BUMN UNTUK INDONESIA

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG

Menavigasi Transformasi untuk Tumbuh Berkelanjutan

Navigating Transformation for Sustainable Growth



Annual Report **2023** Laporan Tahunan

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
DISCLAIMER AND LIMITATION OF RESPONSIBILITY

Laporan Tahunan PT Jaminan Kredit Indonesia tahun buku 2023 ini diterbitkan sesuai Peraturan Menteri BUMN PER- 2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis di mana Jamkrindo menjalankan kegiatan usaha. Jamkrindo tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Jamkrindo" dan "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai PT Jaminan Kredit Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Jaminan Kredit Indonesia secara umum.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah. Laporan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi Jamkrindo yaitu www.jamkrindo.co.id.

PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK

Laporan Tahunan ini juga menyajikan tabel dan grafik yang memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah Bahasa Indonesia. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai konteks.

The Annual Report of PT Jaminan Kredit Indonesia for the 2023 fiscal year was published in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER- 2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

This Annual Report contains statements of financial condition, results of operations, policies, projections, plans, strategies and objectives of the Company which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws and regulations, except for historical matters. These statements have prospects of risk, uncertainty, and may result in actual developments that are materially different from those reported.

Prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current and future conditions as well as the business environment in which Jamkrindo carries out its business activities. Jamkrindo does not guarantee that documents whose validity has been confirmed will bring certain results as expected.

This annual report contains the words "Jamkrindo" and"Company" which are defined as PT Jaminan Kredit Indonesia, which carries out business activities in the field of credit guarantees. Sometimes, the word "We" is used on the basis of convenience to refer to PT Jaminan Kredit Indonesia in general.

The mention of the currency unit. "Rupiah", "Rp" or "IDR" refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah. This report is presented in two languages, namely Indonesian and English, using an easy-to-read font type and size and good-quality printing. This Annual Report can be viewed and downloaded on Jamkrindo's official website, namely www.jamkrindo.co.id.

NOTICE ON TABLE AND GRAPH

This Annual Report also presents tables and graphs that present numerical data with writing standards following Indonesian language rules. Numerical presentation in the text uses standard Indonesian and English rules according to the context.

PENJELASAN TEMA
THEME EXPLANATION



Menavigasi Transformasi untuk Tumbuh Berkelanjutan

Navigating Transformation for Sustainable Growth

Jamkrindo senantiasa melakukan inovasi dan transformasi untuk terus meraih pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai transformasi terus dilakukan baik dari sisi transformasi pada struktur organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), sistem teknologi, bisnis dan operasional, tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan serta keuangan guna memperkuat kinerja perseroan secara berkelanjutan.

Dalam transformasi bisnis perusahaan menitikberatkan diversifikasi pendapatan antara lain dengan optimalisasi bisnis non penugasan dan juga pengembangan bisnis model dan bisnis proses. Dalam tata kelola risiko dan kepatuhan dilakukan penguatan *three line of defense* serta *four eyes principles.* Adanya dinamika usaha yang terus berkembang juga melakukan penguatan di bidang teknologi dan sumber daya manusia. Hal ini dengan tujuan agar perusahaan senantiasa menghadirkan layanan penjaminan inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif serta efisien secara berkelanjutan.

Di tahun 2023 beragam layanan penjaminan yang mempermudah UMKMK memperoleh akses pembiayaan kepada lembaga keuangan telah dihadirkan oleh Jamkrindo. Tidak hanya itu, Perusahaan juga mengambil peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKMK serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan tanggung jawab dan sosial (TJSL).

Jamkrindo continues to innovate and transform to achieve sustainable growth. Various transformations continue to be carried out both in terms of transformation in the organizational structure, management of Human Resources (HR), technology systems, business and operations, risk management governance and compliance as well as finance to strengthen the company's performance in a sustainable manner.

In business transformation, the Company focuses on revenue diversification, among others, by optimizing non-assignment businesses as well as developing business models and business processes. In risk governance and compliance, the three lines of defense and four eyes principles are strengthened. The existence of business dynamics that continue to grow also strengthens technology and human resources. This is with the aim that the Company always presents innovative, competitive guarantee services with professional, effective and efficient services on an ongoing basis.

In 2023 a variety of guarantee services that enable MSMEs to gain access to financing from financial institutions have been provided by Jamkrindo. Not only that, the Company also takes an important role in supporting the growth of MSMEs and improving community welfare through various social responsibility activities (TJSL).

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY



INOVASI UNTUK TUMBUH BERKELANJUTAN
INNOVATION FOR SUSTAINABLE GROWTH

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional, Jamkrindo terus melakukan inovasi baik dalam pengembangan produk maupun layanan agar dapat mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang telah terbukti dapat menjadi pilar perekonomian masyarakat Indonesia.

Inovasi yang dilakukan Jamkrindo merupakan wujud dari komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan penjaminan yang terbaik bagi UMKM dan Koperasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan nasional. Langkah tersebut juga merupakan strategi Perusahaan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

In line with the improvement in national economic growth, Jamkrindo continues to innovate, both in product and service development, so that it can support the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives which have been proven to be pillars of the Indonesian economy.

The innovations conducted by Jamkrindo are a manifestation of the Company's commitment to provide the best guarantee services for MSMEs and Cooperatives so that they can make a greater contribution to national development. This step is also the Company's strategy to achieve sustainable business growth.





UMKM MAJU BERSAMA JAMKRINDO
MSMES ADVANCED WITH JAMKRINDO

Pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan berbagai aspek dalam sosial kemasyarakatan dan perekonomian pada umumnya justru melahirkan hikmah tersendiri. Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) justru mampu menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu pilar perekonomian masyarakat Indonesia. Penyerapan tenaga kerja hingga perputaran transaksi yang besar mencerminkan bahwa sektor UMKM mampu tampil lincah di tengah tantangan pandemi COVID-19. Sebagai entitas yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan bagi UMKM dan Koperasi, Jamkrindo tentu memiliki komitmen yang tinggi untuk tumbuh bersama UMKM. Dengan bisnis Penjaminan yang dilakukan, Jamkrindo berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM, khususnya menjadi bagian dari infrastruktur atas penguatan permodalan bagi UMKM.

The COVID-19 pandemic, which devastated various aspects of society and the economy in general, actually generate to a lesson in itself. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) were actually able to demonstrate their ability as one of the pillars of the Indonesian people's economy. The absorption of labor to a large turnover of transactions reflected that the MSME sector was able to appear agile amidst the challenges of the COVID-19 pandemic. As an entity appointed to provide guarantees for MSMEs and Cooperatives, Jamkrindo certainly has a high commitment to grow with MSMEs. With the guarantee business carried out, Jamkrindo contributed to the growth of MSMEs, especially as part of the infrastructure for strengthening capital for MSMEs.

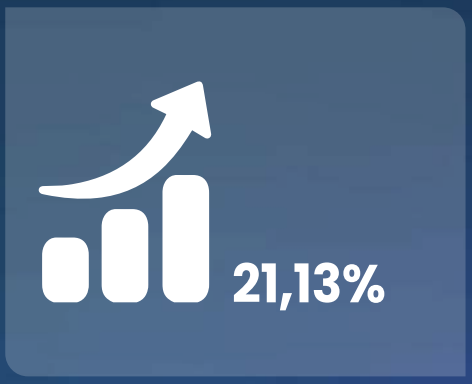
MENGOPTIMALKAN POTENSI DI TENGAH SITUASI YANG TAK PASTI
OPTIMIZING POTENTIALS IN THE MIDST OF UNCERTAINTY

Merosotnya perekonomian akibat pandemi COVID-19 merupakan tantangan utama yang dihadapi Jamkrindo di tahun 2020. Kinerja sektor UMKM juga mengalami penurunan akibat kontraksi ekonomi yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Hal ini juga berdampak pada peningkatan risiko usaha bagi Perusahaan. Menghadapi tantangan tersebut, Jamkrindo berupaya untuk mengelola tantangan yang ada dengan melakukan sejumlah strategi efisiensi dan strategi keuangan yang tepat. Upaya yang dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2020 bukan hanya sekedar untuk bertahan di tengah kondisi yang sulit, tapi juga untuk memastikan kesiapan Perusahaan tatkala pandemi ini telah berakhir. Di tahun 2020, Perusahaan juga memperkuat sinergi dengan anggota IFG (Indonesia Financial Group) untuk memastikan Perusahaan dapat meraih pertumbuhan yang berkelanjutan di masa-masa mendatang.

The decline in the economy due to the COVID-19 pandemic was the main challenge faced by Jamkrindo in 2020. The performance of the MSME sector also experienced a decline due to the economic contraction that occurred throughout 2020. This also had an impact on increasing business risks for the Company. Facing these challenges, Jamkrindo sought to manage existing challenges by implementing a number of efficiency strategies and appropriate financial strategies. The efforts made by the Company throughout 2020 were not only aimed to survive amidst difficult conditions, but also to ensure the Company's readiness when the pandemic is over. In 2020, the Company also strengthened synergies with IFG (Indonesia Financial Group) members to ensure that the Company can achieve sustainable growth in the future.

PENCAPAIAN PENTING 2023
IMPORTANT ACHIEVEMENTS IN 2023

Volume Penjaminan
Guarantee Volume



Rp378,37 **triliun** | trillion

Volume Penjaminan Jamkrindo tahun 2023 tercatat sebesar Rp378,37 triliun, meningkat 21,13% dari tahun sebelumnya sebesar Rp312,36 triliun.

Jamkrindo's guarantee volume in 2023 was recorded at IDR378.37 trillion, an increase of 21.13% from the previous year of IDR312.36 trillion.

Pendapatan Penjaminan
Guarantee Income



Rp6,35 **triliun** | trillion

Pendapatan Penjaminan Jamkrindo tahun 2023 tercatat sebesar Rp6,35 triliun, meningkat 20,45% dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,27 triliun.

Jamkrindo's guarantee income in 2023 was recorded at IDR6.35 trillion, an increase of 20.45% from the previous year of IDR5.27 trillion.

Laba Bersih
Net Profit

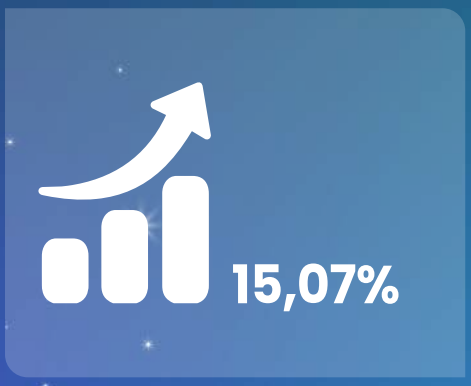


Rp1,44 **triliun** | trillion

Tahun 2023, Jamkrindo meraih laba bersih sebesar Rp1,44 triliun, meningkat 12,24% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,28 triliun.

In 2023, Jamkrindo achieved a net profit of IDR1.44 trillion, an increase of 12.24% from the previous year of IDR1.28 trillion.

Aset
Asset

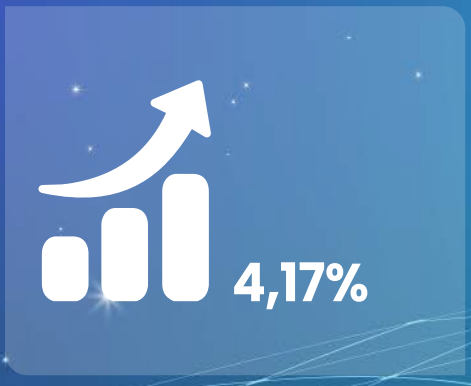


Rp32,23 **triliun** | trillion

Total aset Jamkrindo tahun 2023 mencapai Rp32,23 triliun, meningkat 15,07% dari tahun sebelumnya sebesar Rp28,01 triliun.

Jamkrindo's total assets in 2023 reached IDR32.23 trillion, an increase of 15.07% from the previous year of IDR28.01 trillion.

Ekuitas
Equity



Rp13,35 **triliun** | trillion

Jumlah Ekuitas Jamkrindo tahun 2023 meningkat 4,17% menjadi Rp13,35 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp12,82 triliun.

Jamkrindo's total equity in 2023 increased by 4.17% to IDR13.35 trillion from the previous year of IDR12.82 trillion.

JEJAK LANGKAH JAMKRINDO
JAMKRINDO MILESTONES

1970–1981

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)
Penjaminan Kredit Program untri TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk.

Cooperative Credit Guarantee Institution (LJKK)
Untri TRI Program Credit Guarantee, Palawija Rice Credit, Fertilizer Procurement Credit.

1981–2000

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)
Penjaminan Kredit Program untuk Koperasi, seperti: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT.

Cooperative Financial Development Public Company (Perum PKK)
Program Credit Guarantee for Cooperatives, such as: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Dairy Cow Credit, Palawija Rice Clove Credit, Fertilizer Procurement Credit, KUT.

2000–2008

Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana)
Penjaminan Kredit dengan *Business Oriented* untuk pengembangan UMKM, pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah.

Public Corporation for Business Development Facility (Perum Sarana)
Business Oriented Credit Guarantee for the development of MSMEs, provision of Profit-Sharing Loans, launch of Sharia Guarantee Products.

2020

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)
Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)
Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes, namely general credit, micro credit, construction credit, guarantees for guarantee bank, distribution guarantees, program guarantees and Surety Bonds and guarantees in the context of SOE synergy.

2020–2023

PT Jaminan Kredit Indonesia

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

PT Jaminan Kredit Indonesia
Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes, namely general credit, micro credit, construction credit, guarantees for guarantee bank, distribution guarantees, program guarantees and Surety Bonds and guarantees in the context of SOE synergy.

2008–2020

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)
Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

General Company Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)
Credit guarantees for MSMEs offered in conventional and sharia schemes, namely general credit, micro credit, construction credit, guarantees for guarantee bank, distribution guarantees, program guarantees and Surety Bonds and guarantees in the context of SOE synergy.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

2	SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMER AND LIMITATION OF RESPONSIBILITY
3	PENJELASAN TEMA THEME EXPLANATION
4	KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY
6	PENCAPAIAN PENTING 2023 IMPORTANT ACHIEVEMENTS IN 2023
8	JEJAK LANGKAH JAMKRINDO JAMKRINDO MILESTONES
10	DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS
01	**IKHTISAR KINERJA** PERFORMANCE HIGHLIGHT
14	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING HIGHLIGHT OF IMPORTANT FINANCIAL DATA
18	IKHTISAR BISNIS DAN ORGANISASI BUSINESS AND ORGANIZATIONAL HIGHLIGHTS
20	IKHTISAR SAHAM SHARE OVERVIEW
21	INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PENDANAAN LAINNYA INFORMATION ABOUT BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS, AND OTHER CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY FUNDING INFORMATION
22	KILAS PERISTIWA 2023 2023 EVENTS HIGHLIGHTS
02	**LAPORAN MANAJEMEN** MANAGEMENT REPORT
29	LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT
45	LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTOR'S REPORT
56	PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT STATEMENT OF RESPONSIBILITY
03	**PROFIL PERUSAHAAN** COMPANY PROFILE
60	INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY
62	RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF THE COMPANY
66	BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA LINE OF BUSINESS AND PRODUCTS AND SERVICES
71	KOMPETENSI INTI CORE COMPETENCY
72	VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE
74	MAKNA LOGO MEANING OF LOGO
76	STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE
78	PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE
93	PROFIL DIREKSI PROFILES OF DIRECTORS
112	PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF PROFILES OF EXECUTIVE OFFICERS
124	DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND HUMAN RESOURCES COMPETENCY DEVELOPMENT
134	KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM COMPOSITION OF SHAREHOLDERS
138	STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA GROUP AND BUSINESS GROUPS STRUCTURE
139	DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI/JOINT VENTURE (JV)/SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATE ENTITIES/JOINT VENTURE ENTITIES (JV)/SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)
141	KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM DAN PENERBITAN EFEK LAINNYA CHRONOLOGICAL SHARE ISSUANCE AND LISTING OF OTHER SECURITIES
142	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS
143	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATIONS
145	KEANGGOTAAN ASOSIASI ASSOCIATION MEMBERSHIP
146	DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK DAN KANTOR CABANG/ KANTOR PERWAKILAN ADDRESS LIST OF SUBSIDIARIES AND BRANCH OFFICES/ REPRESENTATIVE OFFICES
150	INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE
04	**ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN** MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
154	TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI ECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW
170	KINERJA ENTITAS ANAK, PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH PERFORMANCE OF SUBSIDIARY, PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH
173	ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECTS
175	TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW
188	LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT (LOSS) AND COMPREHENSIVE INCOME

195 LAPORAN ARUS KAS
CASH FLOW STATEMENT

199 TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
RECEIVABLE COLLECTIBILITY LEVEL

200 STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

203 PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2023
TARGET ACHIEVEMENT IN 2023

206 PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI KINERJAPERUSAHAAN TAHUN 2024
BUSINESS PROSPECTS AND COMPANY PERFORMANCE PROJECTIONS IN 2024

209 KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA
DIVIDEND POLICY AND ITS DISTRIBUTION

210 PERPAJAKAN: KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
TAXATION: CONTRIBUTION TO THE STATE

211 INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

217 PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERDAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN
CHANGES IN REGULATIONS THAT IMPACT THE COMPANY

218 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

218 TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
COMPANY HEALTH LEVEL

219 INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

221 RENCANA JANGKA PANJANG
LONG-TERM PLAN

05 TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

224 Prinsip Umum
GENERAL PRINCIPLES

227 PRINSIP TATA KELOLA DAN KOMITMEN PENERAPANNYA OLEH JAMKRINDO
GOVERNANCE PRINCIPLES AND COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION BY JAMKRINDO

241 PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

252 ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

258 RENCANA PENGEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2024
CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION DEVELOPMENT PLAN FOR 2024

259 PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

310 TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
INFORMATION TRANSPARENCY ABOUT THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

336 ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

337 SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

340 KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

350 KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

357 KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITEE

364 KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

373 ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

396 FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

402 AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL AUDIT/INTERNAL AUDIT UNIT

420 MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

431 AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

459 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

468 KODE ETIK
CODE OF ETHICS

478 KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA
PERFORMANCE-BASED LONG-TERM COMPENSATION

480 KOMITMEN TERHADAP ANTI KORUPSI
COMMITMENT TO ANTI-CORRUPTION

480 KEBIJAKAN TERKAIT INSIDER TRADING
POLICIES RELATED TO INSIDER TRADING

480 WHISTLEBLOWING SYSTEM

484 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
REPORT OF ASSETS OF STATE ADMINISTRATORS

486 TRANSPARANSI PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE
TRANSPARENCY OF BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

490 TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
GOVERNANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

494 STRUKTUR ORGANISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

07 LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT


Jamkrindo
A member of IFG

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG



1

Ikhtisar Kinerja
Performance Highlight

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
HIGHLIGHT OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

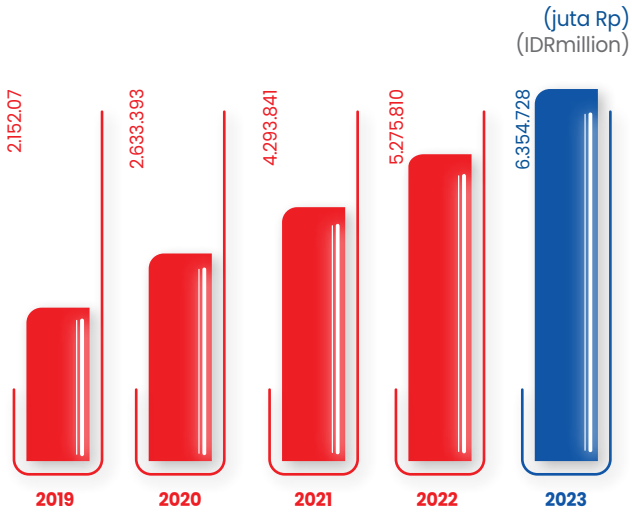
Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

dalam jutaan Rupiah
In IDRmillion

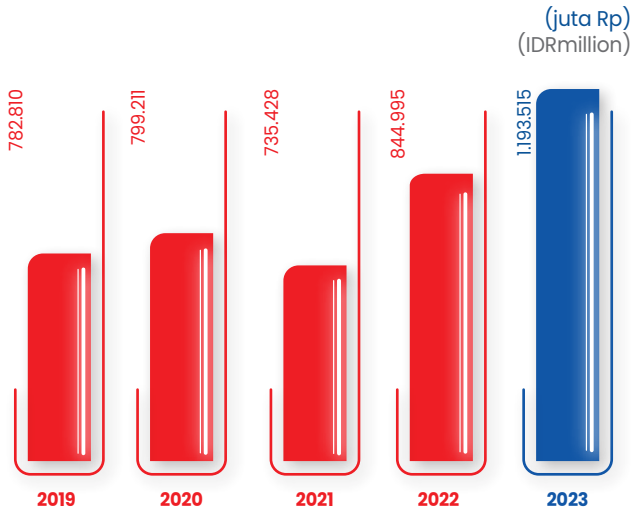
Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Penjaminan – bersih Guarantee Income – Net	**6.354.728**	5.275.810	4.293.841	2.633.393	2.152.072
Beban Penjaminan – bersih Guarantee Expenses – Net	**3.577.322**	3.309.233	2.737.761	1.830.400	1.737.959
Pendapatan Penjaminan – bersih Guarantee Income – Net	**2.777.396**	1.966.577	1.556.080	802.993	414.113
Komisi – bersih Commissions – Net	**61.313**	9.279	6.791	(27.195)	(48.138)
Pendapatan Investasi – bersih Investment Income – Net	**1.193.515**	844.995	735.428	799.211	782.810
Beban Usaha Operating Expenses	**(2.255.338)**	(1.206.253)	(977.748)	(903.670)	(991.759)
Pendapatan Lain-lain Bersih Other Income – Net	**15.099**	61.671	16.820	51.130	24.612
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	**1.638.962**	1.580.617	1.224.193	604.162	42.491
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefits/(Expenses)	**(202.113)**	(300.460)	(158.185)	(148.029)	156.420
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**1.436.849**	1.280.157	1.066.008	456.133	198.911
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	**57.517**	(152.675)	(87.826)	89.480	102.334
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit for the Year	**1.494.366**	1.127.482	978.182	545.613	301.245
LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA **PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO**					
Pemilik Entitas Induk Owner of the parent entity	**1.437.013**	1.279.835	1.065.822	456.312	198.913
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	**(164)**	322	186	1	(2)
Jumlah Total Total	**1.436.849**	**1.280.157**	**1.066.008**	**456.313**	**198.911**
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO					
Pemilik Entitas Induk Owner of the parent entity	**1.494.520**	1.127.174	977.992	545.612	301.247
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	**(154)**	308	190	1	(2)
Jumlah Total Total	**1.494.366**	1.127.482	978.182	545.613	301.245

*) Disajikan Kembali
*) Restatement

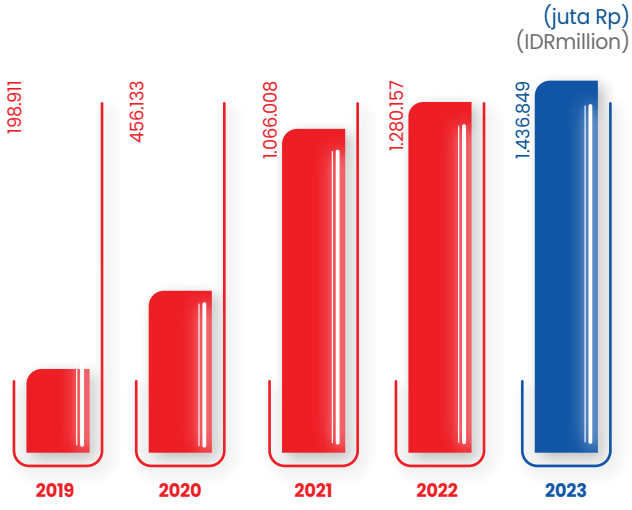
Pendapatan Penjaminan
Guarantee Income



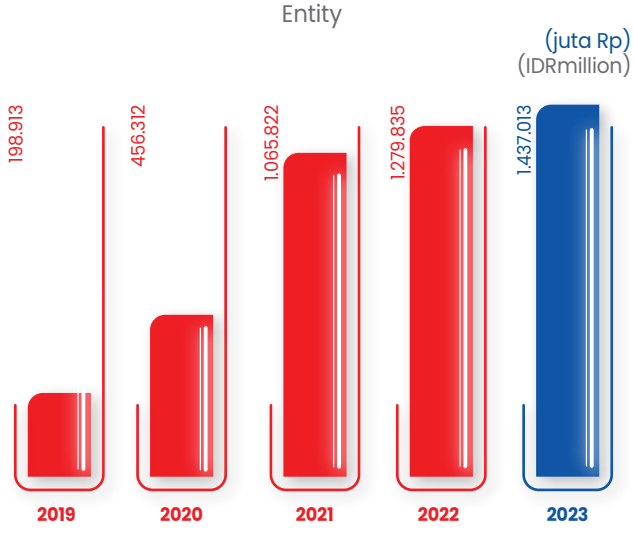
Pendapatan Investasi Bersih
Investment Income - Net



Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year



Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit of the Year Attributable to Owner of the Parent Entity



Posisi Keuangan Konsolidasian

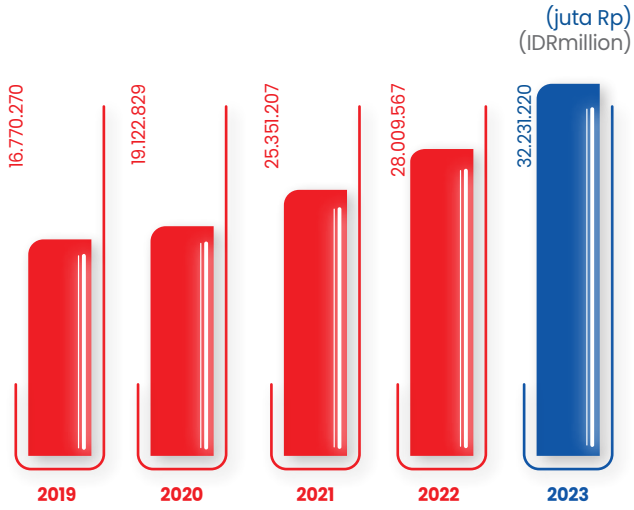
Consolidated Statement of Financial Position

dalam jutaan Rupiah
In IDRmillion

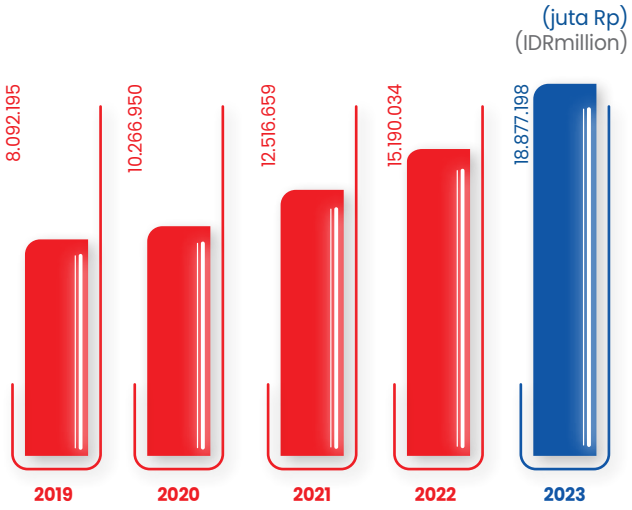
Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset Total Assets	**32.231.220**	28.009.567	25.351.207	19.122.829	16.770.270
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**18.877.198**	15.190.034	12.516.659	10.266.950	8.092.195
Jumlah Ekuitas Total Equity	**13.354.022**	12.819.533	12.834.548	8.855.879	8.678.075

*) Disajikan Kembali
*) Restatement

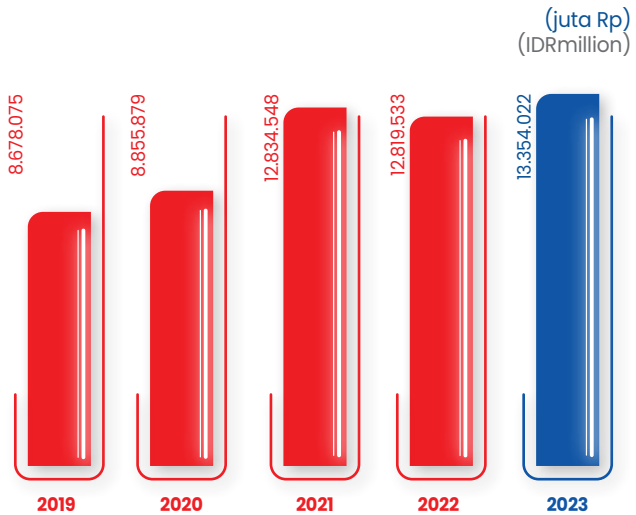
Jumlah Aset
Total Assets



Jumlah Liabilitas
Total Liabilities



Jumlah Ekuitas
Total Equity



Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statement of Cash Flows

dalam jutaan Rupiah
In IDRmillion

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flow from Operating Activities	**4.237.557**	2.185.486	1.664.670	528.040	9.666
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flow from Investment Activities	**(3.625.035)**	(2224.011)	(4.590.357)	(115.549)	(116.668)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flow from Funding Activities	**(1.005.570)**	(1,141,466)	3.000.000	(400.000)	(39.754)
Kenaikan/Penurunan (Bersih) Kas dan Setara Kas (Net) Increase/Decrease in Cash and Cash Equivalents	**(393.048)**	(1.179.991)	74.313	12.491	(146.756)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	**6.445.968**	7.625.959	101.105	88.614	235.370
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	**6.052.920**	6.445.968	175.418	101.105	88.614

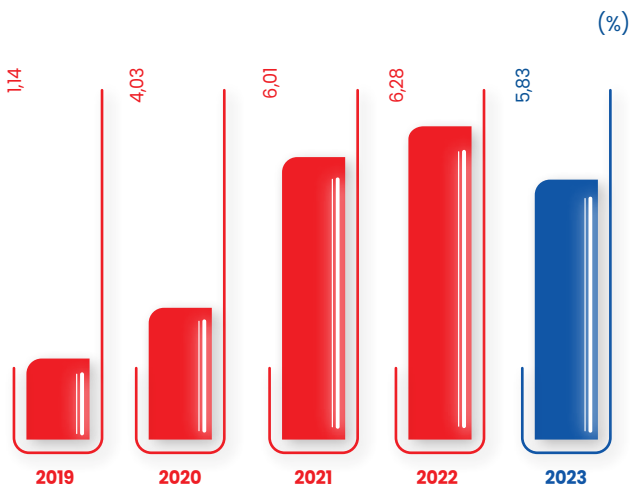
Rasio-rasio Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Ratios

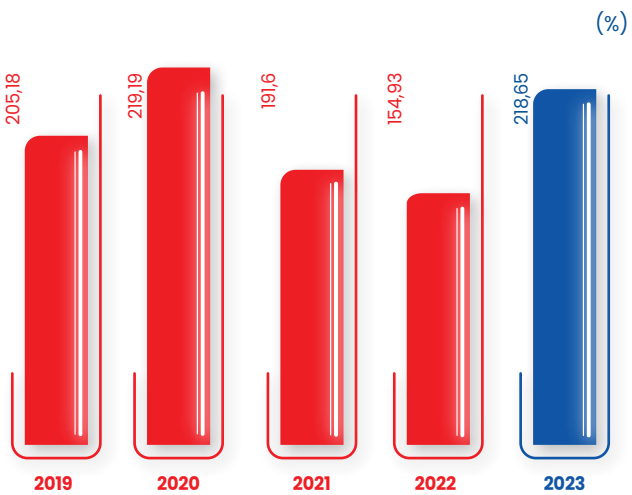
dalam jutaan Rupiah
In IDRmillion

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
RASIO RENTABILITAS PROFITABILITY RATIO					
Net Profit Margin	**22,61**	22,69	24,44	16,14	8,60
Profit Margin on Sales	**21,32**	24,26	24,34	17,60	6,19
Return on Equity (ROE)	**10,98**	9,99	9,83	5,20	2,33
Return on Assets (ROA)	**5,83**	6,28	6,01	4,03	1,14
RASIO LIKUIDITAS LIQUIDITY RATIO					
Current Ratio	**218,65**	154,93	191,60	219,19	205,18
RASIO SOLVABILITAS SOLVENCY RATIO					
Debt to Equity Ratio (DER)	**141,36**	118,49	97,52	115,93	207,47

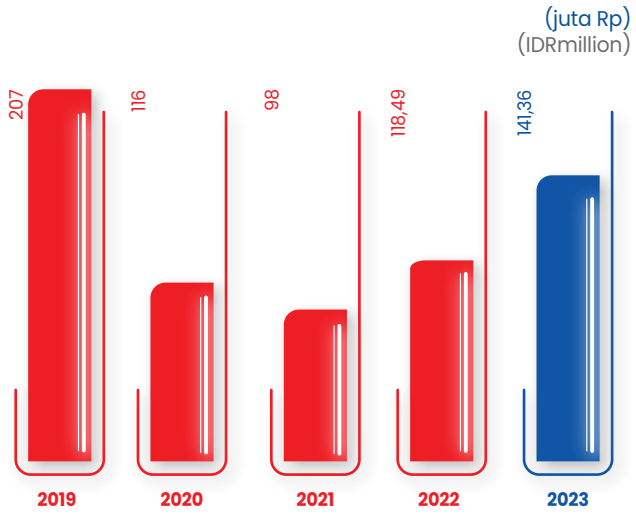
Return on Assets (ROA)



Current Ratio



***Debt to Equity Ratio* (DER)**



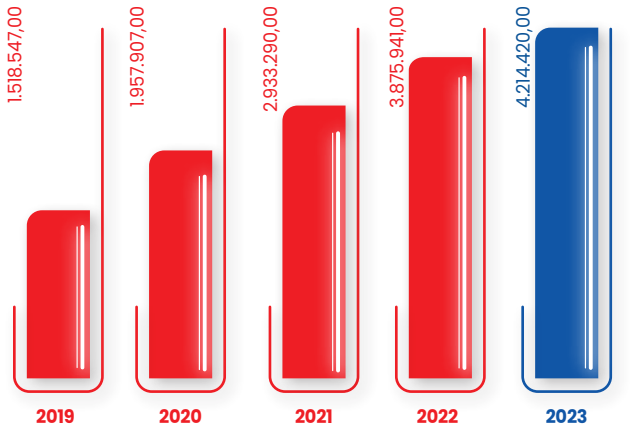
IKHTISAR BISNIS DAN ORGANISASI
BUSINESS AND ORGANIZATIONAL HIGHLIGHTS

dalam jutaan Rupiah
In IDRmillion

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN GUARANTEE FEE INCOME					
Jumlah IJP KUR KUR Guarantee Fee Total	**4.214.420**	3.857.941	3.066.974	1.957.907	1.518.547
Jumlah IJP Non KUR Non-KUR Guarantee Fee Total	**2.524.280**	1.765.847	2.435.010	1.368.909	795.064
PENDAPATAN BUNGA INTEREST INCOME					
Bunga Deposito Deposit Interest	**373.267**	228.502	295.970	382.815	486.672
Bunga Obligasi Bond Interest	**710.447**	551.470	313.589	215.437	181.758
Pendapatan Sukuk Sukuk Income	**49.355**	33.084	16.981	15.704	-
Pendapatan Reksadana Mutual Fund Income	**51.515**	18.616	68.640	180.236	87.419
Dividen Dividend	**16.839**	8.239	3.686	6.067	8.360
Pendapatan *Capital Gain* Capital Gain Income	**6.544**	37.522	53.526	14.078	37.628
Efek Beragun Aset Asset Backed Securities	**298**	1.051	2.140	4.929	4.715

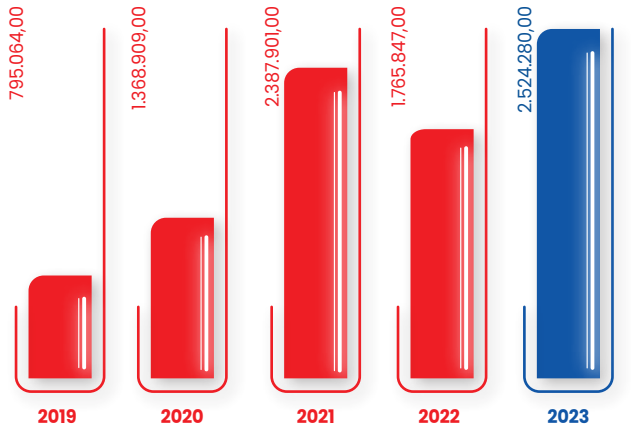
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan - Kredit KUR
KUR Guarantee Fee Income Total

(juta Rp)
(IDRmillion)



Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan - Kredit Non KUR
Non-KUR Guarantee Income Fee Total

(juta Rp)
(IDRmillion)



Ikhtisar Organisasi

Organization Overview

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN COMPANY HEALTH LEVEL					
Nilai Bobot Weight Value	**AA+**	93	87,00	81,95	70,80
Kriteria Criteria	**Sangat Sehat** **Very Healthy**	Sehat "AA" Healthy "AA"	Sehat "AA" Healthy "AA"	Sehat "AA" Healthy "AA"	Sehat "A" Healthy "A"
KONTRAK MANAJEMEN MANAGEMENT CONTRACT					
Capaian *Key Performance Indicator* (KPI) KPI Performance	**101,55**	100,11	103,11	104,99	100,59
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE					
Skor *Assessment* GCG GCG Assessment Score	**96,268**	94,443	96,316	96,810	95,804
Predikat Hasil *Assessment* GCG GCG Assessment Predicate	**"Sangat Baik"** **"Very Good"**	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"	"Sangat Baik" "Very Good"
KETENAGAKERJAAN MANPOWER					
Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees (people)	**1.075**	1.025	1.951	1.743	1.736
Investasi Pendidikan dan Pelatihan (Rp-juta) Education and Training Investment (IDRmillion)	**27.599**	23.381	20.360	19.110	26.791

IKHTISAR SAHAM
SHARE OVERVIEW

Jumlah Saham dan Pemegang Saham
Jumlah keseluruhan saham Jamkrindo sebanyak 10.638.733 lembar saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham Seri A atau sebesar 0,01%, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebanyak 10.638.733 lembar saham Seri B atau 99,99%.

Number of Shares and Shareholders
The total number of Jamkrindo shares is 10,638,733 shares, namely 1 (one) Series A share or 0.01% owned by the Republic of Indonesia and 10,638,733 Series B shares or 99.99% owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Informasi Tentang Perdagangan Saham Dan Kepemilikan Saham Oleh Publik
Hingga 31 Desember 2023 Jamkrindo tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham.

Information on Share Trading and Public Ownership
Until December 31, 2023, Jamkrindo did not trade its shares to the public. Therefore, there is no information related to stock trading.

Informasi Tentang Aksi Korporasi
Di sepanjang tahun 2022 dan 2023, Jamkrindo tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

Information on Corporate Actions
Throughout 2022 and 2023, Jamkrindo did not carry out corporate actions such as stock splits, reverse stocks, bonus shares, or a decrease in the nominal value of shares.

Dividen Saham
Berdasarkan RUPS Tahunan tahun buku 2022 yang diselenggarakan tanggal 27 Juni 2023 Pemegang Saham memutuskan penetapan laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Jamkrindo tahun buku 2022 sebesar Rp1.280 miliar, sebesar Rp959,87 atau 75% dari laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk tersebut dibagikan sebagai dividen tunai.

Share Dividend
Based on the Annual GMS for the fiscal year 2022 held on June 27, 2023, the Shareholders decided to determine the net profit for the year attributable to the owners of the parent entity Jamkrindo for the fiscal year 2022 of IDR1,280 billion, amounting to IDR959.87 or 75% of the profit for the year distributed to the owners of the parent entity as cash dividends.

Pembagian Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2022, dan pembagian Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

Distribution of Share Dividends for the results of the 2022 fiscal year, and distribution of Share Dividends for the results of the 2021 fiscal year are as follows:

Dividen Saham Share Dividend	**2023 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2022)** (for 2022 Fiscal Year Business Results)	**2022 (untuk Hasil Usaha Tahun Buku 2021)** (for 2021 Fiscal Year Business Results)
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk di Tahun Sebelumnya (Rp-juta) Profit for the Year Attributable to Owner of the Parent Entity in the Previous Year (IDR-million)	1.279.835	1.065.822
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp-juta) Cash Dividend Distributed (IDR-million)	959.876	799.366
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	75	75
Tanggal Pengumuman Announcement Date	27 Juni 2023 June 27, 2023	22 Desember 2022 December 22, 2022
Tanggal Pembayaran Payment Date	14 Agustus 2023 August 14, 2023	29 Desember 2023 December 29, 2023

INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN *CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY* PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ABOUT BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS, AND OTHER CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY FUNDING INFORMATION

Hingga 31 Desember 2023, Jamkrindo tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk. Jamkrindo juga tidak menerbitkan surat utang untuk pendanaan lainnya seperti Surat Berjangka Menengah, atau *Medium Term Notes.*

As of December 31, 2023, Jamkrindo did not record bonds, sukuk or convertible bonds, or list other securities. Therefore, there is no information related to the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/yield rates, maturity dates, and bond/sukuk ratings. Jamkrindo also did not issue debt securities for other funding, such as Medium Term Notes.

KILAS PERISTIWA 2023
2023 EVENTS HIGHLIGHTS



11 Februari 2023
February 11, 2023

Prospek Stabil, Jamkrindo Kembali Raih Peringkat idAA+ dari Pefindo
Stable Prospects, Jamkrindo Again Achieves idAA+ Rating from Pefindo



07 Mei 2023
May 07, 2023

Direktur Utama Jamkrindo Hendro Padmono Tutup Usia
President Director of Jamkrindo Hendro Padmono Passes Away



16 Mei 2023
May 16, 2023

Jamkrindo Lakukan Edukasi Anti Perundungan dan Kekerasan Seksual Kepada Ribuan Pelajar SD
Jamkrindo Conducts Anti-Bullying and Sexual Violence Education for Thousands of Elementary School Students



15 Juni 2023
June 15, 2023

Jamkrindo Bagi Ratusan Kacamata Gratis Untuk Pelajar di Indonesia Timur
Jamkrindo Gives Hundreds of Free Glasses to Students in Eastern Indonesia



01 Juli 2023
July 01, 2023

Rayakan HUT ke-53, Jamkrindo Berkomitmen Tingkatkan Kinerja dalam Menjembatani Aksesibilitas Finansial UMKM
Celebrating its 53rd Anniversary, Jamkrindo is Committed to Improving Performance in Bridging Financial Accessibility for MSMEs



05 Juli 2023
July 05, 2023

Dorong Peningkatan Kompetensi UMKM Tanah Air, Jamkrindo Gelar Kelas Bisnis UMKM 2023
Encouraging Increased Competency of Indonesian MSMEs, Jamkrindo Holds 2023 MSME Business Class



31 Juli 2024
July 31, 2024

Perubahan Susunan Komisaris & Direksi PT Jamkrindo
Changes in the Composition of Commissioners & Directors of PT Jamkrindo



12 Agustus 2023
August 12, 2023

Jamkrindo berpartisipasi dalam acara Hari UMKM Nasional EXPO 2023 di Kota Surakarta dengan mempromosikan UMKM Binaan dan sosialisasi layanan penjaminan
Jamkrindo participates in the National MSME Day EXPO 2023 event in Surakarta City by promoting assisted MSMEs and disseminating guarantee services.



15 September 2023
September 15, 2023

Jamkrindo Bawa 21 Produk UMKM ke Festival Pasar Senggol di Turki
Jamkrindo Brings 21 MSME Products to the Bump Market Festival in Turkey



27 September 2023
September 27, 2023

Dorong UMKM Naik Kelas, Jamkrindo Kembali Gelar *Workshop* Pengelolaan Keuangan
Encouraging the Upgrade of MSMEs, Jamkrindo again holds a financial management workshop



02 Oktober 2023
October 02, 2023

Gelar *Workshop* di Palu, Jamkrindo Dorong Literasi Keuangan UMKM di Wilayah Indonesia Timur
Holding a Workshop in Palu, Jamkrindo Encourages Financial Literacy for MSMEs in Eastern Indonesia



1 November 2023
November 1, 2023

Perluas Akses Pembiayaan, Bank BJB dan Jamkrindo Jalin Kerja Sama penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Expanding Access to Financing, Bank Bjb and Jamkrindo Establish Cooperation in guaranteeing People's Business Credit (KUR)



20 November 2023
November 20, 2023

Berkontribusi positif dalam bidang wirausaha berbasis pesantren, Jamkrindo Raih PT Jamkrindo memperoleh Santripreneur *Award* 2023
Contributing positively to Islamic boarding school (pesantren)-based entrepreneurship, Jamkrindo wins Santripreneur Award 2023


TJSL



Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG



2

Laporan Manajemen
Management Report

Krisna Wijaya

Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/
Independent Commissioner



LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kinerja PT Jaminan Kredit Indonesia yang telah melalui berbagai tantangan dalam menjalankan kegiatan usaha dalam industri penjaminan dengan capaian kinerja yang baik. Selama 2023, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tugas pengawasan serta memberikan nasihat terhadap strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan saran atas kebijakan dan tindakan strategis yang diambil oleh Direksi, serta memastikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perusahaan telah mengacu kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris juga senantiasa berupaya untuk memastikan bahwa Perusahaan telah dikelola secara profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris menjaga objektivitas dan independensi. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan, kecuali hal-hal yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Ekonomi global tumbuh melambat di tahun 2023. Konflik geopolitik yang berkepanjangan di Eropa dan Timur Tengah telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap bagi perekonomian global di tahun 2023. Tingkat inflasi global yang masih relatif tinggi membuat sebagian besar Bank Sentral, termasuk The Fed untuk mengambil kebijakan untuk mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi (*higher for longer*).

Kondisi tersebut juga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% di tahun 2023, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,31%.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional di tahun 2023 menjadi tantangan bagi Jamkrindo. Perlambatan ekonomi tersebut menghambat pertumbuhan kinerja sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi target pasar utama Jamkrindo.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Allow us to express our gratitude to God Almighty for the performance of PT Jaminan Kredit Indonesia which has gone through various challenges in carrying out business activities in the guarantee industry with good performance achievements. In 2023, the Board of Commissioners has carried out supervisory functions and duties as well as providing advice on the strategies and policies carried out by the Board of Directors.

In conducting its duties, the Board of Commissioners has supervised and provided advice on policies and strategic actions taken by the Board of Directors, as well as ensuring that in carrying out its operational activities, the Company always refer to the Company's Work Plan and Budget (RKAP), as well as ensuring compliance with all applicable rules and regulations.

The Board of Commissioners also always try to ensure that the Company is managed professionally, in accordance with the principles of Good Corporate Governance and compliance with applicable regulations, as well as paying attention to the interests of shareholders and other stakeholders. In carrying out its role, the Board of Commissioners maintains objectivity and independence. The Board of Commissioners is not involved in making operational decisions for the Company, except for matters regulated and stipulated in the Company's Articles of Association and statutory regulations.

Assessment of Directors' Performance

The global economy grew slowly in 2023. The prolonged geopolitical conflict in Europe and the Middle East has had a huge impact on the global economy in 2023. The global inflation rate was relatively high, forcing most Central Banks, including the Fed, to take policy to maintain high interest rates (higher for longer).

This condition also had an impact on the economy in Indonesia. According to data from the Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy grew 5.05% in 2023, which is lower than the previous year of 5.31%.

The slowing global and national economic growth in 2023 presented a challenge for Jamkrindo. The economic slowdown hindered the growth of the performance of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, which is Jamkrindo's main target market.

Di tengah tantangan tersebut kinerja perusahaan tahun 2023 tetap menunjukkan pertumbuhan yang termasuk memuaskan. Pertama Perusahaan dapat meningkatkan penjaminan bersih sebesar Rp6,35 triliun yang meningkat 20,45% dari tahun 2022. Kedua, laba bersih mencapai Rp1,44 triliun, meningkat 12,24% dari tahun sebelumnya. Ketiga, Perusahaan juga berhasil mencatat pertumbuhan aset sebesar 15,07% menjadi Rp32,23 triliun dan peningkatan jumlah ekuitas sebesar 4,17% menjadi Rp13,35 triliun.

Di tahun 2023, Direksi juga secara umum dapat memenuhi *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdiri dari 5 (lima) perspektif atau indikator, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, serta Pengembangan Talenta dengan pencapaian skor sebesar 101,55.

Kategori Category		**#**	**KPI**	**Formula**
NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA Economic and Social Value for Indonesia	FINANSIAL Financial	1.A	EBITDA	Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Invome from Associated Entities and Joint Ventur
		1.B	ROE Return on Equity (ROE)	Laba Bersih Tahun Berjalan/Average total Equity Net Profit for the Year/Average total Equity
		2	*Gearing Rasio* Total Total of Gearing Ratio	*Outstanding* Penjaminan/Ekuitas Outstanding Guarantee/Equity
	OPERASIONAL Operational	3	Penyelesaian Audit Laporan Keuangan secara tepat waktu sesuai ketentuan Timely completion of Financial Statement Audits in accordance with regulations	Penyelesaian audit laporan keuangan tahun 2022 paling lambat pada 31 Maret 2023, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Completion of the audit of the 2022 financial statements no later than March 31, 2023, with an unqualified opinion (WTP)
		4	*Recovery Rate Subrogation*	Pendapatan Subrogasi/Beban Klaim Disetujui Konsolidasi Subrogation Income/Consolidated Approved Claims Expense
		5.A	*Collection Rate Premi*/IJP	Outstanding piutang IJP dengan jangka waktu ≤ 2 bulan/Total Piutang IIJP Outstanding Guarantee Fee Income (IJP) receivables with maturity ≤ 2 months/Total IIJP Receivables
		5.B	*Days Sales Outstanding*	*Average aging* dari piutang (DSO = *days sales outstanding*) Average aging of receivables (DSO = days sales outstanding)
		6	Penguatan Manajemen Risiko Strengthening Risk Management	Progres penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pengukuran *Risk Maturity* Index di tahun 2022 Progress on completion of follow-up on recommendations for measuring Risk Maturity Index in 2022
	SOSIAL Social	7	Volume Penjaminan KUR KUR Guarantee Volume	Pemenuhan *market share* 50% dari volume penjaminan KUR yang ditargetkan oleh Pemerintah apda tahun 2023 Market share fulfillment of 50% of KUR guarantee volume targeted by the Government in 2023
INOVASI BISNIS MODEL Business Model Innovation		8.A	Hasil *Underwriting* Konsolidasi Consolidated Underwriting result	Hasil *Underwriting* Konsolidasi (Pendapatan *Underwriting* – Beban *Underwriting*) Consolidated Underwriting Results (Underwriting Income - Underwriting Expenses)
		8.B	Hasil *Underwriting* Non Program Non-program underwriting result	Hasi *Underwriting* Non Program Induk (Non KUR Non PEN) Non Parent Program Underwriting Results (Non KUR Non PEN)
		9	*Combiner Rasio* (COR)	*Loss Ratio + Expense Ratio*

Amidst these challenges, the Company's performance in 2023 showed quite satisfactory. First, the company can improve in net guarantees of IDR6.35 trillion, an increase of 20.45% from 2022. Second, achieving a net profit of IDR1.44 trillion, an increase of 12.24% from the previous year. Third, the Company also managed to record asset growth of 15.07% to IDR32.23 trillion and an increase in total equity of 4.17% to IDR13.35 trillion.

In 2023, the Board of Directors was also generally able to fulfill the Key Performance Indicator (KPI) which consists of 5 (five) perspectives or indicators, namely Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technological Leadership, Increased Investment, and Talent Development with achievement of a score of 101,55.

	Satuan Unit	**Polaritas** Polarity	**Bobot** Weight	**Target 2023** 2023 Target	**Realisasi** Realization	**Capaian** Achievement	**Nilai** Score
	Rp Miliar IDRBillion	*Maximize*	5	1.906	1.879	98,59%	4,93
	%	*Maximize*	5	10,39%	10,98%	10,98%	5,28
	Kali Time	*Minimize*	5	22,41	24,49	91,52%	4,58
	Waktu Time	*Minimize*	6	31 Maret 2023 March 31, 2023	6 April 2023 April 6, 2023	98,36%	5,90
	%	*Maximize*	5	29,99%	17,78%	59,30%	2,97
	%	*Maximize*	5	13,34%	18,88%	141,53%	5,50
	Hari Days	*Maximize*	5	200	139,66	143,00%	5,50
	%	*Maximize*	5	100%	100,00%	100,00%	5,00
	%	*Maximize*	5	100%	52,43%	104,85%	5,24
	Rp Miliar IDRBillion	*Maximize*	5	2.314	2.777	120,03%	5,50
	Rp Miliar IDRBillion	*Maximize*	4	287	2.494	868,99%	4,40
	%	*Maximize*	5	77,72%	112%	69,57%	3,48

Kategori Category	#	KPI	Formula
KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI Technology Leadership	10	Implementasi sistem konsolidasi laporan keuangan terintegrasi dan MIS terintegrasi (*front end* dan *back end*) Implementation of integrated financial report consolidation system and integrated MIS (front end and back end)	Progres pemenuhan integrasi laporan keuangan dan dari *business driver* indikator yang telah ditetapkan* (Laporan Keuangan, *Claim* per LOB, *Gearting Ratio*) Progress in fulfilling the integration of financial reports and business driver indicators that have been set* (Financial Report, Claim per LOB, Gearting Ratio)
	11	Pengembangan *channel* pemasaran digital Development of digital marketing channels	IJP dari *channel* pemasaran digital Guarantee Fee Income (IJP) from digital marketing channels
PENINGKATAN INVESTASI Increasing Investment	12.A	*Yield on Investment* (YoI)	Pendapatan investasi/rata-rata total investasi Investment income/average total investment
	12.B	Pertumbuhan AUM Konsolidasi Consolidated AUM Growth	(Nilai aset investasi akhir tahun 2023/nilai aset investasi akhir tahun 2022) -1 (Investment asset value end of 2023/investment asset value end of 2022) -1
	13	Pencapaian KPI PMN PMN KPI Achievement	Realisasi Indikator KPI PMN (Pelaporan dan efektivitas penggunaan PMN (*Gearing Ratio*)) Realization of PMN KPI Indicators (Reporting and effective use of PMN (Gearing Ratio))
PENGEMBANGAN TALENTA Talent Development	14.A	Perempuan dan Milenial (<42 tahun) dalam *Top Talent* Women and Millennials (<42 years old) in Top Talent	1. 1. (Jumlah *Top *Talent Milenial*/Jumlah *Top Talent*) X 100% (Target 20%) 2. 2. (Jumlah *Top *Talent Milenial*/Jumlah *Top Talent*) X 100% (Target 15%) 1. (Number of *Top Millennial Talents/Number of Top Talents) X 100% (Target 20%) 2. (Number of *Millennial Top Talent/Number of Top Talent) X 100% (Target 15%)
	14.B	Implementasi *talent mobility* Implementation of talent mobility	*Presentase top talent* (BOD-1 atau setara) yang mengalami *talent mobility* anggota *holding* Percentage of top talent (BOD-1 or equivalent) who experience talent mobility of holding members
	15	Rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko Risk management organ qualification fulfillment ratio	Rasio Pemenuhan kualifikasi organ pengelolaan risiko = Jumlah personil organ pengelola risiko yang memenuhi kualifikasi/Jumlah personil seluruh organ pengelola risiko Risk management organ qualification fulfillment ratio = Number of qualified risk management organ personnel/Number of all risk management organ personnel
TOTAL			

	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target 2023 2023 Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Nilai Score
	%	*Maximize*	5	100%	133,33%	133,33%	5,50
	Rp Miliar IDRBillion	*Maximize*	5	1,3	1,6	123,26%	5,50
	%	*Maximize*	4	5,13%%	5,61%	109,35%	4,37
	%	*Maximize*	4	4,90%	23,05%	470,32%	4,40
	%	*Maximize*	7	100%	100,00%	100,00%	7,00
	%	*Maximize*	5	100%	1. 33,33% 2. 16,67%	138,89%	5,50
	%	*Maximize*	4	10%	15,00%	150,00%	4,40
	%	*Maximize*	6	10%	73,91%	739,13%	6,00
			100				

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh insan Jamkrindo atas capaian kinerja keuangan Perusahaan yang mengalami pertumbuhan dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi, Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan sepanjang tahun 2023. Secara garis besar tugas Dewan Komisaris sebagai Berikut:

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang, tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi, termasuk dalam implementasi strategi Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disampaikan Direksi dan mendapat persetujuan dari Pemegang Saham sebagai acuan pengawasan.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan terus melakukan ekspansi pasar dengan fokus pada *core competence* Perusahaan sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas. Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung upaya-upaya yang dijalankan Direksi namun terus mengingatkan Direksi untuk terus meningkatkan upaya mitigasi terhadap setiap potensi risiko dari ekspansi usaha tersebut.

Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan perhatian yang besar terhadap upaya efisiensi yang dijalankan Perusahaan, termasuk dalam pengelolaan *cost of fund* dan pengelolaan investasi dengan tetap menekankan pada penilaian risiko yang komprehensif. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian.

Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus pada pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini mencakup transparansi dalam pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap standar tata kelola yang baik, dan memastikan bahwa keputusan bisnis diambil dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Mekanisme dan Frekuensi Pengawasan

Dewan Komisaris telah berupaya melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap Direksi melalui beberapa mekanisme, antara lain dengan memeriksa laporan dan melakukan pengawasan tambahan melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

For this achievement, the Board of Commissioners would like to expressed its appreciation to the Directors and all Jamkrindo employees, which experienced growth from the same period in the previous year.

Implementation of the Duties of the Board of Commissioners

As the organ tasked with supervising the management of the Company carried out by the Board of Directors, the Board of Commissioners has carried out various supervisory activities throughout 2023. The duties of the Board of Commissioners are outlined below.

Supervision of the Implementation of Company Strategy

In accordance with the mandate of the Law, the main task of the Board of Commissioners is to supervise the management of the Company carried out by the Board of Directors, including the implementation of the Company's strategy. In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners adheres to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) which has been submitted by the Board of Directors and received approval from Shareholders as a reference for supervision.

Throughout 2023, the Company continued to expand its market by focusing on the Company's core competencies as a step to maintain and increase profitability. The Board of Commissioners fully supported the efforts carried out by the Board of Directors but continues to remind the Board of Directors to continue to increase mitigation for any potential risks from business expansion.

In addition, the Board of Commissioners paid great attention to efficiency efforts carried out by the Company, including in managing the cost of funds and investment management while continuing to emphasize comprehensive risk assessment. This is very important to do in the midst of conditions which are full of uncertainty.

The Board of Commissioners paid special attention to risk management and good corporate governance. This includes transparency in financial reporting, compliance with good governance standards, and ensuring that business decisions are taken taking into account the interests of all stakeholders.

Monitoring Mechanism and Frequency

The Board of Commissioners have carried out strict supervision of the Board of Directors through several mechanisms, including examining reports and carrying out additional supervision through the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee.

Dewan Komisaris menggunakan mekanisme secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perusahaan. Mekanisme secara langsung dilakukan melalui kunjungan ke tempat-tempat kegiatan Perusahaan. Sedangkan mekanisme secara tidak langsung dilakukan melalui rapat dengan mengundang Direksi. Dewan Komisaris terlibat secara aktif dalam memberikan arahan kepada Direksi melalui beberapa kegiatan utama. Kegiatan tersebut antara lain, rapat internal dan rapat gabungan, sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melakukan 12 kali rapat internal dan 12 kali rapat gabungan Bersama dengan Direksi.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan hak dan wewenang Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.

Realisasi Kinerja Dewan Komisaris

Tahun 2023, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 sebagaimana Risalah RUPS No B.293/EKT/DIRUT/RUPS/I/2023. Adapun realisasi KPI Dewan Komisaris tahun 2023 mencapai 104,17%.

The Board of Commissioners implemented direct and indirect mechanisms to supervise the implementation of the Company's strategy. The direct mechanism was carried out through visits to the Company's activities. Meanwhile, the indirect mechanism is carried out through meetings by inviting the Board of Directors. The Board of Commissioners is actively involved in providing guidance to the Board of Directors through several main activities. These activities include, among others, internal meetings and joint meetings, as a form of coordination in order to discuss the Board of Directors' periodic reports and discuss business conditions and prospects as well as national policies that have an impact on the Company's performance. BoC also provided responses, notes and advice as outlined in the Minutes of Meeting.

Throughout 2023, the Board of Commissioners held 12 internal meetings and 12 joint meetings with the Board of Directors.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners adhered to applicable laws and regulations while still considering the rights and authority of the Board of Directors in managing the Company.

Realization of the Performance of the Board of Commissioners

In 2023, the Board of Commissioners had carried out its duties and responsibilities in accordance with the Key Performance Indicators (KPI) which have been ratified through the General Meeting of Shareholders regarding Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 as stated in the Minutes of GMS No. B.293/EKT/DIRUT/RUPS /I/2023. The realization of the Board of Commissioners' KPI in 2023 is 104.17%.

No	Program Kerja Work Program	KPI 2023			Realisasi 2023 2023 Realization		
		Jumlah Total	Satuan Unit	Bobot Weight	Jumlah Total	Satuan Unit	Bobot Weight
I	**ASPEK PENGAWASAN DAN PENGARAHAN** ASPECTS OF SUPERVISION AND GUIDANCE			**60**			**60**
1	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal Meeting	12	Rapat Meeting	10,00	13	Rapat Meeting	10,83
2	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2023 General Meeting of Shareholders (GMS) RKAP 2023	1	Rapat Meeting	10,00	1	Rapat Meeting	10,00
3	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kinerja Perusahaan Tahun 2022 (*Audited*) General Meeting of Shareholders (GMS) on the Company Performance in 2022 (Audited)	1	Rapat Meeting	10,00	1	Rapat Meeting	10,00
4	Pemberian Saran dan Masukan kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan Provision of Advice and Input to the Board of Directors in the Management of the Company	12	Dokumen Document	10,00	13	Dokumen Document	10,83
5	Evaluasi Terhadap Auditor Eksternal Evaluation of the External Auditor	1	Rapat Meeting	5,00	1	Rapat Meeting	5,00

No	Program Kerja Work Program	KPI 2023			Realisasi 2023 2023 Realization		
		Jumlah Total	Satuan Unit	Bobot Weight	Jumlah Total	Satuan Unit	Bobot Weight
6	Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal Evaluation of the Internal Audit Unit	1	Rapat Meeting	5,00	1	Rapat Meeting	5,00
7	Pengawasan Terhadap Anak Perusahaan Supervision of Subsidiaries	1	Rapat Meeting	10,00	1	Rapat Meeting	10,00
	Sub Jumlah 1 Subtotal 1			**60,00**			**61,67**
II	**ASPEK PELAPORAN** REPORTING ASPECTS			**30**			**30**
1	Memberikan Tanggapan/Pendapat terhadap Hal-Hal yang Memerlukan Persetujuan dan/atau Rekomendasi Dewan Komisaris sesuai Ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Peraturan Lainnya Provide Responses/Opinions on Matters Requiring Approval and/or Recommendations from the Board of Commissioners In Accordance with Provisions in the Articles of Association or Other Regulations	4	Dokumen Document	10,00	4	Dokumen Document	10,00
2	Menyusun Laporan Berkala Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (Triwulanan) Tahun 2023 Prepare the 2023 Board of Commissioners Oversight Duty Report (Quarterly).	4	Dokumen Document	5,00	4	Dokumen Document	5,00
3	Menyusun Tanggapan atas Laporan Berkala Hasil Evaluasi atas Kinerja Perusahaan Tahun 2023 (Triwulanan) Prepare Responses to Periodic Reports of Evaluation Results on Company Performance in 2022 (Quarterly)	4	Dokumen Document	5,00	4	Dokumen Document	5,00
4	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024 Prepare the Board of Commissioners Work Plan and Budget for 2024	1	Dokumen Document	5,00	1	Dokumen Document	5,00
5	Menyusun dan Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2024 Compile and Propose Performance Achievement Indicators for the Board of Commissioners in 2024	1	Dokumen Document	5,00	1	Dokumen Document	5,00
	Sub Jumlah II Subtotal II			**30,00**			**30,00**
III	**ASPEK DINAMIS** DYNAMIC ASPECTS			**10**			**10**
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan/ atau Cabang Monitoring and Evaluation of the Performance of Regional Offices and/or Branches	6	Kegiatan Activities	5,00	6	Kegiatan Activities	5,00
	Seminar/*Workshop* dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris Seminars/Workshops in the Context of Increasing the Competence of Members of the Board of Commissioners and Board of Commissioners' Organs	4	Kegiatan Activities	5,00	6	Kegiatan Activities	7,50
	Sub Jumlah III Subtotal II			**10,00**			**12,50**
	Jumlah Total			**100,00**			**104,17**

Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Direksi telah menyusun RKAP 2024 berdasarkan sejumlah asumsi kondisi internal maupun eksternal Perusahaan. Dewan Komisaris memandang target yang ditetapkan Direksi pada RKAP 2024 merupakan target yang cukup menantang namun sangat realistis untuk diwujudkan. Terlebih Direksi juga telah menjabarkan strategi pengembangan usaha yang akan dijalankan di tahun 2024. Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung rencana strategis Perusahaan di tahun 2024.

Namun demikian, Dewan Komisaris tetap mengingatkan Direksi untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap aspek pengembangan SDM dan Teknologi Informasi. Dewan Komisaris menilai, keberadaan SDM yang andal akan menjadi kunci keberhasilan Perusahaan untuk mewujudkan target-targetnya, termasuk target jangka panjang. Demikian juga halnya dengan Teknologi Informasi yang semakin dibutuhkan, baik sebagai supporting bagi operasional Perusahaan juga sebagai potensi usaha baru bagi Perusahaan.

Selain itu, Dewan Komisaris juga menyarankan Direksi untuk mengoptimalkan sinergi dengan anggota Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan lainnya, baik dalam pengembangan usaha maupun upaya untuk menciptakan operation excellence yang ditunjang dengan efisiensi yang baik.

Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan petunjuk Pemegang Saham, Dewan Komisaris melalui komitenya melakukan pengawasan dan peninjauan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam proses bisnis Perusahaan. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Penerapan GCG hingga saat ini telah berjalan dengan baik, didukung dengan kerja sama yang efektif antara organ GCG di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga fungsi dan tanggung jawab masing-masing organ pendukung dapat berjalan sesuai dengan kebijakan GCG Perusahaan.

Terbitnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara menjadi pemicu bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Dewan Komisaris memandang, penerapan GCG yang sudah berjalan dengan baik di Perusahaan harus tetap terus ditingkatkan kualitasnya melalui penguatan organ dan penyesuaian kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil *self assessment* penerapan GCG dengan mengacu pada Keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) – sebelum keputusan tersebut

Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Board of Directors has prepared the 2024 RKAP based on a number of assumptions about the Company's internal and external conditions. The Board of Commissioners views the target set by the Board of Directors in the 2024 RKAP as a target that is quite challenging but very realistic. Moreover, the Board of Directors has also outlined the business development strategy that will be implemented in 2024. The Board of Commissioners fully supports the Company's strategic plan for 2024.

However, the Board of Commissioners continues to remind the Board of Directors to pay more attention to aspects of HR development and Information Technology. The Board of Commissioners assesses that the presence of reliable human resources will be the key to the Company's success in realizing its targets, including long-term targets. Likewise, Information Technology is increasingly needed, both as support for the Company's operations and as a potential new business for the Company.

In addition, the Board of Commissioners also advised the Board of Directors to optimize synergy with other Insurance and Guarantee BUMN Holding members, both in business development and efforts to create operational excellence supported by good efficiency.

The Implementation of Corporate Governance

In accordance with Shareholder instructions, the Board of Commissioners, through its committee, supervised and reviewed compliance with legal regulations and the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Company's business processes. The Board of Commissioners believes that the implementation of GCG had gone well, supported by effective collaboration between GCG organs under the Board of Commissioners and Directors, so that the functions and responsibilities of each supporting organ can run in accordance with the Company's GCG policy.

The issuance of SOEs Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises is a trigger for Companies to continue to improve the quality of GCG implementation as an effort to realize sustainable business growth.

The Board of Commissioners viewed that the quality of the implementation of GCG which has already run well in the Company must continue to be improved through strengthening of the organs and adjusting policies in accordance with statutory regulations. Based on the results of the self-assessment of GCG implementation by referring to the Decree of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance, before

dicabut berdasarkan SK Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 – yang dilakukan oleh Tim *Self Assessment* Jamkrindo pada awal tahun 2023, penerapan GCG di Perusahaan meraih skor 96,268 dengan kualifikasi "Sangat Baik". Namun demikian, dibandingkan hasil *self assessment* tahun sebelumnya, pencapaian tersebut sedikit mengalami penurunan, dimana tahun 2022 Perusahaan meraih skor 96,433 dengan kualifikasi **"Sangat Baik"** pada *assessment* yang dilakukan oleh PT Cita Negeri Amanah.

this decision revoked based on the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number SK-12/S.MBU/08/2023 – carried out by the Jamkrindo's Self-Assessment Team at the beginning of 2023, the implementation of GCG in the Company achieved a score of 96.268 with the qualification **"Very Good"**. However, compared to the results of the previous year's self-assessment, this achievement has decreased slightly, in which in 2022 the Company achieved a score of 96.433 with the qualification "Very Good" in the assessment carried out by PT Cita Negeri Amanah.

Untuk itu, Dewan Komisaris meminta komitmen Direksi untuk terus mendorong upaya untuk mengikatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

For this reason, the Board of Commissioners requests the commitment of the Board of Directors to continue to encourage efforts to improve the quality of GCG implementation within the Company. In addition, the Board of Commissioners also encourages the Board of Directors to improve the quality of the implementation of the Company's risk management and internal control system in accordance with the provisions of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023.

Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur, Perusahaan perlu melakukan penetapan toleransi risiko dan limit risiko yang dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) dan strategi Perusahaan secara keseluruhan. Dewan Komisaris berpandangan bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai.

To effectively control risks, policies and procedures, the Company needs to determine risk tolerance and risk limits by taking into account the level of risk to be taken (risk appetite), risk tolerance and the Company's overall strategy. The Board of Commissioners is of the opinion that the risk management system is adequate.

Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS)

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) di Jamkrindo telah berjalan dengan cukup efektif. Keberadaan sistem ini merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan Perusahaan.

Managing the Whistleblowing System (WBS)

The implementation of the System (WBS) at Jamkrindo has been running quite effectively. The existence of this system is part of the Company's efforts to prevent fraud within the Company.

Di tahun 2023, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, keberadaan WBS menjadi semakin penting karena menjadi bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perusahaan.

In 2023, along with the publication of SOEs Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, the existence of a WBS is becoming increasingly important because it is part of the internal control system in preventing irregular practices and aims to detect early and prevent irregularities or violations and gradually create an open, sincere, honest, and responsible working climate in the Company.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap upaya yang dilakukan Perusahaan untuk memperkuat pelaksanaan WBS melalui penyesuaian aturan, sosialisasi dan juga penyempurnaan infrastruktur.

Throughout 2023, the Board of Commissioners monitored the efforts made by the Company to strengthen WBS implementation through adjusting regulations, outreach and also improving infrastructure.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu 4 (empat) komite yaitu, komite audit, komite pemantau risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite tata kelola terintegrasi.

Performance Assessment of the Board of Commissioners' Committees

To increase the role of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by 4 (four) committees namely, audit committee, risk monitoring committee, nomination and remuneration committee, integrated governance committee.

Setiap tahun Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja dari masing-masing Komite, baik secara individual maupun kolektif kolegial, yang dilakukan secara *self-assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Masing-masing kegiatan/aktivitas Program Kerja dalam lingkup masing-masing Komite dirumuskan kuantitasnya dan diberikan bobot, kemudian dijadikan tolok ukur capaian kinerja Komite secara keseluruhan.

Tahun 2023, Komite Audit telah memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan secara efektif membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit telah mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris dan rapat dengan mengundang Direktorat Keuangan dan Perencanaan Strategis, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) serta Divisi terkait.

Tahun 2023, hasil penilaian kinerja Komite Audit mencapai skor 110,00.

Every year the Board of Commissioners evaluates the performance of each Committee, both individually and collectively collegial, which is carried out through self-assessment using an evaluation method in a system determined by the Board of Commissioners. The quantity of each Work Program activity/ies within the scope of each Committee is formulated and weighted, then used as a benchmark for the performance achievements of the Committee as a whole.

In 2023, the Audit Committee has ensured the implementation of internal control and effectively assisted the Board of Commissioners in supervising the implementation of internal and external audit functions, implementation of corporate governance and compliance with applicable laws and regulations. In carrying out its duties, the Audit Committee has held meetings with the Board of Commissioners and meetings inviting the Directorate of Finance and Strategic Planning, and the Internal Audit Unit (SPI) and related Divisions.

In 2023, the results of the Audit Committee performance assessment reached a score of 110.00.

INDIKATOR INDICATORS	**RUMUSAN** FORMULA	**TARGET 1 TAHUN** TARGET 1 YEAR	**BOBOT** WEIGHT	**REAL**	**SKOR** SCORE
Aspek Pengawasan & Pengarahan: Aspect of Supervision and Guidance:			**60%**		**60**
Menyelenggarakan Rapat Komite Organizing Committee Meetings	Jumlah Rapat Komite Number of Committee Meetings	12 kali 12 times	15%	12 kali 12 times	15
Mengikuti Rapat Dekom Joining the Board of Commissioners Meeting	Jumlah Rapat Dekom Number of BoC Meetings	12 kali 12 times	15%	12 kali 12 times	15
Evaluasi terhadap Auditor Eksternal Evaluation of the External Auditor	Jumlah Rapat/Surat/Laporan Number of Meetings/Letters/ Reports	1 kali 1 times	15%	1 kali 1 times	15
Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal Evaluation of the Internal Control System	Jumlah Rapat/Surat/Laporan Number of Meetings/Letters/ Reports	2 kali 2 times	15%	2 kali 2 times	15
Aspek Pelaporan: Reporting Aspects:			**30%**		**30**
Menyusun Program Kerja Tahunan Develop an Annual Work Program	Jumlah Program Kerja Komite Number of Committee's Work Program	1 kali 1 times	5%	1 kali 1 times	5
Membantu Menyusun Laporan/Pendapat/ Saran kepada Pemilik Modal/Pemegang Saham Assist in Compiling Reports/Opinions/ Suggestions to Capital Owners/ Shareholders	Jumlah Surat Tanggapan Dekom Number of BoC's Response Letters	4 kali 4 times	10%	4 kali 4 times	10
Membantu Dekom Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Assist the Board of Commissioners in Compiling Supervisory Duty Reports	Jumlah Laporan Tugas Pengawasan Number of Supervisory Reports	4 kali 4 times	10%	4 kali 4 times	10

INDIKATOR INDICATORS	RUMUSAN FORMULA	TARGET 1 TAHUN TARGET 1 YEAR	BOBOT WEIGHT	REAL	SKOR SCORE
Membantu Dekom Menyusun Balasan/ Tanggapan Surat Direksi Assisting the Board of Commissioners Prepares Replies/Responses to the Directors' Letters	% Jumlah Surat yang Ditanggapi sesuai Ketentuan Percentage of Number of Letters Responded, In Accordance with the Regulations	100%	5%	100%	5
Aspek Dinamis/Lain-lain: Dynamic/Other Aspects			**10%**		**20**
Mengikuti Kegiatan Kunjungan Dekom Participating in Visiting Activities of the Board of Commissioners/Board of Supervisors	Jumlah Kunjungan yang Diikuti Number of Visits Participated	2 kegiatan 2 activities	5%	4 kegiatan 4 activities	10
Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan Participate in competence and knowledge improvement activities	Jumlah pelatihan/seminar/ workshop/ yang diikuti Number of Workshops/ Training/ Seminars Participated	1 kegiatan 1 activities	5%	2 kegiatan 2 activities	10
Jumlah Bobot Total Weight			**100%**		**110**

Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan atas strategi investasi yang diterapkan Perusahaan dengan pertimbangan risiko yang terukur dan terkontrol dengan baik. Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga telah berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko untuk terus memantau tingkat maturitas risiko Perusahaan.

Tahun 2023, hasil penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko mencapai skor 92,50.

The Risk Monitoring Committee has monitored the investment strategy implemented by the Company with consideration of risks that are measurable and well controlled. In addition, the Risk Monitoring Committee has also coordinated with the Risk Management Division to continue to monitor the Company's risk maturity level.

In 2023, the performance assessment results of the Risk Monitoring Committee reached a score of 92.50.

INDIKATOR INDICATORS	RUMUSAN FORMULA	TARGET 1 TAHUN TARGET 1 YEAR	BOBOT WEIGHT	REAL	SKOR SCORE
Aspek Pengawasan & Pengarahan: Aspect of Supervision and Guidance:			**60%**		**60%**
Menyelenggarakan Rapat Internal Komite Organizing Internal Committee Meetings	Jumlah Rapat Komite Number of Committee Meetings	12 kali 12 times	20%	12 kali 12 times	20%
Mengikuti Rapat Internal dengan Dewan Komisaris Participated in internal meetings with the Board of Commissioners	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Number of BoC Meetings	12 kali 12 times	20%	12 kali 12 times	20%
Mengikuti Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Teknis Joining the Board of Commissioners' Meeting with the Technical Directors	Jumlah Rapat Number of Meetings	12 kali 12 times	20%	12 kali 12 times	20%

INDIKATOR INDICATORS	RUMUSAN FORMULA	TARGET 1 TAHUN TARGET 1 YEAR	BOBOT WEIGHT	REAL	SKOR SCORE
Aspek Pelaporan: REPORTING ASPECTS:			**30%**		**30%**
Menyusun Program Kerja Tahunan Komite (RKA Komite) Prepare the Committee's annual work program (RKA Committee)	Jumlah Program Kerja Komite Number of Committee's Work Program	1 kali 1 time	15%	1 kali 1 time	15%
Menyusun Laporan Triwulanan/Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite. Prepare Quarterly Reports/Annual Reports on the Implementation of the Committee's Duties.	Jumlah Laporan Tugas Pengawasan Number of Supervisory Task Reports	4 kali 4 time	10%	4 kali 4 time	10%
Membantu Dewas Menyusun Balasan/ Tanggapan Surat Direksi. (Laporan Kinerja Investasi Periodik Setiap Bulan) Helping the Board of Directors diganti Assissting the the Board of Commissioners	% Jumlah Surat yang Ditanggapi sesuai Ketentuan Percentage of Number of Letters Responded, In Accordance with the Regulations	100%	5%	100%	5%
Aspek Dinamis/LAIN-LAIN: DYNAMIC/OTHER ASPECTS			**10%**		**10%**
Kunjungan Kerja ke Kantor Cabang/ Perwakilan dalam Rangka Pengumpulan Data dan Evaluasi Kinerja serta Penerapan Manajemen Risiko Working visits to Branch/Representative Offices in Order to Collect Data and Evaluate Performance and Apply Risk Management	Jumlah Kunjungan/Laporan Number of Visits/Reports	2 kali 2 times	5%	1 kegiatan 1 activity	2,50%
Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Pengetahuan Participate in Competence and Knowledge Improvement Activities	Jumlah Pelatihan/Seminar/ *Workshop*/yang Diikuti Number of Training/Seminars/ Workshops/Participated	1 kegiatan 1 activity	5%	0 kegiatan 0 activity	0
Jumlah Bobot Total Weight			**100%**		**92,5%**

Sedangkan Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan review terhadap kebijakan remunerasi Perusahaan dan melakukan kajian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Meanwhile, the Nomination and Remuneration Committee has reviewed the Company's remuneration policy and conducted studies on prospective members of the Board of Commissioners and Directors of the Company and Subsidiaries.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Tahun 2023, komposisi Dewan Komisaris Jamkrindo mengalami perubahan sesuai Keputusan Sirkuler Pemegang Saham melalui Surat Keputusan No. SK-217/MBU/07/2023 dan No. 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang mengangkat Angger P. Yuwono sebagai Komisaris Perusahaan.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Jamkrindo menjadi sebagai berikut:

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In 2023, the composition of Jamkrindo's Board of Commissioners had undergone changes in accordance with the Circular Shareholder Decree through Decree No. SK-217/MBU/07/2023 and No. 16/ KepSir -PS/BPUI/VII/2023 dated July 31, 2023 which appointed Anger P. Yuwono as Company Commissioner.

For that reason, the composition of the Jamkrindo Board of Commissioners is as follows:

Nama Names	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Tenure
Krisna Wijaya	Komisaris Utama /Komisaris Independen President/Independent Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-243/MBU/10/2022 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Decree of the State Minister of SOEs as A Series Shareholder No. SK-243/MBU/10/2022 and BPUI Decree as B Series Shareholder No. 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022 dated October 27, 2022	27 Oktober 2022 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2027 October 27, 2022 until the GMS which will be held in 2027	Ke-1 1st
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 jo. No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2022 jo. No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020	17 Oktober 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 October 17, 2019 until the GMS which will be held in 2024	Ke-1 1st
Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-19/MBU/01/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/2021 tanggal 18 Januari 2021 Decree of the State Minister of SOEs as A Series Shareholder No. SK-19/MBU/01/2021 and BPUI Decree as B Series Shareholder No. 02/SK-DIR/RUPS/AP/BPUI/2021 dated January 18, 2021	18 Januari 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 January 18, 2021 until the GMS which will be held in 2026	Ke-1 1st
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-02/MBU/01/ 2019 tanggal 3 Januari 2019 jo. No. SK-51/ MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 Decree of the Minister of SOEs No. SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019 jo. No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020	3 Januari 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 January 3, 2029 until the GMS which will be held in 2024	Ke-1 1st
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-182/MBU/06/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 tanggal 2 Juni 2021 Decree of the State Minister of SOEs as A Series Shareholder No. SK-182/MBU/06/2021 and BPUI Decree as B Series Shareholder No. 05/SK_DIR/RUPS/AP/BPUI/2021 dated June 2, 2021	2 Juni 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 June 2, 2021 until the GMS which will be held in 2026	Ke-1 1st
Angger P. Yuwono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-217/MBU/07/2023 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 Decree of the State Minister of SOEs as A Series Shareholder No. SK-217/MBU/07/2023 and BPUI Decree as B Series Shareholder No. 16/KepSir/PS/BPUI/VII/2023 dated July 31, 2023	31 Juli 2023 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 July 31, 2023 until the GMS which will be held in 2028	Ke-1 1st

Penutup

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada Direksi, manajemen dan seluruh karyawan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja yang telah dicapai pada Tahun Buku 2023. Dewan Komisaris juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjadi bagian penting dari perjalanan usaha Jamkrindo.

Kepada para pemangku kepentingan lain, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah berjalan selama ini. Ke depannya, Dewan Komisaris sungguh berharap, seluruh jajaran Perusahaan dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Jamkrindo menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Closing

On this occasion, the Board of Commissioners would like to thank and express its appreciation to the Board of Directors, management and all employees. The Board of Commissioners expresses its highest appreciation for the performance achieved in the 2023 Fiscal Year. The Board of Commissioners is also grateful for the trust given by shareholders to be an important part of Jamkrindo's business journey.

To other stakeholders, the Board of Commissioners would like to express its gratitude for the cooperation that we have. In the future, the Board of Commissioners really hopes that all levels of the Company can continue to formulate appropriate strategies and be able to lead Jamkrindo towards better growth.

Jakarta, 25 Juni 2024
Atas Nama Dewan Komisaris
Jakarta, June 25, 2024
On behalf of the Board of Commissioners



Krisna Wijaya
Komisaris Utama /Komisaris Independen
President/Independent Commissioner

Akhmad Purwakajaya

Direktur Utama
President Director



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dapat melewati tahun 2023 yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja yang cukup memuaskan. Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material.

Kondisi Ekonomi, Industri dan Tantangan Perusahaan Tahun 2023

Tantangan ekonomi global belum mereda di tahun 2023. Masih berlanjutnya konflik geopolitik di Eropa dan Timur Tengah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global di tahun 2023. Tekanan inflasi masih cukup tinggi yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, serta fenomena El Nino. Untuk mengendalikan laju inflasi, negara maju menerapkan kebijakan suku bunga tinggi, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR) dipertahankan berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*).

Fenomena *higher for longer* memicu *capital outflow* dari pasar keuangan di *emerging market* dan penguatan nilai tukar dolar amerika serikat terhadap hampir seluruh mata uang lainnya.

Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan *World Economics Outlook* yang diterbitkan pada Januari 2024 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3,1%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,4%.

Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh solid meski juga mengalami tren perlambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2023 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% atau melambat dari 5,31% di 2022. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya disebabkan nilai ekspor yang turun menjadi USD258,82 miliar dari USD291,90 miliar di tahun 2022, sejalan dengan normalisasi harga komoditas di sepanjang 2023. Kendati demikian, neraca perdagangan Indonesia tahun 2023 masih mencatatkan surplus sebesar USD36,93. Capaian tersebut menunjukkan kinerja perdagangan Indonesia yang terjaga di tengah perlambatan ekonomi global.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Allow us to give our praise and gratitude to the presence of God Almighty for His abundance of mercy and grace so that PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) can get through the year 2023 which is full of challenges by posting quite satisfactory performance. We hereby submit the Directors' accountability report for the management of the Company for the fiscal year ending at December 31, 2023, with the financial statement which has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja , Wibisana, Rintis & Partners (PricewaterhouseCoopers) and received an unqualified opinion.

Economic Conditions, Industry and Company Challenges in 2023

Global economic challenges had not subsided in 2023. The continuing geopolitical conflict in Europe and the Middle East had a huge impact on the global economy in 2023. Inflation was still quite high, which was triggered by rising energy and food prices due to escalation of geopolitical conflicts, economic fragmentation and the El Nino phenomenon. To control the rate of inflation, developed countries implemented high interest rate policies, including maintaining the Federal Funds Rate (FFR) at a high level for a longer period of time (higher for longer).

The 'higher for longer' phenomenon triggers capital outflows from financial markets in emerging markets and a strengthening of the United States dollar exchange rate against almost all other currencies.

The International Monetary Fund (IMF), in its World Economics Outlook report published in January 2024, projected global economic growth in 2023 at 3.1%, which was lower than the previous year's growth of 3.4%.

In the midst of slowing global economic conditions, the Indonesian economy could still grow solidly even though it was also experiencing a slowing trend. Based on data from the Statistics Indonesia, in 2023, the Indonesian economy grew 5.05% or experienced a slow-down from 5.31% in 2022. The slowdown in Indonesia's economic growth was mainly due to the export value falling to USD258.82 billion from USD291.90 billion in 2022. This was in line with the normalization of commodity prices throughout 2023. Nevertheless, Indonesia's trade balance in 2023 still recorded a surplus of USD36.93. This achievement shows that Indonesia's trade performance was maintained amidst the global economic slowdown.

Kendati pertumbuhan ekonomi sedikit melambat, namun ekonomi Indonesia relatif stabil di 2023. Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah. Berdasarkan data BPS, inflasi nasional 2023 tercatat sebesar 2,61%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 5,51%. Hal tersebut salah satunya juga karena kebijakan BI yang menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) menjadi 6,00% dari posisi akhir tahun lalu sebesar 5,50% untuk memastikan inflasi inti tetap terjaga. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas pasar keuangan Indonesia dengan menetapkan suku bunga acuan yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga global.

Even though economic growth has slowed slightly, the Indonesian economy will be relatively stable in 2023. This was integral to the success of the efforts made by the government and Bank Indonesia (BI) in maintaining the inflation rate at a low level. Based on BPS data, national inflation in 2023 was recorded at 2.61%, which was much lower than the previous year's of 5.51%. This was also due to BI's policy of increasing the benchmark interest rate or BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) to 6.00% from the position at the end of last year of 5.50% to ensure core inflation is maintained. This was done to maintain the stability of the Indonesian financial market by setting a reference interest rate that is higher than global interest rates.

Sejalan dengan ekonomi yang melambat, industri penjaminan dapat mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri penjaminan meningkat 18,63% dari Rp39,12 triliun di tahun 2022 menjadi Rp46,41 triliun di tahun 2023.

In line with the slowing economy, the guarantee industry can experience quite good growth. Based on data from the Financial Services Authority (OJK), guarantee industry assets increased 18.63% from IDR39.12 trillion in 2022 to IDR46.41 trillion in 2023.

Di tahun 2023, OJK menerbitkan *Roadmap* Lembaga Penjamin 2023-2027. *Roadmap* ini disusun sebagai peta jalan pengembangan Lembaga Penjamin di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 dan diharapkan akan menjadi panduan strategis bagi lembaga penjamin di Indonesia dalam mengembangkan produk dan layanannya, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan investasi dan perluasan bisnis, serta menjaga kesehatan dan tata kelola di masa yang akan datang.

In 2023, OJK published the Guarantee Institution Roadmap 2023-2027. This roadmap has been prepared as a road map for the development of Guarantee Institutions in Indonesia to support economic growth towards a Golden Indonesia 2045 and is expected to become a strategic guide for guarantee institutions in Indonesia in developing their products and services, planning and implementing investment activities and business expansion, as well as maintaining health and governance in the future.

Inisiatif dan Kebijakan Strategis Jamkrindo

Tahun 2023 menjadi tahun yang cukup menantang bagi Jamkrindo. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan meningkatnya persaingan di industri penjaminan merupakan tantangan utama yang dihadapi Perusahaan sepanjang tahun 2023. Untuk itu, Perusahaan telah menetapkan serangkaian strategi dengan mengusung tema "*Retained Growth and Profitability*".

Jamkrindo Strategic Initiatives and Policies

2023 was quite a challenging year for Jamkrindo. Slowing economic growth and increasing competition in the guarantee industry were the main challenges faced by the Company throughout 2023. For this reason, the Company has established a series of strategies with the theme "Retained Growth and Profitability".

Jamkrindo tetap fokus untuk mempertahankan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis penjaminan, serta memperkuat jejaring dan peran dalam pengembangan UMKMK dan industri penjaminan. Perusahaan telah menjalankan sejumlah inisiatif strategis sebagai berikut:

1. Memperkuat portofolio produk dengan perbaikan T&C, pencadangan klaim yang kuat, kolaborasi dengan BUMN berorientasi pada profitabilitas;
2. Memperkuat portofolio usaha dan investasi;
3. Memperkuat dan mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi dan perluasan pasar;
4. Meningkatkan preferensi pelanggan terhadap produk Jamkrindo;
5. Meningkatkan loyalitas pelanggan dan mitra melalui CRM;
6. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI;
7. Meningkatkan efektivitas dan standardisasi proses kerja;

Jamkrindo remains focused on maintaining the growth and profitability of the guarantee business, as well as strengthening networks and roles in the development of MSMEs and the guarantee industry. The Company has implemented a number of strategic initiatives as follows:

1. Strengthening the product portfolio with improved T&C, strong claims reserves, and collaboration with profitability-oriented SOEs;
2. Strengthening business and investment portfolios;
3. Strengthening and developing partnership networks for market penetration and expansion;
4. Increasing customer preference for Jamkrindo products;
5. Increasing customer and partner loyalty through CRM;
6. Improving the quality and scope of IT-based customer service;
7. Increasing effectiveness and standardization of work processes;

8. Meningkatkan efisiensi proses internal dan dengan mitra berbasis otomasi;
9. Meningkatkan kinerja bisnis melalui pemanfaatan *machine learning*;
10. Mengoptimalkan pemeringkatan dan pembinaan UMKMK untuk peningkatan *market share*;
11. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM;
12. Memperkuat pengelolaan pengetahuan organisasi;
13. Meningkatkan internalisasi budaya inovasi;
14. Meningkatkan budaya sadar risiko, kepatuhan & penerapan prinsip TARIF (GCG);
15. Mengoptimalkan pembinaan mitra untuk mendukung misi organisasi.

Sejalan dengan inisiatif strategis tersebut, di tahun 2023 Jamkrindo melakukan restrukturisasi model bisnis: Perubahan bisnis model dengan memfokuskan pada produk yang memberi solusi kepada mitra, bukan sekedar komoditas. Perusahaan juga melakukan penguatan fokus bisnis (*sharpen our focus of business*), yaitu dengan meningkatkan fokus bisnis pada produk yang menjadi *core competence* Perusahaan untuk mengurangi *price war* dalam bersaing.

Di tahun 2023, Jamkrindo juga fokus dalam melakukan restrukturisasi portofolio dengan memperbaiki portofolio produk untuk menghilangkan potensi kerugian. Langkah tersebut juga diimbangi dengan melakukan peningkatan tata kelola yang lebih *prudent* dan berbasis risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam usaha dengan mekanisme *four eyes principle*.

Peningkatan kompetensi SDM juga menjadi fokus utama Jamkrindo di tahun 2023 dengan menyelenggarakan program peningkatan kompetensi secara konsisten bagi seluruh karyawan Perusahaan, khususnya yang terkait dengan industri penjaminan. Hal ini sejalan dengan upaya Jamkrindo untuk meningkatkan daya saing bisnis (*enhance our competitiveness*): Peningkatan kompetensi bisnis untuk meningkatkan persaingan di pasar. Selain itu, Perusahaan juga meningkatkan aspek kepemimpinan dengan menyelenggarakan program *leadership skill*.

Jamkrindo juga memperkuat sinergi dan kerja sama dalam ekosistem *Holding* IFG untuk menghasilkan efisiensi biaya.

Peran Direksi dalam Penetapan Inisiatif dan Kebijakan Strategis Perusahaan dan Langkah *Monitoring*

Sebagai penanggung jawab operasional perusahaan, Direksi memiliki peran yang sangat sentral dalam penentuan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan. Direksi menyusun langkah dan strategi perusahaan sesuai dengan arahan dan aspirasi pemegang saham.

Dalam menyusun strategi dan kebijakan strategis, Direksi mempertimbangkan berbagai aspek, baik internal maupun eksternal Perusahaan. Direksi berperan memberikan arahan strategis dan target-target yang akan dicapai yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

8. Increasing the efficiency of internal processes and with automation-based partners;
9. Improving business performance through the use of machine learning;
10. Optimizing the ranking and development of MSMEs to increase market share;
11. Increasing HR competency and productivity;
12. Strengthening organizational knowledge management;
13. Increasing the internalization of innovation culture;
14. Increasing the culture of risk awareness, compliance & implementation of TARIFF principles (GCG);
15. Optimizing partner development to support the organization's mission.

In line with this strategic initiative, in 2023 Jamkrindo restructured its business model: Change its business model by focusing on products that provide solutions to partners, not just commodities. The Company also strengthened its business focus (sharpen our focus of business), namely by increasing business focus on products that are the Company's core competence to reduce price wars in competition.

In 2023, Jamkrindo also focused on restructuring its portfolio by improving its product portfolio to eliminate potential losses. This step was also balanced by improving governance that is more prudent and risk-based and implementing the precautionary principle in business with the four eyes principle mechanism.

Competency development also became Jamkrindo's main focus in 2023 by consistently implementing competency improvement programs for all Company employees, especially those related to the guarantee industry. This was in line with Jamkrindo's efforts to increase its competitiveness: Increasing business competence to increase competitiveness in the market. In addition, the Company also improved the leadership aspect by organizing a leadership skills program.

Jamkrindo also strengthened synergy and cooperation within the IFG Holding ecosystem to produce cost efficiencies.

The Role of the Board of Directors in Determining Company Strategic Initiatives and Policies and Monitoring Steps

As the party responsible for Company operations, the Board of Directors has a very central role in determining the Company's strategy and strategic policies. The Board of Directors formulates the Company's steps and strategies in accordance with the directions and aspirations of shareholders.

In developing strategic strategies and policies, the Board of Directors considers various aspects, both internal and external to the Company. The Board of Directors' role is to provide strategic direction and targets to be achieved which are outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

Direksi menugaskan setiap Unit Kerja di Perusahaan untuk menjabarkan target dan strategi dan kebijakan strategisnya lebih detail lagi. Usulan rencana target dan strategi pencapaian target tersebut kemudian dilaporkan kepada Direksi dalam Rapat Direksi dengan tujuan untuk bersama-sama melakukan reviu, menyelaraskan target dan strategi dalam RKAP tersebut dengan target dan strategi yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Inisiatif dan kebijakan strategis serta target yang ditetapkan Perusahaan tersebut kemudian dibahas bersama dengan Dewan Komisaris untuk dimintakan nasihat dan persetujuannya.

Direksi bertanggung jawab terhadap terlaksananya inisiatif dan kebijakan strategis Perusahaan serta tercapainya target-target Perusahaan. Karena itu, Direksi harus memastikan strategi Perusahaan dilaksanakan sesuai rencana. Direksi mengetahui dan juga mengawasi perkembangan pengelolaan Perusahaan, mulai dari pemasaran, keuangan, perpajakan, sumber daya manusia, dan kegiatan operasional Perusahaan lainnya yang paparkan melalui forum rapat monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik.

Tantangan yang Dihadapi

Selama tahun 2023, Jamkrindo menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Ketidakpastian Ekonomi Global dan Nasional
   Meskipun sudah melewati masa pemulihan atas dampak COVID-19, dampak ekonomi dari pandemi masih dirasakan. Banyak sektor usaha yang masih dalam tahap *recovery* sehingga mempengaruhi performa kredit yang disalurkan oleh perbankan dan berdampak pada kinerja penjaminan. Selanjutnya adalah faktor inflasi dan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi stabilitas perekonomian sehingga berdampak pada kemampuan untuk menjamin kredit dengan kondisi yang lebih optimal.
2. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah
   Pemerintah terus mengembangkan dan memperbarui kebijakan terkait sektor keuangan dan perbankan. Jamkrindo harus terus beradaptasi dengan kebijakan baru, termasuk regulasi terkait penjaminan kredit dan pengelolaan risiko perusahaan.
3. Manajemen Klaim
   Mengelola rasio klaim yang meningkat juga menjadi tantangan utama. Jamkrindo senantiasa meningkatkan kualitas analisis risiko dan penjaminan kredit untuk mengoptimalkan rasio klaim.
4. Transformasi Digital dan Teknologi
   Implementasi teknologi baru yang memerlukan investasi cukup besar dan perubahan budaya kerja. Implementasi teknologi baru harus dilakukan secara bertahap dan disertai program internalisasi budaya yang memadai bagi karyawan. Selain itu peningkatan keamanan data dan sistem Informasi juga menjadi *concern* perusahaan guna melindungi informasi sensitif dan operasional perusahaan.

The Board of Directors assigns each Work Unit in the Company to describe its targets, strategies and strategic policies in a more detailed manner. The proposed target plans and target achievement strategies are then reported to the Board of Directors in a Board of Directors Meeting with the aim of jointly conducting a review, aligning the targets and strategies in the RKAP with the targets and strategies contained in the Company's Long-Term Plan (RJPP). The strategic initiatives and policies as well as the targets set by the Company are then discussed together with the Board of Commissioners for advice and approval.

The Board of Directors is responsible for implementing the Company's strategic initiatives and policies as well as achieving the Company's targets. Therefore, the Board of Directors must ensure that the Company's strategy is implemented according to plan. The Board of Directors knows and also supervises the development of the Company's management, starting from marketing, finance, taxation, human resources, and other Company operational activities which are explained through periodic monitoring and performance evaluation meeting forums.

Challenges Faced

During 2023, Jamkrindo faced the following challenges:

1. Global and National Economic Uncertainty
   Despite the recovery period from the impact of COVID-19, The Company still experienced the economic impact of the pandemic. Many business sectors were still in the recovery stage, which affected the performance of credit disbursed by banks and has an impact on guarantee performance. Furthermore, inflation and exchange rate fluctuations affected economic stability, thus impacting the ability to guarantee credit with more optimal conditions.
2. Government Regulations and Policies
   The government continues to develop and update policies related to the financial and banking sectors. Jamkrindo must continue to adapt to new policies, including regulations related to credit guarantee and corporate risk management.
3. Claims Management
   Managing the increasing claims ratio is also a major challenge. Jamkrindo constantly improves the quality of risk analysis and credit guarantee to optimize the claim ratio.
4. Digital and Technology Transformation
   Implementation of new technology that requires considerable investment and changes in work culture. Implementation of new technology must be done gradually and accompanied by an adequate cultural internalization program for employees. In addition, improving data security and information systems is also a concern for the company to protect sensitive information and company operations.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)
   Dinamika yang terjadi pada industri keuangan memerlukan peningkatan kompetensi karyawan. Jamkrindo senantiasa berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru. Selain itu, mempertahankan talenta terbaik dan merekrut tenaga ahli yang berkualitas menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi persaingan yang ketat di pasar tenaga kerja.
6. Tantangan Sosial dan Lingkungan
   Sebagai BUMN, Jamkrindo diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang kuat. Program CSR harus dirancang untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai upaya keberlanjutan dalam operasional perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Sehingga dalam hal ini, selain menciptakan *economic value,* Jamkrindo juga turut serta dalam menciptakan *social value*.

Kinerja Jamkrindo Tahun 2023

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2023, Jamkrindo masih dapat membukukan kinerja operasional dan keuangan yang cukup memuaskan. Jumlah kredit yang dijamin Jamkrindo tahun 2023 mencapai Rp378,37 triliun, meningkat 21% dari tahun sebelumnya sebesar Rp312,36 triliun. Pencapaian tersebut juga berada di atas target RKAP 2023 sebesar Rp340,26 triliun atau dengan realisasi sebesar 111%.

Penjaminan Jamkrindo tahun 2023 utamanya merupakan penjaminan Non KUR, yaitu mencapai Rp248,34 triliun, meningkat 215% dari tahun sebelumnya sebesar Rp106,28 triliun. Sedangkan penjaminan KUR tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp130,03 triliun. Hal ini sejalan dengan penurunan penyaluran KUR di tahun 2023 menjadi Rp297 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp373 triliun.

Dengan peningkatan penjaminan di tahun 2023, imbal jasa penjaminan yang diperoleh Perusahaan juga meningkat 19% menjadi Rp6,73 dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,64 triliun. Perolehan imbal jasa penjaminan tersebut juga berada di atas target RKAP 2023 yaitu sebesar Rp6,72 triliun.

Kinerja keuangan Jamkrindo tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat baik. Pendapatan penjaminan bersih yang dibukukan Perusahaan meningkat 20% menjadi Rp6,35 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,28 triliun. Perusahaan juga mencatat peningkatan pendapatan investasi bersih sebesar 41% menjadi Rp1,19 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp844,99 miliar.

Dengan pencapaian tersebut, tahun 2023 Jamkrindo membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp1,44 triliun, naik 12% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,28 triliun.

5. Human Resources (HR)
   The dynamics that occur in the financial industry require an increase in employee competence. Jamkrindo constantly invests in HR training and development to be able to adapt to changes and new challenges. Furthermore, retaining top talent and recruiting qualified experts is a challenge, especially in the face of intense competition in the labor market.

6. Social and Environmental Challenges
   As a state-owned enterprise, Jamkrindo is expected to implement a strong Corporate Social Responsibility (CSR) program. CSR programs should be designed to have a positive impact on the surrounding community and environment as a sustainability effort in the company›s operations to support sustainable development and meet stakeholder expectations. Thus, in this case, in addition to creating economic value, Jamkrindo also participates in creating social value.

Jamkrindo Performance in 2023

In the midst of various challenges faced throughout 2023, Jamkrindo was still able to record quite satisfactory operational and financial performance. The amount of credit guaranteed by Jamkrindo in 2023 reached IDR378.37 trillion, an increase of 21% from the previous year of IDR312.36 trillion. This achievement was also above the 2023 RKAP target of IDR340.26 trillion, or with a realization of 111%.

Jamkrindo's guarantee for 2023 was mainly Non-KUR guarantee , which reached IDR248.34 trillion, an increase of 215% from the previous year of IDR106.28 trillion. Meanwhile, KUR guarantees in 2023 decreased to IDR130.03 trillion. This was in line with the decline in KUR distribution in 2023 to IDR297 trillion from the previous year of IDR373 trillion.

With the increase in guarantees in 2023, the guarantee service fees obtained by the Company also increased 19% to IDR6.73 trillion from the previous year of IDR5.64 trillion. The income from guarantee services was also above the 2023 RKAP target, namely IDR6.72 trillion.

Jamkrindo's financial performance in 2023 experienced a very good improvement. Net guarantee income recorded by the Company increased 20% to IDR6.35 trillion from the previous year of IDR5.28 trillion. The Company also recorded an increase in net investment income of 41% to IDR1.19 trillion from the previous year's IDR844.99 billion.

With this achievement, in 2023 Jamkrindo posted a profit for the year of IDR1.44 trillion, increased by 12% from the previous year of IDR1.28 trillion.

Posisi keuangan Jamkrindo tahun 2023 juga menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Perusahaan mencatat pertumbuhan aset sebesar 15% menjadi Rp32,23 triliun dan pertumbuhan ekuitas sebesar 4% menjadi sebesar Rp13,35 triliun. Namun demikian, liabilitas Perusahaan juga meningkat 24% menjadi Rp18,88 triliun.

Jamkrindo's financial position in 2023 also shows very good improvement. The Company recorded asset growth of 15% to IDR32.23 trillion and equity growth of 4% to IDR13.35 trillion. However, the Company's liabilities also increased 24% to IDR18.88 trillion.

Perbandingan Target dan Realisasi

Kinerja Jamkrindo tahun 2023 secara umum berada di atas target yang ditetapkan dalam RKAP 2023, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Comparison of Target and Realization

Jamkrindo's performance in 2023 was generally above the target set in the 2023 RKAP, namely with the following details:

dalam juta Rupiah
in IDRmillion

Uraian Description	RKAP 2023	Realisasi 2023 2023 Realization	Pencapaian RKAP RKAP Achievement
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income	5.019.585	6.738.700	134,25
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	1.327.940	1.436.849	108,20
Aset Assets	30.085.327	32.231.220	107,13
Liabilitas Liabilities	16.516.492	18.877.198	114,29
Ekuitas Equity	13.541.835	13.354.022	98,61

Prospek Usaha Jamkrindo

Perekonomian Indonesia di tahun 2024 diprediksi masih akan cukup menantang. Hal ini tak lepas dari kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian. Selain itu, di tahun 2024, Indonesia juga akan menggelar pesta demokrasi dengan agenda utama pemilihan pemimpin nasional, sehingga akan sangat berdampak pada keyakinan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi dan pengembangan bisnis.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih bisa terjaga di atas 5%. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%.

Pada tahun 2024, Pemerintah berupaya melakukan transformasi ekonomi dan reformasi fiskal secara komprehensif. Reformasi fiskal yang komprehensif dilakukan dengan cara optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif. Dalam melakukan optimalisasi penerimaan negara, diperlukan efektivitas reformasi perpajakan dan insentif fiskal yang mendorong investasi.

Industri penjaminan diproyeksikan akan tetap dapat meraih pertumbuhan yang baik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang terbukti dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Memperhatikan pentingnya peran UMKM, Pemerintah terus mendorong akses pembiayaan dengan meningkatkan share kredit UMKM.

Jamkrindo Business Prospects

The Indonesian economy in 2024 is predicted to still be quite challenging. This was due to global economic conditions which are still shrouded in uncertainty. In addition, in 2024, Indonesia will also hold a democratic party with the main agenda being the election of a national leader, so it will have a big impact on the confidence of business actors to expand and develop their business.

In the midst of these conditions, the Indonesian Government is optimistic that Indonesia's economic growth in 2024 can still be maintained above 5%. The Indonesian government has set a target for Indonesia's economic growth in 2024 at 5.2%.

In 2024, the Government seeks to carry out comprehensive economic transformation and fiscal reform. Comprehensive fiscal reform is carried out by optimizing state revenues, improving the quality of spending, and encouraging innovative financing. In optimizing state revenues, effective tax reform and fiscal incentives that encourage investment are needed.

The guarantee industry is projected to continue to achieve good growth. This is in line with the government's efforts to continue to encourage the growth of the MSME sector which has been proven to support national economic growth. Paying attention to the important role of MSMEs, the Government continues to encourage access to financing by increasing the share of MSME credit.

Menghadapi kondisi tersebut, Perusahaan memiliki beberapa strategi usaha dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan *Market Share* Melalui Kolaborasi antar Anak Perusahaan *Holding* dan BUMN
   Jamkrindo bergabung dalam *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan dengan harapan terdapat *guidelines* mengenai *playing field* antar sesama anggota *Holding* terkait dengan penetrasi produk. Pembentukan *Holding* diharapkan dapat menciptakan kolaborasi dan efisiensi bagi seluruh anggota dan induk. Kolaborasi dan efisiensi yang diharapkan terjadi dengan adanya *Holding* dan kerja sama dengan anak perusahaan meliputi: peningkatan bunga deposito, efisiensi biaya transaksi, efisiensi dari *integrated marketing program*, efisiensi pengadaan, efisiensi dengan *shared services*, efisiensi beban depresiasi dan sewa, efisiensi beban klaim.
2. Melakukan Pengembangan Sistem TI yang Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas Proses Bisnis Perusahaan
   Proses bisnis Perusahaan, terutama *core business process*, masih belum terintegrasi secara menyeluruh. Beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh Perusahaan masih tergantung pada penginputan data di masing-masing aplikasi sehingga berpotensi adanya perbedaan di beberapa proses bisnis yang menyebabkan data tumpang tindih. Saat ini Perusahaan sedang mengembangkan arsitektur teknologi. Dalam pengembangan arsitektur teknologi terdapat fokus permasalahan terkait *integrated service management* yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber informasi baik secara internal maupun eksternal. Adanya pengembangan tersebut diharapkan mendorong percepatan dan simplifikasi proses bisnis yang ada.
3. Melakukan Pemeringkatan dan Pembinaan UMKMK
   Jamkrindo sudah menginisiasi pengumpulan *database*, pemeringkatan dan pembinaan UMKMK melalui kerja sama dengan berbagai universitas. Jamkrindo juga tengah merancang alat bantu untuk melakukan *scoring* UMKMK. Selain itu, Jamkrindo dapat menggunakan dana TJSL yang dimilikinya untuk mendukung kegiatan pembinaan UMKMK.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan serta Membina Hubungan Baik dengan Mitra
   Jamkrindo selalu berusaha memberikan layanan penjaminan dan klaim yang sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA). Kemampuan Jamkrindo dalam memberikan layanan yang baik ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi mitra untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh Jamkrindo.
5. Meningkatkan Kompetensi SDM Terutama pada Pengetahuan dan Kompetensi Kunci
   Guna memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga meningkatkan produktivitas Perusahaan, maka Divisi MSDM telah melakukan asesmen pejabat dan pengembangan karyawan secara terus menerus untuk dapat mendukung proses bisnis di seluruh unit kerja yang membutuhkan. Divisi MSDM telah melakukan Pendidikan dan pelatihan baik dengan pihak internal

Facing these conditions, the Company has several business strategies to realize the Company's vision and mission, including the following:

1. Increasing Market Share Through Collaboration between Holding Subsidiaries and SOEs
   Jamkrindo joined the SOEs' Insurance and Guarantee Holding with the hope that there would be guidelines regarding the playing field between fellow Holding members related to product penetration. The formation of the Holding is expected to create collaboration and efficiency for all members and parents. Collaboration and efficiency that are expected to occur with Holding and cooperation with subsidiaries include: increased deposit interest, transaction cost efficiency, efficiency from integrated marketing programs, procurement efficiency, efficiency with shared services, efficiency in depreciation and rental expenses, efficiency in claim expenses.
2. Developing an Integrated IT System to Increase the Effectiveness of the Company's Business Processes
   The Company's business processes, especially core business processes, are still not fully integrated. Several applications developed by the Company still depend on inputting data in each application, so there is the potential for differences in several business processes that cause data to overlap. Currently the Company is developing a technology architecture. In developing technology architecture there is a focus on issues related to integrated service management, namely the ability to integrate data from various information sources both internally and externally. It is hoped that this development will encourage the acceleration and simplification of existing business processes.
3. Carrying out ranking and development of MSMEs
   Jamkrindo has initiated database collection, ranking and development of MSMEs through collaboration with various universities. Jamkrindo is also designing tools to score MSMEs. In addition, Jamkrindo can use its TJSL funds to support MSME development activities.
4. Improving Service Quality and Building Good Relations with Partners
   Jamkrindo always tries to provide guarantee and claims services in accordance with the Service Level Agreement (SLA). Jamkrindo's ability to provide good service is one of the factors that influences partners to use the products offered by Jamkrindo .
5. Increasing HR Competency, Especially in Knowledge and Key Competencies
   In order to strengthen existing Human Resources (HR) so as to increase the Company's productivity, the HRM Division has carried out continuous assessment of officials and employee development to be able to support business processes in all work units that require it. The HRM Division has carried out education and training with both internal and external parties to

maupun eksternal untuk meningkatkan kompetensi SDM, serta melaksanakan asesmen mingguan yang diikuti oleh seluruh karyawan secara konsisten.

6. Melaksanakan Manajemen Risiko yang Terintegrasi di Seluruh Proses Bisnis
   Adanya penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) membuat penyelenggaraan bisnis penjaminan harus memperhatikan risiko/*prudent* dalam setiap proses bisnis. Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan mitra dalam rangka pengelolaan risiko Perusahaan. Perumusan strategi untuk mendukung sasaran tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan Dukcapil, Infobank dan Pefindo Biro Kredit (PBK) dalam mendukung proses bisnis penjaminan. Selain itu, peningkatan pemahaman risk awareness juga perlu ditingkatkan untuk karyawan dan juga para *owner* (pemegang saham) dalam melakukan tindakan maupun pengambilan keputusan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Jamkrindo berkomitmen untuk menjadikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas operasional Perusahaan. Jamkrindo senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran terimplementasi di lingkungan bisnis Perusahaan.

Tahun 2023, penerapan GCG di lingkungan Jamkrindo menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Perusahaan telah melakukan telah melakukan penyesuaian kebijakan-kebijakan internal dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, termasuk melakukan penyesuaian dalam penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perusahaan.

Pelaksanaan fungsi dan tugas dari setiap organ tata kelola juga telah disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan tetap relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memastikan kegiatan operasional telah dijalankan dan dikendalikan dengan baik sesuai dengan tujuan Perusahaan, organ Perusahaan senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten dan menyeluruh serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development*, GCG menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa mendatang.

improve HR competency, as well as carrying out weekly assessments which are attended by all employees consistently.

6. Implementing Integrated Risk Management in All Business Processes
   The implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) means that the implementation of the guarantee business must pay attention to risk/prudence in every business process. The Company has collaborated with partners in the context of managing the Company's risks. Formulating strategies to support these targets can be done by collaborating with Dukcapil, Infobank and Pefindo Credit Bureau (PBK) to support the guarantee business process. In addition, there is a need to improve understanding of risk awareness for employees and also owners (shareholders) in taking actions and making decisions.

Implementation of Corporate Governance

Jamkrindo is committed to making the principles of Good Corporate Governance (GCG) the main foundation in every operational activity of the Company. Jamkrindo always applies GCG principles in all its business activities. These principles include, among others, transparency, accountability, responsibility, independence and fairness which are implemented in the Company's business environment.

In 2023, the implementation of GCG in the Jamkrindo environment has shown a very significant increase. The Company has adjusted its internal policies to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, including making adjustments in the implementation of risk management and the Company's internal control system.

The implementation of the functions and duties of each governance organ has also been adjusted to these new provisions. This is intended to ensure that the Company remains relevant to applicable laws and regulations.

To ensure that operational activities were carried out and controlled properly in accordance with the Company's objectives, the Company's organs had always strived to implement GCG consistently and thoroughly and refer to applicable laws and regulations, while still paying attention to the interests of other stakeholders. In the concept of sustainable development, GCG is one of the main pillars which is expected to be able to form the foundation of a healthy investment climate. Furthermore, GCG has become a fundamental factor for investors in assessing the Company's sustainable performance into the future.

Komitmen penerapan GCG merupakan bagian proses transformasi dan hal yang mutlak bagi Jamkrindo. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG Jamkrindo.

Tahun 2023, Jamkrindo telah melakukan penilaian penerapan GCG sesuai kriteria Keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) – sebelum keputusan tersebut dicabut berdasarkan SK Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-12/S.MBU/08/2023, dan memperoleh skor 96,268 dengan kualifikasi **"Sangat Baik"**. Namun demikian, dibandingkan hasil *self assessment* tahun sebelumnya, pencapaian tersebut sedikit mengalami penurunan, dimana tahun 2022 Perusahaan meraih skor 96,433 dengan kualifikasi "Sangat Baik". Hal ini akan menjadi catatan bagi Perusahaan untuk terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan, baik dari sisi *soft structure* maupun dari sisi *infrastructure* GCG.

Penerapan Manajemen Risiko

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Jamkrindo dan sebagai upaya Perusahaan mengantisipasi tantangan, hambatan, dan potensi risiko yang mungkin terjadi, baik yang dipicu oleh perubahan faktor eksternal maupun internal Perusahaan yang sangat cepat dan kompleks, maka Perusahaan secara konsisten dan kontinu mengimplementasikan Manajemen Risiko pada seluruh aktivitas bisnis dan operasionalnya.

Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara holistik dan terpadu dapat memperkuat kapabilitas Perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Infrastruktur Manajemen Risiko Jamkrindo disusun dengan menggunakan acuan Manajemen Risiko standard internasional berbasis ISO 31000:2018. Tahun 2023, Jamkrindo juga telah melakukan penyesuaian penerapan manajemen risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

Organ pengelola risiko yang wajib dimiliki sesuai dengan pemetaan kategori dan klasifikasi risiko Jamkrindo mengikuti ketentuan pada Pasal 56 dalam PER-2/MBU/03/2023, dimana Jamkrindo berada pada klasifikasi risiko Sistemik A dan memiliki Organ Pengelola Risiko sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengarah;
2. Direksi;
3. Komite Audit;
4. Komite Pemantau Perusahaan;
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. Direktur yang membidangi pengelolaan risiko;
7. Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan;
8. Satuan Pengawas Intern.

Commitment to implementing GCG is part of the transformation process and is absolute for Jamkrindo. This is done through strengthening existing infrastructure and continuously improving systems and procedures to support the effectiveness of Jamkrindo's GCG implementation.

In 2023, Jamkrindo has carried out an assessment of the implementation of GCG according to the criteria of the Decree of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance, before the decision was revoked based on the Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN Number SK-12/S.MBU/08/2023, and obtained a score of 96.268 with the qualification **"Very Good"**. However, compared to the results of the previous year's self-assessment, this achievement has decreased slightly, in which in 2022 the Company achieved a score of 96.433 with the qualification "Very Good". This will be a note for the Company to continue to make continuous improvements, both in terms of soft structure and in terms of GCG infrastructure.

Implementation of Risk Management

In order to achieve Jamkrindo's vision and mission and as part of the Company's efforts to anticipate challenges, obstacles and potential risks that may occur, whether triggered by very rapid and complex changes in external and internal factors of the Company, the Company consistently and continuously implements Risk Management throughout business activities and operations.

The implementation of Risk Management, which was carried out in a holistic and integrated manner, can strengthen the Company's capabilities in increasing the Company's added value for all stakeholders and maintaining business sustainability in the long term.

Jamkrindo's Risk Management Infrastructure is prepared using international standard Risk Management as a reference based on ISO 31000:2018. In 2023, Jamkrindo has also made adjustments to the implementation of risk management in accordance with SOEs Ministerial Regulation Number PER-2/MBU/03/2023.

Mandatory risk management organs that must be owned by the Company are in accordance with Jamkrindo's risk category and classification mapping following the provisions in Article 56 in PER-2/MBU/03/2023, in which Jamkrindo is in the Systemic A risk classification and has the following Risk Management Organs:

1. Board of Commissioners/Supervisory Board;
2. Board of Directors;
3. Audit Committee;
4. Company Monitoring Committee;
5. Integrated Governance Committee;
6. Director in charge of risk management;
7. Director in charge of financial management;
8. Internal Audit Unit.

Dengan keberadaan organ tersebut, penerapan manajemen risiko di Jamkrindo diharapkan dapat terus ditingkatkan kualitasnya.

With the existence of this organ, it is hoped that the quality of the implementation of risk management at Jamkrindo can continue to be improved.

Perubahan Komposisi Direksi

Tahun 2023, komposisi Direksi Jamkrindo mengalami perubahan, di mana berdasarkan keputusan pemegang saham Nomor SK-21/MBU/07/2023 dan Nomor 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 tanggal 31 Juli 2023. Melalui keputusan tersebut, pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat Kadar Wisnuwarman sebagai Direktur Operasional dan Jaringan yang telah berakhir masa jabatannya. Sebagai pengganti, melalui keputusan yang sama, pemegang saham juga mengangkat Akhmad Purwakajaya sebagai Direktur Utama dan Alia Nur Fitri sebagai Direktur Keuangan dan Investasi, serta mengalihkan Suwarsito yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko sebagai Direktur Operasional dan Jaringan.

Changes in Board of Directors Composition

In 2023, the composition of Jamkrindo's Board of Directors underwent changes, where based on resolution of shareholder Number SK-21/MBU/07/2023 and Number 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 dated July 31, 2023. Through this decision, shareholders also honorably dismissed Kadar Wisnuwarman as Director of Operations and Networks whose term of office has ended. As a replacement, through the same decision, shareholders also appointed Akhmad Purwakajaya as President Director and Alia Nur Fitri as Director of Finance and Investment, and transferred Suwarsito who previously served as Director of Finance, Investment and Risk Management as Director of Operations and Networks.

Selain itu, pemegang saham juga mengubah nomenklatur jabatan Direksi, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

In addition, shareholders also changed the nomenclature of Directors' positions, namely with the following details:

Nomenklatur Lama Previous Nomenclature	**Nomenklatur Baru** New Nomenclature
Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan Director of HRM, General Affairs, and Compliance	Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of HRM, General Affairs, and Risk Management
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment

Dengan demikian, komposisi Direksi Jamkrindo menjadi sebagai berikut:

Therefore, the composition of Jamkrindo's Board of Directors is as follows:

Nama Names	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Tenure
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	SK-21/MBU/07/2023 – 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023–31 Juli 2028 July 31, 2023–July 31, 2028	Ke-1 1st
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022–27 Oktober 2027 October 27, 2022–October 27, 2027	Ke-1 1st
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of HRM, General Affairs, and Risk Management	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022–27 Oktober 2027 October 27, 2022–October 27, 2027	Ke-1 1st
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional and Services	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022–27 Oktober 2027 October 27, 2022–October 27, 2027	Ke-1 1st
Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023–21 Maret 2026 July 31, 2023–March 21, 2026	Ke-1 1st
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023–31 Juli 2028 July 31, 2023–July 31, 2028	Ke-1 1st

Atas nama Jamkrindo, kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam dalamnya atas meninggalnya Bapak Hendro Padmono, semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kadar Wisnuwarman atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Jamkrindo.

Penutup

Jamkrindo telah berhasil mencatat sejumlah prestasi di tahun 2023. Kontribusi Perusahaan terhadap pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat juga semakin terlihat nyata. Keberhasilan tersebut tak lepas dari peran seluruh karyawan Jamkrindo. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh karyawan Jamkrindo yang telah bekerja dengan dedikasi yang tinggi sehingga memungkinkan Perusahaan untuk meraih sejumlah prestasi di tahun 2023.

Kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami, juga kepada Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga bagi Direksi.

Kepada seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Dengan penuh optimisme, mari kita terus berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kemampuan Perusahaan untuk mendukung pembangunan di Indonesia.

On behalf of Jamkrindo , we would like to express our deepest condolences for the passing of Mr. Hendro Padmono> We truly hope that he will be accepted in the best place next to God Almighty. We would also like to express our appreciation and gratitude to Kadar Wisnuwarman for his dedication and contribution while serving as a member of the Jamkrindo Board of Directors.

Closing

Jamkrindo has succeeded in recording a number of achievements in 2023. The Company's contribution to development which has a direct impact on society is also increasingly visible. This success was due to the role of all Jamkrindo employees. For this reason, on this auspicious occasion, we would like to express our highest appreciation to all Jamkrindo employees who have worked with high dedication to enable the Company to achieve a number of achievements in 2023.

We would also like to express our highest appreciation to the shareholders for the trust and support they have given us, as well as to the Board of Commissioners who always provide very valuable direction and guidance to the Board of Directors.

To all stakeholders and work partners, we also express our appreciation and gratitude for the good cooperation that has been established so far. With full optimism, let us continue to work and innovate to improve the Company's ability to support development in Indonesia.

Jakarta, 25 Juni 2024
Atas Nama Direksi
Jakarta, June 25, 2024
On behalf of the Board of Directors



Akhmad Purwakajaya
Direktur Utama
President Director

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT STATEMENT OF RESPONSIBILITY

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jaminan Kredit Indonesia tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Statement of Responsibility from the members of Board of Directors and Board of Commissioners on the correctness of the content of PT Jamkrindo's Annual Report in 2023

We, the undersigned, state that all information in the Annual Report of PT Jaminan Kredit Indonesia of 2023 contains complete information and we are fully responsible for the correctness of the content of the Company's Annual Report. This statement is made truthfully and consciously.

Jakarta, 25 Juni 2024
Jakarta, June 25, 2024

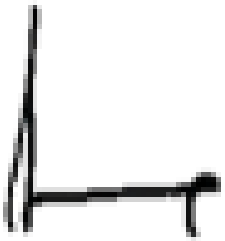
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS



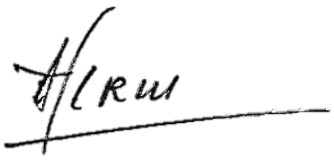
Krisna Wijaya
Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner



Desty Arlaini
Komisaris
Commissioner



Ari Wahyuni
Komisaris
Commissioner



Hernita Alius
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Muhammad Muchlas Rowi
Komisaris Independen
Independent Commissioner

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT STATEMENT OF RESPONSIBILITY

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jaminan Kredit Indonesia tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Statement of Responsibility from the members of Board of Directors and Board of Commissioners on the correctness of the content of PT Jamkrindo's Annual Report in 2023

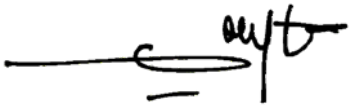
We, the undersigned, state that all information in the Annual Report of PT Jaminan Kredit Indonesia of 2023 contains complete information and we are fully responsible for the correctness of the content of the Company's Annual Report. This statement is made truthfully and consciously.

Jakarta, 25 Juni 2024
Jakarta, June 25, 2024

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS



Akhmad Purwakajaya
Direktur Utama
President Director



Suwarsito
Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operations and Network



Achmad Ivan S Soeparno
Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs, and Compliance



Henry Panjaitan
Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Guarantee Business



Abdul Bari
Direktur Kelembagaan dan Layanan
Director of Service and Institutions



Alia Nur Fitri
Direktur Keuangan dan Investasi
Director of Finance and Investment


Jamkrindo
Jaminan Kredit Indones
A member of IFG

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG



3

Profil Perusahaan
Company Profile

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN
GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY

Nama Perusahaan
Company Name

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG

PT Jaminan Kredit Indonesia, atau disingkat PT Jamkrindo
PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated to PT Jamkrindo

Bentuk dan Status Badan Usaha
Form and Status of Business Entity

Perseroan Terbatas (PT)
Limited Liability Company

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

1 Juli 1970
Juli 1, 1970

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011484.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 07 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.KN., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075624.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022.

Deed of Establishment Number 25 dated February 24, 2020 made before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notary in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0011484. .01 Year 2020 dated February 24, 2020 and last amended by Deed Number 07 dated October 07, 2022 made before Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.KN., Notary in Jakarta and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0075624.AH.01.02. Year 2022 dated October 19, 2022.



Bidang Usaha
Line of Business

Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya

Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (UMKMK), Guarantee for SOEs, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees.

Jaringan Usaha
Business Network

9 Kantor Wilayah, 55 Kantor Cabang (termasuk 1 Kantor Cabang Khusus), dan 17 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia

9 Regional Offices, 55 Branch Offices (including Special Branch Offices), and 17 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia

Kepemilikan
Ownership

- **Saham Seri A Dwiwarna**
  Pemerintah Republik Indonesia (0,000009%)
- **Saham Seri B**
  PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (99,999991%)

- Series A Dwiwarna Shares
  The Government of Republik Indonesia (0.000009%)
- Series B Shares
  PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (99.999991%)

Penyertaan Modal Negara
Addition of State Capital

Rp10.638.733.000.000
(sepuluh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah)

IDR10,638,733,000,000
(ten trillion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty three million Rupiah)

Karyawan Tetap
Permanent Employees

1.075 orang di tahun 2023
1,075 employees in 2023

Media Sosial
Social Media

Twitter	**@pt_jamkrindo**
Instagram	**@pt_jamkrindo**
Facebook	**Jamkrindo**
YouTube	**PT Jamkrindo**

Alamat dan Informasi Perusahaan
Company Address and Information

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telepon: +62 21 6540335
Faksimili:+62 21 6540344, 6540348
***Email:* contact@jamkrindo.co.id**
Situs Web: www.jamkrindo.co.id

Jamkrindo Building
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Central Jakarta 10610, Indonesia
Phone: +62 21 6540335
Fax:+62 21 6540344, 6540348
Email: contact@jamkrindo.co.id
Website: www.jamkrindo.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
BRIEF HISTORY OF THE COMPANY



Sekilas tentang Jamkrindo

Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah No. 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tanggal 31 Mei 1985.

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Peraturan Pemerintah No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

A Glance at Jamkrindo

Starting from the real condition in which the development of cooperative was still behind compared to two other economic actors (SOE's and Private), the Government established Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) in 1970 which in its development was changed to Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) through Government Regulation No.51 dated December 23, 1981, which is renewed by Government Regulation No. 27 dated May 31, 1985.

Along with its success in carrying out the functions and duties of PKK Perum in developing cooperatives through Credit Guarantee activities, the Government expanded the range of PKK Perum services, becoming not only limited to cooperatives, but also includes Micro, Small and Medium Enterprises through Government Regulation No. 95 dated November 7, 2000 and at the same time changed the name of PKK Perum to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti peraturan tersebut tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

Furthermore, in May 2008, through Government Regulation No. 41 dated May 19, 2008, the name of Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) was changed again become Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). The change of company name is related to business changes, the Company no longer provides loans directly to MSMEs and Cooperatives through profit sharing patterns, but focuses on the MSME and Cooperative credit guarantee business. In 2008 also, the Government issued Presidential Regulation No. 2 dated January 26, 2008 concerning the Guarantee Institution. To implement the Presidential Regulation, the Government in this case the Ministry of Finance, issued Regulation of the Minister of Finance No. 222/PMK.010/2008 dated December 16, 2008 concerning Credit Guarantee Companies and Credit Re-Guarantee Companies. With the regulation, Perum Jamkrindo is required to have a business license as a Credit Guarantee Company. Following up on the regulation, the Minister of Finance issued Decree No.KEP-77/ KM.10/2009 dated April 22, 2009 which stipulates Perum Jamkrindo's business license as a Credit Guarantee company.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, officially changed the legal entity of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia or Perum Jamkrindo become a Limited Liability Company through Government Regulation No. 11 of 2020 dated February 14, 2020 concerning the Change of Legal Entity Form from Public Corporation (PERUM) of Jaminan Kredit Indonesia into a Limited Liability Company (Persero) that has been enacted on February 17, 2020. This decision was strengthened by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 Year 2020 concerning Ratification of establishment of Legal Entity of Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). The deed of establishment of the Company PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed at the Ministry of SOE Building, Jakarta on February 24, 2020.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia merubah status badan hukum PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menjadi PT Jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan. Beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam BUMN *Holding* Perasuransian dan Penjaminan tersebut adalah:

1. Anggota *Holding* Pasar Modal dan Jasa Keuangan
   a. PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), bergerak di bidang manajemen investasi;
   b. PT Bahana Sekuritas, bergerak dibidang penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek;
   c. PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), yang bergerak di bidang pembiayaan modal ventura dan bertugas membina sektor UMKM di Indonesia;
   d. PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), bergerak dalam bidang investasi dan jasa penasehat keuangan (*advisory*);

Then based on Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) changed the status of legal entity PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) to PT Jamkrindo and officially became a subsidiary of the holding of Insurance and Guarantee. The companies that are members of the BUMN Holding Insurance and Guarantee are as follows:

1. Capital Market and Financial Services Subsidiaries:
   a. PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), is engaged in investment management;
   b. PT Bahana Sekuritas, is engaged in securities underwriting and securities trading brokerage;
   c. PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), which is engaged in venture capital financing and is tasked with fostering the MSME sector in Indonesia;
   d. PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), is engaged in investment and financial advisory services (advisory);

e. PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU"), bergerak di bidang pemilikan, pengelolaan, dan penyewaan Gedung.

2. Anggota *Holding* Asuransi Umum dan Penjaminan
   a. PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo") yang melaksanakan usaha di bidang jasa asuransi kredit dan asuransi umum;
   b. PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") yang melayani penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada bank ataupun non-bank;
   c. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ("Jasa Raharja") bergerak di bidang asuransi sosial;
   d. PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") bergerak di bidang asuransi umum.
3. Anggota *Holding* Asuransi Jiwa dan Kesehatan
   PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa.

Riwayat Perubahan Nama Perusahaan

Sepanjang berdirinya hingga saat ini Perusahaan telah berganti nama sebanyak 6 (enam) kali. Adapun detail dari kronologis perubahan nama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985;
2. Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000;
3. Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008;

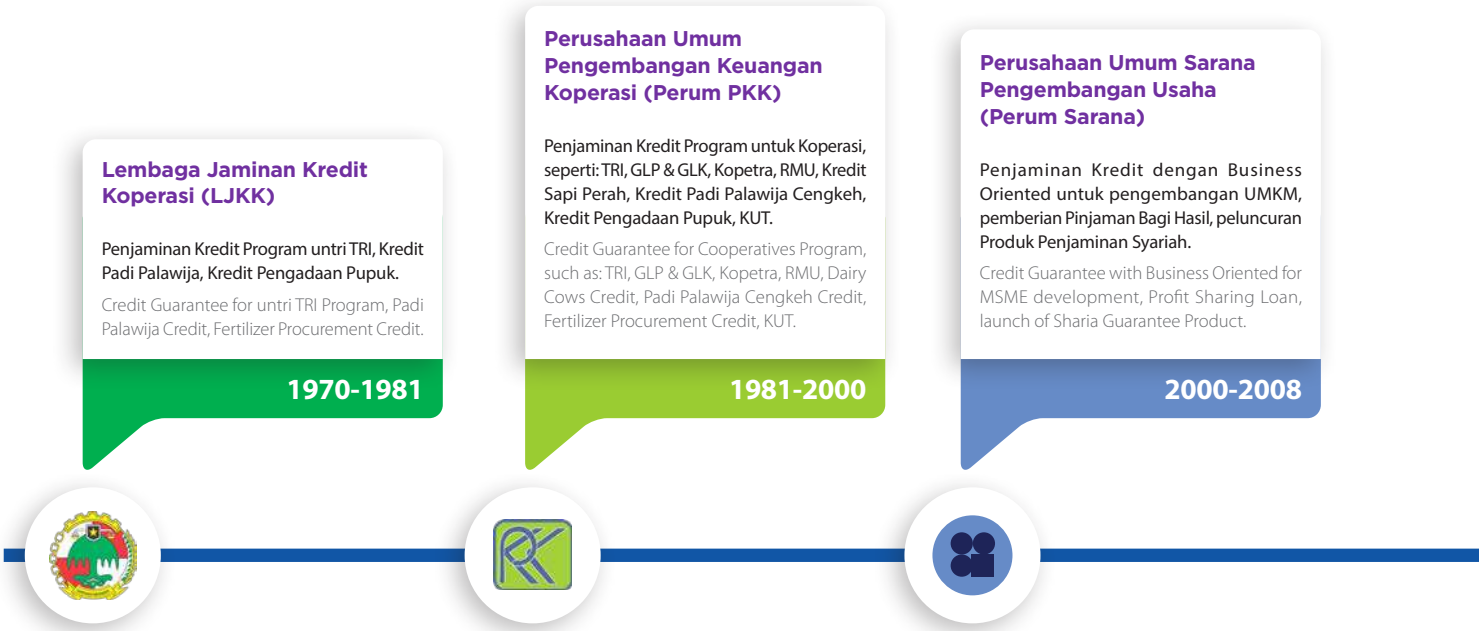
e. PT Graha Niaga Tata Utama ("GNTU"), is engaged in building ownership, management, and rental.

2. Member of General Insurance and Guarantee Holding
   a. PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo") which conducts business in the field of credit insurance and general insurance services;
   b. PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") which provides guarantees, either directly or indirectly, to banks or non- banks;
   c. PT Asuransi Jasa Raharja ("Jasa Raharja") is engaged in social insurance;
   d. PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") is engaged in general insurance.
3. Life and Health Insurance Holding Member
   PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) which is engaged in life insurance.

The Change of Company's Name

Throughout its establishment until now, the Company has changed its name 6 (six) times. The details of the chronology of the name change are as follows:

1. The company was originally established under the name of Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No. 51 of 1981 which was a merger of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which was established in 1970. The Government Regulation was then refined through Government Regulation No. 27 of 1985;
2. The Company name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No. 95 of 2000;
3. The company name was changed again into Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) based on the Government Regulation No. 41 of 2008;



4. Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perum Jamkrindo dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilakukan penandatanganan akta pendirian PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) yaitu Akta No. 25 tanggal 24 Februari 2020 di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero);
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 Tanggal 9 April 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028854.AH.01.02.Tahun 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* Asuransi dan Penjaminan dengan nama PT Jaminan Kredit Indonesia disingkat PT Jamkrindo.

4. In order to change the form of Perum Jamkrindo legal entity from Public Corporation (PERUM) to Limited Liability Company (PT), the Government issued Government Regulation No. 11/2020 which has been enacted on February 17, 2020. To comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the deed of establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed, namely Deed No. 25 dated February 24, 2020 at the Ministry of SOEs building, in Jakarta on February 24, 2020 and has been ratified by Decree of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 of 2020 concerning the Ratification of the Establishment of a Legal Entity Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero);
5. Based on Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and the Deed of Amendment to the Articles of Association No. 2 dated April 9, 2020 which was ratified by the Decree of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0028854. AH.01.02. In 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee holding company under the name PT Jaminan Kredit Indonesia abbreviated as PT Jamkrindo.

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah, antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond*, dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond, and guarantee in order to synergy of SOEs.

2008-2020

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah, antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond*, dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

2020

PT Jamkrindo

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah, antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond*, dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

2020-Sekarang
2020-Present

BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA
LINE OF BUSINESS AND PRODUCTS AND SERVICES

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dalam pasal 3 disebutkan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber dana Perseroan berdasarkan prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik.

Business Activities Based on Articles of Association

Based on Deed No. 10, dated March 8, 2021 concerning Amendments to the Articles of Association in article 3, it is stated that the Purpose and Objectives and Business Activities are to conduct business activities guarantees for Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives, Guarantees for State-Owned Enterprises, Warehouse Receipt System Guarantees, and other Guarantees as well as optimizing the utilization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan dan Kesesuaiannya dengan Anggaran Dasar Perusahaan

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha untuk mendukung pembiayaan. Berikut disampaikan pelaksanaan kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha yang telah dilakukan.

Implemented Business Activities and Their Compliance with the Company's Articles of Association

To achieve those aims and objectives, the Company is able to perform some business activities and business development policies to support financing. The following is a presentation of the implementation of business activities and business development policies that have been implemented.

No	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not been Implemented	Keterangan Description
1.	Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Credit guarantee, conventional financing, or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Umum, Penjaminan Kredit Mikro, Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Penjaminan Program PEN Available in General Credit Guarantee, Micro Credit Guarantee, People's Business Credit Guarantee products. PEN Program Guarantee
2.	Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya Loan guarantees channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives that have a savings and loan business unit to its members	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna KKLK Available in the KKLK Multipurpose Credit Guarantee product
3.	Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan Credit guarantee and/or partnership program loans distributed by state-owned enterprises in the context of partnership and community development programs	✓	Penyaluran program kemitraan Distribution of partnership programs
4.	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives	x	Belum/Tidak dijalankan Not yet implemented
5.	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of purchase of goods in installments made to Micro Enterprises, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO Available in the OTO Credit Guarantee product

No	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not been Implemented	Keterangan Description
6.	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives	n/a	Tidak ada None
7.	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of purchase of goods in installments made to Micro Enterprises, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO Available in the OTO Credit Guarantee product
8.	Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of the trade transactions carried out to Micro, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Distribusi Barang Available in the Goods Distribution Guarantee product
9.	Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa *surety bond* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of the procurement of surety bond goods and/or services carried out for Micro, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	✓	Terdapat pada produk *Surety Bond, Surety Bond Co-Guarantee*, Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa Available in Surety Bond products, Surety Bond Co-Guarantee, Guarantee of Construction Credit & Procurement of Goods/Services
10.	Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of bank guarantees (counter bank guarantees) made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi, Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi *Co-Guarantee* Available in the Credit Guarantee of Counter Bank Guarantee, Co-Guarantee Counter Bank Guarantee
11.	Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives	x	Belum dijalankan Not yet implemented
12.	Penjaminan *letter of credit* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Guarantee of letters of credit made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives	x	Belum dijalankan Not yet implemented
13.	Penjaminan kepabeanan (*Custom Bond*) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Customs guarantees (Custom Bonds) carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	✓	Terdapat pada *Customs Bond* Available in the Customs Bond
14.	Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Excise guarantees carried out on Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperative	✓	Terdapat pada produk *Customs Bond* Available in the Customs Bond product
15.	Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (*start up business*) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro Business, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives	✓	Terdapat pada produk penjaminan Kredit Umum, dan Penjaminan Kredit Mikro Available in General Credit guarantee products, and Micro Credit Guarantee
16.	Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Mikro Available in Micro Credit Guarantee products

No	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Has not been Implemented	Keterangan Description
17.	Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perseroan dengan badan usaha milik negara lain Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises	✓	Terdapat dalam produk *Surety Bond*, Penjaminan Bersama KUR, Penjaminan Pembiayaan *Invoice* Available in Surety Bond, Guarantee of KUR Joint, Guarantee of Invoice Financing products
18.	Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals in accordance with the purposes and objectives of the Company	x	Tidak dijalankan karena dialihkan seluruhnya kepada PT Jamsyar. Not implemented because it was transferred entirely to PT Jamsyar
19.	Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan Provision of management consulting services related to Guarantee business activities	✓	Terdapat di Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan II Available in Institutional Business Relations Division II
20.	Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi Ranking, management consulting, management services, assistance/empowerment, as well as other services for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, and Cooperatives	✓	Terdapat di Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan II Available in Institutional Business Relations Division II
21.	Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions in accordance with their authority	n/a	Tidak ada None

Kegiatan usaha utama Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan Bersama (*co-guarantee*) kecuali kegiatan usaha utama dalam hal Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan dan Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

The Company's main business activities can be conducted in the form of a Co-Guarantee, except for the main business activity in terms of providing management consulting services related to Guarantee and Rating business activities, management consulting, management services, mentoring/empowerment, as well as other services for Micro Enterprises, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives.

Produk dan Jasa yang Dijalankan Perusahaan

Berikut disampaikan produk dan jasa yang dijalankan Perusahaan per 31 Desember 2023.

Products and Services of the Company

The following are the products and services implemented by the Company as of December 31, 2023.

Jenis Produk Type of Product	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Guarantee of People's Business Credit	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum *bankable* yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif. Venture Capital Credit/Financing and/or investment to MSMEs in a productive and feasible, but not yet bankable business field which is guaranteed by the Guarantee Company. KUR distribution is expected to help develop productive businesses.
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP KPR Sejahtera Guarantee-Housing Financing Liquidity Facility	Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Guarantee on housing loan disbursement which is a collaboration program between the Bank and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia. This guarantee is given with low-interest rates and mild and fixed installments throughout the period of credit and is intended for low-income communities.

Jenis Produk Type of Product	Keterangan Description
Penjaminan Sistem Resi Gudang Guarantee on the Warehouse Receipt System	Kegiatan pemberian jaminan kepada Pengelola Gudang atas Kewajibannya kepada petani dalam melakukan pengelolaan barang komoditas. Activities of providing guarantees to warehouse managers for their obligations to farmers in managing commodity goods.
Penjaminan Kredit Umum Guarantee on General Credit	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus) Guarantee of credit/financing provided by the Guarantee Beneficiary to the Guaranteed for the purposes of additional Working capital and/or Investment in order to increase and develop the Guaranteed business (The guarantee process is carried out on a case-by-case basis).
Penjaminan Kredit Mikro Micro Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha mikro dan Kecil, untuk keperluan modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah *plafond* kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan yang proses penjaminan dilakukan secara otomatis Bersyarat (*Conditional Automatic Cover*/CAC) Guarantee of the credit given by the Recipient of Guarantee to the Guaranteed Micro and Small Entrepreneurs, for Working Capital needs and/or investment in the framework of increasing and developing productive businesses, in which the credit limit is in accordance with the microcredit provisions in the Guarantee Recipient. The guarantee process of which is automatic conditional (Conditional Automatic Cover/CAC).
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Guarantee of Construction Credit & Procurement of Goods/ Services	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan *Bouwheer* (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional. Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient to the Guaranteed for additional working capital for the construction and procurement of goods/services in accordance with the employment contract between the Guaranteed and Bowheer (the project owner), the source of which is from the State/Regional Budget, or State-owned Enterprises, or national private expenditure.
Penjaminan Kredit Multiguna Multipurpose Credit Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan lainnya (Non Bank) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/ instansi Pemerintah) baik yang penyalurnya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif. Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient of Other (Non-bank) Financial Institutions to the Guaranteed individuals (permanent employees of a Company/Government agency) whose distribution is conducted directly or through other institutions, and the source of return is deducted from guaranteed wages. The guarantee application process is done collectively.
Penjaminan Distribusi Barang Goods Distribution Guarantee	Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan pabrikan (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (analisa penjaminan dilakukan dengan *case by case*) Credit guarantees for credit/financing of distribution which is given provided by manufacturing companies to distributors who distribute goods. (guarantee analysis is done on case basis).
Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi Guarantee on Guarantee/ Counter Guarantee Bank	Penjaminan yang diberikan Penjamin (Perum Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan *Obligee* ketika Terjamin wanprestasi. A guarantee given by the Guarantor (Jamkrindo) to the Guarantee Recipient (Bank) that is unconditional and the Guarantor will pay compensation to the Guarantee Recipient for the Bank Guarantee (BG) disbursement claim submitted by the Obligee when the Guaranteed has defaulted.
Surety Bond Surety Bond	Suatu perjanjian 3 pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada *Obligee* bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *Obligee*, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut A 3-party agreement between the Guarantor and the Guaranteed on the basis of confidence jointly pledged to the Obligee that if due to any circumstances the Guaranteed has become negligent or fail to carry out work in accordance with the Obligee's demand, the Guarantor will be responsible to the Obligee to settle the Guaranteed's obligations.
Payment Bond	Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan. Guarantee issued by the Guarantor to guarantee the Guaranteed's payment to the Guarantee Recipient for the bailout facility given to the Guarantee Recipients whose funding source is from the Guarantee Receiver or other funding source designated by the Guarantee Receiver.
Customs Bond	Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang & impor dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada *Obligee* (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin (importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya. Guarantee on customs facilities, facilities for suspension/exemption of goods import duty and collection of other goods import duty to the Obligee (Directorate General of Customs and Excise) if the Guaranteed (importer/producer of exporters) does not complete its obligations.

Jenis Produk Type of Product	Keterangan Description
Penjaminan Keagenan Kargo Cargo Agency Guarantee	Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/*Obligee* (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/*Principal* (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/*Obligee*. A guarantee that is given to the Recipient of Guarantee/Obligee (The Transportation Service Provider) for guaranteed obligations/principal (Cargo Agent) in making payment of freight costs to the Recipient of Guarantee/Obligee.
Penjaminan *Invoice Financing* Guarantee of Invoice Financing	Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada *invoice* yang diterbitkan oleh penerima jaminan. Guarantee to guarantee the Guaranteed payment obligations based on invoices issued by Guarantee Recipients.
Penjaminan *Supply Chain Financing* Guarantee of Supply Chain Financing	Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka pengerjaan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari PERUSAHAAN INTI tertentu berupa KMK *pre Financing*, KMK *Post Financing* dan KMK Distributor. Guarantee on Credit given by the Guarantee Recipient to the Guaranteed in the context of Workmanship/project completion, acquisition of receivables/bills, procurement of goods and/or services, purchase of goods and/or services, based on contracts or similar documents from certain CORE COMPANIES in the form of KMK Pre Financing, KMK Post Financing, and KMK Distributor.
Penjaminan Kemaritiman /Jaring Maritime/Fisheries Guarantee	Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan. Guarantee on financing for working capital and investment used for activities in the field of Marine and Fisheries.
Penjaminan Pembiayaan Otomotif Automotive Financing Guarantee	Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna. Guarantee of credit/financing to own motorized vehicles provided by other financial institutions for the purpose of working capital and/or investment or multipurpose.
Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang Credit Guarantee on Subsidy Scheme of Warehouse Receipt	Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya. The activity of giving guarantee with the Warehouse Receipt Subsidy Scheme credit facilities to the guaranteed (such as Farmers, Farmer Groups, Combined Farmer Groups, and Cooperatives) which is distributed by recipients of guarantee (Executing Banks/Non-Bank Financial Institutions Providing Credit) with warehouse receipts issued through the Warehouse Receipt System as a collateral. This is in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments.
Penjaminan Kredit Resi Gudang Warehouse Receipt Credit Guarantee	Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan: Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang *(Collateral Management Agreement/ CMA)*. Guarantee of Warehouse Receipt Credit given to the Guaranteed channeled by the Guarantee Recipient with warehouse receipt issued through the Warehouse Receipt System (SRG) as collateral in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments. This type of guarantee can also be given by the Collateral Manager through a collateral management agreement (CMA) between Guaranteed, Guarantee Recipient, and Warehouse Management (CMA).
Penjaminan *Fintech* Fintech Guarantee	Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh *lender* melalui penyelenggara *(peer to peer landing)* kepada *borrower*. Guarantee on information technology-based money lending services that are channeled by lenders through the organizer (peer to peer lending) to the borrower.
Penjaminan KPR Guarantee of Home Ownership Loans	Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (*Non Bank*) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko. Guarantee of the Home Ownership Loan given by Other (Non-Bank) Financial Institutions Guarantee Recipient to the Guaranteed whose financing facilities are used to buy houses, flats/apartments, home offices, shop houses or other consumptive needs with collateral in the form of houses, apartment, home office, or shophouse.
Penjaminan *Capital Management Guarantee* (CMG) Guarantee on Capital Management Guarantee (CMG)	Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) *coverage* penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank. Guarantee on the loan portfolio in 1 (one) guarantee coverage as one of the Bank's Credit Risk Mitigation.

KOMPETENSI INTI
CORE COMPETENCY

Untuk mencapai tujuan perusahaan, tidak hanya dibutuhkan strategi yang baik tetapi juga diperlukan metode untuk mengoptimalkan kemampuan perusahaan agar memiliki lebih dari kompetitornya. Hal ini lah yang disebut dengan kompetensi inti. Dengan mengoptimalkan *core competency*, Perusahaan mampu menghubungkan nilai-nilai dari inti bisnis dengan kompetensi utama bisnisnya. Sehingga perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dan siap untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan.

To achieve company goals, good strategies and methods are needed so that the Company can offer more than its competitors. This is referred to as core competency. By optimizing the core competency, the Company is able to connect the values of its core business with its main business competencies. As a result, the Company will have a competitive advantage and will be ready to face future business challenges.

Kriteria Identifikasi Identification Criteria	*Accessibility*	Perluasan pasar melalui kolaborasi BUMN dan peningkatan efisiensi melalui kolaborasi *Holding* Market expansion through the collaboration of SOEs and increased efficiency through the collaboration of Holding.
	Unik/Langka Unique/Rare	Satu-satunya BUMN yang bergerak dibidang penjaminan khususnya untuk UMKM The only state-owned enterprise engaged in special guarantees for MSMEs.
	Value Creation	Mengoptimalkan reputasi dan citra terpercaya sebagai anggota Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan untuk membentuk *brand preference* di mata pelanggan Optimizing reputation and trusted image as a member of SOE's Holding in Insurance and Guarantee to establish brand preference in the eyes of customers.
Risiko Risk		1. Target bisnis tidak tercapai; 2. Kualitas layanan yang dinilai kurang baik oleh pelanggan/mitra seperti layanan penjaminan dan klaim yang melebihi SLA; 3. Pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak efisien; 4. Implementasi IT kurang sesuai dengan persyaratan *best practice* IT yang berlaku. 1. Business target not achieved; 2. Service quality that is considered poor by customers/partners, such as guarantee and claims services that exceed the SLA; 3. Inefficient implementation of operational activities; 4. IT implementation is not in accordance with applicable IT best practice requirements.
Kendala Constraint		1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM Terjamin; 2. Keterbatasan ekspansi produk-produk yang *profitable* sebagai dampak dari pandemi COVID-19; 3. Persaingan usaha yang semakin ketat. 1. The impact of the COVID-19 pandemic on the business continuity of Guaranteed MSME debtors; 2. Limited expansion of profitable products as a result of the COVID-19 pandemic; 3. Business competition is getting tighter.

Sesuai dengan kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, maka kompetensi inti Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Penjaminan terbesar di Indonesia;
2. Kapasitas penjaminan untuk UMKM sangat besar;
3. Jamkrindo lebih memahami UMKM;
4. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik di bidang penjaminan kredit UMKMK, kecepatan pembayaran klaim jaminan kredit, dan Melayani produk sesuai kebutuhan mitra (*customized product*);
5. Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari pemerintah;
6. Sistem informasi yang terintegrasi secara internal dan eksternal dengan mitra bisnis;
7. Memperkuat model bisnis dengan bergabung dalam Asuransi dan Penjaminan *Holding*.

In accordance with the above identification criteria and the results of the development of the Company's business model, the Company's core competencies are as follows:

1. The largest guarantee company in Indonesia;
2. The guarantee capacity of MSMEs is very large;
3. Jamkrindo better understands MSMEs;
4. Having good expertise and reputation in the field of MSMEs credit guarantee, speed of payment of credit guarantee claims, and serving products according to the needs of partners (customized products);
5. Having large capital and great support from the Government;
6. Information systems that are integrated internally and externally with partners;
7. Strengthening the business model by joining to the Insurance and Guarantee Holding.

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Risalah Rapat No. B.002/ EKT/DIRUT/RUPS/1/2022 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, maka Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

In order to ensure the implementation of professional business activities based on the Minutes of Meeting No. B.002/ EKT/DIRUT/RUPS/1/2022 concerning the Ratification of the Company's Long- Term Plan (RJPP) from 2020 to 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors shall determine the Vision, Mission and Corporate Culture as follows:

Visi Vision

Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

To become the main choice of business actors in guarantee services to support growth and equity of the national economy.

Misi Vision

Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Improving the financial accessibility of MSMEs and Cooperatives through the provision of innovative, competitive guarantees with continuous professional, effective and efficient services.

Kredo Perusahaan

Kredo perusahaan Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir, sebagai berikut:

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan;
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis;
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan;
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan;
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasaan pelanggan.

Budaya Perusahaan

Sesuai dengan arahan Menteri BUMN kepada seluruh Perusahaan BUMN, maka budaya perusahaan Jamkrindo terdiri dari 6 (enam) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "AKHLAK".

Company Credo

There are five points in the Credo of Jamkrindo, which are:

1. Trusted in carrying out guarantee business;
2. Responsive to changes in the business environment;
3. Excellent and Professional in service;
4. Sound corporate governance;
5. Leading in providing customer satisfaction.

Corporate Culture

In accordance with the direction of the Minister of SOEs to all state-owned enterprises, Jamkrindo's corporate culture consists of 6 (six) items of cultural values embraced by the Company, namely the culture of "AKHLAK".

AKHLAK

Amanah
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

Kompeten
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Harmonis
Saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Adaptif
Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Kolaboratif
Membangun kerja sama yang sinergis

Trusted
Uphold the given trust

Competent
Continuously learn and develop capabilities

Harmonious
Care to each other and respect differences

Loyal
Prioritize dedication for Nation and Country

Adaptive
Continuously innovate to respond and make change

Collaborative
Build strategic alliance

MAKNA LOGO
MEANING OF LOGO

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG



Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

- **Warna Biru** Blue Color
- **Warna Putih** White Color

Ikon Grafis
The Graphic Icon

Ikon grafis pada logo membentuk konfigurasi huruf "J" yang tegas dan bersudut, yang melambangkan ketegasan Perusahaan, orientasi yang fokus pada tujuan, serta konsistensi pada visi. Huruf "J" tersebut membentuk sebuah kunci berwarna putih, yang bermakna dasar dari moto Perusahaan, yaitu "Kunci Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) menuju sukses". Huruf "J" pada logo terbentuk dari 3 (tiga) garis tegas berwarna putih, yang melambangkan kesatuan dari inti pelayanan Perusahaan, yaitu Jaminan terhadap UMKMK.

Visual logo Perusahaan juga disematkan frasa "A Member of IFG" yang menggambarkan bahwa PT Jamkrindo merupakan bagian dari semangat kolaboratif IFG Holding dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, dan investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi, sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

The graphic icon on the logo forms a strict and angular "J" letter configuration, which symbolizes firmness, an orientation that focuses on goals, and consistency in vision. The letter "J" forms a white key, which means the basis of the Company's motto is "the key to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs) towards success". The letter "J" in the logo is formed from 3 (three) white lines, which symbolize the unity of the core of the Company's service, namely the Guarantee for Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives.

The Company's visual logo is also embedded with the phrase "A Member of IFG" which illustrates that PT Jamkrindo is part of the collaborative spirit of IFG Holding in moving to become a leading, trusted and integrated insurance, guarantee and investment service provider, as a driving force for an inclusive and sustainable ecosystem in Indonesia.

Akronim Perusahaan
The Company's Acronym

Akronim Perusahaan yaitu "JAMKRINDO" merupakan singkatan dari Jaminan Kredit Indonesia. Akronim ini terucap sangat familiar, dengan tujuan membangun "*Brand Awareness*" dan identitas melalui pengucapannya, yang secara psikologis akan terekam dalam otak manusia dan memungkinkan adanya pengucapan berulang-ulang. Pemilihan huruf yang tegas, jelas, kokoh, namun sederhana dan dinamis didasari pada visi Perusahaan, yang melambangkan kepemimpinan dengan ketangguhan dan ketegasan. Jenis *bold* atau cetak tebal bertujuan untuk memperkuat makna simbolisasi nama Perusahaan dan konotasi yang relevan terhadap *core* bisnis Perusahaan.

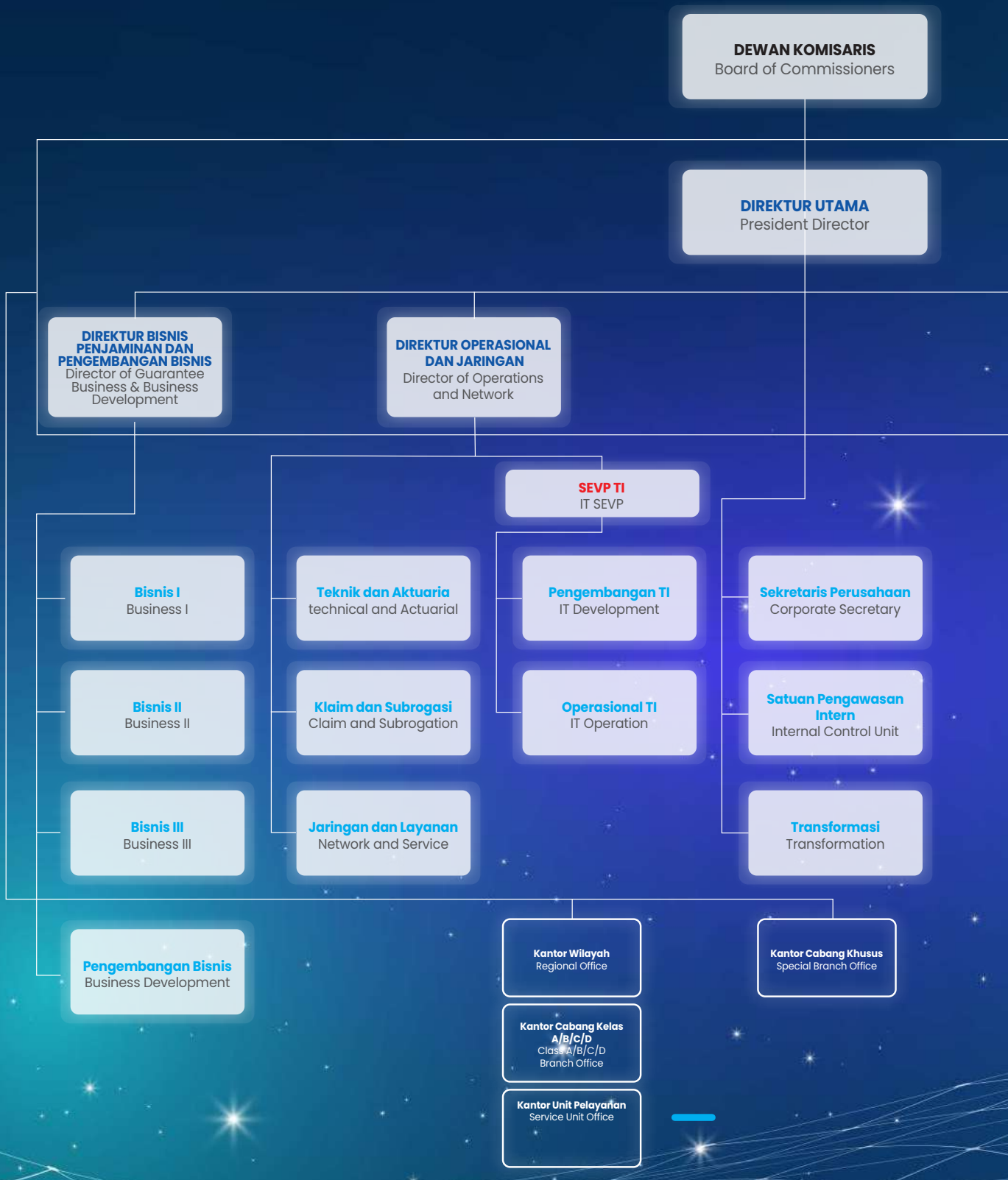
The Company's acronym, "JAMKRINDO" stands for 'Jaminan Kredit Indonesia' (Indonesian Credit Guarantee). This acronym sounds very familiar, which is appropriate with the aim of building "Brand Awareness" and identity through its pronunciation. The expectation of using this acronym is that it psychologically will be recorded in the human brain and allow for repeated pronunciation. The choice of letters that are firm, clear, sturdy, yet simple and dynamic is based on the Company's vision, which symbolizes leadership with toughness and firmness. Bold type lettering aims to strengthen the meaning of the company name and the connotations relevant to the core business of the Company.

Warna Biru melambangkan konsentrasi, ketenangan, bekerja sama, dapat menerima segala masukan, peka, cerdas, dan bersatu. Hal ini sejalan dengan bidang usaha Perusahaan, yaitu pelayanan dan kemitraan. Putih merupakan lambang kesucian, kebersihan, dan ketepatan dari Perusahaan untuk mewujudkan visinya. Komposisi kedua warna tersebut memberikan nuansa ketenangan dan kematangan jasa pelayanan yang terbentuk karena keteguhan memegang budaya Perusahaan.

Blue symbolizes concentration, calmness, cooperation, the ability to receive all input, sensitivity, smart, and unity; this is in line with the Company's business sector, namely service and partnership. The color White is symbol of holiness, cleanliness, and accuracy of the Company to realize its vision. The composition of the colors provides a nuance of calm and maturity in the service that is established because of the firmness in holding on to the Company's culture.


Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia
A member of IFG

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

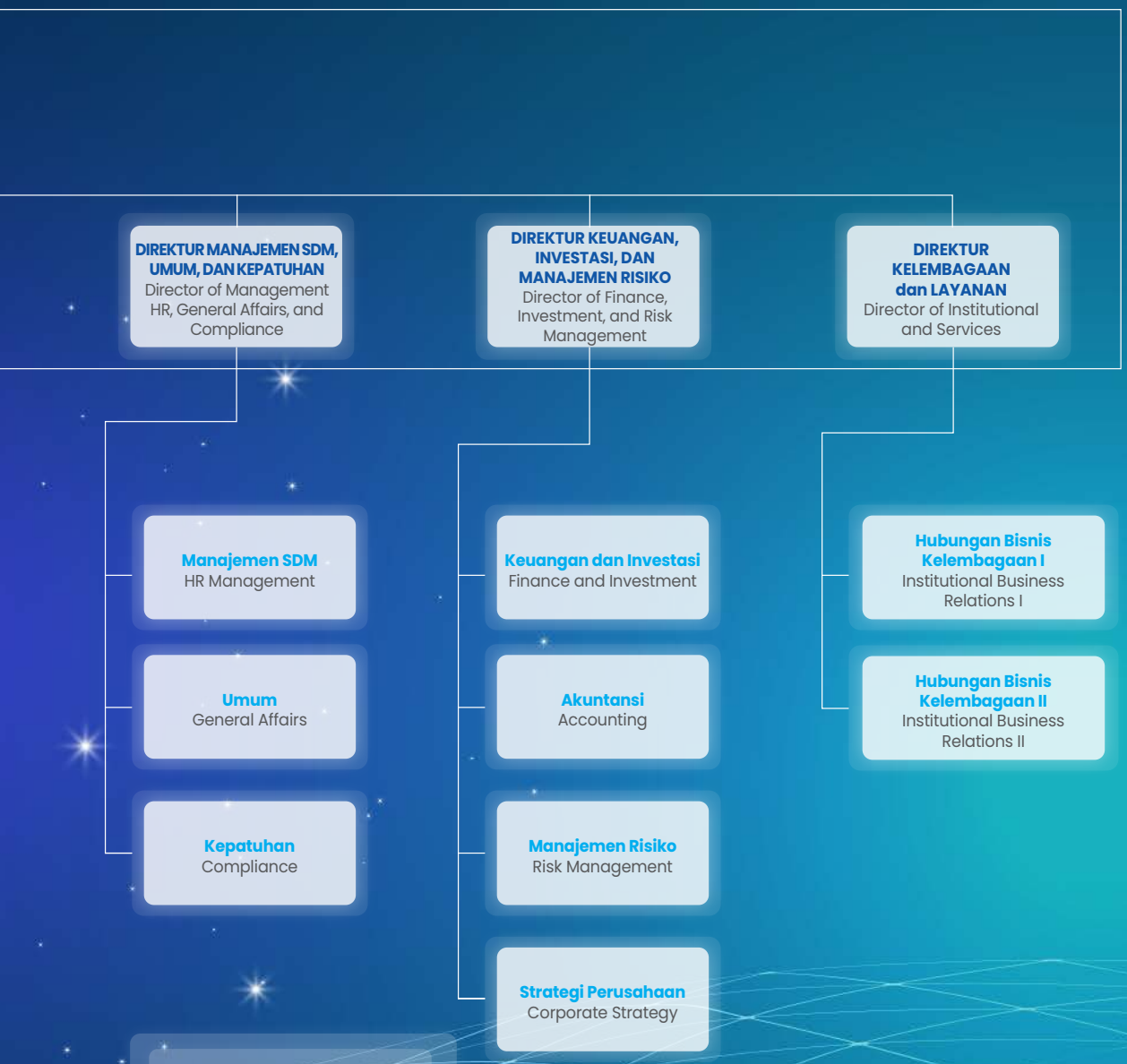


Bagi Perusahaan salah faktor terpenting dalam kesuksesan pengelolaan operasional adalah bagaimana memiliki strategi dalam mengembangkan dan mendesain struktur organisasinya agar efektif dan efisien. Perusahaan senantiasa membuat strategi pengembangan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Pengembangan yang dilakukan Perusahaan berfokus untuk membangun organisasi sesuai dengan fungsinya saat ini dan menyesuaikan untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan.

Perusahaan telah menetapkan ketentuan berkaitan dengan penyesuaian Struktur Organisasi Perusahaan sesuai Ketetapan Direksi No: 01/KD/5/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Struktur Organisasi Jamkrindo, sebagai berikut :

For the Company, one of the most important factors in successful operational management is how to have a strategy in developing and designing their organizational structure so that it is effective and efficient. The Company always creates organizational development strategies that are tailored to the needs and challenges it faces. The development carried out by the Company focuses on building the organization according to its current function and adapting it to achieve sustainable goals.

The Company has established provisions relating to adjustments to the Company's Organizational Structure in accordance with Directors' Decree No: 01/KD/5/VI/2023 dated June 5, 2023 concerning Organizational Structure of Jamkrindo, as follows:



PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Ari Wahyuni
Komisaris
Commissioner

Hernita Alius
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Krisna Wijaya
Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner



Di sepanjang tahun 2023, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris yaitu Bapak Angger P. Yuwono resmi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan per 31 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham No. SK-217/MBU/07/2023 dan 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 Dengan demikian, per 31 Desember 2023 Perusahaan memiliki 6 (enam) Dewan Komisaris yang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen di mana salah satunya adalah Komisaris Utama.

Berikut adalah profil Dewan Komisaris per 31 Desember tahun 2023 :

Throughout 2023, there were changes to the composition of the Board of Commissioners, namely Mr. Angger P. Yuwono officially serves as Commissioner of the Company as of July 31, 2023 based on Shareholders' Decree No. SK-217/MBU/07/2023 and 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023. Thus, as of December 31, 2023, the Company has 6 (six) Board of Commissioners consisting of 3 (three) Commissioners and 3 (three) Independent Commissioners, one of whom is the President Commissioner.

The following are the profiles of the Board Commissioners as of December 31, 2023 :

Muhammad Muchlas Rowi
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Desty Arlaini
Komisaris
Commissioner

Angger P. Yuwono
Komisaris
Commissioner



Krisna Wijaya



Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/
Independent Commissioner

Periode Jabatan
2022-2027, Periode Pertama
Term of Office
2022-2027, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	68 tahun 68 years old
Kelahiran Birth	:	Jakarta/22 Juli 1955 Jakarta, July 22, 1955
Domisili Domicile	:	Jakarta Selatan, DKI Jakarta South Jakarta, DKI Jakarta
Pendidikan Education	:	• Program Doktoral Studi Antar Bidang, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (2009) • Jurusan Ilmu-ilmu Sosial, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (1990) • Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (1980) **Short Course** (1) Harvard Business School, Corporate Social Responsibility Program, 2011, (2) Standford School of Business and Chicago Booth, Chicago, AS Director's Program 2012, (3) Wharton Business School, Pensylvenia, AS, Program Strategic Decision Making, 2013, (4) Cambridge University Business School, London, Program Strategic Decision Making,2014 • Doctoral Program in Interdisciplinary Studies, Graduate Faculty, Gadjah Mada University (2009) • Department of Social Sciences, Master of Management Study Program, Universitas Gadjah Mada (1990) • Department of Agricultural Social Economics, Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University (1980) **Short Course** (1) Harvard Business School, Corporate Social Responsibility Program, 2011, (2) Standford School of Business and Chicago Booth, Chicago, USA Director's Program 2012, (3) Wharton Business School, Pensylvenia, USA, Strategic Decision Making Program, 2013, (4) Cambridge University Business School, London, Strategic Decision Making Program, 2014.
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	SK-243/MBU/10/2022 DAN 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022 SK-243/MBU/10/2022 and 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-7/KDK.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-7/KDK.05/2023 dated February 27, 2023
Riwayat Profesi Professional History	:	Anggota Tim Penilai Klarifikasi/ Presentasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bidang Perbankan OJK (2022-sekarang), Komisaris Utama/Independen PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (2020-2022), Komisaris Utama PT Danareksa (Persero) (Mei 2020-Oktober 2020), Komisaris Utama PT Brilian Indah Gemilang (2018-sekarang), Komisaris Independen PT Adira Finance (Tbk) (2016-sekarang), Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) (2016-2022), Komisaris Utama/Independen PT BNI Life (2015-2018), Anggota Dewan Pengawas Yayasan Adaro Membangun Negeri (2014-sekarang), Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Tbk) (2010-2015), Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Chub Syariah Insurance (2009-sekarang), Komisaris PT Bank Danamon (Tbk) (2008-2010), Kepala Eksekutif/Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2005-2007), Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) (Juli 2005-September 2005), Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) (2000-2005). Member of the Assessment Team for Clarification/Presentation of the OJK Banking Sector Capability and Proper Test (2022-present), President/Independent Commissioner of PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (2020-2022), President Commissioner of PT Danareksa (Persero) (May 2020-October 2020) , President Commissioner of PT Brilian Indah Gemilang (2018-present), Independent Commissioner of PT Adira Finance (Tbk) (2016-present), Director of the Indonesian Banking Development Institute (LPPI) (2016-2022), President/ Independent Commissioner of PT BNI Life (2015 -2018), Member of the Supervisory Board of the Adaro Building the Nation Foundation (2014-present), Independent Commissioner of PT Bank Mandiri (Tbk) (2010-2015), Member of the Sharia Supervisory Board of PT Chub Syariah Insurance (2009-present), Commissioner of PT Bank Danamon (2018-2018). Tbk) (2008-2010), Chief Executive/Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation (LPS) (2005-2007), Independent Commissioner of PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) (July 2005-September 2005), Director of PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) (2000-2005).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Krisna Wijaya memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. 1. Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Chub Syariah Insurance (2009 sd Sekarang). 2. Anggota Dewan Pengawas Yayasan Adaro Membangun Negeri (2014 sd 2023) sudah selesai Nov 2023. 3. Komisaris Independen PT Adira Finance (Tbk) (2016 sd Sekarang) 4. Komisaris Utama/Independen PT Brilian Indah Gemilang (2018 sd sekarang). 5. Anggota Tim Penilai Klarifikasi/Presentasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bidang Perbankan, OJK (2015 sd sekarang). 6. Honorable Faculty Lembaga Pengembangan Perkembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 2023 sd sekarang. Krisna Wijaya holds multiple concurrent positions at other companies/institutions. 1. Member of Sharia Supervisory Board of PT Chub Syariah Insurance (2009 to present). 2. Member of the Supervisory Board of Adaro Membangun Negeri (2014 to 2023) has finished Nov 2023. 3. Independent Commissioner of PT Adira Finance (Tbk) (2016 to present). 4. President Commissioner/Independent of PT Brilian Indah Gemilang (2018 to present). 5. Member of the Assessment Team for Clarification/Presentation of Capability and Appropriateness Assessment for Banking, OJK (2015 to present). 6. Honorable Faculty of the Indonesian Banking Development Institute (LPPI) 2023 until now.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Krisna Wijaya tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama. Krisna Wijaya does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	Manajemen Risiko Level I, II, III, 3rd Level of International Risk Management, Level IV, Level V, Key Risk Management Challenges, dan Sertifikasi Profesi Penjaminan. Risk Management Level I, II, III, 3rd Level of International Risk Management, Level IV, Level V, Key Risk Management Challenges, and Guarantee Professional Certification.

Muhammad Muchlas Rowi



Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Jabatan
17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024,
Periode Pertama
Term of Office
October 17, 2019 – October, 17 2024,
1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	51 tahun 51 years old
Kelahiran Birth	:	Garut, 31 Agustus 1972 Garut, August 31, 1972
Domisili Domicile	:	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	• (S3) Doktoral Hukum di UNTAG Jakarta (2023) • (S3) Doktoral Manajemen di STAI Surabaya (2022) • (S2) Magister Manajemen di STIE IBMT Surabaya (2019) • (S1) Sarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (1998) • (S1) Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha (2020) • Doctor of Law, University of August 17, 1945 Jakarta (2023) • Doctor of Management, STAI Surabaya (2022) • Master of Management, STIE IBMT Surabaya (2019) • Bachelor of Philosophy, Gadjah Mada University (1998) • Bachelor of Law, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha (2020)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Anggota Dewan Pengawas Independen diemban sejak 17 Oktober 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas Independen/Komisaris Independen ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan M Muchlas Rowi diubah dari Anggota Dewan Pengawas Independen menjadi Komisaris Independen. The position of Member of the Independent Supervisory Board has been carried out since October 17, 2019, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is his first period as the Independent Supervisory Board/Independent Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, M Muchlas Rowi's position was changed from Member of the Independent Supervisory Board to Independent Commissioner.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-9/KDK.05/2020 tanggal 6 mei 2020 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-9/KDK.05/2020 dated May 6, 2020
Riwayat Profesi Professional History	:	Dosen Institut Bisnis Muhammadiyah, Bekasi (2020 - sekarang), Komisaris PT Semen Indonesia Beton (2020-2023), Bendahara Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Bandung (2021-sekarang), Pemilik PT Monami garment Sukabumi (2021-sekarang), Pimpinan Umum Monday Media Group (2015-sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014-sekarang), General Manager Marketing PT Intan Sejati Klaten (2016-2018). Lecturer at the Muhammadiyah Business Institute, Bekasi (2020-present), Commissioner of PT Semen Indonesia Beton (2020-2023),Treasurer of the Board of Trustees (BPH) of Universitas Muhammadiyah Bandung (2021-present), Owner of PT Monami garment Sukabumi (2021-present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014-present), General Manager of Marketing of PT Intan Sejati Klaten (2016-2018).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	M Muchlas Rowi memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain 1. Dosen Institut Bisnis Muhammadiyah, Bekasi (Juni 2022 - sekarang) 2. Komisaris PT Semen Indonesia Beton (2020-sekarang) 3. Bendahara Badan Pembina Harian (BPH) Institut Bisnis Muhammadiyah (2019-sekarang) 4. Pemilik Rosbuck Milk & Coffee (2018-sekarang) 5. Pimpinan Umum Monday Media Group (2015-sekarang) M Muchlas Rowi holds multiple concurrent positions at other companies/institutions. 1. Lecturer at the Muhammadiyah Business Institute, Bekasi (June 2022-present) 2. Commissioner of PT Semen Indonesia Beton (2020-present) 3. Treasurer of Daily Development Board of Muhammadiyah Business Institute (2019-present) 4. Rosbuck Milk & Coffee's owner (2018-present) 5. Managing Director of Monday Media Group (2015-present)
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Muhammad Muchlas Rowi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama. Muhammad Muchlas Rowi does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	GRCCE (Governance, Risk, and Compliance Certified Executive) GRCCE (Governance, Risk, and Compliance Certified Executive)

Hernita Alius



Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Jabatan
18 Januari 2021-17 Januari 2026,
Periode Pertama
Terms of Office
January 18, 2021 – January 17, 2026,
1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	64 tahun 64 years old
Kelahiran Birth	:	Jakarta, 13 Oktober 1959 Jakarta, Oktober 13, 1959
Domisili Domicile	:	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	• (S2) Magister Sains, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2006) • (S2) Magister Manajemen Universitas Bhayangkara (2004) • (S1) Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (1986) • (DIII) Diploma dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1981) • Master of Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (2006) • Master of Management, Bhayangkara University (2004) • Bachelor of Economics from Faculty of Economics, Krisnadwipayana University (1986) • Diploma III from The State Accounting College (1981)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Komisaris Independen diemban sejak 18 Januari 2021 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Jamkrindo, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para Pemegang Saham PT Jamkrindo No. SK-19/MBU/01/2021 dan No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Komisaris Independen ini merupakan periode pertama, sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Perusahaan. The position of the Independent Commissioner has been carried out since January 18, 2021, through the resolution of shareholders of PT Jamkrindo, the Decree of the Minister of SOEs and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the capital owner of PT Jamkrindo No. SK-19/MBU/01/2021 and No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia. This position is her first period as the Independent Commissioner, previously she had never served in the Supervisory Board/ Board of Commissioners of the Company.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-17/KDK.05/2021 tanggal 20 April 2021 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-17/KDK.05/2021 dated April 20, 2021.
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur PT Indobagus Investama (2018), Kepala di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2016-2017), Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu (2012-2016), Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2009-2012), Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang (2006-2009), dan Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang (2000-2006) Director of PT Indobagus Investama (2018), Head of Jakarta Pajak Pratama Tax Office, Cilandak (2016-2017), Supervisor of Tax Inspector at Jakarta Pajak Pratama Tax Office, Pasar Minggu (2012-2016), Supervisor of Tax Inspector at Jakarta Pajak Pratama Tax Office, Cilandak (2009-2012), Supervisor of Tax Inspector at Tangerang Madya Tax Office (2006-2009), Supervisor of Tax Inspector at Tangerang Tax Inspection and Investigation Office (2000-2006).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Hernita Alius tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Hernita Alius does not hold any concurrent position at other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Hernita Alius tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Hernita Alius does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	Manajemen Risiko Level 1 Risk Management Level I

Ari Wahyuni



Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan
3 Januari 2019-3 Januari 2024, Periode Pertama
Term of Office
January 3, 2019 – January 3, 2024, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	57 tahun 57 years old
Kelahiran Birth	:	Surabaya, 9 November 1966 Surabaya, November 9, 1966
Domisili Domicile	:	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Pendidikan Education	:	• (S2) Master of Public Management Carnegie-Mellon University (1994) • (S1) Ilmu Hukum (keperdataan) Universitas Diponegoro (1990) • Master of Public Management, Carnegie Mellon University (1994) • Bachelor of Law (civil affairs) Diponegoro University (1990)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Anggota Dewan Komisaris diemban sejak 3 Januari 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama. Jabatan Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Ari Wahyuni diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris. The position of Member of the Board of Commissioners has been carried out since January 3, 2019, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No. SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is her first period as the Supervisory Board. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Ari Wahyuni's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-66/KDK.05/2019 tanggal 6 Agustus 2019 Board of Commissioners Decree No. KEP-66/KDK.05/2019 dated August 6, 2019
Riwayat Profesi Professional History	:	Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Desember 2021-sekarang), Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018-Desember 2021), Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013-September 2018), Dewan Pengawas PERURI (2013-2018), Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2009-2013), Kepala Pusdiklat Keuangan Umum BPPK (2008-2009), Kepala Bagian Pengawasan Kebijakan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset BAPEPAM (2006-2008), Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, Bapepam (2004-2006), Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Perundangan-undangan dan Bantuan Hukum BAPPEPAM (1999-2000). Head of Organization and Management Bureau, Secretariat General of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (December 2021-present), Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (September 2018-December 2021), Director of Investment Management System of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2013-September 2018), PERURI Supervisory Board (2013-2018), Secretary of the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2009-2013), Head of BPPK General Finance Education and Training Center (2008-2009), Division Head of Investment Policy Supervision, Investment Management and Research Bureau of BAPEPAM (2006-2008), Division Head of Investment Policy Development, Investment Management and Research Bureau of BAPEPAM (2004-2006), Division Head of Legislation, Legislation Bureau, and Legal Assistance Bureau of BAPPEPAM (1990-2000).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Desember 2021-sekarang) Head of Organization and Management Bureau, Secretariat General of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (December 2021-present)
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Ari Wahyuni tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Ari Wahyuni memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian Keuangan Ari Wahyuni does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors. Ari Wahyuni has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of Finance.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	Enterprise Risk Management Enterprise Risk Management

Desty Artaini



Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan
2 Juni 2021-2 Juni 2026,
Periode Pertama
Term of Office
June 2, 2021 – June 2, 2026,
1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	47 tahun 47 years old
Kelahiran Birth	:	Palembang, 4 Desember 1976 Palembang, December 4, 1976
Domisili Domicile	:	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Pendidikan Education	:	• (S2) Magister jurusan Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (2006) • (S1) Sarjana jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI (2000) • (D3) Ahli Madya jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997) • Master of Management Science, University of Indonesia (2006) • Bachelor of Economics majoring in Accounting, YAI College (2000) • Diploma 3 Associate of Accounting, State College of Accounting (1997)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Komisaris diemban sejak 2 Juni 2021 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-182/MBU/06/2021 dan Keputusan Direktur Utama PT BPUI (Persero) No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan dalam Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. The position as Commissioner has been carried out since June 2, 2021, through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-182/MBU/06/2021 and the Decree of President Director of PT BPUI (Persero) No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 dated June 2, 2021 concerning Dismissal and Appointment Board of Commissioners Member of PT Jaminan Kredit Indonesia. This position is her first period as Commissioner.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-50/KDK.05/2021 tanggal 10 September 2021 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-50/KDK.05/2021 dated September 10, 2021
Riwayat Profesi Professional History	:	1. Riwayat Profesi di Kementerian BUMN Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (14 Maret 2021-sekarang), Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN (29 Mei 2020-25 April 2021), Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I Kementerian BUMN (8 Januari 2018-20 Juni 2019), Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia Kementerian BUMN (7 Juli 2017-8 Juni 2020), Kepala Sub Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Pehubungan IIa-2 Kementerian BUMN (22 Oktober 2015-21 Oktober 2015), Kepala Sub Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pehubungan IIIa Kementerian BUMN (9 Mei 2014-21 Oktober 2015), Sub Bidang Usaha Industri Primer IIIa1 Kementerian BUMN (19 September 2013-8 Mei 2014), Kepala Sub Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik IIIb1 Kementerian BUMN (3 September 2012-18 Spetember 2013), Kepala Sub Bidang Usaha Industri Primer IIb2 Kementerian BUMN (8 Oktober 2010-2 September 2012), Kepala Sub Bidang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Usaha Penunjang Pertanian Kementerian BUMN (21 Mei 2008-7 Oktober 2010) 2. Riwayat Profesi di BUMN Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia (2 Juni 2021-sekarang), Komisaris PT Perkebunan Nusantara VI (9 Juni 2020-3 Juni 2021), Komisaris PT Perkebunan Nusantara II (19 Maret 2018- 9 Juni 2020), Sekretaris Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (1 Oktober 2013-2 Juli 2018), Sekretaris Dewan Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (28 November 2011-26 Februari 2014) 1. Professional History at the Ministry of SOEs Assistant Deputy for Logistics Services of the Ministry of SOEs (March 14, 2021-present), Assistant Deputy for Plantation and Forestry of the Ministry of SOEs (May 29, 2020-April 25, 2021), Assistant Deputy for Agro and Pharmaceutical Industry Business I of the Ministry of SOEs (January 8, 2018-June 20, 2019), Head of Agro and Pharmaceutical Industry Business Ia of the Ministry of SOEs (July 7, 2017-June 8, 2020), Head of Construction and Transportation Infrastructure IIa-2 of the Ministry of SOEs (October 22, 2015-21 October 2015), Head of Sub Division of Transportation Facilities and Infrastructure IIIa of the Ministry of SOEs (May 9, 2014-21 October 2015), Sub Division of Primary Industry IIIa1 of the Ministry of SOEs (September 19, 2013-8 May 2014), Head of Sub Division of Infrastructure and Logistics IIIb1 of the Ministry of SOEs (September 3, 2012-18 September 2013), Head of Sub Division of Primary Industry IIb2 of the Ministry of SOEs (October 8, 2010-2 September 2012), Head of Sub Division of Governance and Risk Management of Agriculture Support Business of the Ministry of SOEs (May 21, 2008-October 7, 2010) 2. Professional History in SOEs Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia (June 2, 2021-present), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara VI (June 9, 2020-June 3, 2021), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara II (March 19, 2018-June 9, 2020), Secretary of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (October 1, 2013-July 2, 2018), Secretary of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (November 28, 2011-February 26, 2014)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (2021-sekarang) Assistant Deputy for Logistics Services of the Ministry of SOEs (2021-present)
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Desty Arlaini tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Desty Arlaini memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham seri A melalui rangkap jabatannya di Kementerian BUMN. Desty Arlaini does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors. Desty Arlaini has affiliation with Series A shareholders through her concurrent position at the Ministry of SOEs.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	• Certified Risk Management Professional (CRMP) • Certified Risk Management Officer (CRMO)

Angger P Yuwono

Komisaris Utama/Independen
Commissioner

Periode Jabatan
31 Juli 2023 – 31 Juli 2028,
Periode Pertama
Term of Office
July 31, 2023 – July 31, 2028,
1st Period



Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	64 tahun 64 years old
Kelahiran Birth	:	Magelang, 17 November 1959 Magelang, November 17, 1959
Domisili Domicile	:	Indonesia
Pendidikan Education	:	(S1) Matematika, Institut Teknologi Bandung (ITB) (1985) Bachelor of Mathematics, Bandung Institute of Technology (1985)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Bergabung dalam jajaran Dewan Komisaris PT Jamkrindo, melalui Surat Keputusan Para Pemegang No. SK-217/MBU/07/2023 dan No. 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023. Jabatan dalam Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. Joining the Board of Commissioners of PT Jamkrindo through the Decree of Shareholders No. SK-217/MBU/07/2023 and No. 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 dated July 31, 2023. This position is his first period as Commissioner.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Masih Dalam Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan In the process of the Fit and Proper Test
Riwayat Profesi Professional History	:	Beliau mengawali karir sebagai Dosen di beberapa Universitas di Jakarta pada tahun 1985-1987, selanjutnya menjabat sebagai Manager Aktuaria & IT pada PT Asuransi Intan Life tahun 1987-1990, Direktur & Aktuaris Cigna Life Indonesia pada tahun 1990-1999, Direktur PT AIA Indonesia (AIG Group) pada tahun 1999-2001. Beliau juga pernah menjabat Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri pada tahun 2001-2004, dan sejak Juni 2021 diangkat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam bidang organisasi industri perasuransiam beliau pernah menjadi Ketua Bidang Asuransi Jiwa pada Dewan Asuransi Indonesia (DAI) pada tahun 1999-2002 dan Pendiri & Ketua Umum Pertama Asosiasi Assuransi Jiwa Indonesia (AAJI) tahun 2002 – 2004. He started his career as a Lecturer at several Universities in Jakarta in 1985-1987, then served as Actuarial & IT Manager at PT Asuransi Intan Life in 1987-1990, Director & Actuary of Cigna Life Indonesia in 1990-1999, Director of PT AIA Indonesia (AIG Group) in 1999-2001. He also served as President Director of PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri in 2001-2004, and since June 2021 has been appointed as President Director of PT Asuransi Jiwasraya (Persero). In the field of insurance industry organizations, he was Chairman of the Life Insurance Division at the Indonesian Insurance Council (DAI) in 1999-2002 and Founder & First Chairman of the Indonesian Life Insurance Association (AAJI) in 2002-2004.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2021- Desember 2023 President Director of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2021-December 2023
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Angger P Yuwono tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Angger P Yuwono memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham melalui rangkap jabatannya di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Angger P. Yuwono does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors. Angger P. Yuwono has affiliation with Shareholders through his concurrent position at PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	• Fellow of the Society of Actuary of Indonesia (FSAI) • Chartered Financial Consultant (ChFC) • Certified In Risk Governance Professional (CRGP)

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG

PROFIL DIREKSI
PROFILES OF DIRECTORS

Di sepanjang tahun 2023, terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A dan Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B, dengan kronologi sebagai berikut:

Throughout 2023, there were changes to the composition of the Board of Directors based on the Decree of the Minister of SOEs as Series A Shareholders and the BPUI Decree as Series B Shareholders, with the following chronology:

Susunan Direksi dari 27 Oktober 2022 – 31 Juli 2023
Composition of Board of Directors from October 27, 2022 to July 31, 2023

Alasan Perubahan
Reasons for Change

Nama Name	**Jabatan** Position	
Hendro Padmono	Direktur Utama President Director	Meninggal Dunia
Kadar Wisnuwarman	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Networks	Pemberhentian Jabatan
Suwarsito	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	Peralihan jabatan menjadi Direktur Operasional dan Jaringan Transfer of position to Director of Operations and Networks

Susunan Direksi dari 31 Juli 2023 – 31 Desember 2023
Composition of Board of Directors from July 31, 2023 to December 31, 2023

Alasan Perubahan
Reasons for Change

Nama Name	**Jabatan** Position	
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	Penunjukan oleh pemegang saham dengan Nomor SK-21/MBU/07/2023 – 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 Appointment by shareholders with Number SK-21/MBU/07/2023 – 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Penunjukan oleh pemegang saham dengan Nomor SK-244/MBU/10/2022 – 014/KepSIr-PS/BPUI/X/2022 Appointment by shareholders with Number SK-244/MBU/10/2022 – 014/KepSIr-PS/BPUI/X/2022
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of Human Resources Management, General Affairs, and Risk Management	Penunjukan oleh pemegang saham dengan Nomor SK-244/MBU/10/2022 – 014/KepSIr-PS/BPUI/X/2022 Appointment by shareholders with Number SK-244/MBU/10/2022 – 014/KepSIr-PS/BPUI/X/2022
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutions and Services	Penunjukan oleh pemegang saham dengan Nomor SK-244/MBU/10/2022 – 014/KepSIr-PS/BPUI/X/2022 Appointment by shareholders with Number SK-244/MBU/10/2022 – 014/KepSIr-PS/BPUI/X/2022
Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Networks	Penunjukan oleh pemegang saham dengan Nomor SK-21/MBU/07/2023 – 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 Appointment by shareholders with Number SK-21/MBU/07/2023 – 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	Penunjukan oleh pemegang saham dengan Nomor SK-21/MBU/07/2023 – 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023 Appointment by shareholders with Number SK-21/MBU/07/2023 – 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023

Berikut adalah profil Direksi per 31 Desember tahun 2023 :

The following are the profiles of Board of Directors as of December 31, 2023 :

Achmad Ivan S Soeparno
Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan
Director of Human Resources Management, General Affairs, and Compliance

Suwarsito
Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operations and Network

Akhmad Purwakajaya
Direktur Utama
President Director



Abdul Bari
Direktur Kelembagaan dan Layanan
Director of Institutions and Services

Alia Nur Fitri
Direktur Keuangan dan Investasi
Director of Finance and Investment

Henry Panjaitan
Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Business of Guarantee



Hendro Padmono

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan
27 Oktober 2022 – 26 Oktober 2027,
Periode Pertama
Term of Office
October 27, 2022 – October 26, 2027,
1st Period



Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	57 tahun 57 years old
Kelahiran Birth	:	Yogyakarta, 23 Desember 1966 Yogyakarta, December 23, 1966
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	• (S2) Master of Science Universitas Gadjah Mada (2012) • (S1) Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (1991) • Master of Science, Gadjah Mada University (2012) • Bachelor of Agriculture Technology, Gadjah Mada University (1991)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 27 Oktober 2022 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/10/2022 – 014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia The position as Director has been carried out since October 27, 2022, through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-244/MBU/10/2022 – 014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 concerning Dismissal, Transfer of Position, and Appointment of the Members of Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-1/KDK.05/2023 tanggal 30 Januari 2023 OJK Board of Commissioners Decree No. Kep-1/KDK.05/2023 dated January 30, 2023
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur Utama PT Jamkrindo (27 Oktober 2022 – Sekarang), SEVP Fixed Assets Management & Procurement PT Bank BRI (2021 – 2022), Komisaris Utama PT Bringin Karya Sejahtera (BRIKS) (2021 – 2022), Pemimpin Wilayah Jakarta 2 PT Bank BRI (2020 – 2021), Pemimpin Wilayah Bandung PT Bank BRI (2019 – 2020), Pemimpin Wilayah Yogyakarta PT Bank BRI (2018-2019), Kepala Divisi Bisnis Retail & Menengah PT Bank BRI (2017 – 2018), Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis Jakarta 1 PT Bank BRI (2016 – 2017), Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis KW Semarang PT Bank BRI (2014-2016), Pemimpin Cabang Kebayoran Baru PT Bank BRI (2013-2014), Pemimpin Cabang Yogya Cik Di Tiro PT Bank BRI (2010-2013), Kepala Bagian Humas Corporate Secretary PT Bank BRI (2008-2010), Pemimpin Cabang Denpasar Kuta (2006-2008), Pemimpin Cabang BRI Atambua (2004-2006) President Director of PT Jamkrindo (27 October 2022-present), SEVP Fixed Assets Management & Procurement of PT Bank BRI (2021-2022), President Commissioner of PT Bringin Karya Sejahtera (BRIKS) (2021-2022), Regional Head of Jakarta 2 Region of PT Bank BRI (2020-2021), Regional Head of Bandung Region of PT Bank BRI (2019 – 2020), Regional Head of Yogyakarta Region of PT Bank BRI (2018-2019), Head of Retail & Medium Business Division of PT Bank BRI (2017-2018), Deputy Regional Head for Business Sector Jakarta 1 Region of PT Bank BRI (2016-2017), Deputy Regional Head for Business Sector KW Semarang Region of PT Bank BRI (2014-2016), Head of Kebayoran Baru Branch of PT Bank BRI (2013-2014), Head of Yogya Cik Di Tiro Branch of PT Bank BRI (2010-2013), Head of Public Relations of Corporate Secretary of PT Bank BRI (2008-2010), Head of Denpasar Kuta Branch (2006-2008), Head of BRI Atambua Branch (2004-2006)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Hendro Padmono tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Hendro Padmono does not hold any concurrent position at other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Hendro Padmono tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama Hendro Padmono does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	• Manajemen Risiko Perbankan, Level 5, 10 Agustus 2021/BNSP • Bahasa Inggris, Good User, 10 Februari 2001/Toeic • Banking Risk Management, Level 5, August 10, 2021/BNSP • English, Good User, February 10, 2001/TOEIC

*)Berhenti menjabat per 7 Mei 2023
*)Resigning from position as of May 7, 2023

Akhmad Purwakajaya



Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan
31 Juli 2023 – 31 Juli 2028 Periode Pertama
Term of Office
July 31, 2023 – July 31, 2028, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	53 tahun 53 years old
Kelahiran Birth	:	Lampung, 26 April 1971 Lampung, April 26, 1971
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta , Indonesia DKI Jakarta , Indonesia
Pendidikan Education	:	(S1) Ekonomi Akuntansi Universitas Gadjah Mada (1998) Bachelor of Economy (Accounting), Gadjah mada University (1998)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 31 Juli 2023 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-21/MBU/07/2023 – 17/Kep-Sir-PS/BPUI/VIII/2023 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia The position as Director has been carried out since July 31, 2023, through the Decree of the Minister of SOEs SK-21/MBU/07/2023 – 17/Kep-Sir-PS/BPUI/VIII/2023 concerning Dismissal, Transfer of Position, and Appointment of the Members of Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-3/KDK.05/2024 tanggal 12 Januari 2024 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-3/KDK.05/2024 dated January 12, 2024
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur Utama PT Jamkrindo (31 Juli 2023 – Sekarang), Pengalaman Kerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Regional CEO Office Jakarta 1 (2022 - 2023), Pemimpin Cabang Khusus (2021- 2022) Executive Vice President, Kepala Divisi SOE 2 (2020-2021), Kepala Divisi Institution 2 (2017-2020), Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu (Juni – Agustus 2017), Pemimpin Cabang Tegal (2016-2017), Group Head Divisi BUMN 1 (2014-2016), Group Head Divisi BUMN 2 (2012-2016), Pemimpin Cabang Sengkang (2010-2011) President Director of PT Jamkrindo (July 31, 2023-Present), Regional CEO Office Jakarta 1 Region of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022-2023), Special Branch Leader (2021-2022), Executive Vice President, Head of SOEs Division 2 (2020-2021), Head of Institution Division 2 (2017-2020), Head of Jakarta Pasar Minggu Branch (June-August 2017), Head of Tegal Branch (2016-2017), Group Head of SOEs Division 1 (2014-2016), Group Head of SOEs Division 2 (2012-2016), Head of Sengkang Branch (2010-2011)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Akhmad Purwakajaya tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Akhmad Purwakajaya does not hold any concurrent position at other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Akhmad Purwakajaya tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama Akhmad Purwakajaya does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	• Sertifikasi Kompetensi Penjaminan Sub Bidang Pengelolaan, LSP Penjaminan, 2023 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, BNSP, 2019 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, BNSP, 2019 • Negotiation Strategies: Creating and Maximizing Value, Columbia Business School, 2019 • Pendidikan Enhancement Bagi Pejabat EVP "Becoming A Leader of Leaders: Pathway To Success, ACT Consulting & Bank BRI, 2019 • Certified Wealth Manager (CWM) Program, The Certified Wealth Managers' Association (CWMA) & MCI A, 2019 • Seminar "Make A Good Impression", Duta Bangsa, 2018 • Program Pendidikan dan Pengembangan Karir Level Assistant Vice President Materi Manajemen Umum dan Kepemimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PPM Manajemen, 2017 • Finance Management and Marketing Management Module for AVPDP on Management Development Program, Bank BRI & Prasetya Mulya, 2017 • Sertifikasi Workshop Peran Lelang Dalam Penyelesaian Permasalahan Perbankan Serta Aspek Hukum Penyelesaian Piutang Bermasalah, Lembaga Pengembangan Informasi, 2012 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level I, Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2011 • Sertifikasi Sub Branch Manager Training, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2008 • Sertifikasi Training Profil Bisnis (Link & Match), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2007 • Sertifikasi Program Total Image, Lembaga Pendidikan Duta Bangsa, 2006 • Sertifikasi Pelatihan Dasar-Dasar Manajemen Risiko, Sentra Pendidikan Surabaya, 2006 • Sertifikasi Devisa MP, Bank BRI, 2005 • Sertifikasi Pelatihan "Achieving Target Through Negotiation Skills & Motivation Building", Multi Training Center, 2003 • Sertifikasi Training Credit Risk Management (CRM), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2003 • Sertifikasi International Trade Finance Training, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2002 • Sertifikasi Pendidikan Refreshing AO Ritel Komersial, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2002 • Sertifikasi Pendidikan AO Ritel Se – Sumatera, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2000 • Assurance Competency Certification, Subject of Management, LSP Guarantee, 2023 • Risk Management Certification Level 4, BNSP, 2019 • Risk Management Certification Level 3, BNSP, 2019 • Negotiation Strategies: Creating and Maximizing Value, Columbia Business School, 2019 • Enhancement Education for EVP Officials "Becoming A Leader of Leaders: Pathway To Success", ACT Consulting & Bank BRI, 2019 • Certified Wealth Manager (CWM) Program, The Certified Wealth Managers' Association (CWMA) & MCI A, 2019 • Seminar "Make A Good Impression", Duta Bangsa, 2018 • Education and Career Development Program for Assistant Vice President Level, General Management and Leadership Materials, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PPM Management, 2017 • Finance Management and Marketing Management Module for AVPDP on Management Development Program, Bank BRI & Prasetya Mulya, 2017 • Certification Workshop on the Role of Auctions in Resolving Banking Problems and Legal Aspects of Resolving Problematic Receivables, Information Development Institute, 2012 • Risk Management Certification Level I, Indonesian Bankers Association (IBI), 2011 • Sub Branch Manager Training Certification, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2008 • Business Profile Training Certification (Link & Match), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2007 • Total Image Program Certification, Duta Bangsa Educational Institution, 2006 • Risk Management Basics Training Certification, Surabaya Education Center, 2006 • MP Foreign Exchange Certification, Bank BRI, 2005 • Training Certification "Achieving Target Through Negotiation Skills & Motivation Building", Multi Training Center, 2003 • Credit Risk Management (CRM) Training Certification, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2003 • International Certification on Trade Finance Training, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2002 • Commercial Retail AO Refreshing Education Certification, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2002 • Retail AO Education Certification– Sumatera region, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2000

*)Resmi menjabat per 31 Juli 2023
*)Officially serving as of per July 31, 2023

Kadar Wisnuwarman

Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operations and Network

Periode Jabatan
- 21 November 2017-20 November 2022, Periode Pertama
- 20 November 2022 - 31 Juli 2023, Periode Kedua

Term of Office
- November 21, 2017 – November 20, 2022, 1st Period
- November 20, 2022 - July 31, 2023, 2nd Period



Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	52 tahun 52 years old
Kelahiran Birth	:	Malang, 31 Oktober 1971 Malang, October 31, 1971
Domisili Domicile	:	Cibubur, Jawa Barat, Indonesia Cibubur, West Java, Indonesia
Pendidikan Education	:	• (S2) Magister Manajemen, Universitas Hasanuddin (2002) • (S1) Manajemen, Universitas Airlangga (1996) • Master of Management, Hasanuddin University (2002) • Bachelor of Management, Airlangga University (1996)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 21 November 2017 melalui Keputusan Menteri Negara Bumn selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. The position of Director has been carried out since November 21, 2017 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 dated November 21, 2017 concerning Appointment of Member of Board of Director of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Director.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-26/KDK.05/2018 tanggal 13 April 2018 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-26/KDK.05/2018 dated April 13, 2018
Riwayat Profesi Professional History	:	Pranata Utama Perum Jamkrindo untuk ditugaskan sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017), Kepala Kantor Cabang Jakarta Khusus, Perum Jamkrindo (2013-2014), Kepala Divisi Penjaminan Komersial, Perum Jamkrindo (2013), Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi, Perum Jamkrindo (2013), Sekretaris Perusahaan Perum Jamkrindo (2012-2013), Kepala Kantor Cabang Denpasar, Perum Jamkrindo (2011-2012), Kepala Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2010-2011), Kepala Bagian Penjaminan Kantor Pusat, Perum Jamkrindo (2006-2010), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Jakarta, Perum Jamkrindo (2004-2006), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Bandung, Perum Jamkrindo (2004), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2003-2004). Main Institution's Officer of Perum Jamkrindo to be assigned as President Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017), Head of Jakarta Special Branch Office, Perum Jamkrindo (2013-2014), Head of the Commercial Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013), Head of Claims and Subrogation Division, Perum Jamkrindo (2013), Corporate Secretary of Perum Jamkrindo (2012-2013), Head of Denpasar Branch Office, Perum Jamkrindo (2011-2012), Head of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2010-2011), Section Head of Guarantee of the Head Office, Perum Jamkrindo (2006-2010), Section Head of Operations of Jakarta Branch Office, Perum Jamkrindo (2004-2006), Section Head of Operations of Bandung Branch Office, Perum Jamkrindo (2004), Section Head of Operations of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2003-2004).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Kadar Wisnuwarman tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Kadar Wisnuwarman does not hold any concurrent position at other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Kadar Wisnuwarman tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama Kadar Wisnuwarman does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	• Leadership Training For Managers • Professional Directors Program • Manajemen Risiko Perbankan • Leadership Training For Managers • Professional Directors Program • Banking Risk Management

*)Berhenti menjabat per 31 Juli 2023
*)Resigning from position as of July 31, 2023

Suwarsito

Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operations and Network

Periode Jabatan
22 Maret 2021 – 27 Oktober 2023,
Periode Pertama
Term of Office
March 22, 2021 – October 27, 2023,
1st Period



Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	51 tahun 51 years old
Kelahiran Birth	:	Sragen, 28 Februari 1972 Sragen, February 28, 1972
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	• (S2) Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin Makassar (2007) • (S1) Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Ekonomi (1996) • Master of Management, Hasanuddin University, Makassar (2007) • Bachelor of Economics, Diponegoro University, Semarang (1996)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur Operasional dan Jaringan diemban sejak 31 Juli 2023 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-21/MBU/07/2023 – 17/Kep-Sir-PS/BPUI/VIII/2023 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia The position of Director of Operations and Network has been carried out since July 31, 2023 through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-21/MBU/07/2023 – 17/Kep-Sir-PS/BPUI/VIII/2023 concerning Dismissal, Transfer of Position, and Appointment of Members of Board of Director of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-40/KDK.05/2021 tanggal 19 Agustus 2021 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-40/KDK.05/2021 dated August 19, 2021
Riwayat Profesi Professional History	:	Berkarir di Jamkrindo sejak tahun 1977. Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Kepala Divisi Bisnis PT Jamkrindo (2018-2021), Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank (2016-2018), Kepala Kantor Wilayah III Jakarta PT Jamkrindo (April 2016-Agustus 2016), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Jakarta (2013-2016), Kepala Divisi Umum PT Jamkrindo (2012-2013), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Bandung (Januari 2012-Desember 2012), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Pekanbaru (2011-2012), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Banjarmasin (2010-2011). He has had a career in Jamkrindo since 1977 with several positions that have been held, including Head of Business Division of PT Jamkrindo (2018-2021), Head of Bank Guarantee Business Division (2016-2018), Head of Regional Office III Jakarta of PT Jamkrindo (April 2016-August 2016), Head of Jakarta Branch Office of PT Jamkrindo (2013-2016), Head of General Affairs Division of PT Jamkrindo (2012-2013), Head of Bandung Branch Office of PT Jamkrindo (January 2012-December 2012), Head of Pekanbaru Branch Office of PT Jamkrindo (2011-2012), Head of Banjarmasin Branch Office of PT Jamkrindo (2010-2011).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Suwarsito tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Suwarsito does not hold any concurrent position at other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Suwarsito tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama Suwarsito does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	• Wealth Management – 3, Wealth Management, 2019 • Manajemen Risiko Perbankan – 3, LSP Perbankan, 2019 • Manajemen Risiko Perbankan – 2, LSP Perbankan, 2019 • Manajemen Risiko Perbankan – 1, LSP Perbankan, 2018 • Wealth Management – 3, Wealth Management, 2019 • Banking Risk Management – 3, LSP Banking, 2019 • Banking Risk Management – 2, LSP Banking, 2019 • Banking Risk Management – 1, LSP Banking, 2018

*) Resmi menjabat per 31 Juli 2023 berdasarkan peralihan jabatan dari sebelumnya sebagai Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
*) Officially serving as of July 31, 2023 in accordance with the transfer of position from Director of Finance, Investment and Risk Management

Henry Panjaitan



Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Business of Guarantee

Periode Jabatan
27 Oktober 2022 – 26 Oktober 2027,
Periode Pertama
Term of Office
October 27, 2022 – October 26, 2027,
1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	54 tahun 54 years old
Kelahiran Birth	:	Jakarta, 7 Juli 1969 Jakarta, July 7, 1969
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	• (S1) Manajemen di Universitas Padjadjaran (1991) • (S2) Banking di University of New South Wales (2002) • (S2) Manajemen Keuangan di Universitas Indonesia (2003) • Bachelor of Management, Padjadjaran University (1991) • Master of Banking, University of New South Wales (2002) • Master of Financial Management, University of Indonesia (2003)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 27 Oktober 2022 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/10/2022 – 014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia The position of Director has been carried out since October 27, 2022 through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-244/MBU/10/2022 – 014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 concerning Dismissal, Transfer of Position, and Appointment of Members of Board of Director of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-8/KDK.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-8/KDK.05/2023 dated February 27, 2023
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo (27 Oktober 2022 – Sekarang), Direktur Treasury dan International PT Bank BNI (2020 – 2022), Pemimpin Wilayah Bank BNI Jakarta Senayan (Juli – September 2020), Pemimpin Wilayah Bank BNI Jakarta BSD (2019 – 2020), Pemimpin Divisi BIN Bank BNI Kantor Pusat (2016 – 2017), Head of Business & Banking Bank BNI Wilayah Jakarta Senayan (2015 – 2016), General Manager Bank BNI Kantor Cabang Hong Kong (2010 – 2015), Deputy General Manager Bank BNI Cabang Hong Kong (2009 – 2010), Pemimpin Kelompok Pemasaran & Advisory Trade Finance Divisi International Bank BNI Kantor Pusat (2009), Pemimpin Kelompok Trade Finance Divisi International Bank BNI Kantor Pusat (2008 – 2009), Manager Personal Asisten Direksi Divisi KMP Bank BNI Kantor Pusat (2007 – 2008), Relationship Manager Divisi Korporasi Bank BNI Kantor Pusat (2006 – 2007), Pengelola Pemasaran Bisnis Divisi Korporasi Dua Bank BNI Kantor Pusat (2004 – 2005), Pengelola Analisis Kredit Divisi Korporasi Dua bank BNI Kantor Pusat (2004), Pengelola Advisory & Sekuritis Divisi Investasi & jasa Keuangan Bank BNI Kantor Pusat (2003-2004) Director of Business of Guarantee of PT Jamkrindo (October 27, 2022-present), Director of Treasury and International of PT Bank BNI (2020-2022), Regional Head of Bank BNI Jakarta Senayan (July-September 2020), Regional Head of Bank BNI Jakarta BSD (2019-2020) , Head of BIN Division of Bank BNI Head Office (2016-2017), Head of Business & Banking of Bank BNI Jakarta Senayan Region (2015-2016), General Manager of Bank BNI Hong Kong Branch Office (2010-2015), Deputy General Manager of Bank BNI Hong Kong Branch (2009-2010), Head of the Marketing & Advisory Trade Finance Group, International Division of Bank BNI, Head Office (2009), Head of the Trade Finance Group, International Division of Bank BNI, Head Office (2008-2009), Personal Manager, Assistant Director, KMP Division, Bank BNI, Head Office (2007-2008), Relationship Manager, Corporate Division of Bank BNI Head Office (2006-2007), Business Marketing Manager of Corporate Division II of Bank BNI Head Office (2004-2005), Credit Analysis Manager of Corporate Division II of Bank BNI Head Office (2004), Advisory Manager & Securities Investment & Financial Services Division of Bank BNI Head Office (2003-2004)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Henry Panjaitan tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Henry Panjaitan does not hold any concurrent position at other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Henry Panjaitan tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama Henry Panjaitan does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	• Manajemen Risiko Perbankan, Level 5, 17 September 2020/BSMR • Continual Mandatory Learning, Program (CMPL) 3 Industri, Perbankan di tengah Disrupsi, Digital dan Era Pandemic Covid, BNI, 2020 • Continual Mandatory Learning Program (CMPL) 2 Prospek Ekonomi 2021 dan Kebijakan Pasar Modal dlm Merespon Dampak Pandemi dan dalam Menghadapi Kondisi Politik di Indonesia, BNI, 2020 • Continual Mandatory Learning Program (CMPL) 1 Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Bisnis dan Perbankan. BNI, 2020 • Sertifikasi Dealer Level Advance, LSPP, 2020 • Banking Risk Management, Level 5, September 17, 2020/BSMR • Continual Mandatory Learning Program (CMPL) 3, Banking Industry in the Midst of Digital Disruption and the Covid Pandemic Era, BNI, 2020 • Continual Mandatory Learning Program (CMPL) 2, 2021 Economic Prospects and Capital Market Policies in Responding to the Impact of the Pandemic and Facing Political Conditions in Indonesia, BNI, 2020 • Continual Mandatory Learning Program (CMPL) 1, Socialization of the Job Creation Law and its Impact on Business and Banking, BNI, 2020 • Dealer Certification, Advanced Level, LSPP, 2020

Achmad Ivan Soeparno



Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan
Director of Human Resources Management, General Affairs, and Compliance

Periode Jabatan
27 Oktober 2022 – 26 Oktober 2027 ,
Periode Pertama
Term of Office
October 27, 2022 – October 26, 2027 ,
1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	57 tahun 57 years old
Kelahiran Birth	:	Jakarta, 11 Agustus 1966 Jakarta, August 11, 1966
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	• (S1) Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran (1991) • (S2) Master of Business Administration – Banking and Finance di Curtin University (Perth – Western Australia) (1998) • Bachelor of International Relations, Padjadjaran University (1991) • Master of Business Administration – Banking and Finance, Curtin University, Perth, Western Australia (1998)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 27 Oktober 2022 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/10/2022 – 014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia The position of Director has been carried out since October 27, 2022 through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-244/MBU/10/2022 – 014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 concerning Dismissal, Transfer of Position, and Appointment of Members of Board of Director of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-2/KDK.05/2023 tanggal 30 Januari 2023 OJK Board of Commissioners Decree No. Kep-2/KDK.05/2023 dated January 30, 2023
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan PT Jamkrindo (27 Oktober 2022 – Sekarang), Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta (2021 – 2022), Direktur Utama PT Braja Mukti Cakra (BMC) (2014 – 2021), Direktur Keuangan & Marketing PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (2013 – 2014), General Manager Risk Management & Investment PT Bakrie Steel Industries (2012 – 2013), Vice President, Area Lending Head Bank Pundi Indonesia (2011 – 2012), Division Head for The Credit Program Division (2000 – 2011), Account Manager PT Bank Panin (1994 – 1996), Account Officer PT Lippo Bank (1993 – 1994) Director of Human Resources Management, General Affairs, and Compliance of PT Jamkrindo (October 27, 2022-Present), President Director of PT Jamkrida Jakarta (2021-2022), President Director of PT Braja Mukti Cakra (BMC) (2014-2021), Director of Finance & Marketing of PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (2013-2014), General Manager of Risk Management & Investment of PT Bakrie Steel Industries (2012-2013), Vice President, Lending Head Division, Bank Pundi Indonesia (2011-2012), Division Head for The Credit Program Division (2000-2011), Account Manager of PT Bank Panin (1994-1996), Account Officer of PT Lippo Bank (1993-1994)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Achmad Ivan S Soeparno tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Achmad Ivan S Soeparno does not hold any concurrent position at other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Achmad Ivan S Soeparno tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama Achmad Ivan S Soeparno does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	• Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Direktur Investasi (Okupasi), 23 Agustus 2022 BJS • LSP Penjaminan, LSP, 2022 • LSPMR, Manajemen Risiko, 2021 • Branch Office Management Program Angkatan Ke-2, Bank Pundi, 2012 • Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat I (Satu), Badan Sertifikasi Manajemen Risiko – Global Association of Risk Professionals (GARP), 2011 • Training of Trainers – Sistem Informasi Manajemen Pemasaran Pengendalian Intern Peraturan dan Pengawasan Ekstern, Certif – Sertifikasi Profesional untuk Lembaga Keuangan Mikro, 2004 • Pelatihan Pengawasan BPR, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero – BI, 2004 • Pelatihan Pembiayaan Syariah, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero – Tazkia Institute (Syariah Finance & Management),2002 • Pelatihan Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero – BI, 2001 • Guarantee Business Professional Certification Training Program for Investment Director (Occupation), August 23, 2022, BJS • LSP Guarantee, LSP, 2022 • LSPMR, Risk Management, 2021 • Branch Office Management Program Batch 2, Bank Pundi, 2012 • Risk Management Certification Level I, Risk Management Certification Body – Global Association of Risk Professionals (GARP), 2011 • Training of Trainers – Marketing Management, Internal Control Regulations, and External Supervision Information System, Certification – Professional Certification for Microfinance Institutions, 2004 • BPR Supervision Training, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero – BI, 2004 • Sharia Financing Training, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero – Tazkia Institute (Syariah Finance & Management),2002 • Rural Bank Management Training, Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero – BI, 2001

Abdul Bari



Direktur Kelembagaan dan Layanan
Director of Institutions and Services

Periode Jabatan
27 Oktober 2022 – 26 Oktober 2027,
Periode Pertama
Term of Office
October 27, 2022 – October 26, 2027,
1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	48 tahun 48 years old
Kelahiran Birth	:	Subang, 29 September 1975 Subang, September 29, 1975
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	• (S3) Doctor Human Resource Management di Universitas Negeri Jakarta (2014) • (S2) Magister Manajemen SDM di ST Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia (2004) • (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2002) • Doctor of Human Resource Management, State University of Jakarta (2014) • Master of Human Resources Management, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia (2004) • Bachelor of Public Health Science , Muhammadiyah University, Jakarta (2002)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 27 Oktober 2022 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/10/2022 – 014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia The position of Director has been carried out since October 27, 2022 through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-244/MBU/10/2022 – 014/Kep-Sir-PS/BPUI/X/2022 concerning Dismissal, Transfer of Position, and Appointment of Members of Board of Director of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-9/KDK.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-8/KDK.05/2023 dated February 27, 2023
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur Kelembagaan dan Layanan (27 Oktober 2022 – Sekarang), Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo (2016-2022), Pranata Utama Direktorat Operasional & Jaringan PT Jamkrindo (2016), Pejabat Pranata Utama Direktorat Utama PT Jamkrindo (2015), Pranata Madya Sekretaris Utama (2015), Tim Project BPJS University BPJS Kesehatan (2014 – 2015), Dewan Komisaris Prima Multi Terminal Subsidiary Pelindo 1 PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan (2014-2015), Direktur Keuangan Pusat Studi SUmber Daya Manusia (PSSDM) UNJ (2013 – 2015), General Manager PT AXA Assistance Indonesia (AXA Group) (2001 – 2014), Inhouse Medical Services/24 Alarm Center Dr.Tedjo & Associates (1998 – 2000), Inhouse Medical Services/24 Alarm Center Dr. Damiyanti & Associates (1994 – 1996) Director of Institutions and Services (October 27, 2022-present), Corporate Secretary of PT Jamkrindo (2016-2022), Principal Officer of the Operational & Network Directorate of PT Jamkrindo (2016), Principal Officer of the Main Directorate of PT Jamkrindo (2015), Intermediate Principal Secretary (2015), Project Team of BPJS University of BPJS (2014-2015), Board of Commissioners of Prima Multi Terminal Subsidiary Pelindo 1 of PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan (2014-2015), Finance Director of the Center for Human Resources Studies (PSSDM) UNJ (2013 – 2015), General Manager of PT AXA Assistance Indonesia (AXA Group) (2001-2014), Inhouse Medical Services/24 Alarm Center of Dr. Tedjo & Associates (1998-2000), Inhouse Medical Services/24 Alarm Center of Dr. Damiyanti & Associates (1994-1996)
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Abdul Bari tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Abdul Bari does not hold any concurrent position at other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Abdul Bari tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama Abdul Bari does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	• Sertifikasi Kompetensi Mengelola Pemasaran Produk Penjaminan, Mengelola Portofolio Penjaminan, dan Mengelola Risiko Penjaminan, LSP, 2022 • Manajemen Risiko Perbankan, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), 2022 • Manajemen Risiko Perbankan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2022 • Strategic Public Relations, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2022 • ERMA : Certified in Enterprise Risk Governance, ERMA, 2021 • LSP MKS : Qualified Risk Governance Professional, LSP MKS, 2021 • Harvard Business School : Strategy Execution, Harvard Business School, 2021 • Wharton : AI for Business, Wharton University of Pennsylvania, 2021 • Executives Public Relations, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2021 • Pelatihan Antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Financial Group, 2021 • Competency Certification for Managing Guarantee Product Marketing, Managing Guarantee Portfolio, and Managing Guarantee Risk, LSP, 2022 • Banking Risk Management, Risk Management Certification Body (BSMR), 2022 • Banking Risk Management, National Professional Certification Agency (BNSP), 2022 • Strategic Public Relations, National Professional Certification Agency (BNSP), 2022 • ERMA : Certified in Enterprise Risk Governance, ERMA, 2021 • LSP MKS : Qualified Risk Governance Professional, LSP MKS, 2021 • Harvard Business School : Strategy Execution, Harvard Business School, 2021 • Wharton : AI for Business, Wharton University of Pennsylvania, 2021 • Executives of Public Relations, National Professional Certification Agency (BNSP), 2021 • Anti-Corruption Training with the Corruption Eradication Commission (KPK), Indonesia Financial Group, 2021

Alia Nur Fitri*



Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment, and Risk Management

Periode Jabatan
31 Juli 2023 – 31 Juli 2028,
Periode Pertama
Term of Office
July 31, 2023 – July 31, 2028,
1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	53 tahun 53 years old
Kelahiran Birth	:	Malang, 29 November 1971 Malang, November 29, 1971
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	• (S2) Magister Manajemen Pemasaran di Universitas Gadjah Mada (1997) • (S1) Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di Universitas Gadjah Mada (1994) • Master of Marketing Management, Gadjah Mada University (1997) • Bachelor of Agricultural Production & Processing Technology, Gadjah Mada University (1994)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diemban sejak 31 Juli 2023 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-21/MBU/07/2023 – 17/Kep-Sir-PS/BPUI/VIII/2023 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia The position of Director has been carried out since July 31, 2023 through the Decree of the Minister of SOEs No. SK-21/MBU/07/2023 – 17/Kep-Sir-PS/BPUI/VIII/2023 concerning Dismissal, Transfer of Position, and Appointment of Members of Board of Director of PT Jaminan Kredit Indonesia.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-14/KDK.05/2024 tanggal 7 Februari 2024 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-14/KDK.05/2024 dated February 7, 2024
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur Keuangan dan Investasi (31 Juli 2023 – Sekarang), Kepala Divisi Transformasi PT Jamkrindo (Januari-Juli 2023), Kepala Divisi Perencanaan Strategis (2017-2023), Kepala Divisi Manajemen Risiko (2016-2017), Pranata Utama Direktorat Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko (April – Agustus 2016), Kepala Bagian Investasi (Januari – April 2016), Kepala Seksi Analisis Investasi (September – November 2016), Analis Kredit Korporasi PT BNI (Persero) Tbk (1998-2009). Director of Finance and Investment (July 31, 2023-present), Head of Transformation Division of PT Jamkrindo (January-July 2023), Head of Strategic Planning Division (2017-2023), Head of Risk Management Division (2016-2017), Main Officer of the Directorate of Finance, Investment , and Risk Management (April-August 2016), Head of Investment Section (January-April 2016), Head of Investment Analysis Section (September-November 2016), Corporate Credit Analyst of PT BNI (Persero) Tbk (1998-2009).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Alia Nur Fitri tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Alia Nur Fitri does not hold any concurrent position at other companies/institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Alia Nur Fitri tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama Alia Nur Fitri does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.
Sertifikasi yang Dimiliki Certification	:	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level II LSPP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2019 • Sertifikasi Manajemen Risiko Level I LSPP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2018 • Certified Financial Modelling, International Academy of Business and Financial Management (IABFM), 2014 • Risk Management Certification, Level II LSPP, National Professional Certification Agency (BNSP), 2019 • Risk Management Certification, Level I LSPP, National Professional Certification Agency (BNSP), 2018 • Certified Financial Modelling, International Academy of Business and Financial Management (IABFM), 2014

*)Resmi menjabat per 31 Juli 2023
*)Officially serving as of July 31, 2023

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
PROFILES OF EXECUTIVE OFFICERS



Sigit Tjahjo Prabowo
Senior Executive Vice President Teknologi Informasi
Senior Executive Vice President of Information Technology

Menjabat Sejak Served Since	:	01 November 2021 November 01, 2021
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Surakarta, 06 September 1970 Surakarta, September 06, 1970
Usia Age	:	53 tahun 53 years old
Domisili Domicile	:	Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia Tebet, South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada Master of Management, Gadjah Mada University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Senior Executive Vice President TI (01 April 2022-31 Desember 2022) • Prohire-Senior Executive Vice President (01 November 2021-31 Maret 2022) • Senior Executive Vice President of Information Technology (April 01, 2022-December 31, 2022) • Prohire-Senior Executive Vice President (November 01, 2021-March 31, 2022)



Aribowo
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Menjabat Sejak Served Since	:	12 Juli 2023 July 12, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Probolinggo, 06 Juni 1966 Probolinggo, June 06, 1966
Usia Age	:	57 tahun 57 years old
Domisili Domicile	:	Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia Kemayoran, Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Ekonomi, Universitas Andalas Master of Economics, Andalas University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Sekretaris Perusahaan (12 Juli 2023 - 31 Desember 2023) • Kepala Divisi Keuangan dan Investasi (01 Agustus 2016 - 16 Juli 2023) • Kepala Kantor Wilayah II Palembang (22 April 2016 – 31 Juli 2016) • Kepala Kantor Wilayah 1 Jakarta (10 Desember 2015 – 21 April 2016) • Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta (03 September 2014 – 09 Desember 2015) • Corporate Secretary (July 12, 2023 - December 31, 2023) • Head of Finance and Investment Division (August 01, 2016 - July 16, 2023) • Head of Regional Office II Palembang (April 22, 2016 - July 31, 2016) • Head of Regional Office 1 Jakarta (December 10, 2015 - April 21, 2016) • Head of Jakarta Special Branch Office (September 03, 2014 - December 09, 2015)



Andry Septianto
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Menjabat Sejak Served Since	:	01 Desember 2020 December 01, 2020
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Sawit Seberang, 22 September 1978 Sawit Seberang, September 22, 1978
Usia Age	:	45 tahun 45 years old
Domisili Domicile	:	Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia Kemayoran, Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Manajemen, Universitas Gadjah Mada Master of Management, Gadjah Mada University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Satuan Pengawasan Intern (01 Desember 2020 - 31 Desember 2022) • Wakil Kepala Satuan Pengawasan Intern (05 Oktober 2020 – 30 November 2020) • Pemimpin Cabang Bandung (31 Agustus 2018 – 04 Oktober 2020) • Kepala Kantor Cabang Kupang (03 Februari 2017 – 30 Agustus 2018) • Kepala Kantor Cabang Pekanbaru (22 April 2016 – 02 Februari 2017) • Head of Internal Audit (December 01, 2020 - December 31, 2022) • Deputy Head of Internal Audit (October 05, 2020 - November 30, 2020) • Head of Bandung Branch (August 31, 2018 - October 04, 2020) • Head of Kupang Branch Office (February 03, 2017 - August 30, 2018) • Head of Pekanbaru Branch Office (April 22, 2016 - February 02, 2017)



Wakhyu Hidayattulloh
Kepala Divisi Bisnis I
Head of Business Division I

Menjabat Sejak Served Since	:	22 Maret 2021 March 22, 2021
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Banjar, 05 Oktober 1974 Banjar, October 05, 1974
Usia Age	:	49 tahun 49 years old
Domisili Domicile	:	Cibinong, Jawa Barat, Indonesia Cibinong, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Manajemen Bisnis, STIE Dewantara Bachelor of Business Management, STIE Dewantara
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Bisnis 1 (22 Maret 2021 - 31 Desember 2023) • Pemimpin Wilayah V Semarang (31 Agustus 2018 - 21 Maret 2021) • Kepala Kantor Wilayah II Palembang (1 Agustus 2016 - 30 Agustus 2018) • Head of Business Division 1 (March 22, 2021 - December 31, 2023) • Head of Semarang Region V (August 31, 2018 - March 21, 2021) • Head of Regional Office II Palembang (August 1, 2016 - August 30, 2018)



Mahfudh Sudiyono
Kepala Divisi Bisnis II
Head of Business Division II

Menjabat Sejak Served Since	:	11 April 2022 April 11, 2022
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Jombang, 17 Maret 1973 Jombang, March 17, 1973
Usia Age	:	50 tahun 50 years
Domisili Domicile	:	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Manajemen, Universitas Brawijaya Bachelor of Management, Brawijaya University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Bisnis II (11 April 2022-31 Desember 2023) • Kepala Divisi Teknik & Administrasi Bisnis (31 Agustus 2018-10 April 2022) • Kepala Divisi Teknik & Administrasi Penjaminan (10 Desember 2015-30 Agustus 2018) • Kepala Divisi Teknik Penjaminan Bank (03 September 2014 – 09 Desember 2015) • Kepala Kantor Cabang Palembang (27 Juni 2013 – 02 September 2014) • Head of Business Division II (April 11, 2022-December 31, 2023) • Head of Engineering & Business Administration Division (August 31, 2018-April 10, 2022) • Head of Engineering & Administration of Guarantee Division (December 10, 2015-August 30, 2018) • Head of Bank Guarantee Engineering Division (September 03, 2014 - December 09, 2015) • Head of Palembang Branch Office (June 27, 2013 - September 02, 2014)



Bambang Suryo Atmojo
Kepala Divisi Bisnis III
Head of Business Division III

Menjabat Sejak Served Since	:	23 Oktober 2023 October 23, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Gresik, 29 April 1985 Gresik, April 29, 1985
Usia Age	:	39 tahun 39 years old
Domisili Domicile	:	Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia Sidoarjo, East Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Bachelor of Accounting, Muhammadiyah Sidoarjo University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Bisnis III (23 Oktober 2023 - 31 Desember 2023) • Pemimpin Wilayah Medan (22 Maret 2021 - 22 Oktober 2023) • Pemimpin Cabang Padang (02 Mei 2019 – 21 Maret 2021) • Pemimpin Cabang Malang (27 Januari 2016 – 01 Mei 2019) • Kepala Seksi Penjaminan Non Bank - Kanca Surabaya (29 Mei 2015 – 26 Januari 2016) • Head of Business Division III (October 23, 2023 - December 31, 2023) • Head of Medan Region (March 22, 2021 - October 22, 2023) • Head of Padang Branch (May 02, 2019 - March 21, 2021) • Head of Malang Branch (January 27, 2016 - May 01, 2019) • Head of Non Bank Guarantee Section - Kanca Surabaya (May 29, 2015 - January 26, 2016)



Etyk Turniyatun
Kepala Divisi Pengembangan Bisnis
Head of Business Development Division

Menjabat Sejak Served Since	:	22 Maret 2021 March 22, 2021
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Surakarta, 24 April 1970 Surakarta, April 24, 1970
Usia Age	:	54 tahun 54 years old
Domisili Domicile	:	Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Makassar, South Sulawesi, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Hukum, Universitas Slamet Riyadi Bachelor of Law, Slamet Riyadi University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Pengembangan Bisnis (22 Maret 2021 - 31 Desember 2023) • Pemimpin Cabang Makassar (2 Mei 2020 - 21 Maret 2021) • Plt. Pemimpin Cabang Makassar (2 Mei 2019-1 Mei 2020) • Pemimpin Cabang Gorontalo (31 Agustus 2018-1 Mei 2019) • Head of Business Development Division (March 22, 2021 - December 31, 2023) • Head of Makassar Branch (May 2, 2020 - March 21, 2021) • Acting Head of Makassar Branch (May 2, 2019 - May 1, 2020) • Head of Gorontalo Branch (August 31, 2018 - May 1, 2019)



Ragil Ramadhona Setyadi
Kepala Divisi Teknik dan Aktuaria
Head of Technical and Actuarial Division

Menjabat Sejak Served Since	:	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Depok, 21 Mei 1987 Depok, May 21, 1987
Usia Age	:	36 tahun 36 years old
Domisili Domicile	:	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Manajemen, STIE Dharma Bumiputera Bachelor of Management, STIE Dharma Bumiputera
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Aktuaria (1 Oktober 2021-31 Desember 2023) • Prohire - Bidang Aktuaria Perusahaan (1 Juni 2021-30 September 2021) • Head of Actuarial Division (October 1, 2021-December 31, 2023) • Prohire - Corporate Actuarial Field (June 1, 2021-September 30, 2021)



Ceriandri Widuri
Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi
Head of Claims and Subrogation Division

Menjabat Sejak Served Since	:	01 Januari 2023 January 01, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Semarang, 13 Maret 1972 Semarang, March 13, 1972
Usia Age	:	51 tahun 51 years old
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Manajemen Strategik, Universitas Gadjah Mada Master of Strategic Management, Gadjah Mada University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi (01 Januari 2023 – 31 Desember 2023) • Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Pemeringkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Konsultasi Manajemen (PUKM) (31 Agustus 2018-31 Desember 2022) • Kepala Divisi Manajemen Risiko (19 September 2017-30 Agustus 2018) • Kepala Divisi Penjaminan Syariah (10 Maret 2014-18 September 2017) • Head of Claims and Subrogation Division (January 01, 2023 - December 31, 2023) • Head of Risk Management and Rating Division of Micro, Small, Medium Enterprises, Management Consulting (PUKM) (August 31, 2018-December 31, 2022) • Head of Risk Management Division (September 19, 2017-August 30, 2018) • Head of Sharia Guarantee Division (March 10, 2014 - September 18, 2017)



Lusy Susanti
Kepala Divisi Jaringan dan Layanan
Head of Network and Services Division

Menjabat Sejak Served Since	:	22 Maret 2021 March 22, 2021
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Batusangkar, 8 Januari 1977 Batusangkar, January 8, 1977
Usia Age	:	47 tahun 47 years old
Domisili Domicile	:	Pekanbaru, Riau, Indonesia Pekanbaru, Riau, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Akuntansi, Universitas Andalas Bachelor of Accounting, Andalas University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Jaringan dan Layanan (22 Maret 2021 - 31 Desember 2023) • Kepala Divisi Umum (2 Mei 2019 - 21 Maret 2021) • Kepala Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang (31 Agustus 2018 - 1 Mei 2019) • Head of Network and Services Division (March 22, 2021 - December 31, 2023) • Head of General Division (May 2, 2019 - March 21, 2021) • Head of Warehouse Receipt System Guarantee Desk (August 31, 2018 - May 1, 2019)



Harjanto
Kepala Divisi Pengembangan Teknologi Informasi
Head of Information Technology Development Division

Menjabat Sejak Served Since	:	25 Januari 2022 January 25, 2022
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Wonogiri, 25 Juni 1982 Wonogiri, June 25, 1982
Usia Age	:	41 tahun 41 years old
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Innovation Creativity and Entrepreneurship, University of New Castle Master's Degree in Innovation Creativity and Entrepreneurship, University of New Castle
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Pengembangan TI (25 Januari 2022-31 Desember 2023) • Kepala Bagian Sistem Manajemen dan Pengembangan Organisasi, Divisi Perencanaan Strategis (31 Januari 2019-24 Januari 2022) • Head of IT Development Division (January 25, 2022-December 31, 2023) • Head of Management System and Organization Development Section, Strategic Planning Division (January 31, 2019- January 24, 2022)



Nur Syamsuhadi
Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi
Head of Information Technology Operations Division

Menjabat Sejak Served Since	:	25 Januari 2022 January 25, 2022
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Yogyakarta, 30 April 1988 Yogyakarta, April 30, 1988
Usia Age	:	36 tahun 36 years old
Domisili Domicile	:	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Ilmu Komputer, Universitas Gadjah Mada Bachelor of Computer Science, Gadjah Mada University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Operasional TI (25 Januari 2022 - 31 Desember 2023) • Kepala Bagian Perencanaan dan Strategi TI, Divisi Teknologi Informasi (2 Januari 2020-24 Januari 2022) • Head of IT Operations Division (January 25, 2022 - December 31, 2023) • Head of IT Planning and Strategy, Information Technology Division (January 2, 2020-January 24, 2022)



Siti Maesaroh
Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Head of Human Resources Management Division

Menjabat Sejak Served Since	:	22 Maret 2021 March 22, 2021
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Magelang, 26 Mei 1971 Magelang, May 26, 1971
Usia Age	:	53 tahun 53 years old
Domisili Domicile	:	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Manajemen, Universitas Negeri Jakarta Master of Management, Jakarta State University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (22 Maret 2021-31 Desember 2023) • Kepala Bagian Kebijakan dan Pengembangan SDM Divisi MSDM (1 Oktober 2018-21 Maret 2021) • Kepala Bagian Operasional dan Pengelolaan SDM Divisi MSDM (13 Maret 2017-30 September 2018) • Head of Human Resources Management Division (March 22, 2021-December 31, 2023) • Head of HR Policy and Development Division HRM Division (October 1, 2018-March 21, 2021) • Head of Operations and HR Management Division HRM Division (March 13, 2017-September 30, 2018)



Achmad Muhlison
Kepala Divisi Umum
Head of General Division

Menjabat Sejak Served Since	:	23 Oktober 2023 October 23, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Ponorogo, 10 Januari 1972 Ponorogo, January 10, 1972
Usia Age	:	51 tahun 51 years old
Domisili Domicile	:	Bandung, Jawa Barat, Indonesia Bandung, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Manajemen Risiko, Universitas Andalas Master of Risk Management, Andalas University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Umum (23 Oktober 2023 - 31 Desember 2023) • Pemimpin Wilayah Palembang (11 April 2022 - 22 Oktober 2023) • Kepala Desk Subrogasi (31 Agustus 2018 - 10 April 2022) • Kepala Kantor Wilayah VIII Banjarmasin (08 Maret 2017 – 30 Agustus 2018) • Head of General Affairs Division (October 23, 2023 - December 31, 2023) • Head of Palembang Region (April 11, 2022 - October 22, 2023) • Head of Subrogation Desk (August 31, 2018 - April 10, 2022) • Head of Regional Office VIII Banjarmasin (March 08, 2017 - August 30, 2018)



M. Natsir Rahmadi
Kepala Divisi Kepatuhan
Head of Compliance Division

Menjabat Sejak Served Since	:	01 Agustus 2016 August 01, 2016
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Pasuruan, 25 Mei 1972 Pasuruan, May 25, 1972
Usia Age	:	52 tahun 52 years old
Domisili Domicile	:	Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Hukum, Universitas Brawijaya Bachelor of Law, Brawijaya University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Kepatuhan (1 Agustus 2016 - 31 Desember 2023) • Sekretaris Perusahaan (10 Desember 2015 - 31 Juli 2016) • Head of Compliance Division (August 1, 2016 - December 31, 2023) • Corporate Secretary (December 10, 2015 - July 31, 2016)



Putu Panca Nitiari
Kepala Divisi Keuangan dan Investasi
Head of Finance and Investment Division

Menjabat Sejak Served Since	:	12 Juli 2023 July 12, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Gianyar, 22 Desember 1979 Gianyar, December 22, 1979
Usia Age	:	44 tahun 44 years old
Domisili Domicile	:	Gianyar, Bali, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Akuntansi, Universitas Udayana Bachelor of Accounting, Udayana University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Keuangan dan Investasi (12 Juli 2023 – 31 Desember 2023) • Wakil Kepala Divisi Keuangan dan Investasi (21 April 2021-31 Desember 2022) • Pemimpin Cabang Madiun (2 Mei 2020-20 April 2021) • Kepala Bagian Operasional Kantor Wilayah VII Denpasar (13 Maret 2017-1 Mei 2019) • Head of Finance and Investment Division (July 12, 2023 - December 31, 2023) • Deputy Head of Finance and Investment Division (April 21, 2021-December 31, 2022) • Head of Madiun Branch (May 2, 2020-April 20, 2021) • Head of Operations, Regional Office VII Denpasar (March 13, 2017-May 1, 2019)



Diana Mayawati
Kepala Divisi Akuntansi
Head of Accounting Division

Menjabat Sejak Served Since	:	10 Desember 2015 December 10, 2015
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Jakarta, 19 Oktober 1975 Jakarta, October 19, 1975
Usia Age	:	48 tahun 48 years old
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S1 Akuntansi, Universitas Trisakti Bachelor of Accounting, Trisakti University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Akuntansi (31 Agustus 2018 - 31 Desember 2022) • Kepala Divisi Akuntansi & PKBL (10 Desember 2015 - 30 Agustus 2018) • Head of Accounting Division (August 31, 2018 - December 31, 2022) • Head of Accounting & PKBL Division (December 10, 2015 - August 30, 2018)



Boy Herwin Nur
Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management Division

Menjabat Sejak Served Since	:	01 Januari 2023 January 01, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Padang, 16 Februari 1973 Padang, February 16, 1973
Usia Age	:	50 tahun 50 years old
Domisili Domicile	:	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Manajemen, Universitas Tanjungpura Master of Management, Tanjungpura University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Manajemen Risiko (01 Januari 2023 – 31 Desember 2023) • Wakil Kepala Divisi Akuntansi (11 April 2022-31 Desember 2022) • Pemimpin Cabang Pontianak (31 Agustus 2018-10 April 2022) • Kepala Kantor Cabang Tarakan (26 Juli 2017-30 Agustus 2018) • Kepala Kantor Cabang Pangkal Pinang (22 April 2016-25 Juli 2017) • Head of Risk Management Division (January 01, 2023 - December 31, 2023) • Deputy Head of Accounting Division (April 11, 2022-December 31, 2022) • Head of Pontianak Branch (August 31, 2018-April 10, 2022) • Head of Tarakan Branch Office (July 26, 2017-August 30, 2018) • Head of Pangkal Pinang Branch Office (April 22, 2016 - July 25, 2017



Puspita Dewi
Kepala Divisi Strategi Perusahaan
Head of Corporate Strategy Division

Menjabat Sejak Served Since	:	01 Januari 2023 January 01, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Cilacap, 23 Juni 1976 Cilacap, June 23, 1976
Usia Age	:	47 tahun 47 years old
Domisili Domicile	:	Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	• S2 Manajemen, Universitas Gadjah Mada • S1 Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada • Master of Management, Gadjah Mada University • Bachelor of Agricultural Technology, Gadjah Mada University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Strategi Perusahaan (01 Januari 2023 – 31 Desember 2023) • Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi (11 April 2022 - 31 Desember 2022) • Pemimpin Wilayah VI Surabaya (22 Maret 2021 - 10 April 2022) • Pemimpin Cabang Surabaya (31 Agustus 2018 - 21 Maret 2021) • Kepala Kantor Cabang Jambi (3 Februari 2017 - 30 Agustus 2018) • Head of Corporate Strategy Division (January 01, 2023 - December 31, 2023) • Head of Claims and Subrogation Division (April 11, 2022 - December 31, 2022) • Head of Surabaya Region VI (March 22, 2021 - April 10, 2022) • Head of Surabaya Branch (August 31, 2018 - March 21, 2021) • Head of Jambi Branch Office (February 3, 2017 - August 30, 2018)



Krisna Johan
Kepala Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan I
Head of Institutional Business Relations Division I

Menjabat Sejak Served Since	:	01 Januari 2023 January 01, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Sumenep, 05 Juli 1971 Sumenep, July 05, 1971
Usia Age	:	52 tahun 52 years old
Domisili Domicile	:	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Manajemen Risiko, Universitas Indonesia Master of Risk Management, University of Indonesia
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Kepala Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan I (01 Januari 2023 – 31 Desember 2023) • Pemimpin Wilayah VIII Banjarmasin (31 Agustus 2018 - 31 Desember 2022) • Kepala Kantor Wilayah III Jakarta (30 Agustus 2016 – 30 Agustus 2018) • Kepala Divisi Manajemen Risiko (18 Juli 2016 – 30 Agustus 2016) • Kepala Divisi Investasi dan Keuangan (27 Juni 2013 – 18 Juli 2016) • Head of Institutional Business Relations Division I (January 01, 2023 - December 31, 2023) • Head of Region VIII Banjarmasin (August 31, 2018 - December 31, 2022) • Head of Regional Office III Jakarta (August 30, 2016 - August 30, 2018) • Head of Risk Management Division (July 18, 2016 - August 30, 2016) • Head of Investment and Finance Division (June 27, 2013 - July 18, 2016)



Anggit Murdiwibowo
Wakil Kepala Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan II
Deputy Head of Institutional Business Relations Division II

Menjabat Sejak Served Since	:	01 Januari 2023 January 01, 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	:	Jakarta, 27 Maret 1986 Jakarta, March 27, 1986
Usia Age	:	37 tahun 37 years old
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Pendidikan Terakhir Latest Educational Background	:	S2 Magister Manajemen SDM, Universitas Prof. Dr. Moestopo Master of Human Resources Management, Prof. Dr. Moestopo University
Sekilas Jabatan di Jamkrindo Job Position at Jamkrindo at a Glance	:	• Wakil Kepala Divisi Hubungan Bisnis Kelembagaan II (01 Januari 2023 – 31 Desember 2023) • Kepala Bagian Kesekretariatan, Sekretaris Perusahaan (31 Agustus 2018 - 31 Desember 2022) • Kepala Bagian Pemeringkatan UMKM, Divisi Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen (13 Maret 2017 – 30 Agustus 2018) • Deputy Head of Institutional Business Relations Division II (January 01, 2023 - December 31, 2023) • Head of Secretariat, Corporate Secretary (August 31, 2018 - December 31, 2022) • Head of MSME Rating Section, MSME Rating and Management Consulting Division (March 13, 2017 - August 30, 2018)



DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND HUMAN RESOURCES COMPETENCY DEVELOPMENT

"2.120 karyawan organik dan non organik yang berkarya di Jamkrindo mendedikasikan dirinya kepada dunia UMKM dan Koperasi melalui 9 Kantor Wilayah, 55 Kantor Cabang dan 17 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia."

"2,120 organic and non-organic employees working at Jamkrindo dedicate themselves to the MSMEs and Cooperatives sector through 9 Regional Offices, 55 Branch Offices and 17 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia."

Demografi Karyawan

Jamkrindo memiliki karyawan dengan budaya kerja unggul yang merupakan aset paling berharga dalam memberikan produk dan layanan jasa penjaminan kredit. Per akhir tahun 2023, Jamkrindo memiliki 2120 karyawan mengalami kenaikan sebesar 9,00% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2022 yaitu 1.945 orang. Kenaikan tersebut dikarenakan rekrutmen pada tahun 2023.

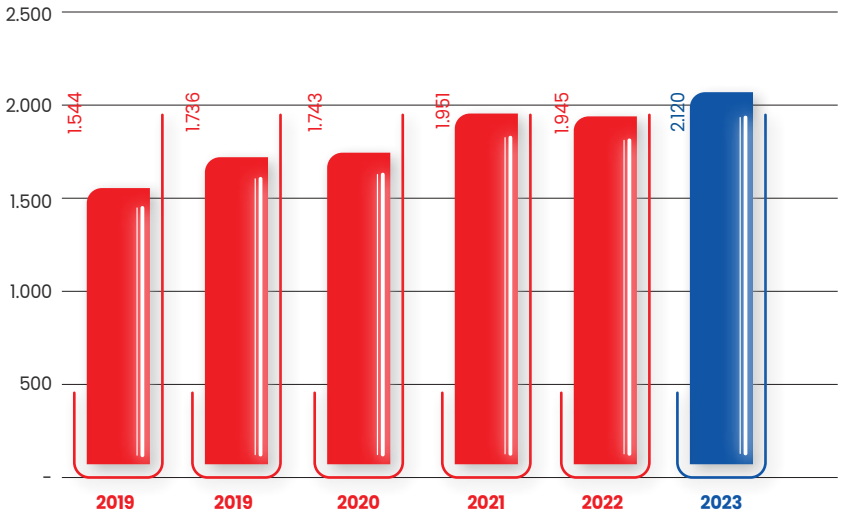
Profil demografi karyawan Jamkrindo dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini:

Employee Demographics

Jamkrindo has employees with a superior work culture which is the most valuable asset in providing credit guarantee products and services. By the end of 2023, Jamkrindo has 2,120 employees, which is an increase by 9.00% compared to the number of employees as of December 31, 2022 of 1,945 people. The increase was mainly due to the recruitment process conducted in 2023.

The demographic profile of Jamkrindo employees can be seen in the following tables and charts:

Pergerakan Jumlah Keseluruhan Karyawan dalam 6 (Enam) Tahun Terakhir 2018-2023
Growth of Number of Employees in the Last 6 (Six) Years 2018-2023

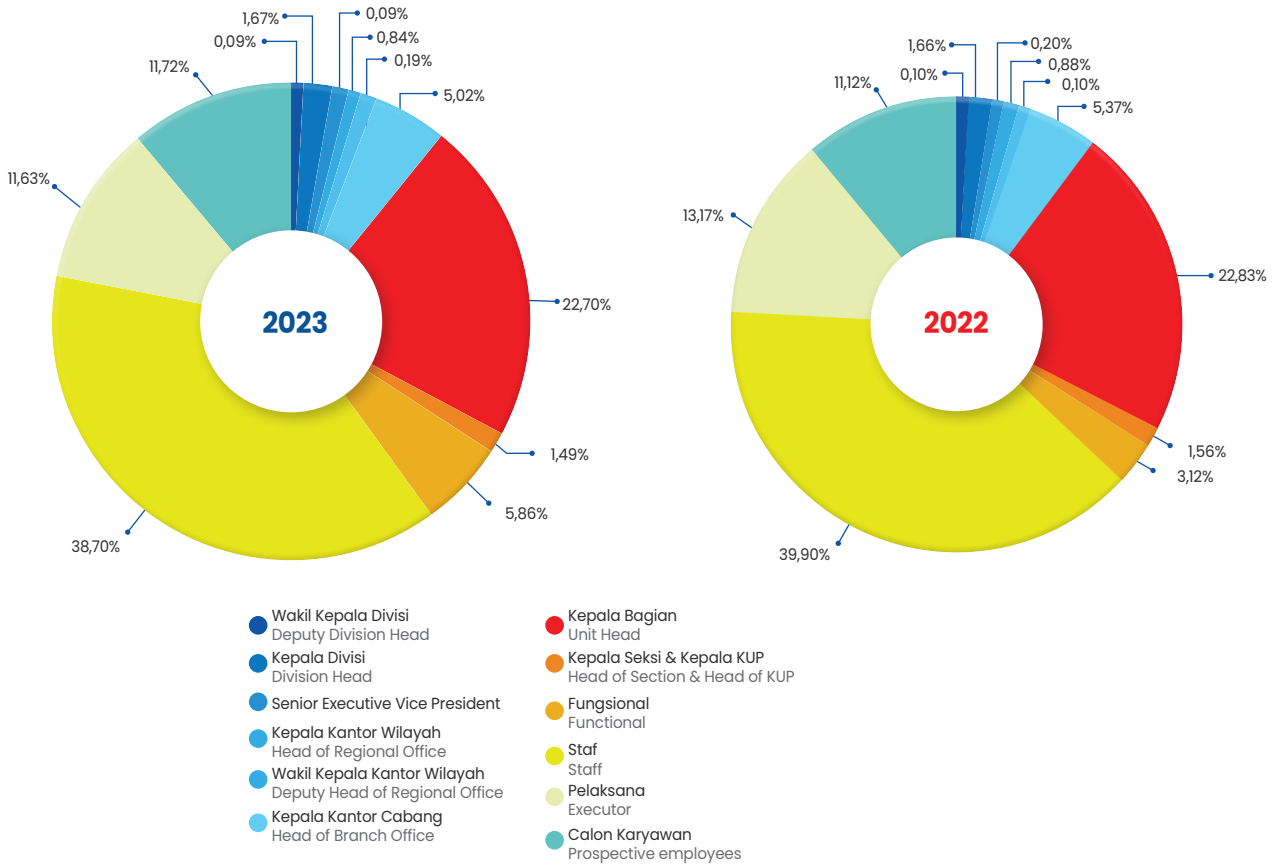


Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Level Organisasi (orang)
Demographic of Permanent Employees by Organization Level (people)

Level Organisasi Organization Level	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
Senior Executive Vice President	1	0	1	0,09%	1	0	1	0,10%	0	0,00%
Kepala Divisi Division Head	11	7	18	1,67%	10	7	17	1,66%	1	5,88%
Wakil Kepala Divisi Deputy Division Head	1	0	1	0,09%	1	1	2	0,20%	-1	-50,00%
Kepala Kantor Wilayah Head of Regional Office	9	0	9	0,84%	9	0	9	0,88%	0	0,00%
Wakil Kepala Kantor Wilayah Deputy Head of Regional Office	2	0	2	0,19%	1	0	1	0,10%	1	100,00%
Kepala Kantor Cabang Head of Branch Office	48	6	54	5,02%	49	6	55	5,37%	-1	-1,82%
Kepala Bagian Unit Head	179	65	244	22,70%	175	59	234	22,83%	10	4,27%
Kepala Seksi & Kepala KUP Head of Section & Head of KUP	16	0	16	1,49%	15	1	16	1,56%	0	0,00%
Fungsional Functional	41	22	63	5,86%	22	10	32	3,12%	31	96,88%
Staf Staff	195	221	416	38,70%	204	205	409	39,90%	7	1,71%
Pelaksana Executor	61	64	125	11,63%	70	65	135	13,17%	-10	-7,41%
Calon Karyawan Prospective employees	46	80	126	11,72%	40	74	114	11,12%	12	10,53%
Jumlah Total	**610**	**465**	**1075**	**100%**	**597**	**428**	**1025**	**100.00%**	**50**	**4,88%**

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Level Organisasi
Composition of Permanent Employees by Organization Level



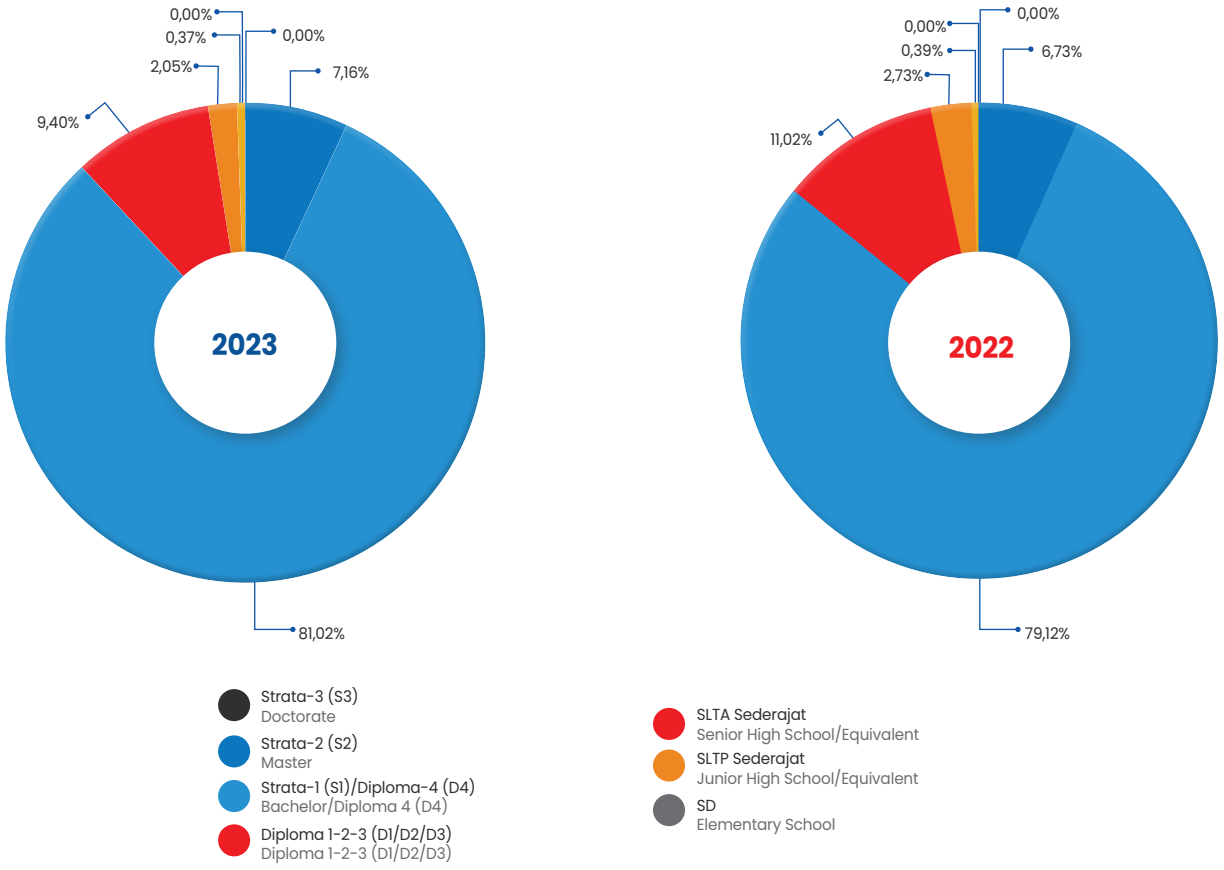
Berdasarkan level organisasi, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh level Staf. Penambahan karyawan didapatkan melalui rekrutmen Calon Karyawan sebanyak 71 orang. Selain itu terdapat Promosi Karyawan dari Level Staf menjadi Kepala Bagian dan Fungsional.

Based on organizational level, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by staff level. The additional employees were obtained through the recruitment of 71 prospective employees. Apart from that, there are employee promotions from staff level to Unit Head and functional.

Jenjang Pendidikan Education Level	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
Strata-3 (S3) Doctorate	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Strata-2 (S2) Master	**50**	**27**	**77**	**7,16%**	45	24	69	6,73%	8	11,59%
Strata-1 (S1)/ Diploma-4 (D4) Bachelor/Diploma 4 (D4)	**495**	**376**	**871**	**81,02%**	475	336	811	79,12%	60	7,40%
Diploma 1-2-3 (D1/ D2/D3) Diploma 1-2-3 (D1/ D2/D3)	**45**	**56**	**101**	**9,40%**	53	60	113	11,02%	-12	-10,62%
SLTA Sederajat Senior High School/ Equivalent	**16**	**6**	**22**	**2,05%**	20	8	28	2,73%	-6	-21,43%

Jenjang Pendidikan Education Level	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
SLTP Sederajat Junior High School/ Equivalent	**4**	**0**	**4**	**0,37%**	4	0	4	0,39%	0	0,00%
SD Elementary School	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah Total	**610**	**465**	**1075**	**100,00%**	**597**	**428**	**1025**	**100,00%**	**50**	**4,88%**

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Composition of Permanent Employees by Education Level



Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma 4 (D4), selain itu di Tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah karyawan yang menyelesaikan pendidikan Strata-2 (S2).

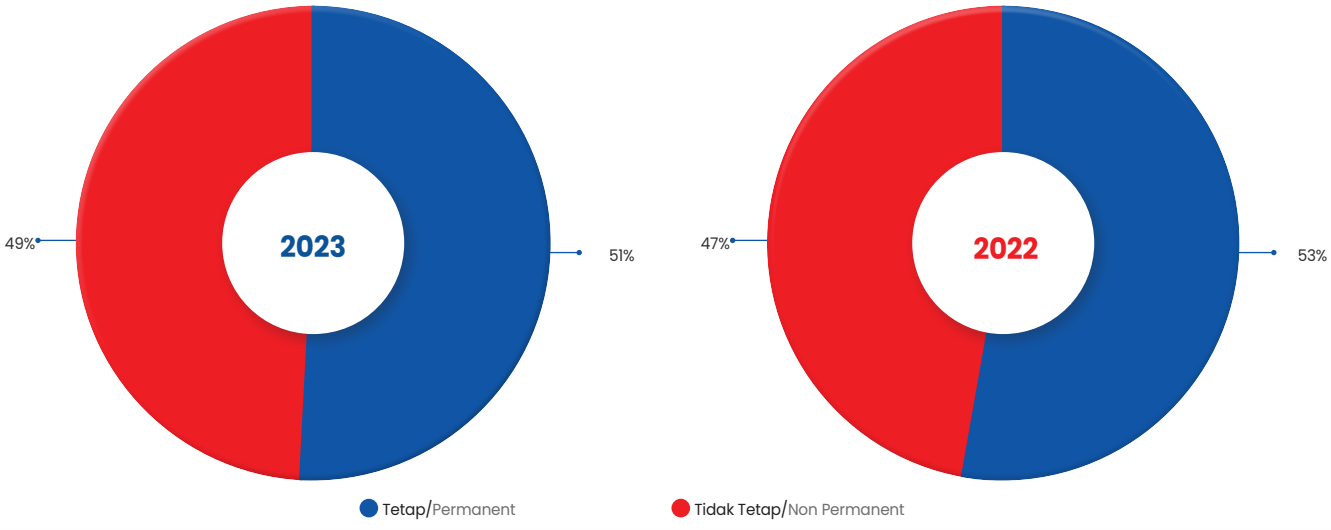
Based on educational level, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by employees with a Bachelor's (S1)/Diploma 4 (D4) degree. In addition, in 2022, there was an increase in the number of employees who have acquired their master degree.

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)
Demographic of Permanent Employees by Employment Status (people)

Status Kepegawaian Employment Status	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
Tetap Permanent										
Permanen (PKWTT) Permanent (PKWTT)	**603**	**462**	**1065**	**50,24%**	592	426	1018	52,34%	47	4,62%
Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah Assigned to a Subsidiary, PT Jamkrindo Syariah	**6**	**2**	**8**	**0,38%**	4	1	5	0,26%	3	60,00%
Penugasan PT LSPP Assigned to PT LSPP	**1**	**1**	**2**	**0,09%**	1	1	2	0,10%	0	0,00%
Sub Jumlah Tetap Sub Total Permanent	**610**	**465**	**1075**	**50,71%**	**597**	**428**	**1025**	**52,70%**	**50**	**4,88%**
Tidak Tetap Non-Permanent										
Kontrak *Outsourcing* Outsourced Contracts	**585**	**246**	**831**	**39,20%**	471	160	631	32,44%	200	31,70%
Magang Bersertifikasi Certified Apprentice	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	8	25	33	1,70%	-33	-100,00%
Prohire Prohire	**15**	**5**	**20**	**0,94%**	11	3	14	0,72%	6	42,86%
KKWT KKWT	**97**	**97**	**194**	**9,15%**	120	122	242	12,44%	-48	-19,83%
Sub Jumlah Tidak Tetap Sub Total of Non-permanent	**697**	**348**	**1045**	**49,29%**	**610**	**310**	**920**	**47,30%**	**125**	**13,59%**
Jumlah Total	**1307**	**813**	**2120**	**100,00%**	**1207**	**738**	**1945**	**100,00%**	**175**	**9.00%**

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Composition of Total Employees Based on Employment Status



Berdasarkan status kepegawaian, komposisi karyawan tetap Jamkrindo lebih besar jika dibandingkan dengan karyawan tidak tetap.

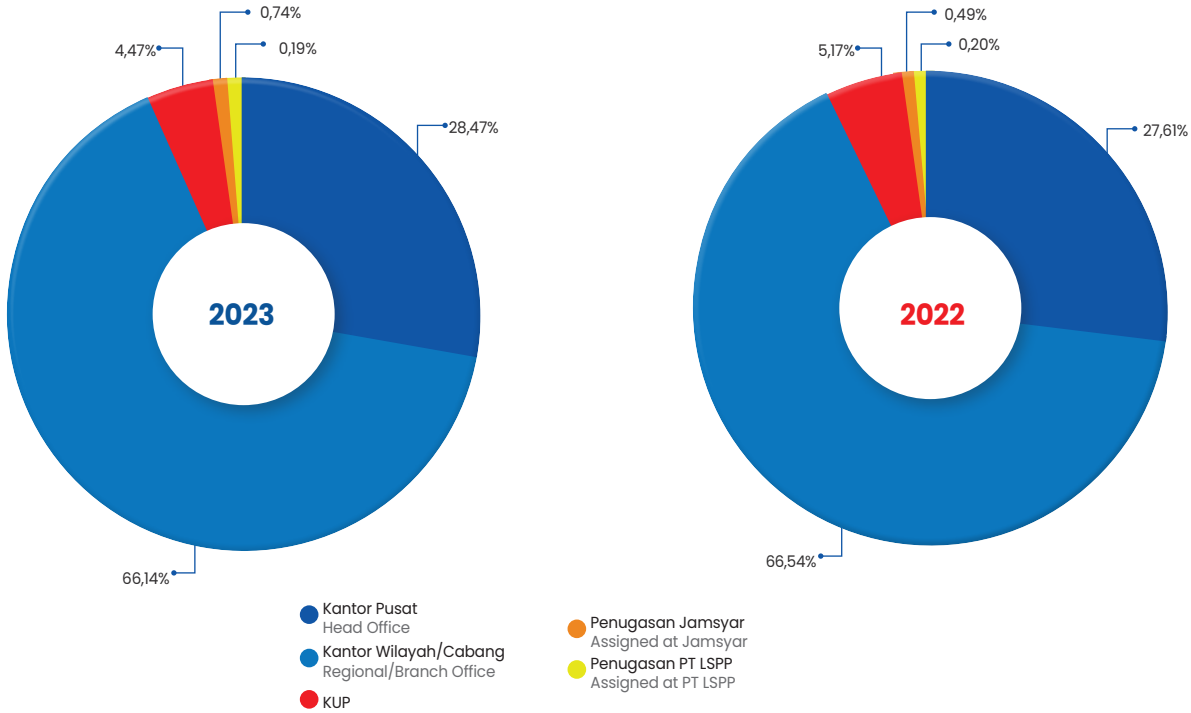
Based on placement/operating area, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees who work in Regional/Branch Offices.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Penempatan/Wilayah Kerja (orang)
Demographic of Permanent Employees by Placement/Operating Area (people)

Penempatan/ Wilayah Kerja Placement/ Operating Area	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
Kantor Pusat Head Office	**161**	**145**	**306**	**28,47%**	150	133	283	27,61%	23	8,13%
Kantor Wilayah/ Cabang Regional/Branch Office	**413**	**298**	**711**	**66,14%**	408	274	682	66,54%	29	4,25%
KUP KUP	**29**	**19**	**48**	**4,47%**	34	19	53	5,17%	-5	-9,43%
Penugasan Jamsyar Assigned at Jamsyar	**6**	**2**	**8**	**0,74%**	4	1	5	0,49%	3	60,00%
Penugasan PT LSPP Assigned at PT LSPP	**1**	**1**	**2**	**0,19%**	1	1	2	0,20%	0	0,00%
Jumlah Total	**610**	**465**	**1075**	**100,00%**	**597**	**428**	**1025**	**100,00%**	**50**	**4,88%**

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Penempatan/Wilayah Kerja
Composition of Total Permanent Employees Based on Placement/Operating Area



Berdasarkan penempatan/wilayah kerja, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap yang bertugas di Kantor Wilayah/Cabang.

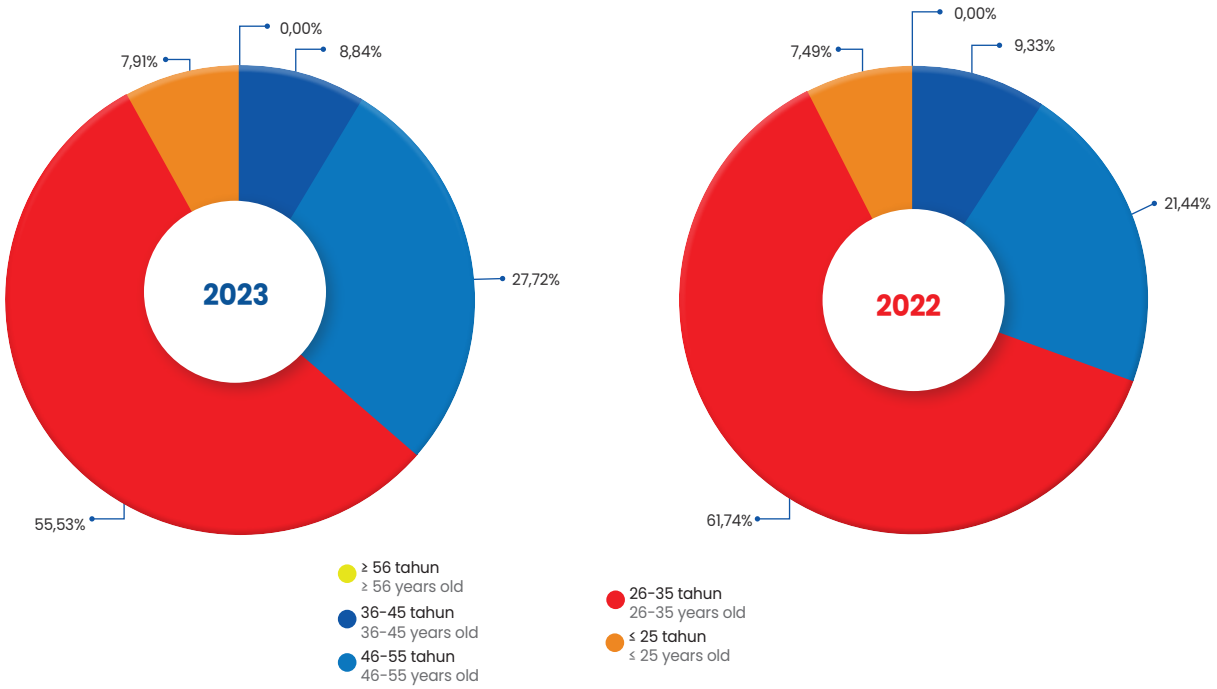
Based on placement/operating area, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees who work in Regional/Branch Offices.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Rentang Usia (orang)
Demographic of Permanent Employees by Age Range (people)

Rentang Usia Age Range	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
≥ 56 tahun ≥ 56 years old	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	0	0	0	0,00%	0	0,00%
46-55 tahun 46-55 years old	**61**	**34**	**95**	**8,84%**	62	32	94	9,33%	1	1,06%
36-45 tahun 36-45 years old	**198**	**100**	**298**	**27,72%**	170	89	259	21,44%	39	15,06%
26-35 tahun 26-35 years old	**329**	**268**	**597**	**55,53%**	337	249	586	61,74%	11	1,88%
≤ 25 tahun ≤ 25 years old	**22**	**63**	**85**	**7,91%**	28	58	86	7,49%	-1	-1,16%
Jumlah Total	**610**	**465**	**1075**	**100,00%**	**597**	**428**	**1025**	**100,00%**	**50**	**4,88%**

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Rentang Usia
Composition of Permanent Employees by Age Range



Berdasarkan kelompok usia, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap yang berada dalam kelompok usia 26-35 tahun

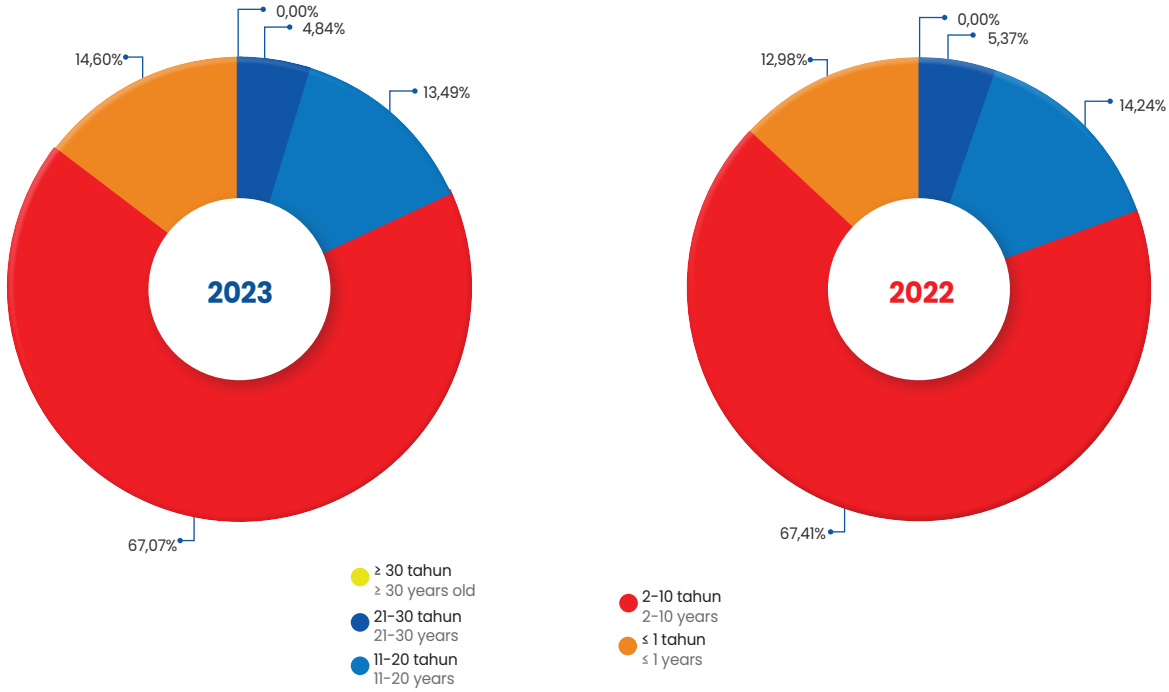
Based on age range, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees in the range of 26-35 year old.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Masa Kerja (orang)
Demographic of Permanent Employees by Serving Period (people)

Masa Kerja Serving Period	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
≥ 30 tahun ≥ 30 years	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
21-30 tahun 21-30 years	30	22	52	4,84%	33	22	55	5,37%	-3	-5,45%
11-20 tahun 11-20 years	86	59	145	13,49%	87	59	146	14,24%	-1	-0,68%
2-10 tahun 2-10 years	437	284	721	67,07%	428	263	691	67,41%	30	4,34%
≤ 1 tahun ≤ 1 years	57	100	157	14,60%	49	84	133	12,98%	24	18,05%
Jumlah Total	610	465	1075	100,00%	597	428	1025	100,00%	50	4.88%

L = Laki-laki/P = Perempuan
M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Masa Kerja
Composition of Permanent Employees by Serving Period



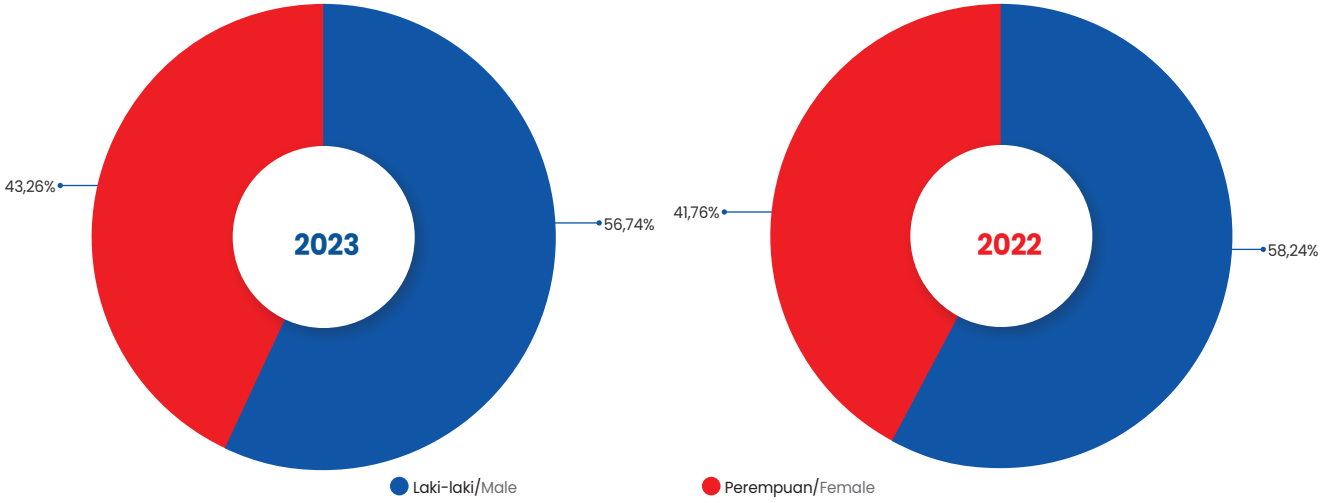
Berdasarkan masa kerja, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap dengan masa kerja 2-10 tahun. Terdapat penambahan karyawan tetap Jamkrindo dengan masa kerja di bawah 1 tahun sebesar 18,05%.

Based on serving period, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees with a service period of 2-10 years. There was an increase in Jamkrindo permanent employees with a serving period of less than 1 year amounting to 18.05%.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)
Demographic of Permanent Employees by Gender (people)

Gender	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Laki-laki Male	**610**	**56,74%**	597	58,24%	13	2,18%
Perempuan Female	**465**	**43,26%**	428	41,76%	37	8,64%
Jumlah Total	**1075**	**100,00%**	**1025**	**100,00%**	**50**	**4,88%**

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Gender
Composition of Permanent Employees Based on Gender



Sebagian besar karyawan tetap Jamkrindo adalah karyawan laki-laki

Most of Jamkrindo's permanent employees are male employees.

Pengembangan Kompetensi

Pengelolaan SDM yang profesional menjadi salah satu fokus utama Jamkrindo dalam menghadirkan produk dan layanan jasa penjaminan kredit yang berkualitas. Perencanaan dan strategi pengembangan SDM merupakan fungsi utama yang dilaksanakan Jamkrindo untuk menjamin SDM yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Tujuan perencanaan dan strategi pengembangan SDM adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam Perusahaan;
2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan dapat terselesaikan;
3. Menghindari terjadinya *miss management* dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat;

Competency Development

Professional HR management is one of Jamkrindo's main focuses in providing quality credit guarantee products and services. HR development planning and strategy is the main function implemented by Jamkrindo to ensure the right human resources to occupy various positions and jobs at the right time.

The objectives of HR planning and development strategies are:

1. To determine the quality and quantity of employees who will fill all positions in the Company;
2. To ensure the availability of current and future labor so that every work can be completed;
3. To prevent the occurrence of mismanagement and overlap in the execution of duties;
4. To facilitate coordination, integration, and synchronization to increase work productivity;

5. Menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrutmen, pengembangan, kompensasi, penilaian kinerja, manajemen karir, dan kedisiplinan hingga pensiun/pemberhentian karyawan;

5. To become a guideline in establishing programs for recruitment, development, compensation, performance assessment, career management and discipline until retirement/dismissal of employees;

Biaya Pengembangan Kompetensi

Secara keseluruhan anggaran Pembelajaran dan Pengembangan SDM yang telah digunakan sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar 118% yaitu Rp27,6 miliar dari total anggaran sebesar Rp26,1 miliar.

Competency Development Costs

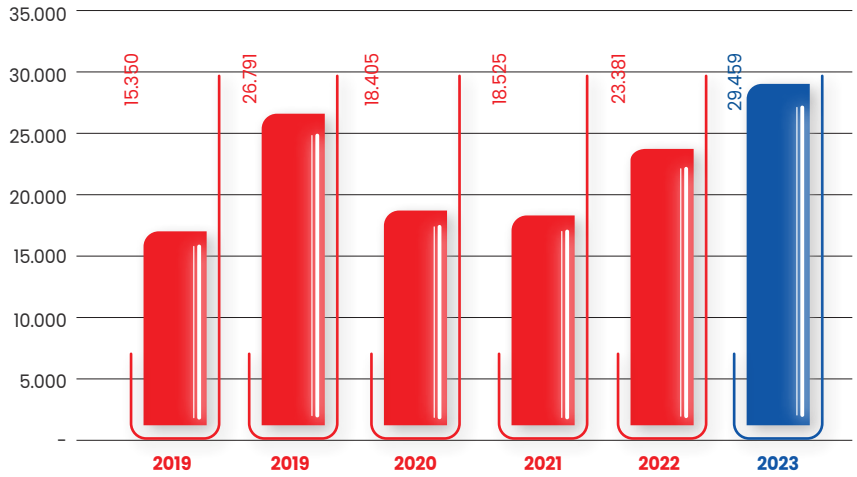
Overall, the HR Learning and Development budget that has been used until December 2023 is 118%, namely IDR27.6 billion of the total budget of IDR26.1 billion.

	Realisasi 2023 (Rp-juta) 2023 Realization (IDR-million)	**Anggaran 2023 (Rp-juta)** 2023 Budget (IDR-million)	**Realisasi 2022 (Rp-juta)** 2022 Realization (IDR-million)	**Realisasi 2023 Terhadap Anggaran 2023** 2023 Realization to 2023 Budget **(%)**	**Realisasi 2023 Terhadap Realisasi 2022** 2023 Realization to 2022 Realization **(%)**
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(1:2)**	**(1:3)**
Biaya Pengembangan Kompetensi Competency Development Costs	27.599	26.104	23.381	106%	118%

Berdasarkan data tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terkait dengan realisasi anggaran Pembelajaran dan Pengembangan SDM, terjadi kenaikan anggaran sebesar 27% pada dari tahun 2022 ke tahun 2023. Besaran biaya pengembangan kompetensi karyawan secara total dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Based on data from 2018 to 2023 related to the realization of the HR Learning and Development budget, there was an increase in the budget amounting to 27% from 2022 to 2023. The total cost of employee competency development can be seen in the graph as follows :

GRAFIK REALISASI ANGGARAN PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN SDM
REALIZATION OF HR LEARNING AND DEVELOPMENT BUDGET



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Struktur Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N nomor 07 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran dasar PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) tanggal 19 Oktober 2022, dijelaskan pemegang saham Jamkrindo sebagai berikut:

1. Saham Seri A sebanyak 1 (satu) lembar milik Negara Republik Indonesia; dan
2. Saham Seri B sebanyak 10.638.732 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Structure of Shareholders

Based on the Deed of Notary by Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.K.N No. 07 dated October 7, 2022 concerning Amendments to the Articles of Association of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dated October 19, 2022, the shareholders of Jamkrindo are explained as follows:

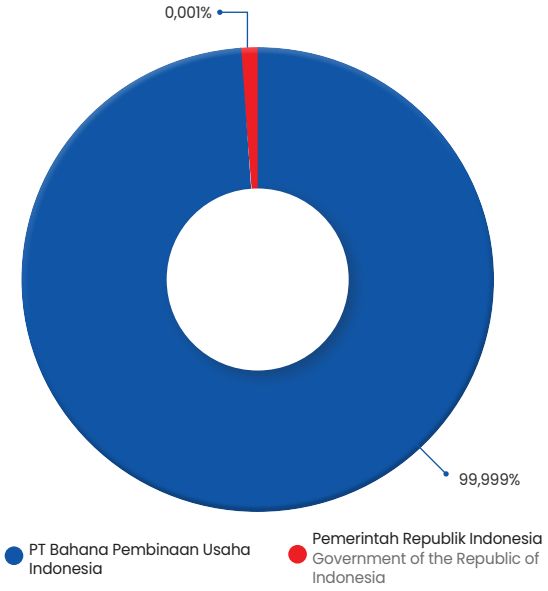
1. Series A shares as much as 1 (one) share owned by the Republic of Indonesia; and
2. Series B shares amounted to IDR10,638,732 (ten million six hundred thirty eight thousand seven hundred thirty two) shares owned by the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Kepemilikan Saham Jamkrindo per 31 Desember 2023
Jamkrindo's Ownership as of December 31, 2023

Pemegang Saham Shareholders	**Jumlah Saham (lembar)** Total Shares (Sheet)	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)** Paid-Up and Issued Capital (IDR)	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership **(%)**
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1	1.365.160	0,000012832%
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia*	10.638.732	10.638.732.000.000	99,99998717%
Jumlah Total	**10.638.733**	**10.638.733.000.000**	**100,00%**

1 Lembar Saham = Rp1.000.000
1 Sheet of Share = Rp1.000.000

Komposisi Pemegang Saham Jamkrindo per 31 Desember 2023
Jamkrindo Shareholder Composition as of December 31, 2023



Informasi Tentang Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Kelompok Pemegang Saham Masing-masing di Bawah 5 (Lima) Persen

Hingga 31 Desember 2023, Jamkrindo tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan Program Kepemilikan Saham Manajemen, atau *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Seluruh kepemilikan saham sesuai dengan penjelasan di atas. Sehingga, tidak ada pejabat Perusahaan ataupun karyawan yang memiliki saham Perusahaan.

Information About Share Ownership by Management and Shareholder Groups Less Than 5 (Five) Percent

As of December 31, 2023, Jamkrindo does not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) policy and a Management Stock Ownership Program (MSOP). The Company also does not conduct an Initial Public Offering of Shares that allows the public ownership of the Company's shares. All shareholdings are in accordance with the above explanation. Thus, no company officials or employees own shares of the Company.

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali Hingga Entitas Pemilik Akhir

"Pemerintah Republik Indonesia merupakan entitas pemilik akhir dari Jamkrindo dengan kepemilikan sebesar 100%, yang terdiri dari kepemilikan langsung sebesar 0,000012832% dan sisanya sebanyak 99,99998717 kepemilikan tidak langsung melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)"

Information About Major/Controlling Shareholders up to Ultimate Owner Entities

"The Government of the Republic of Indonesia is the ultimate owner entity of Jamkrindo with 100% ownership, consisting of direct ownership of 0,000012832% and the remaining 99,99998717% indirect ownership through PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)"

Seperti telah dijelaskan di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Akta Perubahan Anggaran Dasar nomor 07 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran dasar PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) tanggal 19 Oktober 2022, Jamkrindo resmi menjadi anak usaha dari holding Asuransi dan Penjaminan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI). Dengan demikian, BPUI bertindak sebagai entitas induk Jamkrindo.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; kuasa Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Pemerintah Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus entitas pemilik akhir Jamkrindo.

As described above, based on Government Regulation No. 20 of 2020 dated March 16, 2020 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia and Amendment to the Deed of Articles of Association No. 7 dated October 7, 2022 concerning Amendment to the Articles of Association of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dated October 19, 2022, Jamkrindo officially became a subsidiary of the Holding insurance and guarantee of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI). Thus, BPUI acts as the parent entity of Jamkrindo.

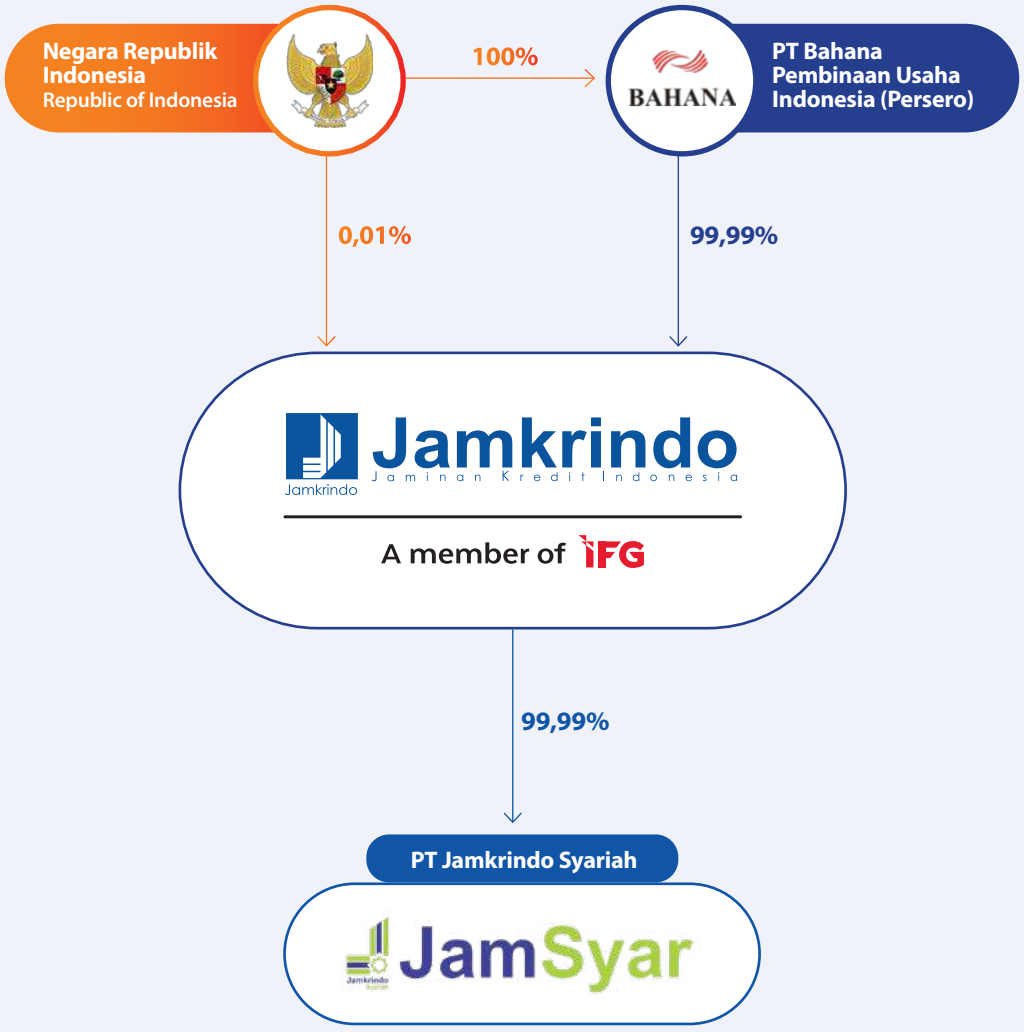
In accordance with Government Regulation No. 41 of 2003 concerning The Delegation of Position, Duties and Authority of the Minister of Finance to Limited Corporation (Persero), Public Corporation (PERUM) and Service Corporation (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and State Gazette of the Republic of Indonesia; the power of the Main Shareholder/Controlling Company is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs). Thus, the Ministry of SOEs as the power of shareholders of the Government of Indonesia acts as the main/controlling shareholder as well as the ultimate owner entity of Jamkrindo.

Entitas Induk Parent Entity		
Nama Name	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Bentuk dan Status Badan Usaha Form and Status of Business Entity	:	Perseroan Terbatas (PT); Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Limited Liability Company (PT); State-Owned Enterprises (SOEs)
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	:	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional. Government Regulation No. 18 of 1973 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia for The Company's Establishment in the National Private Business Development Sector as amended by Government Regulation No. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia for The Company's Establishment in the National Private Business Development Sector.
Tanggal Pendirian Date of Establishment	:	17 April 1973 April 17, 1973
Bidang Usaha Line of Business	:	Bidang asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasehat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya termasuk pada usaha pengelolaan gedung perkantoran. Insurance, guarantees, venture capital, securities, investment managers, investment advisors, financial consultants and management consultants, as well as other financial services businesses including office building management businesses.
Kepemilikan Ownership	:	Pemerintah Republik Indonesia 100,00% The Government of Republic Indonesia 100.00%
Modal Dasar Authorized Capital	:	Rp240.000.000.000.000 IDR240,000,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid-Up and Issued Capital (IDR)	:	Rp90.163.537.000.000 IDR90,163,537,000,000
Alamat Address	:	Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT. 5/RW. 3, Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT. 5/RW. 3, Senayan, Kebayoran Baru South Jakarta, DKI Jakarta 12190
Telepon Phone	:	(+62 21) 50890929
Email	:	cs@ifg.id
Situs Web Website	:	https://ifg.id

Entitas Induk Parent Entity	
Manajemen Management	**Dewan Komisaris** • Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Fauzi Ichsan • Komisaris Independen, Hotbonar Sinaga • Komisaris, Masyita Crystallin • Komisaris, Sumiyati • Komisaris, Nasrudin • Komisaris, Wahyu Setyawan **Direksi** • Direktur Utama, Hexana Tri Sasongko • Wakil Direktur Utama, Haru Koesmahargyo • Direktur SDM, Rizal Ariansyah • Direktur Bisnis, Pantro Pander Silitonga • Direktur Teknik, Rianto Ahmadi • Direktur Keuangan, Heru Handayanto **Board of Commissioners** • President Commissioner concurrently Independent Commissioner, Fauzi Ichsan • Independent Commissioner, Hotbonar Sinaga • Commissioner, Masyita Crystallin • Commissioner, Sumiyati • Commissioner, Nasrudin • Commissioner, Wahyu Setyawan **Board of Director** • President Director, Hexana Tri Sasongko • Vice President Director, Haru Koesmahargyo • Director of Human Resources, Rizal Ariansyah • Director of Business, Pantro Pander Silitonga • Technical Director, Rianto Ahmadi • Director of Finance, Heru Handayanto

Pemegang Saham Utama/Pengendali sekaligus Entitas Pemilik Akhir Main/Controlling Shareholder as well as the Ultimate Owning Entity	
Pemerintah Republik Indonesia/Kepresidenan Government of the Republic of Indonesia/Presidency	Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No. 3 RT. 2/RW. 3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Indonesia Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No. 3 RT. 2/RW. 3, Kel. Gambir Kec. Gambir, Central Jakarta DKI Jakarta 10110, Indonesia
	Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 3845627 www.setneg.go.id Office of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Jl. Veteran No. 17-18 Central Jakarta 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 3845627 www.setneg.go.id
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ministry of State-Owned Enterprises (SOE)	Kantor Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 www.bumn.go.id Office of the Ministry of SOEs Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Central Jakarta 10110 DKI Jakarta, Indonesia Telp. +62 21 29935678 Fax. +62 21 29935740 www.bumn.go.id

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA
GROUP AND BUSINESS GROUPS STRUCTURE



DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI/JOINT VENTURE (JV)/ SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

CHRONOLOGICAL SHARE ISSUANCE AND LISTING OF OTHER SECURITIES

Per 31 Desember 2023, Jamkrindo memiliki satu entitas anak perusahaan, yakni PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar), yang bergerak di bidang Jasa Penjaminan Syariah.

As of December 31, 2023, Jamkrindo has one subsidiary entity, namely PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar), which operates in the Sharia Guarantee Services sector.

Entitas Anak Subsidiary	**Bidang Usaha** Line of Business	**Domisili** Domicile	**Tahun Pendirian** Year of Establishment	**Tahun Beroperasi** Year of Operation	**Kepemilikan Saham** Share Ownership **(%)**		**Jumlah Aset (Rp-juta)** Total Assets (IDR-million)		**Status Operasi** Operation Status
					2023	**2022**	**2023**	**2022**	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Business	Jakarta	2014	2014	99,929%	99,929%	2.452.095	2.449.452	Beroperasi Operating

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar)

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar)

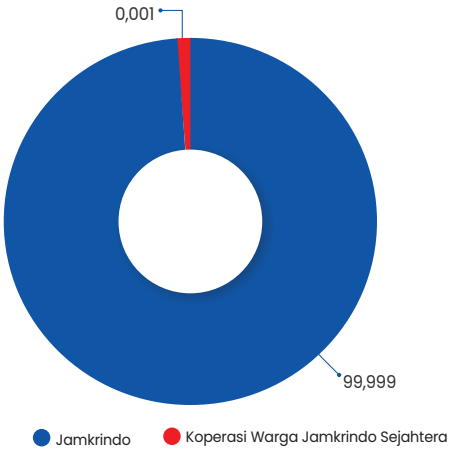
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No. 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan hAm Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan hAm No. AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014, kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung *tagline* "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, Responsif, dan Inovatif".

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") was established on September 16, 2014 and obtained an operational permit on November 7, 2014. Jamsyar was established through Notarial Deed No. 68 made by the Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014 which was registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No.AHU-26462.40.10.2014 concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of PT Jamkrindo Syariah dated September 24, 2014. It received an operation permit from the Financial Services Authority (OJK) through the OJK letter No. KEP-134/d.05/2014 dated November 7, 2014 concerning the Granting of a Sharia Guarantee Company Business License to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar is engaged in the Sharia Guarantee Services business, with the tagline "Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative".

Perusahaan memiliki 99,929% saham Jamsyar, sementara sisanya sebesar 0,0710% dimiliki oleh Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

The Company owns 99,929% of Jamsyar shares, while the remaining 0,0710% is owned by Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

Kepemilikan Jamsyar
Jamsyar Ownership



Ikhtisar Keuangan Jamsyar
Jamsyar Financial Highlights

	2023 (Rp-juta)	2022 (Rp-juta)
Pendapatan Income	**333.437**	503.297
Beban Usaha Operating Expenses	**128.258**	113.972
Laba Bersih Net Income	**33.889**	189.630
Laba Komprehensif Comprehensive Income	**48.296**	168.778
Aset Asset	**2.452.095**	2.449.452
Liabilitas Liabilities	**1.257.974**	1.303.627
Ekuitas Equity	**1.194.121**	1.145.825

Manajemen Kunci Jamsyar per 31 Desember 2023
Jamsyar Key Management As of December 31, 2023

Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Komisaris Utama | President Commissioner	:	Aribowo
Komisaris Independen | Independent Commissioner	:	Edy Utomo*
Komisaris | Commissioner	:	Alie Basya Syamsudin*
Direksi Board of Directors		
Direktur Utama | President Director	:	Hari Purnomo*
Direktur Operasional | Director of Operations	:	Loesdarwanto*
Direktur Keuangan, SDM, dan Umum | Director of Finance, HR, and General Affairs	:	Endang Sri Winarni
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board		
Ketua Dewan Pengawas Syariah | Chairman of Sharia Supervisory Board	:	M. Asrorun Ni'am Sholeh*
Anggota Dewan Pengawas Syariah | Member of Sharia Supervisory Board	:	Muhammad Syakir Sula*
Anggota Dewan Pengawas Syariah | Member of Sharia Supervisory Board	:	Abdul Aziem

*) efektif setelah fit and proper test OJK I *) effective after OJK fit and proper test

KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM DAN PENERBITAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGICAL ISSUANCE AND LISTING OF OTHER SECURITIES

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan belum melakukan perdagangan saham kepada publik dan pencatatan saham di bursa efek baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham mencakup tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan nama bursa di mana saham dicatatkan.

Throughout 2023, the Company has not traded shares to the public or listed shares on stock exchanges either in Indonesia or abroad. Therefore, there is no information related to the share trades, including year of shares issuance, number of shares, nominal value of shares, and share offering price for each corporate action; number of shares listed after each corporate action; and the name of the stock exchange on which Company shares are listed.

Perusahaan juga tidak menerbitkan efek apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

The Company also does not issue any securities. Therefore, there is no information regarding the name of other securities, the year of other securities issuance, the interest rate/reward of other securities, and other securities maturity dates; value of other securities; name of the exchange in which other securities are listed; and securities ratings.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

Nama dan Alamat Kontak Lengkap Name and Address		**Jenis dan Bentuk Jasa** Types and Forms of Services	**Biaya** Costs	**Periode Penugasan** Period
Pemeringkat Perusahaan Rating Companies	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)	Jasa Pemeringkatan Perusahaan Corporate Rating Service	-	-
Kantor Akuntan Publik Public Accountant	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC) Gedung WTC, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 29, RT.4/RW.2, Kuningan, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12920	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 General Audit of Financial Statements for Financial Year 2023	Rp5.900.000.000	Ke-4
Konsultan Aktuaria Actuarial Consultant	PT Padma Radya Aktuaria (KKA Riana dan Rekan) Disctrict 8, Treasury Tower 6th Floor, Unit N Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, SCBD Jakarta 1219	Pekerjaan Jasa Konsultan untuk Perhitungan Imbalan Pasca Kerja Periode 31 Desember 2023 Consulting Services for Calculation of Post-Employment Benefits for the Period of December 31, 2023	-	-
Konsultan Hukum Legal Consultant	-	-	-	-
Jasa Penilai Assessor Service	-	-	-	-

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan pada tahun 2023
Awards in 2023

Tanggal	Deskripsi	Dokumentasi
September 7, 2023 September 7, 2023	PT Jamkrindo memenangkan penghargaan TrenAsia ESG Award 2023 pada kategori Credit Guarantee for Sustainability. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada Jamkrindo yang senantiasa berkontribusi terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM serta ekonomi nasional. PT Jamkrindo won the 2023 TrenAsia ESG Award in the category of Credit Guarantee for Sustainability. This award is a form of appreciation to Jamkrindo which always contributes to the growth and sustainability of MSMEs and the national economy.	
September 18, 2023 September 18, 2023	Jamkrindo kembali meraih penghargaan SWA Indonesia Most Reputable Companies 2023 pada kategori Guarantee Company. Jamkrindo again won the 2023 SWA Indonesia Most Reputable Companies award in the category of Guarantee Company.	
September 21, 2023 September 21, 2023	PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) kembali berhasil memperoleh penghargaan di ajang IDX Channel Anugerah Inovasi 2023. Dalam ajang tersebut, IDX Channel memberikan apresiasi atas Inovasi Jamkrindo Online Suretyship (JOS) untuk kategori Hubungan Eksternal. Hadir dalam simbolis penyerahan penghargaan pada Rabu, 20 September 2023 yaitu Wakil Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan II PT Jamkrindo. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) has again succeeded in winning an award at the 2023 IDX Channel Anugerah Innovation. In this event, IDX Channel expressed appreciation for the Jamkrindo Online Suretyship (JOS) Innovation in the category of External Relations. Present at the symbolic award presentation on Wednesday, September 20, 2023 was the Deputy Head of Institutional Relations Division II of PT Jamkrindo.	

Penghargaan pada tahun 2023
Awards in 2023

Tanggal	Deskripsi	Dokumentasi
November 10, 2023 November 10, 2023	PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) berhasil memperoleh penghargaan di acara Indonesia Digital Ecosystem Summit (IDES) 2023. Dalam ajang tersebut, SWA Media *Group* memberikan penghargaan kepada Jamkrindo sebagai perusahaan terbaik yang telah menyiapkan *ecosystem digital* untuk kepentingan bisnis di masa depan, dengan mendapatkan Predikat *Very Good*. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) has succeeded in winning an award at the 2023 Indonesia Digital Ecosystem Summit (IDES). In this event, SWA Media Group awarded Jamkrindo as the best company that has prepared a digital ecosystem for future business interests, by receiving a Very Good Predicate.	
November 21, 2023 November 21, 2023	PT Jamkrindo berhasil mendapatkan anugerah Santripreneur Award 2023 kategori BUMN yang Peduli Entrepreneur/UMKM di Istana Wakil Presiden pada Senin, 20 November 2023 yang dihadiri oleh Direktur Utama PT Jamkrindo Bapak Akhmad Purwakajaya. PT Jamkrindo succeeded in receiving the 2023 Santripreneur Award in the category of SOE that Cares about Entrepreneurs/ MSMEs at the Vice President's Palace on Monday, November 20, 2023, which was attended by the President Director of PT Jamkrindo, Mr. Akhmad Purwakajaya.	
November 30, 2023 November 30, 2023	PT Jamkrindo memenangkan penghargaan TrenAsia ESG Award 2023 pada kategori Credit Guarantee for Sustainability. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada Jamkrindo yang senantiasa berkontribusi terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM serta ekonomi nasional. PT Jamkrindo won the 2023 TrenAsia ESG Award in the category of Credit Guarantee for Sustainability. This award is a form of appreciation to Jamkrindo which always contributes to the growth and sustainability of MSMEs and the national economy.	

Sertifikasi yang masih berlaku di Tahun 2023
Certification in 2023

Tanggal Date	Nama Sertifikasi Name of Certification	Berlaku Hingga Valid until	Diberikan oleh Organizer
25 Oktober 2021 October 25, 2021	Sistem Manajememen Mutu (SMM) SNI ISO 9001 : 2015 Quality Management System, Requierements (Guarantee & Claim Service) Quality Management System (QMS) SNI ISO 9001: 2015 Quality Management System, Requierements (Guarantee & Claim Service)	1 Mei 2024 May 1, 2024	SUCOFINDO INTERNASIONAL CERTIFICATION SERVICE
17 September 2023 September 17, 2023	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 : 2016 (Anti Bribery Management System) Anti-bribery Management System (ABMS) SNI ISO 37001: 2016 (Anti Bribery Management System)	4 Agustus 2026 August 4, 2026	Intertect SAI Global

Sertifikasi yang masih berlaku di Tahun 2023
Certification in 2023

Tanggal Date	**Nama Sertifikasi** Name of Certification	**Berlaku Hingga** Valid until	**Diberikan oleh** Organizer
28 Januari 2023 January 28, 2023	Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi SNI ISO 20000 : 2018 Anti-bribery Management System (ABMS) SNI ISO 37001: 2016 (Anti-Bribery Management System)	27 Januari 2026 August 4, 2026	BSI (British Standards Institution)
29 April 2019 April 29, 2019	Sistem Manajemen Keamanan Infomasi SNI ISO 27001 : 2013 Information Security Management System SNI ISO 27001: 2013	28 April 2025 April 28, 2025	BSI (British Standards Institution)
1 November 2023 November 1, 2023	Business Continuity Management System SNI ISO 22301 Business Continuity Management System SNI ISO 22301	1 November 2024 November 1, 2024	BSI Group

KEANGGOTAAN ASOSIASI
ASSOCIATION MEMBERSHIP

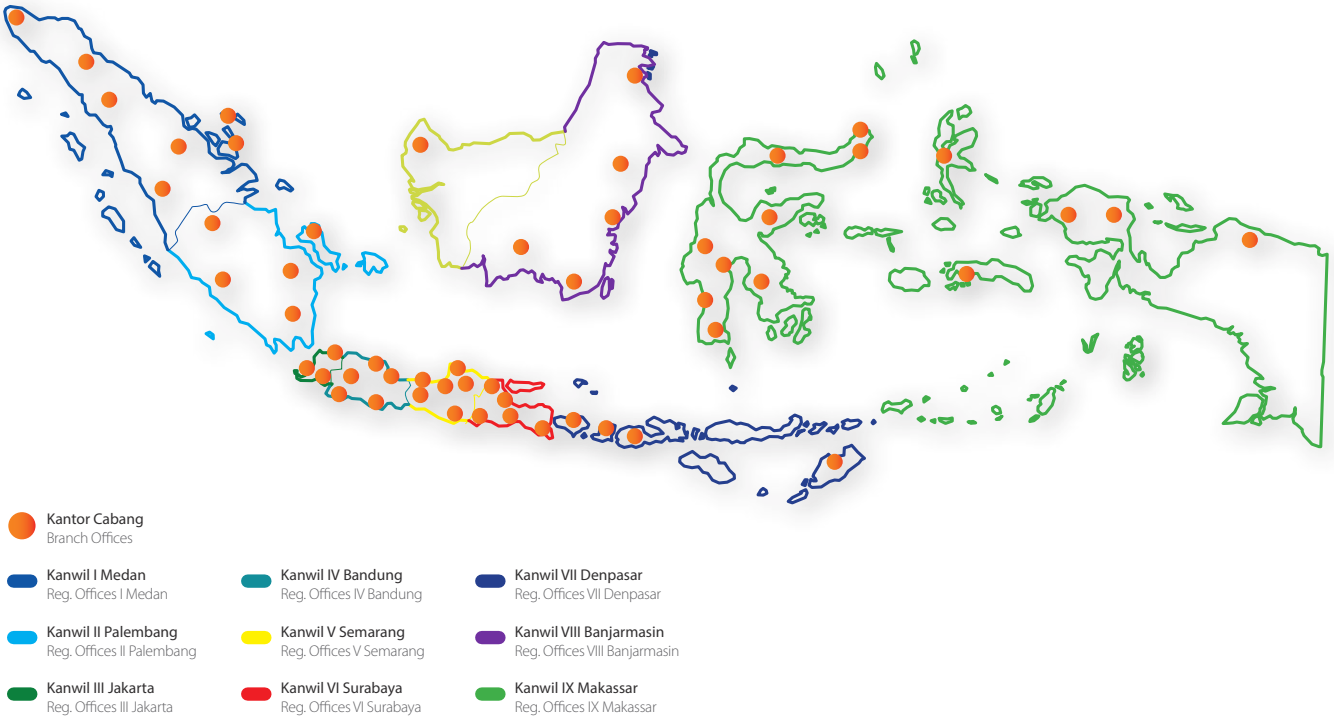
Dalam rangka untuk memperkuat bisnisnya, Jamkrindo telah tergabung dalam keanggotaan organisasi, sebagai berikut:

To strengthen its business, Jamkrindo has joined the following membership organizations :

Nama Organisasi/Asosiasi Name of Organization/Association	**Ruang Lingkup** Scope	**Posisi Keikutsertaan** Position
Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO)	Nasional National	Anggota Member

DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK DAN KANTOR CABANG/KANTOR PERWAKILAN

ADDRESS LIST OF SUBSIDIARIES AND BRANCH OFFICES/REPRESENTATIVE OFFICES



Kantor Pusat PT Jamkrindo	:	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia Telp: +62 21 6540335 Fax: +62 21 6540344, 6540348 Website: www.jamkrindo.co.id Email: contact@jamkrindo.com
Entitas Anak Subsidiary		
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	:	Gedung Jamsyar Jl. Letjend Suprapto No.20 Blok A II/4 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat 10510 Telp: +62 21 6540386 Fax: +62 21 6540389 Website: www. jamkrindosyariah.com Email: info@jamkrindosyariah.com

Kantor Wilayah
Regional Office

Kanwil Regional Office		Alamat Address
I	Medan	Jl. Bukit Barisan No. 03 Medan – 20111; Telp: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192
II	Palembang	Jl. Basuki Rahmat Ruko No. 2-3 Kec. Kemuning Palembang 30127; Telp: (0711) 5556582 Fax: (0711) 5556589
III	Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp (021) 6540335 Fax (021) 6540387
IV	Bandung	Jl. Soekarno Hatta No 774 RT 06 RW 07 Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung 40293 ; Telp : (022) 87357777 Fax: (022) 87357777
V	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang, Jawa Tengah; Telp: (024) 7601797; Fax: (024)7614138
VI	Surabaya	Gedung Jamkrindo, Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2 - 3 Surabaya; Telp: (031) 8685567 Fax: (031) 8670568
VII	Denpasar	Pertokoan Dewata Square Blok A12 Jl. Letda Tantular, Renon. Denpasar -80232; Telp: (0361) 286854 Fax: (0361) 286267
VIII	Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210 B Banjarmasin - Kalimantan Selatan; Telp: (0511) 6744706 Fax: (0511) 3273435
IX	Makassar	Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112 Telp: 0411-875836 Fax: (0411) 8099005

Kantor Cabang Khusus
Special Branch Office

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	Alamat Address
Kantor Cabang Khusus Jakarta Jakarta Special Branch Office	Gedung Lippo Kuningan Lt. 10, Jl. Haji R. Rasuna Said Kav. B12 RT 6 RW 7 Karet Kuningan Jakarta Selatan 12920

Kantor Cabang
Branch Offices

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office		Alamat Address
I	1	Medan	Jl. Sei Serayu No. 40 Medan, Sumatera Utara; Telp: (061) 4152827/4155767 Fax: (061) 4156775
	2	Pekan Baru	JL. Jend. Sudirman No 150, Kel. Suka Ramai - Pekanbaru 28113 Telp : 0761-854311, 854870 Fax : 0761-848801
	3	Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C Padang, Sumatera Barat; Telp: (0751) 7050598 Fax: (0751) 447165
	4	Tanjung Pinang	Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji NO. 6 Telp : (0771) 316919
	5	Batam	Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No.9 Jl Raja Ali Haji Fisabilillah, Batam Center, Batam Telp (0778) 7495993 Fax (0778)469019
	6	Balige	Jl. Sisingamangaraja No.87, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir 22316 Sumatera Utara Telp/Fax : (0632) 21501/(0632) 21722
II	7	Palembang	Jl. Residen abdul rozak no.188-189 kelurahan kalidoni Palembang; Telp: (0711) 7826393 Fax: (0711) 7826398
	8	Jambi	Jl. Soemantri Brojonegoro No. 23 RT 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Telp: (0741) 668707 Fax: (0741) 668115
	9	Bengkulu	Jl. Ahmad Yani Rt. 004/Rw 001 No.28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-38119; Telp: (0736) 344541 Fax: (0736) 344249
	10	Lampung	Jl. Jend Sudirman No.128 RT.001 RW 001, Rawa Laut, Enggal. Bandar Lampung; Telp: (0721) 778511 Fax: (0721) 778513
	11	Pangkal Pinang	Jl. A Yani No. 11 H Pangkal Pinang – 33136; Telp: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816
III	12	Jakarta	Gedung JAMKRINDO Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran Jakarta Pusat - 10610 Telp : (021) 6540409
	13	Pontianak	Jl. Moch. Solor No 4. RT/RW 004/007, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78121 Telp: (0561) 749095, Fax: (0561) 7461468

Kantor Cabang
Branch Offices

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office		Alamat Address
	14	Serang	Ruko Cipare Blok A1 Jl. Jendral A. Yani No. 34, Serang, Banten - 42117, Telp/Fax : (0254) 228999/ (0254) 229247
	15	Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1 Jl.Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322
IV	16	Bandung	Jl. Soekarno Hatta No 774 RT 06 RW 07 Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung 40293 Telp: (022) 86359999
	17	Cirebon	Jl. Dr Sudarsono No. 10 B RT.004 RW.005, Kesambi- Kota Cirebon, Jawa Barat; Telp: (0231) 8336851 Fax: (0231) 8336850
	18	Purwakarta	Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No.6 RT/RW 01/01 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa Barat; Telp: (0264) 8304002 Fax: (0264) 8304002
	19	Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No.90 Rt.05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi 43113; Telp: (0266) 6223811 Fax: (022) 6223868
	20	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 52 Kel. Empangsari, Kec.Tawang, Kota Tasikmalaya Telp : (0265) 235 4445
V	21	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang; Telp: (024) 7614136/ 7610129 Fax: (024) 7614138
	22	Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.161 A, Tegalrejo Kota Yogyakarta - 55244; Telp: (0274) 5012288/5012323 Fax: (0274) 5012545
	23	Solo	Jl. Honggowongso No.141 A, RT/RW 004/005 Kel. Kratonan, Kec. Serengan Surakarta; Telp: (0271) 2936030 Fax: (0271) 2936030
	24	Purwokerto	Ruko Centrum Unit A Jl. Komisaris Bambang Suprapto No. 21-23 Kel. Purwokerto Lor, Kec.Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah; Telp: (0281) 6572555 Fax: (0281) 6574755
	25	Kudus	Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12-14 Kel. Nganguk, Kec Kota Kudus. Jawa Tengah – 59312; Telp: (0291) 430757 Fax: (0291) 430758
	26	Tegal	Jl. Gajah Mada No.21, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah 52121
VI	27	Surabaya	Jl. Diponegoro No. 171. Surabaya, Telp: (031) 5679848 Fax: (031) 5679592
	28	Kediri	Jl. Kilisuci No.85 Kota Kediri; Telp: (0354) 7418826 Fax: (0354) 680881
	29	Banyuwangi	Jl. Letjend S. Parman No. 116, Kel. Sumberrejo, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi – 68419; Telp: (0333) 418140 Fax: (0333) 425804
	30	Malang	Jl. Semeru No.66, Kel. Oro-oro Dowo, Kec Klojen. Kota Malang 65112 Tlp (0341) 3018571 Fax (0341) 3019116
	31	Madiun	Jl. Thamrin No. 38, Madiun – 63117; Telp: (0351) 4472250 Fax: (0351) 4472249
VII	32	Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76 Denpasar Telp : (0361) 286854
	33	Mataram	Jl. Sriwijaya Ruko 4 No. 179, Mataram; Telp: (0370) 644573/ 644747 Fax: (0370) 644572
	34	Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82 kec. Sumbawa Besar NTB, Telp : 0371-2629239
	35	Kupang	Jl. Jenderal Soeharto No.110 Blok.A, RT 20, RW 008, Kel Naikolan, Kec Maulafa, Kota Kupang-NTT 85111; Telp: (0380) 8553899 Fax: (0380) 8554088
VIII	36	Samarinda	Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117; Telp: (0541) 747608 Fax: (0541) 206578
	37	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No.17 B Kuripan Banjarmasin-70236; Telp: (0511) 3273345 Fax: (0511) 3273435
	38	Palangkaraya	Jl. Yos Sudarso No. 6 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 73112 Telp/fax : (0536) 4264269/(0536) 3242394
	39	Tarakan	Jl. Jend Sudirman RT.04 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan - 77113; Telp: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494
	40	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.11. Balikpapan - 76114; Telp: (0542) 8504032 Fax: (0542) 8504033
IX	41	Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Telp : (0411)873031
	42	Gorontalo	Jl. HB Jassin No.218, Kel. Libuo, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo Telp (0435) 828003 Fax: (0435) 828002
	43	Mamuju	Jl. Urip Sumoharjo No.55 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91515 Telp : (0426)2324878

Kantor Cabang
Branch Offices

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office		Alamat Address
	44	Ambon	Jl Philip Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126; Telp: (0911) 351770
	45	Ternate	Jl. Inpres No. 7 Ubo – Ubo Kel. Tabona Telp : (0921)3122739
	46	Jayapura	Jl. Raya Kelapa Dua Enterop No. 2 (Depan Kantor Distrik Jayapura Selatan) Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Telp/Fax : (0967) 524424/(0967) 524423
	47	Manokwari	Jl. Trikora, Wosi,Manokwari Papua Barat Telp : (0986)214184
	48	Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C Palu - Sulteng 94121 Telp :(0451) 4131812
	49	Kendari	Jl. La Ode Hadi No 56 B Kendari - 93118 Telp : (0401)3196780
	50	Manado	Kawasan Mega Mas Blok F1 No.22 Kelurahan Titiwungan Selatan, Kecamatan Sario 95113 (62-431) 865194/865198
	51	Bitung	Jl. Sam ratulangi No.1 Bitung, Sulawesi Utara Telp : (0438) 35939
	52	Pare-pare	Jl. Andi mappatola no 30 c parepare, sulawesi selatan Telp : 0421-2914592
	53	Palopo	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 90 Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Provinsi Sulawesi Selatan - 91911; Telp: (0471) 23006 Fax: (0471) 326925
	54	Sorong	Jl. Basuki Rahmat KM 9 Sorong (Samping BLKI) - Papua Barat Telp: (0951)329081

Kantor Unit Pelayanan (KUP)
Service Unit Offices (KUP)

Kanwil Regional Office	KUP Service Unit Office		Alamat Address
I	1	Dumai	Jl Jendral Sudirman No.391 Dumai Kota Telp: (0765) 439037
	2	Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No.04 Rantau Prapat Sumatera Utara; Telp: 0624-326333 Fax: 0624-326222
	3	Mandailing Natal	Jl. Willem Iskandar No. 81 Panyabungan – 22913; Telp: 0636-3221148 Fax: 0636-3221774
II	4	Lubuk Linggau	Jalan Yos Sudarso RT 001 No.366 Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan Telp : 0733 3281182
III	5	Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor Telp : (0251) 7564211
	6	Cibinong	Ruko Cibinong City Center Jalan Tegar Beriman 1 Blok A No. 29 Cibinong Kab Bogor Telp : (021) 29335250
	7	Bekasi	Ruko Perkantoran Jl.Jend A Yani Marga Jaya Bekasi Selatan 17148 Telp: (021) 82691292
IV	8	Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi Telp/Fax : (022) 20661506/(022) 20661522
V	9	Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah; Telp: (0293) 3201767 Fax: (0293) 3201770
	10	Cilacap	Jl Jend. Sudirman No 17, Cilacap, Telp: (0282) 531194/ 532010 Fax: (0282) 531115
VI	11	Surabaya Kota	Jl. Dr. Ir H. Soekarno No.360 B, Surabaya Telp (031) 87858114 Fax (031) 87858114
	12	Pamekasan	Jl Jokotole No.26, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan Telp : 0324 - 3510118
	13	Jember	Jl. KH Wahid Hasyim No. 12B, Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Jawa Timur Kode pos 68137 Telp & Fax : 0331-4431044
	14	Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.15, Bojonegoro – 62111; Telp: (0353) 2898420 Fax: (0353) 2899525
VIII	15	Pangkalan Bun	Jl. Iskandar Kec.Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113
IX	16	Watampone	Jalan Ahmad Yani No 29 B Kel. Macanang, Kec. Tanete. Provinsi Sulawesi Selatan Telp :0481 2921375
	17	Pekalongan	Jl. KH. Mansyur No. 164 B, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan; Telp : 0285-8359006

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN
INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE



Situs web merupakan salah satu sarana dalam memenuhi keterbukaan informasi yang diperlukan oleh segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik. Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id, disajikan secara komunikatif dan dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

Situs resmi Perusahaan telah menyajikan informasi umum tentang Perusahaan, informasi bagi Pemodal atau Investor berupa informasi tentang Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, serta informasi Tata Kelola Perusahaan. Pada situs web Perusahaan juga disajikan informasi penting lainnya seperti informasi tentang kegiatan Perusahaan serta informasi tentang produk dan layanan Perseroan.

Website is a means of fulfilling the information disclosure required by all stakeholders and the general public in accordance with the principles of transparency and openness of information to the public. The Company has an official website, www.jamkrindo.co.id, presented communicatively and openly accessible, with the aim of providing comprehensive information about the Company to a wide audience.

The Company's official website provides general information about the Company, information for Investors in the form of information about Financial Reports and Annual Reports, as well as information about Corporate Governance. The Company's website also provides other important information such as information about the Company's activities and information about the Company's products and services.

Adapun kesesuaian situs web Perusahaan dengan kebutuhan informasi kepada publik, khususnya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut.

The suitability of the Company's website with the public's needs of information, especially shareholders and stakeholders, is as follows.

Uraian Description	**Ketersediaan** Availability	**Keterangan** Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Shareholder information up to the individual final owner	v	https://www.jamkrindo.co.id/sejarah-perusahaan
Isi Kode Etik Code of Conduct	v	https://jamkrindo.co.id/code-of-conduct
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan The information of the General Meeting of Shareholders (GMS) shall at least include the agenda materials discussed in the GMS, the summary of the minutes of GMS, and important date information, namely date of GMS announcement, date of GMS summons, date of GMS implementation, date of release of the summary of the minutes of GMS	x	n/a
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) Separate annual financial statements (last 5 years)	v	https://www.jamkrindo.co.id/dokumen/laporan_keuangan
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors	v	https://www.jamkrindo.co.id/manajemen
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	v	https://jamkrindo.co.id/board-manual

v = tersedia pada situs web Jamkrindo | x = belum tersedia pada situs web Jamkrindo
v = available on Jamkrindo website | x = not yet available on Jamkrindo website



Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG



4

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI
ECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

Kondisi Ekonomi Tahun 2023

Konflik geopolitik yang berkepanjangan di Eropa dan Timur Tengah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global di tahun 2023. Kendati sudah mengalami penurunan, namun tingkat inflasi global masih relatif tinggi.

Untuk mengendalikan laju inflasi, The Fed mengambil kebijakan untuk mempertahankan *Federal Funds Rate* (FFR) pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Di 2023, The Fed tercatat beberapa kali menaikkan tingkat suku bunga acuan dari 4,25%-4,50% di akhir tahun 2022 menjadi 5,25%-5,50% di akhir tahun 2023. Demikian juga dengan Bank Sentral Eropa (ECB) yang tercatat menaikkan tingkat suku bunga pinjaman hingga ke level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 4,75%.

Fenomena *higher for longer* memicu *capital outflow* dari pasar keuangan di emerging market dan penguatan nilai tukar dolar amerika serikat terhadap hampir seluruh mata uang lainnya.

Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan *World Economics Outlook* yang diterbitkan pada Januari 2024 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 3,1%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,4%.

Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh solid meski juga mengalami tren perlambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2023 ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% atau melambat dari 5,31% di 2022. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya disebabkan nilai ekspor yang turun menjadi USD258,82 miliar dari USD291,90 miliar di tahun 2022, sejalan dengan normalisasi harga komoditas di sepanjang 2023. Kendati demikian, neraca perdagangan Indonesia tahun 2023 masih mencatatkan surplus sebesar USD36,93. Capaian tersebut menunjukkan kinerja perdagangan Indonesia yang terjaga di tengah perlambatan ekonomi global.

Di samping penurunan ekspor, konsumsi rumah tangga juga melambat menjadi 4,82%. Hal ini disebabkan oleh penurunan konsumsi transportasi akibat kenaikan harga BBM subsidi sejak akhir kuartal 3-2022 dan penurunan konsumsi makanan dan minuman akibat kenaikan harga beberapa bahan pokok.

Kendati pertumbuhan ekonomi sedikit melambat, namun ekonomi Indonesia relatif stabil di 2023. Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah

Economic Conditions in 2023

The prolonged geopolitical conflict in Europe and the Middle East had a huge impact on the global economy in 2023. Even though the global inflation rate has experienced a decline, it is still relatively high.

To control the inflation rate, the Fed adopted a policy of maintaining the Federal Funds Rate (FFR) at a high level for a longer period of time (higher for longer). In 2023, the Fed was recorded to have raised its benchmark interest rate several times from 4.25%-4.50% at the end of 2022 to 5.25%-5.50% at the end of 2023. Similarly, the European Central Bank (ECB) was recorded raising loan interest rates to the highest level in history, namely 4.75%.

The higher for longer phenomenon triggers capital outflows from financial markets in emerging markets and a strengthening of the United States dollar exchange rate against almost all other currencies.

The International Monetary Fund (IMF), in its World Economics Outlook report published in January 2024, projects global economic growth in 2023 at 3.1%, lower than the previous year's growth of 3.4%.

In the midst of slowing global economic conditions, the Indonesian economy could still solidly grow even though it is also experiencing a slowing trend. Based on data from the Statistics Indonesia, in 2023, the Indonesian economy grew 5.05% or slowed down from 5.31% in 2022. The slowdown in Indonesia's economic growth was mainly due to the export value falling to USD 258.82 billion from USD 291.90 billion in 2022, which was in line with the normalization of commodity prices throughout 2023. Nevertheless, Indonesia's trade balance in 2023 still recorded a surplus of USD 36.93. This achievement shows that Indonesia's trade performance was maintained amidst the global economic slowdown.

Apart from the decline in exports, household consumption also slowed to 4.82%. This was caused by a decrease in transportation consumption due to the increase in subsidized fuel prices since the end of the 3rd quarter of 2022 and a decrease in food and beverage consumption due to an increase in the prices of several basic commodities.

Even though economic growth has slowed slightly, the Indonesian economy was relatively stable in 2023. This cannot be separated from the success of the efforts

dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah. Berdasarkan data BPS, inflasi nasional 2023 tercatat sebesar 2,61%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 5,51%. Hal tersebut salah satunya juga karena kebijakan BI yang menaikkan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) menjadi 6,00% dari posisi akhir tahun lalu sebesar 5,50% untuk memastikan inflasi inti tetap terjaga. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas pasar keuangan Indonesia dengan menetapkan suku bunga acuan yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga global.

Di pasar keuangan, dana asing tercatat masuk ke pasar keuangan Indonesia sebesar Rp49,24 triliun. Dana tersebut sebagian besar disumbangkan oleh dana asing yang masuk ke pasar utang yaitu sebesar Rp62,56 triliun. Sedangkan di pasar saham mencatatkan dana keluar sebesar Rp13,32 triliun. Masuknya dana asing tersebut mendorong perbaikan nilai tukar rupiah sebesar 1,14% menjadi Rp15.390.

Industri Penjaminan Tahun 2023

Industri penjaminan kredit memainkan peran penting dalam menjamin risiko penyaluran kredit lembaga perbankan. Beberapa sektor seperti UMKM, misalnya, dinilai sangat membutuhkan peran lembaga penjaminan untuk membantu proses penyaluran pembiayaan dari perbankan berjalan lancar melalui jasa penjaminan risiko kredit.

Walaupun berperan penting dalam menopang perekonomian, industri penjaminan di Tanah Air masih memiliki beragam rintangan dalam menjalankan perannya, mulai dari kurangnya pemahaman dari masyarakat dan lembaga jasa keuangan terkait peran industri penjaminan hingga terbatasnya SDM di bidang penjaminan, telah menghambat industri ini dalam menjalankan fungsinya.

Tahun 2023, industri penjaminan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri penjaminan meningkat 18,63% dari Rp39,12 triliun di tahun 2022 menjadi Rp46,41 triliun di tahun 2023. Di tahun 2023, OJK menerbitkan *Roadmap* Lembaga Penjamin 2023-2027. *Roadmap* ini disusun sebagai peta jalan pengembangan Lembaga Penjamin di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan *roadmap* lembaga penjamin diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan penguatan industri lembaga penjamin sehingga mampu menyediakan jasa yang efisien dan berdaya saing. Lebih lanjut, *roadmap* diharapkan akan menjadi panduan strategis bagi lembaga penjamin di Indonesia dalam mengembangkan produk dan layanannya, merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan investasi dan perluasan bisnis, serta menjaga kesehatan dan tata kelola di masa yang akan datang.

made by the government and Bank of Indonesia (BI) in maintaining the inflation rate at a low level. Based on data from the Statistics Indonesia, national inflation in 2023 was recorded at 2.61%, much lower than the previous year's 5.51%. This was also due to BI's policy of increasing the benchmark interest rate or BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) from 5.50% at the end of 2022 to 6.00% to ensure core inflation was maintained. This was done in order to maintain the stability of the Indonesian financial market by setting a reference interest rate that is higher than global interest rates.

In the financial market, foreign funds amounting to IDR49.24 trillion were recorded entering the Indonesian financial market. Most of these funds were contributed by foreign funds entering the debt market, amounting to IDR62.56 trillion. Meanwhile, the stock market recorded an outflow of IDR13.32 trillion. The influx of foreign funds prompted an improvement in the IDRexchange rate by 1.14% to IDR15,390.

Guarantee Industry in 2023

The credit guarantee industry plays an important role in guaranteeing the risk of lending to banking institutions. Several sectors such as MSMEs, for example, are considered to really need the role of guarantee institutions to help the process of channeling financing from banks run smoothly through credit risk guarantee services.

Even though it plays an important role in supporting the economy, the guarantee industry in Indonesia still has various obstacles in carrying out its role, ranging from a lack of understanding from the public and financial services institutions regarding the role of the guarantee industry to limited human resources in the guarantee sector, which has hampered this industry in carrying out its functions.

In 2023, the guarantee industry experienced moderate growth. Based on data from the Financial Services Authority (OJK), guarantee industry assets increased 18.63% from IDR39.12 trillion in 2022 to IDR46.41 trillion in 2023. In 2023, OJK published the 2023-2027 Guarantee Institution Roadmap. This roadmap was prepared for the development of Guarantee Institutions in Indonesia to support economic growth towards the 2045 Golden Indonesia.

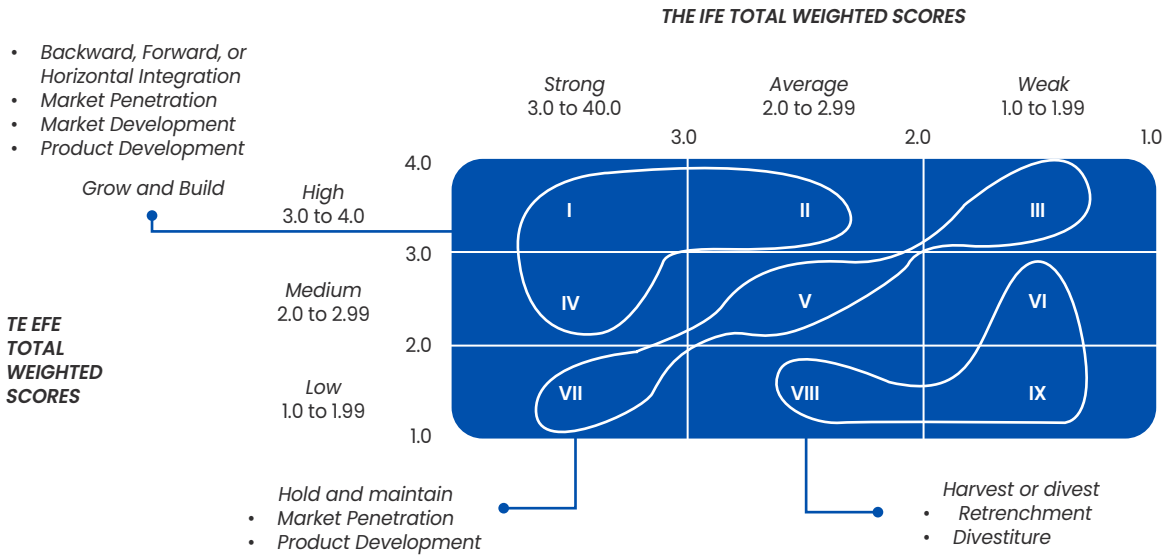
It is hoped that the preparation of the guarantee institution roadmap will encourage the growth and strengthening of the guarantee institution industry so that it is able to provide efficient and competitive services. Furthermore, it is hoped that the roadmap will become a strategic guide for guarantee institutions in Indonesia in developing their products and services, planning and implementing investment activities and business expansion, as well as maintaining health and governance in the future.

Posisi Perusahaan Saat Ini (IE MATRIX)

Posisi perusahaan saat ini dapat diperoleh dengan menggunakan alat analisis IE Matrix, yang memetakan skor EFE dan IFE yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam sebuah matriks yang menggambarkan kekuatan internal yang dimiliki perusahaan dan kemampuan perusahan menghadapi variabel eksternal yang ada. Selain untuk mengetahui posisi saat ini, matriks IE digunakan untuk menentukan strategi yang paling sesuai dengan posisi saat ini. IE Matrix terbagi ke dalam 9 kuadran, dan masing-masing kuadran memiliki pilihan strategi yang berbeda seperti yang ditampilkan sebagai berikut.

The Company Current Position (IE MATRIX)

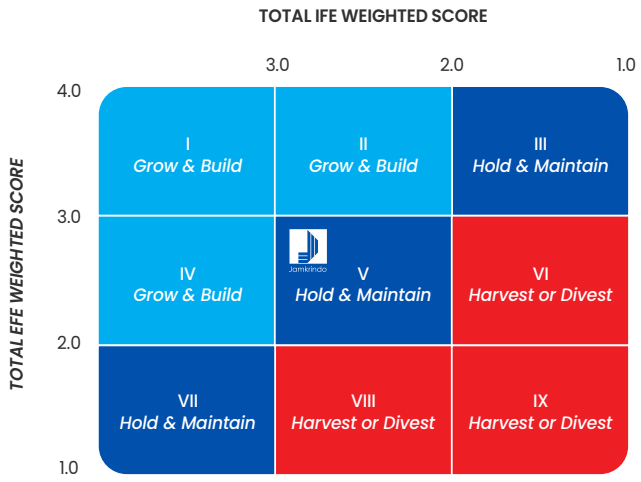
The Company's current position can be obtained using the IE Matrix analysis tool, which maps the previously obtained EFE and IFE scores into a matrix that describes the Company's internal strengths and the Company's ability to deal with existing external variables. In addition to knowing the current position, the IE matrix is used to determine the strategy that best suits the current position. The IE Matrix is divided into 9 quadrants, and each quadrant has different strategy options as shown below.



Sumber: Strategic management: concepts and cases / Fred R. David -13th ed.
Source: : Strategic management: concepts and cases/Fred R. David -13th ed.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dengan menggunakan EFE Matrix dan IFE Matrix, Jamkrindo memiliki Skor EFE = 2,928 dan Skor IFE = 2,833. Dengan demikian, posisi Jamkrindo pada matriks IE digambarkan seperti berikut ini.

Based on the results of the previous analysis using the EFE Matrix and IFE Matrix, Jamkrindo has an EFE Score = 2.928 and an IFE Score = 2.833. Thus, Jamkrindo's position in the IE matrix is described as follows.



Menurut David (2013), strategi yang paling sesuai untuk perusahaan yang berada pada posisi di kuadran V ini adalah *Hold and Maintain*. Pada posisi ini, perusahaan disarankan untuk menjaga dan menguatkan profitabilitas dan kapabilitas internal serta melakukan strategi intensif,

According to David (2013), the most suitable strategy for companies in this position in quadrant V is Hold and Maintain. In this position, companies are advised to maintain and strengthen profitability and internal capabilities and conduct intensive strategies, namely strengthening product

yakni memperkuat posisi produk di pasar. Berdasarkan posisinya, Jamkrindo memiliki dua alternatif strategi intensif yang dapat dijalankan, yakni:

- *Market Penetration*, yaitu meningkatkan market share untuk produk maupun jasa yang ada pada target pasar saat ini melalui upaya pemasaran yang lebih intens.
- *Product Development*, yaitu meningkatkan penjualan dengan mengembangkan produk atau jasa yang baru atau memperbaiki (menambah fitur/meningkatkan kinerja) produk atau jasa yang ada saat ini.

Strategi Pengembangan Usaha

Sesuai arah pengembangan perusahaan pada tahun 2023, PT Jamkrindo menetapkan tema "*Retained Growth and Profitability*" yang berfokus mempertahankan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis penjaminan, serta mengembangkan/memperkuat jejaring dan peran dalam pengembangan UMKMK dan industri penjaminan.

Dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan di tahun 2023, maka Perusahaan menetapkan inisiatif strategis sebagai berikut:

1. Memperkuat portofolio produkdengan perbaikan T&C, pencadangan klaim yang kuat, kolaborasi dengan BUMN berorientasi pada profitabilitas
2. Memperkuat portofolio usaha dan investasi
3. Memperkuat dan mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi dan perluasan pasar
4. Meningkatkan preferensi pelanggan terhadap produk Jamkrindo
5. Meningkatkan loyalitas pelanggan dan mitra melalui CRM
6. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI
7. Meningkatkan efektivitas dan standarisasi proses kerja
8. Meningkatkan efisiensi proses internal dan dengan mitra berbasis otomasi
9. Meningkatkan kinerja bisnis melalui pemanfaatan *machine learning*
10. Mengoptimalkan pemeringkatan dan pembinaan UMKMK untuk peningkatan *market share*
11. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM
12. Memperkuat pengelolaan pengetahuan organisasi
13. Meningkatkan internalisasi budaya inovasi
14. Meningkatkan budaya sadar risiko, kepatuhan & penerapan prinsip TARIF (GCG)
15. Mengoptimalkan pembinaan mitra untuk mendukung misi organisasi.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Jamkrindo menjalankan kegiatan usaha dibidang penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), penjaminan bagi BUMN, penjaminan sistem resi gudang, dan penjaminan lainnya. Hingga akhir tahun 2023, laporan keuangan Perusahaan yang yang telah diaudit oleh Kantor

position in the market. Based on its position, Jamkrindo has two alternative intensive strategies that can be implemented, namely:

- Market Penetration, which is to increase market share for existing products and services in the current target market through more intense marketing efforts.
- Product Development, which is to increase sales by developing new products or services or improving (adding features/enhancing performance) existing products or services.

Business Development Strategies

In accordance with the direction of the company's development in 2023, PT Jamkrindo sets the theme "Retained Growth and Profitability" which focuses on maintaining the growth and profitability of the guarantee business, as well as developing/strengthening networks and roles in the development of MSMEs and Corporatives (UMKMK) and the guarantee industry.
To achieve the Company's goals in 2023, the Company sets the following strategic initiatives:

1. Strengthening the product portfolio with T&C improvements, strong claim reserves, collaboration with profitability-oriented SOEs
2. Strengthening business and investment portfolio
3. Strengthening and developing partnership networks for market penetration and expansion
4. Increasing customer preference for Jamkrindo products
5. Increasing customer and partner loyalty through CRM
6. Improving the quality and coverage of IT-based customer services
7. Improving effectiveness and standardization of work processes
8. Improving the efficiency of internal processes and with automation-based partners.
9. Improving business performance through the utilization of machine learning
10. Optimizing the ranking and coaching of MSMEKs to increase market share
11. Improving competency and productivity of human resources
12. Strengthening organizational knowledge management
13. Improving internalization of innovation culture
14. Improving risk awareness culture, compliance & implementation of TARIF (GCG) principles
15. Optimizing partner coaching to support the organization's mission.

OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Jamkrindo carries out business activities in the field of guarantees for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (MSMEs), guarantees for SOEs, guarantees for warehouse receipt systems, and other guarantees. Until the end of 2023, the Company's financial statements, which have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja,

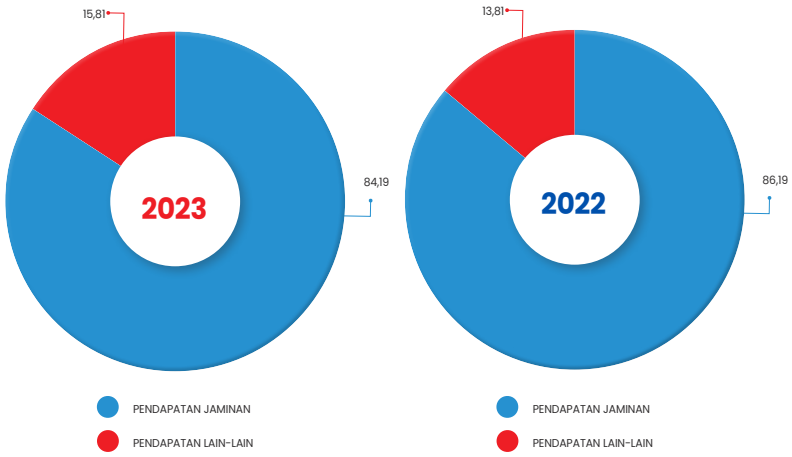
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCooper) belum menerapkan PSAK No.5 tentang Segmen Operasi, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Perusahaan memiliki segmen operasi tunggal. Pembahasan segmen usaha dalam laporan ini dipisahkan berdasarkan sumber pendapatan Perusahaan yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu pendapatan imbal jasa penjaminan, pendapatan investasi, dan pendapatan lain-lain.

Wibisana, Rintis & Partner (PricewaterhouseCooper) have not implemented PSAK No. 5 regarding Operating Segments. Therefore, the Company is considered having a single operating segment. The discussion of business segments in this report is separated based on the Company's source of income, which is divided into 3 (three) major groups, namely guarantee fee income, investment income, and other income.

Komposisi pendapatan tahun 2023 dan 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

The composition of income for 2023 and 2022 can be described as follows:

Grafik Komposisi Pendapatan Jamkrindo 2023 & 2022
Graph of 2023 & 2022 Jamkrindo Revenue Composition



Komposisi pendapatan Perusahaan tahun 2023 masih didominasi oleh pendapatan penjaminan sebesar Rp6,35 triliun atau dengan kontribusi mencapai 84,19%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,08 triliun. Sedangkan kontribusi dari pendapatan investasi adalah sebesar 15,81% atau setara dengan Rp1.19 triliun. Kontribusi pendapatan investasi tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya

The composition of the Company's revenue in 2023 was still dominated by guarantee income of IDR6.35 trillion, or with a contribution reaching 86.19%, an increase compared to the previous year of IDR1.08 trillion. Meanwhile, the contribution from investment income was 15.81%, or equivalent to IDR1.19 trillion. The contribution of investment income in 2023 has increased compared to the previous year.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Jamkrindo memberikan layanan penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

Guarantee Fee Income

In accordance with Law No. 1 of 2016 concerning Guarantees, Jamkrindo provides credit guarantee services and financing provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.

Jamkrindo telah menjalankan kegiatan penjaminan kredit baik berupa KUR maupun non KUR, yang disalurkan oleh perbankan (penjaminan bank), baik bank konvensional maupun bank syariah dan lembaga non bank (penjaminan non bank) yang diproses secara *case by case* maupun *conditional automatic cover*. Atas layanan tersebut, Perusahaan memperoleh Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang tarifnya ditetapkan dengan pertimbangan paling sedikit:

Jamkrindo has carried out credit guarantee activities in the form of both KUR and non-KUR, which are distributed by banks (bank guarantees), both conventional banks and Islamic banks, and non-bank institutions (non-bank guarantees) which are processed on a case-by-case basis and conditional automatic cover. For these services, the Company obtains Guarantee Fee (IJP); the rate of which is determined by considering at least:

1. Risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan:
   a. Rasio Klaim;
   b. Jenis Kredit atau Pembiayaan;
   c. Cakupan penjaminan; dan
   d. Jangka waktu penjaminan.
2. Biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran.
3. Keuntungan.

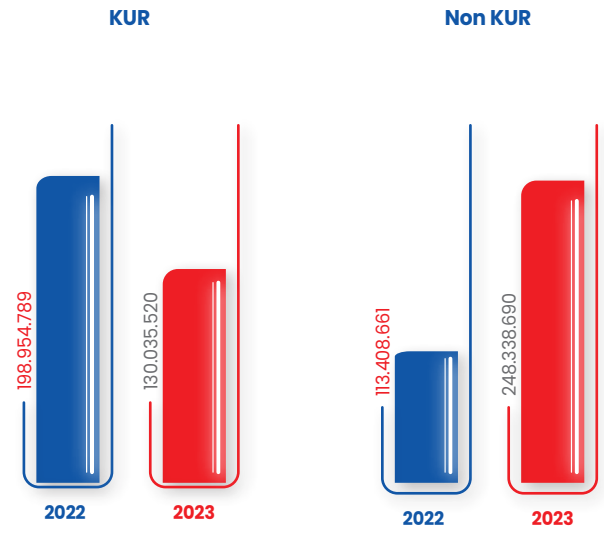
Berikut adalah gambaran jumlah kredit yang dijamin oleh Jamkrindo pada tahun 2022 serta RKAP dan realisasi tahun 2023:

1. Guaranteed risk, which at least is calculated based on:
   a. Claim Ratio;
   b. Type of Credit or Financing;
   c. Guarantee coverage; and
   d. Guarantee period.
2. General administrative, operational and marketing costs.
3. Profit.

The following is an overview of the number of credit guaranteed by Jamkrindo in 2022 as well as the 2023 RKAP and realization:

Tabel Jumlah Kredit yang Dijamin Tahun 2022-2023
Table of Total Guaranteed Loans for 2022-2023

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2023 (Rp-Juta) 2023 RKAP (IDR-Million)	Presentase % Percentage %	
	2023 (Rp-Juta) (IDR-Million)	2022 (Rp-Juta) (IDR-Million)		Capaian RKAP 2023 2023 Achievement	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
KUR	**130.035.520**	198.954.789	**225.000.000**	58%	(35%)
PEN	**(956)**	7.124.836	**-**	0%	(100%)
Non KUR	**248.339.646**	106.283.825	**115.261.096**	215%	134%
Total Kredit Total Credit	**378.374.210**	**312.363.450**	**340.261.096**	**111%**	**21%**



Total kredit yang dijaminkan Perusahaan tahun 2023 mencapai 378,37 triliun meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp312,36 triliun. Pencapaian tersebut berada di atas target yang ditetapkan pada RKAP 2023 sebesar Rp340,26 triliun atau dengan pencapaian sebesar 111%

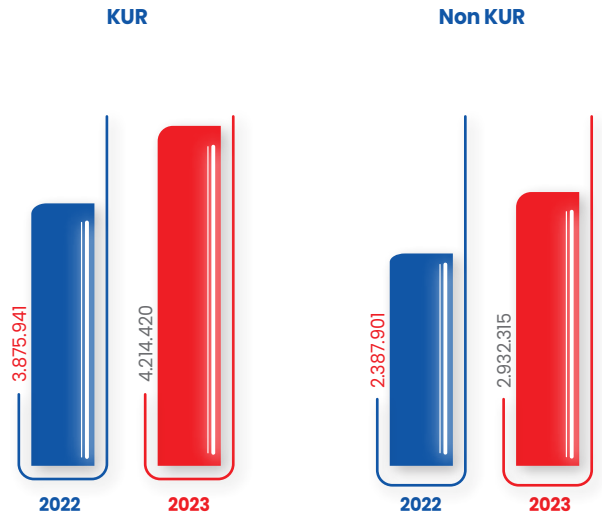
Total credit guaranteed by the Company in 2023 reached IDR378.37 trillion, an increase of 21% compared to the previous year of IDR312.26 trillion. This achievement was above the target set in the 2023 RKAP of IDR340.26 trillion, or an achievement of 111%.

Dari kredit yang dijamin di tahun 2023 Perusahaan memperoleh IJP sebesar Rp7,15 triliun atau meningkat 16% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6,15 triliun. Pencapaian tersebut setara dengan 106% dari target RKAP yang ditetapkan sebesar Rp6,72 triliun.

From guaranteed credit in 2023, the Company obtained a guarantee fee of IDR7.15 trillion, an increase of 16% compared to the previous year of IDR6.15 trillion. This achievement is equivalent to 106% of the RKAP target set at IDR6.72 trillion.

Tabel Imbal Jasa Penjaminan Tahun 2022-2023
Table of Guarantee Fee for 2022-2023

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2023 (Rp-Juta) 2023 RKAP (IDR-Million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	2023 (Rp-Juta) (IDR-Million)	2022 (Rp-Juta) (IDR-Million)		Rp IDR	%
KUR	**4.214.420**	3.875.941	**4.826.442**	338.479	9%
PEN	**816.110**	1.078.867	**874.635**	(262.757)	(24%)
Non KUR	**2.116.205**	1.190.277	**1.014.929**	925.928	78%
Total Imbalan Jasa Penjaminan Total Guarantee Fee	**7.146.735**	**6.145.085**	**6.716.006**	**1.001.650**	**16%**



Penjaminan KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/ atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Karena perannya yang sangat penting dalam menunjang perekonomian nasional, pemerintah terus mendorong penyaluran KUR. Hal ini dapat dilihat dari plafond KUR yang terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Tahun 2023 realisasi penyaluran KUR mencapai Rp130,04 triliun atau menurun 35% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp198,95 triliun yang diberikan kepada 2.256.224 debitur.

KUR Guarantee

People's Business Credit (KUR) is the government's priority program in supporting MSMEs in the form of a policy of providing credit/financing for venture capital and/or investment to individual/individual debtors, business entities, and/or business groups that are productive and feasible, but do not yet have or do not have enough additional collateral. The objectives of implementing the KUR program include increasing and expanding access to finance for productive businesses, increasing the competitiveness capacity of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and encouraging economic growth and employment.

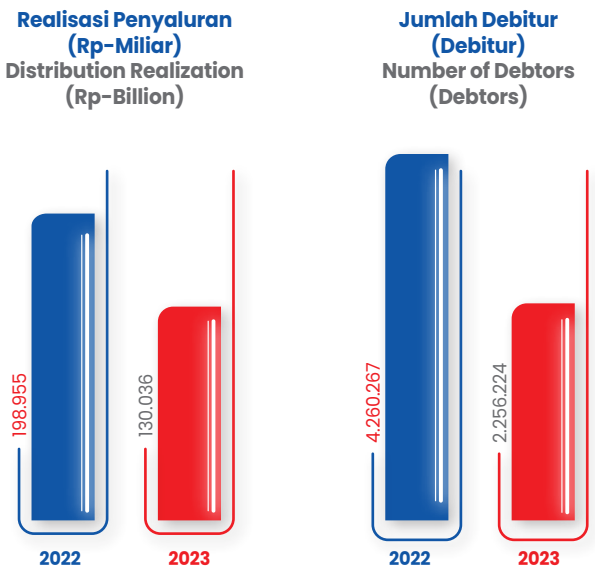
Due to its very important role in supporting the national economy, the government continues to encourage the distribution of KUR. This can be seen from the KUR limit which the government continues to increase.

In 2023 the realization of KUR distribution reached IDR130.04 trillion, a decrease of 35% compared to the previous year of IDR198.95 trillion which was given to 2,256,224 debtors.

Tabel Realisasi Penyaluran KUR 2022 – 2023
Table of KUR Disbursement Realization 2022 – 2023

Uraian Description	Realisasi Realization		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	2023 (Rp-Juta) (IDR-Million)	2022 (Rp-Juta) (IDR-Million)	Nominal (Rp-Juta) (IDR-Million)	Presentase % Percentage %
Realisasi Penyaluran (Rp-miliar/plafond) Realization of Disbursement (IDR-billion/ limit)	**130.036**	198.955	(68.919)	(35%)
Total Debitur Total debtors	**2.256.224**	4.260.267	(2.004.043)	(47%)

Grafik Realisasi Penyaluran KUR 2022 – 2023
Graph of KUR Disbursement Realization 2022 – 2023



Jamkrindo memberikan layanan penjaminan KUR dengan dana PMN yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Program Penjaminan KUR tersebut bekerja sama dengan beberapa bank pelaksana, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN serta Bank BPD, Multifinance dan Koperasi yang mendapat penugasan untuk penyaluran KUR.

Penjaminan KUR diperuntukkan bagi UMKM untuk jenis KUR Mikro (maksimal Rp25 juta), KUR Kecil/Khusus (maksimal sebesar Rp500 juta), KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ("TKI") ditetapkan maksimal sebesar Rp25 juta dengan sistem penjaminan secara *Conditional Automatic Cover* (CAC), dengan Imbal Jasa Penjaminan ("IJP") yang ditanggung oleh pemerintah.

Pendapatan IJP atas penjaminan KUR dicatat sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan No. 22/PMK.05/2010 tanggal 12

Jamkrindo provides KUR guarantee services with PMN funds which have been implemented since 2007 in accordance with Presidential Instruction No. 6 of 2007 and Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia No. 170 of 2015 concerning Implementing Banks and People's Business Credit Guarantee Companies. The KUR Guarantee Program is in collaboration with several implementing banks, namely Bank Mandiri, BRI, BNI, and BTN as well as Bank BPD, Multifinance and Cooperatives who have received assignments for KUR distribution.

KUR guarantees are intended for MSMEs for Micro KUR types (maximum IDR25 million), Small/Special KUR (maximum IDR500 million), KUR for the Placement of Indonesian Migrant Workers ("TKI") is set at a maximum of IDR25 million with a Conditional Automatic Cover (CAC) guarantee system, with Guarantee Fee ("IJP") borne by the government.

Guarantee fee income from KUR guarantees is recorded in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008 concerning People's Business Credit Guarantee Facility and No. 22/

Februari 2010 tentang Perubahan kedua atas PMK No. 135/OMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR, tarif IJP disesuaikan menjadi 3,25% X plafond kredit/pembiayaan X 70% atau sebesar 2,275%.

PMK.05/2010 dated February 12, 2010 concerning the Second Amendment to PMK No. 135/OMK.05/2008 regarding the KUR guarantee facility, the IJP rate is adjusted to 3.25% X the credit/financing limit X 70% or 2.275%.

Tantangan Penjaminan KUR

Penurunan target penyaluran KUR dari 2022 (373 triliun) dan 2023 (297 triliun) menyebabkan potensi penurunan produksi di 2023, namun sampai dengan akhir 2023 pencapaian market share 52,43% untuk tetap dijaga atau optimalisasi dari kualitas penjaminannya.

KUR Guarantee Challenges

The decrease in the KUR distribution target from 2022 (373 trillion) and 2023 (297 trillion) caused a potential decline in production in 2023, but by the end of 2023, the market share achievement of 52.43% must be maintained or optimized for the quality of the guarantee.

Strategi Penjaminan KUR

Optimalisasi market share untuk tetap berada di atas 50%, serta mendorong pertumbuhan segmen pasar baru dengan melibatkan sejumlah pendatang baru seperti Bank Central Asia (BCA), Nobu Bank, Bank Jabar Banten (BJB), Bank Nagari, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Agung, Kospin, dan Bank Banten. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi baru untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan memenuhi target perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, terdapat program RM CAC dalam rangka perbaikan kualitas penjaminan kredit dan pemilihan market yang sehat serta penagihan subrogasi.

KUR Guarantee Strategy

Optimizing market share to remain above 50%, as well as encouraging the growth of new market segments by involving a number of new entrants such as Bank Central Asia (BCA), Nobu Bank, Bank Jabar Banten (BJB), Bank Nagari, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Agung, Kospin, and Bank Banten. This step is expected to encourage an increase in new production to maintain sustainable growth and meet overall company targets. Apart from that, there is a RM CAC program to improve the quality of credit guarantees and healthy market selection and subrogation collection.

Kinerja Penjaminan KUR

Jamkrindo yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

KUR Guarantee Performance

Jamkrindo is a State-Owned Enterprise (SOE) which has the duty and authority to carry out business activities in the field of developing Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK).

Tabel Nilai Penjaminan dan IJP KUR Tahun 2022 – 2023
Table of Guarantee and Guarantee Fee Value Year 2022 – 2023

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2023 (Juta) 2023 RKAP (IDR-Million)	Presentase % Percentage %	
	2023 (Rp-Juta) (IDR-Million)	2022 (Rp-Juta) (IDR-Million)		Capaian RKAP 2023 2023 Achievement	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
Penjaminan KUR KUR Guarantee	**130.035.520**	198.954.789	**225.000.000**	58%	(35%)
IJP KUR KUR Guarantee Fee	**4.214.420**	3.875.941	**4.826.442**	87%	9%

Realisasi penjaminan KUR tahun 2023 adalah sebesar Rp130,04 triliun atau mencapai 58% dari anggaran RKAP 2023 yaitu sebesar Rp225 triliun. Dibandingkan tahun 2022, realisasi penjaminan KUR menurun 35% di mana tahun 2022 penjaminan KUR adalah sebesar Rp198,96 triliun. Sedangkan pendapatan IJP KUR adalah sebesar Rp4,21 triliun atau 87% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2023 yaitu sebesar Rp4,83% triliun. Pendapatan IJP KUR tahun 2023 juga meningkat 9% dari tahun sebelumnya Rp3,88 triliun.

The realization of KUR guarantees in 2023 is IDR130.04 trillion, or 58% of the 2023 RKAP budget, which is IDR225 trillion. Compared to 2022, the realization of KUR guarantees decreased by 35% of which in 2022, the KUR guarantees amounted to IDR198.96 trillion. Meanwhile, the revenue of KUR guarantee fee is IDR4.21 trillion, or 87% of the target set in the 2023 RKAP, which is IDR4.83% trillion. The revenue of KUR guarantee fee in 2023 also increased by 9% from th previous year of IDR3.88 trillion.

Tabel Laba Rugi Penjaminan KUR 2022 – 2023
Table of Profit and Loss Guarantee for KUR 2022 – 2023

Uraian Description	Realisasi Realization		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Nominal (Rp-juta)** (IDR-million)	**Presentase %** Percentage %
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net Guarantee Fees	**3.742.081**	3.480.079	262.002	7,53
Beban Klaim Claim Expenses	**3.490.090**	2.288.662	1.201.428	52,49
Penjaminan Bersih Net Guarantee	**251.991**	1.191.418	(939.427)	(78,85)
Pendapatan Investasi Investment Income	**654.175**	573.054	81.121	14,16
Beban Usaha Operating Expenses	**(1.523.469)**	(919.169)	(604.300)	65,74
Pendapatan (Beban) Lain(lain Other Income (Expenses)	**3.105**	3.620	2.743	757,69
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	**(545.382)**	848.992	(1.394.374)	(164,24)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	**(8.189)**	(362.118)	353.929	(97,74)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**(537.192)**	486.804	(1.023.996)	(210,35)

Tahun 2023, dari penjaminan KUR Perusahaan memperoleh Imbal Jasa Penjaminan Bersih sebesar Rp3,74 triliun, meningkat Rp262 miliar atau 7,53% dari tahun 2022 sebesar Rp3,48 triliun. Beban klaim yang dibukukan Perusahaan juga mengalami peningkatan menjadi Rp3,50 triliun atau meningkat 52,49% dari tahun sebelumnya Rp2,29 triliun, sehingga Perusahaan membukukan penjaminan bersih sebesar Rp252 juta, menurun 78,85% dari tahun 2022 sebesar Rp1,19 triliun.

In 2023, from the KUR guarantee, the Company obtained a net guarantee fee of IDR3.74 trillion, an increase of IDR262 billion or 7.53% from the year 2022 of IDR3.48 trillion. Claims expenses recorded by the Company also increased to IDR3.50 trillion, an increase of 52.49% from the previous year of IDR2.29 trillion, so that the Company recorded a net guarantee of IDR252 million, a decrease of 78.85% from 2022 of IDR1.19 trillion.

Di tahun 2023, beban usaha Perusahaan menjadi Rp1,52 triliun atau meningkat 65,74% dari tahun sebelumnya Rp919,71 miliar. Namun demikian, Tahun 2023 Perusahaan membukukan beban Pendapatan lain(lain sebesar Rp3,1 miliar, sehingga laba sebelum pajak yang dibukukan Perusahaan tahun 2023 negatif Rp545,38 miliar, menurun 164,24% dari tahun sebelumnya Rp848,99 miliar. Setelah membukukan pajak kini sebesar Rp8,19 miliar, pada tahun 2023 Perusahaan berhasil membukukan laba tahun berjalan dari penjaminan KUR sebesar negatif Rp537,19 miliar, menurun 210,35% dari tahun sebelumnya Rp486,80 miliar.

In 2023, the Company's operating expenses amounted to IDR1.52 trillion, an increase of 65.74% from the previous year of IDR919.71 billion. However, in 2023 the Company obtained other income expense of IDR3.1 billion, so that the profit before tax recorded by the Company in 2023 was negative IDR545.38 billion, a decrease of 164.24% from the previous year of IDR848.99 billion. After recording current tax of IDR8.19 billion, in 2023 the Company managed to secure a profit for the year from KUR guarantee of negative IDR537.19 billion, a decrease of 210.35% from the previous year of IDR486.80 billion.

PENJAMINAN NON KUR

Selain produk penjaminan KUR, Jamkrindo juga memiliki beragam produk lainnya di luar KUR seperti penjaminan distribusi barang, FLPP, keagenan kargo, konstruksi, kontra bank garansi, KPR, kredit mikro, kredit otomotif, kredit umum, *surety bond, payment bond*, pembiayaan invoice, kredit super mikro, keagenan kargo, Resi Gudang, *Capital Management Guarantee* (CMG), dan lain-lain .

Non-KUR Guarantee

In addition to KUR guarantee products, Jamkrindo also has a variety of other products besides KUR, such as goods distribution guarantees, FLPP, cargo agencies, construction, counter bank guarantees, mortgages, micro loans, automotive loans, general loans, surety bonds, payment bonds, invoice financing, super micro credit, cargo agency, Warehouse Receipt, Capital Management Guarantee (CMG), and others.

Beberapa produk yang berkontribusi besar bagi kinerja produksi penjaminan Non KUR antara lain penjaminan FLPP, Kredit Multiguna, kredit mikro, dan surety bond.

Several products that contributed greatly to the production performance of non-KUR guarantees included FLPP guarantees, Multipurpose Loans, micro credit, and surety bonds.

Tantangan Penjaminan Non KUR

- Masih terdapat Penerima Jaminan khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang masih belum sepakat atas *Term & Condition* (TC) *Stoploss*
- Masih banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang belum mengembangkan sistem secara *Host to Host* (H2H)

Non-KUR Guarantee Challenges

- There are still Guarantee Recipients, especially Bank Pembangunan Daerah (BPD), who still do not agree on the Stoploss Terms & Conditions (TC).
- There are still many Bank Pembangunan Daerah (BPD) that have not developed a Host to Host (H2H) system

Strategi Penjaminan Non KUR

- Melakukan Penyelesaian Perjanjian Kerjasama maupun Addendum Perjanjian Kerjasama serta Negosiasi *Term & Condition* (TC) Kepada Penerima Jaminan
- Penyelesaian Pengembangan sistem *Host to Host* (H2H).
- Perluasan Kerjasama Produk Mikro khususnya Himbara

Non-KUR Guarantee Strategy

- Implementing Completion of Cooperation Agreements and Addendums to Cooperation Agreements as well as Negotiation of Terms & Conditions (TC) for Collateral Recipients
- Completing the development of Host to Host (H2H) system.
- Expansion of Micro Product Cooperation, especially Himbara

Kinerja Penjaminan Non KUR

Non-KUR Guarantee Performance

Uraian Description	RKAP Tahun 2023 (Rp-juta) 2023 RKAP (IDR-Million)	Realisasi Realization		Capaian RKAP 2023 (%) 2023 RKAP Achievement	Kenaikan (Penurunan) (%) Increase (Decrease) (%)
		2023 (Rp-juta) (IDR-Million)	2022 (Rp-juta) (IDR-Million)		
Distribusi Barang Goods Distribution	-	-	-	0%	0%
FLPP	**4,007,938**	**27,230,256**	611,368	679%	4354%
Konstruksi Construction	**2,973,048**	**1,548,302**	2,036,536	52%	(24%)
KPR Mortgage	-	-	-	0%	0%
Subsidi Resi Gudang Warehouse Receipt Subsidies	**23,797**	**89,031**	23,105	374%	285%
Kredit Mikro Micro Credit	**25,371,348**	**165,969,941**	32,904,615	654%	404%
Kredit Multiguna Multipurpose Credit	**717,499**	**1,060,678**	1,431,745	148%	(26%)
Kredit OTO OTO Credit	-	-	-	0%	0%
Kredit Super Mikro Super Micro Credit	**18,093,455**	**14,049,080**	17,921,626	78%	(22%)
Kredit Umum General Kredit	**794,900**	**7,542,057**	3,200,541	949%	136%
Pembiayaan Invoice Invoice Financing	**2,131,195**	**1,056,584**	1,691,897	50%	(38%)
Customs Bond	**2,815,454**	**817,661**	1,994,885	29%	(59%)
Keagenan Kargo Cargo Agency	-	-	-	0%	0%
Kontra Bank Garansi Counter-Bank Guarantee	**27,296,212**	**16,315,670**	21,591,702	60%	(24%)
Payment Bond	-	**8,547**	36,112	0%	(76%)
Surety Bond	**31,036,250**	**12,651,841**	22,839,693	41%	(45%)
Grand Total	**115,261,096**	**248,339,646**	**106,283,825**	**215%**	**134%**

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatat nilai penjaminan Non KUR sebesar Rp248,34 triliun, meningkat 134% dari tahun sebelumnya Rp106,28 triliun. Pencapaian tersebut juga setara dengan 215% dari RKAP 2023. Komponen penjaminan terbesar tahun 2023 berasal dari Kredit Mikro yaitu sebesar Rp165,97 triliun atau setara dengan 67% dari total Penjaminan Non KUR tahun 2023.

In 2023, the Company recorded a non-KUR guarantee value of IDR248.34 trillion, an increase of 134% from the previous year of IDR106.28 trillion. This achievement is also equivalent to 215% of the 2023 RKAP. The largest guarantee component in 2023 came from Micro Credit, which is IDR165.97 trillion, or equivalent to 67% of the total Non-KUR Guarantees in 2023.

Tabel Laba Rugi Penjaminan Non KUR Tahun 2022 – 2023
Table of Non-KUR Guarantee Profit and Loss for 2022-2023

Uraian Description	**2023 (Rp-juta)** (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp-juta) (IDR-million)	**Presentase %** Percentage %
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net Guarantee Fee	**1.921.884**	1.795.730	126,154	7%
Beban Klaim Claim Expenses	**959.299**	1.020.570	(61,271)	(6%)
Penjaminan Bersih Net Guarantee	**2.617.556**	775.160	2,540,040	3277%
Pendapatan Investasi Investment Income	**303.910**	271.942	(241,551)	(89%)
Beban Usaha Operating Expenses	**558.746**	(287.084)	845,830	(295%)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	**11.647**	58.049	(46,402)	(80%)
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	**2.366.863**	827.345	1,539,518	186%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	**50.270**	(33.993)	39,020	(115%)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**2.030.916**	793.353	1,237,563	156%

Tahun 2023 dari penjaminan Non KUR Perusahan membukukan memperoleh Imbal Jasa Penjaminan Bersih Non KUR sebesar Rp1,92 triliun, meningkat 7% atau setara dengan Rp126,15 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,80 triliun, sedangkan Laba bersih segmen Non KUR meningkat menjadi Rp2.030,92 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp793,35 miliar.

In 2023, the Company obtained a Net Guarantee Fee from the Non-KUR guarantee of IDR1.92 trillion, an increase of 7% or the equivalent of IDR126.15 billion compared to the previous year of IDR1.80 trillion, while the net profit for the non-KUR segment increased to IDR2,030.92 billion compared to the previous year of IDR793.35 billion.

Penjaminan PEN

PEN adalah Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

PEN Guarantee

PEN Guarantee is a Guarantee given in the context of implementing Government Regulations concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in order to support the financial policies for handling the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic and/or to face threats that endanger the national economy and/or financial system stability and to rescue national economy.

Tabel Realisasi Penyaluran PEN 2023
Table of 2023 PEN Distribution Realization

Uraian Description	2023
Realisasi Penyaluran (Rp-miliar/*plafond*) (konvensional+syariah) Distribution Realization (IDR-billion/limit) (conventional+sharia)	(956)
Jumlah Debitur Total Debtors	(207)

Jamkrindo memberikan layanan penjaminan PEN berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 304/ KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) untuk Melaksanakan Penjaminan Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penjaminan PEN diperuntukkan kepada para pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usahanya. Pendapatan IJP atas penjaminan PEN dicatat sesuai dasar surat:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S(582/MK.08/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal Penetapan Tarif Imbal Jasa Penjaminan atas Penjaminan Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tarif IJP sebesar 7,65% (tujuh koma enam puluh lima perseratus) per tahun;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S(80/MK.08/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Penyesuaian Tarif Imbal Jasa Penjaminan atas Penjaminan Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tarif IJP sebesar 6,11% (enam koma sebelas perseratus) per tahun.

Tantangan Penjaminan PEN

Penerbitan Sertifikat Penjaminan PEN berakhir pada 30 November 2021, Jamkrindo terkendala dalam hal update data *Oustanding* Penjaminan PEN dikarenakan Penerima Jaminan tidak menyampaikan data *Outstanding* kepada Jamkrindo secara berkala atas debitur yang telah lunas maupun yang kreditnya masih berjalan.

Strategi Penjaminan PEN

Divisi Bisnis II menginstruksikan Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang agar dapat melakukan *monitoring* dan rekonsiliasi data *Outstanding* Kredit PEN secara berkala atas masing-masing Penerima Jaminan yang selanjutnya untuk dilaporkan kepada Divisi Bisnis II.

Kinerja Penjaminan PEN

Jamkrindo yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan

Jamkrindo provides PEN guarantee services based on:

1. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 71/PMK.08/2020 concerning Procedures for Government Guarantees through Appointed Guarantee-Owned Business Entities in the context of Implementing the National Economic Recovery Program;
2. Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 304/KMK.08/2020 concerning Assignment to PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) to Implement Government Guarantees in the context of Implementing the National Economic Recovery Program.

PEN guarantees are intended for MSME business actors in running their businesses. Guarantee Fee from PEN guarantee is accounted according to the letter:

1. Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S(582/MK.08/2020 dated July 8, 2020 concerning Stipulation of Rates of Return for Guarantee Fee for Government Guarantees in the National Economic Recovery Program, the Guarantee Fee rate is 7.65% (seven point sixty five percent) per year;
2. Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S(80/MK.08/2021 dated February 4, 2021 concerning Adjustment of Rates of Return for Guarantee Fee for Government Guarantees in the National Economic Recovery Program, the Guarantee Fee rate is 6.11% (six point eleven percent) per year.

PEN Guarantee Challenge

The issuance of PEN Guarantee Certificates ended on November 30 2021, Jamkrindo was hampered in terms of updating the data of Outstanding PEN Guarantee because the Guarantee Recipients did not submit Outstanding data to Jamkrindo periodically for debtors who have been paid off or whose credit was still ongoing.

PEN Guarantee Strategy

Business Division II instructed Regional Offices and Branch Offices to periodically monitor and reconcile the data of Outstanding PEN Credit for each Guarantee Recipient, which was then reported to Business Division II.

PEN Guarantee Performance

Jamkrindo, which is a State-Owned Enterprise (BUMN) that has the duty and authority to carry out business activities in the field of developing Micro, Small, Medium and Cooperative Enterprises (UMKMK). In 2023 there was

Koperasi (UMKMK). Pada 2023 terdapat pembatalan penjaminan PEN sebagai tindak lanjut temuan audit pada PT Jamsyar sehingga terdapat pembatalan terhadap 207 debitur dengan nilai volume penjaminan yang terkoreksi sebesar Rp956 juta.

a cancellation of the PEN guarantee as a follow-up to the audit findings at PT Jamsyar, resulting in the cancellation of 207 debtors with a corrected guarantee volume value of IDR956 million.

Tabel Nilai Penjaminan dan IJP PEN Tahun 2023
Table of PEN Guarantee and Guarantee Fee Value 2023

Uraian Description	Realisasi 2023 (Rp-juta) 2023 Realization (IDR-Million)	RKAP Tahun 2023 (Rp-juta) 2023 RKAP (IDR-Million)	Capaian RKAP 2023 (%) 2023 RKAP Achievement (%)
Penjaminan PEN (konvensional+syariah) PEN guarantee (conventional + sharia)	**(956)**	**-**	**0%**
IJP PEN (*Cash Basis*) Cash Basis	**816.110**	**874.635**	**93%**

Realisasi pendapatan IJP PEN tahun 2023 adalah sebesar Rp816,11 miliar atau 93% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2023 yaitu sebesar Rp874,64 miliar.

The realization of IJP PEN revenue in 2023 was IDR816.11 billion or 93% of the target set in the 2023 RKAP of IDR874.64 billion.

Profitabilitas Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Profitability of Return on Guarantee Fee

Kontribusi Imbalan Jasa Penjaminan Terhadap Laba (Rugi) Konsolidasi 2023
Contribution of Guarantee Fees to 2023 Consolidated Profit (Loss)

Uraian Description	Konsolidasi (Rp-juta) Consolidated (IDR-million)	Eksisting (Rp-juta) Existing (IDR-million)	KUR (Rp-juta) (IDR-million)	Persentase Kontribusi (%) Contribution Percentage (%)	
				Eksisting Existing	KUR
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net Guarantee Fee	6.354.728	2.612.647	3.742.081	41,11	58,89
Beban Klaim Claim Expenses	3.577.332	87.242	3.490.090	2,44	97,56
Penjaminan Bersih Net Guarantee	2.777.396	2.525.405	251.991	90,93	9,07
Pendapatan Investasi Investment Income	1.193.515	539.340	654.175	45,19	54,81
Beban Usaha Operating Expenses	(2.255.338)	(731.869)	(1.523.469)	32,45	67,55
Pendapatan (Beban) Lain(lain Other Income (Expenses)	15.099	11.994	3.105	79,44	20,56
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	1.791.985	2.337.367	(545.382)	130,43	(30,43)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(355.136)	(346.947)	(8.189)	97,69	2,31
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	1.436.849	1.974.041	(537.192)	137,39	(37,39)

Hingga akhir tahun 2023, Penjaminan KUR memberikan kontribusi yang besar terhadap imbal jasa penjaminan Perusahaan. Namun demikian, penjaminan Non KUR menjadi kontributor utama terhadap laba Perusahaan yaitu sebesar Rp1.974,04 miliar, sedangkan penjaminan KUR membukukan kerugian sebesar Rp537,19 miliar.

Until the end of 2023, the KUR Guarantee made a major contribution to the Company's guarantee fees. However, Non-KUR guarantees were the main contributor to the Company's profit, amounting to IDR1,974.04 billion, while the KUR guarantee recorded a loss of IDR537.19 billion.

Pendapatan Investasi

Perusahaan melakukan investasi pada instrumen(instrumen keuangan yang tersedia di pasar, baik pasar modal maupun perbankan. Investasi yang dilakukan dalam bentuk surat berharga terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu yang dimiliki hingga jatuh tempo dan yang tersedia dijual.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan di mana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Tantangan Yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2023, pasar modal, termasuk saham dan obligasi, menghadapi tantangan besar baik di Indonesia maupun secara global. Di Indonesia, investor saham dan obligasi dihadapkan pada volatilitas yang meningkat akibat ketidakpastian politik domestik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan tekanan inflasi yang terus-menerus. Kebijakan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi juga berdampak pada yield obligasi sehingga membuatnya kurang menarik bagi investor yang mencari keamanan dalam investasi jangka panjang. Di pasar global, konflik geopolitik, seperti situasi di Ukraina, serta kebijakan moneter yang tidak menentu dari bank-bank sentral besar menyebabkan fluktuasi yang tajam dalam indeks saham dan nilai obligasi.

Selain itu, iklim investasi juga harus mewaspadai risiko resesi di beberapa ekonomi besar yang dapat mempengaruhi pasar saham dan obligasi secara negatif. Meskipun pasar saham menawarkan peluang untuk keuntungan cepat, risiko yang tinggi dapat menghalangi investor, terutama di tengah potensi kenaikan suku bunga yang dapat membatasi likuiditas pasar. Di sisi lain, sektor seperti teknologi yang telah mengalami lonjakan selama pandemi, kini mengalami koreksi harga yang tajam, yang menunjukkan pergeseran dalam sentimen investor. Namun, transisi global menuju energi berkelanjutan dan digitalisasi masih menawarkan peluang investasi yang menjanjikan, yang membutuhkan navigasi yang cermat di pasar modal untuk memaksimalkan potensi pengembalian.

Strategi Investasi

Seluruh pembelian/penempatan investasi disesuaikan dengan *liability profile* Perusahaan. Seluruh pengelolaan investasi dilakukan secara prudent dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Beberapa fokus strategi *assets allocation* diantaranya:

1. Pemilihan deposito diutamakan pada mitra perbankan yang memiliki fundamental yang sehat dengan penawaran suku bunga kompetitif.

Investment Income

The Company invests in financial instruments available on the market, both the capital market and banking. Investments made in the form of securities are divided into 2 (two) categories, namely those held to maturity and those available for sale.

Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity in which the Company has the positive intention and ability to hold the financial assets to maturity, and are not designated at fair value through profit or loss or available for sale.

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or that are not classified into one of the other categories of financial assets.

Challenges Faced

Throughout 2023, capital markets, including stocks and bonds, faced major challenges both in Indonesia and globally. In Indonesia, stock and bond investors were faced with increased volatility due to domestic political uncertainty ahead of the elections and persistent inflationary pressures. Bank Indonesia's monetary tightening policy aimed at controlling inflation also impacted bond yields, making them less attractive to investors seeking safety in long-term investments. In the global market, geopolitical conflicts, such as the situation in Ukraine, as well as volatile monetary policies from major central banks led to sharp fluctuations in stock indices and bond values.

In addition, the investment climate should also be aware of the risk of recession in some major economies that could negatively affect the stock and bond markets. While the stock market offers opportunities for quick gains, the high risk may discourage investors, especially amid potential interest rate hikes that could limit market liquidity. On the other hand, sectors such as technology that have seen a surge during the pandemic are now experiencing a sharp price correction, indicating a shift in investor sentiment. However, the global transition towards sustainable energy and digitalization still offers promising investment opportunities, which require careful navigation of the capital markets to maximize potential returns.

Investment Strategy

All investment purchases/placements are adjusted to the Company's liability profile. All investment management is done in a prudent manner and prioritizes the principle of prudence. Some of the focuses of the asset allocation strategy include:

1. The selection of deposits is prioritized in banking partners that have healthy fundamentals with competitive interest rate offers.

2. Pemilihan obligasi negara diutamakan pada seri SBN/SBSN yang menjadi *benchmark* dan/atau seri SBN/SBSN yang sesuai dengan maturity liability profile Perusahaan.
3. Pembelian akan disesuaikan dengan *Bond Universe* sesuai dengan kebutuhan maturity untuk memenuhi *liability profile* Perusahaan.
4. Preferensi reksadana diutamakan pada reksadana seperti Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Campuran, dan/atau Reksadana Terproteksi/Reksadana Penyertaan Terbatas dengan underlying efek/emiten yang berfundamental baik dengan risiko terukur.
5. Melakukan *profit taking* dan *switching* pada saham yang memiliki *performance* harga saham yang baik serta memberikan dividen.

2. The selection of state bonds is prioritized on Government Securities (SBN)/Sharia Government Securities (SBSN) series that become benchmarks and/or SBN/SBSN series that are in accordance with the Company's maturity liability profile.
3. Purchases will be adjusted to the Bond Universe in accordance with maturity requirements to meet the Company's liability profile.
4. Mutual fund preferences are prioritized on mutual funds such as Money Market Mutual Funds, Fixed Income Mutual Funds, Balanced Mutual Funds, and/or Protected Mutual Funds/Limited Participation Mutual Funds with underlying securities/issuers that have good fundamentals with measurable risks.
5. Perform profit taking and switching on stocks that have good stock price performance and provide dividends.

Tahun 2023, investasi dalam surat berharga yang dilakukan Perusahaan utamanya masih berupa produk Obligasi, yaitu mencapai 88,85% dari total surat berharga yang dimiliki Perusahaan atau setara dengan Rp13,10 triliun. Selain itu, Jamkrindo juga memiliki portofolio dalam bentuk Reksadana dalam jumlah yang cukup besar, yaitu Rp1,45 triliun atau setara dengan 9,90% dari surat berharga Perusahaan.

In 2023, investment in securities made by the Company is still mainly in the form of bond products, reaching 88.85% of the total securities owned by the Company or equivalent to IDR13.10 trillion. In addition, Jamkrindo also has a portfolio in the form of mutual funds in a fairly large amount, which is IDR1.45 trillion or equivalent to 9.90% of the Company's securities.

Uraian Description	**2023 (Rp-juta)** (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	**Presentase %** Percentage %
Bunga Deposito Time Deposits Interest	**373.267**	228.502	144.765	63,35
Bunga Obligasi Bond Interest	**710.447**	551.470	158.977	28,83
Pendapatan Reksadana Mutual Fund Income	**51.515**	18.616	32.899	176,72
Pendapatan Sukuk Sukuk Income	**49.355**	33.084	16.271	49,18
Pendapatan *Capital Gain* Saham Income on Capital Gain	**6.544**	37.522	(30.978)	(82,56)
Dividen Dividend	**16.839**	8.293	8.546	103,05
Efek Beragunan Aset (EBA) Asset Backed Securities	**298**	1.051	(753)	(71,65)
Jumlah Pendapatan Investasi Total Investment Income	**1.208.265**	**878.538**	**329.727**	**37,53**
Beban Investasi Investment Expenses	**(14.750)**	(33.543)	18.793	(56,03)
Jumlah Pendapatan Investasi Bersih Total Investment Income – Net	**1.193.515**	**844.995**	**348.520**	**41,25**

Pendapatan investasi yang dibukukan Jamkrindo tahun 2023 mencapai Rp1.193,51 miliar, meningkat 41,25% atau setara dengan Rp348,52 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp844,99 miliar. Peningkatan pendapatan investasi tersebut utamanya disebabkan adanya peningkatan *assets under management* dan peningkatan suku bunga deposito.

Investment income accounted by Jamkrindo in 2023 reached IDR1,193.51 billion, an increase of 41.25%, or equivalent to IDR348.52 billion compared to the previous year of IDR844.99 billion. The increase in investment income was mainly due to an increase in assets under management and an increase in deposit interest rates.

KINERJA ENTITAS ANAK, PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

PERFORMANCE OF SUBSIDIARY, PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

Sejalan dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamkrindo Syariah") terus menunjukkan pertumbuhan kinerja yang baik. Di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang sangat menantang, Jamkrindo Syariah masih dapat membukukan pertumbuhan kinerja yang baik.

In line with the growth of the Sharia finance industry in Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamkrindo Syariah") continues to show good performance growth. In the midst of very challenging economic and business conditions, Jamkrindo Syariah was still able to record good performance growth.

Laporan Posisi Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Financial Position Report

Aset
Asset

Uraian Description	**2023 (Rp-juta)** (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	**Presentase %** Percentage %
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	**249.007**	452.038	(203.031)	(44,91)
Investasi Investment	**601.852**	459.697	142.155	30,92
Piutang Penjaminan Ulang - bersih Amounts due from Reinsurers - Net	**186.384**	92.376	94.008	101,77
Piutang Lain-Lain Bersih Other Net Receivables	**78**	157	(79)	(50,32)
Beban Dibayar di Muka Prepaid Expenses	**3.554**	3.226	328	10,17
Aset Tetap – bersih Fixed Assets - net	**83.497**	74.280	9.217	12,41
Aset Tidak Berwujud - bersih Intangible Assets - net	**340**	482	(142)	(29,46)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	**51.537**	49.147	2.390	4,86
Aset Lain-lain Other Assets	**1.275.846**	1.318.049	(42.203)	(3,20)
Jumlah Aset Total Assets	**2.452.095**	**2.449.452**	**2.643**	**0,11**

Aset Jamkrindo Syariah pada tahun 2023 tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau sebesar 0,11% atau setara dengan Rp2,64 miliar, menjadi Rp2,45 triliun dari Rp2,45 triliun di tahun 2022.

Jamkrindo Syariah's assets in 2023 did not experience a significant increase by 0.11% or equivalent to IDR2.64 billion, to IDR2.45 trillion from IDR2.45 trillion in 2022.

Liabilitas
Liabilities

Uraian	2023 (Rp-juta)	2022 (Rp-juta)	Kenaikan (Penurunan)	
			selisih (Rp-juta)	Presentase %
Utang Klaim Claim Payables	**5.110**	5.456	(346)	(6,34)
Utang Pajak Taxes Payables	**4.507**	1.671	2.836	169,72
Utang Penjaminan Ulang Amounts due to Reinsurers	**53.857**	48.315	5.542	11,47
Pendapatan Ditangguhkan Deferred Income	**686.139**	715.196	(29.057)	(4,06)
Cadangan Klaim Claim Reserves	**358.504**	366.887	(8.383)	(2,28)
Akrual dan Utang Lain-Lain Accruals and other payables	**113.147**	116.998	(3.851)	(3,29)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post-Employment Benefits Liabilities	**6.137**	6.241	(104)	(1,67)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**1.257.974**	**1.303.627**	**(45.653)**	**(3,50)**

Jumlah liabilitas Jamkrindo Syariah tahun 2023 tercatat sebesar Rp1,26 triliun, menurun 3,50% atau setara dengan Rp45,65 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,30 triliun. Penurunan tersebut utamanya disebabkan penurunan pendapatan ditangguhkan dan cadangan klaim.

Jamkrindo Syariah's total liabilities in 2023 were recorded at IDR1.26 trillion, decrease of 3.50% or equivalent to IDR45.65 billion compared to the previous year of IDR1.30 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in deferred income and claims reserves.

Ekuitas
Equity

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Penyertaan Modal Equity Participation	**705.620**	705.620	0	0,00
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja Remeasurement of post employment benefit	**450**	(439)	889	202,51
Kerugian yang belum direalisasikan atas surat berharga yang dikur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Unrealised losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax	**(468)**	(13.986)	13.518	96,65
Saldo Laba Retained Earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated retained earnings	**454.630**	265.000	189.630	71,56
Tidak ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings	**33.889**	189.630	(155.741)	(82,13)
Total Ekuitas Total Equity	**1.194.121**	**1.145.825**	**48.296**	**4,21**

Pada tahun 2023, ekuitas Jamkrindo Syariah mengalami peningkatan sebesar 4,21% atau setara dengan Rp48,30 miliar, menjadi Rp1,19 triliun dari Rp1,15 triliun di tahun 2022. Peningkatan jumlah ekuitas tersebut disebabkan peningkatan saldo laba.

In 2023, Jamkrindo Syariah's equity increased by 4.21% or equivalent to IDR48.30 billion, to IDR1.19 trillion from IDR1.15 trillion in 2022. The increase in total equity was due to an increase in retained earnings.

Laporan Laba (Rugi)
Profit (Loss) Statement

Uraian Description	**2023 (Rp-juta)** (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	**Presentase %** Percentage %
Jumlah pendapatan kafalah Total Kafalah Fees	**333.437**	462.992	(129.555)	(27,98)
Jumlah beban kafalah Total Kafalah Expenses	**(253.217)**	(170.033)	83.184	48,92
Pendapatan kafalah bersih Net Kafalah Fees	**80.220**	292.959	(212.739)	(72,62)
Pendapatan Investasi Investment Income	**85.822**	68.229	17.593	25,79
Beban Usaha Operating Expenses	**(128.258)**	(113.972)	14.286	12,53
Beban Lain-lain bersih Other Expenses - net	**(9.770)**	(7.176)	2.594	36,15
Laba Sebelum Zakat dan Pajak Penghasilan Profit Before Zakat and Income Tax	**28.014**	240.040	(212.026)	(88,33)
Zakat Zakat	**(700)**	(6.001)	(5.301)	(88,34)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	**27.314**	234.039	(206.725)	(88,33)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	**6.575**	(44.409)	50.984	(114,81)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**33.889**	189.630	(155.741)	(82,13)

Tahun 2023 Jamkrindo Syariah membukukan pendapatan kafalah bersih sebesar Rp80,22 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp292,96 miliar. Kemudian Pendapatan Investasi Bruto mencatatkan sebesar Rp85,82 atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp68,23 miliar.

In 2023 Jamkrindo Syariah recorded a net kafalah fee of IDR80.22 billion, a decrease compared to the previous year of IDR292.96 billion. Then Gross Investment Income recorded IDR85.82 or an increase compared to the previous year of IDR68.23 billion.

Dengan kinerja tahun 2023 tersebut, Jamkrindo Syariah membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp33,89 miliar, menurun 82,13% atau setara dengan Rp155,74 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp189,63 miliar

With this performance in 2023, Jamkrindo Syariah obtained a profit for the year of IDR33.89 billion, a decrease of 82.13% or equivalent to IDR155.74 billion compared to the previous year of IDR189.63 billion.

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECTS

Dari sisi pemasaran Jamkrindo sampai saat ini jumlah jaringan kerja sebanyak 9 (sembilan) Kantor Wilayah, 1 (Satu) Kantor Cabang Khusus, 10 (Sepuluh) Kantor Cabang Tipe A, 7 (Tujuh) Kantor Cabang Tipe B1, 10 (Sepuluh) Kantor Cabang B2, 7 (Tujuh) Kantor Cabang C1, 8 (Delapan) Kantor Cabang Tipe C2, 8 (Delapan) Kantor Cabang Tipe C3 3 (Tiga) Kantor Cabang Tipe D, dan 17 (Tujuh Belas) Kantor Unit Pelayanan, 12 Digital Business Unit (DBU) serta memiliki anak perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah untuk melayani mitra yang menjalankan bisnis dengan sistem Syariah.

In terms of marketing, to date, Jamkrindo has a total network of 9 (nine) Regional Offices, 1 (One) Special Branch Office, 10 (Ten) Type A Branch Offices, 7 (Seven) Type B1 Branch Offices, 10 (Ten) B2 Branch Offices, 7 (Seven) C1 Branch Offices, 8 (Eight) Type C2 Branch Offices, 8 (Eight) Branch Offices Type C3 3 (Three) Branch Offices Type D, and 17 (Seventeen) Service Unit Offices, 12 Digital Business Units (DBU) and has a subsidiary company PT Penjaminan Jamkrindo Syariah to serve partners who operate businesses with the Sharia system.

Jamkrindo terus meningkatkan kegiatan pemasaran dengan merumuskan enam inisiatif strategis terkait bidang bisnis dan pemasaran sebagai berikut:

Jamkrindo continues to improve its marketing activities by formulating six strategic initiatives related to business and marketing as follows:

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	**Kebijakan** Policies
Memperkuat portofolio produk existing, baru, dan kolaborasi *Holding* dan BUMN berorientasi pada Profitabilitas Strengthen the existing product portfolio, new, and profitability-oriented collaboration of Holding and SOEs	1. Kelompok produk dengan profitabilitas tinggi didorong untuk bertumbuh 2. Kelompok produk dengan profitabilitas rendah dapat dipertahankan bila secara teknikal dapat diperbaiki 3. Kolaborasi BUMN dilakukan pada produk dengan profitabilitas tinggi pada sektor industri yang potensial 4. Pengembangan produk mengikuti strategi bisnis Holding dan regulasi yang berlaku 5. Penyelenggaraan bisnis penjaminan memperhatikan prinsip risiko/*prudent* 1. Product groups with high profitability are encouraged to grow 2. Product groups with low profitability can be maintained if technically they can be improved 3. SOEs collaboration is carried out on products with high profitability in potential industrial sectors 4. Product development follows the Holding business strategy and applicable regulations 5. Guarantee business implementation takes into account the principle of risk/prudent
Memperkuat portofolio usaha dan Investasi Strengthen business and investment portfolios	1. Diversifikasi usaha harus terkait dengan bisnis inti perusahaan dan strategi bisnis *Holding* 2. Pengelolaan portofolio usaha dan investasi memperhatikan prinsip *prudent* dan efektif 3. Laba dari anak perusahaan digunakan sepenuhnya untuk memperkuat permodalan perusahaan tersebut sehingga dapat mendukung peningkatan kapasitas penjaminan 1. Business diversification must be related to the Company's core business and Holding's business strategy 2. Management of business and investment portfolios takes into account prudent and effective principles 3. Profits from subsidiaries are fully used to strengthen the Company's capital so that it can support the increase in guarantee capacity
Memperkuat & mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar Strengthen and develop partnership networks for market penetration & expansion	1. Pengembangan jejaring tidak dengan membuka unit kerja baru (milik Jamkrindo) 2. Pengembangan jejaring menekankan kepada upaya anorganik 3. Pengembangan jejaring dengan memanfaatkan potensi *Holding* 1. Network development is not by opening a new work unit (owned by Jamkrindo) 2. Network development emphasizes inorganic efforts 3. Network development is by utilizing the potential of Holding
Meningkatkan preferensi pelanggan terhadap produk Jamkrindo Increase customer preference for Jamkrindo products	1. Upaya peningkatan *brand preference* ditujukan kepada berbagai stakeholder secara berimbang dengan memperhatikan ketepatan media yang digunakan 2. Upaya peningkatan *brand preference* dengan memanfaatkan kekuatan *branding Holding* 1. Efforts to increase brand preference are aimed at various stakeholders in a balanced way by taking into account the accuracy of the media used 2. Efforts to increase brand preference by leveraging the strength of Holding's branding

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Kebijakan Policies
Meningkatkan loyalitas pelanggan & mitra melalui CRM Increase customer and partner loyalty through CRM	1. Pengelolaan hubungan ditujukan kepada penerima jaminan dan terjamin secara seimbang 2. Pengelolaan hubungan dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika dan kepatuhan 1. Relationship management is aimed at guarantee recipients and is guaranteed in a balanced manner 2. Relationship management is carried out by taking into account the principles of ethics and compliance
Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI Improving the quality and coverage of IT-based customer services	1. Pengembangan aplikasi berdasarkan prinsip *business case* (manfaat) yang dapat dipertanggungjawabkan 2. Peningkatan kapabilitas IT bersama *Holding* 1. Application development based on accountable business case principles (benefits) 2. Increasing IT capabilities with Holding

Pangsa Pasar

Berdasarkan data OJK pada bulan Desember 2023 tercatat sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan yang bergerak di bidang industri penjaminan yang terdiri dari 1 (satu) Perusahaan BUMN yaitu Jamkrindo, 18 (Delapan Belas) Perusahaan Penjaminan Daerah, dan 1 (Satu) Perusahaan Penjaminan Swasta Konvensional 2 (dua) Perusahaan Penjamin Swasta Syariah.

Berikut adalah gambaran total aset, liabilitas, dan ekuitas industri penjaminan konvensional serta posisi Jamkrindo di industri.

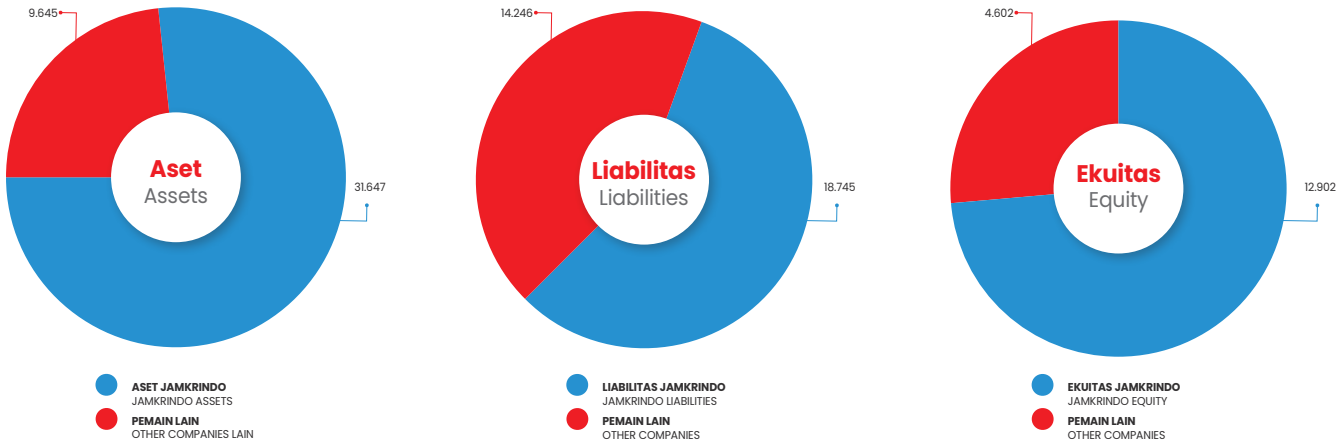
Market Share

Based on OJK data in December 2023, there were 22 (twenty-two) companies engaged in the guarantee industry consisting of 1 (one) SOEs Company, namely Jamkrindo, 18 (Eighteen) Regional Guarantee Companies, and 1 (One) Private Guarantee Company 2 (two) Sharia Private Guarantee Companies.

The following is an overview of the total assets, liabilities and equity of the conventional guarantee industry and Jamkrindo's position in the industry.

Keterangan Description	Jumlah Industri (Unit) Number of Industry (Unit)	Aset (miliar Rp) Assets (IDR-billion)	Liabilitas (miliar Rp) Liabilities (IDR-billion)	Ekuitas (miliar Rp) Equity (IDR-billion)
Perusahaan Penjaminan BUMN SOE Guarantee Companies	1	31.647	18.745	12.902
Perusahaan Penjaminan Daerah Regional Guarantee Companies	18	5.195	2.848	2.347
Perusahaan Penjaminan Swasta Konvensional Conventional Private Guarantee Company	1	4.039	3.831	209
Perusahaan Penjamin Swasta Syariah Sharia Private Guarantee Company	2	5.012	2.966	2.046
Jumlah Total	**22**	**45.893**	**28.389**	**17.503**

Gambaran Total Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Jamkrindo di Industri Penjaminan
Overview of Jamkrindo's Total Assets, Liabilities, and Equity in The Guarantee Industry



TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

Pembahasan tinjauan keuangan berikut berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dengan opini wajar dalam semua hal yang material disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023.

The following discussion of the financial review is based on the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2023 and has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) with a fair opinion in all material respects adjusted to the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia and revisions issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants which are considered relevant to its operations and affect the financial statements as of December 31, 2023.

Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position

Uraian Description	**2023 (Rp-juta)** (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	**Presentase %** Percentage %
Jumlah Aset Total Assets	**32.231.220**	28.009.567	4.221.653	15,07
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**18.877.198**	15.190.034	3.687.164	24,27
Jumlah Ekuitas Total Equity	**13.354.022**	12.819.533	534.489	4,17

Posisi keuangan Jamkrindo tahun 2023 cukup baik, dimana jumlah aset dan ekuitas Perusahaan mengalami peningkatan, namun demikian jumlah liabilitas Perusahaan sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jamkrindo's financial position in 2023 was quite good, of which the Company's total assets and liabilities have increased. In addition, the Company's total equity has slightly increased compared to the previous year.

Aset
Assets

Uraian Description	**2023 (Rp-juta)** (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	**Presentase %** Percentage %
Kas dan Kas di Bank Cash and Cash in Banks	**185.130**	236.997	(51.867)	(21,89)
Deposito Wajib dan Berjangka – bersih Statutory and Time Deposits – Net	**7.233.120**	5.451.788	1.781.332	32,67
Deposito Berjangka untuk Tujuan Tertentu - bersih Time Deposits for Specific Purposes – Net	**1.552.271**	1.689.817	(137.546)	(8,14)
Efek-Efek - Bersih Marketable Securities – Net	**14.745.121**	11.981.785	2.763.336	23,06

Aset
Assets

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Piutang Imbal Jasa Penjaminan – bersih Guarantee Fee Receivables – Net	**2.737.976**	3.474.500	(736.524)	(21,20)
Piutang Penjaminan Ulang – bersih Amounts due from Reinsurers – Net	**582.178**	242.025	340.153	140,54
Piutang Hasil Investasi – bersih Investment Income Receivables – Net	**224.895**	166.807	58.088	34,82
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	**115.800**	49.217	66.583	135,28
Aset Tetap – bersih Fixed Assets – Net	**626.808**	513.359	113.449	22,10
Aset Tak Berwujud – bersih Intangible Assets – Net	**68.202**	34.452	33.750	97,96
Penjaminan Ulang Dibayar di Muka Prepaid Re-guarantee	**936.226**	663.699	272.527	41,06
Aset Pengembalian Reimbursement Asset	**791.644**	1.023.425	(231.781)	(22,65)
Biaya Akuisisi Tangguhan Deferred Acquisition Cost	**147.381**	182.502	(35.121)	(19,24)
Aset Penjaminan Ulang Re-guarantee Assets	**354.324**	428.727	(74.403)	(17,35)
Aset Pajak Tangguhan – bersih Deferred Tax Assets – Net	**1.925.862**	1.831.441	94.421	5,16
Aset Lain-Lain – bersih Other Assets – Net	**4.282**	39.026	(34.744)	(89,03)
Jumlah Aset Total Assets	**32.231.220**	**28.009.567**	**4.221.653**	**15,07**

Jumlah aset Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp32,23 triliun, meningkat Rp4,22 triliun atau 15,07% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp28,01 triliun. Peningkatan jumlah aset tersebut utamanya disebabkan adanya peningkatan bisnis sehingga berpengaruh pada peningkatan dana kelolaan investasi atau *Asset Under Management* (AUM).

Jamkrindo's total assets as of December 31, 2023 were recorded at IDR32.23 trillion, an increase of IDR4.22 trillion or 15.07% compared to the same period in 2022 of IDR28.01 trillion. The increase in total assets was mainly due to the increase of business which results in the increase in investment managed funds or Assets Under Management (AUM).

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalent

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Kas Cash	**1.228**	1.342	(114)	(8,49)
Giro Current Account				
Pihak Berelasi Related Parties	**139.766**	160.835	(21.069)	(13,10)
Piha Ketiga Third Parties	**44.140**	74.833	(30.693)	(41,02)

Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalent

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	(4)	(13)	9	(69,23)
Jumlah Giro Total Current Account	**185.130**	**236.997**	**(51.867)**	**(21,89)**

Jumlah kas dan kas di bank Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp185,13 miliar, menurun Rp51,87 miliar atau 21,895 dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp237,00 miliar. Penurunan jumlah kas dan kas di bank tersebut utamanya disebabkan optimalisasi kas dan kas di bank menjadi instrumen investasi.

Total cash and cash in banks of Jamkrindo as of December 31, 2023 was recorded at IDR185.13 billion, a decrease of IDR51.87 billion or 21.895 compared to the same period in 2022 of IDR237.00 billion. The decrease in cash and cash at bank was mainly due to the optimization of cash and cash at bank into investment instruments.

Deposito Wajib dan Berjangka
Statutory and Time Deposits

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Deposito Deposits				
Pihak Berelasi Related Parties	**6.499.226**	4.822.353	1.676.873	34,77
Piha Ketiga Third Parties	**734.071**	629.462	104.609	16,62
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	**(177)**	(27)	(150)	555,56
Jumlah Deposito Total Deposits	**7.233.120**	**5.451.788**	**1.781.332**	**32,67**

Jumlah deposito wajib dan berjangka Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp7,23 triliun, naik Rp1,78 triliun atau 32,67% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp5,45 triliun. Peningkatan jumlah deposito wajib dan berjangka tersebut utamanya disebabkan adanya penempatan kas pada deposito wajib dan berjangka yang berasal dari peningkatan penerimaan kas atas imbal jasa penjaminan dan subrogasi serta aktivitas reinvestment.

Total cash and cash in banks of Jamkrindo as of December 31, 2023 was recorded at IDR185.13 billion, a decrease of IDR51.87 billion or 21.895 compared to the same period in 2022 of IDR237.00 billion. The increase in the amount of Statutory and Time Deposits was mainly due to the placement of cash in Statutory and Time Deposits from an increase in cash receipts from guarantee and subrogation fees and reinvestment activities.

Efek-Efek
Marketable Securities

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI: FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS				
Reksadana Mutual Fund	**1.459.975**	975.630	484.345	49,64
Obligasi Bonds	**599.641**	191.474	408.167	213,17
Sukuk	**10.094**	40.193	(30.099)	(74,89)
Efek Beragun Aset Asset Backed Securities	**3.063**	6.122	(3.059)	(49,97)
NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME:				
Obligasi Bonds	**4.769.589**	3.245.852	1.523.737	46,94
Sukuk	**2.508.432**	1.683.765	824.667	48,98
Saham Shares	**184.154**	193.308	(9.154)	(4,74)
BIAYA PEROLEHAN DIAMORTISASI: MEASURED AT AMORTIZED COST				
Obligasi Bonds	**3.067.887**	2.960.192	107.695	3,64
	2.143.677	2.731.160	(587.483)	(21,51)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	**(1.391)**	(911)	(480)	52,69
Jumlah Efek-Efek Total Marketable Securities	**14.745.121**	**11.981.785**	**2.763.336**	**23,06**

Jumlah efek-efek Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp14,74 triliun, meningkat Rp2,76 triliun atau 23,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp11,98 triliun. Peningkatan jumlah efek-efek tersebut utamanya disebabkan adanya pembelian aset investasi baru yang diprioritaskan pada instrumen surat utang seperti obligasi negara dan obligasi korporasi sesuai *risk appetite* Jamkrindo.

The amount of Jamkrindo's statutory and time deposits as of December 31, 2023 was recorded at IDR7.23 trillion, an increase of IDR1.78 trillion or 32.67% compared to the same period in 2021 of IDR5.45 trillion. The increase in the number of securities was mainly due to the purchase of new investment assets prioritized in debt securities instruments such as Government bonds and corporate bonds in accordance with Jamkrindo's risk appetite.

Piutang Imbal Jasa Penjaminan
Guarantee Fee Receivables

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
BERDASARKAN PIHAK: BY PARTIES:				
Pemerintah Republik Indonesia Government of Republic of Indonesia	**1.663.631**	1.775.450	(111.819)	(6,30)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	**1.382.499**	1.475.793	(93.294	(6,32)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	**751.421**	868.969	(117.548)	(13,53)

Piutang Imbal Jasa Penjaminan
Guarantee Fee Receivables

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	**553.208**	364.392	188.816	51,82
Berbagai Bank Pembangunan Daerah Various Regional Development Banks	**234.956**	170.778	64.178	37,58
Bank swasta Private Banks	**31.587**	14.604	16.983	116,29
PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk	**15.634**	3.260	12.374	379,57
Lain-lain Others	**131.765**	5.769	125.996	2184,02
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	**(2.026.725)**	(1.204.515)	(822.210)	68,26
Jumlah Piutang Jasa Penjaminan Total Guarantee Fee Receivables	**2.737.976**	**3.474.500**	**(736.524)**	**(21,20)**

Jumlah piutang imbal jasa penjaminan Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2,74 triliun, turun Rp736,52 miliar atau 21,20% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp3,47 triliun. Penurunan jumlah piutang imbal jasa penjaminan tersebut utamanya disebabkan adanya pembayaran imbal jasa penjaminan dari mitra penerima penjaminan.

Total guarantee fee receivables of Jamkrindo as of December 31, 2023 were recorded at IDR2.74 trillion, a decrease of IDR736.52 billion or 21.20% compared to the same period in 2022 of IDR3.47 trillion. The decrease in the amount of guarantee fees receivable was mainly due to the payment of guarantee fees from the guarantee recipient partners.

Piutang Penjaminan Ulang
Amounts due from Reinsurers

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
BERDASARKAN PIHAK: BY PARTIES:				
PT Reasuransi Nasional Indonesia	**453.973**	60.689	393.284	648,03
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	**209.319**	205.223	4.096	2,00
PT Asuransi Syariah Mubarakah	**72.705**	72.705	0	0,00
PT Reasuransi Syariah Indonesia	**88.063**	61.135	26.928	44,05
PT Heksa Solution Insurance	**16.456**	20.067	(3.611)	(17,99)
PT BRI Asuransi Indonesia	**6.355**	6.295	60	0,95
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	**4.914**	4.525	389	8,60
PT Tugu Reasuransi Indonesia	**-**	367	-	-
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	**(269.607)**	(188.981)	(80.626)	42,66
Jumlah Piutang Penjaminan Ulang Total Amounts due from Reinsurers	**582.178**	**242.025**	**340.153**	**140,54**

Jumlah piutang penjaminan ulang Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp582,18 miliar, naik Rp340,15 miliar atau 140,54% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp242,02 miliar. Peningkatan jumlah piutang penjaminan ulang tersebut utamanya disebabkan karena peningkatan klaim KUR.

The amount of Jamkrindo's Amounts due from Reinsurers as of December 31, 2023 was recorded at IDR582.18 billion, an increase of IDR340.15 billion or 140.54% compared to the same period in 2022 of IDR242.02 billion. The increase in reinsurance receivables was mainly due to an increase in KUR claims.

Piutang Hasil Investasi
Investment Income Receivables

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Obligasi Bonds	**202.851**	92.424	110.427	119,48
Deposito Berjangka Time Deposits	**9.805**	6.039	3.766	62,36
Sukuk	**12.298**	68.316	(56.018)	(82,00)
Efek Beragun Aset Asset Backed Securities	**22**	42	(20)	(47,62)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	**(81)**	(14)	(67)	478,57
Jumlah Piutang Hasil Investasi Total Investment Income Receivables	**224.895**	**166.807**	**58.088**	**34,82**

Jumlah piutang hasil investasi Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp224,89 miliar, naik Rp58,09 miliar atau 34,82% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp166,81 miliar. Peningkatan jumlah piutang hasil investasi tersebut utamanya disebabkan adanya peningkatan aset deposito wajib dan berjangka serta peningkatan efek-efek Jamkrindo.

Total Jamkrindo's Investment Income Receivables as of December 31, 2023 were recorded at IDR224.89 billion, an increase of IDR58.09 billion or 34.82% compared to the same period in 2022 of IDR166.81 billion. The increase in the amount of Investment Income Receivables was mainly due to an increase in Statutory and time deposit assets and an increase in Jamkrindo's securities.

Aset Tetap
Fixed Assets

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
BIAYA PEROLEHAN ACQUISITION COST				
Kepemilikan Langsung Direct Ownership				
Tanah Land	**256.758**	217.273	39.485	18,17
Bangunan Kantor Office Buildings	**254.379**	226.877	27.502	12,12
Perumahan Dinas Houses	**10.028**	8.648	1.380	15,96
Inventaris Kantor Office Equipment	**209.098**	176.556	32.542	18,43
Inventaris Rumah Dinas Houses Equipment	**6.052**	5.199	853	16,41
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	**36.475**	36.383	92	0,25
Aset dalam Penyelesaian Assets in Progress	**19.167**	-	-	-
Aset Hak Guna Right-of-use Assets				
Bangunan Kantor Office Buildings	**61.745**	61.152	593	0,97

Aset Tetap
Fixed Assets

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	**72.665**	57.304	15.361	26,81
Inventaris Kantor Office Equipment	**159**	159	0	0,00
Jumlah Biaya Perolehan Total Acquisition Cost	**926.526**	789.551	136.975	17,35
AKUMULASI PENYUSUTAN ACCUMULATED DEPRECIATION				
Bangunan Kantor Office Buildings	**(50.492)**	(43.851)	(6.641)	15,14
Perumahan Dinas Houses	**(3.657)**	(3.263)	(394)	12,07
Inventaris Kantor Office Equipment	**(138.911)**	(116.710)	(22.201)	19,02
Inventaris Rumah Dinas Houses Equipment	**(4.510)**	(3.854)	(656)	17,02
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	**(236.272)**	(36.205)	(200.067)	552,59
Aset Hak Guna Right-of-use Assets				
Bangunan Kantor Office Buildings	**(37.444)**	(36.540)	(904)	2,47
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	**(28.315)**	(35.681)	7.366	(20,64)
Inventaris Kantor Office Equipment	**(117)**	(88)	(29)	32,95
Jumlah Akumulasi Penyusutan Total Accumulated Depreciation	**(299.718)**	**(276.192)**	**(23.526)**	**8,52**
Jumlah Aset Tetap (Bersih Total Fixed Assets – Net	**626.808**	**513.359**	**113.449**	**22,10**

Jumlah aset tetap Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp626,80 miliar, naik Rp113,45 miliar atau 22,10% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp513,36 miliar. Peningkatan jumlah aset tetap tersebut utamanya disebabkan adanya pembelian aset Bangunan Gedung Kantor Cabang Tangerang, Jambi dan Pekanbaru serta renovasi beberapa Gedung Kantor baru atas pembelian yang dilakukan di tahun 2022.

Jamkrindo's total fixed assets as of December 31, 2023 were recorded at IDR626.80 billion, an increase of IDR113.45 billion or 22.10% compared to the same period in 2022 of IDR513.36 billion. The increase in the amount of fixed assets was mainly due to the purchase of Tangerang, Jambi and Pekanbaru Branch Office Buildings and renovation of several new Office Buildings for purchases made in 2022.

Aset Tak Berwujud

Jumlah aset tak berwujud Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp68,20 miliar, naik Rp33,75 miliar atau 97,96% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp34,45 miliar. Peningkatan jumlah aset tak berwujud tersebut utamanya disebabkan adanya realisasi pengadaan *software*/sistem/aplikasi terkait project Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) Jamkrindo.

Intangible Assets

Jamkrindo's total intangible assets as of December 31, 2023 were recorded at IDR68.20 billion, an increase of IDR33.75 billion or 97.96% compared to the same period in 2022 of IDR34.45 billion. The increase in intangible assets was mainly due to the realization of software/system/application procurement related to Jamkrindo's Information Technology Master Plan (MPTI) project.

Deposito di Bank yang Dibatasi Penggunaannya
Restricted Deposit in Banks

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	**200.000**	500.000	(300.000)	(60,00)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	**755.139**	709.689	45.450	6,40
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	**421.000**	269.000	152.000	56,51
Berbagai Bank Pembangunan Daerah	**47.900**	82.900	(35.000)	(42,22)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	**125.140**	125.140	0	0,00
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk – Unit Syariah	**3.094**	3.094	0	0,00
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	**(2)**	(6)	4	(66,67)
Jumlah Deposito di Bank yang Dibatasi Penggunaannya Total Restricted Deposit in Banks	**1.552.271**	**1.689.817**	**(137.546)**	**(8,14)**

Jumlah deposito di bank yang dibatasi penggunaannya Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1,55 triliun, turun Rp137,55 miliar atau 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1,69 triliun. Penurunan jumlah deposito di bank yang dibatasi penggunaannya tersebut utamanya disebabkan karena karena adanya penurunan rasio commercial lines.

The amount of Restricted Deposit in Banks as of December 31, 2023 was recorded at IDR1.55 trillion, a decrease of IDR137.55 billion or 8.14% compared to the same period in 2022 of IDR1.69 trillion. The decrease in restricted bank deposits was mainly due to a decrease in the commercial lines ratio.

Penjaminan Ulang Dibayar Di Muka
Prepaid Re-guarantee

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage %
Kredit Usaha Rakyat (KUR) People's Business Kredit (KUR)	**258.785**	249.606	9.179	3,68
Konsumtif Consumptive	**286.869**	351.401	(64.532)	(18,36)
Produktif Productive	**357.271**	11.210	346.061	3087,07
PEN	**20.569**	50.353	(29.784)	(59,15)
Suretyship	**12.732**	1.129	11.603	1027,72
Jumlah Penjaminan Ulang Dibayar di Muka Total Prepaid Re-guarantee	**936.226**	**663.699**	**272.527**	**41,06**

Jumlah penjaminan ulang dibayar di muka Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp936,22 miliar, naik Rp272,53 miliar atau 41,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp663,70 miliar. Peningkatan jumlah penjaminan ulang dibayar di muka tersebut utamanya disebabkan karena adanya peningkatan pada produk produktif.

The amount of Jamkrindo's prepaid re-guarantee as of December 31, 2023 was recorded at IDR936.22 billion, an increase of IDR272.53 billion or 41.06% compared to the same period in 2022 of IDR663.70 billion. The increase in the amount of prepaid re-guarantee was mainly due to an increase of productive products.

Aset Lain-Lain
Other Assets

Uraian Description	**2023 (Rp-juta)** (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	**Presentase %** Percentage %
Klaim dalam Proses Claim in Process	**56.442**	81.476	(25.034)	(30,73)
Piutang investasi jatuh tempo Receivables from Matured Investment	**9.428**	22.178	(12.750)	(57,49)
Pinjaman Bagi Hasil Profit Sharing Loans	**17.110**	17.110	0	0,00
Aset Lainnya Other Assets	**7.319**	9.156	(1.837)	(20,06)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Impairment Allowances	**(86.017)**	(90.894)	4.877	(5,37)
Jumlah Aset Lain-lain Total Other Assets	**4.282**	**39.026**	**(34.744)**	**(89,03)**

Jumlah aset Lain-lain Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp4,28 miliar, turun Rp34,74 miliar atau 89,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp39,03 miliar. Penurunan jumlah aset Lain-lain tersebut utamanya disebabkan oleh adanya penurunan piutang investasi.

Jamkrindo's other assets as of December 31, 2023 were recorded at IDR4.28 billion, a decrease of IDR34.74 billion or 89.03% compared to the same period in 2022 of IDR39.03 billion. The decrease in the number of other assets was mainly due to a decrease in investment receivables.

LIABILITAS
Liabilities

Liabilitas
Liabilities

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Utang Klaim Claim Payables	**81.372**	58.074	23.298	40,12
Utang Penjaminan Ulang Amounts due to reinsurers	**633.300**	221.100	412.200	186,43
Akrual dan Utang Lain-Lain Accruals and other payables	**1.535.414**	969.758	565.656	58,33
Utang Pajak Taxes payables	**129.408**	441.221	(311.813)	(70,67)
Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan Liabilities for financial guarantee contracts	**15.211.466**	12.204.280	3.007.186	24,64
Pendapatan Komisi Ditangguhkan Deferred commission income	**159.158**	122.636	36.522	29,78
Estimasi Liabilitas Klaim Estimated claim liabilities	**358.504**	366.887	(8.383)	(2,28)
Imbal Jasa Kafalah Ditangguhkan Unearned kafalah fees	**686.139**	715.196	(29.057)	(4,06)
Liabilitas Imbalan Kerja Employee benefits liabilities	**82.437**	90.882	(8.445)	(9,29)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**18.877.198**	**15.190.034**	**3.687.164**	**24,27**

Jumlah liabilitas Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp18,88 triliun, naik Rp3,69 triliun atau 24,27% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp15,19 triliun. Peningkatan jumlah liabilitas tersebut utamanya disebabkan adanya peningkatan bisnis yang tercermin dari peningkatan liabilitas kontrak jaminan keuangan.

Jamkrindo's total liabilities as of December 31, 2023 were recorded at IDR18.88 trillion, an increase of IDR3.69 trillion or 24.27% compared to the same period in 2022 of IDR15.19 trillion. The increase in total liabilities was mainly due to an increase in business as reflected in an increase in financial guarantee liabilities contract.

Utang Klaim

Jumlah utang klaim Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp81,37 miliar, naik Rp23,30 miliar atau 40,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp58,07 miliar. Peningkatan jumlah utang klaim tersebut utamanya disebabkan karena persetujuan di akhir bulan Desember tahun 2023 baru dibayarkan pada awal tahun 2024 serta terdapat saldo *abnormal balance* yang disebabkan oleh perubahan kolektibilitas, pembatalan klaim, dan klaim yang sudah kadarluarsa.

Claims Payables

Jamkrindo's total Claims Payables as of December 31, 2023, was recorded at IDR81.37 billion, an increase of IDR23.30 billion or 40.12% compared to the same period in 2022 of IDR58.07 billion. The increase in the amount of claims payable was mainly due to approvals at the end of December 2023 which were only paid at the beginning of 2024 and there were abnormal balances caused by changes in collectibility, cancellation of claims and claims that had expired.

Utang Penjaminan Ulang
Amounts due to reinsurers

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Pihak Berelasi Related Parties	**633.300**	221.100	412.200	186,43
Pihak Ketiga Third Parties	**-**	-	-	-
Jumlah Utang Penjaminan Ulang Total amounts due to reinsurers	**633.300**	**221.100**	**412.200**	**186,43**

Jumlah utang penjaminan ulang Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp633,30 miliar, naik Rp412,20 miliar atau 186,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp221,10 miliar. Peningkatan jumlah utang penjaminan ulang tersebut utamanya disebabkan karena adanya peningkatan utang penjaminan ulang kepada PT. Reasuransi Nasional Indonesia.

Jamkrindo's total Amounts due to reinsurers as of December 31, 2023 was recorded at IDR633.30 billion, an increase of IDR412.20 billion or 186.43% compared to the same period in 2022 of IDR221.10 billion. The increase in the amount of reinsurance payable was mainly due to an increase in reinsurance payable to PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Akrual dan Utang Lain-Lain
Accruals and other payables

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
IJP Belum Teridentifikasi Unidentified guarantee fees	**936.002**	511.109	424.893	83,13
Beban Pegawai Accrued employee expenses	**306.409**	240.761	65.648	27,27
Subrogasi Belum Teridentifikasi Unidentified subrogation income	**-**	3.160	-	-
Beban Operasional Operational expenses	**11.406**	25.797	(14.391)	(55,79)
Beban Sistem dan Teknologi Accrued system and technology expenses	**67.226**	28.312	38.914	137,45
Liabilitas Sewa Lease liabilities	**48.713**	29.129	19.584	67,23
Beban Administrasi dan Umum Administrative and general expenses	**83.035**	60.489	22.546	37,27
Fee Bank Bank fees	**13.477**	12.864	613	4,77
Lainnya Others	**69.146**	58.137	11.009	18,94
Jumlah Akrual dan Utang Lain-lain Total Accruals and other payables	**1.535.414**	**969.758**	**565.656**	**58,33**

Jumlah akrual dan utang lain-lain Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1,53 triliun , naik Rp565,66 miliar atau 58,33% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp969,76 miliar. Peningkatan jumlah akrual dan utang lain-lain tersebut utamanya disebabkan Imbal Jasa Penjaminan Belum Teridentifikasi.

Jamkrindo's total accruals and other payables as of December 31, 2023, were recorded at IDR1.53 trillion, an increase of IDR565.66 billion or 58.33% compared to the same period in 2022 of IDR969.76 billion. The increase in the amount of accruals and other payables was mainly due to Unidentified Guarantee Fees.

Utang Pajak
Taxes Payables

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Entitas Induk Parent entity	**124.901**	439.550	(314.649)	(71,58)
Entitas Anak Subsidiaries	**4.507**	1.671	2.836	169,72
Jumlah Utang Pajak Total Tax Payables	**129.408**	441.221	(311.813)	(70,67)

Jumlah utang pajak Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp129,41 miliar, turun Rp311,81 miliar atau 70,67% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp441,22 miliar. Penurunan jumlah utang pajak tersebut utamanya disebabkan penurunan Utang PPh Pasal 29 pada tahun 2023.

Jamkrindo's total taxes payables as of December 31, 2023 was recorded at IDR129.41 billion, a decrease of IDR311.81 billion or 70.67% compared to the same period in 2022 of IDR441.22 billion. The decrease in the amount of taxes payables was mainly due to decrease in Income Tax Article 29 Debt in 2023.

Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan
Liabilities for financial guarantee contracts

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Kredit Usaha Rakyat People's Business Credit (KUR)	**8.944.482**	8.701.144	243.338	2,80
Konsumtif Consumptive	**1.236.876**	1.995.071	(758.195)	(38,00)
Produktif Productive	**4.527.198**	1.195.751	3.331.447	278,61
PEN National Economic Recovery	**482.352**	201.916	280.436	138,89
Suretyship	**20.558**	110.398	(89.840)	(81,38)
Jumlah Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan Liabilities for financial guarantee contracts	**15.211.466**	**12.204.280**	**3.007.186**	**24,64**

Jumlah liabilitas kontrak jaminan keuangan Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp15,21 triliun, naik Rp3,00 triliun atau 24,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp12,20 triliun. Peningkatan jumlah liabilitas kontrak jaminan keuangan tersebut utamanya disebabkan karena adanya kenaikan produksi pada LOB Produktif.

Jamkrindo's total financial guarantee contract liabilities as of December 31, 2023 were recorded at IDR15.21 trillion, an increase of IDR3.00 trillion or 24.62% compared to the same period in 2022 of IDR12.20 trillion. The increase in the amount of financial guarantee contract liabilities was mainly due to an increase in production at the Productive LOB.

Liabilitas Imbalan Kerja

Jumlah liabilitas imbalan kerja Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp82,43 miliar, turun Rp8,45miliar atau 9,29% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp90,88 miliar. Penurunan jumlah liabilitas imbalan kerja tersebut utamanya disebabkan turunnya tingkat diskonto per tahun untuk program imbalan pasca kerja dan program imbalan pasca kerja jangka panjang.

Employee Benefits Liabilities

Jamkrindo's total employee benefit liabilities as of December 31, 2023 were recorded at IDR82.43 billion, a decrease of IDR8.45 billion or 9.29% compared to the same period in 2022 of IDR90.88 billion. The decrease in employee benefit liabilities was mainly due to a decrease in the annual discount rate for post-employment benefit programs and long-term post-employment benefit programs.

Ekuitas
Equity

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity Attributable to Owners of Parent Entity				
Modal Saham: Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp1.365.160 (nilai penuh) per lembar saham Seri B (nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham Authorised capital: A Series Dwiwarna - nominal value IDR1,365,160 (full value) per share B Series - nominal value IDR1,000,000 (full value) per share				
Modal dasar: Seri A Dwiwarna - 1 saham Seri B - 30.000.000 saham Authorised capital: A Series Dwiwarna - 1 share B Series share - 30,000,000 shares				
Modal ditempatkan dan disetor penuh: Seri A Dwiwarna - 1 saham Seri B - 10.638.732 saham (2020: 7.638.732 saham) Issued and fully paid: A Series Dwiwarna - 1 share, B Series - 10,638,732 shares (2020: 7,638,732 shares)-	**10.638.733**	10.638.733	0	0,00
Penyertaan modal negara The Government's share capita	**-**	-	-	-
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja Remeasurement of post employment benefit	**(19.859)**	(19.324)	(535)	2,77
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak Unrealised losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax	**(265.002)**	(323.044)	58.042	(17,97)
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya Appropriated retained earnings	**1.562.455**	1.242.333	320.122	25,77
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Unappropriated retained earnings	**1.436.849**	1.279.835	157.014	12,27
	13.353.176	12.818.533	534.643	4,17
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	**846**	1.000	(154)	(15,40)
Jumlah Ekuitas Total Equity	**13.354.022**	**12.819.533**	**534.489**	**4,17**

Jumlah ekuitas Jamkrindo per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp13,35 triliun, naik Rp534,49 miliar atau 4,17% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp12,82 triliun. Peningkatan jumlah ekuitas tersebut utamanya disebabkan adanya peningkatan laba di tahun 2023 dan pemupukan laba dari tahun sebelumnya.

Jamkrindo's total equity as of December 31, 2023 was recorded at IDR13.35 trillion, an increase of IDR534.49 billion or 4.17% compared to the same period in 2022 of IDR12.82 trillion. The increase in equity was mainly due to an increase in profits in 2023 and increased profits from the previous year.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT (LOSS) AND COMPREHENSIVE INCOME

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
PENDAPATAN PENJAMINAN GUARANTEE INCOME				
Imbal jasa penjaminan bruto Gross guarantee fee income	**6.738.700**	5.641.788	1.096.912	19,44
Imbal jasa kafalah bruto Gross kafalah fees	**408.035**	503.297	(95.262)	(18,93)
Kenaikan imbal jasa kafalah belum merupakan pendapatan Increase in unearned kafalah fees	**(24.212)**	128.623	(152.835)	(118,82)
Premi penjaminan ulang Re-guarantee premiums	**(767.795)**	(997.898)	230.103	(23,06)
Jumlah Pendapatan Penjaminan (bersih Total guarantee income (Net)	**6.354.728**	5.275.810	1.078.918	20,45
BEBAN PENJAMINAN GUARANTEE EXPENSES				
Beban klaim Claim expenses	**5.957.023**	3.237.332	2.719.691	84,01
Klaim penjaminan ulang Re-guarantee claims	**(788.483)**	(539.414)	(249.069)	46,17
Beban ujrah Ujrah expenses	**15.386**	39.045	(23.659)	(60,59)
Biaya kafalah lainnya Other kafalah expenses	**762**	1.068	(306)	(28,65
Kenaikan cadangan klaim Increase in claim reserves	**(529.220)**	1.440.312	(1.969.532)	(136,74)
Pendapatan subrogasi – bersih Subrogation income - net	**(1.509.417)**	(835.372)	(674.045)	80,69
Pendapatan ujrah penjaminan ulang Re-guarantee ujrah income	**(18.719)**	(33.738)	15.019	(44,52)
Jumlah beban klaim Total claim expenses	**3.577.332**	3.309.233	268.099	8,10
Pendapatan Penjaminan bersih Net guarantee income	**2.777.396**	1.966.577	810.819	41,23
Komisi – bersih Commission - net	**61.313**	9.279	52.034	560,77
Pendapatan investasi – bersih Investment income - net	**1.193.515**	844.995	348.520	41,25
Beban usaha Operating expenses	**(2.255.338)**	(1.206.253)	(1.049.085)	86,97
Pendapatan lain-lain Other Income	**15.099**	61.671	(46.572)	(75,52)
Laba sebelum pajak Profit before tax	**1.485.939**	1.676.269	(190.330)	(11,35)
Beban pajak final Final tax expenses	**(153.023)**	(95.652)	(57.371)	59,98

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	**1.638.962**	1.580.617	58.345	3,69
(Beban)/manfaat pajak penghasilan Income tax benefit (expense)	**(202.113)**	(300.460)	98.347	(32,73)
Laba bersih tahun berjalan Net profit for the year	**1.436.849**	1.280.157	156.692	12,24
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Items that will not be reclassified to profit or loss:				
Pengukuran kembali imbalan kerja Remeasurement of post-employment benefi	**(670)**	(1.030)	360	(34,95)
Efek pajak terkait Related tax effect	**135**	227	(92)	(40,53)
	(535)	(803)	268	(33,37)
Kerugian yang belum terealisasi aset keuangan yang tersedia untuk dijual Unrealized losses on available-for-sale financial assets	**(9.473)**	5.640	(15.113)	(267,96)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Items that will be reclassified to profit or loss:				
Keuntungan yang belum terealisasi aset keuangan yang tersedia untuk dijual Unrealized profit on available-for-sale financial assets	**67.368**	(166.643)	234.011	(140,43)
Efek pajak terkait Related tax effect	**157**	9.131	(8.974)	(98,28)
	67.525	(157.512)	225.037	(142,87)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah Pajak Other comprehensive income for the year, after tax	**57.517**	(152.675)	210.192	(137,67)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**1.494.366**	1.127.482	366.884	32,54
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada: Profit for the Year Attributable to:				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	**1.437.013**	1.279.835	157.178	12,28
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	**(164)**	322	(486)	(150,93)
	1.436.849	1.280.157	156.692	12,24
Laba Komprehensif Diatribusikan Kepada: Comprehensive Income Attributable to				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	**1.494.520**	1.127.174	367.346	32,59
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	**(154)**	308	(462)	(150,00)
	1.494.366	1.127.482	366.884	32,54

Kinerja keuangan Jamkrindo tahun 2023 secara umum mengalami Peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan mencatat Peningkatan penjaminan dan pendapatan investasi yang cukup baik sepanjang tahun 2023, sehingga laba bersih yang dibukukan Perusahaan juga meningkat dibandingkan tahun 2022.

Jamkrindo's financial performance in 2023 has generally increased compared to the previous year. The Company recorded a fairly good increase in guarantees and investment income throughout 2023, so that the net profit recorded by the Company also increased compared to 2022.

Imbal Jasa (Pendapatan) Penjaminan ("IJP")
Guarantee Fee

Uraian Description	**2023 (Rp-juta)** (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	**Presentase %** Percentage
Imbal jasa penjaminan Guarantee fee	**6.738.700**	5.641.788	1.096.912	19,44
Imbal jasa kafalah bruto Gross kafalah fees	**408.035**	503.297	(95.262)	(18,93)
Kenaikan imbal jasa kafalah belum merupakan Pendapatan Increase in unearned kafalah fees	**(24.212)**	128.623	(152.835)	(118,82)
Premi penjaminan ulang Re-guarantee premiums	**(767.795)**	(997.898)	230.103	(23,06)
Jumlah Imbal jasa penjaminan Total Guarantee Fees	**6.354.728**	**5.275.810**	**1.078.918**	**20,45**

Imbal jasa penjaminan yang dibukukan Jamkrindo sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar Rp6,35 triliun, naik Rp1,08 miliar atau 10,45% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,28 triliun. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan penerimaan IJP dari LOB Produktif.

The guarantee fee recorded by Jamkrindo throughout 2023 was recorded at IDR6.35 trillion, an increase of IDR1.08 billion or 10.45% compared to the previous year of IDR5.28 trillion. This increase was mainly due to Guarantee Fee income from Productive LOBs.

Uraian Description	**2023 (Rp-juta)** (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	**Presentase %** Percentage
Kredit Usaha Rakyat People's Business Credit (KUR)	**4.214.420**	3.875.941	338.479	8,73
Konsumtif Consumptive	**209.409**	521.217	(311.808)	(59,82)
Produktif Productive	**1.407.622**	247.647	1.159.975	468,40
PEN National Economic Recovery	**798.201**	907.415	(109.214)	(12,04)
Suretyship	**109.048**	89.568	19.480	21,75
Jumlah Imbal jasa penjaminan Total guarantee fee	**6.738.700**	**5.641.788**	**1.096.912**	**19,44**

Pendapatan Imbal Jasa penjaminan (IJP) adalah premi yang diterima oleh Perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dihitung dari tarif IJP, *plafond* kredit dan jangka waktu kredit. Untuk kredit eksisting, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin, dan jangka waktu penjaminan. IJP dibayar sekaligus di muka. Sedangkan Tarif IJP Kredit Usaha Rakyat

Guarantee Service Income (IJP) is a premium received by the Company from the guaranteed in the framework of guarantee business activities. The amount of IJP is calculated from the IJP rate, credit limit and credit period. For existing credit, the amount of the IJP rate is determined by considering, among other things: the guarantee product, the guaranteed risk, and the guarantee period. IJP is paid all at once in advance. Meanwhile, the IJP Rate for People's

(KUR) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2014 tanggal 1 Oktober 2014 mengatur IJP KUR dibayarkan per tahun oleh Pemerintah dengan periode penagihan pada bulan April dan Oktober.

Business Credit (KUR) is regulated in Minister of Finance Regulation No. 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008 concerning the People's Business Credit Guarantee facility and Minister of Finance Regulation No. 190/PMK.05/2014 dated October 1, 2014 which stipulates that IJP KUR is paid annually by the Government with a billing period in April and October.

Beban Klaim
Claim Expenses

Uraian Description	**2023 (Rp-juta)** (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	**Presentase %** Percentage
Kredit Usaha Rakyat People's Business Credit (KUR)	**4.731.429**	2.148.763	2.582.666	120,19
Konsumtif Consumptive	**245.505**	389.523	(144.018)	(36,97)
Produktif Productive	**336.954**	181.154	155.800	86,00
PEN National Economic Recovery	**304.915**	294.155	10.760	3,66
Suretyship	**338.220**	223.737	114.483	51,17
Jumlah Beban Klaim Total Claim Expenses	**5.957.023**	**3.237.332**	**2.719.691**	**84,01**

Beban klaim adalah beban yang timbul sebagai akibat macetnya kredit akibat risiko yang ditanggung Perusahaan. Jumlah klaim yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Jaminan terdiri dari utang pokok, utang bunga, dan denda yang tidak dapat dipenuhi oleh terjamin pada saat kredit jatuh tempo dan kredit tidak dapat diperpanjang lagi atau sebelum kredit jatuh tempo sesuai kesepakatan yang ada.

Claim expenses are expenses incurred as a result of credit default due to risks borne by the Company. The amount of claims that can be paid by the Company to the Collateral Recipient consists of principal debt, interest payable, and fines that cannot be guaranteed by the guarantee when the credit is due and the credit cannot be extended again or before the credit matures according to the existing agreement.

Jumlah beban klaim Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp5,96 triliun, naik Rp2,72 triliun atau 84,01% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,24 triliun. Peningkatan beban klaim tersebut terutama disebabkan pengajuan klaim yang mengalami kenaikan dikarenakan masa relaksasi kredit terdampak pandemi Covid-19 telah selesai.

The Company's total claim expenses in 2023 were recorded at IDR5.96 trillion, an increase of IDR2.72 trillion or 84.01% compared to the previous year of IDR3.24 trillion. The increase in claim expenses was mainly due to the increase in claim submissions because the credit relaxation period affected by the Covid-19 pandemic had ended.

Pendapatan Investasi – Bersih
Investment Income - Net

Uraian Description	**2023 (Rp-juta)** (IDR-million)	**2022 (Rp-juta)** (IDR-million)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	**Presentase %** Percentage
PENDAPATAN BUNGA: INTEREST INCOME:				
Bunga Deposito Time Deposits Interest	**373.267**	228.502	144.765	63,35
Bunga Obligasi Bond Interest	**710.447**	551.470	158.977	28,83

Pendapatan Investasi – Bersih
Investment Income - Net

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Pendapatan Reksadana Mutual Fund Income	**51.515**	18.616	32.899	176,72
Pendapatan Sukuk Sukuk Income	**49.355**	33.084	16.271	49,18
Dividen Dividend	**16.839**	8.293	8.546	103,05
Pendapatan Capital Gain Income on Capital Gain	**6.544**	37.522	(30.978)	(82,56)
Efek Beragunan Aset Asset Backed Securities	**298**	1.051	(753)	(71,65)
	1.208.265	878.538	329.727	37,53
Beban Amortasi Amortisation Expense	**(4.087)**	(13.541)	9.454	(69,82)
Beban Investasi Investment Expenses	**(10.663)**	(20.002)	9.339	(46,69)
Jumlah Pendapatan Investasi Total Investment Income	**1.193.515**	**844.995**	**348.520**	**41,25**

Sejalan dengan peningkatan jumlah investasi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2023, jumlah pendapatan investasi Jamkrindo tahun 2023 juga meningkat Rp348,52 miliar atau 41,25% menjadi Rp1,19 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp844,99 miliar.

In line with the increase in the number of investments made by the Company in 2023, Jamkrindo's total investment income in 2023 also increased by IDR348.52 billion or 41.25% to IDR1.19 trillion compared to the previous year of IDR844.99 billion.

Pendapatan investasi Jamkrindo tahun 2023 utamanya berasal dari pendapatan bunga obligasi yang mencapai Rp710,45 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan bunga obligasi meningkat 28,83%

Jamkrindo's investment income in 2023 was mainly from bond interest income which reached IDR710.45 billion. Compared to the previous year, bond interest income increased 28.83%

Beban Usaha
Operating Expenses

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Beban pegawai Employee Expenses	**647.384**	527.711	119.673	22,68
Administrasi dan umum Administrative and General	**262.881**	224.666	38.215	17,01
Pemasaran Marketing	**131.470**	124.907	6.563	5,25
Outsourcing	**84.018**	75.512	8.506	11,26
Depresiasi Depreciation	**69.272**	59.214	10.058	16,99
Beban cadangan kerugian penurunan nilai Provision for impairment losses	**898.640**	51.849	846.791	1633,19
Teknologi, sistem dan pengembangan usaha Technology, system and development	**64.553**	50.313	14.240	28,30

Beban Usaha
Operating Expenses

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Perjalanan dinas Business travel	**39.703**	33.927	5.776	17,02
Sewa Lease	**18.830**	15.257	3.573	23,42
Kendaraan Vehicles	**21.654**	19.194	2.460	12,82
Sosialisasi dan rekonsiliasi Social and reconciliation	**14.792**	21.963	(7.171)	(32,65)
Lainnya Others	**2.141**	1.740	401	23,05
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	**2.255.338**	**1.206.253**	**1.049.085**	**86,97**

Jumlah beban usaha Jamkrindo tahun 2023 tercatat sebesar Rp2,25 triliun, meningkat 86,97% atau setara dengan Rp1,05 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,21 triliun. Kenaikan beban usaha tersebut disebabkan adanya peningkatan beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Jamkrindo's total operating expenses in 2023 were recorded at IDR2.25 trillion, an increase of 86.97% or the equivalent of IDR1.05 trillion compared to the previous year of IDR1.21 trillion. The increase in operating expenses was due to an increase in the provision for impairment losses (CKPN).

Pendapatan (Beban) Lain - Bersih
Other Income (Expenses) - Net

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Pendapatan (beban) non-operasional Non-operating income (expenses).	1.108	50.146	(49.038)	(97,79)
Pendapatan Jasa Giro Interest Income	6.838	7.087	(249)	(3,51)
Pendapatan Jasa Administrasi Penjaminan Guarantee Administration Service Income	7.153	4.438	2.715	61,18
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Total Other Income (Expenses)	15.099	61.671	(46.572)	(75,52)

Tahun 2023, Jamkrindo membukukan pendapatan lain-lain sebesar Rp15,10 miliar, menurun 75,52% atau setara dengan Rp46,57 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp61,67 miliar. Hal ini terutama disebabkan pada tahun 2022 terdapat pembatalan penjaminan dan adanya penyesuaian beban akrual.

In 2023, Jamkrindo recorded other income of IDR15.10 billion, a decrease of 75.52% or the equivalent of IDR46.57 billion compared to the previous year of IDR61.67 billion. This was mainly due to the cancellation of guarantees and adjustments in accrual expenses in 2022.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak yang dibukukan Jamkrindo tahun 2023 mencapai Rp1,64 triliun, meningkat 3,69% atau setara dengan Rp58,36 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,68 triliun.Peningkatan tersebut dikarenakan oleh peningkatan bisnis sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan laba.

Profit before Tax

The profit before tax recorded by Jamkrindo in 2023 reached IDR1.64 trillion, an increase of 3.69% or the equivalent of IDR58.36 billion compared to the previous year of IDR1.68 trillion. This increase was due to an increase in business which had an effect on increasing revenue and profits.

Beban Pajak Final

Jumlah beban pajak final Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp153,02 miliar, naik Rp57,37 miliar atau 58,98% dari tahun sebelumnya sebesar Rp96,65 miliar. Peningkatan beban pajak final tersebut disebabkan peningkatan laba sebelum pajak.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Tahun 2023, Perusahaan membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,44 triliun, meningkat 12,24% atau setara dengan Rp156,69 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,28 triliun. Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1,44 triliun, meningkat 12,24% atau setara dengan Rp156,69 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,28 triliun, sedangkan laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah sebesar Rp164 juta, menurun 150,93% atau setara dengan Rp486 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp322 juta.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak

Tahun 2023, Perusahaan membukukan beban komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak sebesar Rp57,52 miliar, mengalami peningkatan 137,67% atau setara dengan Rp210,19 miliar dibandingkan tahun sebelumnya dimana Perusahaan membukukan beban komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak sebesar Rp152,67 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya kondisi pasar yang baik yang menyebabkan nilai investasi naik dan berpengaruh pada pendapatan komprehensif.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan Perusahaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp1,49 triliun, meningkat 32,54% atau setara dengan Rp366,88 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,13 triliun.

Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1,49 triliun, meningkat 32,59% atau setara dengan Rp367,35 miliar dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp1,13 triliun.

Sedangkan laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah sebesar Rp 154 juta, menurun 150% atau setara dengan Rp462 juta dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp308 juta.

Final Tax Expense

The Company's final tax expense in 2023 was recorded at IDR153.02 billion, an increase of IDR57.37 billion or 58.98% from the previous year of IDR96.65 billion. The increase in final tax expense was due to an increase in profit before tax.

Net Profit for the Year

In 2023, the Company posted a net profit for the year of IDR1.44 trillion, an increase of 12.24% or equivalent to IDR156.69 billion compared to the previous year of IDR1.28 trillion. Net profit for the year attributable to owners of the parent entity in 2023 was IDR1.44 trillion, an increase of 12.24% or equivalent to IDR156.69 billion compared to 2022 of IDR1.28 trillion, while net profit for the year attributable to non-controlling interest amounted to IDR164 million, a decrease of 150.93% or equivalent to IDR486 million compared to 2022 of IDR322 million.

Other Comprehensive Income (Expenses) for the Year, After Tax

In 2023, the Company recorded other comprehensive expenses for the current year, after tax, amounting to IDR57.52 billion, an increase of 137.67% or equivalent to IDR210.19 billion compared to the previous year where the Company recorded other comprehensive expenses for the year, after tax, amounting to IDR152.67 billion. This increase was mainly due to good market conditions which caused investment values to rise and had an impact on comprehensive income.

Comprehensive Profit for the Year

The Company's comprehensive profit for the year in 2023 was recorded at IDR1.49 trillion, an increase of 32.54% or equivalent to IDR366.88 billion compared to the previous year of IDR1.13 trillion.

Comprehensive Profit attributable to owners of the parent entity in 2023 is IDR1.49 trillion, an increase of 32.59% or the equivalent of IDR367.35 billion compared to 2022, which was IDR1.13 trillion.

Meanwhile, comprehensive profit attributable to non-controlling interests was IDR154 million, a decrease of 150% or the equivalent of IDR462 million compared to 2022, which was IDR308 million.

LAPORAN ARUS KAS
CASH FLOW STATEMENT

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	**4.237.557**	2.185.486	2.052.071	93,90
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	**(3.625.035)**	(2.224.011)	(1.401.024)	63,00
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	**(1.005.570)**	(1.141.466)	135.896	(11,91)
Kenaikan/(Penurunan) Saldo Kas dan Setara Kas Increase/(Decrease) of Balance of Cash and Cash Equivalents	**(393.048)**	(1.179.991)	786.943	(66,69)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	**6.445.968**	7.625.959	(1.179.991)	(15,47)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	**6.052.920**	6.445.968	(393.048	(6,10)

Jumlah kas dan setara kas Jamkrindo pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp6,05 triliun, menurun Rp393,05 miliar atau 6,10% dibandingkan jumlah kas dan setara kas pada awal tahun 2023. Penurunan jumlah kas dan setara kas tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya aktivitas investasi.

Jamkrindo's total cash and cash equivalents at the end of 2023 was recorded at IDR6.05 trillion, a decrease of IDR393.05 billion or 6.10% compared to the amount of cash and cash equivalents at the beginning of 2023. The decrease in cash and cash equivalents was mainly due to the increase in investing activities.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Cash Flow from Operating Activities

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Guarantee Fee Income	**11.111.588**	6.661.110	4.450.478	66,81
Penerimaan Klaim dari Mitra *Co-Guarantee* Acceptance of Claims from Co-Guarantee Partners	**515.596**	474.047	41.549	8,76
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya Income from other Operating Activities	**1.109.244**	924.165	185.079	20,03
Pembayaran IJP *Co-Guarantee* Payment of Co-Guarantee's Guarantee Fee	**(628.122)**	(938.258)	310.136	(33,05)
Pembayaran Klaim Payment of Claims	**(5.933.725)**	(2.992.011)	(2.941.714)	98,32
Pembayaran Biaya Payment of Expenses	**(684.996)**	(609.940)	(75.056)	12,31

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Cash Flow from Operating Activities

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Pembayaran kepada karyawan Payment to Employee	**(585.647)**	(669.036)	83.389	(12,46)
Pembayaran pajak penghasilan Payment of Income Tax	**(666.381)**	(664.591)	(1.790)	0,27
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Cash Flow from Operating Activities - Net	**4.237.557**	2.185.486	2.052.071	93,90

Arus kas bersih yang diperoleh Jamkrindo dari aktivitas operasi tahun 2023 mencapai Rp4,24 triliun, meningkat Rp2,05 triliun atau 93,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,18 triliun. Arus kas masuk diperoleh dari penerimaan imbal jasa penjaminan, penerimaan klaim dari mitra *co-guarantee* dan penerimaan dari aktivitas operasi lainnya dengan total sebesar Rp12,74 triliun. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk pembayaran IJP co-guarantee, pembayaran klaim, pembayaran biaya, pembayaran kepada karyawan dan pembayaran pajak penghasilan dengan total sebesar Rp8,50 triliun.

The net cash flow obtained by Jamkrindo from operating activities in 2023 reached IDR4.24 trillion, an increase of IDR2.05 trillion or 93.90% compared to the same period the previous year of IDR2.18 trillion. Cash inflow was obtained from Guarantee Fee Income, Acceptance of Claims from Co-Guarantee Partners and Income from other Operating Activities with a total of IDR12.74 trillion. Meanwhile, cash outflow was used for Payment of Co-Guarantee's Guarantee Fee, payment of claims, payment of expenses, payments to employees and payment of income tax totaling IDR8.50 trillion.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Cash Flow from Investment Activities

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Penerimaan Hasil Investasi Receipt from Return of Investment	**1.135.360**	621.152	514.208	82,78
Penempatan Investasi Placement of Investment	**(5.667.989)**	(3.611.396)	(2.056.593)	56,95
Penjualan Investasi Sales of Investment	**1.007.694**	1.003.627	4.067	0,41
Pembelian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Purchase of Fixed Assets and Intangible Assets	**(100.100)**	(237.394)	137.294	(57,83)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Cash Flow used for Investment Activities - Net	**(3.625.035)**	(2.224.011)	(1.401.024)	63,00

Arus kas bersih yang digunakan Jamkrindo untuk aktivitas investasi tahun 2023 tercatat sebesar Rp3,62 triliun , naik Rp1,40 triliun atau 63% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,22 triliun . Arus kas masuk diperoleh dari hasil investasi sebesar Rp2,14 triliun , sedangkan arus kas keluar digunakan untuk penempatan investasi dan pembelian aset tetap dan Aset Tak Berwujud dengan total sebesar Rp5,77 triliun.

The net cash flow used by Jamkrindo for investment activities in 2023 was recorded at IDR3.62 trillion, an increase of IDR1.40 trillion or 63% compared to the previous year of IDR2.22 trillion. Cash inflow was obtained from Receipt from Return of Investment amounting to IDR2.14 trillion, while cash outflow was used for Placement of Investment and Purchase of Fixed Assets and Intangible Assets with a total of IDR5.77 trillion.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Cash Flow from Financing Activities

Uraian Description	2023 (Rp-juta) (IDR-million)	2022 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
			Selisih (Rp-juta) Difference (IDR-million)	Presentase % Percentage
Pembayaran Sewa Lease payments	**(45.693)**	-	(45.693)	(100,00)
Dividen Dividend	**(959.877)**	(1.141.466)	181.589	(15,91)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/(digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flow from (used for) Financing Activities - Net	**(1.005.570)**	(1.141.466)	135.896	(11,91)

Arus kas bersih yang digunakan Jamkrindo untuk aktivitas pendanaan tahun 2023 adalah sebesar Rp1,00 triliun , turun Rp135,90 miliar atau 11.91% dari tahun sebelumnya dimana Jamkrindo memperoleh kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1,14 triliun. Arus kas keluar digunakan untuk pembayaran dividen dan Pembayaran Sewa sebesar Rp1,00 triliun.

The net cash flow used by Jamkrindo for financing activities in 2023 is IDR1.00 trillion, a decrease of IDR135.90 billion or 11.91% from the previous year which Jamkrindo obtained cash from financing activities of IDR1.14 trillion. The cash outflow was used for dividend payments and lease payments amounting to IDR1.00 trillion.

Kemampuan Efisiensi Dan Profitabilitas
Efficiency and Probability

Uraian Description	2023	2022	Perubahan Changes 2022-2023
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	**22,61**	22,69	(0,08)
Marjin Keuntungan (%) Profit Margin (%)	**21,32**	24,26	(2,94)
Rasio Laba terhadap Aset (ROA) (%) Return on Asset Ratio (%)	**5,83**	6,28	(0,45)
Rasio Laba terhadap Ekuitas (ROE) (%) Return on Equity Ratio (%)	**10,98**	9,98	(1,00)
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) (%) Debt to Equity Ratio (%)	**141,36**	118,49	22,87
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%) Operating Expenses to Operating Income (BOPO) (%	**20,37**	18,75	1,62

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang tercermin dari beberapa rasio kinerja keuangan, antara lain rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Lembaga Usaha Penjamin Pasal 43 ayat (2), rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling rendah 120%.

ABILITY TO PAY DEBT

The Company's ability to fulfill its obligations, both short term and long term is reflected in several financial performance ratios, including the liquidity ratio and solvency ratio.

Ability to Pay Short Term Debt

In accordance with OJK Regulation No. 2/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Implementation of Guarantor Business Institutions Article 43 paragraph (2), the guarantor's liquidity ratio is set at a minimum of 120%.

Uraian Description	2023	2022	Perubahan Changes 2022-2023
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	**218,65**	154,93	63,72

Rasio lancar menggambarkan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Selain menggunakan rasio lancar, Perusahaan menggunakan rasio cash flow to debt untuk mengukur tingkat risiko likuiditasnya yaitu dengan membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas dikurangi dengan pendapatan ditangguhkan.

The current ratio describes the Company's ability to pay short term obligations or debts that are due soon when billed as a whole. In addition to using the current ratio, the Company uses the cash flow to debt ratio to measure the level of liquidity risk by comparing the amount of cash and cash equivalents with total liabilities minus deferred income.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Dalam mengukur tingkat solvabilitas Perusahaan digunakan rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio) yang menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa penjaminan, rasio tersebut dapat dilihat dari tingkat kesehatan Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER(10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Asuransi dan Jasa Penjaminan.

Ability to Pay Long Term Debt

In measuring the level of solvency of the Company, the debt to-equity ratio is used which shows the Company's ability to pay all of its obligations both short term and long term. As an SOE engaged in the field of guarantee services, this ratio can be seen from the level of soundness of the Company as stipulated in the Minister of BUMN Regulation No. PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014 concerning Indicators for Soundness Rating of State-Owned Financial Services Enterprises in the Insurance and Guarantee Services Business Sector.

Uraian Description	2023	2022	Perubahan Changes 2022-2023
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) (%) Debt to Equity Ratio (%)	**141,36**	118,49	22,87

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
RECEIVABLE COLLECTIBILITY LEVEL

Dalam industri penjaminan istilah kolektibilitas piutang diartikan sebagai aging piutang yaitu umur piutang yang belum dilakukan pembayaran. Berikut data umur dan saldo piutang Kredit Program Pemerintah (KUR dan PEN) per Desember 2023 beserta pembayaran piutang selama tahun 2023:

In the guarantee industry, the term receivables collectibility is defined as aging receivables, namely the age of receivables that have not been paid. The following is data on the age and balance of Government Program Credit receivables (KUR and PEN) as of December 2023 along with payment of receivables in 2023:

Umur Piutang Receivable Age	***Outstanding* Piutang (Rp-juta)** Outstanding Receivables (IDR-million)			**Pembayaran Piutang (Rp-juta)** Payment of Receivables (IDR-million)		
	KUR Gen 1	**KUR Gen 2**	**PEN**	**KUR Gen 1**	**KUR Gen 2**	**PEN**
>60	134.534	81.580				
>48	79.480	96.697				
>36	96.325	346.481				
>24	103.751	395.923		26.618	4.633.189	588.762
0-24	1.237.109	2.170.039				
Total	1.651.198	3.090.720				

Adapun data umur dan saldo piutang Mitra Mitigasi Risiko per Desember 2023 beserta pembayaran piutang selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The data on the age and balance of the Risk Mitigation Partner's receivables as of December 2023, along with payment of receivables during 2023, are as follows:

Umur Piutang
Receivable Age

Kriteria Umur Piutang Receivable Age Criteria	**PT Asuransi Jiwasraya**	**PT Heksa Solution Insurance**	**PT BRI Asuransi Indonesia**	**PT Reasuransi Indonesia Utama**	**PT Reasuransi Nasional Indonesia**	**PT Reasuransi Syariah Indonesia**
>60	582	15.764		62.286		
>48	1583	274	6.294	50.165		
>36	1756	127		39.379		
>24	552	81		27.789		
0-12	440	210	61	29.700	453.973	88.063

Pembayaran Piutang Selama Tahun 2023
Payment of Receivables in 2023

No	Mitra Mitigasi Risiko Risk Mitigation Partner	Penggantian Pembayaran Klaim (Rp-juta) Claim Payment Reimbursement (IDR-million)
1	PT Heksa Solution Insurance	4.089
2	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	3.000
3	PT Reasuransi Nasional Indonesia	323.001
4	PT Reasuransi Indonesia Utama	23.665
5	PT Reasuransi Syariah Indonesia	36.499

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Rincian Struktur Modal

Struktur modal Perusahaan per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

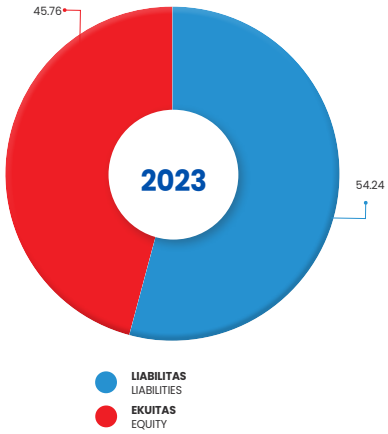
Capital Structure Details

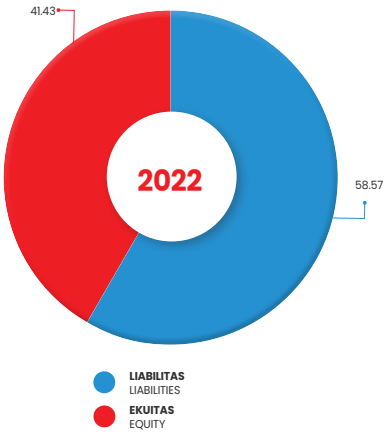
The Company's capital structure as of December 31, 2023 can be explained in the following table:

Uraian Description	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase(Decrease)	
	Rp-juta IDR(Million)	%	Rp-juta IDR(Million)	%	Rp-juta IDR(Million)	%
Liabilitas Liabilities	**18.877.196**	**58,57**	15.190.034	54,24	3.687.162	24,27
Ekuitas Equity	**13.354.022**	**41,43**	12.819.533	45,76	534.489	4,17
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds and Equity	**32.231.220**	**100,00**	28.009.567	100,0	4.221.653	15,07
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas(DER) Debt to Equity Ratio (DER)		**141,36%**		118,49		19,30%

Komposisi struktur modal Perusahaan tahun 2023 adalah 58,57% berasal dari liabilitas dan 41,43% berupa ekuitas. Komposisi ini relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

The composition of the Company's capital structure in 2023 is 58.57% from liabilities and 41.43% from equity. This composition relatively did not experience significant changes compared to the previous year.





Kebijakan Manajemen Atas Struktur Permodalan

Perusahaan memiliki kebijakan untuk menitikberatkan penggunaan ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan dalam mengelola sumber pembiayaan. Penggunaan ekuitas harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna menjaga kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya. Oleh sebab itu, Perusahaan juga membentuk cadangan-cadangan yang bersumber dari laba ditahan.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Kebutuhan permodalan Perusahaan senantiasa direncanakan, dibahas dan dipantau secara rutin pada rapat Komite Permodalan dengan didukung oleh analisis data yang lengkap dan memadai. Dasar penetapan kebijakan atas struktur modal Perusahaan senantiasa berlandaskan pada beberapa pertimbangan, di antaranya estimasi ekonomi, potensi pertumbuhan bisnis, *risk appetite*, dan target rasio permodalan.

Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat tetap memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan mematuhi peraturan pajak yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015, dimana rasio maksimum untuk *Debt to Equity* (DER) yang diperbolehkan untuk tujuan pajak adalah 4:1. Pada tahun 2023, DER yang dimiliki oleh Perusahaan adalah 141,36% Dengan kondisi tersebut, rasio hutang terhadap modal Perusahaan masih berada pada kategori yang baik.

Management Policy on Capital Structure

The Company has a policy to emphasize the use of equity owned by the Company in managing sources of financing. The use of equity must be carried out effectively and efficiently in order to maintain the Company's ability to carry out its business operations. Therefore, the Company also forms reserves sourced from retained earnings.

Basis for Selection of Management Policy on Capital Structure

The Company's capital requirements are always planned, discussed and monitored regularly at the Capital Committee meetings supported by complete and adequate data analysis. The basis for determining the policy on the Company's capital structure is always based on several considerations, including economic estimates, business growth potential, risk appetite, and target capital ratios.

Management's policy on capital structure is based on protecting the Company's ability to maintain business continuity so that it can continue to provide returns for Shareholders and benefits for other stakeholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The Company complies with applicable tax regulations, namely Minister of Finance Regulation No. 169/PMK.010/2015, in which the maximum ratio for Debt to Equity (DER) allowed for tax purposes is 4:1. In 2023, the DER owned by the Company is 141.36% Under these conditions, the Company's debt-to-equity ratio is still in a good category.

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2023, Jamkrindo tidak melakukan ikatan dengan pihak manapun terkait investasi barang modal.

Commitment for Capital Good Investment

Throughout 2023, Jamkrindo did not make any commitment with any parties related to investment in capital goods

Investasi Barang Modal Yang Direalisasikan Pada Tahun Buku
Realized Capital Goods Investment in The Fiscal Year

Jenis Investasi Types of Investment	**Tujuan Investasi** Investment Purposes	**Nilai Investasi (Rp juta)** Investment Value (IDRmillion)
Tanah Land	Relokasi unit kerja ke tempat yang lebih strategis dan lebih representative Relocation of work units to a more strategic and more representative location	35.072
Bangunan Kantor Office Building	Optimalisasi aset yang telah dimiliki melalui Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Optimization of assets that are already owned through the Construction and Renovation of Office Buildings	18.677
Inventaris Kantor Office Equipment	Menggantikan aset yang sudah tidak layak pakai/habis masa umur ekonomisnya dan beberapa aset yang belum ada/dimiliki oleh kantor Replacing assets that are no longer suitable for use/expired their economic life and some assets that do not yet exist/are owned by the office	32.339
Inventaris Rumah Dinas Houses Equipment	Menggantikan aset yang sudah tidak layak pakai/habis masa umur ekonomisnya dan beberapa aset yang belum ada/dimiliki oleh rumah dinas Replacing assets that are no longer suitable for use/expired their economic life and some assets that do not yet exist/are owned by the official residence	845
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	Menggantikan aset yang sudah tidak layak pakai/habis masa umur ekonomisnya dan beberapa aset yang belum ada/dimiliki oleh kantor Replacing assets that are no longer suitable for use/expired their economic life and some assets that do not yet exist/are owned by the official residence	121
Jumlah Investasi Total Investment		**87.054**

Tahun 2023, Jamkrindo merealisasikan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap sebesar Rp87,05 miliar. Investasi tersebut utamanya ditujukan untuk mendukung operasional Perusahaan.

In 2023, Jamkrindo will realize investment in capital goods in the form of fixed assets amounting to IDR87.05 billion. This investment is primarily intended to support the Company's operations.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Material Information and Facts that Occur After the Date of the Accountant's Report

There is no material information and facts that occurred after the date of the accountant's report.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2023
TARGET ACHIEVEMENT IN 2023

Asumsi-Asumsi Yang Digunakan Serta Proses Perumusan Target Tahun 2023

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKAP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Ekonomi Makro
   a. Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy) 5,1 - 5,4 5,3
   b. Inflasi, (%, yoy) 4,0 - 4,8 3,6
   c. Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) 14.500 - 14.900 14.800
   d. Suku Bunga (%) 6,85 - 8,42 7,9
   e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel) 95 - 105 90
   f. Lifting Minyak (ribu barel per hari) 625 - 630 660
   g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari 956 - 964 1.100
2. Asumsi Mikro
   a. Volume penjaminan sebesar Rp340 Triliun.
   b. Pendapatan IJP accrual tumbuh sebesar 16% atau sebesar Rp6.716 Miliar.
   c. Loss Ratio sebesar 58%.
   d. Recovery Rate subrogasi sebesar 30% dari pendapatan subrogasi sebesar Rp999 Miliar
   e. Pendapatan Investasi bersih sebesar Rp953 Miliar atau dengan tingkat YOI sebesar 5,13%.
   f. Opex Ratio sebesar 20,10%.
   g. Tingkat kesehatan dengan kategori "Sehat"

Pencapaian Target Tahun 2023

Pada Tahun Buku 2023 PT Jaminan Kredit Indonesia membukukan *volume* penjaminan sebesar Rp377,63 triliun atau mencapai sebesar 110,98% dari target 2023, realisasi *volume* ini didukung oleh volume penjaminan KUR sebesar Rp136,22 triliun atau mencapai sebesar 60,54% dari target dan *volume* penjaminan Non KUR sebesar Rp241,41 triliun atau mencapai 209,44% dari target 2023.

Laba Tahun Buku 2023 tercatat sebesar Rp1,44 triliun atau mencapai sebesar 108,20% dari target 2023 hal ini dikarenakan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dihasilkan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah beban usaha yaitu sebesar Rp6,35 triliun atau mencapai 126,60% sedangkan beban klaim sebesar Rp3,58 triliun atau sebesar 131,91% sehingga penjaminan bersih

The Assumptions Used and the 2023 Target Formulation Process

The assumptions used in the preparation of the 2023 RKAP is as follows:

1. Macroeconomic Assumptions
   a. Economic Growth (%, yoy) 5.1 - 5.4 5.3
   b. Inflation, (%, yoy) 4.0 - 4.8 3.6
   c. Rupiah Exchange Rate (IDR/USD) 14,500 - 14,900 14,800
   d. Interest Rate (%) 6.85 - 8.42 7.9
   e. Indonesian Crude Oil Price (USD/barrel) 95 - 105 90
   f. Oil Lifting (thousand barrels per day) 625 - 630 660
   g. Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day 956 - 964 1,100
2. Micro Assumptions
   a. Guarantee volume amounted to IDR340 trillion.
   b. IJP accrual revenue grew by 16% or IDR6,716 billion.
   c. Loss Ratio of 58%.
   d. Subrogation Recovery Rate of 30% of subrogation income of IDR999 billion.
   e. Net Investment Income of IDR953 billion or with YOI rate of 5.13%.
   f. Opex Ratio of 20.10%.
   g. Soundness level receiving "Healthy" category

Achievement of Target in 2023

In the 2023 Fiscal Year, PT Jaminan Kredit Indonesia recorded a guarantee volume of IDR377.63 trillion or reached 110.98% of the 2023 target. The realization of this volume was supported by a KUR guarantee volume of IDR136.22 trillion or reached 60,54% of the target and Non-KUR guarantee volume amounting to IDR241.41 trillion or reaching 209.44% of the 2023 target.

Profit for the fiscal year 2023 was recorded at IDR1.44 trillion or reached 108.20% of the 2023 target, this was due to the Guarantee Fee (IJP) income generated which was higher than the total operating expenses of IDR6.35 trillion or reached 126.60% while the claim expense amounted to IDR3.58 trillion or 131.91% , thus the net guarantee amounted to IDR2.78 trillion. With investment income reaching 132.16%

sebesar Rp2,78 triliun. Dengan pendapatan investasi yang mencapai 132,16% dan beban usaha yang diatas target 2023 atau sebesar 137,41%, Perusahaan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp1,64 triliun atau mencapai sebesar 133,49% dengan beban pajak sebesar Rp202,11 miliar sehingga laba setelah pajak menjadi sebesar Rp1,44 triliun atau mencapai sebesar 104,93%.

and operating expenses above the 2023 target or 137.41%, the Company recorded a profit before tax of IDR1.64 trillion or reached 133.49% with a tax expense of IDR202.11 billion so that profit after tax amounted to IDR1.44 trillion or reached 104.93%.

Uraian Description	**Realisasi 2023** 2023 Realization	**Target 2023** 2023 Target	**Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2023** Achievement of Realization Against the 2023 Target (%)
PEMASARAN **MARKETING**			
Volume Kredit yang Dijamin Guaranteed Credit Volume			
KUR (Rp-juta/IDR-million)	**136.222.579**	**225.000.000**	60,54
PEN (Rp-juta/IDR-million)	**0**	**0**	0,00
Non KUR (Rp-juta/IDR-million)	**241.407.625**	**115.261.096**	209,44
Jumlah TotaL (Rp-juta/IDR-million)	**377.630.204**	**340.261.096**	**110,98**
LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Imbal Jasa Penjaminan Bersih (Rp-juta) Net Guarantee Fee – Net (IDR-million)	**6.354.728**	**5.019.585**	126,60
Beban Klaim (Rp-juta) Claim Expenses (IDR-million)	**(3.577.332)**	**(2.711.906)**	131,91
Penjamin Bersih (Rp-juta) Net Guarantee (IDR-million)	**2.777.396**	**2.307.679**	120,35
Pendapatan Investasi (Rp-juta) Investment Income (IDR-million)	**1.193.515**	**903.072**	132,16
Beban Usaha (Rp-juta) Operating Expenses (IDR-million)	**(2.25.338)**	**(1.641.297)**	137,41
Pendapatan (Beban) lain-lain (Rp-juta) Other Comprehensive Income (Expenses) (IDR-million)	**15.099**	**9.198**	164,16
Laba Sebelum Pajak (Rp-juta) Profit Before Tax (IDR-million)	**1.638.962**	**1.818.785**	90,11
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (Rp-juta) Income Tax Benefit (Expense) (IDR-million)	**(202.113)**	**(490.845)**	41,18
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta) Profit for the Year (IDR-million)	**1.436.849**	**1.327.940**	108,20
POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION			
Aset (Rp-juta) Assets (IDR-million)	**32,231,220**	**30.058.328**	107,23
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (IDR-million)	**18.877.198**	**16.516.493**	114,29
Ekuitas (Rp-juta) Equity (IDR-million)	**13.354.022**	**13.541.835**	98,61

Uraian Description	Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2023 2023 Target	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2023 Achievement of Realization Against the 2023 Target (%)
STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE			
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (DER)	**141,36**	**126,98**	111,32
RASIO-RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS			
Return on Equity (ROE) (%)	**10,98**	**10,39**	105,68
Return on Assets (ROA) (%)	**5,83**	**6,31**	92,39
Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) (%) Operating Costs Against Operating Income (BOPO) (%)	**20,37**	**20,42**	99,76
Rasio Solvabilitas (%) Solvency Ratio (%)	**170,75**	**178,75**	95,52
Rasio Likuiditas/Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	**218,65**	**233,53**	93,63

Secara umum, kinerja Jamkrindo di tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKAP kendati masih terdapat beberapa indikator kinerja yang masih berada di bawah target sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

Di bidang pemasaran, seluruh target berhasil dilampaui dengan baik. Volume kredit yang dijaminkan, baik KUR, PEN maupun Non KUR berada di atas target yang ditetapkan di RKAP 2023. Demikian juga halnya dengan pencapaian target laba (rugi) Perusahaan. Kendati penjaminan bersih yang dibukukan Perusahaan sedikit berada di bawah target RKAP, namun pencapaian Laba Tahun Berjalan Perusahaan tahun 2023 mencapai 104,93% dari target RKAP 2023. Hal tersebut salah satunya seiring dengan keberhasilan Perusahaan dalam melakukan efisiensi yang tercermin dari realisasi Beban Usaha yang berada di bawah target RKAP 2023.

In general, Jamkrindo's performance in 2023 has been in accordance with the targets set in the Work Plan and Budget (RKAP) although there are still some performance indicators that are still below the target as shown in the table above.

In the marketing sector, all targets were well exceeded. The volume of credit guaranteed, for KUR, PEN and Non-KUR was above the target set in the 2023 Work Plan and Budget (RKAP). Likewise with the achievement of the Company's profit (loss) target. Although the net guarantee recorded by the Company was slightly below the RKAP target, the achievement of the Company's Profit for the Year 2023 reached 104.93% of the 2023 RKAP target. This is partly in line with the Company's success in carrying out efficiency as reflected in the realization of Operating Expenses which are below the 2023 RKAP target.

PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024

BUSINESS PROSPECTS AND COMPANY PERFORMANCE PROJECTIONS IN 2024

Prospek Usaha Tahun 2024

Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2024 Kementerian Keuangan, perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3 – 5,7 persen di tahun 2024. Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2024. Kontribusi dari sektor industri pengelolaan atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, baik dalam rangka konektivitas, maupun penyelesaian PSN termasuk pembangunan IKN Nusantara.

Laju inflasi di tahun 2024 diperkirakan bergerak dengan tren positif, berada dalam sasaran inflasi. Pencapaian inflasi 2024 pada sasaran 2,5 ± 1,0 persen didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai salah satu kunci pengendalian inflasi nasional, inflasi pangan juga terus dijaga dengan berbagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca. Selain itu, risiko administered price dikelola dengan baik guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum di tengah tantangan agenda reformasi energi yang terus berjalan serta dinamika harga minyak mentah dunia.

Pada tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan terus berlangsung dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan juga peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu,

Business Prospects in 2024

Based on the Ministry of Finance's Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Principles for 2024 document, the national economy is expected to grow by 5.3 - 5.7 percent in 2024. Economic stability in 2023 and the acceleration of national economic transformation will play an important role in supporting the pace of the economy in 2024. Economic growth in each sector is expected to continue to improve in 2024. The contribution of the management industry or manufacturing sector as the largest contributor to GDP is expected to be stronger in supporting economic growth. The trade sector is expected to grow quite strongly as public consumption increases. The agricultural sector is expected to continue to recover along with the greater support expected both agricultural products that will be consumed by the public, as well as those that will become raw materials for the processing industry. The performance of the mining sector is expected to continue to experience a significant increase to support the downstreaming of natural resources. The construction sector is expected to continue to grow positively and strongly, especially with the support of the completion of Government infrastructure projects, both in the context of connectivity, as well as the completion of PSN including the development of Nusantara Capital City.

The inflation rate in 2024 is expected to move with a positive trend, within the inflation target. The achievement of 2024 inflation at the target of 2.5 ± 1.0 percent is supported by people's purchasing power which continues to strengthen along with the growth of public consumption. As one of the keys to controlling national inflation, food inflation also continues to be maintained with various efforts to maintain the availability of supplies and smooth distribution amid the challenges of weather disturbances. In addition, administered price risks are well managed to maintain the sustainability of economic activity in general amid the challenges of the ongoing energy reform agenda and the dynamics of world crude oil prices.

In 2024, the improvement in domestic economic conditions will continue to take place and again support the stability of the exchange rate that is maintained. Better financial and capital market performance and conditions are able to continue to support foreign confidence and capital inflows to Indonesia. At the same time, the improvement and development of real and industrial sector performance continues to open opportunities for direct investment inflows and also opportunities for Indonesia's export performance.

inflasi yang lebih rendah dan terjaga memberikan peluang pelonggaran moneter dan turut mendukung kinerja sektor riil.

Meanwhile, lower and manageable inflation provides an opportunity for monetary easing and also supports real sector performance.

Uraian Description	2022	2023	2024
GDP (%)	5,3	**5,0 - 5,3**	5,3 - 5,7
Inflasi (%) Inflation (%)	5,51	**2,0 - 4,0**	1,5 - 3,5

Sumber : Kemenkeu RI | Source : Indonesia's Ministry of Finance

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diprakirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Indonesia's economy remains resilient amid rising global uncertainty. Data from Statistics Indonesia (BPS) showed that economic growth in the first quarter of 2024 amounted to 5.11% (yoy), an increase compared to growth in the previous quarter of 5.04% (yoy). Going forward, economic growth in 2024 is predicted to remain strong in the range of 4.7-5.5% (yoy) supported by domestic demand, especially from continued growth in consumption and building investment in line with the continued development of the National Strategic Project (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (yoy) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (yoy) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.

The accelerated economic growth in the first quarter of 2024 was supported by higher domestic demand. Household consumption increased by 4.91% (yoy) in line with the implementation of the 2024 Election, national holidays, and collective leave. Consumption of Nonprofit Institutions Serving Households (LNPRT) grew by 24.29% (yoy) driven by the activities of the 2024 Election and Ramadan. Government Consumption increased by 19.90% (yoy) driven by an increase in goods expenditure, mainly related to the implementation of the 2024 Election, as well as personnel expenditure. Investment increased by 3.79% (yoy) mainly supported by building investment as infrastructure development continued. Meanwhile, exports decelerated by 0.50% (yoy), especially exports of goods in line with the decline in commodity prices of main export products, amidst the demand of several major trading partner countries that continued to grow.

Proyeksi Kinerja Dan Rencana Kerja Perusahaan Tahun 2024

Company Performance Projections and Work Plans for 2024

Proyeksi Tahun 2024 terhadap Realisasi Tahun 2023
Projections for 2024 against Realization in 2023

Uraian Description	Realisasi 2023 Realization 2023	Proyeksi 2024 Projection 2024	Perbandingan Proyeksi 2024 Terhadap Realisasi 2023 Projections for 2024 against Realization in 2023
	1	2	%
PEMASARAN MARKETING			
Volume Kredit yang Dijamin (Rp-juta) Guaranteed Credit Volume (IDR-million)	**377.630.204**	340.261.096	109,85%

Proyeksi Tahun 2024 terhadap Realisasi Tahun 2023
Projections for 2024 against Realization in 2023

Uraian Description	Realisasi 2023 Realization 2023	Proyeksi 2024 Projection 2024	Perbandingan Proyeksi 2024 Terhadap Realisasi 2023 Projections for 2024 against Realization in 2023
	1	2	%
LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Imbal Jasa Penjaminan Bersih (Rp-juta) Net Guarantee Fee – Net (IDR-million)	**6.354.728**	5.780.847	90,97
Beban Klaim (Rp-juta) Claim Expenses (IDR-million)	**3.577.332**	3.466.575	96,90
Penjaminan Bersih (Rp-juta) Net Guarantee (IDR-million)	**2.777.396**	2.314.272	83,33
Pendapatan Investasi (Rp-juta) Investment Income (IDR-million)	**1.193.515**	953.088	79,86
Beban Usaha (Rp-juta) Operating Expenses (IDR-million)	**(2.25.338)**	1.428.279	-63,33
Pendapatan (Beban) Lain-lain (Rp-juta) Other Comprehensive Income (Expenses) (IDR-million)	**15.099**	12.327	81,64
Laba Sebelum Pajak (Rp-juta) Profit Before Tax (IDR-million)	**1.638.962**	1.851.408	112,96
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (Rp-juta) Income Tax Benefit (Expense) (IDR-million)	**(202.113)**	482.052	-238,51
Laba Tahun Berjalan (Rp-juta) Profit for the Year (IDR-million)	**1.436.849**	1.369.356	95,30
POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION			
Aset (Rp-juta) Assets (IDR-million)	**32.231.220**	30,629,395	95,03
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (IDR-million)	**18.877.198**	17,134,944	90,77
Ekuitas (Rp-juta) Equity (IDR-million)	**13.354.022**	13,494,451	101,05
STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE			
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas, atau Debt to Equity Ratio (DER) (%) Debt to Equity Ratio (DER)	**141,36%**	126,98%	89,83
RASIO(RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIOS			
Return On Equity (ROE) (%)	**10,98%**	10,39%	94,63
Return On Asset (ROA) (%)	**5,83%**	6,31%	108,23
Net Profit Margin (NPM) (%)	**22,61%**	22,61%	100,00
Rasio Solvabilitas (%) Solvency Ratio (%)	**170,75%**	178,75%	104,69

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA
DIVIDEND POLICY AND ITS DISTRIBUTION

Kebijakan Dividen

Dasar untuk memperhatikan hak para pemegang saham tanpa mengabaikan kondisi keuangan kebijakan pembagian dividen Perusahaan berlandaskan Undang(Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pembagian dividen dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan.

Perusahaan berusaha Perusahaan. Keputusan pembagian dividen Perusahaan dikaitkan dengan, antara lain laba bersih yang didapat pada tahun fiskal dan kewajiban Perusahaan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku serta kondisi keuangan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ke depan dan rencana ekspansi dalam keputusan pembagian dividen.

Dividend Policy

The basis for the Company's dividend distribution policy is based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in which the distribution of dividends is carried out in accordance with the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders. The Company tries to pay attention to the rights of shareholders without ignoring the Company's financial condition.
The decision to distribute the Company's dividends is related to, among other things, the net profit earned in the fiscal year and the Company's obligation to allocate reserve funds in accordance with applicable regulations and the Company's financial condition. In addition, the Company also considers future growth rates and expansion plans in dividend distribution decisions.

Kronologis Pembagian Dividen

Berikut ini adalah ringkasan pembagian dan pembayaran Dividen tunai dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Dividend Distribution Chronology

The following is a summary of distribution and payment of cash dividends in the last 5 (five) years:

Tahun Pembagian Year of Distribution	**Tahun Dividen** Dividend Year	**Tanggal Pengumuman** Date of Announcement	**Tanggal Pembayaran** Date of Payment	**Dividen Kas yang Dibagikan (Rp)** Cash Dividend Distributed (IDR)	**Rasio Pembagian Dividen (%)** Dividend Payout Ratio (%)
2023	2022	27 Juni 2023 June 27, 2023	14 Agustus 2023 August 14, 2023	959.876	75%
2022	2021	22 Desember 2022 December 22, 2022	29 Desember 2022 December 29, 2022	799.366	75%
2021	2020	18 Mei 2022 May 18, 2022	23 Juni 2022 June 23, 2022	342.100	75%
2020	2019	15 Juli 2020 July 15, 2020	18 Agustus 2020 August 18, 2020	400.000	64%
2019	2018	29 Mei 2019 May 29, 2019	27 Juni 2019 June 27, 2019	39.754	10%
2018	2017	3 Mei 2018 May 3, 2018	30 Mei 2018 May 30, 2018	80.184	10%

PERPAJAKAN: KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
TAXATION: CONTRIBUTION TO THE STATE

Selain memberikan dividen, Jamkrindo juga memberikan kontribusi kepada Negara dalam bentuk pajak. Tahun 2023, Jamkrindo telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya dengan rincian dan perbandingannya terhadap tahun 2022 sebagai berikut:

In addition to distributing dividends, Jamkrindo also contributes to the State in the form of taxes. In 2023, Jamkrindo has fulfilled all of its tax obligations with details and comparisons to 2022 as follows:

Jenis Pajak Tax Types	2023	2022
PPh Pasal 29 Income Tax Article 29	**94.078**	419.426
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	**20.595**	13.661
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	**11.489**	4.898
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	**1.114**	510
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 Section 2	**248**	442
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	**46**	39
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	**-**	-
Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax	**1.838**	2.245
Jumlah Total	**129.408**	**441.221**

Informasi Tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen

Hingga akhir tahun 2023, Jamkrindo tidak melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan (ESOP/MSOP). Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait *stock option* yang dimiliki pekerja dan manajemen, baik jumlah saham dan harga *exercise*, jangka waktu, persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak.

Informasi Tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Tahun 2023, Jamkrindo tidak melakukan penawaran umum di bursa manapun.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

INFORMATION ABOUT EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM

Until the end of 2023, Jamkrindo did not implement a share ownership program by management and/or employees (ESOP/ MSOP). Therefore, this Annual Report does not provide information related to stock options held by workers and management, both in terms of number of shares and the exercise price, time period, requirements for workers and/or management who are eligible.

INFORMATION REGARDING THE USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS

In 2023, Jamkrindo did not make a public offering on any stock exchange.

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/ CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Tidak terdapat informasi dan fakta material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2023.

There was no material information and facts regarding the investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring carried out by the Company in 2023.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2023, Jamkrindo tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak yang berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Dalam melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi, Perusahaan melakukan kebijakan terkait dengan mekanisme *review* atas transaksi Perusahaan. Perusahaan melakukan kajian dan analisis atas setiap transaksi-transaksi yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten.

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Adapun pihak berelasi dan sifat hubungan relasi dengan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
   PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) adalah pemegang saham Perusahaan. PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah entitas yang dimiliki dan dikendalikan secara tidak langsung oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Perusahaan memiliki transaksi penjaminan ulang dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia.

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
   Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan. PT Bahana Pembinaan

Transactions Containing Conflicts of Interest

In 2023, Jamkrindo did not make material transactions that contain conflicts of interest.

Transactions with Affiliated Parties

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements. In conducting transactions with affiliated companies, the Company implements a policy related to the review mechanism for the Company's transactions. The Company conducts studies and analysis of every transaction that is carried out thoroughly and continuously by involving competent parties.

The Business Group enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

The related parties and the nature of the relationship with the Company are as follows:

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
   PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) is the Company's shareholder. PT Reasuransi Nasional Indonesia is an entity that is indirectly owned and controlled by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). The Company has a reinsurance transaction with PT Reasuransi Nasional Indonesia.

2. State Owned Enterprises
   The Government of the Republic of Indonesia The Government of the Republic of Indonesia is the majority shareholder of the Company and State-Owned

Usaha Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Syariah, PT Pegadaian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Reasuransi Syariah Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT BRI Asuransi Indonesia, Perum Perumahan Nasional (Persero), PT Bank Raya Indonesia Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Unit Syariah, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT PP (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Mandiri Tunas Finance, PT BNI Multifinance, PT AXA Mandiri Financial Service, Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera, PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Istaka Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bahana TCW Investment Management, PT Danareksa (Persero), PT PNM Investment Management, PT Danareksa Investment Management, PT PP Presisi Tbk, PT BNI Asset Management, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Perkebunan Nusantara, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Propernas Griya Utama, Koperasi Warga Semen Gresik, PT Propernas Griya Utama dan PT Barata Indonesia (Persero) adalah entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan memiliki rekening giro, deposito wajib dan berjangka, surat berharga, deposito yang dibatasi penggunaannya, piutang penjaminan, piutang penjaminan ulang, piutang hasil investasi, utang reasuransi, utang klaim, imbal jasa kafalah bruto, beban penjaminan ulang, premi penjaminan ulang bruto, beban klaim, klaim penjaminan ulang, beban komisi, pendapatan komisi, pendapatan ujrah penjaminan ulang, beban ujrah, pendapatan subrogasi, pendapatan investasi dan beban investasi di entitas(entitas tersebut. Perusahaan memiliki obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan juga memiliki transaksi investasi pada efek-efek, piutang penjaminan, piutang hasil investasi, utang reasuransi, imbal jasa kafalah bruto, premi penjaminan ulang bruto dan pendapatan investasi dengan Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan.

Enterprises and Subsidiaries. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Syariah, PT Pegadaian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Reasuransi Syariah Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT BRI Asuransi Indonesia, Perum Perumahan Nasional (Persero), PT Bank Raya Indonesia Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pegadaian - Sharia Unit, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT PP (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Mandiri Tunas Finance, PT BNI Multifinance, PT AXA Mandiri Financial Service, Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera, PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), Indonesian Export Financing Agency, PT Asuransi Tugu Pratama Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Istaka Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bahana TCW Investment Management, PT Danareksa (Persero), PT PNM Investment Management, PT Danareksa Investment Management, PT PP Presisi Tbk, PT BNI Asset Management, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Perkebunan Nusantara, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Propernas Griya Utama, Koperasi Warga Semen Gresik, PT Propernas Griya Utama and PT Barata Indonesia (Persero) are entities owned by and controlled by the Government of the Republic of Indonesia. The Company has current accounts, statutory and time deposits, marketable securities, restricted deposits, guarantee receivables, re-guarantee receivables, Investment income receivables, reinsurance payable, claims payable, gross kafalah fee, re-guarantee expense, gross re-guarantee premium, claim expenses, reinsurance claims, commission expenses, commission income, ujrah reinsurance income, ujrah expenses, subrogation income, investment income, and investment expenses in these entities. The Company has bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia. The Company also has investment transactions in marketable securities, guarantee receivables, investment receivables, reinsurance payables, gross kafalah fees, gross re-insurance premiums and investment income with State-Owned Enterprises and Subsidiaries.

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi pada Periode Tahun Buku 2022 dan 2023
Realization of Related Party Balances and Transactions in the 2022 and 2023 Fiscal Year Period

dalam juta Rupiah
In IDRmillion

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Dalam Aset Related Party Balances in Assets	2023		2022		Peningkatan/(Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Kas di bank Cash and cash in banks	**139.766**	**0,43**	160.835	0,57	(21.069)	(13,10)
Deposito wajib dan berjangka Statutory and time deposits	**6.499.226**	**20,16**	4.822.353	17,22	1.676.873	34,77
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu Time deposits for specific purposes	**1.504.373**	**4,67**	1.606.923	5,74	(102.550)	(6,38)
Efek-efek Marketable securities	**8.158.469**	**25,31**	6.180.615	22,07	1.977.854	32,00
Sukuk	**4.639.233**	**14,39**	561.010	2,00	4.078.223	726,94
Reksadana Mutual funds	**1.041.223**	**3,23**	561.010	2,00	480.213	85,60
Saham Shares	**134.061**	**0,42**	135.002	0,48	(941)	(0,70)
Efek Beragun Aset Asset backed securities	**3.063**	**0,01**	6.122	0,02	(3.059)	(49,97)
Piutang imbal jasa penjaminan Guarantee fee receivables	**4.366.393**	**13,55**	4.487.864	16,02	(121.471)	(2,71)
Piutang penjaminan ulang Amounts due from reinsurers	**762.624**	**2,37**	338.234	1,21	424.390	125,47
Piutang hasil investasi Investment income receivables	**221.477**	**0,69**	164.723	0,59	56.754	34,45
Jumlah aset dari pihak berelasi Total assets of related parties	**27.469.909**	**85,23**	22.863.692	81,63	4.606.217	20,15
Total Aset Total assets	**32.231.220**		**28.009.567**		**4.221.653**	**15,07**

dalam juta Rupiah
In IDRmillion

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Dalam Liabilitas Related Party Balances in Liabilities	2023		2022		Peningkatan/(Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Utang penjaminan ulang Amounts due to reinsurer	**633.300**	**3,35**	221.100	1,46	412.200	186,43
Utang klaim Claim Payables	**79.975**	**0,42**	54.490	0,36	25.485	46,77
Jumlah liabilitas dari pihak berelasi Total Liabilities of Related Parties	**713.275**	**3,78**	275.590	1,81	437.685	158,82
Total Liabilitas Total Liabilities	**18.877.198**		**15.190.034**		**3.687.164**	**24,27**

dalam juta Rupiah
In IDRmillion

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Dalam Pendapatan Kafalah Related Party Balances in Kafalah income	2023		2022		Peningkatan/(Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Pemerintah Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	**17.909**	**4,39**	171.452	34,07	(153.543)	(89,55)
Jumlah Imbal Jasa Kafalah Bruto dari pihak Berelasi Total Kafalah Fees from Related Party	**17.909**	**4,39**	171.452	34,07	(153.543)	(89,55)
Total Imbal Jasa Kafalah Bruto Total Kafalah Fees-Gross	**408.035**		**503.297**		**(95.262)**	**(18,93)**

dalam juta Rupiah
In IDRmillion

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Dalam Penjaminan Ulang Related Party Balances in Re-guarantee	2023		2022		Peningkatan/(Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Premi penjaminan ulang Re-guarantee premium	**740.166**	**96,40**	914.932	91,69	(174.766)	(19,10)
Total premi penjaminan ulang dari pihak berelasi Total Re-guarantee premium from Related Party	**740.166**	**96,40**	914.932	91,69	(174.766)	(19,10)
Total Premi Penjaminan Ulang Total Re-guarantee premium	**767.795**		**997.898**		**(230.103)**	**(23,06)**

dalam juta Rupiah
In IDRmillion

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Dalam Beban Klaim Related Party Balances in Claim Expenses	2023		2022		Peningkatan/(Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Beban Klaim Claim Expenses	**5.370.958**	**90,16**	2.776.155	85,75	2.594.803	93,47
Total Beban Klaim dari Pihak-pihak Berelasi Total Claim Expenses from Related Parties	**5.370.958**	**90,1**	2.776.155	85,75	2.594.803	93,47
Total Beban Klaim Total Claim Expenses	**5.957.023**		**3.237.332**		**2.719.691**	**84,01**

dalam juta Rupiah
In IDRmillion

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Dalam Klaim Penjaminan Ulang Related Party Balances in reinsurance claims	2023		2022		Peningkatan/(Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Klaim penjaminan ulang Reinsurance claims	**787.839**	**99,92**	533.907	98,98	253.932	47,56
Total Klaim penjaminan ulang dari Pihak-pihak Berelasi Total reinsurance claims in related parties	**787.839**	**99,92**	533.907	98,98	253.932	47,56
Total Klaim Penjaminan Ulang Total reinsurance claims	**788.483**		**539.414**		**249.069**	**46,17**

dalam juta Rupiah
In IDRmillion

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Dalam Beban Komisi Related Party Balances in commission expenses	2023		2022		Peningkatan/(Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Beban Komisi Commission expenses	**2.893**	**9,23**	32.996	36,78	(30.103)	(91,23)
Total Beban Komisi dari Pihak-pihak Berelasi Total commission expenses from related parties	**2.893**	**9,23**	32.996	36,78	(30.103)	(91,23)
Total Beban Komisi Total commission expenses	**31.338**		**89705**		**(58.367)**	**(65,07)**

dalam juta Rupiah
In IDRmillion

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Dalam Pendapatan Komisi Related Party Balances in commission income	2023		2022		Peningkatan/(Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Pendapatan komisi Commission income	**92.030**	**99,33**	97.877	98,88	(5.847)	(5,97)
Total beban komisi dari Pihak-pihak Berelasi Total commission income from related parties	**92.030**	**99,33**	97.877	98,88	(5.847)	(5,97)
Total Pendapatan Komisi Total commission income	**92.651**		**98.984**		**(6.333)**	**(6,40)**

dalam juta Rupiah
In IDRmillion

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Dalam Pendapatan Subrogasi Related Party Balances in subrogation income	2023		2022		Peningkatan/(Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Pendapatan Subrogasi – Bersih Subrogation income - Net	**967.267**	**91,30**	691.650	82,80	275.617	39,85
Total Pendapatan Subrogasi - Bersih dari Pihak-pihak Berelasi Total subrogation income – Net from related parties	**967.267**	**91,30**	691.650	82,80	275.617	39,85
Total Pendapatan Subrogasi – Bersih Total subrogation income – Net	**1.059.417**		**835.372**		**224.045**	**26,82**

dalam juta Rupiah
In IDRmillion

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Dalam Pendapatan Investasi Related Party Balances in investment income	2023		2022		Peningkatan/(Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Pendapatan Investasi Investment income	**1.144.009**	**94,68**	724.640	82,48	419.369	57,87
Total Pendapatan Investasi dari Pihak-pihak Berelasi Total investment income from related parties	**1.144.009**	**94,68**	724.640	82,48	419.369	57,87
Total Pendapatan Investasi Total investment income	**1.208.265**		**878.538**		**329.727**	**37,53**

dalam juta Rupiah
In IDRmillion

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Dalam Beban Investasi Related Party Balances in investment expenses	2023		2022		Peningkatan/(Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Beban Investasi investment expenses	**10.364**	**97,20**	9.385	46,92	979	10,43
Total Beban Investasi dari Pihak-pihak berelasi Total investment expenses from related parties	**10.364**	**97,20**	9.385	46,92	979	10,43
Total Beban Investasi Total investment expenses	**10.663**		**20.002**		**(9.339)**	**(46,69)**

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERDAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN REGULATIONS THAT IMPACT THE COMPANY

Selama kurun waktu Tahun 2023 terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha oleh Perusahaan, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang diundangkan tanggal 30 Desember 2022.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, yang berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2023 tentang laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Kredit dan Unit Usaha Syariah, yang berlaku sejak tanggal 06 Januari 2023.
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang berlaku sejak tanggal 27 Januari 2023.
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang berlaku sejak tanggal 27 Januari 2023.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, yang berlaku sejak 28 Februari 2023.
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang berlaku sejak 24 Maret 2023.
8. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang berlaku sejak 24 Maret 2023.
9. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang berlaku sejak 24 Maret 2023.

During the period of 2023 there are several laws and regulations that have an impact on the implementation of business activities by the Company, namely:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, which was enacted on December 30, 2022.
2. Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, which took effect on January 12, 2023.
3. Circular Letter of the Financial Services Authority Number 1/SEOJK.05/2023 concerning Monthly reports of Guarantee Companies, Credit Guarantee Companies and Sharia Business Units, effective as of January 06, 2023.
4. Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning Amendments to the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit, effective as of January 27, 2023.
5. Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2023 concerning Special Treatment for Recipients of People's Business Credit Affected by the Corona Virus Disease Pandemic 2019, effective as of January 27, 2023.
6. Regulation of the Financial Services Authority Number 3 of 2023 concerning Improvement of Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public, effective as of February 28, 2023.
7. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of SOEs, effective from March 24, 2023.
8. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, effective from March 24, 2023.
9. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, effective from March 24, 2023.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

Tidak terdapat standar baru, revisi dan interpretasi kebijakan akuntansi yang diterapkan pada laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2023 yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Jamkrindo.

There were no new standards, revisions and interpretations of accounting policies applied to the Company's financial statements for the 2023 fiscal year which have a significant impact on Jamkrindo's financial statements.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
COMPANY HEALTH LEVEL

Evaluasi kinerja yang tercermin dalam tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 pasal 76 ayat (1) bahwa Tingkat kesehatan BUMN dinilai menggunakan Peringkat (*rating*) yang didasarkan pada Pemeringkatan. Peringkat (*rating*) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkatan Efek Indonesia (PEFINDO) yang ditandatangani pada tanggal 25 April 2024 dengan hasil sebagai berikut:

a. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone* Rating): id AA- (sa)
b. Peringkat Akhir (*Final Rating*): id AA+/Stable

Dengan demikian, Tingkat Kesehatan untuk PT Jaminan Kredit Indonesia pada Tahun Buku 2023 adalah Sangat Sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri nomor PER-2/MBU/03/2023.

The performance evaluation reflected in the Company's soundness level is based on the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 article 76 paragraph (1) that the soundness level of SOEs is assessed using a rating based on the Rating. The rating submitted in order to assess the soundness level is the rating conducted by PT Pemeringkatan Efek Indonesia (PEFINDO) signed on April 25, 2024 with the following results:

a. Stand Alone Rating: id AA- (sa)

b. Final Rating: id AA+/Stable

Thus, the Soundness Level for PT Jaminan Kredit Indonesia in Fiscal Year 2023 is Very Healthy as stipulated in Ministerial Regulation number PER-2/MBU/03/2023.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Hal-Hal Yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Di Tahun 2023

1. Rencana Kebijakan hapus buku dan hapus tagih Kredit Macet UMKM (UU P2SK) sehingga berpotensi mengurangi pendapatan subrogasi Perusahaan.
2. Adanya peningkatan beban klaim dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan:
   a. Terdapat 4 sektor ekonomi yang masih melambat di Q1-24 yaitu manufaktur, perdagangan, agrikultur dan transportasi dengan total proporsi terhadap GPD nasional sebesar 48,67%.
   b. Adanya Penurunan Pembayaran Nasabah SML (*Special Mention Loan*) pada Q3 dan Q4 tahun 2023 ke Q1 tahun 2024 menunjukan ada faktor yang mempengaruhi kemampuan bayar debitur secara makro.
   c. Kondisi rentabilitas UMKM semakin menurun, menyusul penurunan omset usaha dan peningkatan biaya akibat kenaikan harga barang input.
3. Ketidakpastian tentang keberlangsungan kredit program.

Matters That Have the Potential to Significantly Affect the Continuity of the Company's Business in 2023

1. Policy plan to write-off and write-off bad debts of MSMEs (P2SK Law), potentially reducing the Company's subrogation income.
2. An increase in claim expenses compared to the previous year. This may occur due to:
   a. There are 4 economic sectors that are still slowing down in Q1-24, namely manufacturing, trade, agriculture and transportation with a total proportion to the national GDP of 48.67%.
   b. The decline in SML (Special Mention Loan) customer payments in Q3 and Q4 of 2023 to Q1 of 2024 shows that there are factors that affect the ability of debtors to pay at the macro level.
   c. MSMEs' profitability conditions are declining, following a decline in business turnover and increased costs due to rising input prices.
3. Uncertainty about the sustainability of the credit program.

Assessment Manajemen Atas Hal-Hal Yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

1. Meningkatkan kerja sama penjaminan produktif atas kredit debitur yang tidak memenuhi kualifikasi/ persyaratan sebagai nasabah KUR.
2. Meningkatkan Penjaminan Langsung dengan peningkatan kapabilitas SDM pada bidang analisa kelayakan penjaminan.
3. Penerapan skema stop loss dan melakukan renegotiation/negosiasi ulang kepada mitra terkait yang diharapkan dapat menjaga kesehatan proses penjaminan dan memitigasi risiko.

Management's Assessment of Matters That Potentially Have a Significant Influence on the Continuity of the Company's Business

1. Increase cooperation in productive guarantees for debtor loans that do not meet the qualifications/ requirements as KUR customers.
2. Improve Direct Guarantee by increasing the capability of human resources in the field of guarantee feasibility analysis.
3. Implementation of stop loss schemes and renegotiation to related partners that are expected to maintain the health of the guarantee process and mitigate risks.

Asumsi yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan *Assessment* Atas Hal-Hal Yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Adapun asumsi makro dalam RKAP tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3% per tahun
2. Tingkat inflasi 3,6%
3. *Exchange rate* 1 USD = Rp14.800,-/USD
4. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun 7,9%

Adapun asumsi mikroekonomi dalam RKAP tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

1. Volume penjaminan sebesar Rp340 Triliun
   a. Volume penjaminan KUR sebesar 50% dari target penyaluran KUR nasional atau sebesar Rp225 Triliun
   b. Volume penjaminan Non KUR sebesar Rp115 Triliun
2. Pendapatan IJP *accrual* tumbuh sebesar 16% atau sebesar Rp6.716 Miliar
3. *Loss Ratio* sebesar 58%
4. *Recovery Rate* subrogasi sebesar 30% dari pendapatan subrogasi sebesar Rp999 Miliar
5. Pendapatan Investasi bersih sebesar Rp953 Miliar atau dengan tingkat YOI sebesar 5,13%
6. Opex Ratio sebesar 20,10%

Assumptions Used by Management in Conducting Assessments of Potentially Significant Influences on the Continuity of the Company's Business

The macro assumptions in the RKAP for fiscal year 2023 are as follows:

1. Economic growth rate of 5.3% per year
2. Inflation rate of 3.6%
3. Exchange rate of 1 USD = IDR14,800/USD
4. Interest rate of Indonesia's 10-year Government Bond of 7.9%

The microeconomic assumptions in the RKAP for fiscal year 2023 are as follows:

1. Guarantee volume of IDR340 trillion
   a. KUR guarantee volume of 50% of the national KUR distribution target or IDR225 trillion
   b. Non-KUR guarantee volume of IDR115 trillion
2. Guarantee Fee (IJP) accrual revenue grew by 16% or IDR6,716 billion
3. Loss Ratio of 58%
4. Recovery Rate of subrogation of 30% from subrogation income of IDR999 billion
5. Net Investment Income of IDR953 billion or with YOI rate of 5.13%
6. Opex Ratio of 20.10%

RENCANA JANGKA PANJANG
LONG-TERM PLAN

Perencanaan Perusahaan dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan RJPP Perusahaan tahun 2020-2024 mencapai "1st Preferred Company in SME's Financial Accessibility" dengan karakteristik perusahaan mencakup Konsultan UMKMK, Pusat Data UMKMK, jaringan internasional, proses bisnis yang terintegrasi, efisien dengan tempat kerja yang nyaman. Karakteristik ini memperkuat posisi Perusahaan menjadi "Center of Excellence" UMKMK dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis penjaminan.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah:
1. Pengembangan "Center of Excellence" UMKMK sebagai mitra solusi terintegrasi bagi pengembangan UMKMK
2. Penguatan jejaring kemitraan internasional dalam rangka pengembangan UMKMK
3. Penguatan image Jamkrindo sebagai tempat bekerja yang nyaman bagi para karyawan
4. Penguatan komunikasi korporat Jamkrindo sebagai "Center of Excellence" UMKMK
5. Inisiasi pemanfaatan *Big Data Analytics*
6. Optimalisasi *Learning Center* Penjaminan

The Company's planning in the next 5 (five) years in accordance with the Company's RJPP 2020-2024 reaches "1st Preferred Company in SME's Financial Accessibility" with company characteristics including UMKMK Consultant, UMKMK Data Center, international network, integrated business processes, efficient with a comfortable workplace. These characteristics strengthen the Company's position as the "Center of Excellence" for MSMEs while maintaining the growth and profitability of the guarantee business.

The strategic steps taken are:
1. Development of the UMKMK "Center of Excellence" as an integrated solution partner for UMKMK development.
2. Strengthening international partnership networks in the context of MSMEK development
3. Strengthening Jamkrindo's image as a comfortable place to work for employees
4. Strengthening Jamkrindo's corporate communication as the "Center of Excellence" for MSMEs
5. Initiation of Big Data Analytics utilization
6. Optimization of the Guarantee Learning Center


Jamkrindo
Jamkrindo
Jamkrindo

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG



5

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

PRINSIP UMUM
GENERAL PRINCIPLES

Prinsip Umum

Jamkrindo memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip Governansi Perusahaan atau tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Komitmen Perusahaan ini ditegaskan di dalam Anggaran Dasar dan berbagai kebijakan GCG. Segenap insan Jamkrindo menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan Perusahaan yang dituangkan dalam Pedoman GCG. Segenap insan Jamkrindo bertekad untuk selalu menerapkan GCG secara efektif dan efisien, serta menggunakannya sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

Bagi Jamkrindo, GCG menjadi salah satu pilar utama konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development*, yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa mendatang.

Bagi Perusahaan, governansi perusahaan didefinisikan sebagai suatu pola pikir dan pola kerja yang diterapkan di seluruh jajaran Perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya sistem manajemen yang efisien dan efektif. Komitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dapat menjadi landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam pengelolaan sumber daya dan usaha, governansi perusahaan juga akan meningkatkan tanggung jawab manajemen pada pemegang saham (*shareholders*), pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditur, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, Pemerintah dan masyarakat luas.

Di Indonesia GCG didasarkan pada prinsip metode pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas entitas usaha yang akuntabel, yang kemudian berelasi langsung terhadap pengelolaan organisasi yang berkelanjutan dan iklim investasi yang sehat.

General Principles

Jamkrindo is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in its daily business activities. This Company commitment is emphasized in the Articles of Association and various GCG policies. All personnel of Jamkrindo implement GCG practices in the Company governance as outlined in the GCG Guidelines. All personnel of Jamkrindo are determined to always implement GCG effectively and efficiently, as well as use it as a basis for improving sustainable business performance and also as a form of corporate accountability to stakeholders.

For Jamkrindo, GCG is one of the main pillars of the concept of sustainable development, or sustainability development, which is expected to establish the foundation for a healthy investment climate. Furthermore, GCG has become one of the fundamental factors for investors in assessing a Company's sustainable performance into the future

For the Company, corporate governance is defined as a mindset and working pattern which has been implemented throughout the Company to increase transparency and accountability for creating an efficient and effective management system. Full commitment to implementing GCG principles becomes the basis for creating sustainable added value for the interests of shareholders, society in general, and various other stakeholders (such as employees, consumers, regulators, work partners, etc.) in the long or short term

In managing resources and business, corporate governance also increase management responsibility towards shareholders, stakeholders, as well as accommodate various parties with an interest in the company such as creditors, suppliers, business associations, consumers, workers, the government and wide community.

In Indonesia, GCG is based on the principles of decision-making methods and managing the activities of accountable business entities, which are directly related to sustainable organizational management and a healthy investment climate.

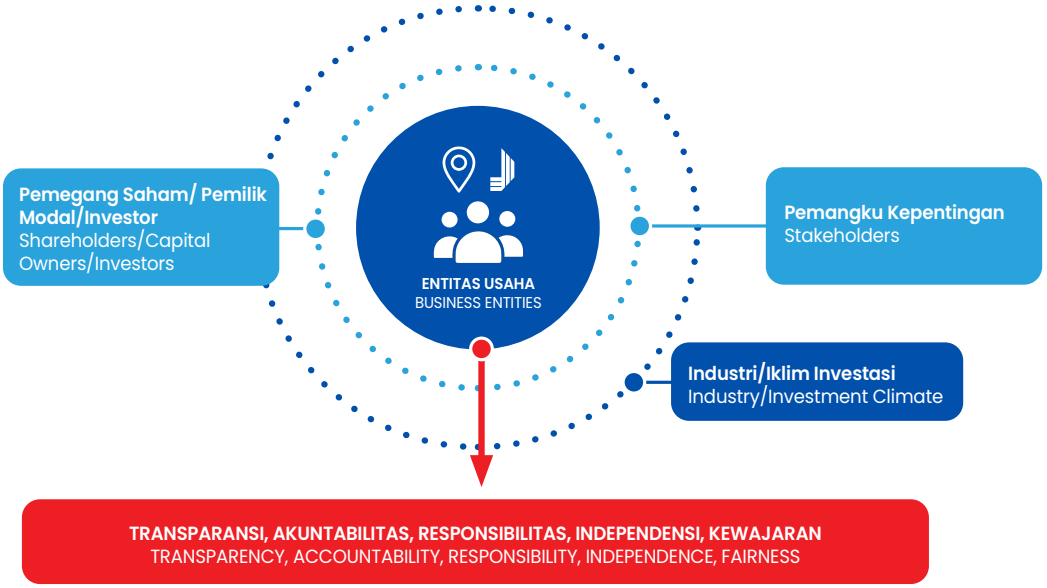
Pendekatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Approach to GCG



Prinsip GCG terus mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Prinsip GCG turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Di lingkungan Perusahaan, evaluasi secara berkala dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

GCG principles continue to develop in line with developments in the business world. The principles of GCG have also undergone development which includes a monitoring and control system that supports work ethics and responsible decision-making, supports integrity in financial reporting, proper risk management, as well as ethically based relationships between stakeholders and the Company. Within the Company, periodic evaluations are carried out on the implementation of GCG to ensure the implementation of GCG principles in a comprehensive manner.

Harmonisasi Entitas Usaha dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
Harmony between Business Entities and Shareholders and Stakeholders



Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu memaksimalkan nilai Jamkrindo bagi para *stakeholders* dalam bentuk meningkatnya kinerja dalam bentuk nilai Perusahaan dalam jangka panjang serta citra positif Perusahaan. Sehingga semakin menguatkan posisi Jamkrindo dalam persaingan global serta pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Selain itu, GCG juga merupakan prinsip-prinsip atau atau *Governance Principles* yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika, sehingga dapat digunakan untuk menjaga kepercayaan pemegang saham (*shareholders*) dan juga pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Through the implementation of GCG principles, it is expected that Jamkrindo value will be able to be maximized for stakeholders, in the form of increased performance, in the form of long-term corporate value and a positive image of the Company. This will strengthen Jamkrindo's position in global competition and sustainable business growth.

In addition, GCG is also the principles or Governance Principles that underlie the Company's management processes and mechanisms based on compliance with laws and regulations, as well as a reflection of an ethical business world, so that it can be used to maintain the trust of shareholders and stakeholders.

PRINSIP TATA KELOLA DAN KOMITMEN PENERAPANNYA OLEH JAMKRINDO

GOVERNANCE PRINCIPLES AND COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION BY JAMKRINDO

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam kegiatan operasional dan bisnis, Jamkrindo mengadaptasi prinsip GCG yang terdiri dari 5 (lima) prinsip yakni Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran dalam memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*):

Basics of Implementing Good Corporate Governance

In its operational and business activities, Jamkrindo adapts GCG principles which consist of 5 (five) principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness in paying attention to the interests of stakeholders:

Keterbukaan Transparency	Berdikari mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. Independently defines transparency as openness in conducting the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the Company.
Akuntabilitas Accountability	Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of the Company's organs so that the management of the Company is carried out effectively.
Pertanggungjawaban Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Conformity in the management of the Company with the applicable laws and regulations and sound corporate principles.
Kemandirian Independence	Kemandirian sebagai suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independence as a condition in which the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/ pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles.
Kewajaran Fairness	Kewajaran sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness refers to fairness and equality in fulfilling stakeholder rights that arise based on agreements and laws and regulations.

Praktik GCG dikembangkan Jamkrindo sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implementasi GCG di lingkup keorganisasian di lingkungan Jamkrindo, di mana hal ini memberikan Perusahaan kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif. Dalam mengimplementasikan GCG, Jamkrindo mengacu pada beberapa peraturan dan perundangundangan, utamanya Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi, mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

GCG practices were developed by Jamkrindo as a commitment to continue to innovate in efforts to improve GCG implementation in the organizational sphere within Jamkrindo, of which this gives the Company confidence in facing every challenge going forward and becoming a business entity with competitive competence. In implementing GCG, Jamkrindo refers to several laws and regulations, especially Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This law provides a comprehensive foundation for aspects of organizational management, starting from the rights and obligations of shareholders, duties and authorities of the Board of Directors and Board of Commissioners, to the Company's relationship with internal and external stakeholders

Sebagai entitas usaha dimana Pemerintah Indonesia menjadi Pemegang Saham, penerapan GCG di lingkup

As a business entity in which the Government of Indonesia is the Shareholder, the implementation of GCG within the

Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corperate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan yang akan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut, tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada entitas usaha BUMN adalah:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 yang selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui azas-azas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Jamkrindo No.01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang saat ini dalam proses

scope of the Company also refers to the Minister of SOEs' Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning Establishment of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN) as amended by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, which was subsequently updated through SOE Ministerial Regulation number: PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which states that GCG are the principles that underlie a process and mechanism for managing a company based on legislation and business ethics. The application of GCG principles which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness is a strong foundation for the sustainability of the Company's business activities. In addition, the implementation of GCG that refers to best practices will increase the trust of Shareholders and stakeholders which will lead the Company to significant and sustainable progress.

Based on the Minister of SOEs' Regulation, the objectives of implementing GCG principles in SOE business entities are:

1. To optimize the value of SOEs so that the Company has strong competitiveness, both nationally and internationally;
2. To encourage the management of SOEs in a professional, efficient and effective manner, as well as empower functions and increase the independence of corporate organs;
3. To encourage Company organs to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of SOEs' social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the SOE;
4. To increase the contribution of SOE in the national economy; Improve a conducive climate for the development of national investment.

The principles of GCG implementation used by the Company refer to the Minister of SOEs' Regulation No. PER-09/MBU/2012 which was subsequently updated through SOE Ministerial Regulation number: PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as the General Guidelines for GCG from the National Committee on Governance Policy (KNKG) through the principles of GCG which are commonly known as TARIF, namely Transparency, Accountability Responsibility, Independence, and Fairness in all Company Organs including Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors listed in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Jamkrindo No.01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII /2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance, which is currently in the process of Harmonization with the Minister

Harmonisasi dengan Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara PT Jaminan Kredit Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

of SOEs' Regulation number: PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises for PT Jaminan Kredit Indonesia, with the following details

Organ GCG GCG Organ	**Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik** Principles of Good Corporate Governance				
	Transparasi Transparency	**Akuntabilitas** Accountability	**Pertanggungjawaban** Responsibility	**Kemandirian** Independency	**Kewajaran** Fairness
Pemegang Saham Shareholders	Pengungkapan yang jelas mengenai rencana transaksi luar biasa antara lain merger, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dalam jumlah yang substansional Keterbukaan dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Clear disclosure of plans for extraordinary transactions, including mergers, acquisitions, and sales of Company assets in substantial amounts Disclosure in determining the income of the Board of Directors and the Board of Commissioners	Pemegang Saham mempunyai tanggungjawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan dan memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan Shareholders have the responsibility to monitor the implementation of GCG principles in the process of managing the Company and ensure that all management of the Company complies with laws and regulations.	Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggungjawab direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Shareholders are not allowed to interfere in the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors in accordance with prevailing laws and regulations	Melakukan prosedur yang lazim dalam menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehingga secara objektif didapatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan Carry out the usual procedures in appointing the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners so that the right person is obtained objectively according to the qualifications required by the Company	Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris Shareholders are entitled to obtain information relating to the interests of the Company from the Board of Directors and or the Board of Commissioner

Organ GCG GCG Organ	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Principles of Good Corporate Governance				
	Transparasi Transparency	**Akuntabilitas** Accountability	**Pertanggungjawaban** Responsibility	**Kemandirian** Independency	**Kewajaran** Fairness
Dewan Komisaris Board of Commissioner	1. Dibuat risalah rapat Dewan Komisaris yang menunjukkan adanya dinamika rapat dalam proses pengambilan keputusan 2. Kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahan 3. Remunerasi Dewan Komisaris dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan 1. Minutes of meetings of the Board of Commissioners are made showing the dynamics of the meeting in the decision-making process 2. The attendance of each member of the Board of Commissioners and implementation of the meeting of the Board of Commissioners is reported in the Company's Annual Report. 3. The Board of Commissioners' remuneration is reported in the Company's Annual Report	Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan pelaksanaan strategi Perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas serta pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara efektif Pemberdayaan fungsi Dewan Komisaris The Board of Commissioners is responsible for overseeing the implementation of the Company's strategy and requires accountability and providing advice to the Board of Directors in the context of effective management of the Company Empowerment of the function of the Board of Commissioners	1. Dewan Komisaris harus mempunyai komitmen untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya 2. Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham 3. Dewan Komisaris turut bertanggungjawab terhadap kebenaran laporan keuangan yang diajukan Direksi kepada Pemegang Saham 1. The Board of Commissioners must have a commitment to comply with laws and regulations related to their duties. 2. The Board of Commissioners is responsible for carrying out their duties to Shareholders. 3. The Board of Commissioners is also responsible for the correctness of the financial reports submitted by the Board of Directors to Shareholders	1. Memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan 2. Dewan Komisaris tidak berwenang membuat keputusan manajemen pengelolaan Perusahaan sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerjasama atau kontrak-kontrak yang bersifat rutin 1. Provide objective considerations in solving problems faced by the Company which may contain potential conflicts of interest 2. The Board of Commissioners is not authorized to make day-to-day management decisions regarding the management of the Company, such as decisions regarding the appointment and termination of employees or the signing of cooperation or routine contracts	Dewan Komisaris dalam menjalankan jabatannya akan selalu menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan *stakeholders* In carrying out their positions, the Board of Commissioners will always apply the Company's business ethics in order to fulfill the interests of stakeholders

Organ GCG GCG Organ	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Principles of Good Corporate Governance				
	Transparasi Transparency	**Akuntabilitas** Accountability	**Pertanggungjawaban** Responsibility	**Kemandirian** Independency	**Kewajaran** Fairness
Direksi Board of Directors	1. Menyediakan Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan sebagai alat bantu untuk mengungkapkan transaksi keuangan dan kinerja Perusahaan kepada *stakeholder* secara transparan 2. Mengungkapkan informasi dan Laporan Keuangan Perusahaan diantaranya disajikan melalui *website* Perusahaan 3. Mengungkapkan gaji dan penghasilan lain direksi pada Laporan Tahunan 1. Providing Company Activity and Financial Reports as a tool to transparently disclose financial transactions and Company performance to stakeholders 2. Disclose information and the Company's Financial Statements, among others, are presented through the Company's website 3. Disclose the salaries and other income of the Board of Directors in the Annual Report	1. Direksi harus mampu menempatkan urutan prioritas dalam upaya pemenuhan kepentingan stakeholder 2. Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mengamankan aset Perusahaan 3. Direksi memberdayakan peran dan fungsi SPI sebagai mitra strategis manajemen 4. Direksi harus memastikan bahwa SPI memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya 1. The Board of Directors must be able to place a priority order in an effort to fulfill stakeholder interest. 2. The Board of Directors builds and establishes an effective Internal Control System so as to safeguard the Company's assets 3. The Board of Directors empowers the role and function of SPI as a management strategic partner 4. The Board of Directors must ensure that SPI has access to information regarding the Company that is necessary to be able to carry out their duties	1. Direksi harus mempunyai komitmen untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan 2. Direksi bertanggungjawab terhadap materi yang disajikan pada Laporan Keuangan 3. Direksi bertanggungjawab terhadap pengungkapan informasi Laporan Keuangan pada media publikasi nasional sehingga dapat diakses oleh *stakeholder* 1. The Board of Directors must have a commitment to comply with the Laws and Regulations related to the Company's operations 2. The Board of Directors is responsible for the material presented in the Financial Statements 3. The Board of Directors is responsible for disclosing Financial Report information in national publication media so that it can be accessed by stakeholders	Komposisi Direksi harus memungkinkan direksi dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lainnya The composition of the Board of Directors must enable the Board of Directors to act independently in the sense that they do not have interests that could interfere with their ability to carry out tasks independently and critically in relation to one another	1. Penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang memadai agar setiap karyawan memperoleh rasa keadilan dikaitkan dengan keberhasilan dalam pencapaian kinerja 2. Menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan *stakeholder* 1. Implementation of an adequate reward and punishment system so that every employee gets a sense of justice associated with success in achieving performance 2. Implementing the Company's business ethics in order to fulfill stakeholder interests

Sementara itu, sebagai warga koporasi, Jamkrindo senantiasa menerapkan prinsip-prinsip governansi korporat yang baik, yang berlandaskan pada 4 (empat) pilar governansi korporat, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), yang terakhir dimutakhirkan pada tahun 2021. PUGKI 2021 sendiri, merupakan pengembangan dan perkembangan terkini dari nilai dasar TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) yang terakhir digunakan pada PUGKI 2019.
Berikut adalah 4 (empat) pilar governansi korporat yang menjadi pedoman Jamkrindo dalam pengelolaan Perusahaan:

Perilaku Beretika

Definisi

Dalam melaksanakan kegiatannya, Korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Penerapan "Perilaku Beretika" di Jamkrindo dapat tercermin dari perilaku sebagai berikut:

1. Selalu Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
2. Memenuhi Janji dan Komitmen.
3. Bertanggung Jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
4. Saling peduli dan menghargai perbedaan.
5. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
6. Selalu menjaga nama baik Perusahaan dan sesama karyawan.
7. Selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.
8. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan & peraturan perusahaan, nilai-nilai dan etika perusahaan.

Akuntabilitas

Definisi

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Penerapan "Akuntabilitas" di Jamkrindo dapat tercermin melalui:

Meanwhile, as a corporate citizen, Jamkrindo always applies the principles of good corporate governance, which are based on 4 (four) pillars of corporate governance, namely ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability, as stated in the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI), which was last updated in 2021. PUGKI 2021 itself, is the latest development and progress of the basic TARIF values (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness) which were last used in PUGKI 2019.

The following are the 4 (four) pillars of corporate governance that serve as guidelines for Jamkrindo in managing the Company:

Ethical Behavior

Definition

In carrying out its activities, the Corporation always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and beliefs consistently. The corporation pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principle of fairness and is managed independently so that each organ of the Company does not dominate the other and cannot be intervened by other parties.

Implementation in the Company

The implementation of "Ethical Behavior" in Jamkrindo can be reflected in the following behavior:

1. Always adhere to moral and ethical values.
2. Fulfilling Promises and Commitments.
3. Responsible for the tasks, decisions, and actions taken.
4. Caring for each other and respecting differences.
5. Obey the leadership as long as it does not conflict with law and ethics.
6. Always maintain the good name of the Company and fellow employees.
7. Always put the interests of the Company first and avoid conflicts of interest.
8. Do not commit acts that are contrary to laws and regulations, Company policies & regulations, Company values and ethic

Accountability

Definition

Corporations can account for their performance in a transparent and fair manner. For this reason, corporations must be managed properly, measurably and in accordance with corporate interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a prerequisite needed to achieve sustainable performance.

Implementation in the Company

The implementation of "Accountability" in Jamkrindo can be reflected through:

1. Menetapkan tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
2. Mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan melalui penyampaian laporan keuangan ke publik secara tepat waktu.
3. Melaporkan kepada Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perusahaan serta perubahan dan penambahannya.
4. Melaporkan kepada Pemegang Saham kinerja perusahaan disertai dengan strategi peningkatan kinerja dan pencapaian target perusahaan.

Transparansi

Definisi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Segala informasi bisnis korporasi yang sedang berjalan dan terkini telah dilakukan pemutakhiran secara periodik melalui situs web Perusahaan sehingga bagi para pihak pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses dan memahani isu terkini dari Perusahaan yang sedang terjadi.

Keberlanjutan

Definisi

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Perusahaan memiliki program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

1. Define the duties and responsibilities of each Company organ and all employees clearly and in line with the Company's vision, mission, values and strategy.
2. Accountable for Company performance through the submission of financial reports to the public in a timely manner.
3. Report to Shareholders regarding the Company's annual Work Plan and Budget as well as changes and additions thereto.
4. Reporting to Shareholders the Company's performance accompanied by a strategy to improve performance and achieve Company targets.

Transparency

Definition

To maintain objectivity in conducting business, the corporation provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understandable to stakeholders. Corporations take the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations, but also important matters for decision making by shareholders, creditors and other stakeholders.

Implementation in the Company

All ongoing and up-to-date corporate business information has been updated periodically through the Company's website so that stakeholders can easily access and understand current issues from the Company.

Sustainability

Definition

The corporation complies with laws and regulations and is committed to carrying out responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development by working with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that is aligned with business interests and the sustainable development agenda.

Implementation in the Company

The Company has a Social and Environmental Responsibility program that aims to:

1. Providing benefits for economic development, social development, environmental development as well as legal development and corporate governance.
2. Contributing to the creation of added value for the Company with principles that are integrated, directed and measurable, as well as accountable.
3. Fostering micro and small businesses to be more resilient and independent as well as the community around the company.

Selain penerapan 4 (empat) pilar governansi korporat, Jamkrindo juga telah menerapkan 8 (delapan) prinsip governansi korporat yang berisi hak-hak pemegang saham, pemangku kepentingan dan pemenuhannya, aturan pokok tentang pengelolaan, dan pengawasan atas pengelolaan korporasi di Indonesia, termasuk aspek etika, manajemen risiko, dan pengungkapan. Adapun 8 (delapan) prinsip governansi korporat tersebut dibagi dalam tiga kelompok prinsip, yakni:

a. Tiga prinsip pertama adalah kelompok prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris;

b. Kelompok prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
c. Kelompok prinsip yang mengatur pemilik sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat.

Berikut adalah 8 (delapan) prinsip governansi korporat dan penerapannya di lingkup Perusahaan, sebagaimana terlampir di bawah ini.

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Definisi

Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Penjelasan

Prinsip 1 berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu Prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Penerapan di lingkup Perusahaan

1. Dewan Komisaris
   a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
   b. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggara Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

In addition to implementing the 4 (four) pillars of corporate governance, Jamkrindo has also implemented 8 (eight) principles of corporate governance which contain the rights of shareholders, stakeholders and their fulfillment, basic rules regarding management and supervision of corporate management in Indonesia, including ethical aspects, risk management, and disclosure. The 8 (eight) principles of corporate governance are divided into three groups of principles, namely:

a. The first three principles are a group of principles that regulate the management and supervisory functions of corporations, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners;
b. The group of principles governing the processes and outputs produced by the Board of Directors and Board of Commissioners; and
c. The third is the group of principles governing resource owners, who will primarily benefit from the implementation of corporate governance.

The following are 8 (eight) principles of corporate governance and their implementation within the scope of the Company

Principle 1: Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners

Definition

The Board of Directors and Board of Commissioners carry out their roles and responsibilities independently to create sustainable value for the best long-term interests of the corporation and shareholders, taking into account the interests of stakeholders.

Explanation

Principle 1 relates to the roles and responsibilities of the Directors in managing the corporation and the roles and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising corporate management by the Directors. In addition, this principle regulates the performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their respective members, handling conflicts of interest that occur between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners as well as increasing the competence of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Implementation in the Company

1. Board of Commissioners
   a. Supervise management policies, the general management of both the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors.
   b. Providing advice to the Board of Directors including supervising the implementation of the Company's Long Term Work Plan, Work Plan and Company Budget, as well as provisions of applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.

c. Memantau dan memastikan bahwa praktik *Good Corporate Governance* telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.

2. Direksi
Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Definisi

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris.

Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Penjelasan

Prinsip 2 mengharuskan pemilihan dan penetapan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, Prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Penetapan komposisi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham.

c. Monitor and ensure that Good Corporate Governance practices have been implemented effectively and sustainably, including by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.

2. Board of Directors
Conduct all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and represent the Company both inside and outside the court on all matters and all events with limitations as stipulated in the provisions of laws and regulations, the Articles of Association and /or Resolutions of the General Meeting of Shareholders

Principle 2: Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Definition

Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are selected and determined in such a way that the composition of the Board of Directors as a management organ and the composition of the Board of Commissioners as a supervisory organ is diverse and each consists of Directors and Commissioners who have the commitment, knowledge, ability, experience and expertise needed to fulfilling properly the management role of the Board of Directors and the supervisory role of the Board of Commissioners.
Remuneration is designed to effectively align the interests of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with the long-term interests of the corporation and sustainable value creation.

Explanation

Principle 2 requires that the selection and appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are conducted in such a way that the Board of Directors and the Board of Commissioners respectively as management and supervisory organs have a composition of members with the knowledge, abilities and expertise needed in accordance with their respective roles. In addition, this Principle emphasizes the importance of remuneration policies to encourage members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to prioritize the long-term interests of the corporation based on the principle of sustainability, and requires disclosure of remuneration policies and information received by the Board of Directors and Board of Commissioners in a transparent and accountable manner.

Implementation in the Company

Shareholders determine the composition and remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

Definisi

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.

Penjelasan

Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Pelaksanaan Rapat Gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris secara periodik dalam tahun berjalan.

Prinsip 4: Perilaku Etis

Definisi

Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.

Penjelasan

Prinsip 4 mengharuskan korporasi untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Adanya penandatangan *code of conduct* setiap tahun kepada seluruh karyawan Perusahaan.

Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Definisi

Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara bertintegritas.

Penjelasan

Prinsip 5 mengharuskan Direksi untuk mengimplementasikan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (*responsible business*) sebagai

Principle 3: Working Relations between the Board of Directors and the Board of Commissioners

Definition

The Board of Directors and Board of Commissioners have a close, open, constructive, professional and trusting working relationship for the best interests of the corporation.

Explanation

Principle 3 emphasizes the importance of a close, open, constructive, professional, trusting working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in achieving the best interests of the corporation. Principle 3 also regulates the need for the Board of Commissioners to access complete information and the importance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners to understand the implications of the corporate ownership structure for carrying out their roles.

Implementation in the Company

Implementation of Joint Meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically during the current year.

Principle 4: Ethical Conduct

Definition

The corporation has a commitment to act ethically and responsibly, upholding the values and culture of the organization

Explanation

Principle 4 requires corporations to periodically make statements regarding corporate commitments not only to comply with applicable laws and regulations, but also commitments to act ethically and responsibly.

Implementation in the Company

The signing of the code of conduct every year for all employees of the Company

Principle 5: Risk Management, Internal Control and Compliance

Definition

The corporation carries out corporate governance practices that are integrated with the implementation of internal control and risk management systems, as well as an effective compliance management system in order to support the achievement of corporate goals, vision, mission, goals, and performance targets in operating business with integrity.

Explanation

Principle 5 requires the Board of Directors to implement governance, internal control, and risk management systems, and an integrated compliance management system as part of the strategy, management tools, and practices implemented by corporations in doing business in a responsible business manner as a good corporate citizen.

warga korporat yang baik (*good corporate citizen*). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan korporat yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi.

Penerapan di lingkup Perusahaan

a. Pelaksanaan Audit Tahunan oleh Satuan Pengawasan Intern.
b. *Self assesment* oleh masing – masing unit kerja terhadap pengelolaan risiko setiap triwulan.
c. Pelaporan hasil *self assesment* Divisi Manajemen Risiko kepada Direktur yang membidangi.
d. Pelaporan triwulanan Direksi kepada Dewan Komisaris.
e. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan kebijakan manajemen risiko.
f. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut hasil pemeriksaaan audit.

Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi

Definisi

Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.

Penjelasan

Prinsip 6 mengharuskan korporasi untuk memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan governansi korporat.

Penerapan di lingkup Perusahaan

Informasi kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi dan governansi korporat dapat diakses secara transparansi melalui situs web Perusahaan www.jamkrindo.co.id

Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham

Definisi

Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

The Board of Commissioners monitors and provides input on the effectiveness of governance implementation, internal control systems, and risk management, and corporate compliance management systems which are carried out in an integrated manner by the Directors.

Implementation in the Company

a. Annual Audit Implementation by the Internal Control Unit.
b. Self assessment by each work unit on risk management every quarter.
c. Reporting the results of the Risk Management Division's self-assessment to the Director in charge
d. Board of Directors quarterly reporting to the Board of Commissioners.
e. The Board of Commissioners conducts active monitoring and provides advice to the Board of Directors on a regular basis regarding the effectiveness of implementing risk management policies.
f. The board of Commissioners carries out active supervision and provides advice to the Board of Directors in order to establish an effective internal control system, as well as monitor and evaluate the follow-up of audit results.

Principle 6: Disclosure and Transparency

Definition

The corporation makes accurate and timely disclosures regarding all material matters concerning the corporation.

Explanation

Principle 6 requires corporations to have a governance framework capable of providing assurance that can result in accurate and timely disclosure of all material matters concerning the corporation, which includes financial condition and performance, ownership of the corporation, and corporate governance.

Implementation in the Company

Information on financial performance, ownership of corporations and corporate governance can be accessed in a transparent manner through the Company's website www.jamkrindo.co.id

Principle 7: Rights of Shareholders

Definition

Corporations protect and facilitate the exercise of shareholder rights and ensure fair treatment of shareholders, including minority shareholders. All shareholders have the opportunity to obtain effective remedies for violations of their rights.

Penjelasan
Prinsip 7 menjelaskan mengenai pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan adil bagi pemegang saham, bagaimana cara kerjasama aktif antara korporasi dengan pemegang sahamnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak pemegang saham secara efektif melalui RUPS.

Penerapan di lingkup Perusahaan
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang melibatkan korporasi dengan pemegang saham.

Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan

Definisi
Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.

Penjelasan
Prinsip 8 menjelaskan peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi.

Penerapan di lingkup Perusahaan
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari masing masing pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Landasan Hukum

Selain mengadaptasi prinsip GCG, Perusahaan juga berpedoman pada ketentuan hukum yang menjadi dasar dan digunakan dalam penerapan GCG Perusahan termasuk regulasi industri dan ketentuan terbaru mengenai perseroan terbatas, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
   a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
   b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
   d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
   e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Explanation
Principle 7 explains the fulfillment of shareholder rights and fair treatment for shareholders, how active cooperation between corporations and their shareholders and the effective implementation of some shareholder rights through the GMS is carried out.

Implementation in the Company
Implementation of the General Meeting of Shareholders involving corporations and shareholders.

Principle 8: Stakeholder Rights

Definition
The corporation recognizes the rights of stakeholders stipulated in applicable laws and regulations or an agreement agreed upon by the corporation and encourages active cooperation with stakeholders in creating wealth, employment and financially sound business sustainability.

Explanation
Principle 8 explains the roles of the Board of Directors and Board of Commissioners in integrating sustainability aspects into the corporate business model, implementing stakeholder engagement, and ensuring the protection of stakeholder rights. The Board of Commissioners monitors the integration of all of the above aspects by the Board of Directors

Implementation in the Company
Signing of Cooperation Agreements with Partners by taking into account the rights and obligations of each party bound by the cooperation agreement.

Legal Basis

In addition to adapting GCG principles, the Company is also guided by the legal provisions that form the basis and are used in the implementation of Company GCG, including industry regulations and the latest provisions regarding limited liability companies, including the following:

1. Law of the Republic of Indonesia
   a. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises (BUMN);
   b. Law of the Republic of Indonesia No. 47 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
   c. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 concerning Guarantees;
   d. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption;
   e. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 concerning State Organizers who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism;

f. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003;
g. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
h. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Peraturan Pemerintah
   a. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
   b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
   c. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

3. Peraturan Menteri BUMN
   a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
   b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
   c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/11/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
   d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Megara;
   e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

f. Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003;
g. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure;
h. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

2. Government Regulations
   a. Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Public Corporations (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia;
   b. Government Regulation No. 38 of 2008 concerning Amendments to Government Regulation No. 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property;
   c. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs.

3. Regulation of the Minister of SOEs
   a. State Minister of SOEs' Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and its amendment No. PER-09/ MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, which was subsequently updated through SOE Ministerial Regulation number: PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of StateOwned Enterprises;
   b. SOEs Minister Regulation Number PER-10/ MBU/10/2020 concerning the Amendment to SOEs Minister Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
   c. State Minister of SOEs' Regulation No. PER-12/ MBU/11/2015 concerning Fifth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Board oDirectors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
   d. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-06/MBU/04/2021 of 2021 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of Megara-Owned Enterprises;
   e. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/02/2018 of 2018 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for Preparing Information Technology Management of State-Owned Enterprises

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
   a. Peraturan OJK No.3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
5. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana terakhir di ubah dalam Akta No. 07 Tanggal 07 Oktober 2022.
6. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

4. Regulations of the Financial Services Authority (OJK)
   a. OJK Regulation No.3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.
5. The Company's Articles of Association as last amended in Deed No. 07 of October 7, 2022.
6. General Guidelines for Indonesian GCG by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Jamkrindo

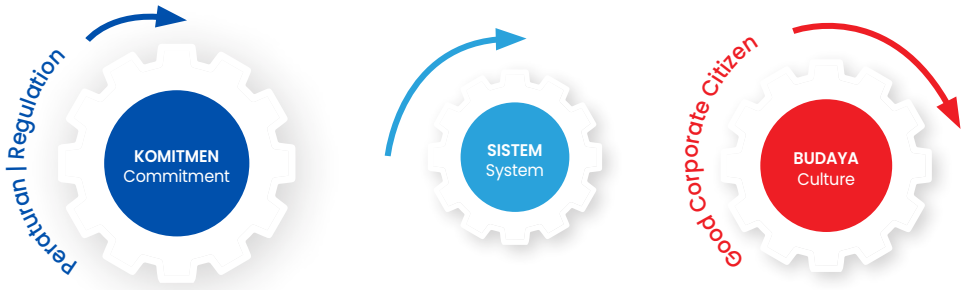
Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) yang dilakukan secara konsisten pada seluruh tingkatan operasional Perusahaan dipercaya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan GCG dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan. Komitmen tersebut membawa Perusahaan untuk terus mengedepankan dan mengadaptasi best practice GCG yang berlaku.

Wujud dari komitmen Jamkrindo dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dituangkan dalam struktur GCG, sistem dan prosedur yang telah disusun oleh Perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan perusahaan yang profesional secara efektif dan efisien. Komitmen tersebut tergambar di *Roadmap* GCG yang telah dimiliki Jamkrindo dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

Improving the Quality of Jamkrindo's GCG Implementation

The consistent application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) at all levels of the Company's operations is believed to contribute to the development of the Company. For this reason, the Company is committed to implementing GCG in every business activity of the Company. This commitment has led the Company to continue to prioritize and adapt the prevailing GCG best practices.

The manifestation of Jamkrindo's commitment to implementing GCG principles is outlined in the GCG structure, systems, and procedures that have been developed by the Company which aims to create added value for stakeholders through effective and efficient professional management of the Company. This commitment is reflected in Jamkrindo's GCG Roadmap in implementing GCG principles to achieve Good Corporate Citizens with the following mechanism:



Patuh terhadap seluruh regulasi atau pedoman yang dijalankan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan *best practice*.

Comply with all regulations or guidelines implemented by the company in accordance with applicable laws and best practices.

Operasional Perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan penerapan WBS.

The Company's operations can work effectively and efficiently through compliance, internal control, risk management, and the implementation of WBS.

Memberikan pelayanan terbaik untuk kegiatan penjaminan bagi UMKMK, dan dapat menjadi *Role Model* bagi perusahaan sejenis.

Provide the best service for guarantee activities for MSME and Cooperative and could become a Role Model for similar Companies.

1. Komitmen
   Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.
2. Sistem
   Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.
3. Budaya
   Nilai-nilai budaya Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Jamkrindo, maka seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Jamkrindo adalah untuk Mendukung Visi Jamkrindo, yaitu menjadi "Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian nasional". Selain itu juga, implementasi GCG yang dilakukan Perusahaan untuk Mendukung Misi Jamkrindo, yaitu Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Dengan demikian Perusahaan dapat memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan dan membangun citra Perusahaan (*brand image*) dan reputasi Perusahaan yang baik serta *benchmark* bagi perusahaan sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

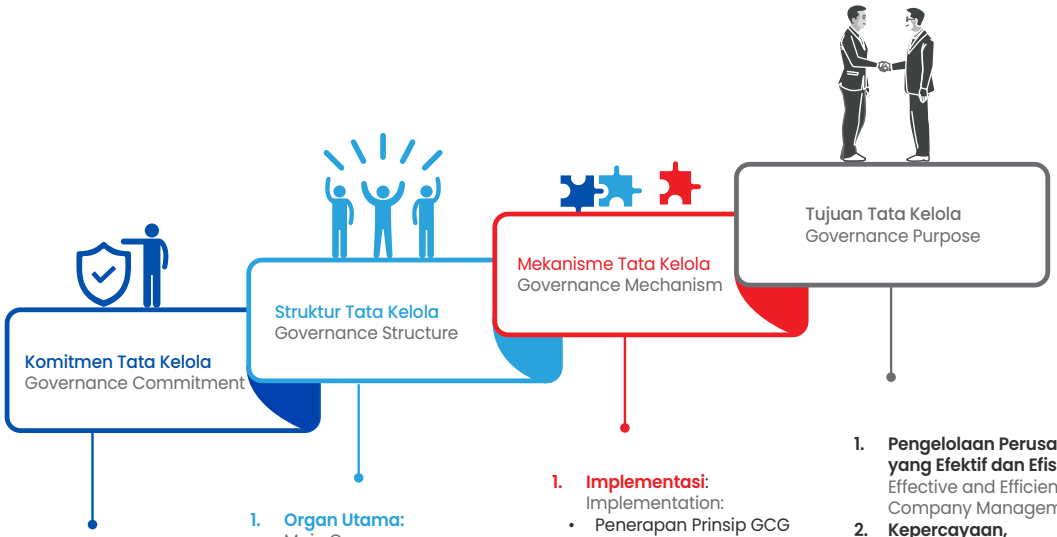
1. Commitment
   In implementing these GCG principles, all Jamkrindo employees are committed to submitting to and complying with all applicable laws and regulations, as well as those that are generally accepted. Management support plays a major role in determining the direction and objectives of GCG implementation at Jamkrindo. In practice, Jamkrindo Management serves as an example for employees to continue to be committed to implementing sustainable GCG. Jamkrindo will implement GCG principles in every business process and make improvements to GCG supporting tools.

2. System
   In supporting the ongoing GCG commitment at Jamkrindo, it is necessary to have a company operational system that can work effectively and efficiently through compliance with applicable laws, an adequate internal control system and good risk management and the implementation of an effective violation reporting system.

3. Culture
   Jamkrindo's cultural values are the foundation for Company Individuals in working to be clearer and more structured. In the context of implementing Jamkrindo's GCG, all Jamkrindo employees are committed to implementing corporate cultural values that are aligned with GCG principles.

The objective of GCG implementation by Jamkrindo is to support Jamkrindo's Vision, namely to become a "Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development". In addition, the implementation of GCG is carried out by the Company to support Jamkrindo's mission, which is to increase the financial accessibility of UMKMK through the provision of innovative, competitive guarantees with professional, effective and efficient services in a sustainable manner.

Therefore, the Company can provide value to stakeholders and build a good corporate image (brand image) and corporate reputation as well as a benchmark for other similar companies as explained below:



1. **Visi dan Misi**
   Vision and Mission
2. **Nilai-nilai Budaya Perusahaan**
   Cultural Values of the Company
3. **Pedoman Tata Kelola**
   Governance Guidelines
4. **Pedoman Perilaku**
   Code of Conduct
5. ***Charter:***
   Charter:
   - Internal Audit *Charter*
   - Internal Audit Charter
   - Komite Audit *Charter*
   - Audit Committee Charter
   - Piagam Komite Pemantau Risiko
   - Risk Monitoring Committee Charter
   - Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi
   - Supervisory and Directors Board guidelines
   - Kebijakan Gratifikasi
   - Gratification Policy
   - Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
   - Violation Reporting System Guidelines
   - Sistem dan Prosedur
   - System and Procedures
   - Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
   - Nomination and Remuneration Committee Charter
   - Piagam Tata Kelola Terintegrasi
   - Integrated Governance Charter

1. **Organ Utama:**
   Main Organs:
   - Rapat Pembahasan Bersama Dewan Komisaris Direksi
   - Joint Meeting between the Board of Supervisory and Board of Directors
2. **Organ Pendukung:**
   Supporting Organs:
   - Komite Audit
   - Audit Committee
   - Komite Pemantau Risiko
   - Risk Monitoring Committee
   - Komite Nominasi dan Remunerasi
   - Nomination and Remuneration Committee
   - Sekretaris Dewan Komisaris
   - Supervisory Board Secretary
   - Sekretaris Perusahaan
   - Corporate Secretary
   - Satuan Pengawasan Internal Perusahaan
   - Company Internal Control Audit Unit Perusahaan
   - Komite Tata Kelola Terintegrasi
   - Integrated Governance Committee

1. **Implementasi:**
   Implementation:
   - Penerapan Prinsip GCG pada kegiatan usaha perusahaan
   - The implementation of GCG Principles in the Company's business activities
2. **Evaluasi:**
   Evaluation:
   - Monitoring Implementasi Tata Kelola Perusahaan
   - Monitoring the Implementation of Company Governance
   - Evaluasi Kinerja Perusahaan
   - Evaluating Company's Performance
   - Evaluasi Rencana Bisnis Perusahaan
   - Evaluating Company's Business Plan
3. **Pemutakhiran:**
   Update:
   - Penyempurnaan Perangkat Pendukung Tata Kelola Perusahaan
   - Improvement of Corporate Governance Support Tools

1. **Pengelolaan Perusahaan yang Efektif dan Efisien**
   Effective and Efficient Company Management
2. **Kepercayaan, Image, dan Reputasi Perusahaan yang Lebih Baik**
   A Better Trust, Image, and Reputation of the Company
3. **Menjadi *Benchmark***
   Become a Benchmark



Rekam Jejak Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Track Record of Development in the Implementation of Good Corporate Governance

2005

Penyusunan | Preparation
1. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan
   Preparation of Corporate Governance Guidelines
   a. Pedoman Perilaku
      Code of Conduct
   b. Pedoman Dewan Pengawas dan Direksi (*Board Manual*)
      Board of Supervisory and Board of Directors Guidelines (Board Manual
   c. Kebijakan Gratifikasi
      Gratification Policy
   d. Pedoman Tata Tertib Rapat
      Meeting Rules of Conduct
   e. Pengendalian Internal Perusahaan
      Company Internal Control
2. Sistem dan Prosedur Berbasis Risiko
   Risk-Based Systems and Procedures

2010

Penyusunan | Preparation
2. *Blueprint* Manajemen Risiko
   Risk Management Blueprint

2011

Penyempurnaan | Refinement
1. Sistem dan Prosedur Berbasis Risiko
   Risk-Based Systems and Procedures

Pembentukan | Establishment
2. Manajemen Risiko
   Risk Management
3. *Charter* (Komite Audit dan Komite Dewan Pengawas)
   Charter (Audit Committee)

2012

Penyempurnaan | Refinement
1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
   Corporate Governance Guidelines
   a. Kebijakan Gratifikasi
      Code of Conduct
   b. Pedoman Tata Tertib Rapat
      Guidelines of Meeting Rules of Conduct
   c. Sistem Pelaporan Pelanggaran
      Whistleblowing System
   d. Pengendalian Internal Perusahaan
      Company Internal Control
2. Pedoman Perilaku
   Code of Conduct
3. Pedoman Dewan Pengawas dan Direksi (*Board Manual*)
   Board of Supervisory and Board of Directors Guidelines (Board Manual)

Pembuatan | Making
1. Rencana Strategis Pengembangan Teknologi Informasi (ITSP)
   Information Technology Development Strategic (ITSP) Plan

2013

Penyempurnaan | Refinement
1. Pedoman Tata Tertib Rapat
   Guidelines of Meeting Rules
2. Pedoman Penyusunan Sistem Operasi Prosedur
   Guidelines for System Operation Procedures Preparation of Conduct

2014

Penyusunan | Preparation
1. Pedoman Internal Audit Berbasis Risiko (Risk Based Internal Audit)
   Risk-Based Internal Audit Guidelines (Risk Based Internal Audit)

Penyempurnaan | Refinemen
1. Pedoman Perilaku
   Code of Conduct
2. Kebijakan Gratifikasi
   Gratification Policy
3. Sistem Pelaporan Pelanggaran
   Whistleblowing System

2015

Penyempurnaan | Refinement
1. Pedoman sistem Pengendalian Internal Perusahaan
   Guidelines for the Company's Internal Control System

2016

1. Review Pengendalian Internal oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Partner
   Review of Internal Control by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners
2. Penyempurnaan Risk Based Internal Audit (RBIA).
   Refinement of Risk- Based Internal Audit (RBIA)

2017

Pelaksanaan Self Assessment sebagai tindak lanjut Reviu Pengendalian Internal oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan
Implementation of Self Assessment as a follow up to the Internal Control Review by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners

2018

Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran
Improvement of Management Guidelines of Whistleblowing System

2019

1. Pemutakhiran website WBS melalui portal wbs.jamkrindo.co.id
   WBS website updates through the portal wbs.jamkrindo.co.id
2. Perbaikan kualitas SOP proses bisnis
   Improvement of the quality of business process SOPs
3. Penyusunan KPI telah tersistematis melalui portal PMS
   Preparation of KPIs has been systematized via the PMS portal
4. Perusahaan telah melaksanakan pemetaan kebutuhan kompetensi dan Analisa kebutuhan pelatihan (*training need analysis*) yang memadai melalui edaran kuesioner yang diberikan kepada seluruh karyawan terkait minat kompetensi yang ingin dikembangkan oleh karyawan
   The Company has carried out a mapping of competency needs and adequate training needs analysis through a questionnaire distributed to all employees related to the competency interests that employees want to develop

2020

Perubahan status hukum dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT), serta pembentukan Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan di mana Jamkrindo menjadi salah satu anggota
Changes in legal status from a Public Company (PERUM) to a Limited Liability Company (PT), as well as the establishment of an Insurance and Guarantee BUMN Holding in which Jamkrindo is a member

2021

Perusahaan mengembangkan GCG melalui Sosialisasi Penerapan *Four Eyes Principle*
The Company develops GCG through the Socialization of the Four Eyes Principle Implementation

2022

Penyempurnaan/Refreshment Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor: 01/SKB/1/XI/2022 – KEP08/DK-Jamkrindo/XI/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Piagam Audit Internal; Ketetapan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia nomor: 01/KD/1/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi; Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia nomor : 13/Per-Dir/1/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Kebijakan Audit Internal; Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia nomor: 48/Per-Dir/4/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat
Refinement/Refreshment of the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia Number: 01/SKB/1/XI/2022 - KEP08/DK-Jamkrindo/XI/2022 dated November 30, 2022 concerning the Internal Audit Charter; Decree of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia number: 01/KD/1/XII/2022 dated December 21, 2022 concerning the Organizational Structure; Regulation of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia number: 13/Per-Dir/1/I/2022 dated January 31, 2022 concerning Internal Audit Policy; PT Jaminan Kredit Indonesia Board of Directors Regulation number: 48/Per-Dir/4/XII/2022 dated December 26, 2022 concerning Provisions on the Obligation to Submit State Organizer Asset Reports (LHKPN) for Officials

2023

Penyempurnaan/Refreshment Ketetapan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor: 04/KD/1/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Audit Internal; Ketetapan Direksi nomor: 01/KD/5//VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Struktur Organisasi; Peraturan Direksi nomor: 09/Per-Dir/5/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan; Surat Edaran Direksi nomor: 34/SE/1/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Prosedur Audit Internal;
Refinement/Refreshment of the Decree of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia Number: 04/KD/1/XII/2023 dated December 29, 2023 regarding Internal Audit Charter; Decree of the Board of Directors number: 01/KD/5/VI/2023 dated June 05, 2023 regarding Organizational Structure; Decree of the Board of Directors number: 09/Per-Dir/5/III/2023 dated March 30, 2023 regarding Delegation of Administrative Authority and Policies; Circular Letter of the Board of Directors number: 34/SE/1/XII/2023 dated December 29, 2023 regarding Internal Audit Procedures;

PENINGKATAN KUALITAS
QUALITY IMPROVEMENT

Perkembangan Penerapaan GCG di Tahun 2023

Praktik GCG terus menerus ditingkatkan di Jamkrindo, melalui *monitoring* dari SPI dan Divisi MSDM atas implementasi *Code of Conduct* (CoC). Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan *fraud* di lingkungan Perusahaan, maka akan diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2023, pemantauan atas penerapan praktik GCG pada Jamkrindo diantaranya:

1. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan *Assessment* atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2023 kepada Kementerian BUMN dan melalui Surat Nomor xxxxx tentang Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Jamkrindo tahun 2023;
2. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Assessment atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melalui Surat Nomor B.624/EKT/DIRUT/SPI/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Jamkrindo tahun 2023;
3. Assessment penerapan GCG untuk periode tahun ukur 2023 dilakukan secara *self Assesment* berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 133/SP/1/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.

Development of GCG Implementation in 2023

The practice of GCG are continuously being improved at Jamkrindo, through monitoring from SPI and the HRM Division on the implementation of the Code of Conduct (CoC). If a conflict of interest or positional abuse is discovered which results in fraud within the Company, it will be resolved and followed up in accordance with prevailing regulations. In 2023, monitoring of the implementation of GCG practices at Jamkrindo includes:

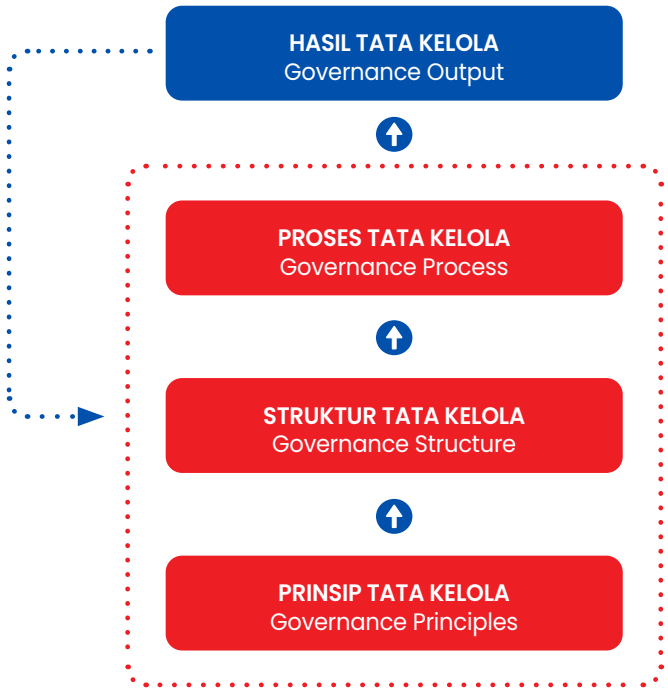
1. Submission of the Report on the 2023 Assessment Results on the Implementation of Good Corporate Governance to the Ministry of SOEs and via Letter Number xxxxx regarding Submission of the Report on the Implementation of Good Corporate Governance at Jamkrindo in 2023;
2. Submission of the Report on the 2023 Assessment Results on the Implementation of Good Corporate Governance to the Financial Services Authority and via Letter Number B.624/EKT/DIRUT/SPI/IV/2024 dated April 30, 2024 concerning Submission of the Report on the Implementation of Good Corporate Governance (Good Corporate Governance) of Jamkrindo in 2023;
3. Assessment of GCG implementation for the 2023 is carried out by self-assessment based on Work Order Letter Number 133/SP/1/XII/2023 dated December 12, 2023.

STRUKTUR DAN PROSES TATA KELOLA

Prinsip-prinsip Tata Kelola atau *Governance Principles* sebagaimana telah dijelaskan di atas, diterapkan di lingkup Perusahaan melalui 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Proses Tata Kelola atau *Governance Process*. Ke-2 aspek ini berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.

STRUCTURE AND GOVERNANCE PROCESSES

The Governance Principles as described above are implemented within the Company through 2 (two) main aspects, namely the Governance Structure and the Governance Process. These two aspects are continuous with one another, which in the end will reflect the expected Governance Outcome.



Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan Proses Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

Struktur Tata Kelola: Organ-organ GCG

Struktur Tata Kelola Perusahaan memiliki beberapa aspek utama yang berperan dalam menunjang penguatan kontrol dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan tujuan penerapan Prinsip Tata Kelola. Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan Pemegang Saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Perusahaan memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai inti serta budaya Perusahaan. Di samping itu, terdapat organ-organ pendukung mencakup Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.

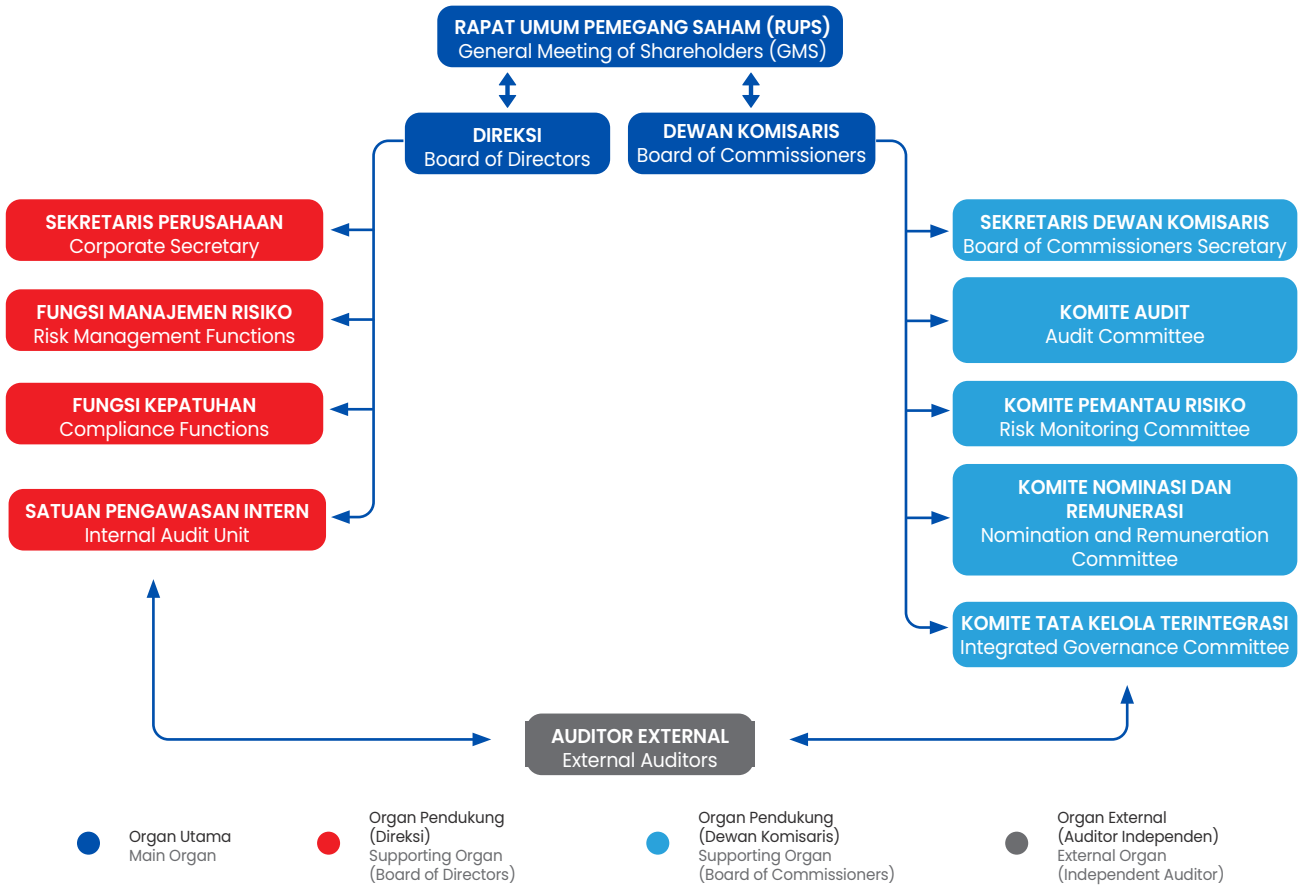
The Governance Structure is an organ owned by the Company. It is an organ that was established due to compliance with applicable laws and regulations, as well as an organ that was formed due to internal needs in order to improve the implementation of GCG. Meanwhile the Governance Process is a series of processes, habits, rules, and institutions that affect the management of the Company as a whole. The Governance process includes laws and regulations that apply to the Company, Standard Procedures, Charters, documents, until the rules are enacted that regulate the relationship between organs or devices.

GOVERNANCE STRUCTURE: GCG ORGANS

The Corporate Governance Structure has several main aspects that play a role in supporting the strengthening of control and management of the Company in accordance with the objectives of implementing the Governance Principles. In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the organizational infrastructure of a Limited Liability Company includes the interests of Shareholders as outlined through the General Meeting of Shareholders (GMS); Board of Directors with their duties to manage; as well as the Board of Commissioners whose function is to supervise. The management system of a Limited Liability Company adheres to a 2 (two) body model or two tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors with clear authorities and responsibilities according to their respective functions as mandated in laws and regulations and the Articles of Association.

The Company has these three main organs, namely the GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners and Directors have the responsibility to maintain long-term business continuity. The Board of Commissioners and the Board of Directors must have the same perception of the vision, mission and core values and culture of the Company. In addition, there are other supporting organs which include Internal Audit and Corporate Secretary.

Struktur Organ GCG Jamkrindo
Organ Structure of Jamkrindo's GCG



Dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemegang Saham dapat melakukan pengambilan keputusan penting berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan di Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perusahaan. Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kedudukan yang setara, Pemegang Saham akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Setelah keputusan diambil, maka RUPS akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

In the General Meeting of Shareholders (GMS) forum, Shareholders can make important decisions related to investments that have been invested in the Company. Decisions made at the GMS are based on the interests of the Company. Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and powers of the Board of Commissioners and Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and Laws and Regulations. With an equal position, Shareholders will carefully consider their decisions for the long term interests of the Company. After the decision is taken, the GMS will hand over all supervisory authority and implementation of the decision to the Board of Commissioners and the Board of Directors. This is in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RUPS tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perusahaan serta keputusan RUPS tersebut dilaksanakan secara optimal dan dicapai maksimal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut.

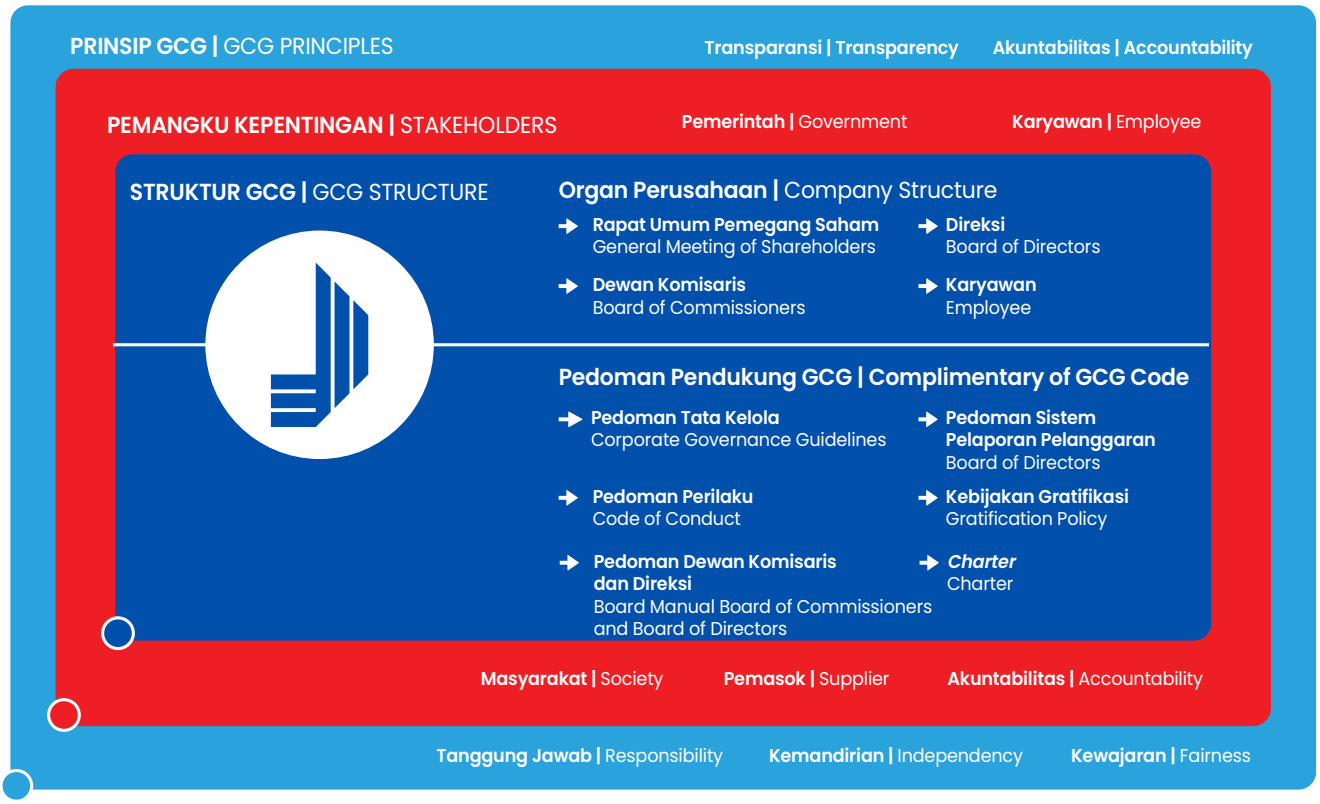
Proses dan Mekanisme GCG: Pedoman dan Perangkat Kebijakan

Agar Struktur Tata Kelola di atas dapat berjalan dengan baik dan memiliki batasan tanggung jawab masing-masing, diperlukan Proses Tata Kelola atau Mekanisme Tata Kelola seperti peraturan dan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan serangkaian aturan internal, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi Perusahaan berbasis pengelolaan yang akuntabel.

Management of the Company and the implementation of each decision of the GMS is carried out by the Board of Directors. The Board of Commissioners then supervises and provides advice to ensure that the Company's objectives and the resolutions of the GMS are optimally implemented and achieved. With such large duties and responsibilities in maintaining the sustainability of the Company, the Board of Commissioners is assisted by the Supporting Committee while the Board of Directors is assisted by work units related to the governance mechanism.

GCG PROCESS AND MECHANISM: GUIDELINES AND POLICY TOOLS

In order for the above Governance Structure to work properly and have limits on their respective responsibilities, a Governance Process or Governance Mechanism is required, such as rules and regulations as previously described, and a series of internal rules, which are expected to create a corporate organizational environment that is based on accountable management.



Secara rinci, aspek perangkat kebijakan GCG yang telah tercatat dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai bentuk ketaatan hukum dan komitmen dalam pelaksanaan GCG, meliputi:

In detail, aspects of the GCG policy tools that have been recorded and approved by the authorities as a form of legal compliance and commitment to GCG implementation include:

Perangkat Kebijakan Policy Toolkit	**Penetapan dan/atau Pembaruan** Settlement and/or Renewal
Anggaran Dasar Perusahaan The Company's Articles of Association	Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia No. 10 tanggal 08 Maret 2021 Statement of the Shareholders' Resolution of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 10th of March 8, 2021
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Guidelines for Good Corporate Governance	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 01/SKB/1/XII/2020–KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 01/SKB/1/ XII/2020–KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 December 30, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance
Pedoman Perilaku Code of Conduct	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 02/SKB/1/XII/2020–KEP-09/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 02/SKB/1/ XII/2020–KEP-09/DK-Jamkrindo/XII/2020 December 30, 2020 concerning Code of Conduct
Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Manual	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 03/SKB/1/XII/2020–KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 03/SKB/1/ XII/2020–KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 December 30, 2020 concerning Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual)
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Telah disahkan oleh Dewan Komisaris PT Jamkrindo pada tanggal 30 Desember 2020 It has been approved by the Board of Commissioners of PT Jamkrindo on December 30, 2020
Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha Investment and Business Risk Committee Charter	Telah disahkan oleh Dewan Komisaris PT Jamkrindo pada tanggal 30 Maret 2021 It has been approved by the Board of Commissioners of PT Jamkrindo on March 30, 2021
Piagam Audit Internal Internal Audit Charter	Ketetapan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia nomor: 04/KD/1/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Decree of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia number: 04/KD/1/XII/2023 dated December 29, 2023 concerning the Internal Audit Charter (Internal Audit Charter)
Kode Etik Satuan Pengawas Intern Internal Supervisory Unit Code of Conduct	Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 34/Per-Dir/1/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kebijakan Audit Internal PT Jamkrindo's Board of Directors Regulation No. 34/Per-Dir/1/XII/2023 dated December 29, 2023 concerning Internal Audit Policy
Pedoman Strategis Manajemen Risiko Risk Management Strategic Guidelines	Disahkan melalui Peraturan Direksi PT Jamkrindo No. 40/Per-Dir/5/XI/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pedoman Strategis Manajemen Risiko Ratified through the Regulation of the Board of Directors of PT Jamkrindo No. 40/Per-Dir/5/XI/2022 dated November 30, 2022 concerning Risk Management Strategic Guidelines
Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Guidelines for Reporting on the Implementation of Risk Management	Disahkan melalui Peraturan Direksi PT Jamkrindo No. 53/Per-Dir/5/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Ratified through the Regulation of the Board of Directors of PT Jamkrindo No. 53/Per-Dir/5/XII/2020 dated December 30, 2020
Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Policy Guidelines	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi PT Jamkrindo No. 42/Per-Dir/4/XI/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Updated and ratified through the Regulation of the Board of Directors of PT Jamkrindo No. 42/Per-Dir/4/ XI/2022 dated November 30, 2022 concerning Policy Guidelines for the Procurement of Goods and Services
Pedoman Kebijakan Gratifikasi Gratification Policy Guidelines	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi PT Jamkrindo No. 18/Per-Dir/4/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Amended and ratified through the Regulation of the Board of Directors of PT Jamkrindo No. 18/PerDir/4/XII/2020 December 30, 2020 concerning Guidelines for Gratification Control

Perangkat Kebijakan Policy Toolkit	Penetapan dan/atau Pembaruan Settlement and/or Renewal
Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Guidelines for Management of Violation Reporting Systems (Whistleblowing System)	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 31/Per-Dir/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang selanjutnyadiperbaharui kembali dengan Peraturan Direksi Nomor 35/Per-Dir/4/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Terintegrasi Amended and ratified through the Regulation of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 31/Per-Dir/1/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines for Whistleblowing Systems, which was subsequently updated with Directors' Regulation Number 35/Per-Dir/4/XII/2023 dated December 29, 2023 concerning Integrated Whistle Blowing System Policy
Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Guidelines for Submission of State Officials Wealth Reports	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 24/Per-Dir/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 Amended and ratified through Regulation of the Directors of Public Companies (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 24/Per-Dir/VI/2017 dated June 14, 2017

Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Jamkrindo memiliki komitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan, serta menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional di lingkungan Perusahaan. Terkait dengan usaha penerapan GCG dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, maka salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan GCG adalah melalui sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Perusahaan memiliki Pedoman sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) Terintegrasi "IFG Integritas" dengan Diterbitkan Ketentuan Direksi Nomor 35/Per-Dir/4/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Terintegrasi.

Pedoman WBST tersebut dilakukan sosialisasi setiap tahun kepada Karyawan bersamaan dengan kegiatan Pembahasan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Strategi *Anti Fraud*, Gratifikasi, yaitu:

DISSEMINATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

Jamkrindo is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) consistently and continuously, and making GCG principles the basis for operations within the Company. In relation to efforts to implement GCG and including eradicating corruption, bribery and other fraudulent practices, one of the most effective ways to prevent and combat practices that are contrary to GCG is through a Whistleblowing System.

The Company establishes the Guidelines for an Integrated Whistleblowing System "IFG Integritas" with the issuance of Board of Directors Regulation Number 35/Per-Dir/4/XII/2023 dated December 29, 2023 concerning the Integrated Whistleblowing System Policy.

The WBS guidelines are disseminated to employees in conjunction with the Discussion of the Anti-Bribery Management System, Anti-Fraud Strategy, Gratification & WBS, namely:

No	Tempat Sosialisasi Place of Dissemination	Tanggal Sosialisasi Date of Dissemination	Tim Pelaksana Committee
1	*Video Conference* melalui *Zoom Meeting* Zoom Meeting Video Conference	15 Mei 2023 May 15, 2023	Satuan Pengawasan Intern, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan Internal Supervisory Unit, Risk Management, and Compliance Division



ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Sebagai wujud komitmen penerapan prinsip GCG, Jamkrindo melaksanakan *assessment* atau penilaian atas penerapan GCG di lingkup Perusahaan. *Assessment* dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu melalui *self assessment* atau evaluasi yang dilakukan oleh tim internal Perusahaan, dan *assessment* atau penilaian yang dilakukan oleh pihak independen.

As a form of commitment to implementing GCG principles, Jamkrindo carries out an assessment of the implementation of GCG within the Company. The assessment is carried out using 2 (two) models, namely through a self-assessment or evaluation carried out by the Company's internal team, and an assessment carried out by an independent party.

Hasil *assessment* diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan dan perbaikan penerapan praktik GCG di Jamkrindo. Selanjutnya penerapan praktik GCG tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dalam bentuk trend kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), dan citra Perusahaan yang baik (*good corporate* image), serta kepercayaan stakeholders (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap Jamkrindo.

The results of the assessment are expected to be the basis for increasing and improving the implementation of GCG practices at Jamkrindo. Furthermore, the implementation of GCG practices is also expected to provide benefits to encourage transparent, professional, and efficient management of the Company so as to increase the value of the Company in the form of high corporate performance trends and good corporate image, as well as stakeholder trust (service users, employees, and society as a whole) to Jamkrindo.

Dasar pelaksanaan penilaian/evaluasi atas penerapan GCG pada Jamkrindo mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Dalam melakukan *self assessment* atas penerapan GCG untuk periode tahun 2023 Jamkrindo sesuai dengan Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

The basis for the assessment/evaluation of the implementation of GCG at Jamkrindo refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. In carrying out a self-assessment on the implementation of GCG for the 2023 period, Jamkrindo is in accordance with the Assessment and Evaluation Indicators/ Parameters for the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

6 (enam) Aspek *Assessment* GCG
(sesuai dengan Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.)
6 (six) GCG Assessment Aspects
(in accordance with the Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs)

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	**Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal** Commitment to Sustainable Shareholders and GMS/ Capital Owners	**Dewan Komisaris/Dewan Pengawas** Board of Commissioners/ Board of Supervisory
Direksi Board of Directors	**Pengungkapan Informasi dan Transparansi** Information Disclosure and Transparency	**Aspek Lainnya** Other Aspects

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Board of Supervisory
Direksi Board of Directors	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	Aspek Lainnya Other Aspects

Hasil penilaian melalui metode ini menggunakan predikat dengan rentang skor sebagai berikut.

The results of the assessment through this method use predicates with the following score ranges



Pengukuran dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2022

MEASUREMENT AND ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE FOR THE 2022 FISCAL YEAR

Penilaian juga dilakukan pada tahun buku 2023 dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG Perusahaan. Proses penilaian dilakukan secara independen dengan menggunakan pihak ketiga (konsultan).

An assessment is also carried out for the 2023 fiscal year with the aim of providing recommendations for continuous improvement of the implementation of the Company's GCG. The assessment process is carried out independently using a third party (consultant).

Assessor/Penilai	:	*Self Assessment*
Metode Penilaian Assessment Method	:	Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 Indicators/Parameters for Assessment of the Implementation of GCG SK16/S.MBU/2012
Tahun Buku Penerapan Year of Implementation	:	1 Januari - 31 Desember 2023 January 1 – December 31, 2023
Periode Pengukuran Assessment Period	:	2 Januari 2024 – 30 Maret 2024 January 2, 2023 – March 30, 2024

Hasil penilaian penerapan GCG tahun 2023 mencapai total skor sebesar 96,268 dengan kualifikasi "Sangat Baik", yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The results of the 2023 GCG implementation assessment achieved a total score of 96.268 with the qualification "Very Good", which can be seen in the following table.

	Aspek Aspects	Bobot Weight	2023	
			Nilai Value	Pencapaian Achievement (%)
		1	2	(2/1 x 100)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance	7,000	**6,743**	**96,330%**
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,000	**8,794**	**97,714%**
III	Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Board of Supervisors/Commissioners	35,000	**33,673**	**96,208%**
IV	Direksi Board of Directors	35,000	**33,803**	**96,581%**
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,000	**8,879**	**98,656%**
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	**4,375**	**87,50%**
Skor Keseluruhan Overall Score		100,000	96,268	
Peringkat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Predicate			"SANGAT BAIK" "VERY GOOD"	

Klasifikasi Kualitas Penerapan *Assessment*
Classification of the Quality of the Implementation of the Assessment

Nilai di atas 85 Score above 85	:	Sangat Baik VERY GOOD
75 < Nilai ≤ 85 75 < Score ≤ 85	:	Baik GOOD
60 < Nilai ≤ 75 60 < Score ≤ 75	:	Cukup Baik MODERATE
50 < Nilai ≤ 60 50 < Score ≤ 60	:	Kurang Baik NOT GOOD
Nilai ≤ 50 Score ≤ 50	:	Tidak Baik BAD

Hasil *Area of Improvement* (AOI) atau rekomendasi atas *self* assessment penerapan GCG yang dilakukan untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The results of the Area of Improvement (AOI) or recommendations for the GCG implementation self-assessment conducted for 2023 can be seen in the table below

No	Hasil Analisa Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2023 Results of GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2023 Fiscal Year	Usulan Rekomendasi Recommendation
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
1	Perusahaan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG *Code*) melalui Keputusan Bersama Nomor: 01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Namun, Pedoman tersebut belum dilakukan pemutakhiran atas adanya Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-02/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara The Company establishes Good Corporate Governance Guidelines (GCG Code) through Joint Decree Number: 01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Corporate Governance Good. However, these guidelines have not been updated with the Minister of SOEs Regulation number: PER-02/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Minister of BUMN Regulation number: PER-03/MBU /03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises	Direkomendasikan agar Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) Nomor: 01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dilakukan harmonisasi perubahan ketentuan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-02/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. It is recommended that the Good Corporate Governance Guidelines (GCG Code) Number: 01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 be harmonized with changes to the provisions in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number: PER-02/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of SOEs number: PER-03/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources State-Owned Enterprises
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BOARD OF COMMISSIONERS/BOARD OF SUPERVIORS	
1	Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi melalui Keputusan Dewan Pengawas nomor: KEP-05/DP-Jamkrindo/III/2018 tanggal Maret 2018 tentang Kebijakan Dewan Pengawas Terkait Mekanisme Pemberian Persetujuan/Tanggapan/Pendapat terhadap Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Namun, atas kebijakan tersebut belum dilakukan harmonisasi dikarenakan masih menggunakan nama "Perusahaan Umum (Perum)" sebagaimana Akte nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 perihal Akte Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Jamkrindo yang seharusnya menjadi "Perseroan Terbatas (PT)" serta perubahan nomenklatur "Dewan Pengawas" yang seharusnya menjadi "Dewan Komisaris" semenjak perubahan Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (PT). The Board of Commissioners establishes a policy regarding the mechanism for providing approval/response/opinions to the RJPP draft submitted by the Board of Directors through Supervisory Board Decree number: KEP-05/DP-Jamkrindo/III/2018 dated March 2018 concerning Supervisory Board Policy Regarding the Mechanism for Providing Approval/Response/Opinion on the Draft Company Long Term Plan (RJPP) and Company Work Plan and Budget (RKAP). However, this policy has not yet been harmonized because it still uses the name "General Company (Perum)" as per Deed number 25 dated February 24, 2020 regarding the Deed of Establishment of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as Jamkrindo which should be a "Limited Liability Company (PT)" as well as changes in the nomenclature of the "Supervisory Board" which should become "Board of Commissioners" since the Company changed to a Limited Liability Company (PT).	Direkomendasikan agar Perusahaan melakukan inventarisir terkait kebijakan yang dikelola oleh Dewan Komisaris untuk dilakukan harmonisasi perubahan ketentuan menyesuaikan dengan perubahan status Perusahaan menjadi PT (Perseroan Terbatas) dan nomenklatur yang berlaku. It is recommended that the Company carry out an inventory of the policies managed by the Board of Commissioners to harmonize changes to provisions in accordance with the change in the Company's status to PT (Limited Liability Company) and the applicable nomenclature.

Beberapa butir rekomendasi yang menjadi *Area of Improvement* penerapan GCG di Perusahaan, sebagaimana yang terlampir pada tabel di atas, meskipun ada beberapa butir yang perlu diperhatikan atau ditindaklanjuti lebih lanjut, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa, penerapan GCG di Perusahaan telah diterapkan atau berjalan dengan baik, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik Secara Berkelanjutan
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 6,743 dari bobot sebesar 7,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 96,330% Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 8,794 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 97,714%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".
3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 33,673 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 96,208%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".
4. Aspek Direksi
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 33,803 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 96,581%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 8,879 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 98,656%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".
6. Aspek Lainnya
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 4,375 dari bobot sebesar 5,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 87,500%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "SANGAT BAIK".

Tren Perkembangan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sejak dilakukan *Assessment* GCG pada tahun 2015 tercatat perkembangan hasil atau skor *assessment* GCG selalu menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai rekomendasi yang muncul. *Assessment* juga dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik

Although there are several points that need further attention or follow-up, some of the recommendation points that become Areas of Improvement of GCG implementation in the Company, as attached in the table above, in general it can be concluded that GCG implementation in the Company has been implemented or is running well , as described below:

1. Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance
   Based on the results of the assessment that was carried out on this aspect, the score achieved was 6.743 out of a weight of 7.000 or equivalent to an achievement percentage of 98.912%. This shows that the commitment to implementing GCG continuously in the Company has gone "VERY GOOD".
2. Aspects of Shareholders and GMS/Capital Owners
   Based on the results of the assessment that was carried out on this aspect, the score achieved was 8.794 out of a weight of 9.000 or equivalent to an achievement percentage of 97.714%. This shows that the commitment to implementing GCG in a sustainable manner in the Company has been "VERY GOOD".
3. Aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board
   Based on the results of the assessment that was carried out on this aspect, the score achieved was 33.673 out of a weight of 35.000 or equivalent to an achievement percentage of 96.208%. This shows that the commitment to implementing GCG in a sustainable manner in the Company has been "VERY GOOD".
4. Aspects of the Board of Directors
   Based on the results of the assessment that was carried out on this aspect, the score achieved was 33.803 out of a weight of 35.000 or equivalent to an achievement percentage of 96.581%. This shows that the commitment to implementing GCG in a sustainable manner in the Company has been "VERY GOOD".
5. Information Disclosure and Transparency Aspects
   Based on the results of the assessment that was carried out on this aspect, the score achieved was 8.879 out of a weight of 9.000 or equivalent to an achievement percentage of 98.656%. This shows that the commitment to implementing GCG in a sustainable manner in the Company has been "VERY GOOD".
6. Other Aspects
   Based on the results of the assessment that was carried out on this aspect, the score achieved was 4.375 out of a weight of 5.000 or equivalent to an achievement percentage of 87.500%. This shows that the commitment to implementing GCG in a sustainable manner in the Company has been "VERY GOOD".

DEVELOPMENT TREND OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION ASSESSMENT

Since the GCG Assessment was carried out in 2015, it has been noted that the progress of the GCG assessment results or scores has always shown an increase. This reflects the Company's commitment to implementing GCG principles according to the recommendations. The assessment is also linked to applicable regulations and best practices in

(*best practice*) dalam penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil *assessment* menjadi masukan yang sangat penting bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

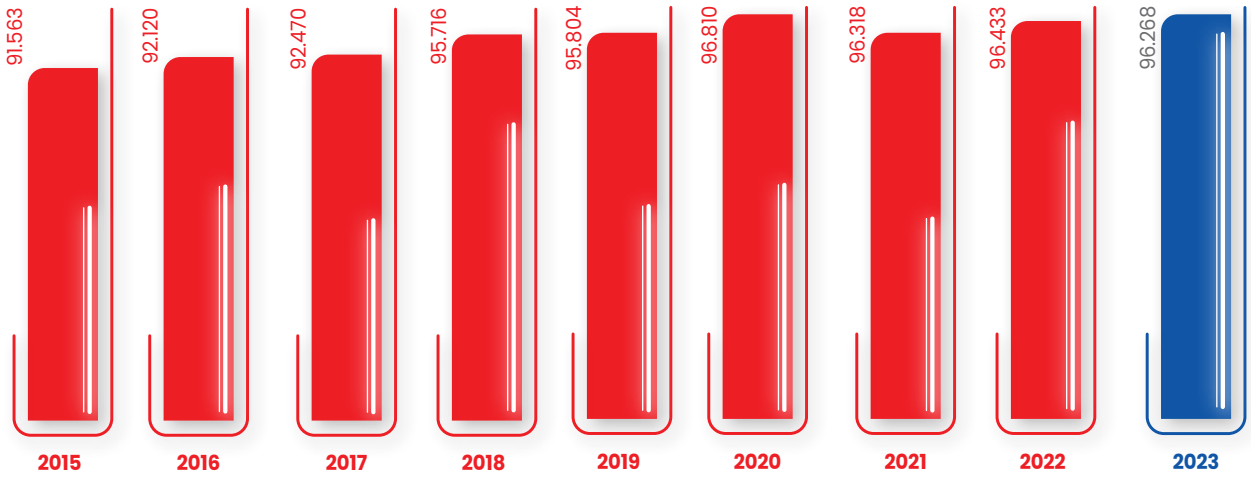
implementing GCG, so that areas that require improvement can be identified. The results of the assessment are very important input for the Company in making decisions in the future.

Sekilas riwayat proses penilaian penerapan GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

A brief history of the Company's GCG implementation assessment process is as follows:

Pengukuran GCG GCG Measurement	**Tahun Buku** Fiscal Year	**Asssessor**	**Skor** Score **(%)**	**Kategori** Category
Self Assessment	2023	Tim *Self Assessment* Jamkrindo Jamkrindo Self Assessment Team	96, 268	Sangat Baik Very Good
Assessment	2022	PT Cita Negeri Amanah	96,433	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2021	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self Assessment Team	96,316	Sangat Baik Very Good
Assessment	2020	PT Cita Negeri Amanah	96,810	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2019	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self Assessment Team	95,804	Sangat Baik Very Good
Assessment	2018	PT Citra Negeri Amanah	95,716	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2017	Tim *Self Assessment* Jamkrindo Jamkrindo Self Assessment Team	92,470	Sangat Baik Very Good
Assessment	2016	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Public Accountant Office Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	92,120	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2015	Tim *Self Assesment* Jamkrindo Jamkrindo Self Assessment Team	91,563	Sangat Baik Very Good

Tren Perkembangan Skor *Assessment* GCG Jamkrindo, 2015-2023
Jamkrindo GCG Assessment Score Development



RENCANA PENGEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2024

CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION DEVELOPMENT PLAN FOR 2024

Jamkrindo berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan penerapan GCG. Di tahun 2024, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, Jamkrindo telah menyusun rencana pengembangan GCG melalui *review* dan *self assessment* GCG yang akan dilakukan oleh internal Perusahaan.

Jamkrindo is committed to continuously evaluating and improving GCG implementation. In 2023, as in previous years, Jamkrindo has developed a GCG development plan through GCG reviews and self-assessments that will be carried out internally by the Company.

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Pemegang Saham dan Informasi Terkait Entitas Induk dan Entitas Pemilik Akhir

Pada tahun 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui PP No 11 tahun 2020 yang telah diundangkan pada tanggal 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484.AH.OI.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

Kemudian pada tanggal 09 April 2020, berdasarkan Akta Pendirian PT Jamkrindo (Persero) mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 02 tanggal 09 April 2020 yang menjadikan bergantinya status dan nama Jamkrindo menjadi PT Jamkrindo.

Selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2021, terdapat perubahan akta No. 02 tanggal 09 April 2020 terkait penambahan modal dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 08 Maret 2021.

Dengan adanya akta tersebut, pemegang saham PT Jamkrindo berubah menjadi 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.365.160 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah); dan 10.638.732 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.638.732.000.000 (sepuluh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Hak, Kewajiban dan Wewenang Pemegang Saham

Menurut Anggaran Dasar Perusahaan, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A

SHAREHOLDERS AND INFORMATION RELATED TO PARENT ENTITIES AND ULTIMATE OWNER ENTITIES

In 2020, the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo officially changed the legal entity of the Indonesian Credit Guarantee Corporation or Perum Jamkrindo to become a Limited Liability Company through PP No. 11 of 2020 which was promulgated on February 17, 2020. This decision was strengthened through the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No. AHU-00011484.AH.OI.01 of 2020 concerning Ratification of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity Limited Liability Company PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) which was signed at the Ministry of SOEs Building, Jakarta on February 24, 2020.

Then, on April 9, 2020, based on the Deed of Establishment PT Jamkrindo (Persero) underwent a change with the issuance of the Deed of Statement of the Shareholders Resolution of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia regarding Amendments to the Articles of Association No. 02 April 9, 2020, which changed the status and name of Jamkrindo to PT Jamkrindo.

Furthermore, on March 8, 2021, there was a change in deed No. 02 dated April 9, 2020 regarding the addition of capital and the rearrangement of the Company's Articles of Association through the Deed of Statement of the Shareholders Resolution of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia concerning Amendments to the Articles of Association No. 10th of March 8, 2021.

With this deed, the shareholders of PT Jamkrindo changed to 1 (one) A series Dwiwarna share, with a total nominal value of IDR1,365,160 (one million three hundred sixty five thousand one hundred and sixty rupiah); and 10,638,732 (ten million six hundred thirty eight thousand seven hundred thirty two) B series shares, each share with a nominal value of IDR1,000,000 (one million rupiah), with a total nominal value of IDR10,638,732,000,000 (ten trillion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty two million rupiah).

Rights, Obligations and Authorities of Shareholders

According to the Company's Articles of Association, the Dwiwarna A series shares is a share that grant their holders the special rights stipulated in these Articles of Association and are exclusively owned by the Republic of Indonesia as Dwiwarna A Series Shareholders. The rights of Dwiwarna A

Dwiwarna. Hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah hak untuk menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
2. Persetujuan perubahan Permodalan;
3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
5. Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perusahaan;
6. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Persetujuan penggunaan laba;
10. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu;
11. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
12. Pengusulan agenda Rapat Umum Pemegang Saham;
13. Pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Kecuali Hak-hak istimewa sebagaimana di atas, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan hak tentang penggunaan laba.

RUPS dan Jenis-jenisnya

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Wewenang RUPS sebagai organ tertinggi Perusahaan dibatasi oleh Undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam rangka mekanisme utama perlindungan dan pelaksanaan hak-hak pemegang saham, maka pelaksanaan RUPS adalah hal yang esensial. Sebagai organ GCG yang menjadi wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Meski demikian, RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi.

Series Shareholders are the right to approve in the General Meeting of Shareholders (GMS) with the mechanism for the use of said rights in accordance with the provisions in the Articles of Association and laws and regulations, regarding the following matters:

1. Approval of amendments to the Articles of Association;
2. Approval of changes in Capital;
3. Approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Approval regarding merger, consolidation, acquisition, separation, and dissolution;
5. Request and access to Company data and documents;
6. Approval of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
7. Approval of the transfer of assets based on the Articles of Association requires approval from the General Meeting of Shareholders;
8. Approval regarding the participation and reduction of the percentage of equity participation in other companies which is based on the Articles of Association require the approval of the General Meeting of Shareholders;
9. Approval of the use of profits;
10. Approval regarding investment and long-term financing based on the Articles of Association is necessary;
11. Approval of the General Meeting of Shareholders;
12. Proposing the agenda for the General Meeting of Shareholders;
13. Proposing candidates for members of the Board of Directors and candidates for members of the Board of Commissioners.

Except for the special rights as above, B Series Shareholders have the same rights with regard to rights regarding the use of profits.

GMS and Its Types

The GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations. The authority of the GMS as the highest organ of the Company is limited by law as stated in Article 75 Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

By prioritizing GCG principles within the framework of the main mechanism for the protection and implementation of shareholder rights, the implementation of the GMS is essential. As a GCG organ that is a forum for shareholders to make decisions, the GMS has authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners. However, the GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and Directors.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya atau RUPS Luar Biasa.

Based on the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the GMS consists of the Annual GMS and Other GMS or Extraordinary GMS.

Jenis-jenis RUPS Types of GMS	
RUPS Tahunan yang diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. **Annual GMS** held to discuss the Company's annual report and annual calculations and carried out no later than 6 (six) months after the fiscal year.	**RUPS Lainnya/Luar Biasa** yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan. **Other/Extraordinary GMS** which can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners or Shareholders to determine matters that are not carried out at the Annual GMS

Selain kedua RUPS tersebut di atas, pemegang saham juga memiliki mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

In addition to the two GMS mentioned above, shareholders also have a Circular Decision mechanism, namely decision making by shareholders outside the GMS mechanism. Circular Decisions have the same legal force as GMS Resolutions, provided that all shareholders provide written approval of the proposals to be decided in terms of Circular Decisions. This is in accordance with Article 91 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Baik RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya memiliki wewenang tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum bagi pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap pengelolaan Perusahaan.

Both the Annual GMS and Other GMS have the highest authority in the Corporate Governance structure as well as being a forum for shareholders to exercise their rights and authority over the management of the Company.

Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2023

Di sepanjang tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan 2 kali RUPS, yaitu:

1. RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
2. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023

IMPLEMENTATION OF GMS THROUGHOUT 2023

Throughout 2023, the Company held 2 (two) GMS, namely:

1. GMS Ratification of Company Work Plan and Budget (RKAP)
2. GMS Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statement for the 2023 Fiscal Year

RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) GMS Ratification of Company Work Plan and Budget (RKAP)		
Hari/Tanggal Day/Date	:	Senin, 30 Januari 2023 Monday, January 30, 2023
Waktu Time	:	22.40 WIB s/d 23.24 WIB 22.40 to 23.24 Western Indonesian Time
Tempat Location	:	*Offline* : Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2 *Online* : *Video Conference Zoom* *Meeting* ID : 851 3077 0703 *Password* : RUPS 2023

RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) GMS Ratification of Company Work Plan and Budget (RKAP)		
Peserta yang Hadir Attendees	:	1. Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi Dan Dana Pensiun Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham seri A 2. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Pemegang Saham seri B 3. Direksi PT Jamkrindo 4. Dewan Komisaris PT Jamkrindo 1. Acting Assistant Deputy for Insurance Services and Pension Funds at the Ministry of SOEs as A Series Shareholder 2. President Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as B Series Shareholder 3. Board of Directors of PT Jamkrindo 4. Board of Commissioners of PT Jamkrindo
Pihak Independen yang Melakukan Perhitungan Suara Independent Parties Conducting Vote Counts	:	Tidak Ada None

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Surat PT Bahana PUI (Persero) No. B.293/EKT/DIRUT/RUPS/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2023. Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The results of the GMS resolution have been set forth in the Letter of PT Bahana PUI (Persero) No. B.293/EKT/DIRUT/RUPS/I/2023 dated January 30, 2023 concerning Ratification of PT Jaminan Kredit Indonesia's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023. All decisions at the GMS were carried out by deliberation and consensus. The results of the GMS decisions along with their implementation and follow-up by Company Management until the end of 2023 are as follows:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions	
Keputusan Mata Acara 1: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023	Agenda 1 Resolution: Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2022 including the Board of Commissioners' Work Plan and Budget for 2023
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Neraca) 2. Laporan Laba-Rugi Konsolidasian 3. Arus Kas Konsolidasian 4. Belanja Modal Konsolidasian	Follow-up on the Resolution 1. Consolidated Financial Statement (Balance Sheet) 2. Consolidated Income Statement 3. Consolidated Cash Flow 4. Consolidated Capital Expenditures
Keputusan Mata Acara 2: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023	Agenda 2 Resolution: Ratification of the 2023 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL).
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: 1. Program usaha Mikro Kecil (PUMK) Tahun 2023 2. Program Non PUMK Tahun 2023	Follow-up on the Resolution 1. Micro and Small Enterpreises Program (PUMK) in 2023 2. Non PUMK Program in 2023
Keputusan Mata Acara 3: Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023	**Agenda 3 Resolution:** Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators) between the Directors and Board of Commissioners and Shareholders in 2023
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Menetapkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia dengan Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini.	**Follow-up on the Resolution** Establish a Management Contract (Key Performance Indicators) between the Directors and Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia and the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2023 which refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/MBU/11/2020 dated November 12, 2020 concerning Management Contracts and The Annual Management Contract for the Directors of State-Owned Enterprises as attached is an inseparable part of the Minutes of this GMS.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions	
Keputusan Mata Acara 4: Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) ant:ara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2023	**Agenda 4 Resolution:** Determination of Management Contract (Key Performance Indicators) between the Board of Commissioners and Shareholders in 2023
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Menetapkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia dengan Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini.	**Follow-up on the Resolution** Establish a Management Contract (Key Performance/Indicators) between the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia and the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2023 which refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 in conjunction with Number PER-09/MBU /2012 concerning the Implementation of the Principles of Good Corporate Governance as attached which is an inseparable part of the Minutes of this GMS.

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 GMS on Approval of Annual Report and Ratification of Consolidated Financial Statement of Fiscal Year 2023		
Hari/Tanggal Day/Date	:	Selasa, 27 Juni 2023 Tuesday, June 27, 2023
Waktu Time	:	08.30 s/d 09.28 WIB 08.30 to 09.28 Western Indonesian Time
Tempat Location	:	Financial Hall, Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 2 Financial Hall, Graha CIMB Niaga Building 2nd Floor
Peserta yang Hadir Attendees	:	1. Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi Dan Dana Pensiun Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham seri A 2. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Pemegang Saham seri B 3. Direksi PT Jamkrindo 4. Dewan Komisaris PT Jamkrindo 1. Acting Assistant Deputy for Insurance Services and Pension Funds at the Ministry of SOEs as A Series ShareholderPresident Director of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as B Series Shareholder 2. Directors of PT Jamkrindo 3. Board of Commissioners of PT Jamkrindo
Pihak Independen yang Melakukan Perhitungan Suara Independent Parties Conducting Vote Counts	:	Tidak Ada None

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Surat Kementerian BUMN No. B.1368/EKT/DIRUT/RUPS/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku.

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023adalah sebagai berikut:

The results of the GMS Resolution have been stated in the SOE Ministry Letter No. B.1368/EKT/DIRUT/RUPS/VI/2023 dated June 27, 2023 concerning Approval of the Annual Report and Ratification of the Fiscal Year Consolidated Financial Statements.

All resolutions at the GMS are made by deliberation and consensus. The results of the GMS decisions along with their implementation and follow-up by Company Management until the end of 2023 are as follows:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022.	Agenda 1 Resolution: Approval of the Company's Annual Report including the Report on the Implementation of Social and Environmental Responsibility for the 2022 Fiscal Year and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the 2022 Fiscal Year.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan konsolidasian tahun buku 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sesuai laporannya Nomor 00559/2.1025/AU.1/05/0222-3/1/IV/2023 tanggal 06 April 2023 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Follow-up on the Resolution Approve the Annual Report regarding the condition and operations of the Company during the 2022 fiscal year, including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2022 fiscal year. Ratify the consolidated Company Financial Statement for the 2022 fiscal year ending December 31, 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan according to report Number 00559/2.1025/AU.1/05/0222-3/1/IV/2023 dated April 6, 2023 with an Unqualified Opinion on the consolidated financial position of the Company and Subsidiaries as of December 31, 2022, as well as their consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date in accordance with the Standards Financial Accounting in Indonesia as well as providing full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ending December 31, 2022, as long as these actions do not constitute criminal and/or violating applicable legal provisions and procedures, recorded in the Company's Financial Statement and not in conflict with the provisions of laws and regulations.
Keputusan Mata Acara 2: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Perseroan Tahun Buku 20212	Agenda 2 Resolution: Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company's Micro and Small Business Funding Program for the 2021 Fiscal Year
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Menyetujui Laporan Tahunan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sesuai laporannya Nomor 00782/2.1025/AU.2/09/0222-3/1/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, tercatat pada Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Follow-up on the Resolution Approve the Annual Report of the Company's Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2022 fiscal year and ratify the Financial Statement of the Company's Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2022 fiscal year which has been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan according to report Number 00782/ 2.1025/AU.2/09/0222-3/1/IV/2023 dated 28 April 2023 with the Unquaified Opinion, as well as granting repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Directors and Board The Commissioner for actions in managing and supervising the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 fiscal year, as long as these actions do not constitute criminal acts and/or violate applicable legal provisions and procedures, are recorded in the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) of the Company for the 2022 fiscal year, and does not conflict with the provisions of laws and regulations.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 3:
Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, serta Tantiem/ Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2022

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
1. Menetapkan tantiem/insentif kinerj/insentif khusus kinerja tahun buku 2022 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris, akan ditetapkan secara tersendiri
2. Wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun 2022, serta menetapkan gaji/ honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023, setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

Keputusan Mata Acara 4:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022 sebesar Rp1.279.834.944.864,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh empat jua sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Sebesar Rp959.876.208.648,- (Sembilan ratus lima puluh Sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagikan sebagai dividen tunai.
2. Dividen tunai yang diberikan kepada Pemegang Saham Seri B dapat dipertimbangkan untuk penguatan kapasitas keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dalam rangka penyelesaian penugasan Pemerintah kepada PT BPUI dan tetap menjaga akuntabilitas atas penggunaan dividen tunai tersebut.

Selisih sebesar laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dikurangi dividen tunai, dimasukkan sebagai cadangan.

Agenda 3 Resolution:
Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and Allowances for Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2023, as well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for Directors and Board of Commissioners for Performance for Fiscal Year 2022

Follow-up on the Resolution
1. Determine tantiem/performance incentives/special performance incentives for the 2022 fiscal year and salary/ honorarium along with facilities and allowances for the 2023 fiscal year for the Board of Directors and the Board of Commissioners, which will be determined separately
2. Authority and power to B Series Shareholders to determine the amount of bonuses/performance incentives/special incentives for performance in 2022, as well as determine salaries/ honorariums, allowances and facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2023, after first consulting with A Series Dwiwarna Shareholder

Agenda 4 Resolution:
Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year

Follow-up on the Resolution
Determining the use of profit for the current year attributable to the owner of the parent entity for the 2022 fiscal year amounting to IDR 1,279,834,944,864,- (one trillion two hundred seventy-nine billion eight hundred thirty-four and nine hundred forty-four thousand eight hundred and sixty-four rupiah) the details are as follows:

1. In the amount of IDR 959,876,208,648,- (Nine hundred fifty-nine billion eight hundred seventy-six million two hundred eight thousand six hundred and forty-eight rupiah) or 75% (seventy-five percent) of the profit for the year attributable to owners of the parent entity distributed as cash dividends.
2. Cash dividends given to B Series Shareholders can be considered to strengthen the financial capacity of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in the context of completing Government assignments to PT BPUI and maintaining accountability for the use of the cash dividends.

The difference in the amount of profit for the year attributable to the owners of the parent entity minus cash dividends is included as a reserve.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 5:
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Periode Tahun Buku 2023

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
1. Penetapan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan PUMK Tahun Buku 2023, akan ditetapkan secara tersendiri
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2023 dan Laporan TJSL, serta Laporan Keuangan PUMK dengan memperhatikan usulan/evaluasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP Pengganti, termasuk menetapkan besaran imbal jasa audit dan menetapkan kondisi serta penunjukannya, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun

Keputusan Mata Acara 6:
Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN RI

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor :

1. PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN;
2. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
3. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN;

Beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Agenda 5 Resolution:
Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company›s Consolidated Financial Statements and Financial Statement for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year Period

Follow-up on the Resolution
1. The appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company›s Consolidated Financial Statement for the 2023 Fiscal Year and the PUMK Financial Statement for the 2023 Fiscal Year, will be determined separately
2. Grant authority and power to B Series Shareholders to determine the KAP that will audit the 2023 Consolidated Financial Statement and TJSL Report, as well as the PUMK Financial Statement by taking into account the proposals/evaluations submitted by the Board of Commissioners and guided by the provisions of the laws and regulations applicable
3. Give authority to the Board of Commissioners to appoint a replacement KAP, including determining the amount of audit fees and determining conditions and appointment, if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason.

Agenda 6 Resolution:
Ratification of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia

Follow-up on the Resolution
Confirming the implementation of SOEs' Ministerial Regulation Number:
1. PER-01/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and TJSL Programs for SOEs;
2. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs;
3. PER-03/MBU/03/2023 concerning SOEs Organs and Human Resources;

And its future changes.

Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2022

Di sepanjang tahun 2022, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2021
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2022

IMPLEMENTATION OF GMS THROUGHOUT 2022

Throughout 2022, the Company held 2 (two) GMS, namely:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of PT Jaminan Kredit Indonesia for the 2021 Fiscal Year
2. Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for PT Jaminan Kredit Indonesia for 2022

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2021
GMS Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of PT Jaminan Kredit Indonesia for the 2021 Fiscal Year

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 2 November 2022 Wednesday, November 2, 2022
Waktu Time	:	Secara Sirkuler Circular
Tempat Location	:	Graha CIMB Niaga Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta, 12190 dan Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Graha CIMB Niaga 18th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta, 12190 and the Ministry of SOEs, Jalan Medan Merdeka

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2021 GMS Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of PT Jaminan Kredit Indonesia for the 2021 Fiscal Year		
Peserta yang Hadir Attendees	:	1. Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi Dan Dana Pensiun Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham seri A 2. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Pemegang Saham seri B 3. Direksi PT Jamkrindo 4. Dewan Komisaris PT Jamkrindo 1. Acting. Assistant Deputy for Insurance Services and Pension Funds of the Ministry of SOEs as A series Shareholder 2. President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as B series Shareholder 3. Board of Directors of PT Jamkrindo 4. Board of Commissioners of PT Jamkrindo
Pihak Independen yang Melakukan Perhitungan Suara Independent Parties Conducting Vote Counts	:	Tidak ada None

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Surat Kementerian BUMN No. SK-293/MBU/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Surat PT BPUI No. 32/BPUI/11/2022 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2021.

The results of the GMS resolution have been set forth in the Letter of the Ministry of SOEs No. SK-293/MBU/12/2022 dated December 22, 2022 and Letter of PT BPUI No. 32/BPUI/11/2022 concerning Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of PT Jaminan Kredit Indonesia for the 2021 Fiscal Year.

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

All resolutions in the GMS are made by deliberation for consensus. The GMS resolutions, along with their implementation and followup by the Company's Management until the end of 2022, are as follows:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions	
Keputusan Mata Acara 1: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021	**Agenda 1 Resolution:** Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year, as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2021. 1. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan konsolidasian tahun buku 2021 yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sesuai laporannya Nomor 01400/2.1025/AU.1/09/0222-2/1/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Follow-Up On The Resolution:** 1. Approve the Annual Report regarding the condition and operations of the Company during the 2021 financial year, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2021 fiscal year. 2. Ratify the Company's consolidated financial statements for the 2021 fiscal year ending December 31, 2021 which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners according to their report Number 01400/2.1025/ AU.1/09/0222-2/ 1/VII/2022 dated July 20, 2022 with a "presented fairly, in all material respects" opinion. The consolidated financial position of the Company and Subsidiaries as of December 31, 2021, as well as their consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date in accordance with the Standard Financial Accounting in Indonesia and provide full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the fiscal year ending on December 31, 2021, as long as these actions are not acts crime and/or violates the applicable legal provisions and procedures, recorded in the Company's Financial Statements and does not conflict with the provisions of laws and regulations

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 2: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Perseroan Tahun Buku 2021 **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Menyetujui Laporan Tahunan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sesuai laporannya Nomor 01405/2.1025/ AU.2/09/0222- 2/1/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, tercatat pada Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2021, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**Agenda 2 Resolution:** Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program for the 2021 Fiscal Year **Follow-Up On The Resolution:** Approved the Annual Report for the Company's Micro and Small Enterprises Funding Program (PUMK) for the 2021 fiscal year and ratified the Financial Report for the Company's Micro and Small Enterprises Funding Program (PUMK) for the 2021 fiscal year which had been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners according to their report Number 01405/ 2.1025/AU.2/09/0222- 2/1/ VII/2022 dated July 20, 2022 with the opinion "presented fairly in all material respects", and providing release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board The Company's Commissioners for their actions in managing and supervising the Company's Micro and Small Enterprises Funding Program (PUMK) for the 2021 fiscal year, as long as these actions do not constitute a crime and/or violate applicable legal provisions and procedures, are recorded in the Micro and Small Enterprises Funding Program Financial Report (PUMK) of the Company for the 2021 fiscal year, and does not conflict with the provisions of laws and regulations.
Keputusan Mata Acara 3: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2021 sebesar Rp1.065.821.934.040,- (satu triliun enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1. Sebesar Rp799.366.450.530,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagikan sebagai dividen tunai. 2. Dividen tunai yang diberikan kepada Pemegang Saham Seri B dapat dipertimbangkan untuk penguatan kapasitas keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dalam rangka penyelesaian penugasan Pemerintah kepada PT BPUI dan tetap menjaga akuntabilitas atas penggunaan dividen tunai tersebut. 3. Selisih sebesar laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dikurangi dividen tunai, dimasukkan sebagai cadangan.	**Agenda 3 Resolution:** Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2021 FOLLOW-UP ON THE RESOLUTION: Determine the use of profit for the year attributable to owners of the parent entity for the 2021 financial year in the amount of IDR1,065,821,934,040, - (one trillion sixty five billion eight hundred twenty one million nine hundred thirty four thousand and forty rupiah) with the following details: 1. A total of IDR799,366,450,530,- (seven hundred ninety nine billion three hundred sixty six million four hundred fifty thousand five hundred thirty rupiah) or 75% (seventy five percent) of the profit for the year attributable to owners of the parent entity are distributed as cash dividends. 2. Cash dividends given to B Series Shareholders can be considered for strengthening the financial capacity of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in order to complete the Government's assignment to PT BPUI and maintain accountability for the use of the cash dividend. 3. The difference in the amount of profit for the year attributable to the owners of the parent entity minus cash dividends is included as a reserve
Keputusan Mata Acara 4: Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2021 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2021 **Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:** Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya tahun buku 2022 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun buku 2021 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	**Agenda 4 Resolution:** Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and Other Allowances for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 Fiscal Year and Tantiem/ Performance Incentives/Special Incentives for the 2021 Fiscal Year for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Performance of the 2021 Fiscal Year **Follow-Up On The Resolution:** Grant authority and power of attorney to B Series Shareholders to determine the amount of salary/honorarium along with other facilities and benefits for the 2022 fiscal year for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as well as bonuses/performance incentives/special incentives for performance for the 2021 fiscal year for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions

Keputusan Mata Acara 5:
Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan tahun buku 2022. Penunjukan KAP akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B dengan memperhatikan usulan/evaluasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan berpedoman pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-241/MBU/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Kriteria Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria pada Badan Usaha Milik Negara.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti, termasuk besaran imbal jasa audit dan menetapkan kondisi serta persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun.

Agenda 5 Resolution:
Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Company's Micro and Small Enterprises Funding Program for the 2022 Fiscal Year

Follow-Up On The Resolution:
1. Granted authority and power of attorney to B Series Shareholders to determine which KAP will conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Company's Micro and Small Enterprises Funding Program (PUMK) for the fiscal year 2022. The appointment of KAP will be determined separately by the B series shareholders, taking into account the proposals/evaluations submitted by the Company's Board of Commissioners and guided by the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises number SK-241/MBU/10/2022 dated October 27, 2022 concerning Criteria for Public Accounting Firms, Public Assessment Service Offices and Actuarial Consulting Firms in State Owned Enterprises.
2. Granted power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine a replacement Public Accountant Office, including the amount of audit fees and determine the conditions and terms of appointment, if the appointed Public Accountant Office is unable to carry out or continue its duties for any reason.

RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2022
General Meeting of Shareholders on the Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for PT Jaminan Kredit Indonesia for 2022

Hari/Tanggal Day/Date	:	Jumat/ 28 Januari 2022 Friday, January 28, 2022
Waktu Time	:	Pukul 18.30 – 19.10 WIB 18.30 to 19.10 Western Indonesian Time
Tempat Location	:	*Video Conference Zoom* *Meeting* ID : 89697072076 *Password* : RUPS2022
Peserta yang Hadir Attendees	:	1. Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi Dan Dana Pensiun Kementerian BUMN 2. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 3. Direksi PT Jamkrindo 4. Komisaris PT Jamkrindo 1. Acting. Assistant Deputy for Insurance and Pension Fund Services at the Ministry of SOEs 2. President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 3. Directors of PT Jamkrindo 4. Commissioners of PT Jamkrindo
Pihak Independen yang Melakukan Perhitungan Suara Independent Parties Conducting Vote Counts	:	Tidak ada None

Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan melalui Surat PT Bahana PUI (Persero) No. B.001/EKT/DIRUT/RUPS/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2022.

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The results of the GMS Resolution have been outlined in PT Bahana PUI (Persero) Letter No. B.001/EKT/DIRUT/RUPS/I/2022 dated January 28, 2022 concerning the Ratification of the Work Plan and Corporate Budget (RKAP) of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2022.

All resolutions in the GMS are made by deliberation for consensus. The GMS resolutions, along with their implementation and followup by the Company's Management until the end of 2022, are as follows:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat The Agenda of the Meeting and its Resolutions as well as the Follow Up on the Results of the Meeting Resolutions	
Keputusan Mata Acara 1: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022	**Agenda 1 Resolution:** Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2022 including the Board of Commissioners' Work Plan and Budget for 2022
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Neraca) 2. Laporan Laba-Rugi Konsolidasian 3. Arus Kas Konsolidasian 4. Belanja Modal Konsolidasian	**Follow-Up On The Resolution:** 1. Consolidated Statement of Financial Position (Balance Sheet) 2. Consolidated Profit and Loss Statements 3. Consolidated Cash Flow 4. Consolidated Capital Expenditures
Keputusan Mata Acara 2: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2022	**Agenda 2 Resolution:** Ratification of the 2022 Social and Environmental Responsibility Program's Work Plan and Budget (RKA-TJSL).
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: 1. Program usaha Mikro Kecil (PUMK) Tahun 2022 2. Program Non PUMK Tahun 2022	**Follow-Up On The Resolution:** 1. 2022 Micro Small Enterprises Program (PUMK). 2. 2022 Non PUMK Program
Keputusan Mata Acara 3: Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performancae Indicators*) antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2022	**Agenda 3 Resolution:** Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators) between the Board of Directors and Board of Commissioners and Shareholders in 2022
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Menetapkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia dengan Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/ MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini.	**Follow-Up On The Resolution:** Establish a Management Contract (Key Performance Indicators) between the Directors and Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia and the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2022 referring to the Minister of SOEs Regulation Number PER-11/ MBU/11/2020 November 12, 2020, concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for Directors of StateOwned Enterprises as attached which are an integral part of the Minutes of this GMS.
Keputusan Mata Acara 4: Penetapan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) ant:ara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2022	**Agenda 4 Resolution:** Determination of Management Contracts (Key Performance Indicators) between the Board of Commissioners and Shareholders in 2022
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Menetapkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia dengan Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risa]ah RUPS ini.	**Follow-Up On The Resolution:** Establish a Management Contract (Key Performance Indicators) between the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia and the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2022 referring to the Minister of BUMN Regulation Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 j.o. Number PER-09/MBU/2012 concerning Implementation of Good Corporate Governance Principles as attached which is an integral part of the Minutes of this GMS.

DIREKSI

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 03/ SKB/1/XII/2020-KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), yang secara garis besar mengatur tentang hari, jam kerja, cuti, dan izin Direksi serta ketentuan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat, kode etik, dan peningkatan kompetensi Direksi.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the organ of the Company that is responsible for managing the Company for the interests and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court.

BOARD OF DIRECTORS WORK GUIDELINES AND RULES

Guidelines and work procedures for the Board of Directors are established through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 03/SKB/1/ XII/2020-KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 December 30, 2020 concerning Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors (Board Manual), which outlines the days, working hours, leave, and permission of the Board of Directors as well as provisions for organizing and making decisions on meetings, code of ethics, and increasing the competence of the Board of Directors.

Kriteria Direksi

Penetapan pedoman kualifikasi Direksi Perusahaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Perusahaan bersandar pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan aturan tersebut terdapat ketetapan mengenai persyaratan formal, materiil dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang Direksi yang mencakup:

BOARD OF DIRECTORS CRITERIA

Determination of qualification guidelines for the Board of Directors of the Company refers to the applicable laws and regulations. In this case, the Company relies on Minister of SOEs' Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Directors of StateOwned Enterprises.

Based on these rules, there are provisions regarding formal, material and other requirements that must be met by a Board of Directors which include:

Persyaratan Requirement	**Uraian** Description	
Formal	1. Cakap melaksanakan perbuatan hukum 2. Tidak pernah dinyatakan pailit 3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit 4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.	1. Capable of carrying out legal actions 2. Never been declared bankrupt 3. Never been a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt 4. Never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances.
Materil Material	1. Integritas 2. Pengalaman 3. Kemampuan untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional 4. Kemampuan bertindak untuk kepentingan Perusahaan, terjamin, dan/atau penerima jaminan 5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan, Terjamin dan/ atau penerima jaminan daripada kepentingan pribadi 6. Kemampuan mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan, Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan 7. Kemampuan menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan 8. Serta persayaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Integrity 2. Experience 3. Ability to act in good faith, honestly, and professionally 4. Ability to act for the benefit of the Company, guaranteed, and/or guarantee recipients 5. Prioritize the interests of the Company, the Guaranteed and/or the guarantor over personal interests 6. Able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company, the Guaranteed, and/or the Guarantee Recipient 7. Able to avoid abuse of authority to gain undue personal advantage or cause harm to the Company 8. As well as other requirements based on statutory provisions
Persyaratan lainnya Other requirements	1. Tidak menjabat anggota Direksi pada BUMN, BUMD, serta Badan usaha milik swasta 2. Tidak menjabat anggota Dewan Komisaris pada BUMN 3. Tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/Lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah 4. Tidak menjabat jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 5. Tidak menjabat jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	1. Not serving as a member of the Board of Directors in SOEs, ROEs, and privately owned enterprises 2. Not serving as a member of the Board of Commissioners in SOEs 3. Not holding other structural and functional positions in central and/or regional government agencies 4. Does not hold other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party officials and/or legislative candidates/members and/or regional head/ deputy regional head candidates 5. Does not hold other positions that may cause a conflict of interest

Ketentuan Masa Jabatan

Masa Jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

TERM OF OFFICE

The term of office for members of the Board of Directors is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2023

STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2023

Nama Names	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Tenure
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	SK-21/MBU/07/2023 – 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023 – 31 Juli 2028 July 31, 2023 – July 31, 2028	Ke-1 1st
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022 – 27 Oktober 2027 October 27, 2022 – October 27, 2027	Ke-1 1st
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of HRM, General Affairs, and Risk Management	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022 – 27 Oktober 2027 October 27, 2022 – October 27, 2027	Ke-1 1st
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional and Services	SK-244/MBU/10/2022 014/KepSir-PS/BPUI/X/2022	27 Oktober 2022 – 27 Oktober 2027 October 27, 2022 – October 27, 2027	Ke-1 1st
Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023 – 21 Maret 2026 July 31, 2023 – March 21, 2026	Ke-1 1st
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	SK-21/MBU/07/2023 17/KepSir-PS/BPUI/VIII/2023	31 Juli 2023 – 31 Juli 2028 July 31, 2023 – July 31, 2028	Ke-1 1st

Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan.

A brief profile of each member of the Board of Directors can be seen in the Profile of the Board of Directors section, in the Company Profile chapter.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi

BOARD OF DIRECTORS' FIT AND PROPER TEST

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, pengangkatan Direksi Perusahaan wajib diikuti dengan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut disampaikan status Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi Perusahaan.

In accordance with OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 dated July 27, 2016 concerning the Fit and Proper Test for Candidates for the Main Parties of Financial Services Institutions, the appointment of the Company's Directors must be followed by a Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (OJK). The following is the status of the Company's Board of Directors' Fit and Proper Test.

Nama Names	Jabatan Position	Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan Description of Fit and Proper Test Results
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-3/KDK.05/2024 tanggal 12 Januari 2024 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-3/KDK.05/2024 dated January 12, 2024
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-9/KDK.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-9/KDK.05/2023 dated February 27, 2023

Nama Names	Jabatan Position	Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan Description of Fit and Proper Test Results
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of HRM, General Affairs, and Risk Management	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-2/KDK.05/2023 tanggal 30 Januari 2023 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-2/KDK.05/2023 dated January 30, 2023
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional and Services	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-9/KDK.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-9/KDK.05/2023 dated February 27, 2023
Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-40/KDK.05/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-40/KDK.05/2021 dated August 27, 2021
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	Lulus Passed	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-14/KDK.05/2024 tanggal 7 Februari 2024 Has obtained a Fit and Proper Test Decree from OJK through Decree No. KEP-14/KDK.05/2024 dated February 7, 2024

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi. Dalam melaksanakan Kepengurusan Perusahaan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan syarat semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi. Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka ditetapkan salah seorang Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dengan urutan sebagai berikut:

1. Salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
2. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir (b) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang. Direktur sebagaimana dimaksud pada butir (c) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo No. 25 tanggal 24 Februari 2020, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

COMPANY MANAGEMENT POLICY

The Company's Management Policy is determined by the Board of Directors. In carrying out the Management of the Company, the President Director has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company, provided that all the actions of the President Director have been approved by the Board of Directors Meeting. If the President Director is absent for any reason, then it is determined that one of the Directors has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors in the following order:

1. One of the Directors appointed by the President Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors;
2. In the event that the President Director does not make an appointment, one of the Directors appointed by and among the existing members of the Board of Directors is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors;
3. In the event that as referred to in point (b) is not carried out, one of the Directors who has served the longest as a member of the Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors;
4. In the event that the Director who has served the longest as a member of the Board of Directors is more than 1 (one) person. The director as referred to in point (c) is the oldest in age authorized to act for and on behalf of the Board of Directors.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Referring to the Articles of Association of the Company (Persero) PT Guarantee Credit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo No. 25 dated February 24, 2020, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

	Tugas Pokok Main Duties
1	Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan tersebut Carry out management of the Company for the interests and objectives of the Company and act as Leaders in such management
2	Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan Represent the Company in and out of court
3	Memelihara dan mengurus kekayaaan Perusahaan Maintain and manage the Company's assetsMelaksanakan
	Tanggung Jawab Responsibilities
1	Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan pengelolaan Perusahaan, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perusahaan dan mewakili Jamkrindo di dalam dan di luar pengadilan The Board of Directors is responsible for implementing regulations and managing the Company, as well as taking legal action for and on behalf of the Company and representing Jamkrindo in and out of court
2	Secara bersama-sama atau individual, bertanggungjawab segala kerugian yang timbul pada kekayaan Perusahaan akibat tindakan Direksi yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan Together or individually, be responsible for any losses arising from the Company's assets due to the actions of the Directors who violate or neglect their duties and/or obligations as stipulated in Company Regulations and Legislation
3	Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap Ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in a timely and complete manner
4	Tanggung jawab lain sesuai ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Other responsibilities according to the provisions of the Company and the applicable laws and regulation

Pembagian Lingkup Tugas Antar Direksi

Tugas dan wewenang masing-masing Direksi telah diatur dalam Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor: 13/Per-Dir/5/VI/2023 dengan Ketetapan Direksi SO 2023: 01/KD/5/VI/2023 tentang Deskripsi Pekerjaan. Dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

DIVISION OF DUTIES BETWEEN DIRECTORS

The duties and authorities of each Board of Directors are regulated in the Regulation of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia Number: 13/Per-Dir/5/VI/2023 with Decree of the Board of Directors SO 2023: 01/KD/5/VI/2023 concerning Job Descriptions. In carrying out their activities, members of the Company's Board of Directors have the following duties and authorities.

Direksi Directors	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	
Akhmad Purwakajaya (Direktur Utama) (President Director)	**Tugas:** 1. Pemimpin Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan. 2. Pemimpin Pengelolaan Kegiatan Hubungan Masyrakat dan Komunikasi Perusahaan 3. Pemimpin Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 4. Pemimpin Pengelolaan Kegiatan Pengawasan Internal dan Eksternal 5. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Perusahaan dan Direktorat Utama. 6. Pemimpin Penyusunan Cetak Biru Transformasi Perusahaan 7. Pemimpin Pengelolaan Strategi Transformation Office. 8. Pemimpin Pelaksanaan Tata Laksana Perusahaan dan Direktorat Utama 9. Pemimpin Pengelolaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan dan Direktorat Utama 10. Pemimpin Pengelolaan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Direktorat Utama 11. Pemimpin Pengelolaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan dan Direktorat Utama 12. Pemimpin Pengembangan Kompetensi Karyawan yang berada di bawah kewenangannya minimal satu tingkat di bawahnya sehingga memenuhi standard kompetensi yang ditentukan. 13. Pemimpin Penyusunan dan Penyampaian laporan Pelaksanaan Tugas Perusahaan dan Direktorat Utama secara berkala 14. Pemimpin pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada RUPS, termasuk melakukan pemanggilan RUPS dan lain-lain sesuai ketentuan UU PT 15. Pemimpin pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya	DUTIES: 1. Leader of the Management of the Company's Long-Term Plan. 2. Leader of the Management of Public Relations and Corporate Communication Activities 3. Leader of Social and Environmental Responsibility Activity Management 4. Leader of the Management of Internal and External Monitoring Activities 5. Leader of Internal Control Implementation of the Company and Main Directorate. 6. Leader of Company Transformation Blueprint Preparation 7. Leader of Transformation Office Strategy Management. 8. Leader of Implementation of Corporate Governance and Main Directorate 9. Leader of Good Corporate Governance (GCG) Implementation Management of the Company and Main Directorate. 10. Leader of Risk Management Implementation Management of the Company and Main Directorate 11. Leader of Management of Good Corporate Governance Implementation of the Company and Main Directorate 12. Leader of Competency Development of Employees under his/her authority at least one level below him/her so as to meet the specified competency standards. 13. Leader in the preparation and submission of reports on the implementation of the Company's and Main Directorate's duties on a regular basis. 14. Leader of accountability for the implementation of duties to the GMS, including summoning the GMS and others in accordance with the provisions of the Company Law. 15. Leader of the implementation of other tasks within the scope of his/her duties
Akhmad Purwakajaya (Direktur Utama) (President Director)	**Wewenang:** 1. Menetapkan dan memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan. 2. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Utama. 3. Memutuskan kegiatan, *coverage* dan anggaran berdasakan pengembangan Direktorat Utama. 4. Menyetujui dan menetapkan dokumen pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Risiko dan Tata Kelola Teknologi Informasi. 5. Menvetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/Kebijakan, Standard Operating Prosedur (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan. 6. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan. 7. Menetapkan tugas pokok dan fungi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja dibawah Direktorat Utama. 8. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan (Triwulanan). 9. Menyetujui dan menetapkan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur Utama untuk kegiatan koresponden khusus. 11. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan relationship dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas selaku Direktur Utama.	AUTHORITY: 1. Establish and approve the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Company Budget. 2. Establish systems, procedures, guidelines, implementation instructions for the President Directorate. 3. Decide activities, coverage and budget based on the development of President Directorate. 4. Approve and stipulate the guidelines for Good Corporate Governance (GCG), Risk Management and Information Technology Governance. 5. Approve and establish jointly with other members of the Board of Directors, formulate and stipulate Regulations/Decisions/Policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company. 6. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge according to authority. 7. Determine the main tasks and functions and coordinate the implementation of the tasks of work units under the President Directorate. 8. Approved the Management Report, the Company's Annual Report, and the Company's Activities and Financial Report (Quarterly). 9. Approve and assign other tasks in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations 10. Approve and sign the President Director's authorization for special correspondent activities. 11. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of duties as President Director.

Direksi Directors	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
Henry Panjaitan (Direktur Bisnis Penjaminan) (Director of Guarantee Business)	**Tugas:** 1. Pemimpin Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Bisnis Penjaminan 2. Pemimpin Pengelolaan Pengembangan Kerja Sama Bisnis Perusahaan. 3. Pemimpin Pengelolaan Kebijakan Terkait Dengan Bisnis Penjaminan. 4. Pemimpin Pengelolaan Marketing. 5. Pemimpin Pengelolaan Portofolio Bisnis Penjaminan. 6. Pemimpin Pengelolaan Penjualan Bisnis Penjaminan. 7. Pengelolaan Bisnis Hubungan Kelembagaan. 8. Pemimpin Pengelolaan Sarana dan Sistem Informasi yang terhubung secara *online* pada ruang lingku Bisnis Penjaminan. 9. Pemimpin Pelaksanaan Pemrosesan Peniaminan. 10. Pemimpin Pengelolaan Pengendalian Penjaminan. 11. Pemimpin Pengelolaan *Channel of Marketing* 12. Pengelolaan Peningkatan Profitabilitas Produk 13. Pengelolaan *Rise* dan Pengembangan Produk| Penjaminan Baru 14. Pemimoin Pelaksanaan Tata Laksana Direktorat Bisnis Penjaminan. 15. Pemimpin Pengelolaan Manajemen Kinerja Direktorat Bisnis Penjaminan 16. Pemimpin Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Bisnis Penjaminan. 17. Pemimpin Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Direktorat Bisnis Penjaminan. 18. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Direktorat Bisnis Penjaminan. 19. Pemimpin Pengembangan Kompetensi Karyawan yang berada dibawah kewenangannya minimal satu tingkat dibawahnya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. 20. Pemimpin Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Secara Berkala. 21. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada RUPS, termasuk melakukan pemanggilan RUPS dan lain-lain sesuai ketentuan UU PT. 22. Pemimpin pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya. 23. Melaksanakan tugas sebagai Direktur pengganti sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan dalam Rapat Direksi. DUTIES: 1. Leader of Management of the Company's LongTerm Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKA) of the Guarantee Business Directorate 2. Leader of the Management of Corporate Business Cooperation Development. 3. Leader of Policy Management Related to Guarantee Business. 4. Leader of Marketing Management. 5. Leader of Guarantee Business Portfolio Management. 6. Sales Management Leader of Guarantee Business. 7. Institutional Relations Business Management. 8. Leader of Management of Information Systems and Facilities that are connected online in the Guarantee Business scope. 9. Leader of Guarantee Processing Implementation. 10. Leader of Guarantee Control Management. 11. Leader of Channel of Marketing Management 12. Product Profitability Improvement Management 13. Management of Rise and Product Development of New Guarantee 14. Leader of the Administration of the Guarantee Business Directorate. 15. Leader of Performance Management of the Directorate of Guarantee Business. 16. Leader of Implementation of Risk Management of Guarantee Business Directorate. 17. Leader of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of Guarantee Business Directorate. 18. Leader of the Implementation of Internal Supervision of the Guarantee Business Directorate. 19. Employee Competency Development Leader who is under his authority at least one level below so that it meets the specified competency standards. 20. Leader of the Preparation and Submission of Periodic Reports on the Implementation of Tasks. 21. Has the accountability for carrying out their duties to the GMS, including summoning the GMS and others in accordance with the provisions of the Company Law. 22. The leader of the implementation of other tasks within the scope of his duties. 23. arry out duties as a substitute Director in accordance with the provisions and carry out additional tasks determined at the Board of Directors Meeting.

Direksi Directors	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	
Henry Panjaitan (Direktur Bisnis Penjaminan) (Director of Guarantee Business)	**Wewenang:** 1. Memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 2. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Bisnis Penjaminan. 3. Menvetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/ Kebijakan, Standard Operating Prosedur (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan. 4. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan. 5. Menetapkan tugas pokok dan fungi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Direktorat Bisnis Peniaminan. 6. Memutuskan bisnis penjaminan, *coverage* dan *plafon* berdasarkan produk dan layanan. 7. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Bisnis Peniaminan (Triwulanan). 8. Menvetujui dan melaksanakan tugas-tugas lain sesai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur untuk kegiatan koresponden khusus. 10. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan relationship dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas terkait Direktorat Bisnis Penjaminan.	**AUTHORITIES:** 1. Provide approval of the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Company Budget. 2. Establish systems, procedures, guidelines, implementation instructions for the Guarantee Business Directorate. 3. Approve and determine together with other members of the Board of Directors, formulate and stipulate Regulations/Decisions/Policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company. 4. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge according to authority. 5. Determine the main tasks and functions and coordinate the implementation of tasks in the Guarantee Business Directorate. 6. Decide on the guarantee, coverage and limit, based on products and services. 7. Approve the Management Report, the Company's Annual Report, and the Guarantee Business Activity Report (Quarterly). 8. Approve and carry out other tasks according to the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations. 9. Approve and sign the Director's authority for special correspondent activities. 10. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of tasks related to the Directorate of Guarantee Business.

Direksi Directors	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	
Suwarsito (Direktur Operasional dan Jaringan) (Director of Operations and Network)	**Tugas:** 1. Pemimpin Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RIPP) Perusahaan dan Rencana Keria dan Anggaran (RKA) Direktorat Operasional dan Jaringan. 2. Pemimpin Pengelolaan Teknik 3. Pemimpin Pelaksanaan Manajemen Klaim Secara Nasional 4. Pemimpin Pengelolaan Subrogasi 5. Pemimpin Pengelolaan Jaringan 6. Pemimpin Pengelolaan Layanan 7. Pemimpin Pengelolaan Kegiatan Aktuaria 8. Pemimpin Pelaksanaan Tata Laksana Direktorat Operasional dan Jaringan. 9. Pemimpin Pengelolaan Manajemen Kinerja Direktorat Operasional dan Jaringan. 10. Pemimpin Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Operasional dan Jaringan. 11. Pemimpin Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Direktorat Operasional dan Jaringan. 12. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Direktorat Operasional dan Jaringan. 13. Pemimpin penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan)/Master Plan Teknologi Informasi Perusahaan. 14. Pemimpin Pengelolaan Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan. 15. Pemimpin Pengelolaan Teknologi Informasi Perusahaan. 16. Pemimpin pengembangan kompetensi karyawan yang berada dibawah kewenangannya minimal satu tingkat dibawahnya sehingga memenuhi standard kompetensi yang ditentukan. 17. Pemimpin penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaa tugas secara berkala. 18. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada RUPS, termasuk melakukan pemanggilan RUPS dan lain-lain sesuai ketentuan UU PT. 19. Pemimpin pelaksanaa tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya 20. Melaksanakan tugas sebagai Direktur pengganti sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan dalam Rapat Direksi.	**DUTIES:** 1. Leader of Compilation of the Company's LongTerm Plan (RIPP) and Work Plan and Budget (RKA) of the Directorate of Operations and Networks. 2. Technical Management Leader 3. Leader of National Claims Management Implementation 4. Subrogation Management Leader 5. Network Management Leader 6. Service Management Leader 7. Actuarial Activity Management Leader 8. Leader of Administration of Operations and Network Directorate. 9. Leader of Performance Management of Directorate of Operations and Network. 10. Leader of Implementation of Risk Management of Directorate of Operations and Networks. 11. Leader of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of Directorate of Operations and Networks. 12. Leader of the Implementation of Internal Supervision of the Directorate of Operations and Networks. 13. Leading the preparation of the Company's Information Technology Strategic Plan/Master Plan for Information Technology. 14. Leader of Information Technology Governance Management. 15. Leader of Information Technology Management of the Company. 16. The leader of employee competency development who is under his authority at least one level below it so that it meets the specified competency standards. 17. Leader of the preparation and submission of reports on the implementation of tasks on a regular basis. 18. Has the accountability for carrying out their duties to the GMS, including summoning the GMS and others in accordance with the provisions of the Company Law. 19. Leader of the implementation of other tasks within the scope of their duties 20. Carry out duties as a substitute Director in accordance with the provisions and carry out additional tasks determined at the Board of Directors Meeting.

Direksi Directors	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	
Suwarsito (Direktur Operasional dan Jaringan) (Director of Operations and Network)	**Wewenang:** 1. Memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Operasional dan Jaringan. 2. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Operasional dan Jaringan. 3. Menyetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/ Kebijakan, *Standard Operating Prosedur* (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan. 4. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan. 5. Menetapkan tugas pokok dan fungi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Direktorat Operasional dan Jaringan. 6. Memutuskan kegiatan, *coverage* dan plafon berdasarkan pengembangan Operasional dan Layanan dari sis Teknik Penjaminan, Keputusan dan Pembayaran, *Co-Guarantee, Co- Branding*, co-asuransi dan Re-Asuransi serta *Re-Guarantee*. 7. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Operasional dan Jaringan (Triwulanan). 8. Menyetujui dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur untuk kegiatan koresponden khusus. 10. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas terkait Direktorat Operasional dan Jaringan.	**AUTHORITIES:** 1. Provide approval for the Company's Long Term Plan and Work Plan and Budget for the Directorate of Operations and Networks. 2. Establish systems, procedures, guidelines, implementation instructions for the Directorate of Operations and Networks. 3. Approve and establish, together with other members of the Board of Directors, formulate and stipulate Regulations/Decisions/Policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company. 4. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge according to authority. 5. Determine the main tasks and functions and coordinate the implementation of tasks in the Operations and Network Directorate. 6. Decide on activities, coverage and limit, based on Operational and Service development in terms of Guarantee technical, Decisions and Payments, Co-Guarantee, Co-Branding, co-insurance and ReInsurance and Re-Guarantee. 7. Approve the Management Report, the Company's Annual Report, and the Operational and Network Activity Report (Quarterly). 8. Approve and carry out other duties in accordance with the provisions of the Company's regulations and applicable laws and regulations. 9. Approve and sign the Director's authority for special correspondent activities. 10. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of duties related to the Directorate of Operations and Network.

Direksi Directors	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	
Achmad Ivan S Soeparno (Direktur MSDM, Umum, dan Risk Management) (Director of HRM, General Affairs, and Risk Management)	**Tugas:** 1. Pemimpin Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Direktorat Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan. 2. Pemimpin Pengelolaan Siklus Manajemen SDM 3. Pemimpin Pengelolaan Siklus Manajemen Umum 4. Pemimpin Pengelolaan Hukum 5. Pemimpin Pengelolaan Kepatuhan 6. Pemimpin Pengelolaan Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan 7. Pemimpin Pengelolaan Teknologi Informasi Perusahaan 8. Pemimpin Pelaksanaan Tata Laksana Direktorat Manajemen SDM, Umumdan Kepatuhan. 9. Pemimpin Pengelolaan Manajemen Kinerja Direktorat Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan 10. Pemimpin Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan Kepatuhan. 11. Pemimpin Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Direktorat Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan. 12. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Direktorat Direktorat Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan. 13. Pemimpin pengembangan kompetensi karyawan yang berada dibawah kewenangannya minimal satu tingkat dibawahnya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. 14. Pemimpin Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Secara Berkala. 15. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada RUPS, termasuk melakukan pemanggilan RUPS dan lain-lain sesuai ketentuan UU PT 16. Pemimpin pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya 17. Melaksanakan tugas sebagai Direktur pengganti sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan dalam Rapat Direksi.	DUTIES: 1. Head of Management of the Company's LongTerm Plan (RJPP) and Budget Work Plan (RKA) of the Directorate of HR Management, General Affairs, and Compliance. 2. Leader of HR Management Cycle Governance 3. General Management Cycle Governance Leader 4. Legal Management Leader 5. Leader of Compliance Management 6. Leader of the Company's Information Technology Governance 7. Leader of Corporate Information Technology Management 8. Leader of Implementation of Governance of the Directorate of HR Management, General Affairs, and Compliance. 9. Leader of Performance Management of the Directorate of HR Management, General Affairs, and Compliance 10. Leader of Implementation of Risk Management of the Directorate of HR Management, General Affairs, and Compliance. 11. Leader of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of the Directorate of HR Management, General Affairs, and Compliance. 12. Head of Implementation of Internal Supervision of the Directorate of HR Management, General Affairs, and Compliance. 13. The leader of employee competency development who is under his authority at least one level below it so that it meets the specified competency standards. 14. Leader of the Preparation and Submission of Periodic Reports on the Implementation of Tasks. 15. Has the accountability for carrying out their duties to the GMS, including summoning the GMS and others in accordance with the provisions of the Company Law. 16. Leader of the implementation of other tasks within the scope of their duties 17. Carry out duties as a substitute Director in accordance with the provisions and carry out additional tasks determined at the Board of Directors Meeting

Direksi Directors	**Tugas dan Wewenang** Duties and Authorities	
Achmad Ivan S Soeparno (Direktur MSDM, Umum, dan Risk Management) (Director of HRM, General Affairs, and Risk Management)	Wewenang: 1. Memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Recana Kerja dan Anggaran Direktorat Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan. 2. Memberikan persetujuan pedoman *Good Corporate Governance* (GG). 3. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan. 4. Memutuskan kegiatan, *coverage* dan anggaran berdasakan pengembangan Direktorat Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan. 5. Menyetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/ Kebijakan, *Standard Operating Prosedur* (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan. 6. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesai kewenangan. 7. Menetapkan tugas pokok dan fungi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Direktorat Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan. 8. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Direktorat Manajemen SDM, Umumdan Kepatuhan (Triwulanan). 9. Menyetujui dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur untuk kegiatan koresponden khusus. 11. Mewakili PTJamkrindo dalam mengadakan relationship dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas terkait Direktorat Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan.	AUTHORITIES: 1. Provide approval for the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget for the Directorate of HR Management, General Affairs, and Compliance. 2. Gave approval for Good Corporate Governance (GG) guidelines. 3. Establish systems, procedures, guidelines, implementation instructions for the Directorate of HR Management, General Affairs, and Compliance. 4. Decide on activities, coverage and budget based on the development of the Directorate of HR Management, General Affairs, and Compliance. 5. Approve and stipulate together with other members of the Board of Directors, formulate and stipulate Regulations/Decisions/Policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company. 6. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge of authority. 7. Determine the main tasks and functions and coordinate the implementation of tasks in the Directorate of HR Management, General Affairs and Compliance. 8. Approve the Management Report, the Company's Annual Report, as well as the Activity Report of the Directorate of HR Management, General Affairs and Compliance (Quarterly). 9. Approve and carry out other tasks in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations. 10. Approve and sign the Director's authority for special correspondent activities. 11. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of tasks related to the Directorate of HR Management, General Affairs and Compliance.

Direksi Directors	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
Abdul Bari (Direktur Kelembagaan dan Layanan) (Director of Institutional and Services)	**Tugas:** 1. Pemimpin Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Kelembagaan dan Layanan. 2. Pemimpin Pengelolaan Pengembangan Kerja Sama Bisnis Perusahaan. 3. Pemimpin Pengelolaan Kebijakan Terkait dengan Kelembagaan dan Layanan. 4. Pemimpin Pengelolaan Marketing. 5. Pemimpin Pengelolaan Penjualan Bisnis Penjaminan 6. Pengelolaan Bisnis Direktorat Kelembagaan dan Layanan 7. Pemimpin Pengelolaan Sarana dan Sistem Informasi yang Terhubung secara *Online* pada Ruang Lingkup Direktorat Kelembagaan dan Layanan 8. Pemimpin Pelaksanaan Pemrosesan Penjaminan. 9. Pemimpin Pengelolaan Saluran Pemasaran (*Channel of Marketing*). 10. Pemimpin Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan UMKMK. 11. Pemimpin Pelaksanaan Tata Laksana Direktorat a. Kelembagaan dan Layanan. 12. Pemimpin Pengelolaan Manajemen Kinerja Direktorat Kelembagaan dan Layanan. 13. Pemimpin Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Kelembagaan dan Layanan. 14. Pemimpin Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Direktorat Kelembagaan dan Layanan. 15. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Direktorat Kelembagaan dan Layanan. 16. Pemimpin Pengembangan Kompetensi Karyawan yang Berada di Bawah Kewenangannya Minimal Satu Tingkat di Bawahnya sehingga Memenuhi Standar Kompetensi yang Ditentukan. 17. Pemimpin Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas secara Berkala. 18. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugasnya kepada RUPS, Termasuk Melakukan Pemanggilan RUPS dan lain-lain Sesuai Ketentuan Undang-Undang PT. 19. Pemimpin Pelaksanaan Tugas-tugas Lain dalam Lingkup Bidang Tugasnya. 20. Melaksanakan Tugas Sebagai Direktur Pengganti Sesuai dengan Ketentuan dan Melaksanakan Tugas Tambahan yang Ditetapkan dalam Rapat Direksi. **DUTIES:** 1. Management Leader of the Company's LongTerm Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKA) of the Directorate of Institutional Relations & Services. 2. Leader of the Management of Corporate Business Cooperation Development. 3. Leader of Policy Management Related to Institutional Relations & Services. 4. Leader of Marketing Management. 5. Sales Management Leader of Guarantee Business 6. Business Management of the Directorate of Institutional Relations & Services 7. Leader of Management of Facilities and Information Systems that are Connected Online in the Scope of the Directorate of Institutional Relations & Services 8. Leader of Guarantee Processing Implementation. 9. Marketing Channel Management Leader (Channel of Marketing). 10. Leader of Management of MSMEC Empowerment Activities. 11. Leader of Governance of Directorate of Institutional Relations & Services 12. Leader of Performance Management of the Directorate of Institutional Relations & Services 13. Leader of Implementation of Risk Management of the Directorate of Institutional Relations & Services 14. Leader of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of the Directorate of Institutional Relations & Services 15. Leader of Implementation of Internal Supervision of the Directorate of Institutional Relations & Services 16. Competency Development Leader for Employees Who Are Under His Authority, at Least One Level Below His Level, so as to Meet the Specified Competency Standards. 17. Leader of the Preparation and Submission of Periodic Reports on the Implementation of Tasks. 18. Has the accountability for the implementation of their duties to the GMS, including summon for the GMS and others in accordance with the provisions of the Law. 19. Leader of the Implementation of Other Duties within the Scope of Their Tasks. 20. Carry out Duties as Substitute Director in accordance with the provisions and carry out additional tasks determined at the Board of Directors meeting.

Direksi Directors	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	
Abdul Bari (Direktur Kelembagaan dan Layanan) (Director of Institutional and Services)	**Wewenang:** 1. Memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 2. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Kelembagaan dan Layanan. 3. Menyetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan peraturan/keputusan/ kebijakan, *Standard Operating Prosedur* (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan. 4. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan. 5. Menetapkan tugas pokok dan fungsi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Direktorat Kelembagaan dan Layanan. 6. Memutuskan bisnis penjaminan, *coverage*, dan plafon berdasarkan produk dan layanan. 7. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Bisnis Penjaminan (Triwulanan). 8. Menyetujui dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur untuk kegiatan koresponden khusus. 10. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas terkait Direktorat Kelembagaan dan Layanan.	AUTHORITY: 1. Provide approval of the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Company Budget. 2. Establish systems, procedures, guidelines, implementation instructions for the Directorate of In Institutional Relations & Services. 3. Approve and establish together with other members of the Board of Directors, formulate and stipulate regulations/decisions/policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company 4. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge according to authority. 5. Determine the main tasks and functions and coordinate the implementation of tasks in the Directorate of Institutions and Services. 6. Decide on the guarantee, coverage and limit based on products and services. 7. Approve the Management Report, the Company's Annual Report, and the Guarantee Business Activity Report (Quarterly). 8. Approve and carry out other tasks in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations. 9. Approve and sign the Director's authority for special correspondent activities. 10. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of tasks related to the Directorate of Institutional Relations & Services

Direksi Directors	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities	
Alia Nur Fitri (Direktur Keuangan dan Investasi (Director of Finance and Investment)	**Tugas:** 1. Pemimpin Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perusahaan dan Rencana Keria dan Anggaran (RKA) Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. 2. Pemimpin Pelaksanaan Manajemen Investasi dan Pengelolaan Keuangan Perusahaan 3. Pemimpin Pelaksanaan Manajemen Akuntansi 4. Pemimpin Pengelolaan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Penjaminan 5. Pemimpin Pelaksanaan Tata Laksana Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. 6. Pemimpin Pengelolaan Manajemen Kinerja Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko 7. Pemimpin Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. 8. Pemimpin Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. 9. Pemimpin Pelaksanaan Pengawasan Internal Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. 10. Pemimpin pengembangan kompetensi karyawan yang berada dibawah kewenangannya minimal satu tingkat dibawahnya sehingga memenuhi standard kompetensi yang ditentukan. 11. Pemimpin Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Secara Berkala. 12. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada RUPS, termasuk melakukan pemanggilan RUPS dan lain-lain sesuai ketentuan UU PT. 13. Pemimpin pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya. 14. Melaksanakan Tugas sebagai Direktur pengganti sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan dalam Rapat Direksi.	DUTIES: 1. Leader of Compilation of the Company's LongTerm Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKA) of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management. 2. Leader of Implementation of Governance of the Company's Investment Management and Financial Management 3. Leader of Implementation of Accounting Management 4. Leader of the Implementation of Corporate Risk Management and Guarantee Management 5. Leader of Implementation of Governance of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management. 6. Head of Performance Management of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management 7. Leader of Implementation of Risk Management of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management. 8. Leader of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management. 9. Head of Implementation of Internal Supervision of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management. 10. The leader of employee competency development who is under his authority at least one level below so that it meets the specified competency standards. 11. Leader of the Preparation and Submission of Periodic Reports on the Implementation of Tasks. 12. Has the accountability for carrying out their duties to the GMS, including summoning the GMS and others in accordance with the provisions of the Company Law. 13. Leader of the implementation of other tasks within the scope of their duties. 14. Carry out Duties as a substitute Director in accordance with the provisions and carry out additional tasks determined at the Board of Directors Meeting.

Direksi Directors	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
Alia Nur Fitri (Direktur Keuangan dan Investasi) (Director of Finance and Investment)	Wewenang: 1. Memberikan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. 2. Memberikan persetujuan pedoman Manajemen Risiko. 3. Menetapkan sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan untuk Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. 4. Memutuskan kegiatan, coverage dan anggaran berdasakan pengembangan Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. 5. Menyetujui dan menetapkan bersama-sama dengan anggota Direksi lain, merumuskan dan menetapkan Peraturan/Keputusan/ Kebijakan, *Standard Operating Prosedur* (SOP) kegiatan operasional maupun non operasional Perusahaan. 6. Menandatangani dokumen hukum untuk mewakili Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Direktur yang membidangi sesuai kewenangan. 7. Menetapkan tugas pokok dan fungi serta mengoordinasikan pelaksanaantugas di Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. 8. Menyetujui Laporan Manajemen, Laporan Tahunan Perusahaan, serta Laporan Kegiatan Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko (Triwulanan). 9. Menyetujui dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Menyetujui dan menandatangani kewenangan Direktur untuk kegiatan koresponden khusus 11. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan relationship dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas terkait Direktorat Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko. AUTHORITIES: 1. Provide approval for the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management. 2. Provide approval for Risk Management guidelines. 3. Establish systems, procedures, guidelines, implementation instructions for the Directorate of Finance, Investment and Risk Management. 4. Decide on activities, coverage and limit based on the development of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management. 5. Approve and stipulate together with other members of the Board of Directors, formulate and stipulate Regulations/Decisions/Policies, Standard Operating Procedures (SOP) for operational and non-operational activities of the Company. 6. Sign legal documents to represent the Company, either alone or together with the Director in charge according to authority. 7. Determine the main tasks and functions and coordinate the implementation of tasks in the Directorate of Finance, Investment and Risk Management. 8. Approve the Management Report, the Company's Annual Report, Set a Report on Activities of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management (Quarterly). 9. Approve and carry out other tasks in accordance with the provisions of Company regulations and applicable laws and regulations. 1 10. Approve and sign the Director's authority for special correspondent activities 11. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of tasks related to the Directorate of Finance, Investment and Risk Management.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Direksi merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis Perusahaan oleh Direksi. Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Direksi Jamkrindo di sepanjang tahun 2023:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by holding competency development programs for all employees. Board of Directors competency development is an effort to update knowledge to support the implementation of the duties of managing the Company's business by the Board of Directors. The following is information about the competency development program for the Board of Directors of Jamkrindo throughout 2023:

Nama Names	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	SS (*Soft Skill*)	*Indonesia Leadership Forum 2023 Leading Through Global Turbulance*	9 Mar 23 March 9, 2023	UI Consulting; PT Daya Makara UI
M Muchlas Rowi	Anggota Dewan Komisaris BoC member	HS (*Hard Skill*)	*Global* GRC *Benchmarking Series* 5	11 Mar 23 March 11, 2023	CENTROIS

Nama Names	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur MSDM, Umum, dan MR Director of HRM, General Affairs, and Risk Management	HS (*Hard Skill*)	Webinar Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKMK Business Strategy Webinar in the Risk Management Based Guarantee Industry to Support Government Programs in MSME Development	4 Oct 23 Oct 4, 23	PT BCG
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional & Services	HS (*Hard Skill*)	Srikandi BUMN *Goes to Campus* (SBGTC)	22 Aug 23 Aug 22, 23	Srikandi BUMN
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	HS (*Hard Skill*)	*Stewardship and Portofolio Management Training Program* Tahun 2023	7 Nov 23 Nov 7, 23	FHCI
Achmad Ivan S. Soeparno	Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of HRM, General Affairs, and Risk Management	HS (*Hard Skill*)	CHRO School 2023	13 Oct – 08 Des 23 Oct 13 –Des 8, 23	FHCI : BUMN School of Excellence
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	HS (*Hard Skill*)	CBDO *Innovation School Cohort* 2	11 Mar 23 March 11, 2023	KBUMN dan FHCI
Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	HS (*Hard Skill*)	*Boards and Risks (Risk Governance and Prevention in a Chaotic World)*	20 Nov 23 Nov 20, 23	IMD
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	HS (*Hard Skill*)	*Risk Beyond* 2023 - *Into The Unknown*: *Charting the Future Agenda*	7 Nov 23 Nov 7, 23	ERM Academy
Achmad Ivan S. Soeparno	(Direktur MSDM, Umum dan MR Director of HRM, General Affairs, and Risk Management	HS (*Hard Skill*)	*Risk Beyond* 2023 - *Into The Unknown*: *Charting the Future Agenda*	7 Nov 23 Nov 7, 23	ERM Academy

Nama Names	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	S (Sertifikasi)	Sertifikasi Kompetensi okupasi Direktur Bisnis, Investasi dan Komisaris Occupational Competency Certification for Business Directors, Investments and Commissioners	29 Aug 23 Aug 29, 23	LSP Penjaminan
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	S (Sertifikasi) S (Certification)	Sertifikasi Kompetensi okupasi Direktur Bisnis, Investasi dan Komisaris Occupational Competency Certification for Business Directors, Investments and Commissioners	29 Aug 23 Aug 29, 23	LSP Penjaminan
M Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	S (Sertifikasi) S (Certification)	Pelatihan dan Sertifikasi Skema GRCCE LSP-GRK Indonesia Training and Certification for the Indonesian LSP-GRK GRCCE Scheme	20 Sep 23 Sep 20, 23	CENTROIS
Fahrul Ismaeni	Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	S (Sertifikasi) S (Certification)	Pelatihan dan Sertifikasi Skema GRCCE LSP-GRK Indonesia Training and Certification for the Indonesian LSP-GRK GRCCE Scheme	20 Sep 23 Sep 20, 23	CENTROIS
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional & Services	S (Sertifikasi) S (Certification)	*Risk Governance & Leadership Masterclass (Refreshment Sertifikasi CERG)*	6 Nov 23 Nov 6, 23	ERM Academy

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Dasar hukum pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is appointed by the Shareholders to provide oversight over the management of the Company run by the Board of Directors. The legal basis for the appointment of the Board of Commissioners is regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Maksud dari *Board Manual* ialah sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Dokumen ini juga mengatur tata hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham yang dikuasakan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara. Ruang lingkup *Board Manual* adalah mengatur dan menjelaskan pelaksanaan hubungan kerja antar organ Dewan Komisaris dan organ Direksi di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

Dalam tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi meliputi, di antaranya:

1. Pertemuan formal;
2. Pertemuan informal;
3. Komunikasi formal;
4. Komunikasi Informal;
5. Laporan berkala;
6. Pelaporan khusus;
7. Surat-menyurat/Memorandum;
8. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan resmi Perusahaan;
9. Benturan kepentingan.

Kriteria Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, persyaratan formal dan materil anggota Dewan Komisaris terdiri dari:

GUIDELINES FOR THE WORK OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The purpose of the Board Manual is to serve as a reference document for the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their duties, authorities, responsibilities, rights and obligations. This document also regulates the relationship between the Board of Commissioners, Directors and Shareholders who are authorized by the Minister of State-Owned Enterprises.
The scope of the Board Manual is to regulate and explain the implementation of working relations between the organs of the Board of Commissioners and the organs of the Board of Directors within the Company by referring to the provisions contained in the Company's Articles of Association and/or the provisions contained in the applicable laws and regulations. The Board of Commissioners is an organ of the Company whose duty is to supervise and provide advice to the Directors in carrying out the Company's management activities.
The management of the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors includes, among others:

1. Formal meeting;
2. Informal meetings;
3. Formal communication;
4. Informal Communication;
5. Periodic reports;
6. Special reporting;
7. Correspondence/Memorandum;
8. Notification of the implementation of official Company activities;
9. Conflict of interest.

CRITERIA FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the provisions in the Minister of BUMN Regulation No. PER-3/MBU/03/2023, the formal and material requirements for members of the Board of Commissioners consist of:

Persyaratan Requirement	**Uraian** Description	
Materiil (Pasal 15) Materials (Article 15)	1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu: a. integritas; b. dedikasi; c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 2. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan juga harus memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan Anak Perusahaan di mana yang bersangkutan dicalonkan.	1. To be appointed as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of an SOE, or member of the Board of Commissioners of a Subsidiary, a person must fulfill the material requirements, namely: a. Integrity b. Dedication c. Understand company management issues related to one of the management functions d. Have adequate knowledge in the field of business in which the person concerned is nominated e. Can provide sufficient time to carry out its duties. 2. In addition to meeting the criteria as intended in paragraph (1), members of the Subsidiary's Board of Commissioners must also have a strong will (enthusiasm) to promote and develop the Subsidiary for which they are nominated.
Syarat Formal (pasal 16) Formal Requirement (Article 16)	Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut: 1. orang perseorangan; 2. mampu melaksanakan perbuatan hukum; 3. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan 5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.	In addition to meeting the criteria as intended in Article 15, to be appointed as a member of the Board of Commissioners of an SOE, or member of the Board of Commissioners of a Subsidiary, a person must fulfill the following formal requirements: 1. Individuals 2. Capable of carrying out legal actions 3. Never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination 4. Never been a member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners/Supervisory Board who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt 5. Never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to nomination

Persyaratan Requirement	Uraian Description	
Persyaratan lainnya (Pasal 17) Other requirement (Article 17)	1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, selain memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 17, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut: a. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota; b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah; c. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan; d. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode; e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris; f. sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. 2. Selain memenuhi kriteria pada ayat (1) di atas, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut: a. bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan; dan b. bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.	1. To be appointed as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of an SOE, or member of the Board of Commissioners of a Subsidiary, in addition to fulfilling the material requirements as intended in Article 15 and the formal requirements as intended in Article 16 or Article 17, a person must also fulfill other requirements as follows: a. not a political party administrator, legislative candidate, and/or legislative member in the People's Representative Council, Regional Representative Council, Provincial People's Representative Council, and Regency/Municipal Regional People's Representative Council; b. not a candidate for head/deputy regional head and/ or head/deputy regional head, including acting head/ deputy regional head; c. not currently occupying a position that has the potential to cause a conflict of interest with the relevant SOEs/Subsidiary; d. not served as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the SOEs or the Board of Commissioners of the Subsidiary concerned for 2 (two) periods; e. not currently occupying a position that is prohibited by law from holding the position of a member of the Board of Commissioners; f. physically and mentally healthy, who is not suffering from an illness that could hinder the performance of their duties as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board, as proven by a health certificate from the hospital; And g. have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have carried out the obligation to pay taxes for the last 2 (two) years. 2. Apart from fulfilling the criteria in paragraph (1) above, members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of BUMN must also fulfill other requirements as follows: a. for prospective candidates from technical ministries or other government agencies, they must be based on a letter of recommendation from the head of the agency concerned; And b. Prospective candidates for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who come from State administrators must report the State Administrator's Asset Report (LHKPN) for the last 2 (two) years as proven by proof of the LHKPN report to the authorized institution.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir tercantum dalam Pasal 14 Ayat 11 disebutkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun, anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya sebagaimana disebutkan pada Ayat 12.

Term of Office

Based on the Company's Articles of Association which have been amended several times and most recently stated in Article 14 Paragraph 11 states that the term of office for members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. However, members of the Board of Commissioners can be dismissed at any time based on a resolution of the General Meeting of Shareholders by stating the reasons as stated in Paragraph 12.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2023

Structure and Composition of The Board of Commissioners for 2023

Susunan Dewan Komisaris Jamkrindo per 31 Desember 2023
Jamkrindo's Board of Commissioners Composition as of December 31, 2023

Nama Names	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Ofiice	Periode Jabatan Tenure
Krisna Wijaya	Komisaris Utama/ Independen Independent/ President Commissioner	SK-243/MBU/10/2022 DAN 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022 SK-243/MBU/10/2022 AND 013/KepSir-PS/BPUI/X/2022	(17 Oktober 2022) 2022-2027 (October 17, 2022) 2022-2027	Ke-1 1st
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 • Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 • Decree of the State Minister of SOEs as A Series Shareholder No. SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019 • Decree of the State Minister of SOEs as A Series Shareholder No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020	17 Oktober 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 October 17, 2019 until the GMS which will be held in 2024	Ke-1 1st
Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. sk-19/mbu/01/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 02/sk-dir/rups-ap/bpui/2021 tanggal 18 Januari 2021 Decree of the State Minister of SOEs as A Series Shareholder No. SK-19/MBU/01/2021 and BPUI Decree as B Series Shareholder No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/2021 dated January 18, 2021	18 Januari 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 January 18, 2021 until the GMS which will be held in 2026	Ke-1 1st
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	• Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 • Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 • Decree of the State Minister of SOEs as A Series Shareholder No. SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019 • Decree of the State Minister of SOEs as A Series Shareholder No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020	3 Januari 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 January 3, 2019 until the GMS which will be held in 2024	Ke-1 1st
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-182/MBU/06/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 tanggal 2 Juni 2021 Decree of the State Minister of SOEs as A Series Shareholder No. SK-182/MBU/06/2021 and BPUI Decree as B Series Shareholder No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 dated June 2, 2021	2 Juni 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 June 2, 2021 until the GMS which will be held in 2026	Ke-1 1st
Angger P. Yuwono	Komisaris Commissioner	SK-217/MBU/07/2023 dan 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 tgl 31 Juli 2023 SK-217/MBU/07/2023 and 16/KepSir-PS/BPUI/VII/2023 dated 31 July 2023	31 Juli 2023 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2028 July 31, 2023 until the GMS which will be held in 2028	Ke-1 1st

Profil singkat masing-masing Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

A brief profile of each Board of Commissioners can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.KN. No. 07 tanggal 07 Oktober 2022. Kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.KN. No. 07 tanggal 07 Oktober 2022) dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran;
2. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi;
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris;
4. Pengawas tidak boleh berubah menjadi pelaksana tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal seluruh jabatan Direksi Perusahaan lowong dan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Pemegang Saham belum mengisi lowong jabatan Direksi tersebut maka untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Komisaris;
5. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara pro-aktif, mencakup seluruh aspek bisnis dan operasional Perusahaan;
6. Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.

1. Umum
   a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
   b. Memiliki itikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
   e. Memantau dan memastikan bahwa praktik *Good Corporate Governance* telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan

Duties, Obligations and Authorities of The Board of Commissioners

The Board of Commissioners is a Company Organ whose job is to carry out general and/or special supervision in accordance with Deed of Notary Hadijah, S.H., No. 10 March 8, 2021, and provide advice to the Board of Directors. Monitoring and advisory activities by the Board of Commissioners are carried out with the following principles:

1. In carrying out supervision, the Board of Commissioners will always comply with the Company's Articles of Association (Notarial Deed of Hadijah, SH No. 10 dated March 8, 2021) and provisions of laws and regulations and implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness;
2. Supervision is carried out by the Board of Commissioners on the management of the Company by the Board of Directors;
3. In carrying out supervision, the Board of Commissioners acts as an assembly and cannot act individually on behalf of the Board of Commissioners;
4. Supervisors may not change to executors of executive duties, except in the event that all positions for the Board of Directors of the Company are vacant and within 30 (thirty) days the Shareholders have not filled the vacant positions for the Board of Directors, then the Company is temporarily managed by the Board of Commissioners;
5. Supervision is carried out not only by simply approving or disapproving actions that require the approval of the Board of Commissioners, but supervision is carried out pro-actively, covering all aspects of the Company's business and operations;
6. The Board of Commissioners may use independent professional services and/or form a Committee to assist the duties of the Board of Commissioners.

1. General
   a. Comply with statutory provisions and/or the Articles of Association;
   b. Having good faith, being full of prudence and responsibility in carrying out tasks for the interests and business of the Company in accordance with the provisions of the laws and regulations;
   c. Supervise the Company's management policies carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including regarding the Company's development plans, Long Term Plans, Work Plans, and Company Budget, implementation of the provisions of the Articles of Association and Shareholders' resolutions, and applicable laws and regulations;
   d. Carry out Company management actions under certain conditions for a certain period of time;
   e. Monitor and ensure that Good Corporate Governance practices have been implemented effectively and sustainably, including by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board

Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*;
f. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya;
g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.

2. Pengawasan
Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan antara lain dengan cara:
a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan;
b. Melakukan kunjungan ke unit kerja/kantor wilayah & cabang/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya;
c. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi;
d. Menugaskan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan tugas-tugas pengawasan.

3. Pelaksanaan Tugas berkaitan dengan Pemegang Saham
Dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:
a. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perusahaan serta perubahan dan penambahannya;
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
c. Melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
d. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Pemegang Saham;
f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham;
g. Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada Pemegang Saham yang dilengkapi dengan alasan pencalonan.

4. Pengelolaan Manajemen Risiko
Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas kebijakan manajemen risiko; perencanaan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi manajemen risiko; serta pelaporan manajemen risiko.

5. Sistem Pengendalian Internal
Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi atas tindaklanjut hasil pemeriksaaan audit.

of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance;
f. Prepare a work plan for the Board of Commissioners for the following year's period;
g. Accountable for the implementation of their duties to Shareholders.

2. Supervision
Supervision by the Board of Commissioners is carried out, among others, by:
a. Request written information from the Board of Directors regarding a problem in the Company;
b. Make visits to certain work units/branch offices/ projects, either with (or without) prior notification to the Board of Directors;
c. Provide responses to periodic reports from the Board of Directors;
d. Assign the Audit Committee, Investment and Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee to carry out supervisory duties.

3. Implementation of Duties related to Shareholders
In relation to Shareholders, the Board of Commissioners has the duty and obligation to:
a. Provide opinions and suggestions to Shareholders regarding the Company's annual Work Plan and Budget and their amendments and additions;
b. Follow the development of the Company's activities, provide opinions and suggestions to Shareholders regarding any issues considered important for the management of the Company;
c. Report immediately to the Shareholders if there are symptoms of a decline in the Company's performance accompanied by suggestions regarding corrective steps that must be taken;
d. Examine, review and sign the Annual Report prepared and submitted by the Board of Directors;
e. Carry out other supervisory duties determined by the Shareholders;
f. Be accountable for the implementation of their duties to Shareholders;
g. Nominate a candidate for External Auditor to the Shareholders accompanied by the reasons for the nomination and the amount of the fee.

4. Management of Risk Management
The Board of Commissioners has the obligation to regularly supervise and provide advice to the Board of Directors regarding the effectiveness of implementing risk management policies.

5. Internal Control System
The Board of Commissioners has the obligation to supervise and provide advice to the Board of Directors in order to establish an effective internal control system, as well as to monitor and evaluate the follow-up of audit results.

6. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
   a. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham, dan Instansi/Lembaga Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
   b. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga informasi penting yang diperlukan oleh Pemangku Kepentingan.
   c. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dan masalah material yang dihadapi.
   d. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   e. Etika Berusaha dan Anti Korupsi. Dewan Komisaris tidak diperkenankan memberikan atau menawarkan atau menerima, sesuatu yang berharga kepada atau dari setiap pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang Dewan Komisaris
   Kewenangan Dewan Komisaris tercantum dalam Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.KN. No. 07 tanggal 07 Oktober 2022 Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 11 Ayat 8 dan Ayat 10, meliputi:
   a. perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dan perbuatan-perbuatan Direksi yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana/usulan Direksi dalam hal:
      i) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah *(Bulid Opearate Transfer*/BTO), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Built Transfer Operate*/BTO), dan kerja sama lainnya dengan nilai dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
      ii) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
      iii) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
      iv) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;

6. Information Disclosure and Confidentiality
   a. The Board of Commissioners oversees that the Board of Directors discloses important information in the Company's Annual Report and Financial Statements to Shareholders, and related Government Agencies/ Institutions in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear, and objective manner.
   b. The Board of Commissioners supervises that the Board of Directors takes the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations but also important information needed by Stakeholders.
   c. The Board of Commissioners oversees that the Board of Directors is active in disclosing the implementation of the principles of Good Corporate Governance and material problems encountered.
   d. The Board of Commissioners is responsible for maintaining the confidentiality of Company information. Confidential information obtained while serving as the Board of Commissioners must remain confidential in accordance with the applicable laws and regulations.
   e. Business Ethics and Anti-Corruption. The Board of Commissioners is not permitted to give or offer or receive anything of value to or from any interested party to influence or as a reward for what has been done and other actions, in accordance with laws and regulations.

7. Authority of the Board of Commissioners
The authority of the Board of Commissioners is listed in the Deed of Notary Bernadette Wirastuti Puntaraksma M.KN. No. 07 dated October 7, 2022 Article 15 Paragraph 2 and Article 11 Paragraph 8 and Paragraph 10, covering:
   a. Actions of the Directors that must obtain written approval from the Board of Commissioners, and actions of the Directors that can only be carried out by the Directors after obtaining a written response from the Board of Commissioners and the approval of the Shareholders. The Board of Commissioners has the authority to approve or reject in writing the plan/suggestion of the Board of Directors in terms of:
      i) Holding cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BTO), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation with a certain value and period determined by the General Meeting of Shareholders;
      ii) Write off bad debts and dead goods inventory from the books;
      iii) Releasing movable fixed assets with an economic age that is generally valid in the industry in general up to 5 (five) years;
      iv) Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;

v) Melakukan penyertaan modal dan pengurangan persentase pernyertaan modal pada perusahaan lain yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
vi) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
vii) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
viii) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
ix) Mengikat perusahaan sebagau penjamin (*borg* atau *avalist*), kecuali pemberian penjaminan yang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan;
x) Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
xi) Melepaskan dan menghapuskan aktiva/aset tetap Perusahaan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
xii) Menetapkan cetak biru (*blueprint*) organisasi Perusahaan;
xiii) Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
xiv) Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
xv) Membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan;
xvi) Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan; dan/atau
xvii) Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham;

xviii) Melakukan investasi dan pembiayaan jangka Panjang;
xix) Melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perusahaan yang tidak bertentangan denganketenuan peraturan perundang-undangan.

b. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan; memasuki pekarangan, gedung dan, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan; meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya yang mengenai segala persoalan

v) Make equity participation and reduce the percentage of equity participation in other companies that must be approved by the Shareholders;
vi) Establish a subsidiary and/or joint venture company;
vii) Release equity participation in subsidiaries and/or joint ventures;
viii) Carry out mergers, consolidations, acquisitions, separations, and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;

ix) Bind the Company as a guarantor (borg or avalist), except for giving guarantees which are the implementation of the Company's business activities;
x) No longer collect bad debts that have been written off;
xi) Releasing and writing of the Company's fixed assets with the usual economic life in the industry, generally more than 5 (five) years, which must be approved by the Shareholders;

xii) Establish a corporate organizational blueprint;

xiii) Establish and change the Company logo;
xiv) Carry out other actions that have not been stipulated in the Company's Work Plan and Budget;
xv) Establish foundations, organizations and/or associations, either directly or indirectly related to the Company which may have an impact on the Company;
xvi) Imposition of fixed and routine Company fees for foundations, organizations and/or associations that are directly or indirectly related to the Company; and/or

xvii) Proposals for representatives from the Company to become candidates for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners in joint ventures and/or subsidiaries that make a significant contribution to the Company and/or have strategic value determined by the General Meeting of Shareholders;

xviii) Make long-term investments and financing;
xix) Issuance of bonds and other debt securities by the Company that are not against the provisions of laws and regulations.

b. Enter the grounds, buildings and offices used by the Company and have the right to see books, letters and other documents, examine cash for verification purposes, examine Company assets; ask for an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding Company management issues; know all the policies and actions that have been and

yang menyangkut pengelolaan Perusahaan; mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan Direks; meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

c. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu; melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
d. Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan.
e. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangam, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

will be carried out by the Board of Directors, and ask the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the meeting of the Board of Commissioners; attend Board of Directors meetings and provide opinions on matters discussed.

c. Appoint and dismiss the secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary; form other committees besides the Audit Committee, if deemed necessary taking into account the Company's capabilities; use experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense, if deemed necessary; carry out actions to manage the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association.
d. The Board of Commissioners may temporarily dismiss members of the Board of Directors if members of the Board of Directors act contrary to the Articles of Association, or if there are indications of causing losses to the Company, neglecting their obligations, or if there are urgent reasons for the Company to do so;
e. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with the Articles of Association, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and/or provisions of laws and regulations.

Pembagian Lingkup Tugas Antar Dewan Komisaris

Pembagian tugas Dewan Komisaris mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Indonesia Nomor KEP-04/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Jamkrindo, dan berikut tugas dan tanggung jawabnya:

Distribution of Duties Between The Board of Commissioners

The division of duties of the Board of Commissioners refers to the Decree of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia No. KEP-04/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 concerning the Distribution of Duties of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo, and the following duties and responsibilities:

No	Nama Names	Jabatan Position	Tugas Duties
1	Krisna Wijaya	Komisaris Utama/ Independen Independent/President Commissioner	Melakukan koordinasi dengan segenap anggota Komisaris maupun perangkat Dewan Komisaris berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris serta khususnya dalam bidang Bisnis Penjaminan, dan Manajemen Risiko Coordinate with all members of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners organs in relation to the duties and authorities of the Board of Commissioners and especially in the field of Guarantee Business and Risk Management.
2	Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Keuangan, dan Operasional. Handle activities related to the duties and authorities of the Board of Commissioners, especially in the field of Finance and Operations
3	Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Investasi, Manajemen SDM, dan Umum. Handle activities related to the duties and authorities of the Board of Commissioners, especially in the fields of Investment, HR Management, and General Affairs.

No	Nama Names	Jabatan Position	Tugas Duties
4	Muhammad Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Jaringan dan Kepatuhan. Handle activities related to the duties and authorities of the Board of Commissioners, especially in the field of Network and Compliance.
5	Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Kelembagaan, dan Layanan. Handle activities related to the duties and authorities of the Board of Commissioners, especially in the field of Institutions and Services.
6	Angger P. Yuwono	Komisaris Commissioner	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Bisnis Penjaminan. Handling activities related to the duties and authority of the Board of Commissioners, especially in the field of Guarantee Business.

Program Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan wawasan maka Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan yang diimplementasikan dalam bentuk mengikuti/ menghadiri Pelatihan, Seminar, *Workshop*, atau pertemuan ilmiah di dalam atau di luar negeri. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengikuti 6 (enam) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Competency Development Program

In order to improve knowledge, competence and insight, the Board of Commissioners carried out activities which are implemented in the form of attending training, seminars, workshops or scientific meetings at home or abroad. In 2023, the Board of Commissioners has participated in 6 (six) activities, with the following details:

No.	Waktu Time	Tempat Location	Topik/Tema Topic/Theme	Peserta Participants	Penyelenggara Organizers
1	11-18 Maret 2023 March 11-18, 2023	Hungaria, Austria, dan Republik Ceko Hungary, Austria and the Czech Republic	*Workshop Global GRC Benchmark Series* – 5, 2023	M Muchlas Rowi	Centrois
2	14 Juni 2023 June 14, 2023	Webinar/ Seminar *Online* Webinar/ Online Seminar	Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Guarding Productivity for Economic Transformation	Krisna Wijaya	BPKP
3	3-4 Agustus 2023 Agustus 3–4, 2023	Yogyakarta	Program Penyegaran Tim Penilai Klarifikasi Penilaian Kemampuan dan eKepatutan Pihak Utama Bank Umum Tahun 2023 Assessment Team Refreshment Program Clarification of Capability and Conformity Assessment for Main Parties of Commercial Banks in 2023	Krisna Wijaya	Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority
4	20-21 September 2023 September 20-21, 2023	Surabaya	*Governance, Risk, and Compliance Certified Executive* (GRCCE)	M Muchlas Rowi	Centrois kolaborasi dengan LSP GRK Indonesia Centrois collaborates with LSP GRK Indonesia
5	07-09 November 2023 November 7-9, 2023	Singapura Singapore	*Stewardship and Portofolio Management Training Program*	Desty Arlaini	Kementerian BUMN kolaborasi dengan Temasek Holding Singapura The Ministry of SOEs collaborates with Temasek Holding Singapore
6	20-21 November 2023 November 20-21, 2023	Switzerland	*Boards and Risks - Risk Governance and Prevention in a Chaotic World*	Hernita Alius	IMD - International Institute for Management Development

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2023

Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2023 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) aspek strategis, yaitu aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat, aspek Pelaporan, dan aspek Dinamis. Di dalam masing-masing aspek tersebut dirumuskan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2023.

Seluruh aspek dan masing-masing aktivitas/kegiatan di dalamnya dirumuskan dengan pendekatan pemenuhan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku.

1. Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat
   Sebagaimana diuraikan di atas, tugas Dewan Komisaris adalah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat. Adapun pokok-pokok kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023, yaitu:
   a. Rapat Internal Dewan Komisaris
      Kegiatan ini merupakan rapat rutin bulanan (minimal dua kali dalam sebulan) yang dilaksanakan secara internal Dewan Komisaris dan dihadiri oleh organ pendukung (Komite-Komite, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Dewan Komisaris) dengan agenda utamanya adalah pembahasan kinerja bulanan Perusahaan baik kinerja keuangan maupun operasional. Apabila diperlukan, rapat internal Dewan Komisaris juga dapat dilakukan setiap minggu dengan agenda yang diajukan oleh Komite. Dalam rapat internal Dewan Komisaris dapat juga membahas dan memutuskan hal-hal terkait dengan kewenangan Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
   b. Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi
      Kegiatan ini pada dasarnya merupakan rapat Dewan Komisaris, yang dalam pelaksanaannya dapat mengundang Direksi guna meminta penjelasan atas masalah kinerja Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap penting. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) dilaksanakan rutin setiap bulan (minimal satu kali dalam sebulan). Selain ituDewan Komisaris juga dapat menyelenggarakan Rapat tematik atas permasalahan/isu strategis tertentu dengan mengundang Direktur Teknis dan/atau Divisi terkait guna memperoleh penjelasan dan pembahasan lebih detail dan spesifik dari agenda rapat yang diajukan.
   c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2023
      Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2023 dilakukan dalam rangka memperoleh pengesahan dari Pemegang Saham (Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B) atas

Brief Report on The Implementation of Duties and Responsibilities of The Board of Commissioners In 2023

The Board of Commissioners' Work Program for 2023 was aimed to achieve 3 (three) strategic aspects, namely the Supervision and Advice Provision aspect, the Reporting aspect, and the Dynamic aspect. In each of these aspects, the activities that will be carried out by the Board of Commissioners in 2023 are formulated.

All aspects and each activity in it are formulated with an approach to fulfilling the duties and obligations of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and other applicable statutory provisions.

1. Aspects of Supervision and Providing Advice
   As described above, the duties of the Board of Commissioners are to carry out supervision and giving advice. The main activities to be carried out in 2023 are:

   a. Board of Commissioners' Internal Meeting. This activity is a routine monthly meeting (minimum twice a month) held internally by the Board of Commissioners and attended by supporting organs (Committees, Secretary to the Board of Commissioners, and Staff of the Board of Commissioners) with the main agenda being a discussion of the Company's monthly financial and operational performance. If necessary, internal meetings of the Board of Commissioners can also be held every week with an agenda proposed by the Committee. In internal meetings, the Board of Commissioners may also discuss and decide matters related to the authority of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association.

   b. Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors. This activity is basically a meeting of the Board of Commissioners, which in practice may invite the Board of Directors to ask for clarification on Company performance issues and other matters deemed important. Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors are held routinely every month (at least once a month). In addition, the Board of Commissioners may also hold thematic meetings on certain issues by inviting the relevant Technical Director and/or Division to obtain a more detailed and specific explanation and discussion of the proposed agenda.

   c. General Meeting of Shareholders (GMS) on RKAP 2022. The 2022 RKAP General Meeting of Shareholders (GMS) is held in order to obtain approval from the Shareholders (the Minister of SOEs as the A Series Dwiwarna Shareholder and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the B Series Shareholder) on the proposed Work Plan and Corporate Budget for the 2022 Fiscal Year which previously discussed with

usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2023 yang sebelumnya telah dibahas bersama dengan Dewan Komisaris. Pelaksanaan rapat biasanya pada bulan pertama pada tahun buku berjalan.

d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2022 (*Audited*)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kinerja Perusahaan Tahun Buku 2022 (Audited) dilakukan dalam rangka memperoleh pengesahan dari Pemegang Saham (Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B) atas hasil kinerja Perusahaan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh auditor eksternal independen dan juga telah dibahas bersama dengan Dewan Komisaris. Pelaksanaan rapat biasanya pada semester pertama pada tahun buku berikutnya.

Adapun rapat pembahasan bersama antara Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris, dan Direksi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi sebagai dasar bagi Dewan Komisaris menyusun tanggapan untuk disampaikan kepada Pemegang Saham.

e. Pemberian Saran dan Nasihat kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan
Pemberian saran dan nasihat atau masukan kepada Direksi disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Pemberian saran dan masukan tersebut didokumentasikan dalam risalah rapat dan/atau surat tersendiri yang memuat hal-hal terkait dengan permasalahan-permasalahan strategis, antara lain:
   i) Pencapaian kinerja keuangan dan operasional Dewan Komisaris melakukan telaah atas laporan berkala dan tahunan yang disampaikan oleh Direksi. *Monitoring* capaian kinerja juga rutin dilakukan setiap bulan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Evaluasi kinerja keuangan dan operasional dilakukan pada Perusahaan termasuk Kantor Wilayah & Kantor Cabang, dan Anak Perusahaan.

   ii) Pencapaian Kinerja Unit Kerja Daerah
   Monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja di daerah (Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Unit Pelayanan) dilakukan secara berkala baik melalui laporan manajemen triwulan dan/atau tahunan maupun per bulan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Pengawasan kinerja unit kerja di daerah juga bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja pada unit-unit yang telah diagendakan dan/atau dipandang perlu *monitoring* & evaluasi melalui diskusi secara langsung.

the Board of Commissioners. Meetings are usually held in the first month of the current financial year.

d. General Meeting of Shareholders (GMS) Company Performance for Fiscal Year 2021 (Audited).
The General Meeting of Shareholders (GMS) for the Company's performance for the 2021 Fiscal Year (Audited) is held in order to obtain approval from the Shareholders (Ministry of BUMN as the A Series Dwiwarna Shareholder and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the B Series Shareholder) for the results of the Company's performance for the financial year 2020 which has been audited by an independent external auditor and has also been discussed with the Board of Commissioners. Meetings are usually held in the first semester of the following fiscal year.

Meanwhile, joint discussions between the Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners, and the Board of Directors are held at least 1 (one) time a year to obtain explanations and clarifications as a basis for the Board of Commissioners to prepare responses to be submitted to Shareholders.

e. Provision of Advice and Suggestion to the Board of Directors in the Management of the Company.
Provision of suggestions and advice or input to the Board of Directors is conveyed in the Board of Commissioners' Meeting with the Board of Directors. The provision of suggestions and input is documented in the minutes of the meeting and/or a separate letter which contains matters related to strategic issues, including:
   i) Achievement of financial and operational performance The Board of Commissioners reviews the periodic and annual reports submitted by Directors. Monitoring of performance achievements is also routinely carried out every month in the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors. Financial and operational performance is carried out at the Company, Subsidiaries, and Branch Offices.
   ii) Branch Performance Achievement Monitoring and evaluation of the performance of work units in the regions (regional offices, branch offices and service unit offices) is carried out regularly either through quarterly and annual management reports or monthly in the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors. Branch performance monitoring can also be carried out by conducting work visits to work units that have been scheduled and/or deemed necessary for direct evaluation and discussion.

iii) Pemenuhan Kepatuhan (*compliance*)
Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi beserta jajaran manajemen dalam; menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga, menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.

iv) Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan investasi
Guna optimalisasi kinerja investasi Perusahaan, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan portofolio investasi dan evaluasi capaian kinerja investasi secara berkala serta memberi saran dan nasehat perbaikan secara spesifik atas pelaksanaan kegiatan investasi. Pengawasan kinerja investasi Perusahaan atau tindakan pengurusan Perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan manajemen risiko.

v) Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan pemberian saran/masukan/arahan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan yang antara lain tertuang dalam surat dan/atau risalah rapat. Berikut hal-hal yang terkait pelaksanaan GCG di Perusahaan, antara lain:

- Penyusunan RJPP dan RKAP
  Dewan Komisaris menjalankan mekanisme untuk memberikan tanggapan atas rancangan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disampaikan oleh Direksi serta menyampaikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Pemegang Saham.
- Perubahan Lingkungan Bisnis dan Permasalahannya yang Berdampak pada Usaha dan Kinerja Perusahaan Dewan Komisaris dibantu Komite mengindentifikasi dan mengumpulkan informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada kegiatan usaha dan/atau kinerja Perusahaan. Jika isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya berdampak signifikan, maka Dewan Komisaris akan memberikan respon dan melakukan telaah visi dan misi dikaitkan dengan perubahan lingkungan bisnis tersebut. Dengan demikian, permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja Perusahaan termonitor melalui respon Dewan Komisaris.

iii) Fulfillment of compliance The Board of Commissioners supervises and monitors the compliance of the Board of Directors in; carrying out applicable laws and regulations and agreements with third parties, running the Company according to the RKAP and/or RJPP.

iv) Policy and Implementation of Investment Management To optimize the Company's investment performance, the Board of Commissioners supervises investment portfolio management policies and periodically evaluates investment performance achievements as well as provides specific suggestions and recommendations for improvements needed with regard to oversight of investment performance. Supervision of the Company's investment performance or Company management actions in accordance with the principles of good corporate governance.

v) Implementation of Good Corporate Governance (GCG) In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is tasked with supervising and providing suggestions/inputs/directions on management policies and the course of management of the Company, which among other things is contained in letters and/or minutes of meetings. The following are matters related to the implementation of GCG in the Company, including:

- Preparation of RJPP and RKAP. The Board of Commissioners operates a mechanism to provide approval or response to the draft RKAP and RJPP submitted by the Board of Directors as well as submit written opinions and suggestions to Shareholders.

- Changes in the Business Environment and the Problems that Impact the Company's Business and Performance. The Board of Commissioners identifies and collects information on the business environment and problems that are expected to impact the Company's business and Company performance. If the issue of changes in the business environment and the problems have a significant impact, the Board of Commissioners will respond and review the vision and mission in relation to the changes in the business environment. Therefore, there are no problems/ challenges (threats and opportunities) that occur and have a significant impact on the Company's performance which the Board of Commissioners does not respond to.

- Respon/Tindak Lanjut atas Saran, Permasalahan atau Keluhan dari *Stakeholder*
  Dewan Komisaris menjalankan mekanisme untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan, atau keluhan dari stakeholder, termasuk *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut arahan dari Pemegang Saham, serta menyampaikan kepada Direksi perihal saran penyelesaian.
- Kebijakan Manajemen Risiko
  Dewan Komisaris memberikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan, diantaranya meliputi:
  - » Rencana kerja unit manajemen risiko;
  - » Hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya;
  - » Laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan Direksi.

- Kebijakan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan Pelaksanaannya Dewan Komisaris memberikan saran dan arahan atas kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi yang diterapkan oleh Perusahaan termasuk permasalahan/ kendala yang dihadapi & yang terjadi.
- Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir dan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
  Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengelolaan SDM, khususnya manajemen pengembangan SDM dan karir di Perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan promosi, mutasi dan demosi, di Perusahaan dan pelaksanaannya. Termasuk tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Direksi berkenaan dengan pemilihan calon Anggota Direksi (perusahaan) kepada Pemegang Saham, dan pemilihan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.

- Kebijakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) dan Pelaksanaan.
  Dewan Komisaris menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Kebijakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan agar senantiasa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) termasuk pelaksanaannya.
- Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaannya.

- Response/Follow Up on Suggestions, Problems, or Complaints from Stakeholders. The Board of Commissioners operates a mechanism to respond/follow up on suggestions, problems, or complaints from stakeholders, including monitoring and evaluating the follow-up of directives from Shareholders, as well as submitting suggestions to the Board of Directors for resolution.
- Risk Management Policy. The Board of Commissioners provides guidance on improving the quality of the Company's risk management policies and implementation which include:
  - » Risk management unit work plan;
  - » Results of risk analysis on the RKAP design and its handling strategy;
  - » Periodic reports on the implementation of risk management submitted by the Board of Directors.
- Implementation of Information Technology System Policy. The Company and the Board of Commissioners provide guidance regarding the policies and implementation of information technology systems used by the Company

- Policy and Implementation of Career Development and Human Resource Management (MSDM).
  The Board of Commissioners provides guidance regarding HR management policies, particularly HR management and career development in the Company, promotion systems and procedures, transfers and promotions, transfers and demotions, in the Company and their implementation. It includes the Board of Commissioners' response to the Board of Directors' proposal regarding the selection of candidates for members of the Board of Directors (of the Company) to Shareholders, and the selection of candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/Joint venture according to the established policies and selection criteria.
- Accounting policies and preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK) and implementation. The Board of Commissioners carries out supervision and provides advice on Accounting Policies and the preparation of financial reports in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK) and its implementation.
- Goods and Services Procurement Policy and its Implementation. The Board of Commissioners

Dewan Komisaris menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya.

- Kebijakan Mutu dan Pelayanan.
  Dewan Komisaris memberikan saran dan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan Perusahaan serta pelaksanaannya.
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga.
  Dewan Komisaris menjalankan pengawasan dan memberikan nasihat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. Apabila terdapat pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan tindakan sesuai kewenangannya dan melaporkan kepada Pemegang Saham.
- Transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham
  Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenai transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- Efektivitas Pelaksanaan Telaah Pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.
  Dewan Komisaris menjalankan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan telaah pengaduan terkait dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.
- Pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.
  Dewan Komisaris menjalankan pemantauan kinerja Direksi berdasarkan telaahan atas kriteria, target, dan indikator kinerja utama sebagaimana tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi. Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi baik kolegial maupun individu dalam secara berkala.

- Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*).
  Dewan Komisaris melaksanakan pemantauan serta memberikan arahan tentang penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap:
  - » Laporan hasil *assessment/review* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, GCG kode, dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau

carries out supervision and provides advice on goods and services procurement policies and their implementation.

- Quality and Service Policy. The Board of Commissioners provides guidance regarding the Company's quality and service policies.

- Compliance with Legislation and Agreements with Third Parties. The Board of Commissioners carries out supervision and provides advice on compliance with laws and regulations and agreements with third parties. If there is a violation by the Board of Directors, the Board of Commissioners takes action according to their authority and reports it to the Shareholders

- Transactions or actions of the Board of Directors within the scope of the authority of the Board The Board of Commissioners discuss transactions or actions of the Board of Directors within the scope of the authority of the Board of Commissioners or Shareholders, as stipulated in the Company's Articles of Association.
- The effectiveness of the implementation of the review of complaints related to SOE. The Board of Commissioners carries out oversight of the effectiveness of reviewing complaints related to SOEs received by the Board of Commissioners.
- Monitoring the performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders. The Board of Commissioners carries out monitoring of the performance of the Board of Directors based on a review of the criteria, targets and key performance indicators included in the Directors' Management Contract individually with the realization of each achievement. The Board of Commissioners submits the results of the performance assessment of the Board of Directors collegially and individually in semiannual and annual supervisory assignment reports.
- Implementation of Good Corporate Governance Principles. The Board of Commissioners carries out monitoring and provides guidance regarding the application of the principles of Good Corporate Governance to:
  - » Report on the results of the assessment/review of the implementation of Good Corporate Governance, GCG code, and other technical policies/provisions, as well

tindaklanjut area of improvement hasil *assessment* GCG oleh Direksi;
» Laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan.

- Penelaahan usulan remunerasi Direksi.
  Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham setiap tahun pada saat Pengesahan Laporan Tahunan. Usulan remunerasi Direksi ditanggapi oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan penilaian capaian kinerja Direksi.

- Pengukuran dan Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris.
  Pengukuran Pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara triwulanan dan tahunan melalui mekanisme *self assessment*. Pada saat pengesahan RKAP Perusahaan, Dewan Komisaris mengajukan usulan *Key Performance Indicators* untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham dan dijadikan salah satu dasar penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pada saat pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan, Dewan Komisaris menyampaikan hasil pengukuran dan penilaian atas pencapaian *Key Performance Indicators* tersebut kepada Pemegang Saham di dalam laporan tugas pengawasan.

f. Evaluasi Kinerja Auditor Eksternal
   Kegiatan ini merupakan salah satu program Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara khusus dengan bantuan Komite Audit guna mengevaluasi kinerja auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP). Kegiatan ini dilakukan guna memastikan Perusahaan mendapatkan mitra audit yang independen, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

g. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal
   Kegiatan ini juga merupakan program Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara khusus dengan bantuan Komite Audit guna mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dalam pengurusan Perusahaan. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan SOP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pengawasan Terhadap Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan dan Pelaksanaannya
   Kegiatan ini dilaksanakan tidak secara langsung kepada entitas anak perusahaan/perusahaan patungan, melainkan melalui komunikasi dengan Direksi perusahaan induk khususnya dalam

as monitoring the follow-up of areas of improvement on the results of the GCG assessment by the Board of Directors;
» GCG report which is disclosed in the annual report.

- Review of the Board of Directors' remuneration proposal. The remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined by the Shareholders every year at the ratification of the Annual Report. The Board of Commissioners needs to respond to the Board of Commissioners' remuneration proposal in accordance with applicable regulations and the Board of Directors' performance assessment.
- Measurement and Assessment of the Performance of the Board of Commissioners.
  Measurement and assessment of the performance of the Board of Commissioners is carried out annually through a self-assessment mechanism. At the time of ratification of the Company's RKAP, the Board of Commissioners submits Key Performance Indicators proposals for approval from Shareholders and is used as one of the basis for assessing the performance of the Board of Commissioners. At the time of ratification of the Company's Annual Report, the Board of Commissioners conveys the results of measurement and assessment of the achievement of the Key Performance Indicators to Shareholders in the Supervisory Task Report

f. External Auditor Performance
   Evaluation This activity is one of the programs of the Board of Commissioners which is carried out specifically with the assistance of the Audit Committee to evaluate the performance of the external auditor (Public Accountant Office/KAP). This activity is carried out to ensure that the Company gets an audit partner who is independent, credible and accountable.

g. Evaluation of the Internal Control System
   This activity is also a program of the Board of Commissioners which is carried out specifically with the assistance of the Audit Committee to evaluate the effectiveness of the implementation of the Internal Control System in managing the Company. This activity is carried out to ensure that the Company carries out its operational activities in accordance with the SOP and applicable laws and regulations.

h. Supervision of Subsidiaries/Joint Venture and Their Implementation
   This activity is carried out not directly to the subsidiaries/ joint venture, but through communication with the Board of Directors of the parent entity, especially in the monthly meeting

forum rapat bulanan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan usaha anak perusahaan/perusahaan patungan.

i. Dalam pengawasan, Dewan Komisaris juga memberikan arahan tentang kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. Komite melakukan evaluasi terhadap arah pengelolaan dan kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan, serta membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran dan masukan perbaikan kepada Direksi.

2. Aspek Pelaporan

Aspek pelaporan meliputi kegiatan Dewan Komisaris dalam menyusun rencana kerja dan menyampaikan laporan berkala selama tahun 2023 sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku, yaitu:

a. Memberikan Tanggapan atau Pendapat Terhadap Hal-Hal yang Memerlukan Persetujuan/Rekomendasi/Keputusan/Tanggapan Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan lainnya, antara lain:
   i) Pengusulan Auditor Eksternal;
   ii) Perubahan Struktur Organisasi;
   iii) Usulan Bakal Calon Direksi;
   iv) Cuti Tahunan Direksi;
   v) Perubahan Susunan Organ Dewan Komisaris;
   vi) Laporan Keuangan dan Kegiatan Perusahaan (triwulanan & tahunan);
   vii) Rencana Penyertaan Modal Perusahaan;
   viii) Pelepasan Aktiva Tetap Perusahaan;
   ix) Penghapusan dari Pembukuan Piutang Macet dan Persediaan Barang Mati;
   x) dan Lainnya.
b. Menyusun Laporan Berkala Tugas Pengawasan (Triwulanan) Tahun 2023.
c. Menyusun Laporan Berkala Hasil Evaluasi atas Kinerja Perusahaan Tahun 2023 (Triwulanan).
d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024.
e. Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Dewan Komisaris Tahun 2024.

3. Aspek Dinamis

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2023 adalah:

a. *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan/atau Cabang.
   Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan *fact finding* serta mengevaluasi melalui diskusi dengan Direksi dan/atau Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Unit Pelayanan, pejabat lainnya dan karyawan Perusahaan mengenai segala tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang dan/atau Kantor Unit Pelayanan serta permasalahan yang dihadapi. Laporan hasil *monitoring* dan evaluasi kinerja dipergunakan

forum. This activity is intended to ensure the continuity of the subsidiary/joint venture business.

i. In its supervision, the Board of Commissioners also provides guidance regarding policies and management of subsidiaries/joint companies. The Committee evaluates the direction of management and performance of subsidiaries/joint ventures related to the Company's business development vision, as well as assisting the Board of Commissioners in providing suggestions and input for improvements to the Board of Directors.

2. Reporting Aspect

The reporting aspect includes the activities of the Board of Commissioners in preparing work plans and submitting periodic reports for 2023, in accordance with the Articles of Association and other applicable laws and regulations, namely:

a. Provide Responses or Opinions on Matters Requiring Approval/Recommendations/Decisions/Responses of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association or other regulations, including:
   i) Proposal of external auditors;
   ii) Changes in Organizational Structure;
   iii) Proposals for Candidates for the Board of Directors;
   iv) Directors Leave Permit;
   v) Changes in the Composition of the Board of Commissioners' Organs;
   vi) Company Financial and Activity Reports, both quarterly and annually;
   vii) Company Equity Participation Plan;
   viii) Sale of Company Assets;
   ix) Write-off of Bad Debts and Inventory of Dead Goods;
   x) and Others.
b. Compile 2023 Supervisory Duty Periodic Reports (Quarterly).
c. Prepare Periodic Reports on the Evaluation Results of the Company's Performance in 2023 (Quarterly).
d. Prepare the 2023 Board of Commissioners Work Plan and Budget.
e. Prepare Performance Achievement Indicators (GPA) for the Board of Commissioners for 2023

3. Dynamic Aspect

Activities to be carried out by the Board of Commissioners in 2023 are:

a. Monitoring and Evaluation of the Performance of Regional Offices and/or Branches; This activity aims to obtain information and fact finding as well as evaluate and discuss with the Directors, Heads of Regional Offices, Heads of Branch Offices, Heads of Service Unit Offices, other officials, and Company employees regarding all actions that have been and will be carried out by Regional Offices and/or Branch Offices and/or Service Unit Offices and problems encountered. Reports on the results of performance monitoring and evaluation are used by the Board of Commissioners to be discussed in the

Dewan Komisaris untuk didiskusikan dalam rapat Dewan Komisaris dan apabila diperlukan juga disampaikan kepada Direksi agar dilakukan langkah tindaklanjut perbaikan.

b. Seminar/*workshop*/pelatihan/studi banding
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris sehingga ilmu yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat.

Board of Commissioners' meetings and if necessary submitted to the Board of Directors for follow-up.

b. Seminars/workshops/training/comparative studies
This activity aims to increase the knowledge, insight, and competence of members of the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners so that it is hoped that this will become material for the consideration of the Board of Commissioners in carrying out the oversight and advisory functions.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan kunjungan ke lapangan guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat/jelas mengenai bidang atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 6 (enam) kali kunjungan, dengan rincian sebagai berikut:

Working Visit of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners carries out field visits to obtain a more accurate/clear picture and information regarding areas or matters that require attention. In 2023, the Board of Commissioners has carried out 6 (six) visits, with the following details:

No.	Tanggal Kunjungan Date of Visits	Tempat Tujuan Visited Places	Perihal Matters	Peserta Participants
1.	10 Januari 2023 Januari 10, 2023	Kantor Wilayah VII Denpasar dan Kantor Cabang Denpasar Denpasar Region VII Office and Denpasar Branch Office	*Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah VII Denpasar dan Kantor Cabang Denpasar Monitoring and Evaluation of the Performance of Denpasar Region VII Office and Denpasar Branch Office	1. M Muchlas Rowi 2. Setyo Puji H 3. Safari Mirza
2.	05 Mei 2023 May 5, 2023	Kantor Cabang Lampung Lampung Branch Office	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Cabang Lampung Monitoring and Evaluation of the Performance of Lampung Region	1. M Muchlas Rowi 2. Hernita Alius 3. Safari Mirza
3.	31 Mei 2023 May 31, 2023	Kantor Wilayah I Medan, Kantor Cabang Tanjung Pinang, dan Kantor Cabang Batam Medan Regional Office I, Tanjung Pinang Branch Office, and Batam Branch Office	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah I Medan, Kantor Cabang Tanjung Pinang, dan Kantor Cabang Batam Monitoring and Evaluation of the Performance of Medan Regional Office I, Tanjung Pinang Branch Office, and Batam Branch Office	1. M Muchlas Rowi 2. Hernita Alius 3. Safari Mirza
4.	11 September 2023 September 11, 2023	Kantor Cabang Padang Padang Branch Office	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kantor Cabang Padang Monitoring and Evaluation of the Performance of Padang Branch Office	1. M Muchlas Rowi 2. Hernita Alius 3. Mas Dharmawan Suryadi
5.	06 Desember 2023 December 6, 2023	Kanwil V Semarang dan Kanca Semarang Regional Office V, Semarang and Semarang Branch Office	*Monitoring* Evaluasi Kinerja Kanwil V Semarang dan Kanca Semarang Monitoring and Evaluation of the Performance of Regional Office V, Semarang and Semarang Branch Office	1. Krisna Wijaya 2. Fahrul Ismaeni
6.	11 Desember 2023 December 11, 2023	Kantor Cabang Malang Malang Branch Office	Monitoring Evaluasi Kinerja Kantor Cabang Malang Monitoring and Evaluation of the Performance of Malang Branch Office	1. Krisna Wijaya 2. M Muchlas Rowi 3. Ari Wahyuni 4. Hernita Alius 5. Angger P Yuwono 6. Setyo Puji H 7. Safari Mirza 8. Sukamdani Eko Basuki 9. Fahrul Ismaeni 10. Lando Simatupang 11. Mas Dharmawan Suryadi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki tugas pokok, yakni melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Komisaris memiliki 14 kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf b. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dapat tergambar dari surat-surat Dewan Komisaris, baik yang ditujukan kepada Direksi, Menteri BUMN selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai Pemegang Saham/Holding dan maupun pihak lain.

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners has the main task, namely to supervise and provide advice. In carrying out these duties, the Board of Commissioners has 14 obligations as described in article 15 paragraph 2 letter b. The implementation of the duties and obligations of the Board of Commissioners can be illustrated from the letters of the Board of Commissioners, both addressed to the Board of Directors, the Minister of BUMN as Capital Owner/Share Holder, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Share Holder/Holding and other parties.

Penilaian Kinerja Organ Pendukung dan Komite di Bawah Dewan Komisaris Berikut Dasar Penilaiannya

Assessment of The Performance of Supporting Organs and Committees Under The Board of Commissioners and The Basis for The Assessment

Penilaian Kinerja Komite Audit

Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan secara *self-assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Masing-masing kegiatan/aktivitas Program Kerja dalam lingkup Komite Audit dirumuskan kuantitasnya dan diberikan bobot, kemudian dijadikan tolok ukur capaian kinerja Komite Audit secara keseluruhan.

Audit Committee Performance Assessment

Evaluation of the performance of the Audit Committee, both individually and collectively, is carried out by self-assessment using the evaluation method in a system determined by the Board of Commissioners. Each work program activity/activity within the scope of the Audit Committee is formulated in quantity and given a weight, then used as a benchmark for the performance of the Audit Committee as a whole

Hasil Pengukuran Kinerja Komite Audit
Audit Committee Performance Measurement Results

INDIKATOR INDICATORS	RUMUSAN FORMULATION	TARGET 1 Thn TARGET 1Yr	BOBOT WEIGHT	REAL	SKOR SCORE
Aspek Pengawasan & Pengarahan: ASPECT OF SUPERVISION AND GUIDANCE:			**60%**		**60**
Menyelenggarakan Rapat Komite Organizing Committee Meetings	Jumlah rapat Komite Number of Committee Meetings	12 kali 12 Times	15%	12 kali 12 Times	15
Mengikuti Rapat Dekom Joining the Board of Commissioners Meeting	Jumlah rapat Dekom Number of BoC Meetings	12 kali 12 Times	15%	12 kali 12 Times	15
Evaluasi terhadap Auditor Eksternal Evaluation of the External Auditor	Jumlah rapat/surat/laporan Number of Meetings/Letters/ Reports	1 kali 1 Time	15%	1 kali 1 Time	15
Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal Evaluation of the Internal Control System	Jumlah rapat/surat/laporan Number of Meetings/Letters/ Reports	2 kali 2 Times	15%	2 kali 2 Times	15
Aspek Pelaporan: REPORTING ASPECTS:			**30%**		**30**
Menyusun program kerja tahunan Develop an annual work program	Jumlah Program Kerja Komite Number of Committee Work Programs	1 kali 1 Time	5%	1 kali 1 Time	5
Membantu menyusun laporan/pendapat/saran kepada Pemilik Modal/Pemegang Saham Assist in compiling reports/opinions/ suggestions to Capital Owners/Shareholders	Jumlah surat Tanggapan Dekom Number of BoC's Response Letters	4 kali 4 Times	10%	4 kali 4 Times	10
Membantu Dekom menyusun laporan tugas pengawasan Assist the Board of Commissioners in compiling supervisory duty reports	Jumlah Laporan Tugas Pengawasan Number of Supervisory Reports	4 kali 4 Times	10%	4 kali 4 Times	10
Membantu Dekom menyusun balasan/ tanggapan surat Direksi Assisting the Board of Commissioners prepares replies/responses to the Directors' letters	% jumlah surat yang ditanggapi sesuai ketentuan Number of Supervisory Reports	100%	5%	100%	5

Hasil Pengukuran Kinerja Komite Audit
Audit Committee Performance Measurement Results

INDIKATOR INDICATORS	RUMUSAN FORMULATION	TARGET 1 Thn TARGET 1Yr	BOBOT WEIGHT	REAL	SKOR SCORE
Aspek Dinamis/Lain-lain: DYNAMIC ASPECTS/OTHERS:			**10%**		**20**
Mengikuti kegiatan kunjungan Dekom Participating in visiting activities of the Board of Commissioners/Board of Supervisors	Jumlah kunjungan yang diikuti Number of Visits Joined	2 kegiatan 2 Activities	5%	4 kegiatan 4 Activities	10
Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan Participate in competence and knowledge improvement activities	Jumlah pelatihan/seminar workshop/ yang diikuti Number of Workshops/ Training/ Seminars Participated	1 kegiatan 1 Activity	5%	2 kegiatan 2 Activities	10
Jumlah Bobot Total Weight			**100%**		**110**

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Evaluasi terhadap kinerja Komite Pemantau Risiko, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan secara *self-assessment* dengan menggunakan metoda evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Masing-masing kegiatan/aktivitas Program Kerja dalam lingkup Komite Pemantau Risiko dirumuskan kuantitasnya dan diberikan bobot, kemudian dijadikan tolok ukur capaian kinerja Komite Pemantau Risiko secara keseluruhan.

Performance Assessment of the Risk Monitoring Committee

Evaluation of the performance of the Risk Monitoring Committee, both individually and collectively, is carried out in a self-assessment using an evaluation method in a system determined by the Board of Commissioners. The quantity for each activity of the Work Program within the scope of the Risk Monitoring Committee is formulated and given a weight, then used as a benchmark for the overall performance of the Risk Monitoring Committee

Pengukuran Kinerja Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Performance Measurement

INDIKATOR INDICATORS	RUMUSAN FORMULATION	TARGET 1 Thn TARGET 1Yr	BOBOT WEIGHT	REAL	SKOR SCORE
Aspek Pengawasan & Pengarahan: ASPECT OF SUPERVISION AND GUIDANCE			**60%**		**60%**
Menyelenggarakan Rapat Internal Komite Organizing Internal Committee Meetings	Jumlah rapat Komite Number of Committee Meetings	12 kali 12 Times	20%	12 kali 12 Times	20%
Mengikuti Rapat Internal dengan Dewan Komisaris Participated in internal meetings with the Board of Commissioners	Jumlah rapat Dewan Komisaris Number of BoC Meetings	12 kali 12 Times	20%	12 kali 12 Times	20%
Mengikuti Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Teknis Joining the Board of Commissioners' Meeting with the Technical Directors	Jumlah rapat Number of Meetings	12 kali 12 Times	20%	12 kali 12 Times	20%
Aspek Pelaporan: REPORTING ASPECTS:			**30%**		**30%**
Menyusun program kerja tahunan Komite (RKA Komite) Prepare the Committee's annual work program (RKA Committee)	Jumlah Program Kerja Komite Number of Committee's Work Program	1 kali 1 Time	15%	1 kali 1 Time	15%
Menyusun Laporan triwulanan/laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite. Prepare quarterly reports/annual reports on the implementation of the Committee's duties	Jumlah Laporan Tugas Pengawasan Number of Supervisory Task Reports	4 kali 4 Times	10%	4 kali 4 Times	10%

Pengukuran Kinerja Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Performance Measurement

INDIKATOR INDICATORS	RUMUSAN FORMULATION	TARGET 1 Thn TARGET 1Yr	BOBOT WEIGHT	REAL	SKOR SCORE
Membantu Dewas menyusun balasan/ tanggapan surat Direksi. (Laporan Kinerja Investasi periodik setiap bulan) Helping the Board of Directors prepare replies/ responses to the Board of Directors' letters. (Periodic Investment Performance Report every month)	% jumlah surat yang ditanggapi sesuai ketentuan Percentage of Number of Letters Responded, In Accordance with the Regulations	100%	5%	100%	5%
Aspek Dinamis/Lain-lain: DYNAMIC/OTHER ASPECTS:			**10%**		**10%**
Kunjungan kerja ke Kantor Cabang/ Perwakilan dalam rangka pengumpulan data dan evaluasi kinerja serta penerapan manajemen risiko Working visits to Branch/Representative Offices in order to collect data and evaluate performance and apply risk management	Jumlah kunjungan/ Laporan Number of visits/reports	2 kali 2 Times	5%	1 kegiatan 1 Activity	2,50%
Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan Participate in competence and knowledge improvement activities	Jumlah pelatihan/ seminar/*workshop*/ yang diikuti. Number of training/ seminars/ workshops/ participated.	1 kegiatan 1 Activity	5%	0 kegiatan 0 Activity	0
Jumlah Bobot Total Weight			**100%**		**92,5%**

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, agar dapat menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, kriteria Komisaris Independen adalah berkewarganegaraan Indonesia; dan berdomisili di Indonesia.
Komisaris Independen Lembaga Penjamin, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who are not affiliated with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders and are free from business relationships or other relationships that may affect their ability to act independently in accordance with GCG principles, in order to create a more favorable, objective and independent business climate.

Criteria for Members of The Independent Board of Commissioners

In accordance with OJK Regulation No. 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, the criteria for an Independent Commissioner are Indonesian citizens; and domiciled in Indonesia.
Independent Commissioner of Guarantee Institution, must meet the following requirements:

1. Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, or shareholders of the Guarantee Institution, in the same Guarantee Institution;
2. Never been a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of the Sharia Supervisory Board or held a position 1 (one) level below the Board of Directors at the same Guarantee Institution or other business entity that has an affiliation with the Guarantee Institution within 6 (six)) last month;

3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; dan
4. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.

3. Understand the laws and regulations in the field of Guarantee, Sharia Guarantee, Re-Guarantee, and/or Sharia Re-Guarantee and other relevant laws and regulations; and
4. Has good knowledge of the financial condition of the Guarantee Institution of which the Independent Commissioner is serving.

Komisaris Independen Jamkrindo dan Pernyataan Independensinya

Jumlah Komisaris Independen Jamkrindo adalah sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana terlampir pada pembahasan Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2023, atau mencapai 60,00% dari jumlah keseluruhan Dewan Komisaris Perusahaan di tahun 2023.

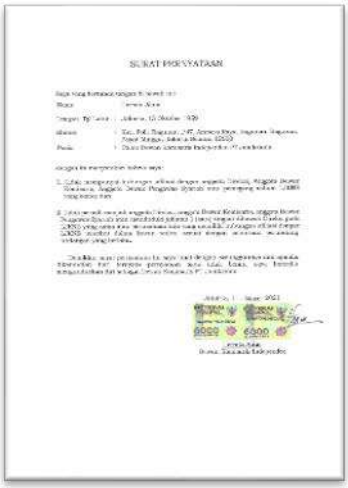
Independent Commissioner of Jamkrindo and Their Statement of Independence

The number of Jamkrindo Independent Commissioners is 3 (three) people as attached in the discussion of the 2022 Composition of the Board of Commissioners, or 60.00% of the total number of the Company's Board of Commissioners in 2023.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen
Statement of Independence of Independent Commissioners







TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

INFORMATION TRANSPARENCY ABOUT THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dunia usaha, khususnya pada bidang penjaminan selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Terlebih bisnis ini merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan target pasar Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Atas dasar tersebut, dibutuhkan beragam kompetensi dan keahlian serta pengalaman di level manajemen Perusahaan khususnya pada Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan agar senantiasa dapat menjawab tantangan dunia usaha dengan kebijakan-kebijakan strategisnya.

Perusahaan menilai bahwa keberagaman komposisi sangat diperlukan, meskipun regulasi dan Peraturan Perundang-undangan terkait belum mengatur hal tersebut. Keberagaman Komposisi pada Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman serta gender dapat memberikan berbagai macam sudut pandang terkait strategi pengelolaan Perusahaan agar menjadi lebih baik dan berkualitas.

Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola perusahaan dirancang untuk dapat menciptakan iklim yang mendorong adanya partisipasi konkret seluruh pemangku kepentingan serta adanya keberagaman dalam susunan komposisi Dewan Komisaris maupun Direksi. Keberagaman ini diwujudkan melalui pembentukan komposisi Dewan Komisaris maupun Direksi yang memenuhi berbagai aspek yang diperlukan baik dari segi kualifikasi akademis, keterampilan, usia serta atas dasar prinsip anti diskriminasi. Berikut keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan belum memiliki kebijakan yang secara spesifik mengatur keberagaman susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam Pedoman GCG yang dimiliki Perusahaan, disebutkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi dipilih oleh Pemegang Saham melalui mekanisme yang diatur oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham, dengan fokus utama memiliki latar belakang pengalaman/ pengetahuan di bidang penjaminan.

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The business world, particularly in the field of guarantees, is always experiencing quite dynamic developments. Moreover, this business is one of the important sectors in driving the growth of the national economy with a target market of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives. On this basis, various competencies and expertise and experience are needed at the Company's management level, especially at the Company's Board of Commissioners and Directors so that they can always respond to the challenges of the business world with their strategic policies.

The Company considers that diversity in composition is necessary, even though the relevant regulations and laws have not regulated this matter. The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors which consists of academic qualifications, expertise, experience and gender can provide various perspectives regarding the Company's management strategy so that it becomes better and of better quality.

Therefore, the implementation of corporate governance is designed to be able to create a climate that encourages concrete participation of all stakeholders and diversity in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors. This diversity is manifested through the formation of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors which fulfills the various aspects required both in terms of academic qualifications, skills, age and on the basis of anti-discrimination principles. The following is the diversity of composition owned by each member of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Diversity Policy for the Board of Commissioners and Directors

The Company does not yet have a policy that specifically regulates the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors. In the Company's GCG Guidelines, it is stated that the Board of Commissioners and the Board of Directors are elected by the Shareholders through a mechanism regulated by the Minister of SOEs as the proxy of the Shareholders, with the main focus being on having background experience/ knowledge in the field of guarantee.

Berikut disampaikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2023

The following is the diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2023

Nama Names	Jabatan Position	Warga Negara Citizenship	Kualifikasi Akademik Academic Qualification	Usia Age	Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Krisna Wijaya	Komisaris Utama/Independen Independent/President Commissioner	Indonesia	Doctor Studi Antar Bidang (Ilmu Studi Kebijakan) Doctor of Interdisciplinary Studies (Policy Studies	68	Laki-laki Male
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Doktor Program Studi Teologi Doctor of Theological Studies	51	Laki-laki Male
Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	Indonesia	Magister Manajemen dan Magister Sains Master of Management and Master of Science	64	Perempuan Female
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	Indonesia	Magister Public Management Master of Public Management	57	Perempuan Female
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	47	Perempuan Female
Angger P. Yuwono	Komisaris Commissioner	Indonesia	Sarjana Matematika Bachelor's Degree in Mathematics	64	Laki-laki Male
Direksi Board of Directors					
Akhmad Purwakajaya	Direktur Utama President Director	Indonesia	Sarjana Ekonomi Bachelor of Economy	53	Laki-laki Male
Henry Panjaitan	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	54	Laki-laki Male
Achmad Ivan S Soeparno	Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan Director of HRM, General Affairs, and Compliance	Indonesia	*Master of Business Administration*	57	Laki-laki Male
Suwarsito	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	51	Laki-laki Male
Abdul Bari	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Institutional and Services	Indonesia	*Doctor Human Resource Management*	48	Laki-laki Male
Alia Nur Fitri	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	Indonesia	Magister Manajemen Master of Management	53	Perempuan Female

PENILAIAN PENERAPAN GCG UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Aspek Dewan Komisaris

Skor hasil asesmen pada aspek Dewan Komisaris mencapai 33,673 atau 96,208% dari bobot keseluruhan sebesar 35,000 pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya yaitu 33,742 atau 96,406%, terdapat penurunan sebesar 0,069 pada aspek Dewan Komisaris.

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Board of Commissioners' Aspect

The assessment score on the Board of Commissioners' aspect reached 33.673 or 96.208% of the overall weight of 35,000 in 2023. When compared to the previous year's score of 33.742 or 96.406%, there was a decrease of 0.069 in the Board of Commissioners aspect.

Aspek Direksi

Skor hasil asesmen pada aspek Direksi mencapai 33,803 atau 95,581% dari bobot keseluruhan sebesar 35,000 pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya yaitu 33,755 atau 96,433%, terdapat kenaikan sebesar 0,048 pada aspek Dewan Komisaris

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Dewan Komisaris mengacu kepada *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 sebagaimana Risalah RUPS No B.293/EKT/DIRUT/RUPS/I/2023 Salah satu keputusan yaitu menyetujui dan menetapkan kontrak manajemen (*Key Performance Indicators*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham PT Jamkrindo Tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Adapun Pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial dilakukan berdasarkan capaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang mencakup aspek-aspek berikut:

Board of Directors' Aspect

The assessment score on the Board of Directors' aspect reached 33,803 or 95.581% of the overall weight of 35,000 in 2023. When compared to the previous year's score of 33.755 or 96.433%, there was an increase of 0.048 in the Board of Commissioners aspect.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Assessment of the Board of Commissioners'

Performance The Board of Commissioners' assessment refers to the 2022 Key Performance Indicators (KPI) which have been ratified through the General Meeting of Shareholders regarding Ratification of the 2023 Work Plan and Corporate Budget (RKAP) as stated in the Minutes of GMS No B.293/EKT/DIRUT/RUPS/I/2023. One of the decisions is to approve and establish a management contract (Key Performance Indicators) between the Board of Commissioners and the Shareholders of PT Jamkrindo for 2023 which refers to the Minister of SOEs Regulation concerning the Implementation of Good Corporate Governance.

As for the collegial measurement and performance assessment of the Board of Commissioners, it is carried out based on Key Performance Indicators (KPI) achievements which cover the following aspects:

No	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	KPI		Bobot Weight	TW IV QIV		Bobot Weight
		Jumlah Total	Satuan Unit		Jumlah Total	Satuan Unit	
I	**ASPEK PENGAWASAN dan PENGARAHAN** ASPECTS OF SUPERVISION AND GUIDANCE			60			60
1.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	12	Rapat Meetings	10,00	12	Rapat Meetings	10,00
2.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2023 General Meeting of Shareholders (GMS) on RKAP 2023	1	Rapat Meetings	10,00	1	Rapat Meetings	10,00
3.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kinerja Perusahaan Tahun 2022 (*Audited*) General Meeting of Shareholders (GMS) on Company Performance in 2022	1	Rapat Meetings	10,00	1	Rapat Meetings	10,00
4.	Pemberian Saran dan Masukan Kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan Provision of Advice and Input to the Board of Directors in the Management of the Company	12	Dokumen Documents	10,00	12	Dokumen Documents	10,00
5.	Evaluasi Terhadap Auditor Eksternal Evaluation of the External Auditor	1	Rapat Meetings	5,00	1	Rapat Meetings	5,00
6.	Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal Evaluation of the Internal Control System	1	Rapat Meetings	5,00	1	Rapat Meetings	5,00
7.	Pengawasan Terhadap Anak Perusahaan Supervision of Subsidiaries	1	Rapat Meetings	10,00	1	Rapat Meetings	10,00
	Sub Jumlah 1 Subtotal I			**60,00**			**60,00**

No	PROGRAM KERJA WORK PROGRAM	KPI		Bobot Weight	TW IV QIV		Bobot Weight
		Jumlah Total	Satuan Unit		Jumlah Total	Satuan Unit	
II	**ASPEK PELAPORAN** REPORTING ASPECTS			**30**			**30**
1.	Memberikan Tanggapan/Pendapat Terhadap Hal-Hal Yang Memerlukan Persetujuan dan/atau Rekomendasi Dewan Komisaris Sesuai Ketentuan Dalam Anggaran Dasar atau Peraturan Lainnya Provide Responses/Opinions on Matters Requiring Approval and/or Recommendations from the Board of Commissioners In Accordance with Provisions in the Articles of Association or Other Regulations	4	Dokumen Documents	10,00	6	Dokumen Documents	15,00
2.	Menyusun Laporan Berkala Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (Triwulanan) Tahun 2023 Prepare the 2023 Board of Commissioners Oversight Duty Report (Quarterly).	4	Dokumen Documents	5,00	4	Dokumen Documents	5,00
3.	Menyusun Tanggapan atas Laporan Berkala Hasil Evaluasi atas Kinerja Perusahaan Tahun 2023 (Triwulanan) Prepare Responses to Periodic Reports of Evaluation Results on Company Performance in 2023 (Quarterly)	4	Dokumen Documents	5,00	4	Dokumen Documents	5,00
4.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024 Prepare the Board of Commissioners Work Plan and Budget for 2024	1	Dokumen Documents	5,00	1	Dokumen Documents	5,00
5.	Menyusun dan Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2024 Compile and Propose Performance Achievement Indicators for the Board of Commissioners in 2024	1	Dokumen Documents	5,00	1	Dokumen Documents	5,00
	Sub Jumlah II Subtotal II			30,00			32,50
III	**ASPEK DINAMIS** DYNAMIC ASPECTS			**10**			**10**
1.	*Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan/ atau Cabang Monitoring and Evaluation of the Performance of Regional Offices and/or Branches	6	Kegiatan Activities	5,00	6	Kegiatan Activities	5,00
2.	Seminar/*Workshop* Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris Seminars/Workshops in the Context of Increasing the Competence of Members of the Board of Commissioners and Board of Commissioners' Organs	4	Kegiatan Activities	5,00	6	Kegiatan Activities	7,50
	Sub Jumlah III Subtotal III			**10,00**			**12,50**
	Jumlah Total			**100,00**			**108,33**

Sistem Penilaian:
1. Penilaian maksimal sesuai dengan bobot masing-masing indikator
2. Kriteria hasil penilaian:

Scoring system:
1. Maximum assessment according to the weight of each indikator
2. Criteria for assessment results:

No.	Realisasi Skor Score Realization	Kriteria Criteria
1.	> 95 (maksimal 100) > 95 (maximum 100)	Sangat Baik Very Good
2.	> 80 s.d. 94 > 80 to 94	Baik Good
3.	> 65 s.d. 80 > 65 to 80	Cukup Moderate

No.	Realisasi Skor Score Realization	Kriteria Criteria
4.	> 50 s.d. 65 > 50 to 65	Kurang Poor
5.	< 50 < 50	Sangat Kurang Bad

Sedangkan realisasi pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individual mengacu pada surat keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo No. KEP-02/DK-JAMKRINDO/IV/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2018 tentang Kebijakan Terkait Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, berikut realisasi capaian kinerja individual masing-masing Dewan Komisaris :

The realization of measuring and evaluating the performance of the Board of Commissioners individually refers to the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo No. KEP-02/DK-JAMKRINDO/IV/2023 dated April 28, 2023 concerning Amendments to the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-04/DP-JAMKRINDO/III/2018 concerning Policies Related to the Performance Assessment of the Board of Commissioners, along with the realization of the individual performance achievements of each Board Commissioner:

Nama Names	Bobot Persentase Capaian Skor KPI Dekom Weight Percentage of Board of Commissioners' KPI Score Achievement	Persentase Kehadiran Dewan Komisaris				Bobot persentase kehadiran rapat Meeting Attendance Weight Percentage	Total Persentasi Capaian Kinerja Individu Total Percentage of Individual Performance Achievement
		Rapat Dewan Komisaris dgn Direksi Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors	Rapat Internal Internal Meeting	Rapat Umum Pemegang Saham General Meetings of Shareholders	Total Kehadiran Rapat Total Meeting Attendance		
	1	2	3	4	5=2+3+4	6=5*30%	7=1+6
Krisna Wijaya	75,8	40	40	20	100	30	105,8
Ari Wahyuni	75,8	40	40	20	100	30	105,8
Muhammad Muchlas Rowi	75,8	40	40	20	100	30	105,8
Hernita Alius	75,8	40	40	20	100	30	105,8
Desty Arlaini	75,8	37	40	20	97	29,1	104,9
Angger P Yuwono	75,8	40	40	20	100	30	105,8

Sistem Penilaian:

1. Realisasi capaian total skor KPI Dewan Komisaris, bobot 70%
   Perhitungan mencakup:
   a. Aspek pengawasan dan pengarahan, bobot 60%.
   b. Aspek pelaporan, bobot 30%.
   c. Aspek dinamis, bobot 10%.
2. Realisasi persentase kehadiran Dewan Komisaris (individual) dalam rapat, bobot 30%.

   Perhitungan bobot per jenis rapat, yaitu:
   a. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, bobot 40%.
   b. Rapat Internal, bobot 40%.
   c. Rapat Umum Pemegang Saham, bobot 20%.

Scoring system:

1. Realization of the total achievement of the Board of Commissioners' KPI score, weight 70%
   Calculations include:
   a. Supervision and guidance aspects, weight 60%.
   b. Reporting aspect, weight 30%.
   c. Dynamic aspect, weight 10%.
2. Realization of the percentage of attendance of the Board of Commissioners (individuals) at meetings, with a weight of 30%.
   Calculation of weights per type of meeting, namely:
   a. Meetings of the Board of Commissioners and Directors, weight 40%.
   b. Internal Meetings, weight 40%.
   c. General Meeting of Shareholders, weight 20%.

Pengukuran kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara mandiri (*self-assessment*) untuk selanjutnya dievaluasi sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham, dalam bentuk Laporan Triwulanan Perkembangan Realisasi KPI dan Laporan Tahunan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Penilaian atau evaluasi kinerja Direksi melekat pada *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia NOMOR PER - 11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen Dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan. Adapun yang melakukan penilaian adalah setiap unit kerja sesuai perpektif atau Indikator Kinerja.

Indikator untuk mengukur kinerja Direksi yang melekat pada penilaian KPI Perusahaan, terdiri dari 5 (Lima) Perspektif atau Indikator (Nilai Ekonomi Dan Sosial Untuk Indonesia Financial, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, Pengembangan Talenta). Secara umum, kinerja dari program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 secara umum dapat dikatakan telah mencapai target dengan pencapaian skor KPI (*Key Performance Indicator*) sebesar 101,55 dengan rincian sebagai berikut:

The performance measurement of the Board of Commissioners is carried out independently (self-assessment) and then evaluated as input to improve the performance of the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties and providing advice to the Board of Directors. Furthermore, these results are submitted to Shareholders, in the form of a Quarterly Report on the Development of KPI Realization and an Annual Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners.

Assessment of the performance of the Board of Directors

The assessment or evaluation of the performance of the Board of Directors is attached to the Company's Key Performance Indicator (KPI), which refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER - 11/ MBU/11/2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for Directors and Regulations of the Minister of State for State Owned Enterprises Number PER-10/ MBU/2014 dated July 25, 2014 concerning Indicators for Soundness Rating of State-Owned Enterprises Financial Services in the Insurance and Guarantee Services Business Sector. Those who carry out the assessment are each work unit according to the perspective or Performance Indicators.

Indicators to measure the performance of the Board of Directors are attached to the Company's KPI assessment, consisting of 5 (Five) Perspectives or Indicators (Economic and Social Value for Indonesia Financial, Business Model Innovation, Technology Leadership, Increasing Investment, Talent Development). In general, the performance of work programs and activities conducted during 2023 is considered to have achieved the target with the achievement of a KPI (Key Performance Indicator) score of 101.55 with the following details:

Kategori Category		#	KPI	Formula	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target 2023 2023 Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Nilai Score
Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	Finansial Financial	1.A	Ebitda	*Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses + Gain (loss) on Forex + Invome from Associated Entities and Joint Ventur*	Rp Miliar	Maximize	5	1.906	1.879	98,59%	4,93
		1.B	*Roe Return On Equity* (Roe)	Laba Bersih Tahun Berjalan / *Average total Equity* Net Profit for the Year / Average total Equity	%	Maximize	5	10,39%	10,98%	10,98%	5,28
		2	*Gearing* Rasio Total Total Of Gearing Ratio	*Outstanding* Penjaminan / Ekuitas Outstanding Guarantee/ Equity	Kali	Minimize	5	22,41	24,49	91,52%	4,58
	Operasional Operational	3	Penyelesaian Audit Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu Sesuai Ketentuan Timely Completion Of Financial Statement Audits In Accordance With Regulations	Penyelesaian audit laporan keuangan tahun 2022 paling lambat pada 31 Maret 2023, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Completion of the audit of the 2022 financial statements no later than March 31, 2023, with an unqualified opinion (WTP)	Waktu	Minimize	6	31 Maret 2023	6 April 2023	98,36%	5,90
		4	*Recovery Rate Subrogation*	Pendapatan Subrogasi / Beban Klaim Disetujui Konsolidasi Subrogation Income/ Consolidated Approved Claims Expense	%	Maximize	5	29,99%	17,78%	59,30%	2,97
		5.A	*Collection Rate Premi/Ijp*	Outstanding piutang IJP dengan jangka waktu ≤ 2 bulan / Total Piutang IIJP Outstanding Guarantee Fee Income (IJP) receivables with maturity ≤ 2 months / Total IIJP Receivables	%	Maximize	5	13,34%	18,88%	141,53%	5,50
		5.B	*Days Sales Outstanding*	*Average aging* dari piutang (DSO = *days sales outstanding*) Average aging of receivables (DSO = days sales outstanding)	Hari	Maximize	5	200	139,66	143,00%	5,50
		6	Penguatan Manajemen Risiko Strengthening Risk Management	Progres penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pengukuran *Risk Maturity Index* di tahun 2022 Progress on completion of follow-up on recommendations for measuring Risk Maturity Index in 2022	%	Maximize	5	100%	100,00%	100,00%	5,00
	Sosial Social	7	*Volume* Penjaminan Kur Kur Guarantee Volume	Pemenuhan Market share 50% dari *Volume* penjaminan KUR yang ditargetkan oleh Pemerintah apda tahun 2023 Market share fulfillment of 50% of KUR guarantee volume targeted by the Government in 2023	%	Maximize	5	100%	52,43%	104,85%	5,24

Kategori Category	#	KPI	Formula	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target 2023 2023 Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Nilai Score
Inovasi Bisnis Model Business Model Innovation	8.A	Hasil *Underwriting* Konsolidasi Consolidated Underwriting Result	Hasil Underwritting Konsolidasi (Pendapatan *Underwritting* – Beban *Underwriting*) Consolidated Underwriting Results (Underwriting Income - Underwriting Expenses)	Rp Miliar	Maximize	5	2.314	2.777	120,03%	5,50
	8.B	Hasil *Underwriting* Non Program Non-Program Underwriting Result	Hasi *Underwriting* Non Program Induk (Non KUR Non PEN) Non Parent Program Underwriting Results (Non KUR Non PEN)	Rp Miliar	Maximize	4	287	2.494	868,99%	4,40
	9	*Combiner Rasio* (Cor)	*Loss Ratio + Expense Ratio*	%	Maximize	5	77,72%	112%	69,57%	3,48
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	10	Implementasi Sistem Konsolidasi Laporan Keuangan Terintegrasi Dan Mis Terintegrasi (*Front End Dan Back End*) Implementation Of Integrated Financial Report Consolidation System And Integrated Mis (Front End And Back End)	Progres pemenuhan integrasi laporan keuangan dan dari *business driver* indikator yang telah ditetapkan* (Laporan Keuangan, *Claim* per LOB, *Gearting Ratio*) Progress in fulfilling the integration of financial reports and business driver indicators that have been set* (Financial Report, Claim per LOB, Gearting Ratio)	%	Maximize	5	100%	133,33%	133,33%	5,50
	11	Pengembangan *Channel* Pemasaran Digital Development Of Digital Marketing Channels	IJP dari *channel* pemasaran *digital* *Guarantee Fee Income* (IJP) from digital marketing channels	Rp Miliar	Maximize	5	1,3	1,6	123,26%	5,50
Peningkatan Investasi Increasing Investment	12.A	*Yield On Investment* (Yoi)	Pendapatan investasi / rata-rata total investasi Investment income / average total investment	%	Maximize	4	5,13%%	5,61%	109,35%	4,37
	12.B	Pertumbuhan Aum Konsolidasi Consolidated Aum Growth	(Nilai aset investasi akhir tahun 2023 / nilai aset investasi akhir tahun 2022) -1 (Investment asset value end of 2023 / investment asset value end of 2022) -1	%	Maximize	4	4,90%	23,05%	470,32%	4,40
	13	Pencapaian KPI PMN PMN KPI Achievement	Realisasi Indikator KPI PMN (Pelaporan dan efektivitas penggunaan PMN (*Gearing Ratio*)) Realization of PMN KPI Indicators (Reporting and effective use of PMN (Gearing Ratio))	%	Maximize	7	100%	100,00%	100,00%	7,00

Kategori Category	#	KPI	Formula	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target 2023 2023 Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Nilai Score
Pengembangan Talenta Talent Development	14.A	Perempuan Dan Milenial (<42 Tahun) Dalam *Top Talent* Women And Millennials (<42 Years Old) In Top Talent	1. (Jumlah *Top *Talent* Milenial/Jumlah Top Talent) X 100% (Target 20%) 2. (Jumlah **Top Talent* Milenial/Jumlah *Top Talent*) X 100% (Target 15%) 1. (Number of *Top Millennial Talents / Number of Top Talents) X 100% (Target 20%) 2. (Number of *Millennial Top Talent/Number of Top Talent) X 100% (Target 15%)	%	Maximize	5	100%	1. 33,33% 2. 16,67%	138,89%	5,50
	14.B	Impelentasi *Talent Mobility* Implementation Of Talent Mobility	Presentase *top talent* (BOD-1 atau setara) yang mengalami *talent mobility* anggota holding Percentage of top talent (BOD-1 or equivalent) who experience talent mobility of holding members	%	Maximize	4	10%	15,00%	150,00%	4,40
	15	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio	Rasio Pemenuhan kualifikasi organ pengelolaan risiko = Jumlah personil organ pengelola risiko yang memenuhi kualifikasi / Jumlah personil seluruh oragn pengelola risiko Risk management organ qualification fulfillment ratio = Number of qualified risk management organ personnel/Number of all risk management organ personnel	%	Maximize	6	10%	73,91%	739,13%	6,00
TOTAL						**100**				**101,56**

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

Di tahun 2023 tidak dilaksanakan program kerja implementasi KPKU, hal ini dikarenakan memperhatikan arahan pemegang saham yang mendorong Perusahaan melakukan transformasi perusahaan dengan implementasi INDI 4.0.

SUPERIOR PERFORMANCE RATING CRITERIA (KPKU)

In 223, the KPKU implementation work program was not carried out, this was due to paying attention to shareholder directives that encourage Companies to carry out corporate transformation by implementing INDI 4.0.

TATA KELOLA REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan diusulkan dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan membahas pertimbangan usulan, hasil survei dengan

REMUNERATION GOVERNANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Proposal Procedure and Mechanism Up to Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Determination of remuneration for the Board of Commissioners and Directors of the Company refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 concerning the Sixth Amendment to the Minister of SOEs Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs.

The remuneration of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is proposed at the Board of Commissioners Meeting, by discussing the consideration

industri sejenis dan sektor lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi mengusulkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS, dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri dan kemampuan Perusahaan, untuk kemudian ditetapkan dalam RUPS.

of the proposal, the results of surveys with similar industries and other sectors. The Board of Commissioners and the Board of Directors propose to the Shareholders through the GMS, with due observance of Ministerial Regulations and the capability of the Company, to then be determined at the GMS.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan dalam Rapat Dewan Komisaris Remuneration for the Board of Commissioners and Directors is proposed at the Board of Commissioners Meeting	→	**Hasil usulan remunerasi dalam Rapat Dewan Komisaris diusulkan dalam RUPS** The results of the proposed remuneration at the Board of Commissioners' meeting are proposed at the GMS	→	**RUPS menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi** The GMS determines the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors

Faktor perhitungan atas usulan besaran remunerasi:

1. Pertimbangan usulan yang ada
2. Hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya
3. Kemampuan Perusahaan

Calculation factors for the proposed amount of remuneration:

1. Consideration of existing proposals
2. Survey results with similar industries and other sectors
3. Company Capabilities

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh Pemegang Saham serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh Pemegang Saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan.

Remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out on the basis of a formula determined by the Shareholders and has been reviewed by the Board of Commissioners through in-depth study conducted by the Shareholders. The decision to determine the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined through the Annual GMS.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021, komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

1. Remunerasi Dewan Komisaris
   a. Honorarium;
   b. Tunjangan;
   c. Fasilitas;
   d. Tantiem/Insentif Kinerja;
   e. Pajak atas Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Remunerasi Direksi
   a. Gaji;
   b. Tunjangan;
   c. Fasilitas;
   d. Tantiem/Insentif Kinerja;
   e. Pajak atas Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.

Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan sebagai berikut:

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Directors

Based on the Minister of SOEs Regulation No. PER-13/MBU/09/2021, the income components for the Board of Commissioners and Directors consist of:

1. Remuneration for the Board of Commissioners
   a. Honorarium;
   b. Allowance
   c. Facility;
   d. Tantiem/Performance Incentives;
   e. Taxes on Honorarium, Allowances and Facilities for the Board of Commissioners are borne and become the burden of the Company. Meanwhile, taxes on Tantiem/ Performance Incentives for the Board of Commissioners are borne and become the burden of each member of the Board of Commissioners.
2. Board of Directors remuneration
   a. Wages;
   b. Allowances;
   c. Facility;
   d. Tantiem/Performance Incentives;
   e. Taxes on Salaries, Allowances and Facilities for the Board of Directors are borne and become the burden of the Company. Meanwhile, taxes on Tantiem/ Performance Incentives for the Board of Directors are borne and become the burden of each member of the Board of Directors.

The remuneration structure and its components for the Board of Commissioners and Directors are presented as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration Structure	Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration Structure
1. Honorarium Dewan Komisaris Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama b. Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama 1. HONORARIUM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS Is a fixed income in the form of money received every month because of his position as a member of the Company's Board of Commissioners, with the following conditions: a. The calculation of the President Commissioner's salary is 45% of the President Director's salary b. The calculation of the Commissioner's salary is 90% of the President Commissioner's salary	1. Gaji Direksi Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Seri A. b. Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama 1. Directors' Salaries Is a fixed income in the form of money received every month because of his position as a member of the Company's Board of Directors, with the following conditions: a. The President Director's salary is determined using internal guidelines stipulated by the Minister of SOEs as the proxy of the A Series Shareholders. b. Calculation of other Director's salary is 85% of the President Director's salary
1. Tunjangan Dewan Komisaris Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium, yang dapat berupa: a. Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya. b. Tunjangan Transportasi, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya sebesar 20% dari perhitungan gaji. c. Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari honorarium per tahun. 1. Allowances for The Board of Commissioners Is income in the form of money or that can be valued in money received at a certain time by members of the Board of Commissioners other than Honorarium, which can be in the form of: a. Religious Holiday Allowance, given at most 1 (one) time of fixed income per month in each year. b. Transportation Allowance, given 1 (one) time per month in the amount of 20% of the salary calculation. c. Post-Employment Insurance, provided with the condition that the premium borne by the Company is at most 25% of the honorarium per year.	1. Tunjangan Direksi Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa: a. Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya. b. Tunjangan Perumahan, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya. c. Tunjangan Operasional, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya. d. Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun. 1. Board of Directors' Allowance Is income in the form of money or that can be valued in money received at a certain time by members of the Board of Directors other than salary, which can be in the form of: a. Religious Holiday Allowance, given at most 1 (one) time of fixed income per month in each year. b. Housing Allowance, given 1 (one) time per month. c. Operational Allowance, given 1 (one) time per month. d. Retirement Insurance, provided with the condition that the premium borne by the Company is at most 25% of salary per year.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration Structure	Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration Structure
1. Fasilitas Dewan Komisaris Adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang- undangan, yang dapat berupa: a. Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk kepesertaan asuransi/penggantian biaya pengobatan. b. Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perusahaan.	1. Fasilitas Direksi Adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa: a. Fasilitas Kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai Faktor Jabatan. b. Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk kepesertaan asuransi/penggantian biaya pengobatan. c. Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perusahaan.
1. Facilities for The Board of Commissioners Is income in the form of facilities and/or benefits and/ or guarantees used/ utilized by members of the Board of Commissioners in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of: a. Health facilities, provided in the form of insurance membership/ reimbursement of medical expenses. b. Legal Aid Facility, provided if necessary, in the event of an action/deed for and on behalf of the position related to the Company.	1. Directors' Facilities Is income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/ utilized by members of the Board of Directors in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of: a. Vehicle Facilities, provided with 1 (one) unit of official vehicle along with maintenance and operational costs with specifications and standards according to Position Factors. b. Health facilities, provided in the form of insurance membership/ reimbursement of medical expenses. c. Legal Aid Facility, provided if necessary, in the event of an action/deed for and on behalf of the position related to the Company
1. Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris a. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahaan Laporan Tahunan apabila Realisasi Pencapaian Key Performance Indicators melebihi 100%. b. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris. c. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: i) Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama sebesar 45% dari Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama. ii) Perhitungan Komisaris lainnya sebesar 90% dari Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama.	1. Tantiem/Insentif Kinerja Direksi a. Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Tantiem dapat diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI). Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahaan Laporan Tahunan apabila Realisasi Pencapaian Key Performance Indicators melebihi 100%. b. Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. c. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi adalah sebagai berikut: i) Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Seri A. ii) Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja Direktur lainnya sebesar 85% Tantiem/Insentif Kinerja gaji Direktur Utama.
1. Tantiem/Performance Incentive for The Board of Commissioners a. Tantiem is Income which is an award given to members of the Board of Commissioners if they earn profits and do not experience accumulated losses. The Company can give Tantiem to members of the Board of Commissioners based on the stipulation of the GMS in the approval of the Annual Report if the Realization of Achievement of Key Performance Indicators exceeds 100%. b. Performance incentives are income which is an award given to members of the Board of Commissioners. c. Calculation of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Commissioners is as follows: i) Calculation of the Tantiem/Performance Incentive for the President Commissioner is 45% of the Tantiem/ Performance Incentive for the President Director. ii) The calculation of other Commissioners is 90% of the President Commissioner's Tantiem/Performance Incentives	1. Tantiem/Performance Incentives for Board of Directors a. Tantiem, namely income which is an award given to members of the Board of Directors of SOE if they earn profits and do not experience accumulated losses. Tantiem can be given as an additional form of Long Term Incentive (LTI). The Company can give Tantiem to members of the Board of Directors based on the stipulation of the GMS in the approval of the Annual Report if the Realization of Achievement of Key Performance Indicators exceeds 100%. b. Performance incentives, namely income which is an award given to members of the Board of Directors if there is an increase in performance even though they are still experiencing losses or accumulated losses. c. Calculation of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors is as follows: i) President Director Performance Bonus/Incentives are determined using internal guidelines stipulated by the Minister of SOEs as the proxy of A Series Shareholders. ii) Calculation of Tantiem/Performance Incentive for other Directors is 85% Tantiem/Performance Incentive for the President Director's salary

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration Structure	Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration Structure
1. Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, dll.) 1. No other components (components referred to, such as nonperformance bonuses, stock options, etc.)	1. Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, dll.) 1. No other components (components referred to, such as nonperformance bonuses, stock options, etc.)

Kebijakan Dasar Terkait Indikator dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Penyusunan struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kinerja Perusahaan;
3. Prestasi kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perusahaan;
5. Regulasi lain yang terkait dengan remunerasi, misalnya Upah Minimum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Basic Policy Regarding Indicators and Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors for 2023

The preparation of the structure and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors must take into account the following matters:
1. Applicable laws and regulations;
2. Company performance;
3. Work performance of the Board of Commissioners and Board of Directors;
4. Remuneration that applies in the industry in accordance with the business activities of companies that have the same type and scale of business as the Company;
5. Other regulations related to remuneration, for example Minimum Wage and Labor Law.

Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi (Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021)
Calculation of the Amount of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors (According to Minister of SOEs' Regulation No. PER-13/MBU/09/2021)

Direktur Utama President Director	:	100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Utama/Pengendali) 100% (determined using internal guidelines stipulated by the Minister of SOEs as the proxy of the Majority/Controlling Shareholders)
Direktur Lainnya Other Directors	:	Sebesar 85% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 85% of the President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentives
Komisaris Utama President Commissioner	:	Sebesar 45% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 45% of the President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentives
Komisaris Lainnya Other Commissioners	:	Sebesar 90% dari Honorarium/Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama 90% of the President Commissioner's Honorarium/Tantiem/Performance Incentives

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut

Transparency of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors for 2023

Information on the nominal amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2023

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Periode Menjabat Tenure	Perhitungan per Bulan			Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Total Honorarium and Allowances per Month	Jumlah Honorarium dan Tunjangan Selama 1 Tahun Total Honorarium and Allowances per Year	*Tantiem*	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Jumlah Remunerasi Tahun 2022 Total Remuneration for 2022
		Honorarium	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance						
		(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)
Krisna Wijaya	Januari-Desember January-December	95.400.000	0	19.080.000	114.480.000	1.373.760.000	243.342.515	95.400.000	221.965.920	1.934.468.435

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2023

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Periode Menjabat** Tenure	**Perhitungan per Bulan**			**Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan** Total Honorarium and Allowances per Month	**Jumlah Honorarium dan Tunjangan Selama 1 Tahun** Total Honorarium and Allowances per Year	***Tantiem***	**Tunjangan Hari Raya Keagamaan** Religious Holiday Allowance	**Asuransi Purna Jabatan** Post-Employment Insurance	**Jumlah Remunerasi Tahun 2022** Total Remuneration for 2022
		Honorarium	**Tunjangan Perumahan** Housing Allowance	**Tunjangan Transportasi** Transportation Allowance						
		(Rp/IDR)	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**
M. Muchlas Rowi	Januari-Desember January-December	85.860.000	0	17.172.000	103.032.000	1.236.384.000	2.567.886.576	85.860.000	197.475.024	4.087.605.600
Hernita Alius	Februari-Desember February-December	85.860.000	0	17.172.000	103.032.000	1.236.384.000	2.567.886.576	85.860.000	218.700.000	4.108.830.576
Ari Wahyuni	Januari-Desember January-December	85.860.000	0	17.172.000	103.032.000	1.236.384.000	2.567.886.576	85.860.000	218.700.000	4.108.830.576
Desty Arlaini	Juni-Desember June-December	85.860.000	0	17.172.000	103.032.000	1.236.384.000	2.045.454.496	85.860.000	197.475.024	3.565.173.520
Angger P. Yuwono	Desember December	85.860.000	0	17.172.000	103.032.000	103.032.000	0	0	0	103.032.000
Sub Jumlah (Rp) Subtotal (IDR)										**17.907.940.708**
Fasilitas Kesehatan (*at cost*) (Rp) Health Facilities (at cost) (IDR)										*At Cost*
Fasilitas Kepersertaan dan Perkumpulan Profesi (*at cost*) (Rp) Association Membership and Professional Facilities (at cost) (IDR)										*At Cost*
Fasilitas Bantuan Hukum (*at cost*) Rp) Legal Aid Facility (at cost) (IDR)										*At Cost*

Direksi Directors	**Periode Menjabat** Tenure	**Perhitungan per Bulan** Calculation per Month			**Jumlah Gaji dan Tunjangan per Bulan** Total Salary and Allowance per Month	**Jumlah Gaji dan Tunjangan Selama 1 Tahun** Salary and Allowance in 1 Year	***Tantiem***	**Tunjangan Hari Raya Keagamaan** Religious Allowance	**Asuransi Purna Jabatan** Post-Employment Insurance	**Jumlah Remunerasi Tahun 2022** Total Remuneration 2022
		Gaji Salary	**Tunjangan Perumahan** Housing Allowance	**Tunjangan Transportasi** Transportational Allowance						
		(Rp/IDR)	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**	**(Rp/IDR)**
Hendro Padmono	Januari-Mei January-May	212.000.000	27.500.000	0	239.500.000	1.197.500.000	540.761.145	212.000.000	540.000.000	2.490.261.145
Akhmad Purwakajaya	Agustus-Desember August-December	212.000.000	27.500.000	0	239.500.000	1.197.500.000	0	0	490.963.296	1.688.463.296
Henry Panjaitan	Januari-Desember January-December	180.200.000	27.500.000	0	207.700.000	2.492.400.000	459.646.973	180.200.000	416.974.656	3.549.221.629
Achmad Ivan S Soeparno	Januari-Desember January-December	180.200.000	27.500.000	0	207.700.000	2.492.400.000	459.646.973	180.200.000	416.974.656	3.549.221.629
Abdul Bari	Januari-Desember January-December	180.200.000	27.500.000	0	207.700.000	2.492.400.000	459.646.973	180.200.000	416.974.656	3.549.221.629
Suwarsito	Januari-Desember January-December	180.200.000	27.500.000	0	207.700.000	2.492.400.000	4.950.806.623	180.200.000	459.000.000	8.082.406.623
Kadar Wisnuwarman	Januari-Juli January-July	180.200.000	27.500.000	0	207.700.000	1.453.900.000	5.389.391.580	180.200.000	459.000.000	7.482.491.580

Direksi Directors	Periode Menjabat Tenure	Perhitungan per Bulan Calculation per Month			Jumlah Gaji dan Tunjangan per Bulan Total Salary and Allowance per Month	Jumlah Gaji dan Tunjangan Selama 1 Tahun Salary and Allowance in 1 Year	*Tantiem*	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Allowance	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Jumlah Remunerasi Tahun 2022 Total Remuneration 2022
		Gaji Salary	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tunjangan Transportasi Transportational Allowance						
		(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)
Alia Nur Fitri	Agustus-Desember August-December	180.200.000	27.500.000	0	207.700.000	1.038.500.000	0	0	416.974.656	1.455.474.656
Sub Jumlah (Rp) Subtotal (IDR)										**31.846.762.189**
Fasilitas Kendaraan (Rp) Vehicle Facilities (IDR)										At Cost
Fasilitas Kesehatan (at cost) (Rp) Health Facilities (At Cost) (IDR)										At Cost
Fasilitas Bantuan Hukum(at cost) (Rp) LEGAL AID FACILITY (AT COST) (IDR)										At Cost
Fasilitas Perkumpulan Profesi (Rp) Professional Association Facilities (IDR)										At Cost
Fasilitas Biaya Representasi (Rp) Representation Fee Facility (IDR)										At Cost

Jumlah remunerasi yang diberikan Jamkrindo kepada Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The amount of remuneration provided by Jamkrindo to the Board of Commissioners and Directors in 2023 is as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023
Total Remuneration for the Board of Commissioners and Directors for 2023

	Jumlah/Total (Rp/IDR)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	17.907.940.708
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors	31.846.762.189
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023 Total Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023	49.754.702.897

Rasio Gaji

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Salary Ratio

Information regarding the salary ratio of the Board of Commissioners, Directors, and employees of the Company is as follows:

Perbandingan Ratio	2023	2022	2021
Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Director	**1 : 1,18**	1 : 1,15	1 : 1,1
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	**1 : 2,22**	1 : 2,13	1 : 2,1
Direktur Utama terhadap Komisaris President Director to Commissioner	**1 : 2,47**	1 : 2,37	1 : 2,4
Direktur Utama terhadap Karyawan Tertinggi President Director to Highest Paid Employee	**1 : 2,53**	1 : 2,51	1 : 3
Direktur Utama terhadap Karyawan Terendah President Director to Lowest Paid Employee	**1 : 39,85**	1 : 39,3	1 : 37
Karyawan tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest Paid Employee to Lowest Paid Employee	**1 : 15,73**	1 : 15,64	1 : 12,5
Karyawan terendah terhadap Upah Minimum Regional Lowest Paid Employee to Regional Minimum Wage	**1 : 1,09**	1 : 1,14	1 : 1

Karyawan tertinggi yang dimaksud pada tabel di atas adalah Karyawan yang menduduki jabatan dengan penghasilan tetap (THP), sementara Karyawan terendah adalah Karyawan pelaksana dengan penghasilan (THP). Untuk perhitungan Upah Minimum Regional menggunakan wilayah DKI Jakarta.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dalam rangka review analisis kinerja bulanan Perusahaan, mengetahui perkembangan kondisi serta masalah-masalah aktual yang dialami perusahaan termasuk pemberian nasihat/ saran kepada Direksi. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal, Rapat dengan mengundang Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam kesempatan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris menyampaikan pendapat/tanggapan/ masukan kepada Pemegang Saham dan Usulan RKAP serta masalah-masalah penting lainnya. Dewan Komisaris juga mengadakan rapat rutin sekali dalam setiap bulan, yaitu Rapat Internal Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Pemantau Risiko serta Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Namun dalam hal dipandang penting, Dewan Komisaris juga melakukan rapat-rapat insidental, baik dengan komite-komite maupun dengan Direksi.

Dalam kesempatan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris menyampaikan pendapat/tanggapan/ masukan kepada Pemegang Saham dan Usulan RKAP serta masalah-masalah penting lainnya. Juga melalui pengesahan laporan tahunan yang tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jaminan Kredit Indonesia No. B.1368/EKT/DIRUT/RUPS/ VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2022.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris tercatat telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat Internal, 12 (dua belas) kali Rapat dengan mengundang Direksi, dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The highest paid employee referred to in the table above is an employee holding a position with a fixed income (THP), while the lowest paid employee is an executive employee with income (THP). For the calculation of the Regional Minimum Wage, it uses the area of DKI Jakarta.

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Board of Commissioners' Meeting

Meetings of the Board of Commissioners are held in the context of reviewing the Company's monthly performance analysis, knowing developments in conditions, and actual problems experienced by the Company, including providing advice/ suggestions to the Board of Directors. Meetings of the Board of Commissioners consist of Internal Meetings, Meetings inviting the Directors, and General Meeting of Shareholders (GMS).

On the occasion of the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners conveys opinions/feedback/ inputs to Shareholders and RKAP proposals and other important issues. The Board of Commissioners also holds routine meetings once every month, namely the Board of Commissioners' Internal Meeting which is attended by the Audit Committee, Integrated Governance Committee, and Risk Monitoring Committee as well as the Board of Commissioners' and Directors' meetings. However, in cases deemed important, the Board of Commissioners also holds incidental meetings, both with committees and with the Board of Directors.

On the occasion of the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners conveys opinions/responses/ input to Shareholders and Proposed RKAP and other important issues. Also through ratification of the annual report contained in the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Guarantee Credit Indonesia No. B.1368/EKT/DIRUT/RUPS/VI/2023 dated June 27, 2023 concerning Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements PT Jaminan Kredit Indonesia for Fiscal Year 2022

Throughout 2023, the Board of Commissioners held 12 Internal Board of Commissioners meetings and 12 Board of Directors meetings, and 2 (two) General Meeting of Shareholders (GMS).

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris
Minutes of Board of Commissioners Internal Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Utama Main Agenda
1.	25 Januari 2023 January 25, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Desember 2022. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in December 2022. 2. Others.
2.	24 Februari 2023 February 24, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Januari 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in January 2023. 2. Others.
3.	28 Maret 2023 March 28, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Februari 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in February 2023. 2. Others.
4.	28 April 2023 April 28, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Maret 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in March 2023. 2. Others.
5.	26 Mei 2023 May 26, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan April 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in April 2023. 2. Others.
6.	27 Juni 2023 June 27, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Mei 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in May 2023. 2. Others.
7.	25 Juli 2023 Juy 25, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Juni 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in June 2023. 2. Others.
8.	29 Agustus 2023 August 29, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Juli 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in July 2023. 2. Others.
9.	28 September 2023 September 28, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Agustus 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in August 2023. 2. Others.
10.	27 Oktober 2023 October 27, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan September 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in September 2023. 2. Others.
11.	28 November 2023 November 28, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Oktober 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in October 2023. 2. Others.
12.	22 Desember 2023 December 22, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan November 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in November 2023. 2. Others.

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris
Recapitulation and Attendance Level of the Board of Commissioners in Internal Meetings of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran/ Attendance
Krisna Wijaya	Komisaris Utama/Independen Independent/President Commissioner	12	12	0	100
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	12	12	0	100

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris
Recapitulation and Attendance Level of the Board of Commissioners in Internal Meetings of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran/ Attendance
Muhammad Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	0	100
Hernita Alius	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	0	100
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	12	12	0	100
Angger P Yuwono*	Komisaris Commissioner	5	5	0	100

Keterangan/Information:
*)Resmi menjabat terhitung sejak tanggal 31 Juli 2023/Began serving as of July 31, 2023

Risalah Rapat Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi
Minutes of Meeting of the Board of Commissioners by Inviting the Board of Directors

No.	Tanggal Dates	Agenda Utama Main Agenda
1.	25 Januari 2023 January 25, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Desember 2022. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in December 2022. 2. Others.
2.	24 Februari 2023 February 24, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Januari 2023; 2. Lain – Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in January 2023. 2. Others.
3.	28 Maret 2023 March 28, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Februari 2023; 2. Lain – Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in February 2023. 2. Others.
4.	28 April 2023 April 28, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Maret 2023; 2. Lain – Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in March 2023. 2. Others.
5.	26 Mei 2023 May 26, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan April 2023; 2. Lain – Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in April 2023. 2. Others.
6.	27 Juni 2023 June 27, 2023	1. Tanggapan Direksi atas Surat Dewan Komisaris tentang Tindak Lanjut Rapat *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan April 2023. 2. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Mei 2023 1. Directors' response to the Board of Commissioners' letter regarding follow-up to the monitoring and evaluation meeting of PT Jamkrindo's performance in April 2023. 2. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in May 2023.
7.	25 Juli 2023 July 25, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juni 2023; 2. Lain – Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in June 2023. 2. Others.
8.	29 Agustus 2023 August 29, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juli 2023; 2. Lain – Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in July 2023. 2. Others.
9.	26 September 2023 September 26, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Agustus 2023. 2. Implementasi Information Technologi Security PT Jamkrindo 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in August 2023. 2. Others.

Risalah Rapat Rapat Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi
Minutes of Meeting of the Board of Commissioners by Inviting the Board of Directors

No.	Tanggal Dates	Agenda Utama Main Agenda
10.	27 Oktober 2023 October 27, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja PT Jamkrindo bulan September 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in September 2023. 2. Others.
11.	28 November 2023 November 28, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja PT Jamkrindo bulan Oktober 2023. 2. Lain-Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in October 2023. 2. Others.
12.	22 Desember 2023 December 22, 2023	1. *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan November 2023. 2. Lain – Lain. 1. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in November 2023. 2. Others.

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan
Recapitulation and Attendance Level of Board of Commissioners and Board of Directors in Joint Meeting

	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Krisna Wijaya	12	12	0	100
M. Muchlas Rowi	12	12	0	100
Hernita Alius	12	12	0	100
Ari Wahyuni	12	12	0	100
Desty Arlaini	12	11	1	91,6
Angger P. Yuwono*	5	5	0	100
Direksi Board of Directors				
Hendro Padmono**	4	4	0	100
Akhmad Purwakajaya***	5	2	3	40
Henry Panjaitan	12	10	2	83
Achmad Ivan S Soeparno	12	11	1	91,6
Abdul Bari	12	11	1	91,6
Suwarsito****	12	10	2	83
Alia Nur Fitri*****	5	5	0	100
Kadar Wisnuwarman ******	7	6	1	86

Keterangan/Information:
*) Resmi menjabat per 31 Juli 2023/Began serving since July 31, 2023
**)Berhenti Menjabat per 7 Mei 2023/Stopped serving as of May 7, 2023
***) Resmi menjabat per 31 Juli 2023/Stopped serving as of July 31, 2023
****) Perubahan nomenklatur jabatan dari Direktur Keuangan dan Investasi menjadi Direktur Operasional dan Jaringan per tanggal 31 Juli 2023/Changed in position nomenclature from Director of Finance and Investment into Director of Operations and Network as of July 31, 2023
*****) Resmi menjabat per 31 Juli 2023/Began serving since July 31, 2023
******)Berhenti Menjabat per 31 Juli 2023/Stopped serving as of July 31, 2023

No.	Agenda Pokok Main Agenda	Tanggal Dates
1.	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 PT Jamkrindo (RUPS) Ratification of the Company's Work Plan and Budget 2023 PT Jamkrindo (GMS)	30 Januari 2023 January 30, 2023
2.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited PT Jamkrindo (RUPS) Approval of the Annual Report and Ratification of the 2022 Audited Financial Statements of PT Jamkrindo (Resolutions of the General Meetings of Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia)	27 Juni 2023 June 27, 2023

Rapat/Pertemuan Lain

Selain Rapat Rutin Bulanan (Internal dan mengundang Direksi) dan RUPS, selama tahun 2023 Dewan Komisaris juga telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali Rapat dan/atau Diskusi Lain yang bersifat teknis (secara internal maupun dengan Direktur) serta dilaksanakan dalam rangka membahas permasalahan perusahaan secara spesifik dan lebih mendalam, antara lain:

Other Meetings/Meetings

In addition to regular monthly meetings (internal and inviting the Board of Directors) and GMS, in 2023 the Board of Commissioners has also held 11 other meetings of a technical nature (internally and with the Directors) and carried out in order to discuss specific and more in-depth Company issues, including:

No.	Tanggal Dates	Agenda Utama Main Agenda	Keterangan Information
1.	21 Februari 2023 February 21, 2023	*Progress* Audit Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2022 Progress Audit of Annual Financial Statement for Fiscal Year 2022	Rapat dengan PwC dan SPI Jamkrindo Meeting with PwC and SPI Jamkrindo
2.	28 Februari 2023 February 28, 2023	Konsep Tata Kelola dan Tugas Dewan Komisaris Governance Concept and Duties of the Board of Commissioners	Diskusi Internal Internal Discussion
3.	15 Maret 2023 March 15, 2023	*Progress* Audit Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2022 Progress Audit of Annual Financial Statement for Fiscal Year 2022	Rapat dengan Direksi Jamkrindo dan PwC Meeting with PwC and Jamkrindo's BoC
4.	31 Maret 2023 March 31, 2023	Pembahasan Addendum Perjanjian Kerjasama Jasa KAP untuk Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Jaminan Kredit Indonesia dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2022 Discussion of Addendum to KAP Services Collaboration Agreement for General Audit of Consolidated Financial Statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiaries for Fiscal Year 2022	Rapat dengan Direktur Keuangan, Investasi, & Manajemen Risiko Meeting with Director of Finance, Investment, & Risk Management
5.	05 April 2023 April 5, 2023	Tanggapan atas Penggunaan Anggaran Dewan Komisaris pos Biaya Jasa KAP Tahun 2023 untuk Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 Response to the Use of the Board of Commissioners' Budget post KAP Service Fees for 2023 for the General Audit of the Consolidated Financial Statements for the 2022 Fiscal Year	Rapat Internal Internal Meetings
6.	10 Mei 2023 May 10, 2023	Pembahasan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Jamkrindo Discussion on the Appointment of Acting President Director of PT Jamkrindo	Rapat dengan Direksi Meeting with Jamkrindo's BoC
7.	29 Mei 2023 May 29, 2023	Pembahasan Piagam–Piagam Komite Discussion of Committee Charters	Rapat Internal Internal Meetings
8.	09 Juni 2023 June 9, 2023	Pembahasan Tata Tertib Rapat Discussion of Meeting Rules of Procedure	Rapat Internal Internal Meetings
9.	04 Juli 2023 July 4, 2023	Pembahasan Usulan Penggantian Pejabat PT Jamkrindo Discussion of Proposed Replacement of PT Jamkrindo Officials	Rapat Internal Internal Meetings
10.	17 Oktober 2023 October 17, 2023	Pembahasan Penyesuaian Struktur Organisasi PT Jamkrindo Discussion on Adjusting the Organizational Structure of PT Jamkrindo	Rapat dengan Direktur Keuangan dan Investasi Meeting with Director of Finance and Investment
11.	22 Desember 2023 December 22, 2023	Pembahasan *Summary Executive* RKAP PT Jamkrindo Tahun 2024 Discussion of PT Jamkrindo's 2024 RKAP Executive Summary	Rapat dengan Direktur Keuangan dan Investasi dan Direktur Operasional dan Jaringan Meeting with Director of Finance and Investment, and with the Director of Operations and Network

Rapat Direksi

Sebagaimana diatur dalam peraturan Direksi No. 49/Per-Dir/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Rapat Direksi Jamkrindo, ketentuan mengenai Rapat Direksi Jamkrindo adalah sebagai berikut:

1. Jadwal Rapat
   a. Direksi menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan dalam Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Board of Directors Meetings

As stipulated in the Board of Directors regulation No. 49/Per-Dir/1/ XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines for Managing Jamkrindo Directors' Meetings, the provisions regarding Jamkrindo Directors' Meetings are as follows:

1. Meeting Schedule
   a. The Board of Directors holds meetings as needed, at least once a month according to the plans set out in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

b. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, dan/atau permintaan tertulis seorang atau lebih Dewan Komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

c. Rapat yang bersifat segera dan strategis dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan level Direksi.

2. Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi.

3. Pimpinan Rapat
a. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama.
c. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara Anggota Direksi yang ada.

d. Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) tidak dilakukan, maka salah seorang Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan.
e. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi lebih dari satu orang. Maka Direktur yang tertua dalam usia yang berwenang memimpin Rapat Direksi.

Direksi mengadakan rapat rutin setiap sekali dalam setiap bulan, sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam penjelasan di atas. Di sepanjang 2023, Direksi melaksanakan 20 (dua puluh) kali Rapat Direksi. Di samping itu, Direksi menghadiri 12 kali Rapat dengan Dewan Komisaris. Tentang risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagian pembahasan Rapat Dewan Komisaris.

Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat.

b. Board of Directors meetings can be held outside the regular schedule if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors, and/or a written request from one or more members of the Board of Commissioners stating the matters to be discussed.
c. Meetings that are immediate and strategic with an agenda of matters that require decision-making at the Board of Directors level.

2. Location Held at the domicile of the Company, or at the place of business of the Company, or at other places in the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.

3. Chair of the Meeting
a. The meeting is chaired by the President Director.
b. In the event that the President Director is absent or unavailable, the Board of Directors meeting is chaired by a director specially appointed for that purpose by the President Director.
c. In the event that the President Director does not make an appointment, then one of the Directors is appointed by and among the existing members of the Board of Directors.
d. In the event that the appointment as referred to in paragraph (c) is not made, then one of the Directors who has served the longest as a member of the Board of Directors of the Company.
e. In the event that the Director who has served the longest as a Member of the Board of Directors is more than one person. Then, the Director who is the oldest in age has the authority to chair the Board of Directors Meeting.

The Board of Directors holds regular meetings once every month, as stipulated in the explanation above. Throughout 2023, the Board of Directors will implement the Board of Directors meeting for 20 times. In addition, the Board of Directors attended 12 meetings with the Board of Commissioners. Regarding the minutes of meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, it can be seen in the discussion section of the Board of Commissioners Meeting.

The following are the minutes of the meeting and the level of attendance of the Directors at the meeting.

Risalah Rapat Direksi
Minutes of Board of Directors Meeting

No	Tanggal Dates	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	14 Januari 2023 January 14, 2023	Rapat Pembahasan Progres Pengembangan Teknologi Informasi Information Technology Development Progress Discussion Meeting
2	20 Februari 2023 February 20, 2023	Pembahasan Persiapan *Business Performance Review* Periode Bulan Januari Discussion of Business Performance Review Preparations for the January Period
3	23 Februari 2023 February 23, 2023	Rapat Pembahasan *Business Performance Review* Periode Bulan Januari Discussion of Business Performance Review Preparations for the January Period
4	20 Maret 2023 March 20, 2023	1. *Business Strategy and Management Direction CBC Guarantee* 2. Pembahasan Perdir Kewenangan dan Turunan Struktur Organisasi 1. Business Strategy and Management Direction CBC Guarantee 2. Discussion of Director's Regulation on Authority and Derivation of Organizational Structure

Risalah Rapat Direksi
Minutes of Board of Directors Meeting

No	Tanggal Dates	Agenda Rapat Meeting Agenda
5	13 Maret 2023 March 13, 2023	1. *Update Progress IT* 2. *Update* Kerjasama dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia dan *Pricing* 1. Update IT Progress 2. Update on Collaboration with PT Reasuransi Nasional Indonesia and Pricing
6	11 April 2023 April 11, 2023	Pembahasan *Business Performance Review* Bulan Discussion of Business Performance Review for Month
7	12 Mei 2023 May 12, 2023	Pembahasan Usulan Sewa Kendaraan Dinas SEVP, Kepala Divisi/Pemimpin Wilayah/Pemimpin KCK dan Wakil Kepala Divisi/Wakil Pemimpin Wilayah Discussion of Vehicle Rental Proposals for SEVP Service, Division Heads/Regional Leaders/KCK Leaders and Deputy Division Heads/Deputy Regional Leaders
8	12 Juni 2023 June 12, 2023	Pembahasan Piagam Korporasi Konglomerasi IFG Grup Discussion of the Corporate Charter of the IFG Group Conglomerate
9	8 Juni 2023 June 8, 2023	Pembahasan Agenda HUT Jamkrindo Discussion of Jamkrindo Anniversary Agenda
10	13 Juli 2023 July 13, 2023	Pembahasan Rencana Aksi dan Komite Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Discussion of the Action Plan and Follow-up Committee on BPK Recommendations
11	14 Agustus 2023 August 14, 2023	1. Pembahasan Kerja sama Reasuransi Non KUR 2. Pembahasan ALMA Periode Juni 2023 1. Discussion of Non-KUR Reinsurance Cooperation 2. Discussion on ALMA for the June 2023 period
12	18 Agustus 2023 August 18, 2023	Pembahasan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Macet UMKMK Discussion of Write-Offs of Bad Debts for MSMEs
13	4 September 2023 September 4, 2023	1. Penyampaian Profil Risiko dan Hasil Perhitungan Batasan *Exposure* Penjaminan (*Guarantee Exposure Limit*) 2. Pembahasan Struktur Organisasi 1. Submission of Risk Profile and Guarantee Exposure Limit Calculation results 2. 2. Discussion of Organizational Structure
14	18 September 2023 September 18, 2023	1. Pembahasan Rancangan Struktur Organisasi Perusahaan Tahap II 2. *Kick Off Meeting* Transformasi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah 3. Pembahasan Perjanjian Kerja sama Penjaminan Pinjaman Multiguna Bank Indonesia 1. Discussion of Phase II Company Organizational Structure Design 2. Kick Off Meeting Transformation of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah 3. Discussion of the Bank Indonesia Multipurpose Loan Guarantee Cooperation Agreement
15	11 Oktober 2023 October 11, 2023	Pembahasan Penetapan Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Pinjaman Discussion on Determining the Maximum Loan Limit Policy
16	16 Oktober 2023 October 16, 2023	1. Pembahasan Laporan Hasil Evaluasi Penawaran dan Calon Lokasi Tanah dan/atau Bangunan terpilih Pembelian Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Jambi dan Kantor Cabang Pekanbaru 2. Pembahasan Update Data Aset Tanah dan Bangunan serta Progres Belanja Modal Tahun 2023 1. Discussion of the Report on Bid Evaluation Results and Candidate Locations for Selected Land and/or Buildings Purchase of Land and Buildings for Jambi Branch Offices and Pekanbaru Branch Offices 2. Discussion of Land and Building Asset Data Updates and the Progress of Capital Expenditures in 2023
17	6 November 2023 November 6, 2023	Pemaparan Hasil *Monitoring Past Performance* dan Temuan Audit Periode 2023 atas PEN Gen 1 dan Gen 2 Presentation of Past Performance Monitoring Results and Audit Findings for the 2023 Period of Gen 1 and Gen 2 of National Economic Recovery
18	27 November 2023 November 27, 2023	Pembahasan Digitalisasi Proses Klaim Discussion of the Digitalization of the Claims Process
19	4 Desember 2023 December 4, 2023	Usulan Penetapan SDM *Dedicated* Bisnis CBC Konstruksi dan *Suretyship* beserta Peran dan Tanggung Jawab Proposed Determination of Dedicated HR for CBC Construction and Suretyship Business along with Roles and Responsibilities

Risalah Rapat Direksi
Minutes of Board of Directors Meeting

No	Tanggal Dates	Agenda Rapat Meeting Agenda
20	27 Desember 2023 December 27, 2023	1. Pembahasan Penetapan Piagam Audit Internal Tahun 2023 2. Pembahasan Progres Rencana Kerja sama Penanganan Subrogasi antara PT Jamkrindo dengan BKI 3. Pemaparan Roadmap Kepatuhan PT Jamkrindo Tahun 2024–2028 1. Discussion on the Determination of the 2023 Internal Audit Charter 2. Discussion of the progress of the cooperation plan for handling subrogation between PT Jamkrindo and BKI 3. Presentation of PT Jamkrindo's Compliance Roadmap for 2024–2028

Rekapitulasi dan Tingkat Direksi dalam Rapat Direksi
Recapitulation and Board of Directors in Board of Directors Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran/ Attendance
Hendro Padmono*	6	6	0	100%
Akhmad Purwakajaya**	10	10	10	100%
Henry Panjaitan	20	18	1	90%
Achmad Ivan S Soeparno	20	19	1	95%
Abdul Bari	20	18	2	90%
Suwarsito***	20	18	2	90%
Alia Nur Fitri****	10	10	10	100%
Kadar Wisnuwarman *****	10	8	2	75%

Keterangan/Information:
*)Berhenti Menjabat per 7 Mei 2023/Stopped serving as of May 7, 2023
**) Resmi menjabat per 31 Juli 2023/Began serving since July 31, 2023
***) Perubahan nomenklatur jabatan dari Direktur Keuangan dan Investasi menjadi Direktur Operasional dan Jaringan per tanggal 31 Juli 2023/Changed in position nomenclature from Director of Finance and Investment into Director of Operations and Network as of July 31, 2023
****) Resmi menjabat per 31 Juli 2023/Began serving since July 31, 2023
*****)Berhenti Menjabat per 31 Juli 2023/Stopped serving as of July 31, 2023

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Transparansi Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Di bawah ini disajikan hubungan usaha dan hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham. Bentuk hubungan usaha termasuk di antaranya hutang-piutang, kerja sama bisnis, dsb; sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/ istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya.

DISCLOSURE OF AFFILIATED RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJORITY AND/ OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Transparency of Business Relations and Affiliated Relationship Between the Board of Commissioners, Directors and Shareholders

Below is presented the business relationship and affiliated relationship between the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders. Forms of business relationships including debts, business cooperation, etc.; while the form of affiliation includes special relationships, especially those caused by blood ties such as husband/wife/children/ parents/siblings/ brothers-in-law, etc.

	Hubungan Afiliasi dengan Affiliated Relationship		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Majority/Controlling Shareholders
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Krisna Wijaya	x	x	x
M. Muchlas Rowi	x	x	x
Hernita Alius	x	x	x
Ari Wahyuni	x	x	v
Desty Arlaini	x	x	v
Angger P. Yuwono	x	x	x
Direksi Board of Directors			
Akhmad Purwakajaya	x	x	x
Suwarsito	x	x	x
Henry Panjaitan	x	x	x
Achmad Ivan S. Soeparno	x	x	x
Abdul Bari	x	x	x
Alia Nur Fitri	x	x	x

v = ada / x = tidak ada
v = there is a relation / x = there is no relation

Adanya hubungan afiliasi antara sebagian Dewan Komisaris dengan Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali muncul dari jabatan yang diemban dalam Kementerian, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

The existence of affiliated relationships between some of the Board of Commissioners and the Government of Indonesia as Majority/Controlling Shareholders arises from the positions held in the Ministry, as explained below.

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain di luar Jamkrindo periode tahun 2023 sebagai berikut:

Transparency of the Concurrent Positions of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The management relationship of members of the Board of Commissioners and Directors in other companies outside Jamkrindo for the 2023 period is as follows:

	Kepengurusan pada Perusahaan Lain/Jabatan Lainnya Management at Other Companies/Other Positions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As a Board of Directors	**Jabatan Lainnya** Other Positions
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Krisna Wijaya	v	x	v
M. Muchlas Rowi	v	x	v
Hernita Alius	x	x	x
Ari Wahyuni	x	x	v
Desty Arlaini	x	x	v
Angger P. Yuwono	x	x	x

	Kepengurusan pada Perusahaan Lain/Jabatan Lainnya Management at Other Companies/Other Positions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Board of Commissioners	**Sebagai Anggota Direksi** As a Board of Directors	**Jabatan Lainnya** Other Positions
Direksi Board of Directors			
Akhmad Purwakajaya	x	x	x
Suwarsito	x	x	x
Henry Panjaitan	x	x	x
Achmad Ivan S Soeparno	x	x	x
Abdul Bari	x	x	x
Alia Nur Fitri	x	x	x

v = ada / x = tidak ada
v = there is a relation / x = there is no relation

Rangkap jabatan Dewan Komisaris di luar Perusahaan adalah sebagai berikut:

The concurrent positions of the Board of Commissioners outside the Company are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Positions	Jabatan pada Perusahaan Lain Positions in Other Company
Krisna Wijaya	• Komisaris Independen di PT Brilian Indah Gemilang (2018-sekarang) • Komisaris Independen PT Adira Finance (Tbk) (2016-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas di Yayasan Adaro Membangun Negeri (2014-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Chub Syariah Insurance (2009-sekarang) • Anggota Tim Penilai Klarifikasi/Presentasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bidang Perbankan, OJK (2015 sd sekarang) • Independent Commissioner at PT Brilian Indah Gemilang (2018-present) • Independent Commissioner of PT Adira Finance (Tbk) (2016-present) • Member of the Supervisory Board at the Adaro Membangun Negeri Foundation (2014-present) • Member of the Sharia Supervisory Board at PT Chub Syariah Insurance (2009-present) • Member of the Assessment Team for Clarification/ Presentation on Fit and Proper Test in Banking Sector, OJK (2015 to present)
Muhammad Muchlas Rowi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Pimpinan Umum Monday Media Group (2015-sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014-sekarang), Komisaris PT Semen Indonesia Beton (2020-sekarang) General Manager of Monday Media Group (2015-present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014-present), Commissioner of PT Semen Indonesia Beton (2020-present)
Ari Wahyuni (Komisaris) (Commissioner)	Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Desember 2021-sekarang) Head of Organization and Management Bureau, Secretariat General, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (December 2021-present)
Desty Arlaini (Komisaris) (Commissioner)	Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (2022-sekarang) Assistant Deputy for Logistics Services at the Ministry of SOEs (2022-present)
Angger P Yuwono (Komisaris) (Commissioner)	Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Juni 2021-Desember 2023) President Director of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (June 2021-December 2023)

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris, baik rangkap jabatan sebagai Komisaris di perusahaan lain, maupun jabatan pada institusi negara, tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The concurrent positions held by the Board of Commissioners, both concurrent positions as Commissioners in other companies, as well as positions in state institutions, do not violate applicable laws and regulations.

Transparansi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Transparency of Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors

Share ownership of members of the Board of Commissioners and Directors of the Company and other companies is always disclosed periodically through a list of share ownership of members of the Board of Commissioners and Directors. The following is a transparency of the Company's share ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors, and the ownership of other companies above 5% by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company which can lead to potential conflicts of interest in decision making.

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	Jamkrindo	**Perusahaan Lain > 5%** Other Companies > 5%
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Krisna Wijaya	Nihil/Nil	Nihil/Nil
M. Muchlas Rowi	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Hernita Alius	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Ari Wahyuni	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Desty Arlaini	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Angger P. Yuwono	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Direksi Board of Directors		
Akhmad Purwakajaya	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Henry Panjaitan	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Achmad Ivan S Soeparno	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Abdul Bari	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Suwarsito	Nihil/Nil	Nihil/Nil
Alia Nur Fitri	Nihil/Nil	Nihil/Nil

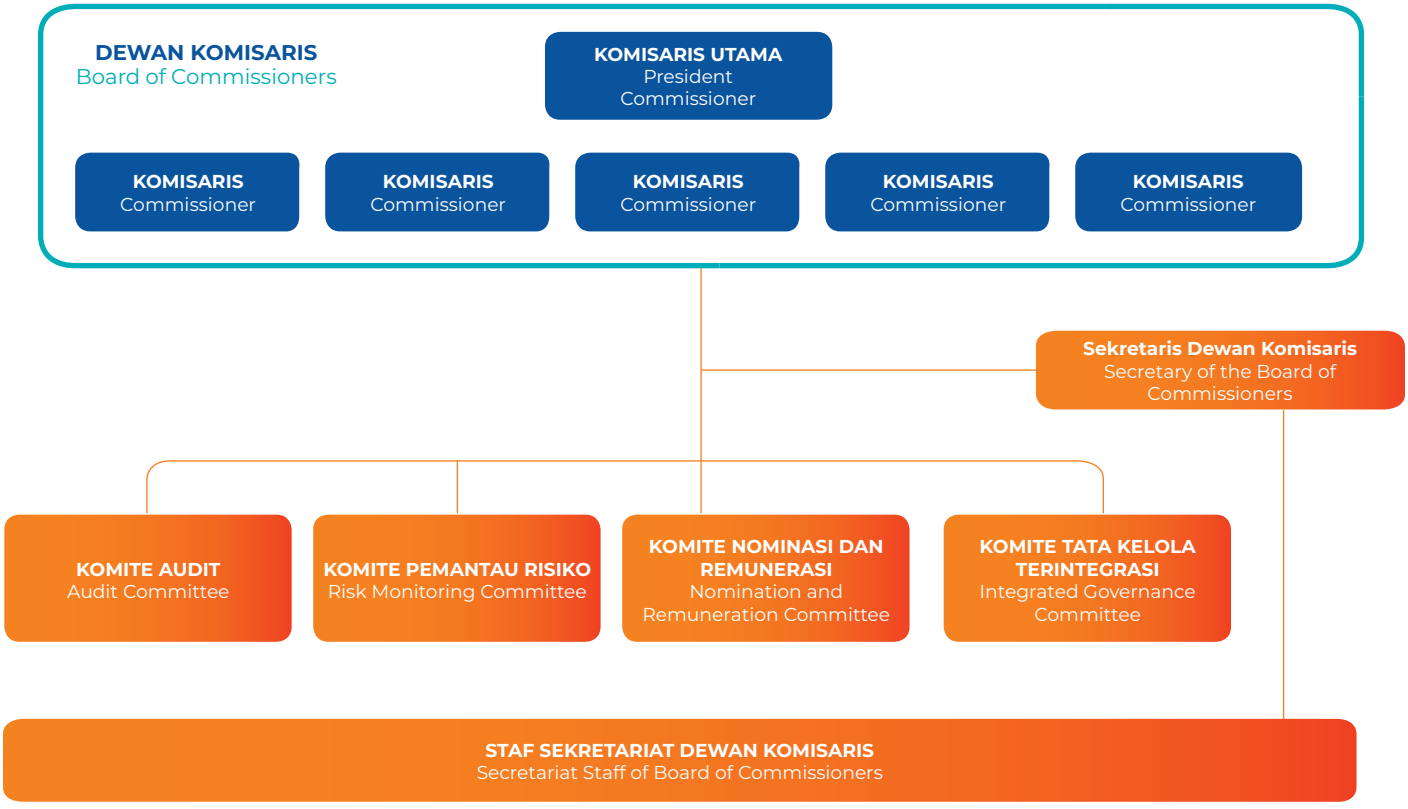
ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Keberadaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sebagai organ pendukung dalam Tata Kelola Perusahaan merupakan wujud implementasi ketentuan dan *best practices* terkait pelaksanaan prinsip GCG sehingga dapat mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan penasihatan Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian saran serta rekomendasi, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung, yaitu: Komite Audit, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, serta Sekretaris Dewan Komisaris. Keberadaan organ-organ pendukung Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan operasional Perusahaan.

The existence of Committees under the Board of Commissioners as supporting organs in Corporate Governance is a form of implementation of provisions and best practices related to the implementation of GCG principles, so as to encourage the effectiveness of the supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners.

In carrying out supervisory duties and responsibilities, providing advice and recommendations, the Company's Board of Commissioners is assisted by Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Integrated Governance Committee, Risk Monitoring Committee, and Secretary to the Board of Commissioner. The existence of these supporting organs for the Board of Commissioners complies with applicable regulations and aims to enhance the implementation of GCG principles in the Company's operational activities



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang berfungsi melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.

In order to assist the smooth implementation of its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary to the Board of Commissioners whose function is to carry out corporate secretarial and protocol activities.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan tugas Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada Permen BUMN PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang meliputi:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris sesuai perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan KEP-03/DK-JAMKRINDO/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo), Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris dipercayakan kepada Setyo Puji Hartono.

Duties of the Secretary to the Board of Commissioners

The implementation of the duties of the Secretary to the Board of Commissioners refers to the Minister of SOEs No. PER-3/ MBU/03/2023, which includes:

1. Prepare meetings, including meeting materials (briefing sheet) of the Board of Commissioners;
2. Make minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
3. Administer the documents of the Board of Commissioners, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare a draft work plan and budget for the Board of Commissioners;
5. Prepare Draft Board of Commissioners Reports;
6. Carry out other duties of the Board of Commissioners.

In addition to carrying out the above tasks, the Secretary to the Board of Commissioners, as the head of the Secretariat, carries out other tasks in the form of:

1. Ensure that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies GCG principles;
2. Provide information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested;
3. Coordinate Committee members, if necessary, in order to expedite the duties of the Board of Commissioners;
4. Act as a liaison officer of the Board of Commissioners with other parties.

The Secretary to the Board of Commissioners is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Based on the Decree KEP-03/DK-JAMKRINDO/II/2021 dated February 1, 2021 concerning Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo), the position of the officer appointed as a Secretary to the Board of Commissioners was entrusted to Setyo Puji Hartono.

Setyo Puji Hartono
Sekretaris Dewan Komisaris I Secretary to the Board of Commissioners
Periode Jabatan I Term of Office
1 Februari 2021–1 Februari 2024, Periode ke-1 I February 1, 2021–February 1, 2024, 1st Period

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun
Kelahiran Wonosobo, 9 Juni 1971
Berdomisili di Jakarta

PENDIDIKAN
Sarjana (S1) Manajemen dari Universitas Janabadra, yogyakarta (1997)
Pasca Sarjana (S2) Ekonomi dari Universitas Indonesia (2007)

RIWAYAT JABATAN
Telah menjabat sebagai Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan IIb-1 (2015-2019), Sekretaris Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) (2017-2019), Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Ib-2 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2019-2020), Penata Kelola Perusahaan Negara Muda sebagai Subkoordinator pada Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (2020-2021), Penata Kelola Perusahaan Negara Muda sebagai Subkoordinator pada Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik (2021-sekarang).

Indonesian citizens
52 years old
Birthplace: Wonosobo, June 9, 1971
Domiciled in Jakarta

EDUCATION
Bachelor (S1) of Management from Janabadra University, Yogyakarta (1997)
Postgraduate (S2) in Economics from the University of Indonesia (2007)

POSITION HISTORY
Has served as Head of the Financial Services, Survey Services and Consulting Services Sub-sector IIb-1 (2015-2019), Secretary to the Board of Commissioners of PT Sarinah (Persero) (2017-2019), Head of the Mining, Strategic Industry and Media Business Sub-sector of the Ministry of State Owned Enterprises (2019-2020), Junior State Enterprise Management as Subcoordinator of Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility (2020-2021), Junior State Enterprise Management as Subcoordinator of Deputy Assistant for Logistics Services (2021-present)

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, tugas Sekretariat Dewan Komisaris di antaranya:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris sesuai perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Brief Report on the Implementation of the 2022 Tasks

The Secretariat of the Board of Commissioners is led by the Secretary of the Board of Commissioners who is tasked with carrying out activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties. In accordance with the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the duties of the Secretariat of the Board of Commissioners include:

1. Prepare meetings, including meeting materials (briefing sheet) of the Board of Commissioners;
2. Make minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
3. Administer the documents of the Board of Commissioners, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare a draft work plan and budget for the Board of Commissioners;
5. Prepare draft reports of the Board of Commissioners;
6. Carry out other duties of the Board of Commissioners.

In addition to carrying out the tasks mentioned above, the Secretary to the Board of Commissioners, as the head of the Secretariat, carries out other tasks in the form of:

1. Ensure that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and implements GCG principles;
2. Provide information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested;
3. Coordinate Committee members, if necessary, in order to expedite the duties of the Board of Commissioners;
4. Act as a liaison officer of the Board of Commissioners with other parties.

Kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris selama tahun 2023, antara lain:

1. Mempersiapkan rapat internal maupun dengan Direksi, termasuk bahan rapat *(briefing sheet)* Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, surat keputusan, surat kuasa, surat undangan, surat tugas risalah rapat, maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2024;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris secara triwulanan maupun tahunan;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lainnya berupa:

1. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selaras dengan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Menyampaikan informasi mengenai di antaranya agenda kegiatan Dewan Komisaris baik secara internal maupun dengan eksternal seperti *Holding*, Kementerian BUMN, KAP audit tahunan, dan lainnya yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris;
3. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan anggota-anggota Komite dalam rangka memperlancar tugas pengawasan Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung *(liaison officer)* Dewan Komisaris dengan pihak lain baik internal seperti Direksi atau BOD-1 dan anak perusahaan, maupun pihak eksternal seperti seperti *Holding*, Kementerian BUMN, dan lainnya.

Activities of the Board of Commissioners' Secretariat in 2023 include:

1. Prepare internal meetings and with the Board of Directors, including meeting materials (briefing sheets) for the Board of Commissioners;
2. Prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
3. Administer Board of Commissioners documents, including incoming letters, outgoing letters, decision letters, power of attorney, invitation letters, meeting minutes assignment letters, and other documents;
4. Prepare the Draft Work Plan and Budget for the Board of Commissioners for 2024;
5. Prepare Draft Reports for the Board of Commissioners on a quarterly and annual basis;
6. Carry out other duties of the Board of Commissioners.

In addition to carrying out the tasks mentioned above, the Secretary of the Board of Commissioners as the head of the Secretariat, carries out other tasks in the form of:

1. Fulfill the obligation to carry out the supervisory duties of the Board of Commissioners in line with statutory regulations and implementing GCG principles;
2. Convey information regarding the agenda of the Board of Commissioners' activities both internally and externally, such as Holding, Ministry of SOEs, KAP annual audit, and others required by the Board of Commissioners;
3. Establish communication and coordination with Committee members in order to facilitate the supervisory duties of the Board of Commissioners;
4. Act as a liaison officer (liaison officer) for the Board of Commissioners with other parties, both internal such as the Board of Directors or BOD-1 and subsidiaries, as well as external parties such as Holding, Ministry of SOEs, and others.

Kebijakan Remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris

Remuneration Policy for the Secretary of the Board of Commissioners

Nama Name	**Honorarium per Bulan** Honorarium per Month	**Tunjangan Transportasi** Transportational Allowance	**Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan** Total Honorarium and Allowance per Month	**Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun** Total Honorarium and Allowance per Year	***Tantiem***	**Jumlah Remunerasi Tahun 2020** Total Remuneration in 2020
	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)		(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)
Setyo Puji Hartono	31.800.000	6.360.000	38.160.000	457.920.000	583.440.000	1.041.360.000

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Pembentukan Komite Audit serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN; dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Komite Audit senantiasa menjalankan tugasnya secara independen dalam membantu Dewan Komisaris memantau kinerja Unit Audit Internal serta Auditor Eksternal yang ditunjuk. Oleh karena itu, Komite Audit diberikan kewenangan untuk membangun hubungan dengan kedua institusi tersebut dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Hasil pengawasan berupa temuan maupun rekomendasi dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris dalam hal pengambilan keputusan.

Struktur, Keanggotaan, Integritas dan Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Struktur, keanggotaan, dan tugas Komite Audit Jamkrindo diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, dan jumlah anggota Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Komisaris adalah sebanyak 2 (dua) orang. Anggota Komite Audit memiliki integritas yang baik dan mempunyai pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan. Selain itu, anggota Komite Audit Jamkrindo mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan serta memahami industri bisnis Jamkrindo. Anggota Komite Audit juga tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan Jamkrindo.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan dan Profil Anggota Komite Audit

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan, pada tahun 2023 terdapat perubahan

The establishment of the Audit Committee and the implementation of its duties and responsibilities is based on Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs; and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

The Audit Committee always carries out its duties independently in assisting the Board of Commissioners in monitoring the performance of the appointed Internal Audit Unit and External Auditor. Therefore, the Audit Committee is given the authority to build relationships with the two institutions and submit reports to the Board of Commissioners. The results of supervision in the form of findings and recommendations can be used as material for consideration for the Board of Commissioners in terms of decision making.

Structure, Membership, Integrity and Expertise, and Independence of the Audit Committee

The structure, membership, and duties of the Jamkrindo's Audit Committee are regulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

The Audit Committee is led by a chairperson who is a member of the Board of Commissioners, and the number of members of the Audit Committee from outside the Board of Commissioners is 2 (two) people. Members of the Audit Committee have good integrity and have sufficient work experience in the field of supervision/examination. In addition, members of the Jamkrindo's Audit Committee must have an educational background in accounting and finance and understand the Jamkrindo business industry. Members of the Audit Committee must also have no potential conflict of interest with Jamkrindo.

Term of Office

The term of office for members of the Audit Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Composition and Profile of Audit Committee

To effectively implement supervisory functions and duties, in 2023, there was a change in the composition of the Audit

susunan keanggotaan Komite Audit, yaitu menetapkan Sdr. Angger P. Yuwono sebagai Anggota Komite Audit melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo No. KEP-06/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Pengangkatan, dan Perubahan Susunan Anggota Komite Audit.

Committee membership, namely appointing Mr. Angger P. Yuwono as Member of the Audit Committee through PT Jamkrindo Board of Commissioners Decree No. KEP-06/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 dated August 1, 2023 concerning Appointment and Changes in the Composition of Audit Committee Members.

Berikut susunan Komite Audit posisi akhir tahun 2023, yaitu:

The following is the composition of the Audit Committee position at the end of 2023:

No.	Nama Names	Jabatan Position	SK Dewan Komisaris Decree of the BoC
1.	Hernita Alius	Ketua Chairperson	KEP-05/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-05/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022
2.	Desty Arlaini	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 KEP-08/DK-JAMKRINDO/VI/2021 dated June 23, 2021
3.	Angger P Yuwono	Anggota Member	KEP-06/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 KEP-06/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 dated August 1, 2023
4.	Safari Mirza	Anggota Member	KEP-02/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 KEP-02/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 3, 2022
5.	Sukamdani Eko B.	Anggota Member	KEP-02/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 KEP-02/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 3, 2022

Hernita Alius
Ketua Komite Audit/Chairperson of the Audit Committee

Profil Ketua Komite Audit Hernita Alius dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.	The profile of the Chairperson of the Audit Committee, Hernita Alius, can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Desty Arlaini
Anggota Komite Audit/Member of the Audit Committee

Profil anggota Komite Audit Desty Arlaini dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.	The profile of the member of the Audit Committee, Desty Arlaini, can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Angger P. Yuwono
Anggota Komite Audit/Member of the Audit Committee

Profil anggota Komite Audit Angger P. Yuwono dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.	The profile of the member of the Audit Committee, Angger P. Yuwono, can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Nama Names	Profil Singkat Brief Profile	



Safari Mirza

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 30 Mei 1966. Menyelesaikan studi Diploma III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987 dan Diploma IV Program Akuntan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1994. Lama berkarir dan menjadi PNS di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan posisi terakhir sebagai Auditor Muda pada BPKP Provinsi Maluku Utara.
Diangkat sebagai Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha terhitung tanggal 8 Mei 2019 dan dialihkan tugasnya menjadi Anggota Komite Audit pada tanggal 3 Oktober 2022.

Indonesian citizens, Born in Jakarta on May 30, 1966. Finished Diploma III at State College of Accountancy (STAN) in 1987 and Diploma IV Accountant Program at State College of Accountancy (STAN) in 1994. Has long career and become a civil servant at the Audit Board of Finance and Development (BPKP) with his last position as Junior Auditor at BPKP North Maluku Province. Appointed as the member of Investment and Business Risk Committee member on May 8, 2019, and transferred to become Member of the Audit Committee on October 3, 2022

Nama Names	Profil Singkat Brief Profile	
 **Sukamdani Eko Basuki**	Lahir di Klaten, 10 April 1984. Menyelesaikan studi D3 di STAN dan S1 Akuntansi di STIE YAI pada tahun 2010. Telah memiliki sertifikasi manajemen risiko (International Risk Management Standard – CRMS). Bekerja menjadi PNS di Kementerian BUMN sejak Mei 2014 sebagai Analis Akuntabilitas Kinerja. Pada Oktober 2014 sampai dengan Januari 2019 menjabat sebagai Analis Keuangan, dan November 2018 sampai dengan Januari 2019 sebagai Kepala Subbagian TU Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Tahun 2019-2020 ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi, dan saat ini menjabat sebagai Analis Pengelola Keuangan APBN Muda. Memiliki pengalaman penugasan di BUMN, yaitu pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Sekretaris Dewan Komisaris (2017-2019), dan sebagai staf Dewan Komisaris di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2019-2022). Terhitung tanggal 3 Oktober 2022, bergabung dalam Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Jamkrindo sebagai Anggota Komite Audit.	Born in Klaten, on April 10, 1984. Completed D3 studies at STAN and S1 Accounting at STIE YAI in 2010. Has a risk management certification (International Risk Management Standard – CRMS). Worked as a civil servant at the Ministry of SOEs since May 2014 as a Performance Accountability Analyst. From October 2014 to January 2019, he served as Financial Analyst, and from November 2018 to January 2019 as Acting Head of TU Subdivision Deputy for Construction Business and Transportation Facilities and Infrastructure. In 2019-2020 he was assigned as Head of the Verification and Accounting Subdivision, and currently serves as a Junior APBN Financial Management Analyst. Has experience in assignments in SOEs, namely at PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) as Secretary to the Board of Commissioners (2017- 2019), and as staff of the Board of Commissioners at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2019-2022). As of October 3 2022, he joined the Supporting Organs of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo as a member of Audit Committee.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang telah diperbarui melalui pengesahan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 5 Juni 2023. Piagam ini mengatur beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Latar belakang, maksud dan tujuan Komite Audit;
2. Dasar pembentukan, organisasi, mencakup hal-hal tentang struktur organisasi, keanggotaan dan persyaratan keanggotaan, masa jabatan, dan evaluasi Komite Audit;
3. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan dan kode etik Komite Audit, meliputi hal-hal tentang tugas dan tanggung jawab, wewenang dan mekanisme kerja, kode etik Komite Audit;
4. Program kerja, rapat, pelaporan Komite Audit, mencakup hal-hal tentang rapat, pelaporan Komite Audit;
5. Penutup, mencakup masa berlaku dan evaluasi.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Perusahaan bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan Tugas Eksternal Auditor dan Internal Auditor;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal;

Audit Committee Charter

In carrying out its duties, the Audit Committee is guided by the Audit Committee Charter which has been updated through approval by the Board of Commissioners on June 5, 2023. This Charter regulates several matters, including the following:

1. Background as well as aims and objectives of the Audit Committee;
2. Basis of establishment, organization, covering matters regarding organizational structure, membership and membership requirements, terms of office, and evaluation of the Audit Committee;
3. Duties, responsibilities, authorities, and code of conduct of the Audit Committee, including matters regarding duties and responsibilities, authorities, and working mechanisms, code of ethics of the Audit Committee;
4. Audit Committee work programs, meetings, and reporting including matters regarding Audit Committee meetings and reporting.
5. Closing, covering the validity period and evaluation.

Functions, Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Company's Audit Committee works collectively and functions to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties. In carrying out its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the Internal Control System and the effectiveness of the implementation of the External Auditor's and Internal Auditor's Duties;
2. Assess the implementation of activities and audit results carried out by the Internal Audit Unit and the External Auditor;

3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Jamkrindo;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Rekomendasi Komite Audit atas penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi tahun buku 2022 PT Jamkrindo mengacu pada ketentuan Peraturan OJK Pasal 13 Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan:

1. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
2. ruang lingkup audit;
3. imbalan jasa audit;
4. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
5. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
6. manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
7. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
8. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Komite Audit merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dalam pengelolaan bisnis Perusahaan khususnya dalam memberikan masukan bagi Dewan Komisaris. Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Komite Audit di sepanjang tahun 2023:

3. Provide recommendations regarding the improvement of the Management Control System and its implementation;
4. Ensure that there is a satisfactory review procedure for all information issued by Jamkrindo;
5. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.

Responsibilities of the Audit Committee in Providing Recommendations on the Appointment and Dismissal of the External Auditor

The Audit Committee's recommendation on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the annual historical financial information for the 2022 fiscal year position of PT Jamkrindo refers to the provisions of OJK Regulation Article 13 Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, taking into account:

1. Independence of AP, KAP, and KAP insiders;
2. Audit scope;
3. Fees for audit services;
4. The expertise and experience of AP, KAP, and the Audit Team from KAP;
5. Audit methodology, techniques, and tools used by KAP;
6. The benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through the replacement of the AP, KAP, and the Audit Team from the KAP;
7. Potential risk of using audit services by the same KAP consecutively for a long period of time; and/or
8. Results of the evaluation of the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by AP and KAP in the previous period, if any.

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by holding competency development programs for all employees. Competency development for the Audit Committee is an effort to update knowledge to support the implementation of supervisory duties in managing the Company's business, especially in providing input to the Board of Commissioners. The following is information about the Audit Committee competency development program throughout 2023:

Nama Names	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Trainings	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal** Dates	**Penyelenggara** Organizers
Hernita Alius	Ketua Komite Audit Chairperson of the Audit Committee	Seminar Workshop	*Boards and Risks - Risk Governance and Prevention in a Chaotic World*	20-21 November 2023 November 20-21, 2023	IMD - International Institute for Management Development

Nama Names	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Trainings	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Dates	Penyelenggara Organizers
Desty Arlaini	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Pelatihan Training	*Stewardship and Portofolio Management Training Program*	07-09 November 2023 November 07-09, 2023	Kementerian BUMN kolaborasi dengan Temasek Holding Singapura Ministry of SOEs collaborates with Singapore's Temasek Holding
Safari Mirza	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Pelatihan Training	GRC *Masterclass Program* 2023 (*Pre* IPO dan *Post* IPO) GRC Masterclass Program 2023 (Pre IPO and Post IPO)	10 Agustus 2023 August 10, 2023	BLMI
			GRC *Masterclass Program* 2023 (Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN) GRC Masterclass Program 2023 (Dissemination of SOE & SOE Subsidiary Ranking)	14 September 2023 September 14, 2023	BLMI
Sukamdani Eko Basuki	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	Pelatihan Training	GRC *Masterclass Program* 2023 (*Pre* IPO dan *Post* IPO) GRC Masterclass Program 2023 (Pre IPO and Post IPO)	10 Agustus 2023 August 10, 2023	BLMI
			GRC *Masterclass Program* 2023 (Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN) GRC Masterclass Program 2023 (Dissemination of SOE & SOE Subsidiary Ranking)	14 September 2023 September 14, 2023	BLMI

Rapat Komite Audit

Komite Audit telah menyelanggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Di sepanjang tahun 2023, Komite Audit menyelenggarakan 12 rapat, dengan risalah rapat dan kehadiran anggota Komite Audit seperti yang terlihat di bawah ini.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee has held meetings aimed at assisting the Board of Commissioners in overseeing the management of the Company. Throughout 2023, the Audit Committee has held 12 meetings, with the minutes of meetings and attendance of members of the Audit Committee as shown below

Risalah Rapat Komite Audit
Minutes of Audit Committee Meetings

Tanggal Dates	Agenda Rapat Meeting Agenda
25 Januari 2023 January 25, 2023	Rencana Kerja Strategis dan RKAT SPI 2023. Strategic Work Plan and RKAT SPI 2023.
20 Februari 2023 February 20, 2023	Bulan Februari 2023: Tanggal 20 Februari 2023 membahas Perkembangan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022. February 2023: February 20, 2023 discussing Developments in the Audit of Financial Statement for the 2022 Fiscal Year.
14 Maret 2023 March 14, 2023	Perkembangan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 per 14 Maret 2022 dan Lain-Lain. Development of Audit of Financial Statement for Fiscal Year 2022 as of March 14 2022 and others.
28 April 2023 April 28, 2023	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Maret 2023 dan Lain-Lain. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in March 2023 and Others.
26 Mei 2023 May 26, 2023	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan April 2023 dan Lain-Lain. Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in April 2023 and Others.
21 Juni 2023 June 21, 2023	Monitoring Hasil Pengawasan sampai dengan Mei 2023 dan Lain-Lain. Monitoring of Supervision Results until May 2023 and others.
20 Juli 2023 July 20, 2023	Format Laporan Kegiatan dan Keuangan Bulanan dan Triwulanan dan Lain-Lain. Format of Monthly and Quarterly Activity of Financial Statement and Others.

Risalah Rapat Komite Audit
Minutes of Audit Committee Meetings

Tanggal Dates	Agenda Rapat Meeting Agenda
22 Agustus 2023 August 22, 2023	Beban CKPN sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Lain-Lain. CKPN Expenses until Q2 2023 and Others.
18 September 2023 September 18, 2023	Klaim dan Subrogasi sampai dengan Bulan Juli 2023 dan Lain-Lain. Claims and subrogation until July 2023 and Others.
18 Oktober 2023 October 18, 2023	RKAP 2024, Tingkat Kesehatan, dan Lain-Lain. RKAP 2024, Soundness Level, and Others.
14 November 2023 November 14, 2023	Penyatuan Pemahaman Timeline Audit KAP dan Pembahasan Tanggapan Surat PwC. Unifying the Understanding of the KAP Audit Timeline and Discussion of the PwC Letter Response.
5 Desember 2023 December 5, 2023	Progres Tindak Lanjut Temuan Audit sampai dengan Bulan November 2023. Progress of Follow-up on Audit Findings until November 2023.

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat
Recapitulation and Attendance of the Audit Committee in Meetings

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran/ Attendance
Hernita Alius	12	12	0	100%
Desty Arlaini	12	12	0	100%
Angger P Yuwono*	5	5	0	100%
Safari Mirza	12	12	0	100%
Sukamdani Eko B	12	12	0	100%

*) mulai masa jabatan terhitung tanggal 31 Juli 2023
*) term of office commencing on July 31, 2023

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit 2023

Komite Audit adalah organ/perangkat yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas Dewan Komisaris. Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya dalam pelaporan dan pertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, disebutkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komite Audit bertugas untuk:
   a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
   b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor Internal maupun auditor eksternal.
   c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
   d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.

Brief Report on the Implementation of the 2023 Audit Committee Work Program

The Audit Committee is an organ/instrument appointed and dismissed by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners' duties. The Audit Committee works collectively and is independent both in carrying out its duties in reporting and is responsible directly to the Board of Commissioners. In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 dated concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the following matters are stated:

1. The Audit Committee is tasked with:
   a. Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of carrying out the duties of external auditors and internal auditors.
   b. Assess the implementation of activities and the results of audits carried out by internal auditors and external auditors.
   c. Provide recommendations regarding improvements to the management control system and its implementation.
   d. Ensure that there are satisfactory evaluation procedures for all information released by the Company.

e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
f. Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

2. Selain tugas-tugas tersebut di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.
Selama tahun 2023, Komite Audit telah melakukan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan rapat Komite secara berkala, sekurang-kurangnya sebulan sekali dengan realisasi:
   - Bulan Januari 2023: Tanggal 25 Januari 2023 membahas Evaluasi Rencana Kerja Strategis dan RKAT SPI 2023;
   - Bulan Februari 2023: Tanggal 20 Februari 2023 membahas Perkembangan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022;
   - Bulan Maret 2023: Tanggal 14 Maret 2023 membahas Perkembangan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 Per 14 Maret 2022 dan Lain-lain;
   - Bulan April 2023: Tanggal 28 April 2023 membahas Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Maret 2023 dan Lain-lain;
   - Bulan Mei 2023: Tanggal 26 Mei 2023 membahas Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan April 2023 dan Lain-lain;
   - Bulan Juni 2023: Tanggal 21 Juni 2023 membahas Monitoring Hasil Pengawasan sampai dengan Mei 2023 dan Lain-lain;
   - Bulan Juli 2023: Tanggal 20 Juli 2023 membahas Format Laporan Kegiatan dan Keuangan Bulanan dan Triwulanan dan Lain-lain;
   - Bulan Agustus 2023: Tanggal 22 Agustus 2023 membahas Beban CKPN sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Lain-lain;
   - Bulan September 2023: Tanggal 18 September 2023 membahas Klaim dan Subrogasi sampai dengan Bulan Juli 2023 dan Lain-lain.
   - Bulan Oktober 2023: Tanggal 18 Oktober 2023 membahas RKAP 2024, Tingkat Kesehatan, dan Lain-lain.
   - Bulan November 2023: Tanggal 14 November 2023 membahas Penyatuan Pemahaman *Timeline* Audit KAP dan Pembahasan Tanggapan Surat PwC.
   - Bulan Desember 2023: Tanggal 5 Desember 2023 membahas Progres Tindak Lanjut Temuan Audit sampai dengan Bulan November 2023.
3. Menyiapkan telaahan/analisa dan bahan terkait kinerja bulanan, perkembangan kondisi dan masalah aktual serta isu strategis yang terjadi pada perusahaan, serta mengikuti rapat Dewan Komisaris.

e. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as other duties of the Board of Commissioners.
f. Carrying out tasks related to risk management as regulated in legislation.

2. In addition to the tasks mentioned above, the Board of Commissioners may provide other assignments in accordance with statutory regulations to the Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter.
In 2023, the Audit Committee has carried out duties in accordance with statutory provisions, including the following activities:
a. Hold regular Committee meetings, at least once a month with the realization of:
   - January 2023: January 25, 2023, discussing the Evaluation of the 2023 SPI Strategic Work Plan and RKAT;
   - February 2023: February 20, 2023, discussing developments in the audit of financial statement for the 2022 fiscal year;
   - March 2023: March 14, 2023, discussing developments in the Audit of Financial Statement for the 2022 Fiscal Year as of March 14, 2022, and others;
   - April 2023: April 28, 2023, discussing Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements for March 2023 and Others;
   - May 2023: May 26, 2023, discussing Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in April 2023 and others;
   - June 2023: June 21, 2023 discussing Monitoring of Supervision Results up to May 2023 and Others;
   - July 2023: July 20, 2023, discussing the Format of Monthly and Quarterly Activity and Financial Statement and Others;
   - August 2023: August 22, 2023, discusses CKPN expenses up to the second quarter of 2023 and others;
   - September 2023: September 18, 2023, discussing Claims and Subrogation up to July 2023 and others.
   - October 2023: October 18, 2023, discussing the 2024 RKAP, Soundness Level, and others.
   - November 2023: November 14, 2023, discussing Unifying the Understanding of the KAP Audit Timeline and Discussion of the PwC Letter Response.
   - December 2023: December 5, 2023, discusses the progress of follow-up to audit findings up to November 2023.
3. Prepare reviews/analyses and materials related to monthly performance, developments in conditions and actual problems as well as strategic issues occurring in the Company, as well as attending Board of Commissioners meetings.

a. Bulan Januari 2023:
   i) Tanggal 9 Januari 2023: *Kick Off Meeting Corporate Governance Assessment* SK 16 PT Jamkrindo Tahun 2022 dan Sosialisasi mengenai SK 16;
   ii) Tanggal 11 Januari 2023: *Kick off Meeting* Audit Laporan Keuangan Konsolidasi PT Jamkrindo Tahun Buku 2022;
   iii) Tanggal 25 Januari 2023: *Monitoring* dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Desember 2022;
   iv) Tanggal 31 Januari 2023: Kunjungan Kerja dan Audiensi Dewan Komisaris PT BPUI dengan Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamkrindo.

b. Bulan Februari 2023:
   i) Tanggal 9 Februari 2023: *Steering Committee Meeting Project Single Platform Enterprise Resource Planning* (ERP) PT BPUI (Persero) dan Anak Perusahaan;
   ii) Tanggal 10 Februari 2023: Rapat Pembahasan Perkembangan Audit Laporan Keuangan *Holding* PT BPUI;
   iii) Tanggal 24 Februari 2023: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Januari 2023.
c. Bulan Maret 2023:
   i) Tanggal 14 Maret 2023: Rapat *Progress* Audit Laporan Keuangan TB 2022 oleh KAP PwC;
   ii) Tanggal 21 Maret 2023: Rapat Pembahasan Perkembangan Audit Laporan Keuangan *Holding* PT BPUI;
   iii) Tanggal 28 Maret 2023: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Februari 2023;
   iv) Tanggal 29 Maret 2023: *Clearance Meeting* KAP atas Audit Laporan Keuangan TB 2022.
d. Bulan April 2023:
   i) Tanggal 3 April 2023: Rapat Pembahasan Tanggapan atas Penggunaan Anggaran Dewan Komisaris pos Biaya Jasa KAP Tahun 2023 untuk Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022;
   ii) Tanggal 5 April 2023: Rapat Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Direksi terkait Penggunaan Anggaran pos Biaya Jasa Audit KAP;
   iii) Tanggal 28 April 2023: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Maret 2023.
e. Bulan Mei 2023:
   i) Tanggal 26 Mei 2023: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan April 2023;
   ii) Tanggal 29 Mei 2023: Penetapan Piagam Komite Dewan Komisaris PT Jamkrindo.
f. Bulan Juni 2023:
   i) Tanggal 9 Juni 2023: Pembahasan Keputusan Surat Keputusan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris;

a. January 2023:
   i) January 9, 2023: Kick Off Meeting Corporate Governance Assessment SK 16 PT Jamkrindo 2022 and Dissemination regarding SK 16;
   ii) January 11, 2023: Kick off Meeting Audit of PT Jamkrindo's Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2022;
   iii) January 25, 2023: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in December 2022;
   iv) January 31, 2023: Working Visit and Audience of the Board of Commissioners of PT BPUI with the Directors and Board of Commissioners of PT Jamkrindo.
b. February 2023:
   i) February 9, 2023: Steering Committee Meeting Project Single Platform Enterprise Resource Planning (ERP) PT BPUI (Persero) and Subsidiaries;
   ii) February 10, 2023: Meeting to discuss developments in the audit of PT BPUI Holding's financial statement;
   iii) February 24, 2023: Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of PT Jamkrindo in January 2023.
c. March 2023:
   i) March 14, 2023: FY 2022 Financial Statement Audit Progress Meeting by KAP PwC;
   ii) March 21, 2023: Meeting to discuss developments in the audit of PT BPUI Holding's financial statement;
   iii) March 28, 2023: Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of PT Jamkrindo in February 2023;
   iv) March 29, 2023: KAP Clearance Meeting on the 2022 FY Financial Statement Audit.
d. April 2023:
   i) April 3, 2023: Meeting to discuss responses to the use of the Board of Commissioners' budget post 2023 KAP service fees for the general audit of the 2022 fiscal year consolidated financial statements;
   ii) April 5, 2023: Meeting to discuss the Board of Commissioners' response to the Board of Directors' proposal regarding the use of the budget post for KAP Audit Service Fees;
   iii) April 28, 2023: Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of PT Jamkrindo in March 2023.
e. May 2023:
   i) May 26, 2023: Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of PT Jamkrindo in April 2023;
   ii) May 29, 2023: Determination of the PT Jamkrindo Board of Commissioners Committee Charter.
f. June 2023:
   i) June 9, 2023: Discussion of the Decree on the Board of Commissioners Meeting Rules of Procedure;

ii) Tanggal 27 Juni 2023: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Mei 2023.

g. Bulan Juli 2023:
Tanggal 25 Juli 2023: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juni 2023;
h. Bulan Agustus 2023:
Tanggal 29 Agustus 2023: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juli 2023;

i. Bulan September 2023:
Tanggal 26 September 2023: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Agustus 2023;
j. Bulan Oktober 2023:
Tanggal 27 Oktober 2023: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan September 2023.
k. Bulan November 2023
Tanggal 28 November 2023: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan Oktober 2023.
l. Bulan Desember 2023
i) Tanggal 22 Desember 2023: Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo bulan November 2023;
ii) Tanggal 22 Desember 2023: Pembahasan *Summary Executive* RKAP PT Jamkrindo Tahun 2024.

4. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Komisaris ke lapangan/unit kerja di daerah
Sampai dengan periode akhir tahun 2023, Komite Audit telah mengikuti Kunjungan kerja Dewan Komisaris, yaitu:

a. Kantor Wilayah VII Denpasar dan Kantor Cabang Binaan pada tanggal 20 Januari 2023;
b. Kantor Wilayah II Palembang dan Kantor Cabang Binaan pada tanggal 5 April 2023;
c. Kantor Wilayah I Medan dan Kantor Cabang Binaan pada tanggal 31 Mei 2023;
d. Kantor Wilayah I Medan dan Kantor Cabang Binaan pada tanggal 11 September 2023.
e. Kantor Wilayah VI Surabaya dan Kantor Cabang Binaan pada tanggal 1 Desember 2023.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2022 yang dilaksanakan oleh KAP KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers/PwC).
6. Melakukan evaluasi dan rekomendasi penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), serta memberikan saran dan masukan atas proses pengadaan KAP audit tahunan tahun 2023 dengan mempertimbangkan kebutuhan penetapan KAP yang sama untuk seluruh anggota *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan.
7. Melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas internal auditor serta memberi tanggapan/masukan terkait temuan-temuan penting internal auditor dan temuan-temuan dari pihak eksternal seperti BPK-RI, OJK, dan lainnya.

ii) June 27, 2023: Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of PT Jamkrindo in May 2023.

g. July 2023:
July 25, 2023: Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's Performance Achievements in June 2023;
h. August 2023:
August 29, 2023: Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of PT Jamkrindo in July 2023;
i. September 2023:
September 26, 2023: Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of PT Jamkrindo in August 2023;
j. October 2023:
October 27, 2023: Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of PT Jamkrindo in September 2023.
k. November 2023
November 28, 2023: Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of PT Jamkrindo in October 2023.
l. December 2023
i) December 22, 2023: Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of PT Jamkrindo in November 2023;
ii) December 22, 2023: Discussion of Executive Summary of RKAP of PT Jamkrindo in 2024.

4. Provide assistance to the Board of Commissioners' visits to the field/work units in the regions'
Until the end of 2023, the Audit Committee has participated in working visits from the Board of Commissioners, namely:
a. Denpasar Region VII Office and Assisted Branch Offices on January 20, 2023;
b. Palembang Regional Office II and Assisted Branch Offices on April 5, 2023;
c. Medan Regional Office I and Assisted Branch Offices on May 31, 2023;
d. Medan Regional Office I and Assisted Branch Offices on September 11, 2023.
e. Regional Office VI Surabaya and Assisted Branch Offices on December 11, 2023.

5. Monitoring and evaluating the implementation of the 2022 financial statement audit carried out by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (PricewaterhouseCoopers/PwC)..
6. Evaluating and recommending the use of Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) services, as well as providing advice and input on the 2023 annual audit KAP procurement process by considering the need to establish the same KAP for all members of the Insurance and Guarantee SOEs Holding.
7. Evaluating the effectiveness of the internal control system and the implementation of the internal auditor's duties as well as providing feedback/input regarding important internal auditor findings and findings from external parties such as BPK-RI, OJK, and others.

8. Melakukan telaahan terhadap Rencana Kerja Strategis dan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) Satuan Pengawas Internal (SPI) Tahun 2023 serta monitoring realisasi rencana kerja sampai dengan September 2023.
9. Melakukan telaahan atas Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2022 PT Jamkrindo (*audited*).
10. Melakukan telaahan atas Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan I Tahun 2023 PT Jamkrindo.
11. Melakukan telaahan atas Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 PT Jamkrindo.
12. Melakukan telaahan atas Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 PT Jamkrindo.
13. Melakukan *review* dan tanggapan atas laporan tugas pengawasan triwulanan.
14. Melakukan telaahan atas Kinerja Perusahaan setiap bulan selama Tahun 2023 serta analisa hasil kunjungan monitoring dan evaluasi kinerja Kanwil dan/atau Kanca Binaan.
15. Melakukan telaah atas hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi setiap bulan.
16. Menyusun serta menyelaraskan Program kerja dan anggaran tahunan Komite dengan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris.
17. Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan, di antaranya:
    a. BLMI GRC Masterclass – Pre IPO dan Post IPO pada tanggal 10 Agustus 2023;
    b. BLMI GRC Masterclass – Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN pada tanggal 14 September 2023.
    c. Sosialisasi Petunjuk Teknis pada tanggal 14 November 2023:
        i) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Pada BUMN (Permen 2 Pasal 103);
        ii) Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Pada Taksonomi Portofolio BUMN (Permen 2 Pasal 73 ayat 10);
        iii) Pelaporan Manajemen Risiko (Permen 2 Pasal 66 ayat 5).

8. Reviewing the Strategic Work Plan and Annual Audit Work Plan (RKAT) of the Internal Supervisory Unit (SPI) for 2023 as well as monitoring the realization of the work plan until September 2023.
9. Reviewing PT Jamkrindo's Fourth Quarter 2022 Activity and Financial Statement (audited).
10. Reviewing PT Jamkrindo's First Quarter 2023 Activity and Financial Statement.
11. Reviewing PT Jamkrindo's 2023 Quarter II Activity and Financial Statement.
12. Reviewing PT Jamkrindo's Third Quarter 2023 Activity and Financial Statement.
13. Reviewing and responding to quarterly supervisory task reports.
14. Conducting a review of the Company's performance every month in 2023, as well as analyzing the results of monitoring and evaluation visits to the performance of Regional Offices and/or Assisted branch office.
15. Reviewing the results of the Board of Commissioners and Directors meetings every month.
16. Preparing and aligning the Committee's annual work program and budget with the work plan and budget of the Board of Commissioners.
17. Participating in activities to increase competency and knowledge, including:
    a. BLMI GRC Masterclass – Pre IPO and Post IPO on August 10, 2023;
    b. BLMI GRC Masterclass – Socialization of SOEs & SOEs' Subsidiary Ratings on September 14, 2023.
    c. Dissemination of Technical Instructions on November 14, 2023:
        i) Preparation of Key Performance Indicators for SOEs (Ministerial Regulation 2 Article 103);
        ii) Risk Management and Aggregation Process in SOEs Portfolio Taxonomy (Ministerial Regulation 2 Article 73 paragraph 10);
        iii) Risk Management Reporting (Ministerial Regulation 2 Article 66 paragraph 5).

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Audit

Remuneration Policy for the Audit Committee

Remunerasi Komite Audit non Dewan Komisaris
Remuneration of Audit Committee Non-Commissioners

Nama Names	**Periode Menjabat** Term of OFfice	**Honorarium per Bulan** Honorarium per Month	**Tunjangan** Allowance	**Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan** Total Honorarium and Allowance per Month	**Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun** Total Honorarium and Allowance per Year	***Tantiem***	**Jumlah Remunerasi Tahun 2020** Total Remuneration in 2020
		(Rp/IDR)	(Rp/IDR)		(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)
Safari Mirza	Januari-Desember January - December	42.400.000	0	42.400.000	508.800.000	0	508.800.000
Sukamdani Eko B	Januari-Desember January - December	42.400.000	0	42.400.000	508.800.000	0	508.800.000

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan nominasi dan remunerasi di lingkup Jamkrindo. Komite ini dibentuk pada 7 April 2020.

The Nomination and Remuneration Committee was formed by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners with regard to nomination and remuneration policies within the scope of Jamkrindo. This committee was just formed on April 7, 2020.

Susunan dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2023 melalui Keputusan No. KEP-07/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dengan menetapkan pemberhentian Sdr. Krisna Wijaya dan mengangkat Bapak Angger P. Yuwono sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berikut susunan Komite Nominasi dan Remunerasi posisi akhir tahun 2023, yaitu:

Composition and Profile of the Nomination and Remuneration Committee Members

In 2023, through Decree no. KEP-07/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 dated August 1, 2023 concerning Dismissal, Appointment and Changes in the Composition of Members of the Nomination and Remuneration Committee, it has stated to dismiss Mr. Krisna Wijaya and appointed Mr. Angger P. Yuwono as Member of the Nomination and Remuneration Committee.

The current composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2023, was as follows:

No.	Nama Names	Jabatan Position	SK Dewan Komisaris Decree of the BoC
1.	M Muchlas Rowi	Ketua Chairperson	KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022
2.	Desty Arlaini	Anggota Member	KEP-09/DK-JAMKRINDO/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 KEP-09/DK-JAMKRINDO/VI/2021 dated June 23, 2021
3.	Ari Wahyuni	Anggota Member	KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022
4.	Hernita Alius	Anggota Member	KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022
5.	Angger P Yuwono	Anggota Member	KEP-07/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 KEP-07/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 dated August 1, 2022

Seluruh Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Dewan Komisaris. Profil masing-masing Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

All Chairperson and Members of the Nomination and Remuneration Committee are members of the Board of Commissioners. The profile of each Chair and Member of the Nomination and Remuneration Committee can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section, in the Company Profile chapter.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah diperbarui melalui pengesahan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 23 Juni 2021. Piagam ini mengatur beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Visi dan misi pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Struktur organisasi dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
3. Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;

Nomination and Remuneration Committee Charter

In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee is guided by the Nomination and Remuneration Committee Charter which was updated through approval by the Board of Commissioners on June 23, 2021. This Charter regulates several things, including the following:

1. Vision and mission of establishing the Nomination and Remuneration Committee;
2. Organizational structure and membership of the Nomination and Remuneration Committee;
3. Requirements for membership of the Nomination and Remuneration Committee;

4. Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi;

5. Wewenang, hak dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi
6. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;

7. Masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
8. Lainnya.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris harus membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Bahwa sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) pada 5 Juni 2023, berikut tugas dan tanggung jawab KNR yaitu:

1. Terkait dengan fungsi nominasi :
   a. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*talent managements*) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
   b. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;

   c. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   d. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   e. Memberikan saran terkait dengan sistem dan prosedur penilaian, pemilihan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan kepada Dewan Komisaris;

   f. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

   g. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   h. Mengevaluasi piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

4. Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee;
5. Authority, rights, and obligations of the Nomination and Remuneration Committee;
6. Meetings of the Nomination and Remuneration Committee;
7. Term of office of the Nomination and Remuneration Committee Members;
8. Other.

Functions, Duties, and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

As per the Minister of SOEs' Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the Board of Commissioners must form a Nomination and Remuneration Committee which is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. In accordance with the Nomination and Remuneration Committee (KNR) Charter on June 5, 2023, the following duties and responsibilities of the NRC are:

1. Related to the nomination function:
   a. Conduct regular reviews of the Company's Talent Management System and monitor and evaluate its implementation;

   b. Evaluate the Company's Representative Candidates who will be proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners of subsidiaries, before being submitted to the GMS/Minister;
   c. Prepare a proposed individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
   d. Prepare development program proposals for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
   e. Provide advice regarding systems and procedures for assessing, selecting and/or replacing members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Executive Officers of the Company to the Board of Commissioners;
   f. Provide recommendations regarding prospective members of the Board of Directors and/or prospective members of the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
   g. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
   h. Evaluate the Committee's charter periodically in accordance with developments in statutory provisions.
   i. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:

i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

ii) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan

iii) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

iv) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

v) Calon yang memenuhi syarat sebagai calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Dewan Komisaris;

vi) Remunerasi dan Nominasi dan yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris;

vii) Hasil evaluasi secara berkala terhadap struktur organisasi, penerapan kebijakan nominasi dan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai.

2. Terkait dengan fungsi remunerasi:
   a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dapat berupa:
      i) Gaji;
      ii) Honorarium;
      iii) Insentif; dan/atau
      iv) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable.
   b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
   e. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
      i) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha perusahaan;
      ii) Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan;
      iii) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
      iv) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan

i) Composition of positions of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
ii) Policies and criteria required in the nomination process; And
iii) Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
iv) Capacity development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
v) Candidates who meet the requirements as candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and Independent parties who will become members of the Board of Commissioners Committee;
vi) Remuneration and Nomination and which require approval/response from the Board of Commissioners;
vii) Results of regular evaluation of the organizational structure, implementation of nomination and remuneration policies for Directors, Board of Commissioners and employees.

2. Related to the remuneration function:
   a. Develop a Remuneration structure for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners which can be in the form of:
      i) Salary;
      ii) Honorarium;
      iii) Incentives; and/or
      iv) Fixed and/or variable allowances.
   b. Develop a policy on Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
   c. Prepare the amount of remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
   d. The structure, policies and amount of Remuneration must be evaluated by the Nomination and Remuneration Committee at least 1 (one) time in 1 (one) year.
   e. The preparation of the structure, policies and amount of Remuneration must take into account:
      i) Remuneration applicable to the industry is in accordance with the Company's business activities and business scale;
      ii) The duties, responsibilities and authority of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners are related to achieving the Company's goals and performance;
      iii) Performance targets or performances of each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
      iv) Balance of allowances between fixed and variable benefits.

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by holding competency development

program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dalam pengelolaan bisnis Perusahaan khususnya dalam memberikan masukan bagi Dewan Komisaris.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Nominasi dan Remunerasi di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada uraian pengembangan kompetensi Dewan Komisaris di Bab Governasi Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam hal pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi. Di sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat, dengan risalah rapat dan kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi seperti yang terlihat di bawah ini.

programs for all employees. Competency development for the Nomination and Remuneration Committee is an effort to update knowledge to support the implementation of supervisory duties in managing the Company's business, especially in providing input to the Board of Commissioners.

Concerning competency development activities that the Nomination and Remuneration Committee has participated throughout 2022, they can be seen in the description of competency development for the Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter in this annual report.

Nomination and Remuneration Committee Meetings

The Nomination and Remuneration Committee has held meetings aimed at assisting the duties of the Board of Commissioners in terms of implementing the nomination and remuneration functions. Throughout 2022, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings, with the minutes of meetings and the presence of members of the Nomination and Remuneration Committee as shown below

Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Minutes of Nomination and Remuneration Committee's Meeting

Tanggal Dates	**Agenda Rapat** Meeting Agenda
16 Februari 2023 February 16, 2023	Pemetaan Talenta PT Jamkrindo dalam rangka Keperluan *Cluster Talent Committee* Talent Mapping of PT Jamkrindo for the Purpose of Cluster Talent Committee
20 Maret 2023 March 20, 2023	Tanggapan atas Usulan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Response to the Proposed Replacement of Directors and Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
31 Mei 2023 May 31, 2023	Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Tahun 2023 dan Tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2022 Proposed Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jamkrindo in 2023 and Bonuses for the Performance of Fiscal Year 2022
29 Desember 2023 December 29, 2023	Data dan Informasi Terkait Pemetaan Talenta BOD-1 PT Jamkrindo Data and Information Related to Talent Mapping of BOD-1 PT Jamkrindo

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat
Recapitulation and Attendance of the Nomination and Remuneration Committee in Meetings

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	**Jumlah Wajib Rapat** Number of Mandatory Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Jumlah Ketidakhadiran** Number of Absence	**% Kehadiran/ Attendance**
M Muchlas Rowi	4	4	0	100%
Krisna Wijaya*)	3	3	0	100%
Desty Arlaini	4	4	0	100%
Ari Wahyuni	4	4	0	100%
Hernita Alius	4	4	0	100%
Angger P Yuwono**)	1	1	0	100%
Rata-rata Average				100%

*) selesai masa jabatan terhitung tanggal 31 Juli 2023
**) mulai masa jabatan terhitung tanggal 31 Juli 2023
*) finished the term of office as of July 31, 2023
**) started the term of office as of July 31, 2023

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi 2023

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/ kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, dan karyawan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) pada telah melakukan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan tanggapan atas usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Tahun 2023 dan tantiem atas kinerja tahun buku 2022.
2. Menyampaikan hasil pemetaan talenta BOD-1 dan evaluasi kinerja Anggota Direksi PT Jamkrindo kepada Pemegang Saham.
3. Menyampaikan tanggapan atas pengusulan wakil Perseroan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsyar (anak perusahaan).

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

Tidak terdapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Dewan Komisaris.

Kebijakan Mengenai Rencana Suksesi Direksi

Suksesi Direksi menjadi momentum membangun tradisi alih generasi dan role model bagi Jamkrindo, selain sebagai tantangan bagi Direksi terpilih dan segenap karyawan untuk menjawabnya dengan prestasi dan kinerja terbaik. Untuk memastikan Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang semestinya, Perusahaan melakukan proses suksesi Direksi di mana penetapan calon Direksi Jamkrindo ditetapkan berdasarkan pemenuhan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/ mBu/02/2015. Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian.

Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi, adalah sebagai berikut:

Brief Report on the Implementation of the 2023 Nomination and Remuneration Committee Work Program

The Nomination and Remuneration Committee is responsible for conducting evaluations as well as compiling and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding nomination and remuneration systems/policies for Commissioners, Directors and employees which require approval from the Board of Commissioners.

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee (KNR) has carried out its duties in accordance with applicable regulations, covering the following activities:

1. Provided response on the proposed remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jamkrindo.
2. Delivered the results of the talent assessment of members of the Board of Directors of PT Jamkrindo and performance evaluation of the members of the BoD to Shareholders.
3. Submitted a response on the proposal for the representative of the Company as the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Jamsyar (subsidiary).

Remuneration Policy for the Nomination and Remuneration Committee

Based on the Minister of SOE's Regulation No. PER-12/ MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the income component of the Nomination and Remuneration Committee is 20% of the salary of the Company's President Director.

There is no Nomination and Remuneration Committee members that comes from outside the Board of Commissioners.

Policy Concerning the Board of Directors Succession Plan

The succession of the Directors is a momentum to build a generational transfer tradition and a role model for Jamkrindo, as well as being a challenge for the elected Directors and all employees to respond with the best achievements and performance. To ensure that the Company is managed by a management who has the proper expertise and competence, the Company carries out a succession process for the Directors, in which candidates for Jamkrindo's directors are determined based on compliance with State Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015. The Board of Directors selection process is carried out by an Evaluation Team determined by the Minister based on proposals from the relevant Echelon I and Ministry Secretary.

The selection process by the Evaluation Team is as follows

Melakukan pemanggilan terhadap Calon Anggota Direksi yang termasuk dalam Daftar Calon yang telah disetujui oleh Menteri, untuk mengikuti UKK.
Call for Candidates for Members of the Board of Directors who are included in the Candidate List that has been approved by the Minister, to take part in the Skill Competency Test (UKK).

↓

Melakukan pengujian terhadap Calon Anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan Lembaga Profesional.
Conduct testing on the Candidates for Members of the Board of Directors if the test does not use a Professional Institution

↓

Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian Lembaga Profesional, jika pengujian menggunakan Lembaga Profesional.
Evaluate the test results of the Professional Institution if the test uses the Professional Institution

↓

Mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan.
Make decisions and provide recommendations on the assessment carried out

↓

Menetapkan hasil akhir evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Evaluasi, untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan penetapan.
Determine the final results of the evaluation signed by the Chair and Deputy Chair of the Evaluation Team, to be submitted to the Minister for approval.

↓

Menyampaikan seluruh dokumen UKK kepada Sekretaris Kementerian untuk diadministrasikan.
Submit all UKK documents to the Secretary of the Ministry for administration.

↓

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri dalam rangka memperlancar proses UKK.
Perform other tasks assigned by the Minister in order to facilitate the UKK process.

Tim Evaluasi memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menentukan calon terbaik. Sedangkan pembobotan dalam penilaian terhadap persyaratan materil calon Direksi, adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 35% dengan perincian sebagai berikut:
   a. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 10%;
   b. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
   c. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%;
   d. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 5%.
2. Kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 55% dengan perincian sebagai berikut:
   a. Pengetahuan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan diberikan bobot 5%;
   b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan diberikan bobot 10%;

The Evaluation Team provides recommendations to the Minister to determine the best candidate. While the weighting in the assessment of the material requirements for candidates for the Board of Directors is as follows:

1. Integrity and morals are given an assessment weight of 35% with the following details:
   a. Never been involved in manipulative acts and deviant practices at the place of which the person concerned worked prior to nomination (acting dishonestly). This is given a weight of 10%;
   b. Never been involved in an act of default which can be categorized as not fulfilling the agreed commitments at the place of which the person concerned worked prior to nomination (bad behavior). This is given a weight of 10%;
   c. Never been involved in an act that is categorized as giving unlawful advantage to the person concerned and/or other parties prior to nomination (bad behavior). This is given a weight of 10%;
   d. Never been involved in an act that could be categorized as a violation of the provisions relating to the principles of managing a healthy company (bad behavior). This is given a weight of 5%.
2. Technical competence/skills are given an assessment weight of 55% with the following details:
   a. Knowledge in the field of business of the SOE concerned is given a weight of 5%;
   b. Understanding of management and corporate governance is given a weight of 10%;

c. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/ Perusahaan/Lembaga diberikan bobot 10%;
d. Kemampuan memimpin dan bekerja sama diberikan bobot 10%;
e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN diberikan bobot 20%.

3. Psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%.

c. Experience in managing SOEs/Companies/ Institutions is given a weight of 10%;
d. The ability to lead and cooperate is given a weight of 10%;
e. The ability to formulate and implement strategic policies in the framework of SOE development is given a weight of 20%.

3. Psychological aspects are given a rating weight of 10%.

KOMITE PEMANTAU RISIKO
RISK MONITORING COMMITTEE

Tujuan pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penetapan, kebijakan, dan pedoman serta pelaksanaan investasi (penempatan dana) dan pengelolaan risiko usaha yang dijalankan oleh direksi dan jajarannya, termasuk kepatuhan Perusahaan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan, sebagai bagian dari perwujudan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/DK-JAMKRINDO/VI/2023 tentang Penetapan Piagam Komite-Komite Dewan Komisaris, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur serta ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Nomor KEP-05/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 tentang Pengangkatan Anggota, dan Perubahan Nomenklatur Komite Investasi dan Risiko Usaha Menjadi Komite Pemantau Risiko.

The purpose of establishing the Risk Monitoring Committee is to assist the Board of Commissioners in performing the supervisory function of the establishment, policies, and guidelines as well as the implementation of investment (placement of funds) and business risk management carried out by the board of directors and its staff, including the Company's compliance with legal and regulatory provisions, as part of the realization of good corporate governance practices.

In connection with the implementation of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the stipulation of the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-03/DK-JAMKRINDO/VI/2023 concerning the Determination of the Charter of the Board of Commissioners Committees, the nomenclature adjustments were made and stipulated through the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo Number KEP-05/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 concerning the Appointment of Members, and Changes in the Nomenclature of the Investment and Business Risk Committee to the Risk Monitoring Committee.

Susunan dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2023, terdapat beberapa perubahan pada Komite Pemantau Risiko di antaranya:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/DK-JAMKRINDO/IV/2023 Tanggal 28 April 2023 tentang Pengangakatan, dan Perubahan Susunan Komite Investasi dan Risiko Usaha pada Dewan Komisaris PT Jamkrindo telah menetapkan Sdr. Mas Dharmawan Suryadi sebagai Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha.
2. Selanjutnya melalui Keputusan No. KEP-05/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, Dewan Komisaris menetapkan perubahan nomenklatur Komite Investasi dan Risiko Usaha menjadi Komite Pemantau risiko serta mengangkat Sdr. Angger P. Yuwono sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

Composition and Profile of Risk Monitoring Committee Members

In 2023, there were several changes to the Risk Monitoring Committee, including:

1. Based on the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-01/DK-JAMKRINDO/IV/2023 Dated April 28, 2023, concerning Appointment and Changes to the Composition of the Investment and Business Risk Committee, the Board of Commissioners of PT Jamkrindo has appointed Mr. Mas Dharmawan Suryadi as Member of the Investment and Business Risk Committee.
2. Furthermore, through Decree No. KEP-05/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 dated August 1, 2023, the Board of Commissioners determined to change the nomenclature of the Investment and Business Risk Committee to become a Risk Monitoring Committee and appointed Mr. Angger P Yuwono as Member of the Risk Monitoring Committee.

Berikut susunan Komite Pemantau Risiko posisi akhir tahun 2023 yaitu,

The following is the composition of the Risk Monitoring Committee at the end of 2023:

No.	Nama Names	Jabatan Position	SK Dewan Komisaris Decree of the BoC
1.	Krisna Wijaya	Ketua Chairperson	KEP-07/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-07/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022
2.	Ari Wahyuni	Anggota Member	KEP-07/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 KEP-07/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 28, 2022

No.	Nama Names	Jabatan Position	SK Dewan Komisaris Decree of the BoC
3.	M. Muchlas Rowi	Anggota Member	KEP-07/DP-JAMKRINDO/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 KEP-07/DK-JAMKRINDO/X/2019 dated October 21, 2019
4.	Angger P. Yuwono	Anggota Member	KEP-05/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 KEP-05/DK-JAMKRINDO/VIII/2023 dated August 1, 2023
5.	Fahrul Ismaeni	Anggota Member	1. KEP-04/DK-JAMKRINDO/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 jo. 2. KEP-03/DK-JAMKRINDO/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 1. KEP-04/DK-JAMKRINDO/X/2020 dated October 1, 2020 jo. 2. KEP-03/DK-JAMKRINDO/X/2022 dated October 3, 2022
6.	Mas Dharmawan Suryadi	Anggota Member	KEP-01/DK-JAMKRINDO/IV/2023 tanggal 28 April 2023 KEP-01/DK-JAMKRINDO/IV/2023 dated April 28, 2023

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Di bawah ini disajikan profil dari para anggota Komite Pemantau Risiko.

Profile of Risk Monitoring Committee Members

Below are the profiles of the members of the Risk Monitoring Committee.

Krisna Wijaya
Ketua Komite Pemantau Risiko/ Head of Risk Monitoring Committee

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko Krisna Wijaya dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.	The profile of the Chairperson of the Risk Monitoring Committee, Krisna Wijaya, can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section, in the Company Profile chapter.

Ari Wahyuni
Anggota Komite Pemantau Risiko/ Member of the Risk Monitoring Committee

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko Ari Wahyuni dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.	The profile of the member of the Risk Monitoring Committee, Ari Wahyuni, can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section, in the Company Profile chapter.

M. Muchlas Rowi
Anggota Komite Pemantau Risiko/ Member of the Risk Monitoring Committee

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko M. Muchlas Rowi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.	The profile of the member of the Risk Monitoring Committee, M. Muchlas Rowi, can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section, in the Company Profile chapter.

Angger P. Yuwono
Anggota Komite Pemantau Risiko/ Member of the Risk Monitoring Committee

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko Angger P. Yuwono dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.	The profile of the member of the Risk Monitoring Committee, Angger P. Yuwono, can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section, in the Company Profile chapter.

Nama Names	Profil Singkat Brief Profile	
 **Fahrul Ismaeni**	Lahir di Surabaya, 22 Mei 1980. Menyelesaikan studi S1 Manajemen Keuangan dan Magister Hukum Bisnis di Universitas Indonesia. Pada tahun 2012 lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Bung Karno. Beberapa sertifikasi telah diperoleh di antaranya Certification in Audit Committee Practices, Certified Legal Auditor, Certified Liquidator Indonesia, dan Certified Government Procurement Expert. Pengalaman bekerja dan menjabat di beberapa perusahaan baik milik negara, swasta, maupun Lembaga Pendidikan seperti pada Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, PT Pertamina Tongkang (saat ini menjadi PT Pertamina Trans Kontinental), PT Sinar Petrindo Perkasa, British Council, dan Itacha Plantion. Tahun 2014-2020 pernah menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite GCG, dan Komite Audit PT Wijaya Karya (Persero). Sedangkan tahun 2012-2013 menjadi Komite Risiko Bisnis dan GCG PT Angkasa Pura I. Sejak Februari 2020, Fahrul juga menjabat sebagai Human Resource Manager Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit terhitung tanggal 1 Oktober 2020 dan dialihkan tugasnya menjadi Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha tanggal 3 Oktober 2022.	Born in Surabaya, May 22, 1980. Completed undergraduate studies in Financial Management and Masters in Business Law at the University of Indonesia. In 2012, he graduated as a Bachelor of Law from Bung Karno University. Several certifications have been obtained, including Certification in Audit Committee Practices, Certified Legal Auditor, Certified Liquidator Indonesia, and Certified Government Procurement Expert. Experience working and serving in several companies, both state-owned, private, and educational institutions such as the Management Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia, PT Pertamina Tongkang (currently PT Pertamina Trans Kontinental), PT Sinar Petrindo Perkasa, British Council, and Itacha Plantation. In 2014-2020, he served as the Nomination and Remuneration Committee, GCG Committee, and Audit Committee of PT Wijaya Karya (Persero). Meanwhile, in 2012-2013 he served as the Business Risk and GCG Committee of PT Angkasa Pura I. Since February 2020, Fahrul has also served as Human Resource Manager at the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia. Appointed as Member of the Audit Committee as of October 1, 2020, and transferred to Member of the Investment and Business Risk Committee on October 3, 2022.
 **Mas Dharmawan Suryadi**	Lahir di Kuningan, 1 Desember 1966. Menyelesaikan studi D IV (Akuntan) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1994 dan S2 Manajemen Keuangan dari Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB-IPB) pada tahun 2013. Berkarir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Auditor sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2002. Pada tahun 2002 melanjutkan karir di PT Sang Hyang Seri (Persero) dimulai sebagai Kepala Bagian pada Satuan Pengawasan Intern (SPI) hingga Direktur Perencanaan dan Transformasi pada tahun 2015. Dari tahun 2015 hingga tahun 2018 menjadi Associate Partner di KAP HMR. Pernah menjadi anggota Komite Audit pada Perum Perumnas periode 2016-2019 dan 2019-2021. Sejak tahun 2018 berkarir di PT Jakarta Propertindo (Perseroda)/Jakpro dimulai sebagai General Manager Keuangan dan Akuntansi hingga menjadi Direktur Keuangan PT Jakarta Utilitas Propertindo (salah satu anak usaha PT Jakpro) sampai dengan tahun 2022. Diangkat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Jamkrindo terhitung sejak tanggal 28 April 2023.	Born in Kuningan, December 1, 1966. Completed Diploma IV (Accounting) studies at the State College of Accountancy (STAN) in 1994 and a Masters in Financial Management from the Management and Business of the Bogor Agricultural Institute (MB-IPB) in 2013. His career started at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as an Auditor from 1988 to 2002. In 2002, he continued his career at PT Sang Hyang Seri (Persero) starting as Head of Section at the Internal Audit Unit (SPI) to Director of Planning and Transformation in in 2015. From 2015 to 2018, he was an Associate Partner at KAP HMR. He was a member of the Audit Committee at Perum Perumnas for the 2016-2019 and 2019-2021 periods. Since 2018, he has had a career at PT Jakarta Propertindo (Perseroda)/Jakpro starting as General Manager of Finance and Accounting until he became Finance Director of PT Jakarta Utilitas Propertindo (a subsidiary of PT Jakpro) until 2022. Appointed as Member of the Risk Monitoring Committee of PT Jamkrindo effective April 28, 2023.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR) telah disahkan pada 5 Juni 2023. Piagam ini mengatur beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Latar belakang, maksud dan tujuan, dan Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko;
2. Organisasi mencakup hal-hal tentang struktur keanggotaan, keanggotaan, dan persyaratan keanggotaan, masa jabatan, dan evaluasi kinerja;
3. Tugas dan tanggung jawab, kewenangan dan Kode Etik, meliputi hal-hal tentang tugas dan tanggung jawab, wewenang dan mekanisme kerja, kode etik;
4. Program Kerja, Rapat Komite, dan Pelaporan, mencakup hal-hal tentang program kerja, pelaksanaan dan mekanisme rapat komite, dan pelaporan; dan
5. Penutup, mencakup masa berlaku dan evaluasi.

Risk Monitoring Committee Charter

The Risk Monitoring Committee (KPR) charter was ratified on June 5, 2023. This charter regulates several things, including:

1. Background, purpose and objectives, and basis for the establishment of the Risk Monitoring Committee;
2. Organization, including matters of membership structure, membership, and membership requirements, term of office, and performance evaluation;
3. Duties and responsibilities, authority and Code of Conduct, covering matters of duties and responsibilities, authority and working mechanism, Code of Conduct;
4. Work Program, Committee Meetings, and Reporting, covering matters of work program, implementation and mechanism of committee meetings, and reporting; and
5. Closing, covering the validity period and evaluation.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung Komite Pemantau Risiko yaitu:

1. Melakukan pemantauan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
2. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Perusahaan yang membidangi Manajemen Risiko;
3. Melakukan pengawasan kebijakan dan pemberitaan eksternal dalam rangka perlindungan konsumen.
4. Melakukan penelaahan dan memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada Dewan Komisaris dalam rangka memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan investasi, risiko usaha dan perlindungan konsumen;
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Duties of the Risk Monitoring Committee

Jamkrindo's Risk Monitoring Committee has the following duties and responsibilities:

1. Carry out investment policy overseas and oversee the implementation of investment policies that have been determined;
2. Evaluate the conformity of risk management policies with their implementation, as well as monitor and evaluate the implementation of the duties of the Company's work unit in charge of Risk Management;
3. Supervise policies and external reporting in the context of consumer protection.
4. Review and provide input regarding matters that require attention to the Board of Commissioners in order to provide advice to the Board of Directors regarding investment, business risks and consumer protection;
5. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners in accordance with statutory provisions.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Komite Pemantau Risiko merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dalam pengelolaan bisnis Perusahaan khususnya dalam memberikan masukan bagi Dewan Komisaris.

Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2023:

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by holding competency development programs for all employees. Risk Monitoring Committee competency development is an effort to update knowledge to support the implementation of supervisory duties in managing the Company's business, especially in providing input to the Board of Commissioners.

The following is information about the Risk Monitoring Committee competency development program throughout 2023:

Nama Names	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Trainings	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal** Dates	**Penyelenggara** Organizers
Krisna Wijaya	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairperson of Risk Monitoring Committee	Webinar/Seminar Online Webinar/Online Seminar	Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Guarding Productivity for Economic Transformation	14 Juni 2023 June 14, 2023	BPKP Finance and Development Supervisory Agency
		Pelatihan Training	Program Penyegaran Tim Penilai Klarifikasi Penilaian Kemampuan dan eKepatutan Pihak Utama Bank Umum Tahun 2023 Refresher Program for the Assessment Team Clarifying the Assessment of Capability and eCapability of Commercial Bank's Main Parties in 2023	3-4 Agustus 2023 August 3-4, 2023	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority

Nama Names	Jabatan Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Trainings	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Dates	Penyelenggara Organizers
M. Muchlas Rowi	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	*Workshop*/Seminar	*Workshop Global GRC Benchmark Series* – 5, 2023	11-18 Maret 2023 March 11-18, 2023	Centrois
		Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	GRCCE	20-21 September 2023 September 20-21, 2023	Centrois kolaborasi dengan LSP GRK Indonesia Centrois collaborated with LSP GHG Indonesia
Fahrul Ismaeni	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	GRCEE	20-21 September 2023 September 20-21, 2023	Centrois kolaborasi dengan LSP GRK Indonesia Centrois collaborated with LSP GHG Indonesia

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Di sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan 12 rapat, dengan risalah rapat dan kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko seperti yang terlihat di bawah ini.

Risk Monitoring Committee Meeting

The Risk Monitoring Committee holds meetings aimed at assisting the Board of Commissioners in supervising the management of the Company. Throughout 2023, the Risk Monitoring Committee held 12 meetings, with minutes of meetings and attendance of Risk Monitoring Committee members as seen below.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes of Investment and Business Risk Committee's Meetings

Tanggal Dates	Agenda Rapat Main Agenda
25 Januari 2023 January 25, 2023	Membahas tentang Analisis Kinerja Manajemen sampai dengan Desember 2022 dan Laporan Kinerja Investasi Desember 2022. Discussed Management Performance Analysis until December 2022 and Investment Performance Report for December 2022.
24 Februari 2023 February 24, 2023	Membahas tentang Kinerja Manajemen bulan Januari 2023, dan Evaluasi Kinerja Investasi bulan Januari 2023. Discussed Management Performance Analysis of January 2023 and Investment Performance Report for January 2023.
28 Maret 2023 March 28, 2023	Membahas tentang Analisis Kinerja Manajemen sampai dengan Februari 2023, *Dashboard* Manajemen Risiko, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Februari 2023. Discussed Management Performance Analysis of February 2023, Risk Management Dashboard, and Investment Performance Report for February 2023.
28 April 2023 April 28, 2023	Membahas tentang Analisis *Dashboard* Manajemen Risiko dan Laporan Kinerja Investasi bulan Maret 2023. Discussed Risk Management Dashboard and Investment Performance Report for March 2023.
26 Mei 2023 May 26, 2023	Membahas tentang Analisa *Dashboard* Manajemen Risiko, dan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kinerja Investasi bulan April 2023. Discussed Risk Management Dashboard and Investment Performance Report for April 2023.
27 Juni 2023 June 27, 2023	Membahas tentang Analisa *Dashboard* Manajemen Risiko, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Mei 2023. Discussed Risk Management Dashboard and Investment Performance Report for May 2023.
25 Juli 2023 July 25, 2023	Membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Juni 2023 dan Laporan Kinerja Investasi bulan Juni 2023. Discusses the Risk Management Evaluation Report for June 2023 and the Investment Performance Report for June 2023.
29 Agustus 2023 August 29, 2023	Membahas tentang tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Juli 2023, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Juli 2023. Discusses the Risk Management Evaluation Report for July 2023 and the Investment Performance Report for July 2023.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes of Investment and Business Risk Committee's Meetings

Tanggal Dates	Agenda Rapat Main Agenda
26 September 2023 September 26, 2023	Membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Agustus 2023, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Agustus 2023. Discusses the Risk Management Evaluation Report for August 2023 and the Investment Performance Report for August 2023.
27 Oktober 2023 October 27, 2023	Membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan September 2023, dan Laporan Kinerja Investasi Bulan September 2023. Discusses the Risk Management Evaluation Report for September 2023 and the Investment Performance Report for September 2023.
28 November 2023 November 28, 2023	Membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Oktober 2023, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Oktober 2023. Discusses the Risk Management Evaluation Report for October 2023 and the Investment Performance Report for October 2023.
22 Desember 2023 December 22, 2023	Membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan November 2023, dan Laporan Kinerja Investasi bulan November 2023. Discusses the Risk Management Evaluation Report for November 2023 and the Investment Performance Report for November 2023.

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran/ Attendance
Krisna Wijaya	12	12	0	100%
Ari Wahyuni	12	12	0	100%
M Muchlas Rowi	12	12	0	100%
Angger P Yuwono*	5	5	0	100%
Fahrul Ismaeni	12	12	0	100%
Mas Dharmawan Suryadi**	8	8	0	100%
Rata-rata Average				**100%**

*) mulai masa jabatan terhitung tanggal 1 Agustus 2023/started his term of office on August 1, 2023
**) mulai masa jabatan terhitung tanggal 28 April 2023/started his term of office on April 28, 2023
*) mulai masa jabatan terhitung tanggal 1 Agustus 2023/started his term of office on August 1, 2023
**) mulai masa jabatan terhitung tanggal 28 April 2023/started his term of office on April 28, 2023

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko 2023

Selama tahun 2023, KPR telah melakukan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko secara berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali, dengan total 12 kali rapat selama setahun.
2. Menyiapkan telaahan/analisa dan bahan terkait kinerja bulanan, perkembangan kondisi dan masalah aktual serta isu strategis yang terjadi pada perusahaan, serta mengikuti rapat Dewan Komisaris.

   a. Januari 2023: membahas tentang Analisis Kinerja Manajemen sampai dengan Desember 2022 dan Laporan Kinerja Investasi Desember 2022.
   b. Februari 2023: membahas tentang Kinerja Manajemen bulan Januari 2023, dan Evaluasi Kinerja Investasi bulan Januari 2023.
   c. Maret 2023: membahas tentang Analisis Kinerja Manajemen sampai dengan Februari 2023,

Brief Report on the Implementation of the 2023 Risk Monitoring Committee Work Program

In 2023, RMC has carried out duties in accordance with statutory provisions, including the following activities:

1. Hold regular Risk Monitoring Committee meetings at least once a month, with a total of 12 meetings during the year.
2. Prepare reviews/analyses and materials related to monthly performance, developments in conditions and actual problems, as well as strategic issues occurring in the Company, as well as attending Board of Commissioners meetings.
   a. January 2023: discussing Management Performance Analysis up to December 2022 and Investment Performance Report December 2022.
   b. February 2023: discussing Management Performance in January 2023, and Evaluation of Investment Performance in January 2023.
   c. March 2023: discussing Management Performance Analysis up to February 2023, Risk Management

Dashboard Manajemen Risiko, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Februari 2023.

d. April 2023: membahas tentang Analisis *Dashboard* Manajemen Risiko dan Laporan Kinerja Investasi bulan Maret 2023.
e. Mei 2023: membahas tentang Analisa *Dashboard* Manajemen Risiko, dan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kinerja Investasi bulan April 2023.
f. Juni 2023: membahas tentang Analisa *Dashboard* Manajemen Risiko, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Mei 2023.
g. Juli 2023: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Juni 2023 dan Laporan Kinerja Investasi bulan Juni 2023.
h. Agustus 2023: membahas tentang tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Juli 2023, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Juli 2023.
i. September 2023: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Agustus 2023, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Agustus 2023.
j. Oktober 2023: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan September 2023, dan Laporan Kinerja Investasi Bulan September 2023.
k. November 2023: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan Oktober 2023, dan Laporan Kinerja Investasi bulan Oktober 2023.
l. Desember 2023: membahas tentang Laporan Evaluasi Manajemen Risiko bulan November 2023, dan Laporan Kinerja Investasi bulan November 2023.
m. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Komisaris ke lapangan/unit kerja di daerah.

3. Sampai dengan periode akhir tahun 2023, KPR telah mengikuti Kunjungan kerja Dewan Komisaris, yaitu:
   a. Kantor Cabang Padang pada tanggal 11-12 September 2023.
   b. Kantor Cabang Malang pada tanggal 11 Desember 2023.
4. Melakukan telaahan atas Laporan Kegiatan dan Keuangan secara triwulanan.
5. Melakukan telaah atas hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi setiap bulan.
6. Melakukan telaahan atas pelaksanaan dan review atas laporan berkala manajemen risiko.

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Komite Pemantau Risiko adalah sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

Berikut disampaikan transparansi remunerasi Komite Pemantau Risiko selain Dewan Komisaris tahun 2023.

Dashboard, and Investment Performance Report for February 2023.

d. April 2023: discussing the Risk Management Dashboard Analysis and Investment Performance Report for March 2023.
e. May 2023: discussing Risk Management Dashboard Analysis, and Performance Evaluation, and Investment Performance Report for April 2023.
f. June 2023: discussing Risk Management Dashboard Analysis and Investment Performance Report for May 2023.
g. July 2023: discussing the Risk Management Evaluation Report for June 2023 and the Investment Performance Report for June 2023.
h. August 2023: discussing the Risk Management Evaluation Report for July 2023, and the Investment Performance Report for July 2023.
i. September 2023: discussing the Risk Management Evaluation Report for August 2023, and the Investment Performance Report for August 2023.
j. October 2023: discussing the Risk Management Evaluation Report for September 2023, and the Investment Performance Report for September 2023.
k. November 2023: discussing the Risk Management Evaluation Report for October 2023, and the Investment Performance Report for October 2023.
l. December 2023: discussing the Risk Management Evaluation Report for November 2023, and the Investment Performance Report for November 2023.
m. Provide assistance to the Board of Commissioners' visits to the field/work units in the regions.

3. Until the end of 2023, RMC has participated in working visits from the Board of Commissioners, namely to:
   a. Padang Branch Office on September 11-12, 2023.
   b. Malang Branch Office on December 11, 2023.
4. Review activity and financial statement on a quarterly basis.
5. Review the results of the Board of Commissioners and Directors meetings every month.
6. Review the implementation and review of periodic risk management reports.

Remuneration Policy for the Risk Monitoring Committee

Based on SOE Minister's Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the income component of the Risk Monitoring Committee is 20% of the salary of the Company's President Director.

Below is the transparency of the remuneration of the Risk Monitoring Committee other than the Board of Commissioners in 2023.

Nama Names	Periode Menjabat Term of OFfice	Honorarium per Bulan Honorarium per Month	Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Total Honorarium and Allowance per Month	Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun Total Honorarium and Allowance per Year	*Tantiem*	Jumlah Remunerasi Tahun 2020 Total Remuneration in 2020
		(Rp/IDR)		(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)
Fahrul Ismaeni	Januari-Desember January-December	42.400.000	42.400.000	508.800.000	0	508.800.000
Mas Dharmawan Suryadi*	Mei-Desember May-December	42.400.000	42.400.000	339.200.000	0	339.200.000

*) mulai masa jabatan terhitung tanggal 28 April 2023/started his term of office on April 28, 2023
*) mulai masa jabatan terhitung tanggal 28 April 2023/started his term of office on April 28, 2023

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Sehubungan dengan salah satu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrindo tentang Pengesahaan RKAP tahun 2023 telah ditetapkan bahwa penetapan klasifikasi risiko untuk Jamkrindo adalah pada kuadran Sistemik A. Selanjutnya, sebagaimana Pasal 56 Ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa kewajiban memiliki organ pengelola risiko bagi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dengan klasifikasi sistemik A dan berkategori BUMN konglomerasi/Anak Perusahaan BUMN Konglomerasi yaitu memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dirangkap oleh Komite Pemantau Risiko.

In relation to one of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders of PT Jamkrindo regarding Ratification of the 2023 RKAP, it has been determined that the determination of the risk classification for Jamkrindo is in the Systemic A quadrant. Furthermore, as stated in Article 56 Paragraph (2) of the Regulation of the Minister of SOE No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Activities of Significant Corporations of State-Owned Enterprises states that it is mandatory to have a risk management organ for SOE and its Subsidiaries with A systemic classification, and in the category of conglomerate SOE/Conglomerate SOE Subsidiaries, namely having a Integrated Governance Committee which is concurrently carried out by the Risk Monitoring Committee.

Susunan dan Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Dewan Komisaris melalui Keputusan No. KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023, membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi:

Composition and Profile of Integrated Governance Committee Members

1. Board of Commissioners, through Decree No. KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023, established an Integrated Governance Committee with the following composition:

No.	Nama Names	Jabatan Position	SK Dewan Komisaris Decree of BoC
1.	Krisna Wijaya[1]	Ketua Chairperson	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
2.	M Muchlas Rowi	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
3.	Hernita Alius[2]	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
4.	Edy Utomo[3]	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023

No.	Nama Names	Jabatan Position	SK Dewan Komisaris Decree of BoC
5.	Fahrul Ismaeni	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
6.	Mas Dharmawan Suryadi	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023

1 Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Jamkrindo/President Commissioner concurrently as Independent Commissioner of PT Jamkrindo
2 Komisaris Independen PT Jamkrindo/Independent Commissioner of PT Jamkrindo
3 Komisaris Independen PT Jamsyar/Independent Commissioner of PT Jamsyar
1 Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Jamkrindo/President Commissioner concurrently as Independent Commissioner of PT Jamkrindo
2 Komisaris Independen PT Jamkrindo/Independent Commissioner of PT Jamkrindo
3 Komisaris Independen PT Jamsyar/Independent Commissioner of PT Jamsyar

2. Selanjutnya, memperhatikan Pasal 17 BAB III tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan maka melalui Keputusan No. KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023, Dewan Komisaris menetapkan Sdr. Lando Simatupang dan Sdr. Abdul Aziem (Dewan Pengawas Syariah PT Jamsyar) sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Further, by considering Article 17 CHAPTER III concerning the Integrated Governance Committee, Financial Services Authority Regulation no. 18/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates, through Decree No. KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023, the Board of Commissioners appointed Mr. Lando Simatupang and Mr. Abdul Aziem (Sharia Supervisory Board of PT Jamsyar) as Member of the Integrated Governance Committee.

Berikut susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi posisi akhir tahun 2023 yaitu:

The following is the composition of the Integrated Governance Committee position at the end of 2023:

No.	Nama Names	Jabatan Position	SK Dewan Komisaris Decree of BoC
1.	Krisna Wijaya[1]	Ketua Chairperson	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
2.	M Muchlas Rowi[2]	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
3.	Hernita Alius[2]	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
4.	Edy Utomo[3]	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
5.	Abdul Aziem[4]	Anggota Member	KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023 dated October 13, 2023
6.	Fahrul Ismaeni	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
7.	Mas Dharmawan Suryadi	Anggota Member	KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 5 September 2023 KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated September 5, 2023
8.	Lando Simatupang	Anggota Member	KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023 dated October 13, 2023

1 Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Jamkrindo/President Commissioner concurrently as Independent Commissioner of PT Jamkrindo
2 Komisaris Independen PT Jamkrindo/Independent Commissioner of PT Jamkrindo
3 Komisaris Independen PT Jamsyar/Independent Commissioner of PT Jamsyar
4 Dewan Pengawas Syariah PT Jamsyar/Sharia Supervicory Board of PT Jamsyar
1 Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Jamkrindo/President Commissioner concurrently as Independent Commissioner of PT Jamkrindo
2 Komisaris Independen PT Jamkrindo/Independent Commissioner of PT Jamkrindo
3 Komisaris Independen PT Jamsyar/Independent Commissioner of PT Jamsyar
4 Dewan Pengawas Syariah PT Jamsyar/Sharia Supervicory Board of PT Jamsyar

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Di bawah ini disajikan profil dari para anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Profile of Integrated Governance Committee Members

Below are the profiles of the members of the Integrated Governance Committee.

Krisna Wijaya
Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi/Chairperson of Integrated Governance Committee

Profil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Krisna Wijaya dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.	The profile of the Chairperson of the Integrated Governance Committee, Krisna Wijaya, can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

M. Muchlas Rowi
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Member of Integrated Governance Committee

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi M. Muchlas Rowi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.	The profile of the member of the Integrated Governance Committee, M. Muchlas Rowi, can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Fahrul Ismaeni
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Member of Integrated Governance Committee

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Fahrul Ismaeni dapat dilihat pada bagian Profil anggota Komite Pemantau Risiko, dalam bab Governansi Perusahaan.	The profile of the member of the Integrated Governance Committee, Fahrul Ismaeni, can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Mas Dharmawan Suryadi
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Member of Integrated Governance Committee

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Mas Dharmawan Suryadi dapat dilihat pada bagian Profil anggota Komite Pemantau Risiko, dalam bab Governansi Perusahaan.	The profile of the member of the Integrated Governance Committee, Mas Dharmawan Suryadi, can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Nama Names	Profil Singkat Brief Profile	
 **Lando Simatupang**	Lahir di Pematang Siantar, 15 Maret 1965. Menyelesaikan S1 jurusan uang dan bank di FE-USU dan S2 Magister Manajemen jurusan banking and finance. Memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko dan menyelesaikan Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (SESPIBANK). Mengikuti berbagai training bidang leadership, enterprise risk management, bank risk management, good corporate governance, asset-liability management dan audit Sejak 1990–2021 sebagai fakulti dan konsultan di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), pernah menjadi Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Koordinator Fakulti dan Corporate Secretary. Bersamaan dengan itu, juga menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di Bank Finconesia, Bank Agris, Bank Ganesha, Bank UOB Indonesia dan Bank ICBC serta advisor Dewan Komisaris Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia. Saat ini sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank BNP Paribas Indonesia (sejak 2008) dan Bank Shinhan Indonesia (sejak 2016). Pada 13 Oktober 2023 melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Nomor KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Jaminan Kredit Indonesia	Born in Pematang Siantar, March 15, 1965. Completed a Bachelor's degree majoring in money and banking at FE-USU and a Master's degree in Management majoring in banking and finance. He has certification in the field of risk management and completed the Bank Staff and Leadership School (SESPIBANK). Participated in various training in the fields of leadership, enterprise risk management, bank risk management, good corporate governance, asset-liability management and audit From 1990–2021, he served as a faculty and consultant at the Indonesian Banking Development Institute (LPPI), he was Head of the Research and Development Division, Faculty Coordinator and Corporate Secretary. At the same time, he is also a member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee at Bank Finconesia, Bank Agris, Bank Ganesha, Bank UOB Indonesia and Bank ICBC as well as an advisor to the Board of Commissioners of Reliance Indonesia Financing Business. Currently, he is a member of the Risk Monitoring Committee of Bank BNP Paribas Indonesia (since 2008) and Bank Shinhan Indonesia (since 2016). On October 13, 2023, through a Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo Number KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 is a member of the Integrated Governance Committee of PT Jaminan Kredit Indonesia

Nama Names	Profil Singkat Brief Profile	
 **Edy Utomo**	Lahir di Lamongan, 3 Februari 1964. Menyelesaikan studi S1 di FE Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya dan S2 Magister Manajemen Agribisnis di Institut Pertanian Bogor. Tahun 2019-2020 menjabat sebagai Kepala Audit Intern Wilayah BRI Bandung. Pada tahun 2016-2019 menjabat sebagai Kepala Audit Intern Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Khusus dan Kantor Cabang Luar Negeri. Pada tahun 2012-2016 menjabat sebagai Kepala Divisi Sentra Operasi Bank Rakyat Indonesia. Saat ini sedang dalam proses *Fit and Proper Test* OJK untuk menjabat sebagai Komisaris Independen PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar). Melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Nomor KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 tanggal 01 Agustus 2023 bergabung dalam keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Jamkrindo.	Born in Lamongan, February 3, 1964. Completed undergraduate studies at the Economic Faculty, Department of Accounting, Brawijaya University and Masters in Agribusiness Management at the Bogor Agricultural Institute. From 2019-2020, he served as Head of Internal Audit for the BRI Bandung Region. In 2016-2019 he served as Head of Internal Audit at Bank Rakyat Indonesia Head Office, Special Branch Offices and Overseas Branch Offices. From 2012-2016, he served as Head of the Operations Center Division of Bank Rakyat Indonesia. Currently, he is in the OJK Fit and Proper Test process to serve as Independent Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar). Through the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo Number KEP-08/DK-JAMKRINDO/IX/2023 dated August 1, 2023, he joins the membership of the Integrated Governance Committee of PT Jamkrindo.
 **Abdul Aziem**	Lahir di Jakarta, 31 Desember 1973. Menyelesaikan studi sarjana (S1) dari Universitas Borobudur, Pasca Sarjana (S2) di Universitas Negeri Jakarta, dan Program Doktoral (S3) Institut PTIQ. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar) sejak 18 September 2019. Selain itu, saat ini aktif sebagai Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Islam Miftahul Huda sejak 2002, dan Ketua Dewan Pengarah LSP Beksya (Bisnis Ekonomi Keuangan Syariah) sejak 2023. Selanjutnya, Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo Nomor KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 bergabung dalam keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Jamkrindo	Born in Jakarta, December 31, 1973. Completed undergraduate studies (S1) from Borobudur University, Postgraduate (S2) at Jakarta State University, and Doctoral Program (S3) at the PTIQ Institute. Currently serving as Member of the Sharia Supervisory Board of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar) since September 18, 2019. In addition, he is currently active as Head of the Miftahul Huda Islamic College Education Division since 2002, and Chair of the LSP Beksya (Sharia Financial Economics Business) Steering Committee since 2023. Furthermore, based on PT Jamkrindo Board of Commissioners Decree Number KEP-09/DK-JAMKRINDO/X/2023 dated October 13, 2023, he joins the membership of the Integrated Governance Committee of PT Jamkrindo

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disahkan pada 5 juni 2023. Piagam ini mengatur beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Latar belakang, maksud dan tujuan, dan Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
2. Organisasi mencakup hal-hal tentang struktur keanggotaan, keanggotaan, dan persyaratan keanggotaan, masa jabatan, dan evaluasi kinerja;
3. Tugas dan tanggung jawab, kewenangan dan Kode Etik, meliputi hal-hal tentang tugas dan tanggung jawab, wewenang dan mekanisme kerja, kode etik;
4. Program Kerja, Rapat Komite, dan Pelaporan, mencakup hal-hal tentang program kerja, pelaksanaan dan mekanisme rapat komite, dan pelaporan; dan
5. Penutup, mencakup masa berlaku dan evaluasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2023, berikut tugas dan tanggung jawabnya:

Integrated Governance Committee Charter

The Charter of the Integrated Governance Committee was ratified on June 5, 2023. This charter regulates several things, including:

1. Background, purpose and objectives, and Basis for Establishment of Integrated Governance Committee;
2. Organization, including matters of membership structure, membership, and membership requirements, term of office, and performance evaluation;
3. Duties and responsibilities, authority and Code of Conduct, covering matters of duties and responsibilities, authority and working mechanism, Code of Conduct;
4. Work Program, Committee Meetings, and Reporting, covering matters of work program, implementation and mechanism of committee meetings, and reporting; and
5. Closing, covering the validity period and evaluation

Duties and Responsibilities of the Integrated Governance Committee

In accordance with the 2023 Integrated Governance Committee Charter, the following are the duties and responsibilities of the Integrated Governance Committee:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki sistem pengendalian internal terintegrasi sesuai dengan praktik terbaik
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
4. Sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya Komite dapat melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi, dan manajemen risiko terintegrasi.
5. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.
6. Pengawasan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara terintegrasi Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian BUMN.
7. Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor eksternal..
8. Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Komite Pemantau Tata Kelola Terintegrasi merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dalam pengelolaan bisnis Perusahaan khususnya dalam memberikan masukan bagi Dewan Komisaris.

Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi di sepanjang tahun 2023:

1. Evaluate the implementation of Integrated Governance, at least through assessing the adequacy of internal control and implementing the compliance function in an integrated manner.
2. Evaluate whether the Company and Subsidiaries have an integrated internal control system in accordance with best practices
3. Monitor and evaluate the effectiveness of the implementation of integrated internal control through reviewing Periodic Reports and Audit Result Reports issued by the Integrated Internal Audit Work Unit

4. In accordance with its needs and interests, the Committee may hold meetings with the Integrated Internal Audit Work Unit and the Integrated Risk Management Work Unit to discuss matters related to the integrated internal control system and integrated risk management.
5. Monitor and evaluate the implementation of follow-up actions by the Board of Directors of the Company and Subsidiaries regarding the findings of the Integrated Internal Audit Work Unit, Public Accounting Firm, and the results of supervision by the Financial Services Authority regarding weaknesses in the system and implementation of integrated internal control.
6. Conduct supervision and evaluation related to the implementation of the Company's and Subsidiaries' integrated Compliance Function with respect to statutory regulations, Financial Services Authority regulations and the Ministry of SOEs.
7. Study periodic reports and audit results reports related to compliance with internal and external regulations issued by the Integrated Compliance Work Unit and external auditors.
8. Conduct regular meetings with the Integrated Compliance Work Unit and evaluate the implementation of follow-up actions by the Board of Directors of the Company and Subsidiaries regarding the findings of the Integrated Compliance Work Unit, Public Accounting Firm, and the results of supervision by the Financial Services Authority regarding weaknesses in the system and implementation of the integrated compliance function.
9. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners in accordance with statutory provisions.

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by holding competency development programs for all employees. Developing the competence of the Integrated Governance Monitoring Committee is an effort to update knowledge to support the implementation of supervisory duties in managing the Company's business, especially in providing input to the Board of Commissioners.

The following is information about the Integrated Governance Committee competency improvement program throughout 2023:

Program Pengembangan Kompetensi Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Competency Improvement

Nama Names	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Trainings	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal** Dates	**Penyelenggara** Organizers
Krisna Wijaya	Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Chairperson of Integrated Governance Committee	*Webinar/Seminar Online* Webinar/Online Seminar	Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Guarding Productivity for Economic Transformation	14 Juni 2023 June 14, 2023	BPKP Finance and Development Supervisory Agency
		Pelatihan Training	Program Penyegaran Tim Penilai Klarifikasi Penilaian Kemampuan dan eKepatutan Pihak Utama Bank Umum Tahun 2023 Refresher Program for the Assessment Team Clarifying the Assessment of Capability and eCapability of Commercial Bank's Main Parties in 2023	03-04 Agustus 2023 August 03-04, 2023	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
M Muchlas Rowi	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Member of Integrated Governance Committee	Workshop/Seminar	*Workshop Global GRC Benchmark Series* – 5, 2023	11-18 Maret 2023 March 11-18, 2023	Centrois
		Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	GRCCE	20-21 September 2023 September 20-21, 2023	Centrois kolaborasi dengan LSP GRK Indonesia Centrois collaborated with LSP GHG Indonesia
Hernita Alius	Ketua Komite Audit Chairperson of the Audit Committee	*Seminar*	*Boards and Risks - Risk Governance and Prevention in a Chaotic World*	20-21 November 2023 November 20-21, 2023	IMD - International Institute for Management Development
Fahrul Ismaeni	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	GRCEE	20-21 September 2023 September 20-21, 2023	Centrois kolaborasi dengan LSP GRK Indonesia
Lando Simatupang	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Member of Integrated Governance Committee	Konferensi Nasional Profesi Manajemen Risiko National Conference on Risk Management Profession	1. *Indonesia economic outlook* 2. *Risk mitigation in the convergence of human capital and disruptive talent models* 3. *Trade investment and infrastructure risk* 4. *Moneteray and fiscal risk factors* 5. Mengelola risiko kebijakan pembangunan nasional (MRPN) 1. Indonesia economic outlook 2. Risk mitigation in the convergence of human capital and disruptive talent models 3. Trade investment and infrastructure risk 4. Moneteray and fiscal risk factors 5. Managing national development policy risk (MRPN)	14-15 Desember 2023 December 14-15, 2023	LSPMR
		Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik Public Sector Risk Management Certification	Sertifikasi Okupasi Ahli Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (CRPP) Public Sector Organization Risk Management Expert Occupational Certification (CRPP)	14 Oktober 2023 October 14, 2023	LSPMR

Program Pengembangan Kompetensi Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Competency Improvement

Nama Names	**Jabatan** Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Trainings	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tanggal** Dates	**Penyelenggara** Organizers
Edy Utomo	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Member of Integrated Governance Committee	Sertifikasi Certification	Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris. Commissioner Scheme Assurance Business Professional Certification Training Program.	2023	Bintang Cahaya Gempita
		Seminar *Risk & Governance Summit* Risk & Governance Summit Seminar	*Sustainable Governance : DIGITAL TRANSFORMATION AS A GAME CHANGER ETHICAL CULTURE AS A VALUE KEEPER*	30 November 2023 November 30, 2023	OJK Financial Services Authority
		International Conference	*Shaping the Foundation for Sustainable & Resilient Insurance and Pension Fund.*	19-20 September 2023 September 19-20, 2023	IFG
		Sertifikasi Certification	Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah dalam Pengembangan UMKMK Business Strategies in the Risk Management-Based Guarantee Industry to Support Government Programs in MSME Development	2023	Bintang Cahaya Gempita
Abdul Aziem	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Member of Integrated Governance Committee	*Seminara*	1. Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah. 2. Tema: Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi 1. Ijtima Sanawi (Annual Meeting) of the Sharia Supervisory Board. 2. Theme: Enhancing Collaboration in the Development of Islamic Financial Economy in the Era of Economic Disruption	13-14 Oktober 2023. October 13-14, 2023.	DSN-MUI
		Workshop	Pra Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII Bidang Peransuransian, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah Pre Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII in the Field of Insurance, Pension Funds, and Sharia Guarantee	6 September 2023. September 6, 2023.	DSN-MUI

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Di sepanjang tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan 3 rapat, dengan risalah rapat dan kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi seperti yang terlihat di bawah ini.

Integrated Governance Committee Meeting

The Integrated Governance Committee holds meetings aimed at assisting the Board of Commissioners in overseeing the management of the Company. Throughout 2023, the Integrated Governance Committee held 3 meetings, with minutes of meetings and the attendance of members of the Integrated Governance Committee as seen below.

Tanggal Dates	Agenda Rapat Meeting Agenda
30 Oktober 2023 October 30, 2023	Membahas tentang Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2023. Discussing the Third Quarter Performance Evaluation of 2023.
28 November 2023 November 28, 2023	Membahas tentang Evaluasi Kegiatan Komite Tata Kelola Semester Kedua. Discussing the Evaluation of the Second Semester Governance Committee Activities.
29 Desember 2023 December 29, 2023	Membahas tentang Rencana Kerja Tahun 2024. Discussing 2024 Work Plan.

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Rapat
Recapitulation and Attendance of the Integrated Governance Committee Meeting

Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee Meeting	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Ketidakhadiran Number of Absence	% Kehadiran/ *Attendance*
Krisna Wijaya	3	3	0	100%
M Muchlas Rowi	3	3	0	100%
Hernita Alius	3	3	0	100%
Edy Utomo	3	3	0	100%
Abdul Aziem*)	3	3	0	100%
Fahrul Ismaeni	3	3	0	100%
Mas Dharmawan Suryadi	3	3	0	100%
Lando Simatupang*)	3	3	0	100%
Rata-Rata Average				**100%**

*) mulai masa jabatan terhitung tanggal 13 Oktober 2023
*) term of office commenced on October 13, 2023

Laporan Singkat Pelaksanaan Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi 2023

Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali, dengan realisasi sebagai berikut:
   a. Bulan Oktober 2023: membahas tentang Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2023.
   b. Bulan November 2023: membahas tentang Evaluasi Kegiatan Komite Tata Kelola Semester Kedua.
   c. Bulan Desember 2023: membahas tentang Rencana Kerja Tahun 2024.
2. Menyiapkan telaahan/analisa dan bahan terkait kinerja bulanan, perkembangan kondisi dan masalah aktual serta isu strategis yang terjadi pada perusahaan, serta mengikuti rapat Dewan Komisaris.
   a. November 2023: membahas tentang Tugas dan Tanggung Jawab Laporan Tata Kelola Terintegrasi.
   b. Desember 2023: membahas tentang Evaluasi Kinerja dan Prosedur yang memastikan penerapan Tata Kelola yang Baik; Evaluadi Laporan GCG dan Profil Risiko.
3. Melakukan pendampingan atas kunjungan Dewan Komisaris ke lapangan/unit kerja di daerah. Sampai dengan periode akhir tahun 2023, Komite Tata Kelola

Brief Report on the Implementation of the 2023 Integrated Governance Committee Work Program

In 2023, the Integrated Governance Committee has carried out duties in accordance with statutory provisions, including the following activities:

1. Holding regular Integrated Governance Committee meetings at least once a month, with the following realization:
   a. October 2023: discussing the Third Quarter Performance Evaluation in 2023.
   b. November 2023: discussing the Evaluation of the Second Semester Governance Committee Activities.
   c. December 2023: discussing the 2024 Work Plan.
2. Prepare reviews/analyses and materials related to monthly performance, developments in conditions and actual problems as well as strategic issues occurring in the Company, as well as attending Board of Commissioners meetings.
   a. November 2023: discussing the Duties and Responsibilities of the Integrated Governance Report.
   b. December 2023: discussing Performance Evaluation and Procedures that ensure the implementation of Good Governance; Evaluate GCG Report and Risk Profile.
3. Provide assistance to the Board of Commissioners' visits to the field/work units in the regions. Until the end of 2023, the Integrated Governance Committee

Terintegrasi telah mengikuti Kunjungan kerja Dewan Komisaris, yaitu:

a. Kantor Wilayah dan Cabang Semarang pada tanggal 6 Desember 2023.
b. Kantor Cabang Malang pada tanggal 11 Desember 2023.

has participated in working visits from the Board of Commissioners, namely to:

a. Semarang Regional Office and Branch on December 6, 2023.
b. Malang Branch Office on December 11, 2023.

Kebijakan Remunerasi bagi Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

Remuneration Policy for Integrated Governance

Based on SOE Ministerial Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the income component of the Integrated Governance Committee is 20% of the salary of the Company's President Director.

Berikut disampaikan transparansi remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi selain Dewan Komisaris tahun 2023.

The following is the transparency of the remuneration of the Integrated Governance Committee non Board of Commissioners in 2023.

Nama Names	**Periode Menjabat** Term of office	**Honorarium per Bulan** Honorarium per Month	**Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan** Total Honorarium and Allowance per Month	**Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun** Total Honorarium and Allowance per Year	**Tantiem**	**Jumlah Remunerasi Tahun 2023** Total Remuneration in 2023
		(Rp/IDR)		(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)
Edy Utomo	Januari-Desember January-December	37.462.500	44.955.000	539.460.000	0	179.820.000
Abdul Aziem	Oktober-Desember October-December	22.500.000	22.500.000	270.000.000	0	270.000.000
Fahrul Ismaeni	Januari-Desember January-December	42.400.000	42.400.000	508.800.000	0	508.800.000
Mas Dharmawan Suryadi	Mei-Desember May-December	42.400.000	42.400.000	339.200.000	0	339.200.000
Lando Simatupang	Oktober-Desember October-December	42.400.000	42.400.000	127.200.000	0	127.200.000

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI
SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Dalam menjalankan peran pengurusan dan pengelolaan Perusahaan, Direksi dibantu oleh beberapa unit satuan kerja yang bekerja di luar struktur internal Direktorat. Satuan kerja ini dibentuk melalui kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun satuan kerja yang dibentuk dalam rangka memberikan pandangan bagi Direksi dalam menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan.

In carrying out the role of managing the Company, the Board of Directors is assisted by several work units that work outside the internal structure of the Directorate. This work unit was formed through compliance with applicable laws and regulations, as well as work units formed in order to provide views for the Board of Directors in carrying out the management of the Company.

Direksi/Board of Directors			
↓	↓	↓	↓
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary	**Fungsi Manajemen Risiko/**Risk Management Functions	**Fungsi Kepatuhan/**Compliance Function	**Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern** Internal Audit/Internal Audit Unit

KOMITE DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh organ di bawah Direksi, baik yang bersifat struktural maupun nonstruktural. Direksi memiliki organ struktural yaitu Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, dan Fungsi Manajemen Risiko. Sedangkan organ non struktural adalah komite-komite terkait bidang tertentu. Hingga 31 Desember 2023, Direksi memiliki 4 (empat) komite sebagai organ pendukung pelaksanaan tugas Direksi, yaitu Komite Penjaminan, Klaim, dan Subrogasi; Komite ALMA; Komite Investasi; dan Komite Manajemen Risiko.

Komite Bisnis Penjaminan

Komite Bisnis Penjaminan dibentuk berdasarkan Surat Edaran Nomor 17/SE/2/I/2022 tentang Pengaturan Komite Penjaminan, Klaim, dan Subrogasi merupakan komite yang bertujuan untuk:

1. Menciptakan kesesuaian, konsistensi, kepatuhan pada langkah-langkah yang ditentukan agar meminimalkan risiko terkait pelaksanaan komite penjaminan, klaim, dan subrogasi perusahaan berdasarkan regulasi dan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Menyediakan standar pelaksanaan komite penjaminan, klaim dan subrogasi perusahaan agar terjadi proses yang efektif dan efisien;
3. Mempermudah pengawasan atas pelaksanaan komite penjaminan, klaim dan subrogasi perusahaan.

COMMITTEE OF BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its functions, duties and responsibilities, the Board of Directors is assisted by organs under the Board of Directors, both structural and non-structural. The Board of Directors has structural organs, namely the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Risk Management Function. Meanwhile, non-structural organs are committees related to certain fields. As of December 31, 2023, the Board of Directors has 4 (four) committees as supporting organs for the implementation of the Board of Directors' duties, namely the Guarantee, Claims and Subrogation Committee; ALMA Committee; Investment Committee; and Risk Management Committee.

Guarantee Business Committee

The Guarantee Business Committee was formed based on Circular Letter Number 17/SE/2/I/2022 concerning the Arrangement of the Guarantee, Claims and Subrogation Committee, which is a committee that aims to:

1. Create conformity, consistency and compliance with the steps determined in order to minimize risks related to the implementation of the Company's guarantee, claims and subrogation committees based on regulations and good Corporate Governance;
2. Provide implementation standards for the Company's guarantee, claims and subrogation committees so that there is an effective and efficient process;
3. Facilitate supervision over the implementation of the company's guarantee, claims and subrogation committees.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan
Berikut adalah susunan dan komposisi keanggotaan komite:

Structure and Composition of Membership
The following is the composition of the committee membership:

Posisi di Komite Position in Committee	Jabatan di Perusahaan Position within the Company
Ketua Chairperson	Direktur Utama President Director
Anggota Member	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business
Anggota Member	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network
Anggota Member	Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko Director of HRM, General Affairs, and Risk Management
Anggota Member	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Invesment
Anggota Member	Direktur Kelembagaan dan Layanan Director of Service and Institutions
Peserta Participant	Kepala Divisi Bisnis terkait Head of Relevant Business Division
Peserta Participant	Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi Head of Claims and Subrogation Division

Komite Aset dan Liabilitas Manajemen (ALMA)

Komite ALMA dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 24/Per-Dir/5/III/2022 tentang Komite Aset dan Liabilitas Manajemen (ALMA) merupakan komite yang bertanggungjawab untuk:

1. Menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan aset, liabilitas, dan modal yang optimal dengan memperhatikan keuntungan, efisiensi biaya dan tingkat risiko;
2. Mengrlola kesenjangan likuiditas (liquidity gap) dan kesenjangan jatuh tempo (maturity gap) antara aset dan liabilitas sehingga Perusahaan terhindar dari default;
3. Mengevaluasi profitabilitas produk penjaminan yang dilakukan oleh Perusahaan;
4. Mengevaluasi pengelolaan portofolio investasi yang dilakukan oleh Perusahaan;
5. Menjaga tingkat kesehatan keuangan Perusahaan dengan mengelola rasio keuangan dan tata kelola Perusahaan dengan baik.

ALMA Committee

The ALMA Committee was formed based on Directors Regulation Number 24/Per-Dir/5/III/2022 concerning the Asset and Liability Management (ALMA) Committee, which is a committee responsible for:

1. Determine optimal asset, liability and capital management strategies and policies by taking into account profits, cost efficiency and risk levels;
2. Manage the liquidity gap and maturity gap between assets and liabilities so that the Company avoids default;
3. Evaluate the profitability of guarantee products carried out by the Company;
4. Evaluate the investment portfolio management conducted by the Company;
5. Maintain the Company's financial soundness by managing financial ratios and Company governance properly.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan

Berikut adalah susunan dan komposisi keanggotaan komite:

Structure and Composition of Membership

The following is the composition of the committee membership:

Posisi di Komite Positions in the Committee	Jabatan di Perusahaan Position in the Company
Ketua Chairperson	Direktur Utama President Director
Ketua Pengganti Substitute Chairperson	Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment
Sekretaris ALMA ALMA Committee	Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Head of Finance and Investment Division

Posisi di Komite Positions in the Committee	**Jabatan di Perusahaan** Position in the Company
Anggota Member	Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business
	Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network
	Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen RIsiko Director of HRM, General Affairs, and Risk Management
	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
	Kepala Divisi Strategi dan Transformasi Head of Strrategy and Transformation Division
	Kepala Divisi Bisnis I Head of Business Division I
	Kepala Divisi Bisnis II Head of Business Division II
	Kepala Divisi Bisnis III Head of Business Division III
	Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan I Head of Institutional Relations Division I
	Kepala Divisi Teknik dan Aktuaria Head of Technical and Actuarial Division
	Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi Head of Claim and Subrogation Division
	Kepala Divisi Jaringan Head of Network Division
	Kepala Divisi Akuntansi Head of Accounting Division
	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division
	Kepala Divisi Kepatuhan Head of Compliance Division
	Kepala Divisi MSDM Head of HRM
	Kepala Divisi Umum Head of General Affairs
	Kepala Divisi Pengembangan TI Head of IT Development Division
	Kepala Divisi Operasional TI Head of IT Operational Division
	Para Pemimpin Wilayah Branch Leaders
	Pemimpin Kantor Cabang Khusus Head of Special Branch Office
Satuan Penunjang Komite ALMA ALMA Committee Supporting Unit	Divisi Keuangan dan Investasi Finance and Investment Division
	Divisi Teknik Dan Aktuaria Technical and Actuarial Division
	Divisi Akuntansi Accounting Division
	Divisi Hubungan Kelembagaan I Institutional Relations Division I
	Divisi Jaringan Network Division

Komite Investasi

Komite Investasi dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 06/Per-Dir/5/II/2023 tentang Komite Investasi merupakan komite yang bertugas untuk membantu Manajemen dalam pengambilan keputusan strategi investasi keuangan dan mengoptimalkan pengelolaan investasi keuangan.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan

Berikut adalah susunan dan komposisi keanggotaan komite:

Investment Committee

The Investment Committee was formed based on Directors' Regulation Number 06/Per-Dir/5/II/2023 concerning the Investment Committee, which is a committee tasked with assisting Management in making financial investment strategy decisions and optimizing financial investment management.

Structure and Composition of Membership

The following is the composition of the committee membership:

Posisi di Komite Position in the Committee	Jabatan di Perusahaan Position in the Company
Ketua Chairperson	Direktur yang membawahi pengelolaan investasi Director in charge of Investment Management
Sekretaris merangkap Anggota Secretary and Concurrently a Member	Kepala Unit Kerja yang membawahi pengelolaan investasi Head of Work Unit in charge of Investment Management
Anggota Member	Direksi yang membawahi Aktuaris Perusahaan Director in charge of Company Actuarial
	Kepala Unit Kerja yang membawahi Manajemen Risiko Head of Work Unit in charge of Risk Management
	Kepala Unit Kerja yang membawahi Kepatuhan Head of Work Unit in charge of Compliance
	Kepala Unit Kerja yang membawahi Akuntansi Head of Work Unit in charge of Accounting
	Kepala Unit Kerja yang membawahi Aktuaris Perusahaan/Tenaga Ahli Perusahaan Head of Work Unit in charge of Company Actuaries/Company Experts

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 57/Per-Dir/5/XII/2020 tentang Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi risiko usaha, jenis dan dampaknya terhadap kegiatan Perusahaan;
2. Menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee was formed based on Directors Regulation Number 57/Per-Dir/5/XII/2020 concerning the Risk Management Committee which is a committee responsible for:

1. Conducting regular assessments and providing recommendations on business risks, their types and impacts on the Company's activities;
2. Determining the Company's risk appetite and risk tolerance.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan

Berikut adalah susunan dan komposisi keanggotaan komite:

Structure and Composition of the Membership

The following is the composition of the committee membership:

Posisi di Komite Position in the Committee	Jabatan di Perusahaan Position in the Company
Ketua Chairperson	Direktur Utama/Direktur yang ditunjuk President Director/Appointed Director
Notulis merangkap Anggota Minute Taker Concurrently a Member	Kepala Bagian Unit Kerja yang membidangi Manajemen Risiko yang ditunjuk Kepala Unit Kerja terkait Head of a Work Unit in charge of Risk Management appointed to be the Head of Relevant Work Unit
Anggota Member	Direksi dan Kepala Unit Kerja yang terkait dengan materi pembahasan Director and Head of Work Unit in relation to the Discussion Materials

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perusahaan memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang bertugas melaksanakan kegiatan komunikasi Perusahaan, termasuk penyusunan strategi serta protokoler dan kesekretariatan Perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan berada langsung di bawah Direksi.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 35/SKD/4/VII/2023 tentang pengangkatan pejabat, Pejabat Sekretaris Perusahaan dipercayakan kepada Aribowo.

CORPORATE SECRETARY

The Company has a Corporate Secretary function whose job is to carry out corporate communication activities, including the preparation of strategies and protocols and corporate secretariat. The function of the Corporate Secretary is directly under the Board of Directors.

Corporate Secretary Officer

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors. Based on Directors Decree No. No. 35/SKD/VII/2023 regarding the appointment of officials, the Corporate Secretary Officer was entrusted to Aribowo.

Aribowo
Kepala Sekretaris Perusahaan/Head of Corporate Secretary
Menjabat Sejak: 12 Juli 2023/Served Since: July 12, 2023

Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun
Kelahiran di Probolinggo pada 6 Juni 1966
Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Pendidikan
1. 2000 - 2002 Universitas Andalas Magister Manajemen, Program Manajemen Keuangan
2. 1985 - 1990 Universitas Airlangga Akuntansi

Riwayat Jabatan
- 12 Juli 2023 - sekarang PT Jamkrindo Sekretaris Perusahaan
- 2019 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Komisaris Utama
- 2017 - 2019 Perum Jamkrindo Kepala Divisi Keuangan dan Investasi
- 2016 Perum Jamkrindo Kepala Kantor Wilayah II Palembang
- 2015 - 2016 Perum Jamkrindo Kepala Kantor Wilayah I Jakarta
- 2014 - 2015 Perum Jamkrindo Kepala Kantor Cabang Khusus Jakarta
- 2014 Perum Jamkrindo Kepala Kantor Wilayah II Surabaya
- 2013 - 2014 Perum Jamkrindo Kepala Divisi Keuangan
- 2012 – 2013 Perum Jamkrindo Kepala Divisi SDM
- 2007 – 2012 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Kantor Cabang Surabaya
- 2005 – 2007 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Kantor Cabang Samarinda
- 2003 – 2005 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Divisi Keuangan
- 2002 – 2003 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Bagian Akuntansi
- 2000 – 2002 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Padang
- 1998 – 2000 Perum Sarana Pengembangan Usaha Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Surabaya
- 1991 – 1998 Perum PKK Penata Muda I Kantor Cabang Jawa Timur

Sertifikasi
- 17 Mei 2023 Badan Nasional Sertifikasi Profesi Sertifikat Manajemen Risiko Perbankan – Level 3
- 21 Desember 2021 Badan Nasional Sertifikasi Profesi Sertifikat Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi
- 22-29 July 2018 Certified Wealth Manager's Association Certificate of Continuing Professional Development (CPD)
- Mei 2018 Certified Wealth Manager's Association

Indonesian citizens
58 years old
Born in Probolinggo on June 6, 1966
Domiciled in Jakarta, Indonesia

Education
1. 2000 - 2002 Andalas University Master of Management, Financial Management Program
2. 1985 - 1990 Airlangga University Accountancy

Position History
- July 12, 2023 – present PT Jamkrindo corporate secretary
- 2019 PT Penjaminan Jamkrindo Syariah President commissioner
- 2017 – 2019 Jamkrindo Corporation Head of Finance and Investment Division
- 2016 Jamkrindo Corporation Head of Regional Office II Palembang
- 2015 – 2016 Jamkrindo Corporation Head of Regional Office I Jakarta
- 2014 – 2015 Jamkrindo Corporation Head of Jakarta Special Branch Office
- 2014 Jamkrindo Corporation Head of Regional Office II Surabaya
- 2013 – 2014 Jamkrindo Corporation Head of Finance Division
- 2012 – 2013 Jamkrindo Corporation Head of HR Division
- 2007 – 2012 Business Development Facility Corporation Head of Surabaya Branch Office
- 2005 – 2007 Business Development Facility Corporation Head of Samarinda Branch Office
- 2003 – 2005 Business Development Facility Corporation Head of Finance Division
- 2002 – 2003 Business Development Facility Corporation Head of Accounting Department
- 2000 – 2002 Business Development Facility Corporation Head of Operations Section of the Padang Branch Office
- 1998 – 2000 Business Development Facility Corporation Head of Operations Section of Surabaya Branch Office
- 1991 – 1998 PKK Corporation Junior Officer I East Java Branch Office

Certification
- May 17, 2023 Indonesia Professional Certification Authority Banking Risk Management Certificate – Level 3
- December 21, 2021 Indonesia Professional Certification Authority Integrated Risk Governance Expert Certificate
- July 22-29, 2018 Certified Wealth Manager's Association Certificate of Continuing Professional Development (CPD)
- May 2018 Certified Wealth Manager's Association

Struktur Organisasi dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Untuk dapat menggambarkan fungsi-fungsi yang terdapat

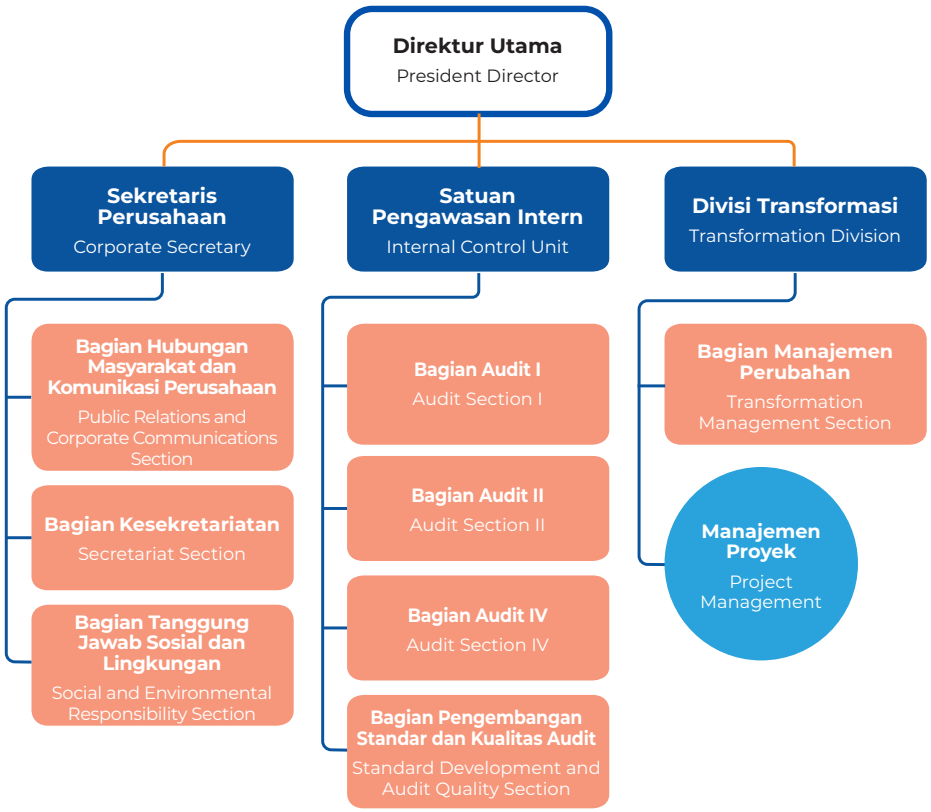
Organizational Structure and Position of Corporate Secretary

To be able to describe the functions contained in the Corporate Secretary, the following is the organizational

di dalam Sekretaris Perusahaan, berikut disampaikan struktur organisasi Sekretaris Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor : 01/KD/5/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Struktur Organisasi.

structure of the Corporate Secretary which was approved based on the Decree of the Board of Directors of PT Guarantee Kredit Indonesia Number: 01/KD/5/VI/2023, dated December 21, 2022 concerning Organizational Structure.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan Jamkrindo
Jamkrindo Corporate Secretary Organizational Structure



Hingga akhir tahun 2023, jumlah karyawan Sekretaris Perusahaan sebanyak 31 orang, dengan rincian, sebagai berikut:

Until the end of 2023, the number of Corporate Secretary employees were 31 people, with details as follows:

Jabatan Position	**Jumlah**/Total **(orang**/People)
Kepala Sekretaris Perusahaan Head of Corporate Secretary	1
Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan Head of Corporate Secretary Division	3
Fungsional Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Functions	2
Staff Bagian Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Division Staffs	10
Calon Karyawan Prospective Employee	2
KKWT	7
Jumlah Total	**25**

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan yang meliputi beberapa aspek di bawah ini:

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Implementation of Corporate Secretary activities includes the following aspects:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2. Pengeloalaan kegiatan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan.
3. Pengelolaan kegiatan kehumasan untuk internal di unit kerja.
4. Pengelolaan kegiatan kehumasan untuk eksternal.
5. Pengelolaan pembuatan dan penggunaan logo Perusahaan.
6. Pengelolaan publikasi laporan keuangan Perusahaan.
7. Pengelolaan kegiatan komunikasi pemasaran Perusahaan.
8. Pengelolaan kesekretariatan.
9. Pengelolaan keprotokolan Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Pengelolaan persuratan dan tata kelola dokumen penting Perusahaan.
11. Pengelolaan kegiatan Perusahaan untuk internal dan eksternal.
12. Pengelolaan kegiatan pelayanan internal Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Pengelolaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
14. Pengelolaan kegiatan pemeringkatan dan pemberdayaan UMKMK.
15. Pengelolaan *data scoring* dari Lembaga eksternal.
16. Pengelolaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan.
17. Pengelolaan tugas sesuai tata laksana dan tata kelola perusahaan yang baik di unit kerja sebagai bagian dari pengendalian internal.
18. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di unit kerja.
19. Penerapan manajemen risiko di unit kerja.
20. Pengelolaan penyusunan dan penyampaian laporan Sekretaris Perusahaan.
21. Pengelolaan pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan. Berikut disampaikan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di tahun 2023:

1. Preparation of Work Plan and Budget (RKA).
2. Management of Public Relations and Corporate Communication activities.
3. Management of public relations activities for internal work units.
4. Management of public relations activities for external.
5. Management of the creation and use of the Company logo.
6. Management of the publication of the Company's financial statement.
7. Management of the Company's marketing communication activities.
8. Secretarial management.
9. Management of protocols for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
10. Management of correspondence and governance of important Company documents.
11. Management of Company activities for internal and external.
12. Management of internal service activities for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
13. Management of Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities.
14. Management of UMKMK rating and empowerment activities.
15. Management of scoring data from external institutions.
16. Management of activities in order to increase financial literacy and financial inclusion.
17. Management of tasks in accordance with good corporate governance and governance in work units as part of internal control.
18. Development of employee competencies in the work unit.
19. Application of risk management in work units.
20. Managing the preparation and submission of reports by the Corporate Secretary.
21. Management of the implementation of other tasks within the scope of their duties.

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by holding competency development programs for all employees. Competency development for the Corporate Secretary is an effort to update knowledge to support the implementation of assigned tasks. The following is a competency improvement program that was attended by Division Heads and employees of the Corporate Secretary Division in 2022.

Tanggal Dates	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Materials of Education and Training	**Penyelenggara** Organizers
15 Juni 2023 June 15, 2023	SS (*Soft Skill*)	The Power of Knowledge : Accelerating Growth with Continuous Learning and Collaboration (Grand Launching ELS)	PT Jamkrindo
5-6 Mei 2023 May 5-6, 2023	SS (*Soft Skill*)	BUMN Communication Week 2023	Forum Humas BUMN SOE Public Relation Forum

Tanggal Dates	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Penyelenggara Organizers
9 Mei 2023 May 9, 2023	SS (*Soft Skill*)	Pelatihan Internal Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Anti-Bribery Management System (SMAP) Internal Audit Training	PT Jamkrindo
4 Oktober 2023 October 4, 2023	HS (*Hard Skill*)	Webinar Strategi Bisnis di Industri Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Guna Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan UMKMK Business Strategy Webinar in the Risk Management Based Guarantee Industry to Support Government Programs in MSME Development	PT BCG
9 Agustus 2023 August 9, 2023	SS (*Soft Skill*)	ESG (Environment Social Governance) Training	Forum Ekselen Bisnis Indonesia
18 Agustus 2023 August 18, 2023	SS (*Soft Skill*)	JURNAL - Knowledge Management for Perfomance and Innovation	KM Plus
2 September 2023 September 2, 2023	HS (*Hard Skill*)	Brevet Analisa Kredit Batch 7 – Jakarta Batch 7 Credit Analysis Brevet - Jakarta	PT Jamkrindo (bekerja sama dengan BRIDge) PT Jamkrindo (in collaboration with BRIDge)
23 September 2023 September 23, 2023	SS (*Soft Skill*)	Young Talent Summit 2023	PT Jamkrindo
13 September 2023 September 13, 2023	HS (*Hard Skill*)	JURNAL - Credit Risk Management Part 1	PT Jamkrindo
20 September 2023 September 20, 2023	HS (*Hard Skill*)	JURNAL - Credit Risk Management Part 2	PT Jamkrindo
13 Oktober 2023 October 13, 2023	SS (Soft Skill)	Forum Klinik Hukum Tahun 2023 - Optimalisasi Penyelesaian Piutang Subrogasi melalui Pengikatan Agunan dan Gugatan Sederhana Legal Clinic Forum in 2023 - Optimizing the Settlement of Subrogated Receivables through Collateral Binding and Simple Lawsuits	Divisi Kepatuhan Compliance Division
30 Oktober 2023 October 30, 2023	SS (Soft Skill)	Kick Off - Jamkrindo Leaders Academy	Jamkrindo
26-27 Oktober 2023 October 26-27, 2023	SS (Soft Skill)	Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah sesuai POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Consumer Protection and Settlement of Customer Complaints in accordance with POJK Number 6/POJK.07/2022	Infobank
6-7 November 2023 November 6-7, 2023	SS (Soft Skill)	The 4th Indonesia Human Capital Summit 2023	FHCI
12 – 14 Dec 23	HS (Hard Skill)	Digital Marketing, Marketing Communication & Social Media Marketing	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
16 – 18 Nov 23	SS (Soft Skill)	Jamkrindo Leaders Academy (Classical Session)	LPPI
14 Desember 2023 December 14, 2023	SS (Soft Skill)	Training Manajemen Risiko dan Sosialisasi Pengisian Kuesioner Risk Maturity Assessment Risk Management Training and Dissemination on Completing the Risk Maturity Assessment Questionnaire	Proxis Consulting
12-13 Desember 2023 December 2-13, 2023	SS (Soft Skill)	Panduan Praktis Menjadi Government Relations Executive Practical Guide to Becoming a Government Relations Executive	Kompas Institute
7 Dec 23	SS (Soft Skill)	Webinar Awareness dan Penerapan SMKI berdasarkan ISO/IEC 27001-2022 Webinar on Awareness and Implementation of ISMS based on ISO/IEC 27001-2022	PT Jamkrindo
6 Oct 23	HS (Hard Skill)	Kick Off dan Workshop TNA Tahun 2024 Batch 1 2024 TNA Kick Off and Workshop Batch 1	PT Wahana Tatar Wirakelola

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Sekretaris perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terbagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu:

1. Kesekretariatan;
2. Hubungan Masyarakat & Komunikasi Perusahaan;
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

1. Kesekretariatan;

Tanggung Jawab Utama & Tugas Pokok:

a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Kesekretariatan
b. Pengelolaan Kesekretariatan
c. Pengelolaan Keprotokolan Direksi dan Dewan Komisaris
d. Pengelolaan Persuratan dan Tata Kelola Dokumen Penting Perusahaan (Surat Menyurat Direksi, Surat Menyurat Perusahaan, Dokumen RUPS, Risalah Rapat, Notulen, Kepdir, SE, PKS, MoU, SK Direksi dan Dewan Komisaris)
e. Pengelolaan Kegiatan Perusahaan (Di antaranya Focus Group Discussion (FGD), *Workshop*, Rakernas, Pengenalan Direksi dan Dewan Komisaris Baru, Rapat Direksi, RUPS) untuk Internal dan Eksternal Perusahaan
f. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Internal Direksi dan Dewan Komisaris
g. Pengelolaan Tugas Sesuai Tata Laksana dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) di Bagian sebagai bagian dari pengendalian internal (*Internal Control*)
h. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di Bagian
i. Penerapan Manajemen Risiko di Bagian
j. Pengelolaan penyusunan dan penyampaian Laporan Bagian Kesekretariatan
k. Pengelolaan pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya

Wewenang:

a. Mengusulkan RKA Bagian Kesekretariatan ke Sekretaris Perusahaan
b. Memutuskan penempatan dan peminjaman dokumen penting Perusahaan
c. Mengusulkan kebijakan, peraturan, sistem, prosedur operasi baku dan metode kerja Bagian Kesekretariatan berdasarkan regulasi dan ketentuan Perusahaan.
d. Mengusulkan pemilihan dan penempatan personel sesuai dengan standar pengelolaan dan ketentuan yang berlaku.
e. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bagian Kesekretariatan sesuai penugasan dari Sekretaris Perusahaan.

Brief Report on the Implementation of Duties of the Corporate Secretary in 2023

The corporate secretary is directly responsible to the President Director. In carrying out its functions and duties, it is divided into 3 (three) areas, namely:

1. Secretariat;
2. Public Relations & Corporate Communications;
3. Social and Environmental Responsibility (CSR).

1. Secretariat;

Main Responsibilities & Main Duties:

a. Preparation of the Work Plan and Budget (RKA) for the Secretariat Section
b. Secretariat Management
c. Protocol Management of the Board of Directors and the Board of Commissioners
d. Management of Letters and Management of Important Company Documents (Correspondence of Directors, Company Correspondence, GMS Documents, Minutes of Meetings, Minutes, Director's Decree, Circular Letter, PKS, MoU, SK Directors and Board of Commissioners)
e. Management of Company Activities, Including Focus Group Discussions (FGD), Workshops, National Working Meeting, Introduction of New Directors and Board of Commissioners, Board of Directors Meetings, GMS) for Internal and External Companies
f. Management of Board of Directors and Board of Commissioners Internal Service Activities
g. Management of Duties in Accordance with Good Corporate Governance (GCG) in the Section as part of internal control
h. Competency development of employees who are in the Department
i. Application of Risk Management in Section
j. Management of preparation and submission of Secretarial Section Reports
k. Management of the implementation of other tasks within the scope of their duties.

Authority:

a. Propose RKA of the Secretarial Section to the Corporate Secretary
b. Decide on the placement and borrowing of important Company documents
c. Propose policies, regulations, systems, standard operating procedures and work methods of the Secretariat Section based on Company regulations and provisions.
d. Propose the selection and placement of personnel in accordance with management standards and applicable regulations.
e. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of the duties of the Secretariat Section according to assignments from the Corporate Secretary

2. Hubungan Masyarakat & Komunikasi Perusahaan;
Tanggung Jawab Utama & Tugas Pokok:
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Hubungan Masyarakat & Komunikasi Perusahaan
b. Pengelolaan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan
c. Pengelolaan Kegiatan Kehumasan untuk Internal (PIC Hubungan Masyarakat) di Unit Kerja
d. Pengelolaan Kegiatan Komunikasi Perusahaan untuk Eksternal (Pameran, Seminar, *Awarding*, *Conference*)
e. Pengelolaan Pembuatan dan Penggunaan Logo Perusahaan
f. Pengelolaan Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan
g. Pengelolaan Kegiatan Komunikasi Pemasaran (*Marketing Communication*) Perusahaan
h. Pengelolaan Tata Sesuai Tata Laksana dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di Bagian sebagai bagian dari pengendalian internal (*Internal Control*)
i. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di Bagian
j. Penerapan Manajemen Risiko di Bagian
k. Pengelolaan penyusunan dan penyampaian Laporan Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
l. Pengelolaan pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya.

Wewenang:
a. Mengusulkan RKA Bagian Hubungan Masyarakat & Komunikasi Perusahaan ke Sekretaris Perusahaan
b. Mengusulkan strategi hubungan masyarakat dan publikasi Perusahaan ke Sekretaris Perusahaan
c. Mengusulkan strategi komunikasi perusahaan ke Sekretaris Perusahaan
d. Mengusulkan strategi Komunikasi Pemasaran (*Marketing Communication*) Perusahaan ke Sekretaris Perusahaan
e. Mengusulkan pemilihan dan penempatan personel sesuai dengan standar pengelolaan dan ketentuan yang berlaku
f. Mengusulkan kebijakan, peraturan, sistem, prosedur operasi baku dan metode kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan berdasarkan regulasi dan ketentuan Perusahaan
g. Mewakili PT Jamkrindo dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Perusahaan sesuai penugasan dari Sekretaris Perusahaan

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Tanggung Jawab Utama & Tugas Pokok:
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Pemberdayaan UMKMK dan Lingkungan
b. Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

2. Public Relations & Corporate Communications;
Main Responsibilities & Main Duties:
a. Preparation of the Work Plan and Budget (RKA) of the Public Relations & Corporate Communications Section
b. Management of Public Relations and Corporate Communication Activities
c. Management of Public Relations Activities for Internal (Public Relations PIC) in Work Units
d. Management of Corporate Communication Activities for External (Exhibition, Seminar, Awarding, Conference)
e. Management of Company Logo Making and Use
f. Management of Company Financial Statement Publication
g. Management of the Company 's Marketing Communication Activities
h. Governance Management in accordance with Good Corporate Governance (GCG) in the Division, as part of internal control
i. Competency development of employees in the Department
j. Application of Risk Management in Section
k. Management of the preparation and submission of Public Relations and Communications Section Reports
l. Management of the implementation of other tasks within the scope of their duties.

Authority:
a. Propose RKA of Public Relations & Corporate Communications Section to the Corporate Secretary
b. Propose a public relations strategy and corporate publications to the Corporate Secretary
c. Propose a corporate communication strategy to the Corporate Secretary
d. Propose the Company's Marketing Communication strategy to the Corporate Secretary.
e. Propose the selection and placement of personnel in accordance with management standards and applicable regulations
f. Propose policies, regulations, systems, standard operating procedures and work methods of the Public Relations and Corporate Communications Section based on Company regulations and provisions
g. Represent PT Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of the duties of the Public Relations and Corporate Communications Section according to assignments from the Corporate Secretary.

3. Social and Environmental Responsibility (CSR)
Main Responsibilities & Main Duties:
a. Preparation of the Work Plan and Budget (RKA) for the MSME Empowerment and Environment Section
b. Management of Social and Environmental Responsibility Activities (TJSL)

c. Pengelolaan Kegiatan Pemeringkatan dan Pemberdayaan UMKMK
d. Pengelolaan Pemanfaatan Data *Scoring* dari Lembaga Eksternal
e. Pengelolaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
f. Pengelolaan Tugas Sesuai Tata Laksana dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) di Bagian sebagai bagian dari pengendalian internal (*Internal Control*)
g. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di Bagian
h. Penerapan Manajemen Risiko di Bagian
i. Pengelolaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Bagian Pemberdayaan UMKMK dan kebutuhan Lingkungan
j. Pengelolaan Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain dalam Lingkup Bidang Tugasnya

Wewenang:
a. Membuat usulan RKA Bagian Pemberdayaan UMKMK dan Lingkungan kepada Sekretaris Perusahaan.
b. Mengusulkan strategi pengembangan Pemberdayaan UMKMK dan Lingkungan ke Sekretaris Perusahaan.
c. Mengusulkan kebijakan, peraturan, sistem, prosedur operas baku dan metode kerja Bagian Pemberdayaan UMKMK dan Lingkungan ke Sekretaris Perusahaan berdasarkan regulasi dan ketentuan Perusahaan.
d. Mengusulkan pemilihan dan penempatan personel sesuai dengan standar pengelolaan dan ketentuan yang berlaku.
e. Mewakili Jamkrindo dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bagian Pemberdayaan UMKMK dan Lingkungan sesuai penugasan dari Sekretaris Perusahaan.

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko merupakan sistem yang digunakan untuk memperkuat aspek akuntabilitas Direksi dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja Perusahaan. Komitmen dalam penerapan Manajemen Risiko, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan, dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang dibangun sesuai konteks dan kapabilitas Perusahaan. Manajemen Risiko Perusahaan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan dengan menggunakan ISO 31000:2018.

Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 121/SKD/4/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat, Boy Herwin Nur dipercaya untuk menjabat Kepala Divisi Manajemen Risiko.

c. Management of MSMEC Ranking and Empowerment Activities
d. Management of Utilization of Scoring Data from External Institutions
e. Management of Activities in the Context of Increasing Financial Literacy and Financial Inclusion.
f. Management of Duties in Accordance with Good Corporate Governance (GCG) in the Section as part of internal control
g. Competency development of employees who are in the Department
h. Implementation of Risk Management in Section
i. Management of the Preparation and Submission of Reports on the MSME Empowerment and Environmental Needs Section
j. Management of the Implementation of Other Duties within the Scope of Their Tasks.

Authority:
a. Make a RKA proposal for the MSME Empowerment and Environment Section to the Corporate Secretary.
b. Propose MSME Empowerment and Environment development strategies to the Corporate Secretary.
c. Propose policies, regulations, systems, standard operating procedures and work methods of the MSME Empowerment and Environment Section to the Corporate Secretary based on Company regulations and provisions.
d. Propose the selection and placement of personnel in accordance with management standards and applicable regulations.
e. Represent Jamkrindo in establishing relationships with third parties regarding the implementation of the duties of the MSME and Environment Empowerment Section according to assignments from the Corporate Secretary.

RISK MANAGEMENT FUNCTION

Risk Management is a system used to strengthen the accountability aspects of the Board of Directors in supporting the decision-making process and developing the Company's performance. Commitment in implementing Risk Management, as an integral part of the Company's management system as a whole, is stated in the Risk Management Policies and Procedures that are developed according to the context and capabilities of the Company. Company Risk Management is implemented in accordance with the conditions and needs of the Company using ISO 31000:2018.

Profile of Head of Risk Management Division

Based on Directors Decree No.121/SKD/4/XII/2022 dated December 26, 2022, concerning the Appointment and Transfer of Officials, Herwin Nur was trusted to serve as Head of the Risk Management Division.

Boy Herwin Nur
Kepala Divisi Manajemen Risiko/Head of the Risk Management Division.
Menjabat Sejak: 1 Januari 2023/Served Since: Jannuary 1, 2023

Warga negara Indonesia
Usia 50 tahun
Kelahiran Padang pada 16 Februari 1973
Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Pendidikan
1. Magister (S2) Manajemen Universitas Tanjungpura (2011)
2. Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Bung Hatta (1996)

Riwayat Jabatan
Beberapa jabatan yang pernah diemban di lingkup Jamkrindo adalah Kepala Divisi Manajemen Risiko (2023-Sekarang), Wakil Kepala Divisi Akuntansi (2022), Kepala Kantor Cabang Pontianak (2018-2022), Kepala Kantor Cabang Tarakan (2017), Kepala Kantor Cabang Pangkal Pinang (2016), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Khusus (2014-2015), Kepala Bagian Pelaporan Divisi Akuntansi (2013), Kepala Bagian Operasional Denpasar (2012), Kepala Bagian Operasional Pontianak (2008-2011).

Sertifikasi
Pelatihan Stabilitas Seminar Sehari IFSO 2024 (LPPI 2023). Nomor Sertifikat: 10/SS15.STABILITAS/DCSC-LPPI/XI/2023.
Pelatihan dan Sertifikasi CRMP (LSPMR 2023). Nomor Sertifikat: 70209 2421 7 0001684 2023.
Master Class Program Series XXII (LSPMR 2023). Nomor Sertifikat: 3613/W-XXVI/CPE/LSPMR/VIII/2023.

Indonesian citizens
50 years old
Born in Padang on February 16, 1973
Domiciled in Jakarta, Indonesia

Education
1. Masters (S2) in Management, Tanjungpura University (2011)
2. Bachelor (S1) in Accounting from Bung Hatta University (1996)

Position History
Several positions held within Jamkrindo are, Head of Risk Management Division (2023-Present), Deputy Head of Accounting Division (2022), Head of Pontianak Branch Office (2018-2022), Head of Tarakan Branch Office (2017), Head of Pangkal Pinang Branch Office (2016), Head of the Operations Section of the Special Branch Office (2014-2015), Head of the Accounting Division Reporting Section (2013), Head of the Denpasar Operations Section (2012), Head of the Pontianak Operations Section (2008-2011).

Certification
IFSO 2024 One Day Seminar on Stability Training (LPPI 2023). Certificate Number: 10/SS15.STABILITY/DCSC-LPPI/XI/2023.
CRMP Training and Certification (LSPMR 2023). Certificate Number: 70209 2421 7 0001684 2023.
Master Class Program Series XXII (LSPMR 2023). Certificate Number: 3613/W-XXVI/CPE/LSPMR/VIII/2023.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Divisi Manajemen Risiko

Untuk dapat menggambarkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Divisi Manajemen Risiko, berikut disampaikan struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko yang telah disahkan berdasarkan Keputusan 01/KD/5/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Struktur Organisasi.

Organizational Structure and Position of the Risk Management Division

To be able to describe the functions contained in the Risk Management Division, the following is the organizational structure of the Risk Management Division which was approved based on Decree 01/KD/5/VI/2023 dated June 5, 2023 about Organizational Structure.

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko
Risk Management Division Organizational Structure



Hingga akhir tahun 2023, jumlah karyawan Divisi Manajemen Risiko sebanyak 21 orang, dengan rincian, sebagai berikut:

Until the end of 2023, the number of employees in the Risk Management Division is 21 people, with details, as follows:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Number (of People)
Kepala Satuan Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division Unit	1
Kepala Bagian Pengelolaan Risiko Korporasi Head of Corporate Risk Management Section	1
Kepala Bagian Pengelolaan Risiko Penjaminan Head of Guarantee Risk Management Section	1
Fungsional Manajemen Risiko Risk Management Function	11
Staf Pengelolaan Risiko Korporasi Corporate Risk Management Staff	2
Staf Pengelolaan Risiko Penjaminan Guarantee Risk Management Staff	3
Admin Administration	2
Jumlah Total	**21**

Tugas Divisi Manajemen Risiko

Tugas Divisi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengelola penerapan dan pelaksanaan manajemen risiko korporasi dan penjaminan, diantaranya:
   a. Melakukan penerapan manajemen risiko;
   b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Divisi Manajemen Risiko;
   c. Melakukan penyusunan kebijakan manajemen risiko;
   d. Melakukan pelaksanaan risk assessment;
   e. Melakukan identifikasi risiko dan penanganan risiko (mitigasi) secara korporasi dan penjaminan;
   f. Pengelolaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Divisi Manajemen Risiko;
   g. Pelaksanaan Penyusunan Profil Risiko;
   h. Penetapan Profil Risiko;
   i. Melakukan monitoring atas penerapan manajemen risiko; dan
   j. Pengelolaan Kebijakan, Prosedur, dan Metodologi Manajemen Risiko.
2. Pengelolaan analisis data risiko industri dari Terjamin atau Mitra Terjamin.
3. Pengelolaan Kerja Sama dengan Lembaga Penyedia Data dan pengolahan data yang diperoleh.
4. Pengelolaan Penerapan 4 (empat) Eyes Principle.
5. Pengelolaan tugas sesuai tata laksana dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) di Unit Kerja sebagai bagian dari pengendalian internal (*Internal Control*).
6. Pemberian Opini/Pendapat Manajemen Risiko.
7. Mengelola *Business Continuity Management* dan pelaksanaan BCM *Maturity Assessment*.
8. Melakukan pengembangan kompetensi karyawan terkait Manajemen Risiko.

Risk Management Division Duties

The duties of the Risk Management Division are as follow:

1. Manage the implementation of corporate risk management and guarantees, including:
   a. Implement risk management;
   b. Preparation of Work Plan and Budget (RKA) of the Risk Management Division;
   c. Perform the preparation of risk management policies;
   d. Perform risk assessment implementation;
   e. Carry out risk identification and risk management (mitigation), corporately and guarantee;
   f. Management of Risk Management Division Report Preparation and Submission;
   g. Implementation of Risk Profile Preparation;
   h. Risk Profile Determination;
   i. Monitor the implementation of risk management; and
   j. Management of Risk Management Policies, Procedures, and Methodologies.
2. Management of industrial risk data analysis from the Guaranteed or Guaranteed Partners.
3. Management of Cooperation with Data Provider Institutions and processing of data obtained.
4. Management of the Implementation of the 4 Eyes Principle.
5. Management of tasks in accordance with good corporate governance (GCG) in the Work Unit as part of internal control.
6. Provision of Risk Management Opinion.
7. Managing Business Continuity Management and implementing BCM Maturity Assessment.
8. Develop employee competencies related to Risk Management.

Sertifikasi Profesi Divisi Manajemen Risiko

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan pengelolaan risiko, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi Manajemen Risiko hingga akhir tahun 2023.

Risk Management Division Professional Certification

Professional certification is an important aspect for auditors to understand developments in risk management, particularly in relation to regulatory compliance and industry developments. The followings are the professional certifications held by employees of the Risk Management Division until the end of 2023.

Nama dan Jabatan Names and Positions	Jenis Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Types of Risk Management Profession Certification
Boy Herwin Nur	CRMP (*Certified Risk Management Professional*) & Manajemen Risiko Perbankan Level 2 CRMP (Certified Risk Management Professional) & Banking Risk Management Level 2
Ahmad Sopyan	CRMP (*Certified Risk Management Professional*)
Nur Rotunnafiah	CRMP (*Certified Risk Management Professional*) & BCCS (Business Continuity Certified Specialist)
Candra Haris Tua Lubis	CRMO (*Certified Risk Management Officer*) & Manajemen Risiko Perbankan Level 1 CRMO (Certified Risk Management Officer) & Banking Risk Management Level 1
Tyas Saraswati Nur Wiyastuty	CRMO (*Certified Risk Management Officer*)
Shofiyah Nada Rosidah	CRMO (*Certified Risk Management Officer*)
Adha Nur Syukur	CRMO (*Certified Risk Management Officer*)
Danang Agus Wahyudi	CRMO (*Certified Risk Management Officer*)
Willem Kristian	Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management Level 1
Vivi Candra	Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management Level 1
Alfi Ridhoniah	Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management Level 1
Maria Annisa Primawestri	Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management Level 1
Gandes Novia Wulansari	Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management Level 1
Yanik Swandayani	Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management Level 1
Aulida Triyana	Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management Level 1
Abu Bakar	Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management Level 1
Irma Hartati	Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Banking Risk Management Level 1
Rafida Aflah	Sertifikasi Skema Analis Penjaminan Assurance Analyst Scheme Certification

Jumlah karyawan Divisi Manajemen Risiko yang memiliki sertifikasi profesi sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 71% dari jumlah keseluruhan karyawan Divisi Manajemen Risiko. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

The number of Risk Management Division employees who have professional certification is 17 people or 71% of the total number of Risk Management Division employees. The Company is committed to increasing the level of professional certification for employees, both for employees who already have professional certification and those who do not have one.

Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh

Competency Development

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by holding competency development programs for all employees. Competency development for the Risk Management Division is an effort

karyawan. Pengembangan kompetensi Divisi Manajemen Risiko merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan risiko di lingkup Perusahaan. Berikut disampaikan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Manajemen Risiko di tahun 2023:

to update knowledge to support the implementation of risk management duties within the Company. The following is the competency development followed by Division Heads and Risk Management Division employees in 2023:

Tanggal Dates	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Types of Education and Training	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Materials of Education and Training	**Penyelenggara** Organizers
27 Maret 2023 March 27, 2023	*Workshop* dan Pelatihan Workshop and Training	*Workshop Awareness* Penerapan GRC dan Pengembangan Kapabilitas ERM GRC Implementation Awareness and ERM Capability Development Workshop	PT Jamkrindo
26 Mei 2023 May 26, 2023	*Workshop* dan Pelatihan Workshop and Training	*Executive Leader* Program: *Leaders as an Agent of Change*	PT Jamkrindo
09 Mei 2023 May 9, 2023	*Workshop* dan Pelatihan Workshop and Training	*Project Management*	PT Jamkrindo
10 Agustus 2023 August 10, 2023	*Workshop* dan Pelatihan Workshop and Training	GRC *Masterclass* Program 2023	Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementrian BUMN Deputy for Finance and Risk Management, Ministry of SOEs
15 Agustus 2023 August 15, 2023	*Workshop* dan Pelatihan Workshop and Training	Sistem Manajemen Mutu dan *Surveillance* Internal Audt ISO 90012015 Quality Management System and Internal Audit Surveillance ISO 9001 2015	Konsultindo
07 November 2023 November 7, 2023	*Workshop* dan Pelatihan Workshop and Training	ISO 31000	PT Jamkrindo
02 Desember 2023 December 2, 2023	*Workshop* dan Pelatihan Workshop and Training	Pelatihan Data *Analytics Workshop with Tableau Knime and Phyton* (Jupyter & Plotly) Data Analytics Workshop Training with Tableau Knime and Python (Jupyter & Plotly)	Patria & Co
08 Desember 2023 December 8, 2023	*Workshop* dan Pelatihan Workshop and Training	*Business Intelligence*	Dibimbing.id
14 Desember 2023 December 14, 2023	*Workshop* dan Pelatihan Workshop and Training	*Training* Manajemen Risiko dan Sosialisasi Pengisian Kuesioner *Risk Maturity Assessment* Risk Management Training and Dissemination on Completing the Risk Maturity Assessment Questionnaire	PT BPUI

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2023

Pada tahun 2023 Divisi Manajemen Risiko memiliki program kerja strategis antara lain:

1. Penguatan Manajemen Risiko (Tindak Lanjut atas Hasil *Risk Maturity Assessment* Tahun 2022)
   Perusahaan telah melakukan *Risk Maturity Assessment* tahun 2022, dari hasil pengukuran maturitas Unit Kerja (Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, diperoleh beberapa saran dan rekomendasi perbaikan yang disarankan dari hasil pengukuran Risk Maturity Assessment, antara lain:
   a. Perlu adanya sosialisasi atas ketentuan-ketentuan eksternal yang berkaitan dengan Lembaga Penjaminan yang relevan dengan tugas dan peran masing-masing Unit Kerja.
   b. Peningkatan kemampuan layanan TI, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan klaim dan penerbitan sertifikat.
   c. Pengkinian Dokumen DR Plan.

Brief Report on the Implementation of the 2023 Risk Management Division's Duties

In 2023, the Risk Management Division has strategic work programs including:

1. Strengthening Risk Management (Follow-up on the Results of the 2022 Risk Maturity Assessment)
   The Company has carried out a Risk Maturity Assessment in 2022, from the results of measuring the maturity of Work Units (Regional Offices and Branch Offices), several suggestions and recommendations for improvements were obtained from the results of the Risk Maturity Assessment measurements, including:
   a. There is a need for dissemination of external provisions relating to Guarantee Institutions that are relevant to the duties and roles of each Work Unit.
   b. Improved IT service capabilities, especially those related to claims management and certificate issuance.
   c. DR Plan Document Update.

d. Peningkatan *awareness* dan budaya sadar risiko di seluruh Unit Kerja.
e. Perlu adanya ketentuan baku yang mengatur tentang identifikasi dan analisa risiko positif (*upside risk*) yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan risiko positif serta dilakukan sosialisasi terkait identifikasi risiko positif/*upside risk* ke seluruh Unit Kerja secara berkala.
f. Perlu adanya peningkatan penerapan konsep tiga lapis pertahanan (three lines of defense) di setiap Unit Kerja.
g. Penerapan prinsip *four-eyes principles* di seluruh Unit Kerja dengan lebih efektif.
h. Penerapan prinsip *cost and benefit* analysis dan implementasi risk-based budgeting dengan lebih optimal.
i. Melakukan pengkinian secara berkala atas pustaka risiko (*risk register*), *risk appetite* dan *risk tolerance* perusahaan sebagai dasar implementasi manajemen risiko di sistem manajemen perusahaan lainnya seperti *risk-based internal audit*, *risk-based budgeting*, dan lainnya.
j. Peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia pada bidang-bidang yang spesifik, seperti Teknologi Informasi (khususnya berkaitan dengan IT *Security* dan IT *Governance*), Manajemen Risiko, BCMS, Audit, SMK3 di Unit Kerja yang relevan.

d. Increased awareness and risk awareness culture in all Work Units.
e. There needs to be standard provisions governing the identification and analysis of positive risks (upside risks) which can be used as guidelines in managing positive risks and to carry out dissemination regarding the identification of positive risks/upside risks to all Work Units on a regular basis.
f. There is a need to increase the application of the three lines of defense concept in each Work Unit.
g. Implementation of the four-eyes principles in all Work Units more effectively.
h. Applying the principles of cost and benefit analysis and implementing risk-based budgeting more optimally.
i. Conduct regular updates on the Company's risk register, risk appetite and risk tolerance as a basis for implementing risk management in other Company management systems such as risk-based internal audit, risk-based budgeting, and others.
j. Increasing Human Resources capabilities in specific areas, such as Information Technology (especially related to IT Security and IT Governance), Risk Management, BCMS, Audit, SMK3 in relevant Work Units.

Terkait dengan rekomendasi hasil *Risk Maturity Assessment* (RMA) Tahun 2022, Dapat dilaporkan bahwa Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan program kerja terkait tindak lanjut *Risk Maturity Assessment* (RMA) Tahun 2022 diantaranya:

Regarding the recommendations for the results of the 2022 Risk Maturity Assessment (RMA), it can be reported that the Risk Management Division has implemented a work program related to the follow-up to the 2022 Risk Maturity Assessment (RMA), including:

No.	Program Kerja Tindak Lanjut RMA 2022 RMA 2022 Follow-up Work Program	Progress
1	Internalisasi *Risk Awareness* Risk Awareness Internalization	100%
2	Sosialisasi SMAP dan Anti Fraud Anti Fraud and SMAP Dissemination	100%
3	Harmonisasi SE Pengelolaan Risiko (terkait *upside risk*) Harmonization of Risk Management SE (in relation to upside risk)	100%
4	Penguatan Fungsi *Risk Officer* dan *Compliance Officer* Strengthening of Risk Officer and Compliance Officer Functions	100%
5	Pelatihan dan Sertifikasi Bidang MR RM Certification and Training	100%

2. Penyusunan Laporan *Stress Test* Risiko Likuiditas
Untuk mencapai sasaran tersebut, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan perhitungan atas stress testing risiko likuiditas dan menyampaikan secara berkala kepada Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko dan Divisi terkait setiap triwulannya.
3. Tersedianya *Framework Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*
Untuk mencapai sasaran tersebut, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan reviu ulang atas Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko, maupun kaji ulang atas *risk capacity, risk target, risk appetite, risk tolerance*, dan *risk limit* Perusahaan. Hal ini guna memastikan penetapan

2. Preparation of Liquidity Risk Stress Test Report
To achieve this target, the Risk Management Division has carried out calculations on liquidity risk stress testing and submitted them periodically to the Director of Finance, Investment and Risk Management and related Divisions every quarter.
3. Availability of Risk Appetite and Risk Tolerance Frameworks
To achieve this target, the Risk Management Division has carried out a review of the Risk Management Policies and Guidelines, as well as a review of the Company's risk capacity, risk targets, risk appetite, risk tolerance

limit-limit risiko sebagaimana dimaksud diatas masih relevan dengan tujuan Perusahaan serta menyusun prosedur dan kertas kerja manajemen risiko atas risk capacity, *risk target*, *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *risk limit* Perusahaan sehingga prosedur dan kertas kerja manajemen risiko relevan, efektif, dan efisien dalam mengelola risiko Perusahaan. Hal ini dilakukan bersama dengan tenaga ahli atau konsultan yang expert di bidangnya.

Dapat dilaporkan bahwa saat ini Perusahaan telah menetapkan Kebijakan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* sebagai berikut:

a. Peraturan Direksi Nomor 24/Per-Dir/4/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Kebijakan Penetapan Peringkat Risiko, Selera Risiko, Toleransi Risiko, dan Indikator Utama Risiko.
b. Surat Edaran Divisi Nomor 04/SE-Div/4/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.

4. Tersedianya Laporan *Guarantee Exposure Limit*.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan perhitungan *Guarantee Exposure Limit* dan menyampaikannya kepada Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko telah menyampaikan Laporan Penyampaian Hasil Perhitungan Batasan Eksposur Penjaminan (*Guarantee Exposure Limit*) kepada Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko melalui memorandum Divisi Manajemen Risiko Nomor: B.657/INT/MRP/MP/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023. Dapat dilaporkan bahwa Divisi Manajemen Risiko juga telah menyampaikan Hasil Perhitungan Batasan Eksposur Penjaminan (*Guarantee Exposure Limit*) kepada Direktur MSDM, Umum, dan Manajemen Risiko melalui memorandum Divisi Manajemen Risiko Nomor: B.732/INT/MRP/MRP/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
5. Terlaksananya *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) *Maturity Assessment*.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan *assessment Governance, Risk, and Compliance* (GRC) melalui Kerja sama dengan pihak yang independen melalui pengadaan jasa konsultan yang expert dibidangnya. Adapun hasil penilaian maturitas GRC (*Governance, Risk, and Compliance*) yang telah dilakukan diperoleh skor 3,04 atau *managed*. Artinya, Perusahaan telah didukung oleh Kebijakan, Prosedur, dan metodologi, namun keselarasan di antara kebijakan, prosedur, dan metodologi masih dalam tahap minimal.
6. Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelolaan Risiko
Untuk mencapai sasaran tersebut, Divisi Manajemen Risiko melakukan monitoring atas pemenuhan Organ Pengelolaan Risiko yang sudah tersertifikasi. Target pemenuhan kualifikasi Organ Pengelola Risiko yaitu sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN Pasal 55, Organ Pengelola Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko terdiri dari:

and risk limits. This is to ensure that the determination of risk limits as referred to above is still relevant to the Company's objectives and to prepare risk management procedures and working papers for risk capacity, risk targets, risk appetite, risk tolerance and risk limits of the Company so that risk management procedures and working papers are relevant, effectively and efficiently in managing the Company's risks. This is done together with experts or consultants who are experts in their fields.

It can be reported that currently the Company has established a Risk Appetite and Risk Tolerance Policy as follows:

a. Directors Regulation Number 24/Per-Dir/4/XI/2023 dated November 9, 2023 concerning Policy for Determining Risk Ratings, Risk Appetite, Risk Tolerance and Main Risk Indicators.
b. Division Circular Number 04/SE-Div/4/XI/2023 dated November 9, 2023 concerning Guidelines for Implementing Risk Appetite and Risk Tolerance.

4. Availability of Guarantee Exposure Limit Report.
To achieve this target, the Risk Management Division has calculated the Guarantee Exposure Limit and submitted it to the Director of Finance, Investment and Risk Management. The Risk Management Division has submitted a report on the submission of the results of the calculation of the Guarantee Exposure Limit to the Director of Finance, Investment and Risk Management through the Risk Management Division memorandum Number: B.657/INT/MRP/MP/VII/2023 dated July 31, 2023. It can be reported that the Risk Management Division has also submitted the Guarantee Exposure Limit Calculation Results to the Director of HRM, General Affairs and Risk Management through the Risk Management Division memorandum Number: B.732/INT/MRP/MRP/VIII/2023 dated. August 23, 2023.

5. Implementation of Governance, Risk, and Compliance (GRC) Maturity Assessment.
To achieve this target, the Risk Management Division has carried out a Governance, Risk and Compliance (GRC) assessment in collaboration with independent parties through the provision of consultant services who are experts in their fields. The results of the GRC (Governance, Risk, and Compliance) maturity assessment that was carried out obtained a score of 3.04 or managed. This means that the Company has been supported by Policies, Procedures and methodology, but the alignment between policies, procedures and methodology is still at a minimal stage.
6. Fulfillment of Risk Management Organ Qualifications
To achieve this target, the Risk Management Division monitors the compliance of certified Risk Management Organs. The risk management organ qualification target is 10%. Based on the Regulation of the Minister of BUMN Number Per-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs Article 55, the Risk Management Organ in implementing Risk Management consists of:

a. Dekom atau Dewas;
b. Direksi;
c. Komite Audit;
d. Komite Pemantau Risiko;
e. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
f. Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko;
g. Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
h. SPI.

Rekap jumlah personil pada Organ Pengelola Risiko yang telah tersertifikasi per Desember 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

a. BoC or Supervisory Board;
b. Board of Directors;
c. Audit Committee;
d. Risk Monitoring Committee;
e. Integrated Governance Committee;
f. Director in charge of Risk management;
g. Director in charge of financial management; And
h. Internal Audit Unit.

A recap of the number of personnel in the Risk Management Organ who have been certified as of December 2023 is presented in the following table:

Organ	**Jumlah** Total	**Jumlah Yang Sudah Sertifikasi** Number of People who have been Certified	**Keterangan** Description
Dewan Komisaris Board of Commissioners	6	4	• Krisna Wijaya (Komisaris Utama): Sertifikasi Manajemen Risiko Level I-V, 3rd *Level of International Risk Management, Key Risk Management Challenges.* • Desty Arlaini (Komisaris): Sertifikasi Manajemen Risiko CRMP dan CRMO • Hernita Alius (Komisaris Independen): Sertifikasi Manajemen Risiko Level I • M Muchlas Rowi: Pelatihan dan Sertifikasi Skema GRCCE LSP-GRK Indonesia • Krisna Wijaya (President Commissioner): Level I-V Risk Management Certification, 3rd Level of International Risk Management, Key Risk Management Challenges. • Desty Arlaini (Commissioner): CRMP and CRMO Risk Management Certification • Hernita Alius (Independent Commissioner): Level I Risk Management Certification M Muchlas Rowi: Training and Certification for the Indonesian GRCCE LSP-GRK Scheme
Direksi Board of Directors	6	6	• Akhmad Purwakajaya: Sertifikasi Kompetensi okupasi Direktur Bisnis, Investasi dan Komisaris • Henry Panjaitan: Sertifikasi Manajemen Risiko Level I-V • Suwarsito: Sertifikasi Manajemen Risiko Level III • Abdul Bari: Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV, *Risk Governance & Leadership Masterclass* (Refreshment Sertifikasi CERG) • Alia Nur Fitri: Sertifikasi Manajemen Risiko Level II, Sertifikasi Kompetensi okupasi Direktur Bisnis, Investasi dan Komisaris • Achmad Ivan S Soeparno: Sertifikasi Manajemen Risiko CRGP • Akhmad Purwakajaya: Occupational Competency Certification for Director of Business, Investment and Commissioner • Henry Panjaitan: Level I-V Risk Management Certification • Suwarsito: Level III Risk Management Certification • Abdul Bari: Level IV Risk Management Certification, Risk Governance & Leadership Masterclass (CERG Certification Refreshment) • Alia Nur Fitri: Level II Risk Management Certification, Occupational Competency Certification for Business Director, Investment and Commissioner • Achmad Ivan S Soeparno: CRGP Risk Management Certification
Komite Audit Audit Committee	2	0	2 (dua) diantaranya sudah termasuk Organ Dekom 2 (two) of them include Organs of the Board of Comissioners
Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	1	1	Fahrul Ismaeni: Pelatihan dan Sertifikasi Skema GRCCE LSP-GRK Indonesia 3 (tiga) diantaranya sudah termasuk Organ Dekom Fahrul Ismaeni: Training and Certification for the Indonesian GRCCE LSP-GRK Scheme 3 (three) of them include Organs of the Board of Comissioners
Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Commmittee	4	0	3 (tiga) diantaranya sudah termasuk Organ Dekom dan 1 (satu) diantaranya sudah termasuk Organ Komite Pemantau Risiko 3 (three) of them are included in the Organs of the Board of Commissioners and 1 (one) of them is included in the Organs of the Risk Monitoring Committee
Direktur yang membidangi Risiko Director in charge of Risk			Sudah termasuk Organ Direksi Includes Organs of the Board of Directors

Organ	Jumlah Total	Jumlah Yang Sudah Sertifikasi Number of People who have been Certified	Keterangan Description
Direktur yang membidangi Keuangan Director in charge of Finance			Sudah termasuk Organ Direksi Includes Organs of the Board of Directors
SPI Internal Audit Unit	27	23	• QIA (Qualified Internal Auditor): 22 • PIA (Professional Internal Auditor): 1 • Sertifikasi TK Dasar PBJ (Pengadaaan Barang dan Jasa): 1 • MR Level 2: 3 • Sertifikat SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) ISO 37001:2016 Internal Audit *Training*: 11 • Sertifikat *Awareness* dan Audit Internal ISO 9001:2015: 8 • CFrA (Certified Forensic Auditor): 4 • BSMR: 2 • Auditor SMK3 (Sistem Menejement Keselamatan dan Kesehatan Kerja: 2 • 1CRMO (Certified Risk Management Officer): 1 • CPIA (Certified Practitioner of Internal Audit): 2 • *Business Continuity Management Certified Professional* (BCMCP): 2 • QIA (Qualified Internal Auditor): 22 • PIA (Professional Internal Auditor): 1 • PBJ Basic Level Certification (Procurement of Goods and Services): 1 • RM Level 2: 3 • SMAP Certificate (Anti-Bribery Management System) ISO 37001:2016 Internal Audit Training: 11 • ISO 9001:2015: 8 Awareness and Internal Audit Certificate • CFrA (Certified Forensic Auditor): 4 • BSMR: 2 • SMK3 Auditor (Occupational Safety and Health Management System: 2 • CRMO (Certified Risk Management Officer): 1 • CPIA (Certified Practitioner of Internal Audit): 2 • Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP): 2
Jumlah Total	**46**	**34**	
Target KPI KPI Target		**10%**	**Sudah tercapai** Achieved
Pemenuhan oleh PT Jamkrindo Fulfillment by PT Jamkrindo		**73,91%**	

Dapat dilaporkan bahwa sebanyak 73,91% personil Organ Pengelola Risiko telah tersertifikasi.

7. Melaksanakan BCM *Maturity Assessment*.
   Hasil pengukuran maturitas BCMS Jamkrindo yang telah dilakukan pada tahun 2023, diperoleh nilai 3.91 (tahap *mature*). Artinya, BCMS telah menjadi budaya perusahaan, hal ini ditandai oleh pengembangan dan pengkinian prosedur (*documented information*) BCMS secara berkelanjutan, uji coba dan simulasi prosedur BCMS, kesiapan sarana dan prasarana BCMS (termasuk infrastruktur TI) yang selalu siap digunakan saat kondisi gangguan/bencana, kapabilitas BCMS dari setiap Pegawai, hingga adanya sertifikasi BCMS internal yang diakui oleh lembaga sertifikasi

8. Melakukan *Surveilence Audit* ISO 22301 dan Ekstensifikasi Ruang Lingkup Audit.
   Untuk mencapai sasaran tersebut, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan *Surveilence* Audit ISO 22301 dan Ekstensifikasi Ruang Lingkup Audit dengan

It can be reported that as many as 73.91% of Risk Management Organ personnel have been certified.

7. Carry out BCM Maturity Assessment.
   The results of Jamkrindo's BCMS maturity measurements carried out in 2023, obtained a value of 3.91 (mature stage). This means that BCMS has become a Company culture. This is characterized by continuous development and updating of BCMS procedures (documented information), testing and simulation of BCMS procedures, readiness of BCMS facilities and infrastructure (including IT infrastructure) which are always ready to be used during disruption/disaster conditions, the BCMS capability of each employee, to the existence of internal BCMS certification that is recognized by the certification body

8. Conduct ISO 22301 Surveillance Audit and Extend the Audit Scope.
   To achieve this target, the Risk Management Division has implemented ISO 22301 Surveillance Audit and Audit Scope Extensification using the assistance of consultant

menggunakan pendampingan jasa konsultan. Divisi Manajemen Risiko telah melakukan persiapan *Surveilence* Audit ISO 22301 dan Ekstensifikasi Ruang Lingkup Audit antara lain:

a. Tindaklanjut atas Audit Sertifikasi ISO 22301:2019 BCMS pada Jamkrindo tahun 2022, diantaranya:
   i) 1 *Positive Comment* yaitu Kecukupan *Resources* (*People, Facilities, Supporting System & Procedure*) untuk implementasi BCMS, mencakup juga pengembangan digitalisasi dan *application* untuk men-*support documented information* nya
   ii) 1 Temuan Minor yaitu *management review* sudah dilakukan dalam laporan BCM dan Rapat Tinjauan Manajemen (tanggal 21 Juli 2021). Meskipun agenda pembahasannya belum mencakup item-item yang ada pada persyaratan ISO 22301:2019 Clause 9.3.2

services. The Risk Management Division has prepared ISO 22301 Surveillance Audit and Audit Scope Extension, including:

a. Follow-up to the ISO 22301:2019 BCMS Certification Audit at Jamkrindo in 2022, including:
   i) 1 Positive Comment, namely Adequacy of Resources (People, Facilities, Supporting System & Procedure) for the implementation of BCMS, including the development of digitalization and applications to support documented information
   ii) 1 Minor Finding, namely that a management review has been carried out in the BCM report and Management Review Meeting (July 21, 2021). Although the discussion agenda does not yet include the items contained in the requirements of ISO 22301:2019 Clause 9.3.2

5 *Opportunity for Improvement* yaitu:

5 Opportunities for Improvement, namely:

No.	Opportunity for Improvement	Referensi Reference
1	Sasaran BCMS sudah ditentukan dengan merujuk ke Kebijakan BCMS Jamkrindo. Peningkatan dapat dipertimbangkan, terkait dokumentasi untuk proses monitoring terhadap pencapaian sasaran BCMS yang sudah dilakukan BCMS targets have been determined by referring to Jamkrindo's BCMS Policy. Improvements can be considered regarding documentation for the monitoring process towards the achievement of BCMS targets that have been carried out	6.2.1
2	Organisasi perlu memastikan tim yang ditugaskan sebagai tim tanggap darurat dilengkapi dengan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka selama gangguan. (contoh: PIC untuk petugas pemadam kebakaran dan P3K di masing-masing kantor cabang) Organizations need to ensure teams assigned as emergency response teams are equipped with the necessary competencies to carry out their responsibilities during a disruption. (example: PIC for firefighters and first aid workers at each branch office)	8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.3
3	Perbaikan dapat dilakukan dengan memastikan fasilitas di area kerja alternatif dalam kondisi baik dan juga dapat berfungsi sebaik fasilitas di tempat utama (contoh Genset di kanwil denpasar, laptop dan printer di rumah dinas bengkulu (hardware dan software) dll) Improvements can be made by ensuring that the facilities in the alternative work area are in good condition and can also function as well as the facilities in the main location (for example generators at the Denpasar regional office, laptops and printers at the Bengkulu official residence (hardware and software) etc.)	8.3.5
4	Organisasi perlu memastikan bahwa informasi pendukung yang diperlukan untuk mengaktifkan rencana tersebut juga disertakan sebagai subjek latihan saat latihan dilakukan (misalnya hasil penilaian sebagai salah satu masukan untuk memastikan aktivasi BCP) The organization needs to ensure that the supporting information required to activate the plan is also included as a subject of the exercise when the exercise is carried out (e.g. assessment results as one of the inputs to ensure activation of the BCP)	8.5
5	Organisasi perlu memastikan bahwa pembentukan MTPD perlu memastikan bahwa pembentukan MTPD terkait dengan fungsi bisnis yang ditetapkan dalam BIA sejalan dengan konsep/definisi MTPD yang disebukan pada ISO 22301 dan juga memastikan bahwa setiap jenis dampak yang telah ditetapkan digunakan dalam proses penilaian dampak gangguan. Organizations need to ensure that the formation of MTPD needs to ensure that the formation of MTPD is related to the business functions specified in the BIA in line with the MTPD concept/definition referred to in ISO 22301 and also ensure that each type of impact that has been determined is used in the disruption impact assessment process.	8.2.2

b. Sosialisasi dan Uji coba BCMS pada Kantor Pusat dan 15 Kantor WIlayah/Kantor Cabang.
c. Pembentukan Tim Sertifikasi ISO 22301:2019-*Business Continuity Management System* (BCMS).
   Dalam rangka mendukung kegiatan Sertifikasi ISO 22301:2019-*Business Continuity Management System* (BCMS) sebagai *assurance* atas pemenuhan persyaratan implementasi *Business Continuity Management System* (BCMS) di Perusahaan, maka

b. Dissemination and trial of BCMS at the Head Office and 15 Regional Offices/Branch Offices.
c. Formation of the ISO 22301:2019-Business Continuity Management System (BCMS) Certification Team.
   To support the ISO 22301:2019-Business Continuity Management System (BCMS) Certification activities as assurance for the fulfillment of the requirements for implementing the Business Continuity Management System (BCMS) in the Company, it is

dipandang perlu untuk dibentuk Tim *Business Continuity Management System* (BCMS). Perusahaan telah membentuk Tim Sertifikasi ISO 22301:2019-*Business Continuity Management System* (BCMS) melalui SPT Nomor: 79111/SPT/DIRUM/SPR/IX/2023.

d. Surveilence Audit ISO 22301
Dapat dilaporkan bahwa atas pelaksanaan Audit Surveillance dan Sertifikasi ISO 22301:2019 – *Business Continuity Management System* (BCMS) tahun 2023 diperoleh hasil diantaranya:
- 1 (satu) positive commentary; dan
- 4 (empat) opportunity for improvement.

9. Terlaksananya *Internal Control Testing* (ICT)
Penilaian hasil ICT untuk setiap pengendalian internal yang diuji, diperoleh dengan menggabungkan hasil pengujian terhadap dimensi desain dan dimensi pelaksanaannya. Nilai gabungan yang mencerminkan kecukupan pengendalian internal, diperoleh dengan memetakan nilai efektivitas desain dengan pelaksanaan pengendalian internal. Nilai dan makna kecukupan pengendalian internal yaitu:

deemed necessary to form a Business Continuity Management System (BCMS) Team. The Company has formed an ISO 22301:2019-Business Continuity Management System (BCMS) Certification Team through SPT Number: 79111/SPT/DIRUM/SPR/IX/2023.

d. Surveillance Audit ISO 22301
It can be reported that the implementation of the 2023 ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System (BCMS) Surveillance and Certification Audit resulted in the following results:
- 1 (one) positive commentary; And
- 4 (four) opportunities for improvement.

9. Implementation of Internal Control Testing (ICT)
Assessment of ICT results for each internal control tested is obtained by combining the test results on the design dimensions and implementation dimensions. The combined value, which reflects the adequacy of internal control, is obtained by mapping the value of design effectiveness with the implementation of internal control. The value and meaning of adequacy of internal control are:

Rating	Range	ICT Level	Penjelasan Description
1	1,0 – 2,0	Adequate/Memadai	Pengendalian dapat mencapai tujuan pengendalian (*control objective*) yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko, yang terkait dengan tujuan dan tata kelola bisnis (*business and governance objective).* Control can achieve control objectives which are intended to reduce risks, which are related to business and governance objectives.
3	2,1 – 3,9	Partially Adequate/Sebagian Memadai	Pengendalian secara umum dapat mencapai tujuan pengendalian (*control objective*) yang dimaksudkan untuk memitigasi risiko, yang terkait dengan tujuan dan tata kelola bisnis (*business and governance objective*) namun tidak sepenuhnya konsisten dengan syarat sistem pengendalian yang sehat. Terdapat beberapa perbaikan pada area penting. Control in general can achieve control objectives which are intended to mitigate risks, which are related to business and governance objectives but are not fully consistent with the requirements of a healthy control system. There are several improvements in important areas.
5	4,0 – 5,0	Inadequate	Kombinasi pengendalian tidak cukup untuk mencapai tujuan pengendalian (*control objective*) yang dimaksudkan untuk memitigasi risiko, yang terkait dengan tujuan dan tata kelola bisnis (*business and governance objective*). The combination of controls is not sufficient to achieve control objectives which are intended to mitigate risks, which are related to business and governance objectives.

Secara umum dari hasil ICT yang dilakukan, Internal Control Perusahaan Tahun 2023 berada pada kategori Adequate dengan total skor 1,07.
In general, from the ICT results carried out, the Company's Internal Control in 2023 is in the Adequate category with a total score of 1.07.

10. Peningkatan Kompetensi: Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko
Untuk mencapai sasaran tersebut, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO), *Certified Risk Management Professional* (CRMP) dan Pelatihan *Financial Risk Manager* untuk karyawan Perusahaan.
11. Penerapan *Four Eyes Principles* di seluruh Unit Kerja Perusahaan
Salah satu tindaklanjut atas saran dan rekomendasi atas *Risk Maturity Assessment* tahun 2023 yaitu perlu adanya penerapan prinsip *Four Eyes Principles* di seluruh Unit Kerja dengan lebih efektif sehingga risiko negatif yang berpotensi terjadi dikemudian hari dapat diminimalisir kemungkinan terjadinya dan/atau dampaknya pada pencapaian sasaran Perusahaan. *Four Eyes Principles*

10. Competency Improvement: Training and Certification in the Field of Risk Management
To achieve these targets, the Risk Management Division has implemented Certified Risk Management Officer (CRMO), Certified Risk Management Professional (CRMP) Certification and Financial Risk Manager Training for Company employees.
11. Implementation of the Four Eyes Principles in all Company Work Units
One follow-up to the suggestions and recommendations for the 2023 Risk Maturity Assessment is the need to implement the Four Eyes Principles in all Work Units more effectively so that negative risks that have the potential to occur in the future can be minimized and/or have an impact on achieving the Company's targets. The Four Eyes Principles have been implemented since January

secara definitif diimplementasikan sejak 01 Januari 2023. Adapun program kerja yang telah dilakukan terkait *Four Eyes Principles* diantaranya:

a. Divisi Manajemen Risiko bersama dengan Divisi Kepatuhan telah melaksanakan Kegiatan *Workshop "Penguatan Efektivitas Implementasi Four Eyes Principle"* pada Kamis – Jumat, 26-27 Februari 2023.

b. Dalam rangka menumbuhkan *Compliance Awareness* dan *Risk Awareness,* dipandang perlu Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko melakukan evaluasi secara langsung kepada Unit Kerja Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Dapat dilaporkan bahwa Divisi Manajemen Risiko telah melakukan evaluasi Unit Kerja Kantor Cabang dan Kantor Wilayah dalam rangka membangun kesadaran *Compliance Awareness* dan *Risk Awareness*.

c. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko juga telah menyampaikan Laporan Evaluasi Implementasi *Four Eyes Principles* kepada Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko melalui Memorandum Divisi MR Nomor: B.656/INT/MRP/MRP/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.

1, 2023. The work programs that have been carried out regarding the Four Eyes Principles include:

a. The Risk Management Division together with the Compliance Division have carried out the Workshop Activity "Strengthening the Effectiveness of Implementing the Four Eyes Principle" on Thursday – Friday, 26-27 February 2023.

b. To grow Compliance and Risk Awareness, it is deemed necessary for the Compliance Division and Risk Management Division to carry out direct evaluations of Branch Office and Regional Office Work Units. It can be reported that the Risk Management Division has carried out an evaluation of Branch Office and Regional Office Work Units in order to build awareness of Compliance Awareness and Risk Awareness.

c. Apart from that, the Risk Management Division has also submitted an Evaluation Report on the Implementation of the Four Eyes Principles to the Director of Finance, Investment and Risk Management via MR Division Memorandum Number: B.656/INT/MRP/MRP/VII/2023 dated July 31, 2023.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Divisi Manajemen Risiko

KPI merupakan salah satu indikator penilai kinerja Divisi Manajemen Risiko. Pada tahun 2023, KPI Divisi Manajemen Risiko berhasil melampaui target KPI yang telah ditetapkan, berikut terlampir rincian KPI Divisi Manajemen Risiko:

Evaluation and Performance Assessment of the Risk Management Division

KPI is one of the indicators for assessing the performance of the Risk Management Division. In 2023, the KPI of the Risk Management Division succeeded in exceeding the KPI targets that had been set, below are the details of the KPI of the Risk Management Division:

KPI DIVISI MANAJEMEN RISIKO 2023

Kategori		#	KPI	Satuan	Polaritas	Bobot	Target 2023	Realisasi	Capaian	Bobot	Keterangan
NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA	FINANSIAL	1.A	EBITDA	Rp Milliar	Maximize	3	1.906	1.937	101,64%	3,05	
		1.B	ROE	%	Maximize	3	10,39%	10,85%	104,41%	3,13	
		2	Gearing Ratio Total	Kali	Minimize	3	22,41	24,33	92,10%	2,76	
	OPERASIONAL	3	Penyelesaian Audit Laporan Keuangan secara tepat waktu sesuai ketentuan	waktu	Minimize	8	31-Mar-23	06-Apr-23	98,36%	7,87	
		4	Recovery Rate Subrogation	%	Maximize	3	29,99%	20,70%	69,03%	2,07	
		5.A	Collection Rate Premi/IJP	%	Maximize	2	13,34%	10,42%	78,08%	1,56	
		5.B	Days Sales Outstanding	Hari	Minimize	2	200	138	144,91%	2,60	
		6	Penguatan manajemen Risiko	%	Maximize	10	100%	100,00%	100,00%	10,00	Telah tercapai
		7	Penyusunan laporan stress test risiko likuiditas	waktu	Minimize	8	Triwulanan	Triwulanan	100,00%	8,00	Telah disetujui Laporan Stress Test Triwulan I Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV oleh Direktur MSDM, Umum, dan MR

KPI DIVISI MANAJEMEN RISIKO 2023

Kategori	#	KPI	Satuan	Polaritas	Bobot	Target 2023	Realisasi	Capaian	Bobot	Keterangan
	8	Penyusunan framework Risk Appetite dan Risk Tolerance	waktu	Minimize	8	Dec-23	100%	100,00%	8,00	Telah tercapai. Kebijakan Risk Appetite dan Risk Tolerance tertuang pada: a. Peraturan Direksi Nomor 24/Per-Dir/4/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Kebijakan Penetapan Peringkat Risiko, Selera Risiko, Toleransi Risiko, dan Indikator Utama Risiko b. Surat Edaran Divisi Nomor 04/SE-Div/4/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Risk Appetite dan Risk Tolerance
	9	Pendampingan Implementasi Guarantee Exposure Limit	%	Maximize	8	100%	100,00%	100,00%	8,00	Telah tercapai.
	10	Implementasi Governance, Risk and Compliance (GRC)	score	Maximize	8	2,78	3,04	109,35%	8,75	Telah tercapai.
SOSIAL	7	Volume Penjaminan KUR	%	Maximize	2	100%	52%	104,85%	2,10	
INOVASI BISNIS MODEL	8.A	Hasil Underwriting Konsolidasi	Rp Milliar	Maximize	3	2.314	2.105	90,97%	2,73	
	8.B	Hasil Underwriting Non Program	Rp Milliar	Maximize	2	287	711	247,77%	2,60	
	9	Combined Ratio (COR)	%	Minimize	2	77,72%	100,84%	77,07%	1,54	
KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI	10	Implementasi sistem konsolidasi laporan keuangan terintegrasi dan MIS terintegrasi (front end dan back end)	%	Maximize	2	100%	133,33%	133,33%	2,60	
	11	Pengembangan channel pemasaran digital	Rp Milliar	Maximize	2	1,3	1,602	123,26%	2,47	
PENINGKATAN INVESTASI	12.A	Yield on investment (YoI)	%	Maximize	2	5,13	5,80%	113,08%	2,26	
	12.B	Pertumbuhan AUM Konsolidasi	%	Maximize	2	4,90%	23,13	472,01%	2,60	
	13	Pencapaian KPI PMN	%	Maximize	2	100%	100%	100,00%	2,00	
PENGEMBANGAN TALENTA	14.A	Perempuan dan Milenial (<42 tahun) dalam Top Talent	%	Maximize	3	100%	1. 33,33% 2. 16,67%	138,89%	3,90	
	14.B	Implementasi talent mobility	%	Maximize	2	10%	15,00%	150,00%	2,60	
	15	Rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko	%	Maximize	10	10%	73,91%	739,13%	13,00	Telah tercapai.
Total					**100**				**106,19**	

FUNGSI KEPATUHAN
COMPLIANCE FUNCTION

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah Perusahaan yang bersifat preventif, untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan otoritas yang berwenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat Perusahaan kepada Regulator atau pihak yang berwenang. Dalam rangka penerapan praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG), pelaksanaan fungsi kepatuhan wajib didukung oleh seluruh Insan Jamkrindo sehingga kepatuhan diharapkan menjadi budaya Perusahaan yang diimplementasikan menjadi standar prilaku setiap Insan Jamkrindo.

The Compliance Function is a series of actions or steps taken by the Company that are preventive in nature, to ensure that the policies, provisions and procedures as well as business activities carried out by the Company comply with the provisions of the competent authority and the provisions of the applicable laws and regulations, and ensure the Company's compliance with the commitments made by the Company to Regulators or authorized parties. In the context of implementing the best practices of Good Corporate Governance (GCG), the implementation of the compliance function must be supported by all Jamkrindo personnel so that compliance is expected to become a corporate culture that is implemented into a standard of behavior for every Jamkrindo employee.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 121/SKD/4/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat PT Jaminan Kredit Indonesia, M. Natsir Rahmadi dipercaya untuk menjabat Kepala Divisi Kepatuhan.

Profile of Head of Compliance Work Unit

Based on Directors Decree No. Board of Directors Decree Number 121/SKD/4/XII/2022 dated December 26, 2022 concerning Appointment and Transfer of Officials at PT Jaminan Kredit Indonesia, M. Natsir Rahmadi was entrusted with serving as Head of the Compliance Division

M. Natsir Rahmadi
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan/Head of the Compliance Division
Menjabat Sejak: 1 Agustus 2016/Served Since: August 1, 2016

Warga negara Indonesia
Usia 52 tahun
Kelahiran Pasuruan 25 Mei 1972
Berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Pendidikan
Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (1999)

Riwayat Jabatan
Berkarir di Jamkrindo sejak tahun 2003. Jabatan yang pernah dipercayakan adalah Sekretaris Perusahaan (2015-2016), Plt. Sekretaris Perusahaan (2014-2015), Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Lembaga Sekretaris Perusahaan (2014), Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Hukum dan Kepatuhan (2012-2014), dan Kepala Seksi Administrasi & Keuangan KAC Papua (2011-2012).

Sertifikasi
Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sertifikasi Manajemen Risiko Level I, Sertifikasi Manajemen Risiko Level II, dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level III

Indonesian citizens
51 years old B
orn in Pasuruan May 25, 1972
Domiciled in Bekasi, West Java, Indonesia

Education
Bachelor (S1) of Law from Brawijaya University (1999)

Position History
Has started his career at Jamkrindo since 2003. The positions that have been entrusted are Corporate Secretary (2015-2016), Acting Corporate Secretary (2014-2015), Head of Legal and Institutional Relations Section of Corporate Secretary (2014), Head of Compliance Division of Legal and Compliance Division (2012-2014), and Head of Administration & Finance Section of KAC Papua (2011-2012).

Certification
ISO 37001:2016 Certification for Anti-Bribery Management System, Level I Risk Management Certification, Level II Risk Management Certification, and Level III Risk Management Certification

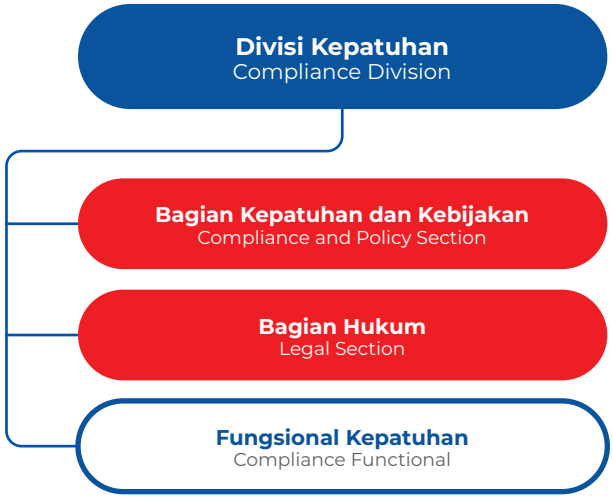
Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan

Untuk dapat menggambarkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Satuan Kerja Kepatuhan, berikut disampaikan struktur organisasi Satuan Kerja Kepatuhan yang telah disahkan berdasarkan Ketetapan Direksi Nomor 01/KD/5/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Struktur Organisasi.

Organizational Structure and Position of the Compliance Unit

To describe the functions contained in the Compliance Work Unit, the following is the organizational structure of the Compliance Work Unit which was approved based on the Decree of the Board of Directors Number 01/KD/5/VI/2023 dated June 5, 2023 concerning Organizational Structure.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan PT Jamkrindo
PT Jamkrindo Compliance Unit Organizational Structure



Hingga akhir tahun 2023, jumlah karyawan Satuan Kerja Kepatuhan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dengan rincian, sebagai berikut

Until the end of 2023, the number of Compliance Work Unit employees is 22 (twenty two) people, with details as follows:

Jabatan Position	**Jumlah (orang)** Number of (People)
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Head of Compliance Work Unit	1
Kepala Bagian Hukum Head of Legal Department	1
Kepala Bagian Kepatuhan dan Kebijakan Head of Compliance and Policy	1
Fungsional Kepatuhan Compliance Functions	11
Staf Bagian Hukum Legal Department Staff	2
Staf Bagian Kepatuhan dan Kebijakan Compliance and Policy Staff	2
Calon Karyawan Prospective Employee	1
KKWT ELH	1
KKWT Umum KKWT General	1
Agendaris Agendalist	1
Jumlah Total	**22**

Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas Divisi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Divisi Kepatuhan;
2. Pengelolaan Penyusunan Legal Drafting/Legal Review atas Dokumen:
   a. Ketetapan Direksi/Peraturan Direksi/Surat Edaran Direksi/Surat Keputusan Direksi;
   b. Perjanjian Kerja Sama/MoU/SP3 Induk;
   c. Surat Kuasa Direksi;
   d. Surat Pernyataan Direksi;

Duties of the Compliance Work Unit

The duties of the Compliance Division are as follows:

1. Compilation of Compliance Division Work Plan and Budget (RKA);
2. Management of Legal Drafting/Legal Review of the following documents:
   a. Decree of the Board of Directors/Regulation of the Board of Directors/Circular of the Board of Directors/ Decree of the Board of Directors;
   b. Main Cooperation Agreement/MoU/SP3;
   c. Directors' Power of Attorney;
   d. Board of Directors' Statement;

e. Pakta Integritas Direksi; dan
f. Surat Tugas Direksi dan lainnya.
3. Pengelolaan Penyusunan Kebijakan Internal Divisi Kepatuhan;
4. Pengelolaan Pengharmonisasian Kebijakan Internal dengan Regulasi Eksternal;
5. Pengelolaan Penyusunan Kajian Hukum (*Legal Opinion*);
6. Pengelolaan Pendampingan dan Pemberian Bantuan Hukum;
7. Pengelolaan Penyelesaian Masalah Hukum (Litigasi dan Non Litigasi);
8. Pengelolaan Penerapann 4 *Eyes Principle*;
9. Pengelolaan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Prosedur Kepatuhan Perusahaan;
10. Pengelolaan Penyusunan Ringkasan Regulasi/ Kebijakan/Ketentuan Eksternal;
11. Pengelolaan Penyusunan Pendapat Kepatuhan (Opini Kepatuhan);
12. Pengelolaan Pemantauan terhadap Pemenuhan Komitmen Sesuai Regulasi;
13. Pengelolaan Penyusunan *Board Manual*;
14. Pengelolaan Tugas sesuai Tata Laksana dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) di Unit Kerja Sebagai Bagian dari Pengendalian Internal (Internal *Control*);
15. Pengembangan Kompetensi Karyawan yang Berada di Unit Kerja;
16. Penerapan Manajemen Risiko di Unit Kerja;
17. Pengelolaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Divisi Kepatuhan; dan
18. Pengelolaan Pelaksanaan Tugas-tugas Lain dalam Lingkup Bidang Tugasnya.

e. Board of Directors' Integrity Pact; And
f. Letter of Assignment of Directors and others.
3. Management of Compliance Division Internal Policy Development;
4. Management of Harmonization of Internal Policies with External Regulations;
5. Management of Compilation of Legal Opinion;
6. Management of Assistance and Provision of Legal Aid;
7. Management of Legal Problem Settlement (Litigation and Non-Litigation);
8. Management of the Implementation of the 4 Eyes Principle;
9. Management of Compilation and Implementation of Company Compliance Policies and Procedures;
10. Management of Compilation of Summary of External Regulations/Policies/Provisions;
11. Compliance Opinion Management;
12. Monitoring Management of Fulfillment of Commitments According to Regulations;
13. Management of Manual Board Preparation;
14. Task Management in accordance with Good Corporate Governance (GCG) in Work Units as Part of Internal Control;
15. Competency Development for Employees in Work Units
16. Implementation of Risk Management in Work Units;
17. Management of the Compilation Division and Submission of Reports; And
18. Management of the Implementation of Other Duties within the Scope of Their Tasks.

Sertifikasi Profesi Satuan Kerja Kepatuhan

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan Satuan Kerja Kepatuhan, terkait Hukum dan Kepatuhan. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Satuan Kerja Kepatuhan hingga akhir tahun 2023.

Compliance Work Unit Professional Certification

Professional certification is an important aspect for auditors, in order to understand the development of the Compliance Unit, related to Law and Compliance. The followings are the professional certifications held by Compliance Work Unit employees until the end of 2023.

Nama dan Jabatan Names and Position	Jenis Sertifikasi Profesi Hukum & Kepatuhan Types of Legal and Compliance Professional Certification
Risky Putra Dewa	1. Advokat 2. Certified Legal Auditor (CLA) 3. Certified Mediator 4. Certified Banking Legal Consultant 1. Advocate 2. Certified Legal Auditor (CLA) 3. Certified Mediator 4. Certified Banking Legal Consultant
M. Rizal Fikri	1. Advokat 2. Certified Compliance Profesional (CCP) 3. Certified Mediator 4. Certified Contract Drafting (CCD) 1. Advocate 2. Certified Compliance Profesional (CCP) 3. Certified Mediator 4. Certified Contract Drafting (CCD)
Anggi Putra	Certified Legal Auditor (CLA)

Nama dan Jabatan Names and Position	Jenis Sertifikasi Profesi Hukum & Kepatuhan Types of Legal and Compliance Professional Certification
I.Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari DP	1. Advokat 2. Certified Mediator 1. Advocate 2. Certified Mediator
Muchammad Fauzan Harris	Advokat Advocate

Jumlah karyawan Satuan Kerja Kepatuhan yang memiliki sertifikasi profesi sebanyak 5 (lima) orang atau 23% dari jumlah keseluruhan karyawan Satuan Kerja Kepatuhan. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Berikut disampaikan peningkatan kompetensi yang diikuti karyawan di Satuan Kerja Kepatuhan di tahun 2023:

The number of Compliance Work Unit employees who have professional certification is 5 (five) people or 23% of the total number of Compliance Work Unit employees. The Company is committed to increasing the level of professional certification for employees, both for employees who already have professional certification and those who do not have one.

Compliance Work Unit Competency Development

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by holding competency development programs for all employees. Compliance Work Unit competency development is an effort to update knowledge to support the implementation of its duties. The following is the competency improvement followed by employees in the Compliance Work Unit in 2023:

Nama Names	Jabatan Position	Tanggal Dates	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Penyelenggara Organizers
M. Natsir Rahmadi	Kepala Divisi Kepatuhan Head of Compliance Division	9 -13 Mei 2023 May 9-13, 2023	Pelatihan dan Sertifikasi Calon Asesor Kompetensi Training and Certification of Competency Assessor Candidates	Pelatihan dan Sertifikasi Calon Asesor Kompetensi Training and Certification of Competency Assessor Candidates	Lembaga Sertifikasi Profesi Penjaminan & BNSP BNSP and Guarantee Professional Certification Institute
Risky Putra Dewa	Kabag Hukum Head of Legal Department	9 Maret 2023 March 9, 2023	BSMR Level 1	BSMR Level 1	Efektif Pro
Muhammad Rizal Fikri	Staf Bagian Section Staff	23 – 26 Mei 2023 May 23-26, 2023	Pelatihan dan Sertifikasi Compliance Management Fundamentals Training and Certification of Compliance Management Fundamentals	Pelatihan dan Sertifikasi Compliance Management Fundamentals Training and Certification of Compliance Management Fundamentals	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera & BNSP BNSP and Mitra Kalyana Sejahtera Professional Certification Institute
I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari D.P	Staf Bagian Section Staff	11 – 15 April 2023 April 11-15, 2023	Pelatihan Sertifikasi Mediator Angkatan XXXVIII Training and Certification of Mediator Batch XXXVIII	Pelatihan Sertifikasi Mediator Angkatan XXXVIII Training and Certification of Mediator Batch XXXVIII	Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Justitia & BNSP BNSP and LPK Justitia Professional Certification Institute

Nama Names	Jabatan Position	Tanggal Dates	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Penyelenggara Organizers
Mega Nursihati	Staf Bagian Hukum Legal Department Staff	20 – 23 September 2023 September 20-23, 2023	Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XVIII Training and Certification of Company Law and Industrial Relations Practitioners Class XVIII	Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XVIII Training and Certification of Company Law and Industrial Relations Practitioners Class XVIII	Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Justitia & BNSP BNSP and LPK Justitia Professional Certification Institute
Gabby Chikita Putri	Staf Bagian Kepatuhan Compliance Division Staff	20 – 23 September 2023 September 20-23, 2023	Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XVIII Training and Certification of Company Law and Industrial Relations Practitioners Class XVIII	Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Angkatan XVIII Training and Certification of Company Law and Industrial Relations Practitioners Class XVIII	Lembaga Sertifikasi Profesi LPK Justitia & BNSP BNSP and LPK Justitia Professional Certification Institute

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2023

Pengendalian anggaran secara efisien dan efektif. Sasaran tersebut dilakukan melalui strategi monitoring dan pengendalian anggaran secara periodik dan menyampaikan tingkat pencapaian anggaran kepada unit kerja yang membutuhkan.

Langkah kebijakan demi mendukung pencapaian sasaran tersebut diantaranya adalah memastikan bahwa biaya-biaya yang direalisasikan telah direncanakan/dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Perusahaan.

Dapat dilaporkan bahwa saat ini kami telah menyampaikan pencapaian anggaran Kantor Pusat periode sampai dengan Triwulan IV 2023 kepada manajemen terkait biaya-biaya dan laporan manajemen setiap bulan yang mencakup realisasi program kerja, kerjaan rutinitas dan keuangan dengan tujuan sebagai bahan evaluasi kinerja yang digunakan oleh manajemen.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Satuan Kerja Kepatuhan

Pada tahun 2023 Satuan Kerja Kepatuhan memiliki 21 program kerja, yang terdiri dari:

1. Pengembangan Aplikasi Jamkrindo *Guarantee Agreement System* (JAGAT).
2. Reviu dan harmonisasi penyesuaian anggaran dasar Perusahaan.
3. Standarisasi PKS KUR.
4. Memperbarui kontrak Kerja sama dengan praktisi/konsultan yang mempunyai kompetensi bidang hukum.
5. Standarisasi dokumen perjanjian pada dokumen suretybond.
6. Melakukan penyusunan kajian hukum transfer bisnis asuransi kredit Jasindo ke Jamkrindo dengan memperhatikan regulasi yang ada.
7. Pelatihan/*training*/sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi bidang hukum.
8. Implementasi aplikasi *monitoring* perkara hukum.

Brief Report on the Implementation of the 2023 Compliance Work Unit Tasks

Budget control efficiently and effectively. This target is carried out through a strategy of monitoring and controlling the budget periodically and conveying the level of achievement of the budget to work units that need it.

Policies to support the achievement of these targets include ensuring that realized costs have been planned/budgeted in accordance with the needs and objectives of the Company.

It can be reported that currently we have submitted the achievement of the Head Office budget for the period up to Quarter IV 2023 to management regarding costs and management reports every month, which include the realization of work programs, routine work and finances with the aim of being performance evaluation materials used by management.

Compliance Work Unit Performance Evaluation and Assessment

In 2022, the Compliance Work Unit has 21 work programs, which consist of:

1. Development of the Jamkrindo Guarantee Agreement System (JAGAT) Application.
2. Review and harmonization of adjustments to the Company's articles of association.
3. Standardization of KUR PKS.
4. Renew cooperation contracts with practitioners/consultants who have legal competence.
5. Standardization of agreement documents on suretybond documents.
6. Prepare a legal review of the transfer of Jasindo's credit insurance business to Jamkrindo by paying attention to existing regulations.
7. Training/certification to improve legal competency.
8. Implementation of legal case monitoring applications.

9. Penanganan masalah hukum dengan mengedepankan proses mediasi dan Pelaporan perkara hukum dan progress penyelesaiannya kepada pemegang saham dan pengkinian informasi perkara melalui sistem.
10. Kolaborasi Divisi Hukum IFG *Group* melalui partisipasi mengikuti event Legal Forum IFG *Group*.
11. Memonitor kinerja dari profesi jasa hukum penunjang sehingga anak perusahaan dapat memperoleh jasa hukum yang berkualitas baik sebagai bahan pertimbangan atau referensi manajemen untuk mengambil Keputusan.
12. Penyusunan peraturan perusahaan bidang hukum dan kepatuhan sesuai Pedoman Strategis Hukum dan Kepatuhan dari Induk *Holding*.
13. Pelatihan/*training*/ sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi Bidang Kepatuhan (pendekatan GRC).
14. *Self Asessment* Kepatuhan.
15. *Compliance checklist* atas alur proses penyusunan PKS pada aplikasi JAGAT.
16. Reviu Kertas Kerja *Compliance Review*/*Checklist* dalam Rangka *Four Eyes Principles*.
17. Menyusun Roadmap Kepatuhan.
18. Mengimplementasikan sistem manajemen kepatuhan terintegrasi dengan harmonisasi program kepatuhan dan digitalisasi (*i-Compliance*), termasuk tindak lanjut atas rekomendasi audit kepatuhan.
19. Pelaksanaan program budaya kepatuhan melalui penerapan digital *Compliance Awareness*.
20. Partisipasi mengikuti *event* pada forum kepatuhan di lingkungan IFG.
21. Implementasi SMAP - Re-Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001: 2016 (*Anti Bribery Management System*).

Sebanyak 21 (dua puluh satu) program kerja tersebut telah selesai dilakukan 100% pada tahun 2023.

9. Handle legal issues by prioritizing the mediation process and reporting legal cases and the progress of their resolution to shareholders and updating case information through the system.
10. Collaboration with the IFG Group Legal Division through participation in the IFG Group Legal Forum event.
11. Monitor the performance of supporting legal services professionals so that subsidiaries can obtain good quality legal services as material for management consideration or reference for making decisions.
12. Preparation of company regulations in the field of law and compliance in accordance with the Legal and Compliance Strategic Guidelines from the Parent Holding.
13. Training/certification to improve competency in the Compliance Sector (GRC approach).
14. Compliance Self-Assessment.
15. Compliance checklist for the PKS preparation process flow in the JAGAT application.
16. Review of the Compliance Review/Checklist Working Paper in the Context of the Four Eyes Principles.
17. Prepare a Compliance Roadmap.
18. Implement an integrated compliance management system with harmonization of compliance and digitalization programs (i-Compliance), including follow-up on compliance audit recommendations.
19. Implementation of a compliance culture program through the implementation of digital Compliance Awareness.
20. Participation in events at compliance forums within IFG.
21. Implementation of SMAP - Re-Certification of SMAP SNI ISO 37001: 2016 (Anti Bribery Management System).

A total of 21 (twenty one) work programs have been 100% completed in 2023.

AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL AUDIT/INTERNAL AUDIT UNIT

Audit Internal merupakan proses pengawasan atas pengelolaan operasional dan bisnis Perusahaan yang dilakukan secara internal. Fungsi Audit Internal di Jamkrindo dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. SPI bertugas melakukan *assurance* dan *consulting* yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 57/SKD/4/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Jamkrindo, Andry Septianto dipercaya untuk menjabat Kepala SPI dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Internal Audit is a process of supervising the management of the Company's operations and business which is carried out internally. The Internal Audit function at Jamkrindo is carried out by the Internal Audit Unit (SPI) led by a Head of SPI who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. SPI is tasked with conducting independent and objective assurance and consulting, with the aim of increasing added value and improving the Company's operations, through a systematic approach by evaluating and improving the adequacy and effectiveness of internal control systems, risk management and corporate governance.

The party that appoints/dismisses the Head of the Internal Audit Unit (SPI)

The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The President Director can dismiss the Head of SPI after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Head of SPI does not meet the requirements as an Internal Auditor as stipulated in the applicable regulations and or fails or is incapable of carrying out his duties.

Profile of Head of Internal Audit Unit

Based on Directors Decree No. 57/SKD/4/XII/2020 dated December 1, 2020 concerning the Appointment of the Head of the Internal Audit Unit of PT Jamkrindo, Andry Septianto was entrusted with the position of Head of SPI, and has received approval from the Board of Commissioners.

Andry Septianto
Kepala Satuan Pengawasan Intern/Head of the Internal Audit Unit
Menjabat Sejak: 1 Desember 2020/Served Since: December 1, 2020

Warga negara Indonesia
Usia 44 tahun
Kelahiran Sawit Seberang, 22 September 1978
Berdomisili di Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Pendidikan
M.M, Manajemen, Universitas Gadjah Mada, 2004

Riwayat Jabatan
Kepala Satuan Pengawasan Intern (1 Desember 2020-sekarang),
Wakil Kepala Satuan Pengawasan Intern (5 Oktober 2020-30 November 2020),
Pemimpin Cabang Bandung (31 Agustus 2018-4 Oktober 2020),
Kepala Kantor Cabang Kupang (3 Februari 2017-30 Agustus 2018)

Sertifikasi
Qualified Internal Audit (QIA) 2015

Indonesian citizens
44 years old
Born in Sawit Seberang, September 22, 1978
Domiciled in Medan, North Sumatra, Indonesia

Education
Master of Management, Gadjah Mada University, 2004

Position History
Head of Internal Audit Unit (December 1, 2020-present),
Deputy Head of Internal Audit Unit (October 5, 2020-November 30, 2020),
Bandung Branch Manager (August 31, 2018 - October 4, 2020), Head of Kupang Branch Office (February 3, 2017 - August 30, 2018)

Certification
Qualified Internal Audit (QIA) 2015

Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) Jamkrindo dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

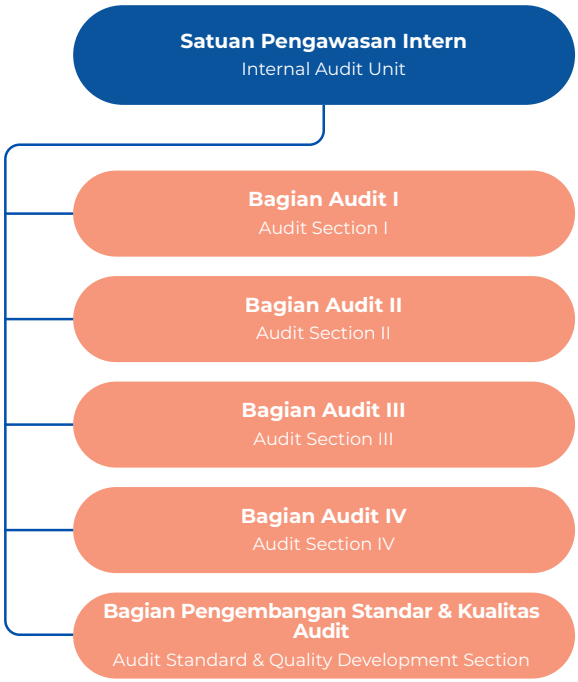
Untuk dapat menggambarkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam SPI, berikut disampaikan struktur organisasi SPI yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi 01/KD/5/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Struktur Organisasi tentang Struktur Organisasi.

Organizational Structure and Position of the Internal Audit Unit

The Jamkrindo Internal Audit Unit (SPI) is led by a Head of SPI who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The President Director can dismiss the Head of SPI after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Head of SPI does not fulfill the requirements as an Internal Auditor as regulated in the applicable regulations and/or fails or is incompetent in carrying out his duties.

To be able to describe the functions contained in the SPI, the following is the organizational structure of the SPI that has been approved based on the Decree of the Board of Directors No. 01/KD/5/VI/2023 dated June 5, 2023 concerning Organizational Structure.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) Jamkrindo
Organizational Structure of the Jamkrindo Internal Audit Unit (SPI).



Mengingat tugas pengawasan yang diemban SPI memegang peranan yang sangat penting, maka jumlah dan kualitas personil SPI diupayakan memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugasnya. Pada periode 2023, jumlah karyawan SPI adalah 28 (dua puluh delapan) orang, dengan rincian, sebagai berikut:

Bearing in mind that the supervisory duties carried out by SPI play a very important role, the number and quality of SPI personnel are made to be adequate so that they can support the implementation of their duties. In the 2023 period, the number of SPI employees is 28 (twenty eight) people, with details as follows:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Number of (People)
Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	1
Kepala Bagian Audit Head of Audit Section	5
Fungsional Senior Specialist Senior Specialist Functions	1
Fungsional Middle Specialist Middle Specialist Functions	1

Jabatan Position	Jumlah (orang) Number of (People)
Fungsional Senior Analyst Senior Analyst Functions	5
Fungsional Middle Analyst Middle Analyst Functions	8
Staf Staff	7
Calon Karyawan Prospective Employee	0
KKWT Pro-Hire	0
Jumlah Total	**28**

Piagam SPI (Internal Audit Charter)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) mempunyai Audit Charter yang ditetapkan pada Ketetapan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia nomor: 04/KD/1/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) dan Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No.34/Per-Dir/1/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kebijakan Audit Internal.

Di samping itu, Internal Audit Charter merupakan pemenuhan compliance perusahaan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada BUMN dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

SPI Charter (Internal Audit Charter)

The Internal Audit Unit (SPI) has an Audit Charter stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Guarantee Credit Indonesia number: 04/KD/1/XII/2023 dated December 29, 2023 concerning the Internal Audit Charter and Regulation of the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No.34/Per-Dir/1/XII/2023 December 29, 2023 concerning Internal Audit Policy.

In addition, the Internal Audit Charter is a fulfillment of Company compliance in implementing the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises in SOE and Republic of Indonesia Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.

Visi dan Misi SPI

SPI's Vision and Missions

Visi
Menjadi strategic business partner yang independen, objektif, profesional, terpercaya, tanggap melalui kegiatan assurance dan consulting serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
Vision
To become a strategic business partner that is independent, objective, professional, trusted, responsive through assurance and consulting activities and can provide added value to the Company.

Misi
Aktif melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas Perusahaan meliputi proses pengendalian manajemen, operasional, dan pengelolaan risiko dalam peningkatan kinerja Perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG.
Meningkatkan peran pemeriksaan intern dan kualitas hasil pengawasan melalui peningkatan kompetensi Auditor Internal dan pemanfaatan sistem informasi.
Mengupayakan pelayanan konsultasi untuk meningkatan nilai-nilai Perusahaan dan sistem pendukungnya, memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas Perusahaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan, *business best practice*, dan prosedur serta kebijakan yang ditetapkan.
Memberikan nilai tambah yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, proaktif, antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar permasalahan, dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.
Missions
Actively supervise all Company activities including management control, operational and risk management processes in improving the Company's performance through increasing the efficiency and effectiveness of the Company's activities based on GCG principles.
Increase the role of internal audit and quality of supervision results through increasing the competence of Internal Auditors and utilization of information system.
Strive for consulting services to improve the values of the Company and its support system, provide assurance that all Company activities have been performed in accordance with the regulations, the business best practices, and the established procedures and policies.
Provide added value that focuses on business processes and customers, is proactive, enthusiastic and reliable, can communicate effectively, is able to find the root of the problem, and can make an optimal use of information technology system.

Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) terkait dengan Pemeriksaan Internal Perusahaan

Dalam menjalankan Pemeriksaan Internal pada Perusahaan, SPI Jamkrindo bertugas:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjalankan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan anggarannya;
3. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan pemeriksaan lainnya atas tugas sesuai arahan dan persetujuan Direktur Utama;
4. Melakukan *review* dan evaluasi penerapan GCG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan organisasi yang berlaku serta memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko dengan membantu Perusahaan mengidentifikasi besaran risiko yang signifikan;
5. Melakukan koordinasi kegiatan SPI dengan kegiatan unit kerja lainnya di lingkungan Perusahaan dan mengevaluasi kecukupan indikator pengukuran kinerja yang digunakan;
6. Menyusun dan menyempurnakan standar kerja audit internal dan pedoman audit internal dan mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan SPI;
7. Menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada pihak-pihak terkait;
8. Melakukan *monitoring* dan pelaksanaan atas tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal serta memberikan jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya terkait dengan fungsi pengawasan;
9. Berkoordinasi dengan pihak eksternal berdasarkan penugasan dari Direktur Utama dalam kaitan dengan tugas-tugas pengawasan;
10. Meningkatkan kompetensi pemeriksaan intern melalui pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, SPI bertanggung jawab untuk:

1. Menyelenggarakan program kerja pengawasan atas pelaksanaan semua kebijakan dan keputusan Direksi serta program kerja Perusahaan;
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada bidang Pengawasan Intern Perusahaan yang berkaitan dengan pemeriksaan kegiatan operasional dan administrasi & keuangan;
3. Melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran laporan atau informasi mengenai segala hal yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan;
4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama mengenai hasil audit, berikut saran perbaikannya;
5. Menilai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melakukan penilaian dan pemantauan atas semua sistem, prosedur, ketentuan dan operasional Perusahaan untuk mendorong efektivitas dan ketaatan

The Duties of the Internal Audit Unit (SPI) Related to the Company's Internal Audit

In carrying out Internal Examination at the Company, SPI Jamkrindo has the following duties:

1. Assist the duties of the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by carrying out operationally both in terms of planning, implementing and monitoring audit results;
2. Coordinate and integrate the preparation of the Annual Audit Work Program (PKAT) and its budget;
3. Carry out routine inspections according to the Annual Audit Work Program (PKAT) and other inspections of tasks according to the direction and approval of the President Director;
4. Review and evaluate the implementation of GCG in presenting assessments in accordance with applicable organizational regulations/policies and contributing to the improvement of the risk management process by helping the Company identify significant risk levels;
5. Coordinate SPI activities with the activities of other work units within the Company and evaluate the adequacy of the performance measurement indicators used;
6. Compile and refine internal audit work standards and internal audit guidelines and coordinate the preparation of SPI activity reports;
7. Deliver Audit Reports (LHA) to related parties;
8. Monitor and implement follow-up on the results of internal and external audits and provide objective consulting services to management and other work units related to the oversight function;
9. Coordinate with external parties based on assignments from the President Director in relation to supervisory duties;
10. Improve internal audit competence through education and training.

To carry out these main tasks, SPI is responsible for:

1. Carrying out a work program of supervising the implementation of all policies and decisions of the Board of Directors as well as the Company's work programs;
2. Coordinating and controlling the implementation of activities in the field of Company Internal Control relating to inspection of operational and administrative & financial activities;
3. Conducting research and test the veracity of reports or information regarding all matters that may cause losses to the Company;
4. Prepare and submit reports to the President Director regarding audit results, along with suggestions for improvement;
5. Assessing compliance with existing regulations, by conducting assessments and monitoring of all systems, procedures, provisions and operations of the Company to encourage effectiveness and compliance in their

dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/pengelolaan risiko usaha;
6. Menilai sistem pengendalian intern perusahaan;
7. Menilai kewajaran laporan keuangan dan menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional/non operasional perusahaan;
8. Memberikan pendapat, usulan dan saran perbaikan atas kegiatan operasional/non operasional;
9. Memotivasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh setiap unit kerja dan wajib melakukan penilaian dan pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut oleh semua Organ Perusahaan;
10. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindaklanjut hasil audit atas hasil audit SPI maupun auditor eksternal dan melaporkan hasil pantauan tersebut kepada Direktur Utama;
11. Menjadi mitra kerja auditor eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan ataupun pemeriksaan lainnya.

implementation and provide recommendations to the Board of Directors regarding business risk control/ management;
6. Assessing the Company's internal control system;
7. Assessing the fairness of the financial statements and assessing the efficiency and effectiveness of the Company's operational/non-operational activities; 8
8. Providing opinions, suggestions, and suggestions for improvements to operational/non-operational activities;
9. Motivating the implementation of GCG principles by each work unit and must evaluate and monitor the implementation of these principles by all Company Organs;
10. Monitoring the implementation of follow-up audit results on SPI and external auditor audit results and reporting the monitoring results to the President Director.
11. Becoming a partner of external auditors in carrying out audits of Company financial reports or other audits.

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Auditor Internal

SPI Jamkrindo aktif sebagai anggota pada Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Asuransi Negara dan Jasa Keuangan (Asgara Jaskeu Plus). Keikutsertaan SPI dalam forum tersebut berguna untuk sharing pengetahuan dan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan intern sesama BUMN.

Participation in the Professional Association of Internal Auditors

Jamkrindo's SPI is active as a member of the Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI) for State Insurance and Financial Services (Asgara Jaskeu Plus). SPI's participation in the forum is useful for sharing knowledge and information regarding internal inspection activities among SOEs.

Sertifikasi Profesi Satuan Pengawasan Intern

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan SPI hingga akhir tahun 2023.

Internal Audit Unit Professional Certification

Professional certification is an important aspect for auditors to understand audit developments, particularly in relation to regulatory compliance and industry developments. The following is the professional certification held by SPI employees until the end of 2023.

No	Nama Names	Jabatan Position	Jenis Sertifikasi Profesi Audit Internal Types of Internal Audit Professional Certification
1	Andry Septianto	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	Qualified Internal Audit (QIA)
2	Bani Dwi Perdaniwati	Kepala Departemen Audit Departemen Pengendalian Standar & Kualitas Audit Head of Audit Standards and Quality Control Department	Qualified Internal Audit (QIA) Profesional Internal Audit (PIA)
3	Laurdes Sinurat	Kepala Departemen Audit Departemen I Head of Audit Department I	Qualified Internal Audit (QIA) Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)
4	Rachmat Firdaus	Kepala Departemen Audit Departemen IV Head of Audit Department IV	Qualified Internal Audit (QIA) Certified Forensik Auditor (CfrA)
5	Arry Andru Palapi	Senior Specialist Departemen Quality Assurance Quality Assurance Department Senior Specialist	Qualified Internal Audit (QIA)
6	Andik Sugiarto	Senior Analyst Departemen III Senior Analyst Department III	Qualified Internal Audit (QIA)

No	Nama Names	Jabatan Position	Jenis Sertifikasi Profesi Audit Internal Types of Internal Audit Professional Certification
7	Andi Aldino Chandra	Senior Analyst Departemen I Senior Analyst Department I	Qualified Internal Audit (QIA) Certified Forensik Auditor (CfrA)
8	Aldhy Haryono Fachrial	Senior Analyst Departemen Pengendalian Standar & Kualitas Audit Audit Standards and Quality Control Department Senior Analyst	Qualified Internal Audit (QIA)
9	Andreas Theodorus Mokodaser	Senior Analyst Departemen IV Senior Analyst Department IV	Qualified Internal Audit (QIA) Certified Forensik Auditor (CfrA)
10	Michael Ranap Simanjuntak	Senior Analyst Departemen II Senior Analyst Department II	Qualified Internal Audit (QIA) Certified Forensik Auditor (CfrA)
11	Asep Ginanjar Cahya Gumilar	Middle Analyst Bagian Quality Assurance Quality Assurance Department Middle Specialist	Qualified Internal Audit (QIA)
12	Arif Syachroni	Middle Analyst Departemen Pengendalian Standar & Kualitas Audit Audit Standards and Quality Control Department Middle Analyst	Qualified Internal Audit (QIA)
13	Laila Wijayanti	Middle Analyst Departemen II Middle Analyst Department II	Qualified Internal Audit (QIA)
14	Rinjani Yusni Maharjanti	Middle Analyst Departemen Pengendalian Standar & Kualitas Audit Audit Standards and Quality Control Department Middle Analyst	Qualified Internal Audit (QIA)
15	Muhammad Ilham	Middle Analyst Departemen IV Middle Analyst Department IV	Qualified Internal Audit (QIA)
16	M. Gustav Qhadafi	Middle Analyst Departemen Pengendalian Standar & Kualitas Audit Audit Standards and Quality Control Department Middle Analyst	Qualified Internal Audit (QIA)
17	Emmerisa Br. Sembiring	Middle Analyst Bagian Quality Assurance Quality Assurance Department Middle Analyst	Qualified Internal Audit (QIA)
18	Indra Budi Setyawan	Staf Departemen Audit I Audit Department I Staff	Qualified Internal Audit (QIA)
19	Laode Shalihi Ismail	Staf Departemen Audit III Audit Department III Staff	Qualified Internal Audit (QIA)

Jumlah karyawan SPI yang memiliki sertifikasi profesi sebanyak 19 (sembilan belas) orang atau 61,29% dari jumlah keseluruhan karyawan SPI. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan SPI, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

The number of SPI employees who have professional certification is 19 (nineteen) people or 61.29% of the total SPI employees. The Company is committed to increasing the level of professional certification for SPI employees, both for employees who already have professional certification and those who do not have one.

Pengembangan Sumber Daya Auditor

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi SPI merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas audit internal. Berikut disampaikan peningkatan kompetensi yang diikuti karyawan Kepala SPI di tahun 2023:

Auditor Resource Development

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by holding competency development programs for all employees. SPI competency development is an effort to update knowledge to support the implementation of internal audit tasks. The following is the competency improvement that was followed by SPI employees in 2023

No	Nama Pelatihan Training Names	Penyelenggara Organizers	Tanggal Pelatihan Training Dates	Nama Peserta Participant Names	Jabatan Positions
1	*Awareness* dan Audit Internal ISO 9001:2015 Awareness and Internal Audit ISO 9001:2015	PT Sucofindo	18 s.d 20 Januari 2023 January 18-20, 2023	Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
2				Bani Dwi Perdaniwati	Kabag PSKA Head of PSKA Section
3				Andik Sugiarto	Fungsional Audit I Audit I Functions
4				Aldhy Haryono F	Fungsional PSKA PSKA Functions
5				Andreas Thedorus M	Fungsional Audit IV Audit IV Functions
6				Laila Wijayanti	Fungsional Audit I Audit I Functions
7				Indra Budi Setiyawan	Staf Audit I Audit I staff
8	Sosialisasi tentang Kebijakan Pengelolaan Bidang Hukum Dissemination of Legal Management Policies	Divisi Kepatuhan PT Jamkrindo Jamkrindo Compliance Division	19 Januari 2023 January 19, 2023	Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
9	*Workshop legal sharing session*	Holding BPUI	26 Januari 2023 January 26, 2023	Asep Ginanjar	Fungsional PSKA PSKA Functions
10	*Sharing Session Dashboard* Keuangan	Internal PT Jamkrindo Pembicara : Komisaris Utama (Bp. Krisna) Internal PT Jamkrindo Speaker: President Commissioner (Mr. Krisna)	27 Januari 2023 January 27, 2023	Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
11				Bani Dwi Perdaniwati	Kabag PSKA Head of PSKA Section
12	Webiner Mengenai Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Fraud Webinar Regarding Investigative Examinations and Calculation of Fraud Losses	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Service Authority (OJK)	24 Februari 2023 February 24, 2023	Bani Dwi Perdaniwati	Kabag PSKA Head of PSKA Section
13				Andreas Thedorus M	Fungsional Audit IV Audit IV Functions
14	Pelatihan *Awareness & Requirement* Perluasan Penerapan ISO 37001 SMAP PT Jamkrindo Tahun 2023 Awareness & Requirements Training Expansion of Implementation of ISO 37001 SMAP PT Jamkrindo in 2023	Konsultan Pendamping (Cevral Consulting) Accompanying Consultant (Cevral Consulting)	21 Maret 2023 March 21, 2023	Agus Mirazul	Kabag Audit III Audit III Section Head
				Arry Andru	Fungsional QA QA Functions
				Andi Aldino	Fungsional Audit I Audit I Functions
				Annisa	Staf Audit I Audit I Staff
				Laode	Staf Audit II Audit III Staff I
15	Pelatihan & Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Dasar Basic Level Qualified Internal Audit (QIA) Training & Certification	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)	3 – 17 April 2023 April 3-17, 2023	1. Indra Budi Setiyawan	Staf Audit I Audit I Staff
				2. Annisa Liviai Ramadhani	Staf Audit II Audit II Staff
				3. Laode Shalihi Ismail	Staf Audit III Audit I Staff

No	Nama Pelatihan Training Names	Penyelenggara Organizers	Tanggal Pelatihan Training Dates	Nama Peserta Participant Names	Jabatan Positions
16	*Awareness* Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Berdasarkan ISO 27000:2013 Information Security Management System (ISMS) Awareness Based on ISO 27000:2013	Divisi Operasional TI IT Operational Division	6 April 2023 April 6, 2023	1. Bani Dwi Perdaniwati	Kabag PSKA Head of PSKA Section
17	*Be Aware of Cyber Attack: Are You at Risk ?*	Divisi Operasional TI IT Operational Division	14 April 2023 April 14, 2023	2. Indra Budi Setiyawan	Staf Audit I Audit I Staff
18	Pelatihan Internal Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Anti-Bribery Management System (SMAP) Internal Audit Training	Cevral Consulting	9 Mei 2023 May 9, 2023	Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
				Agus Mirazul Fajar	Kabag Audit III Head of Audit III Section
				Arry Andru Palapi	Fungsional QA QA Functions
				Muhammad Ilham	Fungsional Audit IV Audit IV Functions
				Muhammad Leonard Gustav	Fungsional PSKA PSKA Functions
				Andesa Putra	Fungsional QA QA Functions
				Andi Aldino C	Fungsional Audit I Audit I Functions
				Annisa Livia	Staf Audit II Audit II Staff
				Laode Salihi Ismail	Staf Audit III Audit III Staff
19	Pelatihan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) pada Program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) Training on Procedures for Calculating Domestic Component Level (TKDN) in the Program for Increasing the Use of Domestic Products (P3DN)	PT Synerga Tata Internasional	11-12 Mei 2023 May 11-12, 2023	Asep Ginanjar Cahya Gumilar	Fungsional QA QA Functions
				Laila Wijayanti	Fungsional audit II Audit II Functions
20	*Executive Leader Program: Leaders as an Agent of Change*	Pahala David Pandjaitan, S.H, MBM, CWM. (Professional Trainer, Komisaris Utama Bank Dassa) Pahala David Pandjaitan, S.H, MBM, CWM. (Professional Trainer, President Commissioner of Bank Dassa)	26 Mei 2023 May 26, 2023	Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
21	Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Guarding Productivity for Economic Transformation	BPKP	14 Juni 2023 June 14, 2023	Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
				Andru	Fungsional QA QA Functions
22	Pelatihan IT Audit Fundamental Fundamental IT Audit Training	IIA Indonesia	19 -20 Juni 2023 June 19-20, 2023	Rachmat Firdaus	Kabag Audit IV Audit IV Section Head

No	Nama Pelatihan Training Names	Penyelenggara Organizers	Tanggal Pelatihan Training Dates	Nama Peserta Participant Names	Jabatan Positions
23	*Introduction To Digital Product Management*	Peruri Digital Academy	21 Juni 2023 June 21, 2023	Laode Shalihi ismail	Staf Audit III Audit III Staff
				Indra Budi S	Staf Audit I Audit I Staff
				Annisa Livia R	Staf Audit II Audit II Staff
24	*Transfiguring Internal Audit: Embracing Agile Practices to Enhance Audit Efficiency and Effectiveness*	SPA Feb- UI 2023	23 Juni 2023 June 23, 2023	1. Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
				2. Bani Dwi P	Kabag PSKA Head of PSKA Section
25	ESG For Auditor	FKSPI	13 Juli 2023 July 13, 2023	1. Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
				2. Bani Dwi P	Kabag PSKA Head of PSKA Section
26	*Upskilling Through Virtual Learning* (JURNAL) – Peningkatan Awareness Keamanan Informasi Upskilling Through Virtual Learning (JURNAL) – Upskilling Information Security Awareness	Divisi Operasional TI IT Operational Division	14 Juli 2023 July 14, 2023	1. Bani Dwi P	Kabag PSKA Head of PSKA Section
				2. Aldhy HaryonoF	Fungsional PSKA PSKA Functions
				3. Indra Budi	Staf Audit I Audit I Staff
27	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Pasar Modal Get to Know More About the Regulations on the P2SK Law in the Context of Strengthening the Capital Market Sector	OJK RI	20 Juli 2023 July 20, 2023	1. Bani Dwi P	Kabag PSKA Head of PSKA Section
				2. Aldhy Haryono	Fungsional PSKA PSKA Functions
				3. Rinjani Yusni	Fungsional PSKA PSKA Functions
				4. Arif Syachroni	Fungsional PSKA PSKA Functions
				5. Leonard Gustav	Fungsional PSKA PSKA Functions
				6. M Ilham	Fungsional Audit IV Audit IV Functions
				7. Emmerisa	Fungsional QA QA Functions
				8. Aulia Vantie Fajriani	Cakar Prospective Employee
28	*Tax Training* Kupas Tuntas Praktis Pajak Atas Natura/Kenikmatan Tax Training Complete Study on Practical Taxes on Natura/Enjoyment	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Indonesian General Insurance Association (AAUI)	21 Juli 2023 July 21, 2023	1. Laurdes Sinurat	Kabag Audit I Audit I Section Head
				2. Andesa Putra	Fungsional QA QA Functions
				3. Indra Budi	Staf Audit I Audit I Staff
29	Pelatihan Pajak atas Natura dan/atau Kenikmatan Tax Training on Natura/Enjoyment	Wahyu Aji M.SE.BKP (QAM. Y Consulting)	25 Juli 2023 July 25, 2023	1. Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
				2. Bani Dwi P	Kabag PSKA Head of PSKA Section
				3. Indra Budi	Staf Audit I Audit I Staff

No	Nama Pelatihan Training Names	Penyelenggara Organizers	Tanggal Pelatihan Training Dates	Nama Peserta Participant Names	Jabatan Positions
30	Program Pelatihan Effective *Stress Management* Effective Stress Management Training Program	IFG Corporate University (BeKerja sama dengan PT Jasindo Bangun Insani) IFG Corporate University (In collaboration with PT Jasindo Bangun Insani)	25 -26 Juli 2023 July 25-26, 2023	1. Hijrah istiqo	Fungsional TI IT Functions
				2. Emmerisa Sembiring	Fungsional QA QA Functions
31	*Basic Financial Statement Analysis*	IFG Corporate University (bekerja sama dengan Daksanaya) IFG Corporate University (In collaboration with Daksanaya)	27-28 Juli 2023 July 27-28, 2023	1. Michael Ranap	Fungsional Audit II Audit II Functions
				2. Leonard Gustav	Fungsional PSKA PSKA Functions
32	Pelatihan & Sertifikasi Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Lanjutan Advanced Qualified Internal Audit (QIA) Training & Certification	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)	7 – 21 Agustus 2023 August 7 – 21, 2023	Bani Dwi Perdaniwati	Kabag PSKA Head of PSKA Section
				Indra Budi Setiyawan	Staf Audit I Audit I Staff
				Laode Shalihi Ismail	Staf Audit III Audit III Staff
33	*Knowledge Management for Perfomance and Innovation* Alvin Soleh (Founder & Principal Consultan KM Plus)	Divisi MSDM HRM Division	18 Agustus 2023 August 18, 2023	Bani Dwi Perdaniwati	Kabag PSKA Head of PSKA Section
				Aldhy Haryono F	Fungsional PSKA PSKA Functions
				Indra Budi Setiyawan	Staf Audit I Audit I Staff
34	*Webinar Leadership in Changing Atmosphere*	OJK RI	24 Agustus 2023 August 24, 2023	Bani Dwi Perdaniwati	Kabag PSKA Head of PSKA Section
				Aldhy Haryono F	Fungsional PSKA PSKA Functions
				Emmerisa Sembiring	Fungsional QA QA Functions
				Arif Syachroni	Fungsional PSKA PSKA Functions
				M Leonard Gustav	Fungsional PSKA PSKA Functions
				Rinjani Yusni	Fungsional PSKA PSKA Functions
				Andes Putra	Fungsional QA QA Functions

No	Nama Pelatihan Training Names	Penyelenggara Organizers	Tanggal Pelatihan Training Dates	Nama Peserta Participant Names	Jabatan Positions
35	Persiapan teknis pengisian HC *Maturity Assessment* PT Jamkrindo Technical preparation for filling out PT Jamkrindo's HC Maturity Assessment	Divisi MSDM HRM Division	25 Agustus 2023 August 25, 2023	Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
36	*Sharing Knowledge* dan *Refreshment framework* COBIT 2019 Sharing Knowledge and Refreshment framework COBIT 2019	Divisi MSDM HRM Division	25 Agustus 2023 August 25, 2023	M Leonard Gustav	Fungsional PSKA PSKA Functions
				Andreas Theodorus	Fungsional Audit IV Audit IV Functions
37	*Program Branch Manager Development Program* (BMDP)	PPM Manajemen PPM Management	31 Agustus - 1 September 2023 August 31-September 1, 2023	Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
38	Brevet Analisa Kredit Batch 7 – Jakarta Batch 7 Credit Analysis Brevet - Jakarta	Bapak Triwidodo, SE, MM (Risk Monitoring Committee, PT Bank Raya Indonesia, Tbk)	31 Agustus - 2 September 2023 August 31-September 2, 2023	Hidjrah Istiqo Kumoro	Fungsional Audit TI IT Audit Functions
				Aulia Vantie Fajriani	Cakar Prospective Employee
39	Pelatihan Penilaian Satuan Pengawasan Intern (SPI) Korporasi dengan Internal Audit Capability Model (IACM) Corporate Internal Audit Unit (SPI) Assessment Training using the Internal Audit Capability Model (IACM)	BPKP	11 - 15 September 2023 September 11-15, 2023	Arry Andru	Fungasional QA QA Function
				Rinjani Yusni	Fungsional PSKA PSKA Functions
				Arif Syachroni	Fungsional PSKA PSKA Functions
				Emmerisa Sembiring	Fungsional QA QA Functions
40	*Certified Practitioner of Internal Audit* (CPIA)	YPIA	11- 22 September 2023 September 11-22, 2023	Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
				Laurdes Sinurat	Kabag Audit I Audit I Section Head
41	*Young Talent Summit* 2023 Tempat: Hotel Aston Bogor Place : Aston Bogor Hotel	Markplus Institute	22-23 September 2023 September 22-23, 2023	Indra Budi	Staf Audit I Audit I Staff
				Laode Salihi	Staf Audit III Audit III Staff
42	*Program Leader as a Coach*	MSDM Jamkrindo	10 Oktober 2023 October 10, 2023	Andry Septianto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit

No	Nama Pelatihan Training Names	Penyelenggara Organizers	Tanggal Pelatihan Training Dates	Nama Peserta Participant Names	Jabatan Positions
43	Pelatihan *Quality Assurance* Fungsi Audit Internal (QAIA) Internal Audit Function Quality Assurance Training (QAIA)	YPIA	23 -24 Oktober 2023 October 23-24, 2023	Arry Andru P	Fungsional QA QA Functions
				Emmerisa Sembiring	Fungsional QA QA Functions
				Asep Ginanjar	Fungsional QA QA Functions
				Andesa Putra	Fungsional QA QA Functions
44	Brevet Analisa Kredit *Batch* 8 – Jakarta Batch 8 Credit Analysis Brevet - Jakarta	*Risk Monitoring Committee*, PT Bank Raya Indonesia, Tbk	26 -28 Oktober 2023 October 26-28, 2023	Andesa Putra	Fungsional QA QA Functions
				Alya	Staf Audit III Audit III Staff
45	Penghitungan Kerugian Negara Calculation of State Losses	IFG Corporate University (bekerja sama dengan Badiklat PKN BPK) IFG Corporate University (In collaboration with PKN BPK Training Center)	13 s.d 14 November 2023 November 13-14, 2023	Andreas Theodorus	Fungsional Audit IV Audit IV Functions
				Tsany	Staf Audit I Audit I Staff
			15 s.d 16 November 2023 November 15-16, 2023	Laila Wijayanti	Fungsional Audit II Audit II Functions
				M ilham	Fungsional Audit IV Audit IV Functions
46	The 4th Indonesia *Human Capital Summit* 2023	FHCI	6 s.d 7 November 2023 November 6-7, 2023	Bani Dwi Perdaniwati	Kabag PSKA Head of PSKA Section
47	*Training* Manajemen Risiko dan Sosialisasi Pengisian Kuesioner *Risk Maturity Assessment* Risk Management Training and Dissemination on Completing the Risk Maturity Assessment Questionnaire	Divisi MSDM HRM Division	14 Desember 2023 December 14, 2023	Bani Dwi Perdaniwati	Kabag PSKA Head of PSKA Section

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2023

Melalui Disposisi Plt. Direktur Utama pada tanggal 29 Desember 2023 terhadap memorandum Satuan Pengawasan Intern No.1537/INT/SPI/PKA/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penyampaian Program Kerja Strategis dan Perencanaan Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Pengawasan Intern tahun 2023, bahwa pada pelaksaan audit tahun 2023, SPI akan melaksanakan audit pada 13 (tiga belas) Divisi, 9 (sembilan) Kantor Wilayah dan 33 (tiga puluh tiga) Kantor Cabang/Kantor Cabang Khusus.

Brief Report on the Implementation of SPI Duties in 2023

Through the Disposition of Acting President Director on December 29, 2023 regarding Internal Audit Unit memorandum No.1537/INT/SPI/PKA/XII/2022 dated December 29, 2022 concerning Submission of the Strategic Work Program and Annual Audit Work Planning (PKAT) of the Internal Audit Unit for 2023, that in carrying out audits in 2023, SPI had carried out audits in 13 (thirteen) Divisions, 9 (nine) Regional Offices and 33 (thirty three) Branch Offices/ Special Branch Offices.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Satuan Pengawasan Intern

Sampai dengan akhir tahun 2023, telah terdapat penyelesaian tindak lanjut sebesar 92,01% atau 967 dari 1.051 atas rekomendasi yang diberikan. Sedangkan 84 rekomendasi atau sebesar 7,99% belum memasuki tanggal jatuh tempo tindak lanjut auidt.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Kepatuhan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan

Jamkrindo senantiasa menjamin bahwa semua kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Perusahaan, dengan tujuan sebagai berikut;

1. Tersedianya Informasi Keuangan dan Manajemen yang Lengkap, Akurat, Tepat Guna, dan Tepat Waktu atau Tujuan Informasi (Tujuan Informasi);
2. Dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Efektivitas dan Efisiensi dalam Kegiatan Usaha (Tujuan Operasional);
4. Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Perusahaan dari Risiko kerugian;
5. Meningkatkan Efektivitas Budaya Risiko (*Risk Culture*) pada Organisasi Perusahaan Secara Menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko);
6. Dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Perusahaan secara berkesinambungan.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Jamkrindo menetapkan Sistem Pengendalian Intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perusahaan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali.

Sistem Pengendalian Intern mendukung pencapaian tujuan kinerja usaha, untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

Jamkrindo menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) – Internal Control Integrated Framework dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Evaluation and Assessment of Internal Audit Unit Performance

By the end of 2023, there had been 92.01% or 967 out of 1,051 follow-up completions for the recommendations given. Meanwhile, 84 recommendations or 7.99% had not yet reached the due date for follow-up audits.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Compliance with Provisions and Legislation

Jamkrindo always guarantees that all business activities have been carried out in accordance with statutory provisions and regulations, both provisions issued by the government, the Financial Services Authority, and internal policies, provisions and procedures established by the Company, with the following objectives;

1. Availability of Complete, Accurate, Effective and Timely Financial and Management Information or Information Purpose;
2. Intended to ensure the availability of reports that are complete, accurate, appropriate and timely required in the context of making decisions that are appropriate and accountable;
3. Effectiveness and Efficiency in Business Activities (Operational Objectives);
4. Intended to increase the effectiveness and efficiency of the use of assets and other resources in order to protect the Company from the risk of loss;
5. Improving the Effectiveness of Risk Culture in the Company Organization as a Whole (Objectives of Risk Culture);
6. Intended to identify weaknesses and assess irregularities early as well as reassess the fairness of existing policies and procedures in the Company on an ongoing basis.

Review of the Effectiveness of the Internal Control System

Jamkrindo establishes the Internal Control System as an important monitoring component in the management of the Company and serves as a reference for healthy and controlled operational activities.

The Internal Control System supports the achievement of business performance goals, to increase value for stakeholders, minimize the risk of loss and maintain compliance with applicable laws and regulations.

Jamkrindo implements an Internal Control System that refers to COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – Internal Control Integrated Framework in compiling an internal control framework that ensures adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, and compliance with applicable laws and regulations.
Statement of the Board of Directors and/or Board of

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

Manajemen dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa Jamkrindo telah memiliki standar acuan kerja yang berlaku bagi seluruh divisi dan fungsi yang ada di Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian internal dalam aktivitas operasional harian.

The management, in this case the Board of Commissioners and Board of Directors, considers that Jamkrindo has work reference standards that apply to all divisions and functions in the Company as the party responsible for implementing internal control in daily operational activities.

Sistem pengendalian internal Jamkrindo yang berjalan saat ini telah sesuai dengan COSO *Framework*, pengendalian internal melibatkan seluruh pihak dalam Perusahaan dimulai dari karyawan, pejabat sampai pada Direksi dan Dewan Komisaris.

Jamkrindo's internal control system that is currently running is in accordance with the COSO Framework, internal control involves all parties within the Company starting from employees, officials to the Board of Directors and Board of Commissioners.

Tujuan pengendalian internal yang akan dicapai Perusahaan sesuai dengan COSO *Framework* meliputi tujuan operasional yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, tujuan pelaporan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang andal, tepat waktu dan transparan sebagaimana ditetapkan oleh regulator serta tujuan kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.

The internal control objectives that will be achieved by the Company in accordance with the COSO Framework include operational objectives related to the effectiveness and efficiency of operational activities, reporting objectives related to reliable, timely and transparent financial reporting as determined by the regulator as well as compliance objectives related to regulatory compliance and applicable laws.

AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik, atau proses audit yang dilakukan pihak eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Akuntan Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

PUBLIC ACCOUNTANT

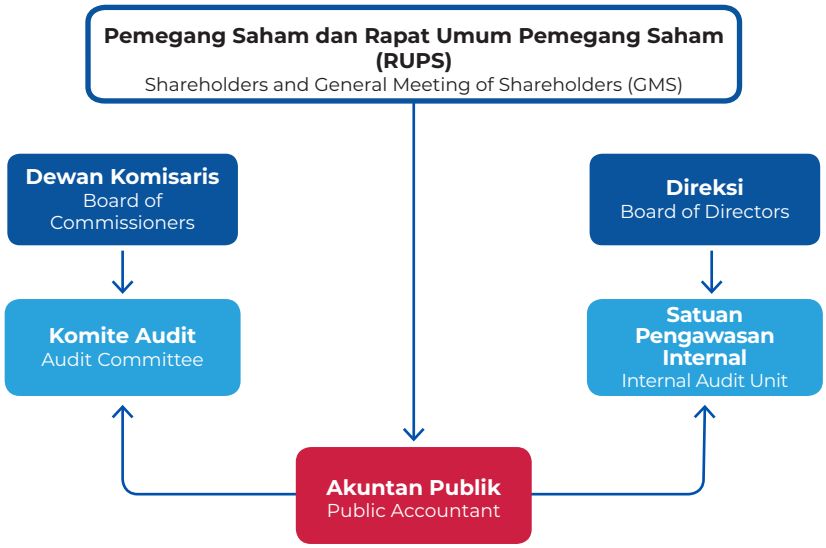
Public Accountants, or audit processes carried out by external parties carry out financial audits to provide independent and objective opinions regarding the fairness, compliance, and conformity of the Company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and applicable laws and regulations. Public Accountants must be free from the influence of the Board of Commissioners, Directors and interested parties in the Company, and the Company must provide all accounting records and supporting data needed in the external audit process so as to enable the Public Accountant to give his opinion on the fairness, compliance and suitability of reports corporate finance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan ditetapkan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perusahaan.

The Public Accounting Firm that examines the Company's financial statements is determined through the GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. To guarantee the independence and quality of the audit results, the appointed external auditors may not have a conflict of interest with any level of Company officials.

Skema sederhana tentang hubungan organ internal GCG dan Akuntan Publik sebagai organ eksternal dapat dilihat di bawah ini.

A simple scheme of the relationship between GCG internal organs and Public Accountants as external organs can be seen below



Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan Auditor Eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi audit independen, Auditor Eksternal melakukan hubungan dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang berada di bawah Direksi, serta Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Penunjukan Auditor Publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; dan usulan Dewan Komisaris yang disahkan dalam RUPS. Berdasarkan PP 20/2015 tersebut, Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian Laporan Keuangan Perusahaan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan;

Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI;

Shareholders through the GMS have the authority to appoint an External Auditor who will carry out an audit of the Company's financial statements. In carrying out the independent audit function, the External Auditor liaises with the Internal Audit Unit (SPI) which is under the Board of Directors, as well as the Audit Committee which is under the Board of Commissioners.

The appointment of a Public Auditor refers to Government Regulation no. 20 of 2015 concerning the Practice of Public Accountants; and the proposal of the Board of Commissioners which is approved in the GMS. Based on PP 20/2015, Public Accountants are limited to a maximum of 5 (five) consecutive financial years, whereby the Public Auditor can provide audit services again after 2 (two) consecutive financial years of not providing audit services to the same company.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

The management is responsible for the presentation of the Company's Financial Statements and adheres to the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) set by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

External Audit Procedures and Auditing Standards

An audit of the Company's Financial Statements is carried out in accordance with the professional standards of a Public Accountant which includes all audit procedures deemed necessary according to the circumstances;

An audit includes testing and evaluating the internal control system, as well as examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the Financial Statements. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the overall presentation of the Financial Statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI;

Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam Laporan Keuangan;

Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-*review* oleh badan atau otoritas terkait;

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts questions and answers to management regarding management statements presented in the Financial Statements.

An audit contains an inherent risk that if there are material errors and irregularities. If there is such thing, KAP will convey it to management. Management approves the working papers of KAP's inspection of the Company for review by the relevant body or authority;

The audit was carried out based on the Professional Standards for Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, then the audit is carried out based on the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Indonesian Financial Supervisory Agency (BPK).

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik
The Mechanism for The Appointment of Public Accounting Firm

Penyampaian arahan dan penugasan dari Dewan Komisaris kepada Komite Audit.
Submission of guidance and assignment from the Board of Commisioner Council to the Audit Committee.

↓

Tindak lanjut Komite Audit: Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dan eksternal. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.
The follow-up by the Audit Committee: Evaluate the implementation of internal and external audits. Submit the report to the Board of Commissioner.

↓

Dewan Komisaris melakukan telaah atas rekomendasi Komite Audit, melakukan pembahasan dengan organ Dewan Komisaris dan calon auditor eksternal/Akuntan Publik.
The Board of Commissioner reviews the Audit Committee recommendations, conducts discussion with the organs of the Board of Commissioner and prospective external auditors/Public Accounting Firm.

↓

Dewan Komisaris menyampaikan surat rekomendasi kepada RPB.
The Board of Commisioner Council submits a recommendation letter to the RPB Joint Discussion Meeting (RPB).

↓

Penetapan Kantor Akuntan Publik oleh RUPS.
The Public Accounting Firm is determined by Joint Discussion Meeting (GMS).

Melalui Surat PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 835/DPU/BPUI/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 perihal Penunjukan Penyedia Pengadaan Bersama Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Anak serta Cucu Perusahaan (*Affiliated Companies*) untuk Tahun Buku 2023 – PT Jaminan Kredit Indonesia, pemegang saham menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC) untuk melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023. Sementara akuntan yang akan melaksanakan audit independen Laporan Keuangan

Through PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Letter No. 835/DPU/BPUI/X/2023 dated October 6, 2023 concerning the Appointment of Joint Procurement Provider of Public Accounting Firm (KAP) Services for General Audit of the Financial Statements of the Company's Subsidiaries and Affiliated Companies for the 2023 Fiscal Year – PT Jaminan Kredit Indonesia, shareholders approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) KAP Tanudiredja Wibisana Rintis and Partners (PWC) to carry out an independent audit of the Company's Financial Statement for the 2023 Fiscal Year. Meanwhile, the accountant who will carry out the independent audit of the Company's Financial Statement

Perusahaan Tahun Buku 2023 adalah Erwandy Susanto. Audit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2023 oleh KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC) telah memasuki periode ke-4 berturut-turut, demikian pula dengan akuntan KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC).

for the 2023 Fiscal Year is Erwandy Susanto. The audit of the Company's financial statements for the 2023 fiscal year by KAP Tanudiredja Wibisana Rintis and Partners (PWC) has entered its 4th consecutive period, as has the accountant of KAP Tanudiredja Wibisana Rintis and Partners (PWC).

Akuntan Publik Tahun 2023
Public Accountant in 2023

Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	:	KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC) Public Accountant Office of Tanudiredja Wibisana Rintis and Partners (PWC)
Akuntan Publik Public Accountant	:	Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec.,
Tahun Audit Audit Year	:	Tahun Buku 2023 Fiscal Year 2023
Periode Penugasan Assignment Period	:	General Audit paling lambat 31 Juli 2024 General Audit of at the latest July 31, 2024
Jasa Service	:	Akuntan Publik – Jasa Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Konsolidasian Anak serta Cucu Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 PT Jaminan Kredit Indonesia Public Accountant – General Audit Services for the Consolidated Financial Statements of the Company's Subsidiaries and Affiliated Companies for PT Jaminan Kredit Indonesia's 2023 Fiscal Year
Jasa Lainnya Other Services	:	-
Biaya Fee	:	Rp4.700.000.000 IDR 4.700.000.000

Daftar Akuntan Publik

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perusahaan 6 (enam) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2018 hingga 2023 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

List of Public Accountants

In the interest of transparency, the following is presented by the Public Auditor of the Company's Financial Statements for 6 (six) consecutive years for the fiscal year 2016 to 2022, as can be seen in the table below.

Tahun Buku Fiscal Year	**Akuntan** Accountant	**Kantor Akuntan Publik** Public Accountant Office	**Opini** Opinion	**Biaya Jasa Audit (Rp-ribu)** Audit Fee (IDR-Thousand)
2023	Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA (STTD.AP.-49/ NB.122/2018)	KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC) No. Izin: STTD.KAP-04/PM.22/2018 Public Accountant Office Tanudiredja Wibisana Rintis and Partners (PWC) No. Permit: STTD.KAP-04/ PM.22/2018	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" 'Present fairly, in all material respects'	4.700.000
2022	Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA (STTD.AP.-49/ NB.122/2018)	KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC) No. Izin: STTD.KAP-04/PM.22/2018 Public Accountant Office Tanudiredja Wibisana Rintis and Partners (PWC) No. Permit: STTD.KAP-04/ PM.22/2018	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" 'Present fairly, in all material respects'	5.665.000
2021	Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA (STTD.AP.-49/ NB.122/2018)	KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC) No. Izin: STTD.KAP-04/PM.22/2018 Public Accountant Office Tanudiredja Wibisana Rintis and Partners (PWC) No. Permit: STTD.KAP-04/ PM.22/2018	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" 'Present fairly, in all material respects'	3.917.455

Tahun Buku Fiscal Year	**Akuntan** Accountant	**Kantor Akuntan Publik** Public Accountant Office	**Opini** Opinion	**Biaya Jasa Audit (Rp-ribu)** Audit Fee (IDR-Thousand)
2020	Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA (STTD.AP.-49/ NB.122/2018)	KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC) No. Izin: STTD.KAP-04/PM.22/2018 Public Accountant Office Tanudiredja Wibisana Rintis and Partners (PWC) No. Permit: STTD.KAP-04/ PM.22/2018	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" 'Present fairly, in all material respects'	6.600.000
2019	Bambang Karunawan, SE, Ak, CPA (STTD.AP-413/ PM.22/2018)	Hertanto, Grace, Karunawan No. Izin: STTD.KAP-00006/ PM.22/2017 Hertanto, Grace, Karunawan No. Permit: STTD.KAP-00006/ PM.22/2017	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" 'Present fairly, in all material respects'	458.850
2018	Bambang Karunawan, SE, Ak, CPA (STTD.AP-413/ PM.22/2018)	Hertanto, Grace, Karunawan No. Izin: STTD.KAP-00006/ PM.22/2017 Hertanto, Grace, Karunawan No. Permit: STTD.KAP-00006/ PM.22/2017	"Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" 'Present fairly, in all material respects'	424.500

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Manajemen Risiko merupakan sistem yang digunakan untuk memperkuat aspek akuntabilitas Direksi dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja Perusahaan. Komitmen dalam penerapan Manajemen Risiko, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan, dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang dibangun sesuai konteks dan kapabilitas Perusahaan. Manajemen Risiko Perusahaan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan dengan menggunakan ISO 31000:2018.

Operational Risk Management

Dalam meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan operasional, Perusahaan juga memasukan potensi tersebut ke dalam bagian sistem Manajemen Risiko Jamkrindo. Sesuai dengan peraturan Direksi Jamkrindo, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Risiko operasional tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kegagalan sistem/*downtime* & teknologi, kesalahan manusia (*human error*), peralatan (*mechanical and technical*), pihak *external*, *fraud*, kegagalan proses internal, organisasi & SDM, *Counterpart*, HSE (*Health, Safety and Environment*), dan Teknologi Informasi.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Operasional, Jamkrindo telah melaksanakan pengisian *Risk and Control Self Assessment* (RC SA). RC SA tersebut dilaksanakan dengan pendekatan bottom up, dimana identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh Kepala Bagian/Manajer di Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan KUP. Penetapan level pelaksana identifikasi dan penilaian risiko tersebut didasarkan pada pertimbangan level tersebut merupakan Pejabat yang terendah di unit kerjanya, sehingga mereka mengetahui permasalahan teknis dan kaitan antara permasalahan teknis tersebut dengan pencapaian tujuan Perusahaan.

Blue-Print Manajemen Risiko Jamkrindo

Untuk melakukan implementasi manajemen risiko terintegrasi, Jamkrindo telah menyusun *Blue-Print* Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai cetak biru arsitektur pengembangan *Enterprise Risk Management* (ERM).

Secara umum, *Blue-Print* ERM Jamkrindo terdiri dari 4 (empat) komponen utama yaitu infrastruktur, kapabilitas, integrasi, dan budaya. Keempat komponen tersebut

Risk Management is a system used to strengthen the accountability aspects of the Board of Directors in supporting the decision-making process and developing the Company's performance. Commitment in implementing Risk Management, as an integral part of the Company's management system as a whole, is stated in the Risk Management Policies and Procedures that are developed according to the context and capabilities of the Company. Company Risk Management is implemented in accordance with the conditions and needs of the Company using ISO 31000:2018.

Operational Risk Management

In minimizing the impact of losses arising from operational activities, the Company also includes this potential in the Jamkrindo Risk Management system. In accordance with the regulations of the Board of Directors of Jamkrindo, operational risk is the risk caused by, among other things, inadequate and/ or non-functioning internal processes, human errors, system failures, or external problems that affect the Company's operations.

Operational risk can be caused by several factors, namely system failure/downtime & technology, human error, equipment (mechanical and technical), external parties, fraud, internal process failure, organization & HR, Counterpart, HSE (Health, Safety and Environment), and Information Technology.

To implement Operational Risk Management, Jamkrindo already has guidelines for implementing Risk and Control Self Assessment (RC SA). The RC SA is carried out using a bottom-up approach, in which risk identification and assessment is carried out by Heads of Sections or Sections in Work Units at the Head Office, Branch Offices and Sub-Branch Offices. Determination of the level of implementation of risk identification and assessment is based on the consideration that this level is the lowest official in their work unit, so they know about technical problems and the link between these technical problems and the achievement of the Company's goals.

Jamkrindo Risk Management Blue-Print

To implement integrated risk management, Jamkrindo has prepared an Integrated Risk Management Blue-Print as an architectural blueprint for Enterprise Risk Management (ERM) development.

In general, Jamkrindo's ERM Blue-Print consists of 4 (four) main components, namely infrastructure, capabilities, integration, and culture. The four components have various

memiliki berbagai elemen sebagai bagian utamanya, secara lebih lengkap model *Blueprint* ERM Jamkrindo digambarkan dalam model di bawah ini.

elements as their main parts, in more detail the Jamkrindo ERM Blueprint model is described in the model below.

Model Blue-Print Manajemen Risiko Terintegrasi Jamkrindo
Jamkrindo's Integrated Risk Management Blueprint model



1. Infrastruktur Manajemen Risiko
   Infrastruktur Manajemen Risiko adalah segala sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan, yang terdiri dari sistem manajemen risiko, dokumen panduan penerapan dan prosedur pelaksanaan, kebijakan manajemen risiko, struktur dan akuntabilitas organisasi, aplikasi, mekanisme proses.
2. Kapabilitas
   Kapabilitas adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang kemampuan para pelaksana pengelola risiko menghadapi risiko pada Unit Kerjanya masing-masing yang melingkupi seluruh jajaran organisasi, termasuk individu karyawan. Hal ini penting sebab meskipun infrastruktur telah tersedia, jika pelaksana pengelola risiko tidak cukup mempunyai kapasitas dan kapabilitas memadai, maka akan sangat berpengaruh pada penerapan aktual di Perusahaan.
3. Integrasi
   Integrasi adalah perwujudan dari prinsip manajemen risiko, di mana manajemen risiko merupakan bagian integral dari proses bisnis Perusahaan, yaitu menggabungkan proses manajemen risiko dengan proses bisnis Perusahaan, di antaranya dalam bidang perencanaan, pengoperasian, pengawasan, dan langkah tindak lanjut perbaikan.
4. Budaya
   Budaya adalah langkah untuk menjadikan budaya risiko menjadi cara dan sikap dalam bekerja dan berpartisipasi mewujudkan ketercapaian sasaran Perusahaan secara berkesinambungan. Program pengenalan, sosialisasi, kampanye yang membangkitkan semangat untuk maju terus mampu dan mau menerapkan manajemen risiko melalui motivasi diri.

1. Risk Management Infrastructure
   Risk Management Infrastructure is all facilities and infrastructure to support the implementation of risk management within the Company, which consists of a risk management system, implementation guidance documents and implementation procedures, risk management policies, organizational structure and accountability, applications, and process mechanisms.
2. Capabilities
   Capability is a competency needed to support the ability of risk management implementers to face risks in their respective work units, covering all levels of the organization, including individual employees. This is important because even though the infrastructure is available, if the executor of risk management does not have sufficient capacity and capability, it will greatly affect the actual implementation in the Company.
3. Integration
   Integration is the embodiment of risk management principles, in which risk management is an integral part of the Company's business processes, namely combining the risk management process with the Company's business processes, including in the areas of planning, operation, supervision, and follow-up steps for improvement.
4. Culture
   Culture is a step to make risk culture a way and attitude in working and participating in realizing the achievement of the Company's goals on an ongoing basis. Introduction programs, dissemination, campaigns that inspire enthusiasm to move forward and are able and willing to apply risk management through self motivation.

Road Map Manajemen Risiko

Untuk mencapai kondisi penerapan manajemen risiko seperti yang telah dituangkan dalam *blue print* Manajemen Risiko, Jamkrindo telah menyusun *road map* implementasi pengembangan manajemen risiko sampai tahun 2026, dengan milestone pencapaian *Blue-Print* manajemen risiko yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

Risk Management Road Map

To achieve the condition of implementing risk management as outlined in the Risk Management blue print, Jamkrindo has prepared a road map for the implementation of risk management development until 2026, with milestones for achieving an integrated risk management Blue-Print as follows:

No	Areas of Improvement	Tahun Year				
		2022	2023	2024	2025	2026
Infrastruktur INFRASTRUCTURE						
1	Pengembangan ketentuan Manajemen Risiko menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan/atau penyesuaian dengan Holding, dan dengan tahun berjalan. Development of Risk Management provisions in accordance with current conditions and/or adjustments with Holding, and with the current year					
2	Implementasi *Four Eyes Principles*. Implementation of the Four Eyes Principles.					
3	Penyusunan *Guarantee Exposure Limit*. Compilation of Guarantee Exposure Limit					
4	Penyusunan pedoman dan kertas kerja stress testing untuk risiko pasar, penjaminan, dan operasional. Preparation of stress testing guidelines and working papers for market, guarantee, and operational risks.					
5	Pengukuran maturitas penerapan Manajemen Risiko dan Business *Continuity Management System* (BCMS). Measurement of the maturity of Risk Management and Business Continuity Management System (BCMS) implementation.					
6	Menyusun branch risk profile, profil risiko per produk/layanan dan profil risiko per aktivitas. Develop branch risk profiles, risk profiles per product/service and risk profiles per activity.					
7	Pengembangan aplikasi SIMR dengan memasukkan *Key Risk Report*, Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko, dan BCMS. SIMR application development by including Key Risk Report, Measurement of Risk Management Maturity Level, and BCMS					
8	Penerapan Manajemen Risiko sejalan dengan peningkatan kinerja Perusahaan, melalui pengelolaan upside risk yang dimiliki Perusahaan. The implementation of Risk Management is in line with the improvement of the Company's performance, through the management of the Company's upside risk					
Kapabilitas CAPABILITY						
1	Proses *check and balance* (berupa penerapan audit) atas implementasi Manajemen Risiko, bukan hanya di Unit Kerja sebagai (*first line of defense)*, namun juga di Divisi yang membidangi Manajemen Risiko. The check and balance process (in the form of an audit) on the implementation of Risk Management, not only in the Work Unit as the first line of defense, but also in the Division in charge of Risk Management.					
2	*Stress testing* untuk risiko likuiditas, pasar, penjaminan, dan operasional. Stress testing for liquidity, market, guarantee, and operational risks					
3	Sertifikasi ISO 22301:2019 *Business Continuity Management System* (BCMS) untuk korporasi. ISO 22301:2019 Business Continuity Management System (BCMS) certification for corporations.					
4	Perluasan objek studi banding, bukan hanya pada bidang Manajemen Risiko, namun juga pada bidang lain seperti implementasi GRC, BCMS, Aplikasi MR, dan *stress testing* MR. Expansion of the comparative study object, not only in the field of Risk Management, but also in other fields such as the implementation of GRC, BCMS, MR Applications, and MR stress testing					

No	Areas of Improvement	Tahun Year				
		2022	2023	2024	2025	2026
5	Pengembangan *risk register* menyesuaikan dengan perkembangan bisnis perusahaan. The development of the risk register adapts to the development of the Company's business					
6	Uji coba dokumen BCMS. BCMS document test					
7	Surveillance audit sertifikasi BCMS ISO 22301:2019. BCMS ISO 22301:2019 certification surveillance audit.					
Integrasi INTEGRATION						
1	Integrasi SIMR dengan Aplikasi Operasional/ Akuntansi. SIMR integration with operational/accounting applications.					
Budaya CULTURE						
1	Pelaksanaan *capacity building* Manajemen Risiko untuk pegawai dalam bentuk sosialisasi internal perusahaan dalam upaya meningkatkan risk awareness. Implementation of Risk Management capacity building for employees in the form of internal company dissemination in an effort to increase risk awareness					
2	*Training*, seminar, dan *workshop* eksternal. External training, seminars and workshops.					
3	Sertifikasi profesional Manajemen Risiko dan BCMS. Risk Management and BCMS professional certification					

Implementasi Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen Risiko dilakukan secara periodik dan insidentil. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan secara periodik adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 (empat) tahapan proses, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan *monitoring* dan evaluasi risiko. Pada tahap awal, proses yang dilakukan adalah Identifikasi dan Penilaian Risiko *Inherent*. Atas hasil identifikasi risiko dan penilaian risiko tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses manajemen risiko.

Kegiatan Manajemen Risiko yang bersifat insidentil adalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko dan pemberian opini terkait dengan hal-hal yang harus dimintakan pendapat kepada Divisi Manajemen Risiko. Kegiatan insidentil berupa pemberian opini untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/*software* baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Kegiatan insidentil berupa pemberian opini sesuai Surat Edaran Direksi No. 126/SE/5/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang SOP Pendapat (Opini) Manajemen Risiko yaitu untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan

Risk Management Implementation

Risk Management activities are carried out periodically and incidentally. Periodic risk management activities are a risk management process consisting of 4 (four) stages of the process, namely risk identification, risk assessment, risk management and risk monitoring and evaluation. In the early stages, the process carried out is Inherent Risk Identification and Assessment. Based on the results of risk identification and risk assessment, an evaluation is carried out to improve the risk management process.

Incidental Risk Management activities are the implementation of risk management carried out at certain stages in accordance with those stipulated in the risk-based business process SOP and the provision of opinions related to matters that must be consulted to the Risk Management Division. Incidental activities in the form of providing opinions on matters that are strategic and have a significant impact on the sustainability of the Company, manufacture of new products and/or activities, transactions with a certain value, write-off policies on Company receivables, preparation of SOPs, RJP, RKAP, implementation of the use of new applications/software , determination of new banks for deposit and investment placements, and other strategic policies.

Incidental activities in the form of giving opinions according to Directors Circular Letter No. 126/SE/5/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning SOP for Risk Management Opinion, namely for matters that are strategic and have a significant impact on the sustainability of the Company,

produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapus bukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJPP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/*software* baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Kelengkapan Manajemen Risiko

Untuk implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, maka diperlukan beberapa kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut, Jamkrindo telah menyusun beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1. Ketetapan Direksi Pedoman Srategis Manajemen Risiko, dengan nomor 02/KD/4/IX/2023 tanggal 20 September 2023, merupakan peraturan yang memberikan sarana untuk melakukan peninjauan ulang terhadap proses penerapan manajemen risiko yang telah dilaksanakan sebelumnya, memberikan panduan pengelolaan risiko yang lebih efektif dengan adanya pengukuran risiko secara menyeluruh, meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan, dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan.
2. Organisasi Manajemen Risiko Jamkrindo secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat Divisi Manajemen Risiko. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat *ad hoc*, yaitu Komite Manajemen Risiko Jamkrindo. Komite Manajemen Risiko (KMR) adalah komite yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan. Komite Manajemen Risiko berperan untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi risiko usaha, jenis, dan dampaknya terhadap kegiatan Perusahaan, menetapkan risk appetite dan risk tolerance Perusahaan, dan memberikan laporan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
3. Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) atau yang disebut sebagai Koordinator *Risk Owner*, yang bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Risk Officer berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Divisi Manajemen Risiko.
4. Prosedur Pengelolaan Risiko sebagaimana Surat Edaran No. 24/SE/4/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Prosedur Pengelolaan Risiko. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai panduan teknis penerapan Manajemen Risiko di Jamkrindo.

manufacture of new products and/or activities, transactions with a certain value, policies writeoff of Company receivables, preparation of SOP, RJPP, RKAP, implementation of use of new applications/software, determination of new banks for deposit and investment placements, and other strategic policies.

Completeness of Risk Management

For the implementation of integrated risk management, a number of tools are required to support the implementation of risk management. In this regard, Jamkrindo has prepared the following completeness:

1. The Board of Directors' Regulation regarding the Implementation of Risk Management number 02/KD/4/IX/2023 dated September 20, 2023 is a regulation that provides a means to review the risk management implementation process that has been implemented previously, provides guidance for more effective risk management through comprehensive risk measurement, increases business capacity and capital, and creates financial system stability that grows sustainably.
2. Structurally, Jamkrindo's Risk Management Organization, the Board of Directors has established an organizational structure in which there is a Risk Management Division. In addition to a structural organization, there is also an ad hoc structure, namely the Jamkrindo Risk Management Committee. The Risk Management Committee (KMR) is a committee consisting of Directors and Heads of Divisions related to the management of Company Risk Management. The Risk Management Committee's role is to carry out periodic assessments and provide recommendations on business risks, types and impacts on the Company's activities, determine the Company's risk appetite and risk tolerance, and provide reports on the implementation of Company Risk Management to the Board of Commissioners.
3. In addition, for the smooth implementation of the risk management process, each work unit is appointed a Person in Charge (PIC) or known as a Risk Owner Coordinator, whose job is to coordinate the implementation of the risk management process in each work unit. In carrying out their duties, the Risk Officer coordinates and consults with the Risk Management Division.
4. Risk Management Procedures as per Circular Letter No. 24/SE/4/X/2023 dated October 9, 2023 on Risk Management Procedures. The Technical Instructions contain an explanation of the technical guidelines for implementing Risk Management at Jamkrindo.

Panduan teknis penerapan Manajemen Risiko tersebut secara garis besar adalah:

a. Penetapan Konteks dan Kriteria;
b. Identifikasi Risiko;
c. Analisis Risiko;
d. Evaluasi Risiko;
e. Penanganan Risiko;
f. Monitoring Risiko;
g. Komunikasi dan Konsultasi Risiko;
h. Pencatatan dan Pelaporan Risiko;
i. Toleransi Risiko.

5. SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait di dalam proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam risk register dan pengendalian risiko yang diperlukan telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis, sementara untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari Divisi Manajemen Risiko sebagai second opinion dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap oleh setiap pemilik proses bisnis.
6. Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi telah ada sejak tahun 2011, perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk data base yang terstruktur.

Jenis dan Pengelolaan Risiko Selama Tahun 2023

Monitoring Top Risk Perusahaan pada tahun 2023 dilakukan atas potensi risiko sebagai berikut:

1. Risiko Strategis
   a. Potensi Target *Underwriting* Non Program tidak tercapai. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Mengembangkan dan meningkatkan kontribusi produksi penjaminan (*volume* penjaminan) melalui kolaborasi dengan Bank BUMN.
      - Meningkatkan kerja sama dengan asosiasi, Holding, anak perusahaan Bank BUMN/ Penerima Jaminan/ *Bowheer* atau mitra strategis lainnya. Perluasan pangsa pasar penjaminan supermikro dan suretyship.
      - Melakukan konversi bisnis model PEN untuk penjaminan kredit produktif dengan skema yang sama.

   b. Potensi tidak tercapainya target ROE. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Memperluas, standarisasi, simplifikasi *digital channeling* (e-SP dan e-IJP).
      - Mengembangkan konsolidasi dan kolaborasi dengan anggota *Holding* dengan meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis Perusahaan.
      - Mengembangkan pengembangan inovasi produk baru yang lebih selektif dan sesuai kebutuhan pasar.

The technical guidelines for implementing Risk Management in outline are:

a. Determination of Context and Criteria;
b. Risk Identification;
c. Risk Analysis;
d. Risk Evaluation;
e. Risk Management;
f. Risk Monitoring;
g. Risk Communication and Consultation;
h. Risk Recording and Reporting;
i. Risk Tolerance.

5. SOP for Risk-Based Business Processes is an SOP for a business process that is prepared by considering the risks involved in the process. The SOP is intended to ensure that the risks listed in the risk register and the necessary risk controls have been considered in the implementation of business processes, while for new types of risks it has been ensured that an opinion has been obtained from the Risk Management Division as a second opinion in consideration of decision making. Considering that the types of activities that exist in Jamkrindo are quite diverse, the risk-based business process SOP is prepared in stages by each business process owner
6. The Integrated Risk Management Support System has existed since 2011, the Company has started to build a Risk Management Information System Application. The application functions to simplify the process of identification, risk assessment, and follow-up of risk management. With the application, risk data can be stored in a structured database.

Types and Risk Management in 2023

Monitoring of the Company's Top Risk in 2023 was carried out for the following potential risks:

1. Strategic Risk
   a. Potential Non-Program Underwriting Targets not achieved. Some mitigations that can be carried out include:
      - Develop and increase the contribution of guarantee production (guarantee volume) through collaboration with state-owned banks.
      - Increase cooperation with associations, holdings, subsidiaries of state-owned banks/guarantee recipients/Bowheer or other strategic partners. Expansion of the supermicro and suretyship guarantee market share.]
      - Convert the PEN business model to guarantee productive credit with the same scheme.

   b. Potential for not achieving the ROE target. Some mitigations that can be carried out include:
      - Expanding, standardizing, simplifying digital channeling (e-SP and e-IJP).
      - Develop consolidation and collaboration with Holding members by increasing the Company's efficiency and business performance.
      - Develop new product innovations that are more selective and according to market needs.

- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan TC untuk produk yang kurang *profitable* dan dampak pandemi Covid-19.
- Meningkatkan kualitas penyusunan tarif IJP/IJK standar.

2. Risiko Operasional
   a. Potensi pemasaran produk yang tidak optimal. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait produk *knowledge*, strategi *marketing* dan *branding* produk penjaminan non program.
      - Membuat *tool marketing kit* sebagai media komunikasi dan pemasaran yang lebih efektif.
   b. Potensi Perusahaan tidak dapat mengoptimalkan aset yang sudah dibeli sehingga tidak memberi nilai tambah bagi Perusahaan. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Perusahaan membuat rencana strategis optimalisasi aset yang telah dibeli.
      - Apabila diperlukan Perusahaan dapat beKerja sama dengan pihak konsultan independent yang berkompeten di bidangnya guna mengetahui perberdayaan terbaik/teroptimal yang dapat dilakukan dari aset tersebut.
      - Sebelum pembelian perlu adanya dukungan dokumen appraisal kelayakan gedung.

   c. Potensi proses bisnis tidak efisien. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Melakukan rekonsiliasi data dari seluruh Unit Kerja kepada Kantor Pusat dilakukan secara tertib.
      - Dukungan sistem TI dalam hal pemenuhan data.
3. Risiko Kredit
   a. Potensi Peningkatan nonperforming guarantee Perusahaan. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan *Monitoring* berkala NPL Penerima Jaminan.
   b. Potensi pengembalian bunga dan pokok MTN tidak tepat waktu. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Pembelian MTN BPUI agar tetap menjaga tingkat RKI yang mendukung bisnis penjaminan. Divisi Keuangan agar berkoordinasi dengan Divisi Aktuaria dan Divisi Klaim dalam penentuan tingkat RKI yang harus dijaga.
      - Agar dalam perjanjian pembelian MTN terdapat persyaratan bahwa PT BPUI bersedia membeli kembali MTN apabila PT Jamkrindo mengalami kesulitan likuiditas.
4. Risiko Likuiditas
   a. Potensi penurunan likuiditas Perusahaan. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah Perusahaan melakukan seleksi atas aset yang ditawarkan Jasindo dan hanya melakukan pembelian terhadap aset yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pendapatan Perusahaan.
   b. Potensi penurunan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:

- Evaluate and improve TC for products that are less profitable and the impact of the Covid-19 pandemic.
- Improving the quality of standard IJP/IJK tariff preparation.

2. Operational Risk
   a. Product marketing potential is not optimal. Some mitigations that can be carried out include:
      - Conduct outreach and training related to product knowledge, marketing strategies and branding of non-program guarantee products.
      - Create a marketing tool kit as a more effective communication and marketing medium.
   b. The Company's potential is not being able to optimize the assets that have been purchased so that they do not provide added value to the Company. Some mitigations that can be carried out include:
      - The Company makes a strategic plan to optimize the assets that have been purchased.
      - If necessary, the Company can collaborate with independent consultants who are competent in their fields to find out the best/most optimal use that can be made from these assets.
      - Before purchasing, it is necessary to have supporting documents assessing the suitability of the building.
   c. Potential inefficient business processes. Some mitigations that can be carried out include:
      - Reconciling data from all Work Units to the Head Office in an orderly manner.
      - IT system support in terms of data fulfillment.
3. Credit Risk
   a. Potential for increasing the Company's non-performing guarantee. Mitigation that can be done is by periodically monitoring the NPL of Collateral Recipients.
   b. Potential return of MTN interest and principal is not timely. Some mitigations that can be carried out include:
      - Purchasing BPUI MTN to maintain RKI levels that support the guarantee business. The Finance Division must coordinate with the Actuarial Division and Claims Division in determining the level of RKI that must be maintained.
      - So that in the MTN purchase agreement there is a requirement that PT BPUI is willing to buy back MTN if PT Jamkrindo experiences liquidity difficulties.
4. Liquidity Risk
   a. Potential reduction in Company liquidity. Mitigation that can be done is for the Company to select the assets offered by Jasindo and only purchase assets that can be utilized optimally for the Company's income.
   b. Potential reduction in the Company's ability to meet its short-term obligations. Some mitigations that can be carried out include:

- Melakukan proyeksi arus kas perusahaan.
- Melakukan perencanaan pendanaan darurat sesuai hasil kajian *stress testing*.
- Melakukan pengelolaan *Liquidity Gap Asset* dan Liabilitas dan mengusahakan agar nilai aset lebih besar dibandingkan dengan nilai liabilitas.

5. Risiko Kepatuhan
   a. Potensi tidak terpenuhinya aspek legalitas atau aspek kepatuhan yang berlaku tentang penjualan aset BUMN/Anak BUMN. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah seluruh pihak yang terlibat memenuhi seluruh peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang harus dipenuhi dalam proses pelepasan aset BUMN/Anak BUMN antara lain Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/Mbu/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara dan Per-03/MBU/03/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/Mbu/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.
   b. Potensi Audit tidak selesai secara tepat waktu. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Melakukan rekonsiliasi data dari seluruh Unit Kerja kepada Kantor Pusat dilakukan secara tertib.
      - Membentuk tim audit yang kompeten.
      - Dukungan sistem TI dalam hal pemenuhan data.
6. Risiko Pasar
   a. Potensi *Opportunity Loss* adanya kenaikan suku bunga. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Agar melakukan manajemen portofolio yang prudent dan memastikan bahwa pembelian setiap instrument investasi dapat memenuhi capaian target investasi yang sudah ditetapkan.
      - Agar menetapkan strategi *exit policy* yang konkrit dan dapat diterapkan guna mengurangi eksposur risiko yang mungkin terjadi.
7. Risiko Hukum
   a. Potensi nilai tuntutan dan atau gugatan hukum. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Tinjauan secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara perusahaan dengan mitra.
      - Unit Kerja rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi pada klausula-klausula yang terdapat pada seluruh Ketentuan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja sama dengan pihak bank/mitra dan agar selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut.
      - Divisi Kepatuhan melakukan Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan gratifikasi kepada seluruh Unit Kerja dan seluruh Unit Kerja rutin melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pemahaman mengenai SMAP dan gratifikasi.

- Project the Company's cash flow.
- Carry out emergency funding planning according to the results of the stress testing study.
- Manage the Liquidity Gap of Assets and Liabilities and ensure that the value of assets is greater than the value of liabilities.

5. Compliance Risk
   a. Potential for non-fulfillment of legality aspects or applicable compliance aspects regarding the sale of BUMN/BUMN Subsidiary assets. Mitigation that can be carried out is that all parties involved fulfill all applicable laws and regulations that must be fulfilled in the process of disposing of BUMN/Subsidiary BUMN assets, including Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-02/Mbu/2010 concerning Procedures for Write-Off and Transfer of Fixed Assets of State-Owned Enterprises and Per-03/MBU/03/2021 concerning the Third Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-02 /Mbu/2010 Concerning Procedures for Writing Off and Transferring Fixed Assets of State-Owned Enterprises.
   b. Potential Audit not completed on time. Some mitigations that can be carried out include:
      - Reconciling data from all Work Units to the Head Office in an orderly manner.
      - Form a competent audit team.
      - IT system support in terms of data fulfillment.

6. Market Risk
   a. Potential Opportunity Loss due to an increase in interest rates. Some mitigations that can be carried out include:
      - To carry out prudent portfolio management and ensure that the purchase of each investment instrument can meet the investment targets that have been set.
      - To determine a concrete exit policy strategy that can be implemented to reduce risk exposure that may occur.
7. Legal Risk
   a. Potential value of claims and/or lawsuits. Some mitigations that can be carried out include:
      - Regular review of contracts and agreements between the Company and partners.
      - The Work Unit routinely carries out outreach activities to all its staff to provide understanding and common perception on the clauses contained in all Company Regulations and Cooperation Agreements with banks/partners and to always be guided by these provisions.
      - The Compliance Division carries out socialization of the Anti-Bribery Management System (SMAP) and gratuities to all Work Units and all Work Units routinely carry out outreach activities to all staff to provide an understanding of ABMS and gratuities.

8. Risiko Reputasi
   a. Potensi Audit tidak selesai secara tepat waktu. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Melakukan rekonsiliasi data dari seluruh Unit Kerja kepada Kantor Pusat dilakukan secara tertib.
      - Membentuk tim audit yang kompeten.
      - Dukungan sistem TI dalam hal pemenuhan data.
9. Risiko Penjaminan
   a. Potensi tingginya klaim atas penjaminan KUR. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Melakukan integrasi online dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
      - Melakukan evaluasi dan penyempurnaan TC PKS saat ini untuk produk yang kurang *profitable* dan pembaharuan Kerja sama KUR terkait dampak Covid-19
   b. Potensi Rendahnya penerimaan subrogasi. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Memperluas, standarisasi, simplifikasi *digital channeling* (e-subro) dengan mitra perbankan maupun non perbankan.
      - Mengembangkan aplikasi terintegrasi antara penjaminan (klaim dan subrogasi) dengan akuntansi.
      - Perluasan mitra penagihan subrogasi.
   c. Potensi rendahnya *co-guarantee* Perusahan. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lainnya:
      - Melakukan pengajuan penggantian klaim secara periodik.
      - Melakukan rekonsiliasi penggantian klaim secara periodik dengan mitra Reasuransi.
      - Melakukan *offset* antara piutang klaim dan hak subrogasi mitra Reasuransi.
      - Melakukan penyelesaian klaim secara *offset* antara piutang klaim dan premi reasuransi.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko dilakukan melalui penilaian RMI (*Risk Maturity Index*). Penilaian RMI dilakukan untuk mengukur tingkat kualitas rancangan dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam melindungi dan menciptakan nilai pada BUMN sesuai dengan Juknis Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Hasil Penilaian RMI utamanya untuk mendapatkan gap dan langkah perbaikan peningkatan penerapan Manajemen Risiko. RMI dinilai dari dua aspek yaitu aspek dimensi dan aspek kinerja.

Aspek Dimensi dalam penilaian RMI terdiri dari:
1. Budaya dan Kapabilitas Risiko;
2. Organisasi dan Tata Kelola Risiko;
3. Kerangka Risiko dan Kepatuhan;
4. Proses dan Kontrol Risiko; dan
5. Model, Data, dan Teknologi Risiko.

8. Reputation Risk
   a. Potential Audit not completed on time. Some mitigations that can be carried out include:
      - Reconciling data from all Work Units to the Head Office in an orderly manner.
      - Form a competent audit team.
      - IT system support in terms of data fulfillment.
9. Underwriting Risk
   a. Potential for high claims for KUR guarantees. Some mitigations that can be carried out include:
      - Carry out online integration with the Program Credit Information System (SIKP).
      - Evaluate and improve the current TC PKS for less profitable products and renew KUR cooperation related to the impact of Covid-19
   b. Potential for low acceptance of subrogation. Some mitigations that can be carried out include:
      - Expand, standardize, simplify digital channeling (e-subro) with banking and non-banking partners.
      - Develop an integrated application between underwriting (claims and subrogation) and accounting.
      - Expansion of subrogation collection partners.
   c. Low potential for Company co-guarantee. Some mitigations that can be carried out include:
      - Submit periodic claim reimbursements.
      - Perform periodic claim reimbursement reconciliations with Reinsurance partners.
      - Make an offset between claim receivables and subrogation rights of Reinsurance partners.
      - Settle claims by offset between claims receivables and reinsurance premiums.

Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System

Evaluation of the effectiveness of the Risk Management system is carried out through an RMI (Risk Maturity Index) assessment. The RMI assessment is carried out to measure the level of design quality and effectiveness of the implementation of Risk Management in protecting and creating value in BUMN in accordance with Technical Guidelines Number SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning Technical Instructions for Risk Maturity Index Assessment (Risk Maturity Index) in the Agency Environment State Owned Enterprises. The results of the RMI Assessment are mainly to find gaps and corrective steps to increase the implementation of Risk Management. RMI is assessed from two aspects, namely the dimensional aspect and the performance aspect.

Dimensional aspects in the RMI assessment consist of:
1. Risk Culture and Capability;
2. Organization and Risk Governance;
3. Risk and Compliance Framework;
4. Risk Process and Control; And
5. Risk Models, Data and Technology.

Sedangkan dalam aspek kinerja dalam Penilaian RMI terdiri dari:
1. Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (*Final Rating*); dan
2. Peringkat Komposit Risiko.

Pernyataan Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris Atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Manajemen Jamkrindo senantiasa melakukan evaluasi terhadap efektifitas sistem manajemen risiko. Dalam mendukung rangka implementasi rencana strategis Perusahaan, di antaranya adalah:
1. Melakukan *addendum* kebijakan risk appetite untuk menyesuaikan dengan kondisi bisnis terkini.
2. Melakukan *review* atas implementasi manajemen risiko.
3. Melakukan *review* atas implementasi manajemen risiko pasar dan likuiditas.
4. Melakukan *review* kebijakan pengelolaan permodalan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, Perusahaan terus mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Komite Audit untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dan Direksi.

Meanwhile, the performance aspect of the RMI Assessment consists of:
1. Final Rating Health Level (Final Rating); And
2. Risk Composite Rating.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee regarding the Adequacy of the Risk Management System

Jamkrindo management always evaluates the effectiveness of the risk management system. In supporting the implementation of the Company's strategic plan, these include:
1. Carry out an addendum to risk appetite policy to adapt to current business conditions.
2. Reviewing the implementation of risk management.
3. Review the implementation of market and liquidity risk management.
4. Review capital management policies.

As part of efforts to improve the quality of risk management implementation, the Company continues to optimize the implementation of the Audit Committee's functions to support the effective implementation of the duties of the Board of Commissioners and Directors.

PERKARA PENTING DAN PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

IMPORTANT CASES AND LEGAL ISSUES

Legal Issues

The problems and/or legal cases faced by the Company, its subsidiaries, as well as members of the Board of Commissioners and Directors throughout 2023 and 2022 are as follows:

Permasalahan hukum Legal Issues	2023		2022		2021	
	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases
Jamkrindo						
Selesai dan Telah memiliki kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	7	Nihil Nil	2	Nihil Nil	2	-
Dalam proses penyelesaian In the settlement process	2	Nihil Nil	8	Nihil Nil	4	-
Jumlah Total	**9**	**Nihil** Nil	**10**	**Nihil** Nil	**6**	**-**
Dewan Komisaris dan Direksi BoD and BoC		Nihil Nil				
Selesai dan Telah memiliki kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	-	-
Dalam proses penyelesaian In the settlement process	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	-	-
Jumlah Total	**Nihil** Nil	**Nihil** Nil	**Nihil** Nil	**Nihil** Nil	**-**	**-**
Entitas Anak Subsidiaries						
Selesai dan Telah memiliki kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	Nihil	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	1	-

Permasalahan hukum Legal Issues	2023		2022		2021	
	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases	Perdata Civil Cases	Pidana Criminal Cases
Dalam proses penyelesaian In the settlement process	8	Nihil Nil	Nihil Nil	Nihil Nil	1	-
Jumlah Total	**8**	**Nihil** Nil	**Nihil** Nil	**Nihil** Nil	**1**	**-**

Sanksi Administrasi

Sepanjang tahun 2023 terdapat 1 (satu) sanksi administrasi yang diterima Perusahaan. Kendati demikian, Perusahaan telah melakukan mitigasi yang tepat terkait pemberian sanksi tersebut. Sanksi yang didapati Perusahaan tidak bersifat material sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan maupun operasional Perusahaan.

Administrative Sanctions

Throughout 2023, there wwa 1 (one) administrative sanction received by the Company. However, the Company has carried out appropriate mitigation regarding the imposition of these sanctions. The sanctions that were found by the Company were not material in nature so that they did not have a significant impact on the Company's financial and operational performance.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Dalam menyampaikan dan penyebaran informasi serta berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan Jamkrindo menggunakan berbagai media yang ada, yaitu media internet, cetak dan kegiatan atau *event*.

In conveying and disseminating information and communicating with interested parties, Jamkrindo uses various existing media, namely internet media, print and activities or events.

Dalam prosesnya, akses terhadap informasi Perusahaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

In the process, access to Company information is divided into 2 (two), namely

No.	Akses Informasi Information Access	Jenis Types	
1	Komunikasi Internal Internal Communications	a.	Surat Edaran Circular Letter
			Jamkrindo Menggunakan Surat Edaran Untuk Mengkomunikasikan Kebijakan Dan Peraturan Terbaru Di Dalam Internal Perusahaan. Informasi Yang Disebarkan Umumnya Berisi Tentang Sosialisasi Kebijakan Direksi . Jamkrindo Uses Circular Letters to Communicate The Latest Internal Policies and Regulations Within The Company. Information Distributed Generally Contain Dissemination of Directors' Policies.
		b.	ICPR (*Integrated Corporate Performance Reporting*)
			Jamkrindo Juga Menggunakan Sarana Teknologi Informasi Yang Berbasis *Web* Yaitu ICPR Yang Telah Diterapkan di Lingkungan Jamkrindo . Jamkrindo also Uses Web-Based Information Technology Facilities, Namely ICPR which Has Been Implemented in The Jamkrindo Environment.
		c.	*E-mail*
			Jamkrindo juga telah memiliki *e-mail system* sendiri untuk mengelola komunikasi internal perusahaan antar unit kerja. Jamkrindo also Has Its Own E-Mail System to Manage The Company's Internal Communications between Work Units.
		d.	Evaluasi dan *Action Plan* Triwulan. Quarterly Evaluation and Action Plan.

No.	Akses Informasi Information Access	Jenis Types
		Untuk sarana komunikasi antara Direksi dengan Kepala Divisi dan Pimpinan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang dalam menyampaikan target dan rencana bisnis Perusahaan, Jamkrindo secara rutin tiga bulan atau triwulanan menyelenggarakan rapat evaluasi dan action plan. Dalam rapat evaluasi dan action plan ini, Direksi Jamkrindo melakukan evaluasi terhadap kinerja triwulanan berjalan dan membahas serta mengkomunikasikan rencana bisnis Jamkrindo untuk triwulan-an kedepan kepada para Kepala Divisi, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor Anak Cabang untuk meneruskan target dan rencana bisnis tahunan yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan. As a means of communication between the Directors and Division Heads and Heads of Branch Offices or Sub-Branch Offices in conveying the Company's targets and business plans, Jamkrindo routinely holds three months or quarterly evaluation meetings and action plans. In this evaluation and action plan meeting, the Board of Directors of Jamkrindo evaluates the current quarterly performance and discusses and communicates Jamkrindo's business plan for the next quarterly to the Heads of Division, Heads of Branch Offices and Heads of Subsidiary Offices to continue the targets and annual business plans that have been stipulated in the current year's RKAP.
		a. Alamat Perusahaan Company Address
		Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat Telepon:+62216540335 Faksimili : +62 21 6540344/48 Gedung Jamkrindo (Jamkrindo Building) Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Central Jakarta Telephone:+62216540335 Fax : +62 21 6540344/48
2	Komunikasi Eksternal External Communications	
		b. Website
		Untuk memudahkan mitra kerja, masyarakat yang berkepentingan lainnya atau *stakeholders* dalam mendapatkan informasi Jamkrindo menyediakan akses dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang handal melalui *website* www. jamkrindo.com. To make it easier for work partners, or other interested communities or stakeholders to obtain information, Jamkrindo provides access by utilizing reliable information technology support through the website www. jamkrindo.com.

No.	Akses Informasi Information Access	Jenis Types
		c. *Press Release* Jamkrindo juga pada saat diperlukan melakukan publikasi dari setiap kegiatan perusahaan yang dilakukan melalui *press release.* When needed, Jamkrindo also publishes every Company activity through press releases.
		d. *Public Expose* Sekali dalam setahun perusahaan wajib menyelenggarakan *public expose* atau paparan publik mengenai kinerja perusahaan . Once a year the Company is required to hold a public exposure regarding the Company's performance.
		e. Iklan Advertisement Iklan digunakan sebagai alat untuk mengelola citra dan meningkatkan awareness terhadap Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan menggunakan media untuk menyebarluaskan iklan di masyarakat, antara lain adalah surat kabar, majalah, dan media lainnya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target *audiences* agar iklan dapat berfungsi dengan efektif . Advertising is used as a tool to manage image and increase awareness of Jamkrindo and its products, by using media to disseminate advertisements in society, including newspapers, magazines and other media, by first analyzing the media and target audiences so that advertising can function effectively.
		f. Pameran Exhibition Jamkrindo juga selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pameran untuk mengelola citra dan meningkatkan awareness terhadap Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan target audiences agar iklan dapat berfungsi dengan efektif . Jamkrindo also always participates in every exhibition activity to manage its image and increase awareness of Jamkrindo and its products, by first analyzing the media and target audiences so that advertising can function effectively.

Korespondensi dan Laporan Berkala

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:

Correspondence and Periodic Reports

Financial and non-financial information from the Company has been compiled and reported transparently to shareholders, stakeholders, and other required institutions. Information is reported according to the time target, presented completely and accurately, up to date, intact and adequate in accordance with the procedures, types and scope as stipulated in the provisions concerning Transparency of the Company's Financial Conditions. Information is presented through reports in the form of:

1. Laporan Triwulan;
2. Penjelasan dan klarifikasi atas pemberitaan di media massa;
3. Keterbukaan informasi melalui *public expose*;
4. Laporan administrasi kepada Pemegang Saham;
5. Laporan Tahunan.

Di bawah ini disajikan korespondensi Perusahaan dengan Kementerian BUMN selama tahun 2023

1. Quarterly Reports;
2. Explanation and clarification of news coverage in the mass media;
3. Disclosure of information through public expose;
4. Administrative reports to Shareholders;
5. Annual report.

Below is presented the Company's correspondence with the Ministry of SOEs for 2022.

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	**Frekuensi (kali)** Frequency (Times)	**Perihal** Regarding
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Buku RKAP 2023 Submission of RKAP 2023
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	2	Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 PT Jaminan Kredit Indonesia Invitation to the General Meeting of Shareholders (GMS) Ratification of the Company's 2022 Work Plan and Budget (RKAP) PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Usulan RUPS GMS Proposal
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN PT Jamkrindo Tahun 2020 pada Triwulan IV Tahun 2022 Realization Report on the Use of Additional PT Jamkrindo PMN Funds in 2020 in the Fourth Quarter of 2022
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Keuangan dan Kegiatan Tahunan Periode Tahun 2022 Annual Financial Statement and Activity for the 2022 Period
Surat Penyampaian Submission Letter	1	*Request For Shareholders Confirmation*
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK Submission of Copies of OJK BoC Decree
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Penjelasan Laporan PMN TW IV Submission of Explanation of PMN Report Q IV
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Ijin Dinas ke Hungaria, Austria, dan Republik Ceko dalam rangka menghadiri Global GRC Benchmark Series – 5, 2023 Application for Service Permit to Hungary, Austria and the Czech Republic to attend the Global GRC Benchmark Series – 5, 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamkrindo Submission of a copy of the decree of the OJK Board of Commissioners regarding the results of the capability assessment and decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Jamkrindo
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri PT Jaminan Kredit Indonesia Report on the Implementation of PT Jaminan Kredit Indonesia's Overseas Official Trip
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Konfirmasi Bantuan Program Pendidikan Kewirausahaan Confirmation of Entrepreneurship Education Program Assistance
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Status Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 PT Jamkrindo Submission of PT Jamkrindo's 2022 Financial Statement Audit Status
Surat Penyampaian Submission Letter		Penyampaian Tanggapan Permintaan Laporan Audited 2022 PT Jamkrindo Submission of Response to PT Jamkrindo's 2022 Audited Report Request

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	**Frekuensi (kali)** Frequency (Times)	**Perihal** Regarding
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN PT Jamkrindo Tahun 2020 Pada Triwulan I Tahun 2023 Realization Report on the Use of Additional PT Jamkrindo PMN Funds in 2020 in the First Quarter of 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian GCG Submission of GCG
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Audited PT Jamkrindo Tahun Buku 2022 Submission of Publication of PT Jamkrindo Audited Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2022
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Laporan Keuangan Program PUMK *Audited* Tahun Buku 2022 PT Jaminan Kredit Indonesia Submission of Audited PUMK Program Financial Statement for Fiscal Year 2022 of PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	2	Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrindo Invitation to PT Jamkrindo GMS
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Progress Penyampaian Dokumen PT Jamkrindo kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Infromasi Penyelenggaraan Rapat Teknis dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Progress Report on Submission of PT Jamkrindo Documents to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Information on Holding Technical Meetings in the context of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2022
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	2	Undangan RUPS Invitation to the GMS
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Penggunaan Dividen Tahun Buku 2022 Use of Dividend Fiscal Year 2022
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Ijin Dalam Rangka Cuti Ibadah Haji Application for Permit for Hajj Leave
Surat Penyampaian Submission Letter	2	Permohonan Testimoni HUT Ke-53 PT Jamkrindo Request for Testimonials for PT Jamkrindo's 53rd Anniversary
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan ACSIC *Conference* Ke-35 di Ulaanbaatar, Mongolia Invitation to the 35th ACSIC Conference Ke-35 in Ulaanbaatar, Mongolia
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penjelasan atas Surat dari Kuasa Hukum PT BAV terkait Penyelesaian Klaim PT Jamkrindo Explanation of the Letter from PT BAV's Attorney regarding the Settlement of PT Jamkrindo Claims
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Ijin Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Luar Negeri Application for Service Permit for Overseas Work Visit
Surat Penyampaian Submission Letter	2	Permohonan Ijin Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Luar Negeri ACSIC Application for Service Permit for Overseas Work Visit to ACSIC
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PNM PT Jamkrindo Tahun 2020 pada Triwulan II Tahun 2023 Realization Report on the Use of Additional PT Jamkrindo PNM Funds in 2020 in the Second Quarter of 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Testimoni HUT PT Jamkrindo Request for Testimonial of Anniversary of PT Jamkrindo
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Masukan dalam Penyusunan aps untuk RKAP Tahun 2024 Request for Input in Preparing APS for 2024 RKAP
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Narasumber Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PT Jamkrindo Tahun 2023 Invitation for Speaker for PT Jamkrindo's 2023 National Coordination Meeting (Rakornas).
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Memberikan *Keynote Speech* Pada Acara Puncak HUT ke-53 PT Jamkrindo Request to Give a Keynote Speech at the Peak Event of PT Jamkrindo's 53rd Anniversary

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	Frekuensi (kali) Frequency (Times)	Perihal Regarding
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Rapat *Monitoring* dan Evaluasi PT Jaminan Kredit Indonesia Invitation to the Monitoring and Evaluation Meeting of PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Rapat *Monitoring* dan Evaluasi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Denpasar PT Jaminan Kredit Indonesia Invitation to the Monitoring and Evaluation Meeting of the Denpasar Regional Office and Branch Office of PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Karyawan Penugasan Assignment Employees
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 PT Jaminan Kredit Indonesia 2nd Quarter of 2023's Activity and Financial Statement of PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang PT Jamkrindo Invitation for Performance Monitoring and Evaluation Activities of Regional Offices and Branch Offices of PT Jamkrindo
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Perjalanan Dinas Luas Negeri PT Jamkrindo PT Jamkrindo Overseas Official Trip Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Monev Jambi Jambi Monitoring and Evaaluation
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Monev Pekanbaru Pekanbaru Monitoring and Evaaluation
Surat Penyampaian Submission Letter	3	Penyampaian Buku AR 2022 Submission of AR 2022 Book
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Ijin Dinas ke Swiss dalam rangka Seminar *Board and Risk* di Switzerland Application for Service Permit to Switzerland for the Board and Risk Seminar in Switzerland
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan *Keynote Speech* Request for Keynote Speech
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN PT Jamkrindo Tahun 2020 Pada Triwulan III Tahun 2023 Realization Report on the Use of Additional PMN Fund of PT Jamkrindo in 2020 in the Third Quarter of 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian usulan dalam Penyusunan Aspirasi Pemegang Saham untuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 (PT Jamkrindo) Submission of proposals in Preparing Shareholder Aspirations for the 2024 Company Work Plan and Budget (PT Jamkrindo)
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Narasumber Strategi Pengelolaan Risiko Reputasi PT Jamkrindo Request for Speaker for PT Jamkrindo's Reputation Risk Management Strategy
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Narasumber Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BUMN Request for Speaker on the Implementation of Risk Management in the SOEs' Environment
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Tambahan Informasi atas Surat Direksi PT Jamkrindo Nomor B.1826/EKT/DIRUT/SPR/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 Perihal Permohonan Ijin Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Luar Negeri Additional Information on the Letter of the Directors of PT Jamkrindo Number B.1826/EKT/DIRUT/SPR/X/2023 dated October 4, 2023 Regarding Application for Service Permits for the Context of Overseas Work Visits
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Ijin Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Luar Negeri Application for Service Permit for Overseas Work Visits
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Triwulan Quarterly Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Data Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) PT Jamkrindo TW III 2023 Submission of PT Jamkrindo Q III 2023 Main Performance Indicators (IKU) Realization Data

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	**Frekuensi (kali)** Frequency (Times)	**Perihal** Regarding
Surat Penyampaian Submission Letter	1	RKAP
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Buku RKAP 2024 Submission of RKAP 2024 Book
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Monitoring dan Evaluasi kinerja Kantor Cabang Batam dan Realisasi KUR Triwulan III Kantor Wilayah Medan PT Jamkrindo Monitoring and Evaluation of the performance of the Batam Branch Office and Realization of Quarter III Medan Regional Office KUR of PT Jamkrindo
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Permintaan Data Usulan Program Tahunan Privatisasi Tahun 2024 Submission of Request for Data on Proposed Annual Privatization Program in 2024
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Rapat Pembahasan RKAP Tahun 2024 PT Jamkrindo Invitation to PT Jamkrindo's 2024 RKAP Discussion Meeting
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Ratek RKAP 2024 Invitation to RKAP 2024 Technical Meeting
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Komisaris PT Jamkrindo Report on the Implementation of the Overseas Official Trip of the Commissioner of PT Jamkrindo
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Ratek RKAP 2024 Invitation to RKAP 2024 Technical Meeting
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian RKAP Submission of RKAP
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Usulan agenda RUPS RKAP 2024 Proposed agenda for the 2024 GMS RKAP
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian kebutuhan PMN th anggaran 2025 Submission of PMN needs for the 2025 fiscal year
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Term Sheet dan Usulan Tarif Produk Penjaminan Kredit Program Skema Khusus Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Submission of Term Sheet and Proposed Rates for Credit Guarantee Products for the Special Scheme for Agricultural Equipment and Machinery (Alsintan)
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 PT Jaminan Kredit Indonesia Invitation to the General Meeting of Shareholders (GMS) Ratification of the Company's 2022 Work Plan and Budget (RKAP) PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Usulan RUPS Proposal of GMS
Surat Penyampaian Submission Letter	1	*Request For Shareholders Confirmation*
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK tentang Hasil Penelilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hendro Padmono dan Sdr. Achmad Ivan S. Soeparno Submission of a copy of the decree of the OJK Board of Commissioners regarding the results of the fit and proper test of Mr. Hendro Padmono and Mr. Achmad Ivan S. Soeparno
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Bulanan Fungsi Kepatuhan Compliance Function Monthly Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Buku RKAP 2023 Submission of RKAP Book 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Keuangan dan Kegiatan Tahunan Periode Tahun 2022 Annual Financial Statement and Activity for the 2022 Period
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Informasi kepada PT Jamkrindo Submission of Information to PT Jamkrindo

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	Frekuensi (kali) Frequency (Times)	Perihal Regarding
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Bulanan Kepatuhan Compliance Function Monthly Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Masukan dan Tanggapan atas Laporan Pengelolaan IFG Corporate University Tahun 2022 dan Kalender Pembelajaran Tahun 2023 Input and Response to the 2022 IFG Corporate University Management Report and 2023 Learning Calendar
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Risalah Rapat Hasil Kunjungan Kerja dan Audiensi Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Submission of Minutes of Meeting Results from Work Visits and Hearings to the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi TW IV Tahun 2022 PT Jamkrindo Submission of Integrated Risk Management Report Q IV 2022 PT Jamkrindo
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Penambahan Modal PT Jamkrindo Request for Capital Addition of PT Jamkrindo
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian LHA LHA Submission
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT Jamkrindo Tahun 2023 Submission of PT Jamkrindo's General Plan for Procurement of Goods and Services for 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamkrindo Submission of a copy of the decree of the OJK Board of Commissioners regarding the results of the capability assessment and decisions of the Board of Commissioners and Directors of PT Jamkrindo
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Tanggapan atas Tindak Lanjut Rapat Komite Investasi Periode Februari 2023 Submission of Responses to the Follow-up to the Investment Committee Meeting for the February 2023 Period
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Persetujuan Keikutsertaan PT Jaminan Kredit Indonesia dalam Pengadaan Bersama Jasa Event Organizer Kegiatan Mudik Bersama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun 2023 Submission of Approval for PT Jaminan Kredit Indonesia's Participation in Joint Procurement of Homecoming Event Organizer Services with PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and Subsidiaries in 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Kepatuhan Compliance Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Tanggapan atas Tindak Lanjut Rapat Komite Investasi Periode Februari 2023 Submission of Responses to the Follow-up to the Investment Committee Meeting for the February 2023 Period
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Laporan Keuangan Submission of Financial Statement
Surat Penyampaian Submission Letter		Laporan Bulanan Kepatuhan Compliance Monthly Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Surat Permintaan Opini Hukum Kepada Kejaksaan Perihal Pengadaan Tanah dan Bangunan Jamkrindo Kantor Cabang Tangerang Letter of Request for Legal Opinion to the Prosecutor's Office Regarding Land and Building Acquisition of Jamkrindo Tangerang Branch Office
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Transaksi Pembelian SBN (PMN 3T) Submission of SBN Purchase Transactions (PMN 3T)
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 Proposed Agenda for the General Meeting of Shareholders (GMS) Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Report for the 2022 Fiscal Year
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrindo Invitation to the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Jamkrindo

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	**Frekuensi (kali)** Frequency (Times)	**Perihal** Regarding
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Permohonan Ijin Dalam Rangka Cuti Ibadah Haji Application for Permit for Hajj Leave
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Testimoni HUT Ke-53 PT Jamkrindo Request for Testimonials for PT Jamkrindo's 53rd Anniversary
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penggunaan Dividen Tahun Buku 2022 Use of Dividend of Fiscal Year 2022
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 PT Jaminan Kredit Indonesia 2nd Quarter of 2023 Activity and Financial Statement of PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Permohonan Memberikan Keynote Speech Pada Acara Puncak HUT ke-53 PT Jamkrindo Request to Give a Keynote Speech at the Peak Event of PT Jamkrindo's 53rd Anniversary
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Koreksi Rincian Penempatan Dana SBN PMN Rp3T Submission of Corrections to Details of Placement of SBN PMN Funds of IDR 3 Trillion
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Menjadi Narasumber Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PT Jamkrindo Tahun 2023 Invitation to be a speaker at PT Jamkrindo's 2023 National Coordination Meeting (Rakornas).
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Ijin Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Luar Negeri ACSIC Application for Service Permit for ACSIC Overseas Work Visit
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Penunjukan Tim Perumus dan Tim Pelaksana Pengadaan Bersama Laptop Tahun 2023 Submission of the Appointment of the Drafting Team and Implementing Team for Joint Procurement of Laptops in 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Konfirmasi Jumlah License dan Alokasi Budget atas Pengadaan Bersama *User License Oracle EBS Project Enterprise Resource Planning* (ERP) PT Jamkrindo Submission of Confirmation of Number of Licenses and Budget Allocation for Joint Procurement of User Licenses for Oracle EBS Project Enterprise Resource Planning (ERP) PT Jamkrindo
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Pembahasan Perkembangan Skema GRSF dan Rencana *Initial Investment* untuk Pengembangan System IT GRF Invitation to discuss the development of the GRSF scheme and initial investment plans for developing the GRF IT system
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Triwulan Quarterly Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Permohonan Pembahasan terkait Penyusunan Kebijakan Strategis terkait Upaya Penyelesaian Subrogasi Request for Discussion regarding the Preparation of Strategic Policies regarding Efforts to Settle Subrogation
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Pemenuhan Dokumen dan/atau Data Pendukung Kajian Komparasi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Anggota Holding Submission of Compliance Documents and/or Data Supporting Comparative Study of Company Regulations and Collective Labor Agreements of Holding Members
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Tanggapan atas Hasil Rapat Komite Pengembangan Produk Holding Submission of Responses to the Results of the Holding Product Development Committee Meeting
Surat Penyampaian Submission Letter	1	*Talent Secondment*
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian RKAP Submission of RKAP
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian kebutuhan PMN th anggaran 2025 Submission of BMN needs for the 2025 fiscal year

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	Frekuensi (kali) Frequency (Times)	Perihal Regarding
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Ratek RKAP 2024 Invitation to 2024 RKAP Technical Meeting
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Dokumen Pendukung atas Hasil Penelaahan Data Debitur dalam Rangka Penjaminan Pemerintah Program PEN Submission of Supporting Documents for Debtor Data Review Results in the Context of Government Guarantee for the PEN Program
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Borderoux IJP Loss Limit dan Klaim Program PEN Per Oktober 2022 Borderoux Guarantee Fee Loss Limit Report and PEN Program Claims as of October 2022
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Bulanan Penjaminan dan Klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR) Monthly Report on Guarantee and Claims for People's Business Credit (KUR)
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Pembatalan Penjaminan Program PEN GEN 2 atas 2 Terjamin PT Jamkrindo Cancellation of PT Jamkrindo Guaranteed PEN GEN 2 over 2 Program Guaranteed
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Periode III Desember 2020 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN Program Period III December 2020
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Asersi Manajemen dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2022 Unaudited PT Jamkrindo Submission of Management Assertions in the Context of Preparing BA BUN Subsidized Expenditure of Unaudited Financial Statements (BA 999.07) of 2022 of PT Jamkrindo
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Triwulan IV Tahun 2022 Pelaksanaan Penugasan Penjaminan PEN PT Jamkrindo Fourth Quarter Report 2022 Implementation of PT Jamkrindo's PEN Guarantee Assignment
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Revisi data Penjaminan KMK PEN Gen 2 Nomor Sertifikat Penjaminan atas 21 Terjamin Request for Revision of KMK PEN Gen 2 Guarantee data Guarantee Certificate Number over 21 Guaranteed
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Dana Penjaminan Kredit Kop dan UKM Cooperative and SME Credit Guarantee Fund Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Data Asersi Tahun 2022 PT Jamkrindo PT Jamkrindo's 2022 Assertion Data Submission
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Periode III Januari 2021 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN Program Period III January 2021
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Bulanan KUR KUR Monthly Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan sebagai Narasumber Focus Group Discussion (FGD) "Go Digital Bersama Dukcapil Melalui Identitas Kependudukan Digital" Invitation as Speaker for Focus Group Discussion (FGD) "Go Digital with Dukcapil Through Digital Population Identity"
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Bulanan KUR KUR Monthly Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Dana Penjaminan Kredit Kop & UKM Cooperative & SME Credit Guarantee Fund Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Periode III Februari 2021 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN Program Period III February 2021
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Konfirmasi Metode Penagihan dan Verifikasi Subsidi IJP KUR Confirmation of Billing Method and Verification of IJP KUR Subsidy
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Data Potensi Tagihan Subsidi IJP KUR Tahun 2023 s.d 2007 Submission of Potential Data for IJP KUR Subsidy Bills from 2023 to 2007

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	**Frekuensi (kali)** Frequency (Times)	**Perihal** Regarding
Surat Penyampaian Submission Letter	2	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Periode III Maret 2021 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN Program Period III March 2021
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Bulanan KUR KUR Monthly Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penjaminan KUR PT Jamkrindo bersama Kemeneterian Koordinator Bidang Perekonomian Invitation to Meeting for Monitoring and Evaluation of PT Jamkrindo's KUR Guarantee Performance with the Coordinating Ministry for Economic Affairs
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Pelaksanaan Penugasan Penjaminan PEN PT Jamkrindo Implementation of PT Jamkrindo's PEN Guarantee Assignment
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Dana Penjaminan Kredit Kop dan UKM Cooperative & SME Credit Guarantee Fund Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Bulanan KUR KUR Monthly Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Dana Penjaminan Kredit Kop dan UKM Cooperative & SME Credit Guarantee Fund Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Periode III April 2021 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN Program Period III April 2021
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Borderoux IJP *Loss Limit* dan Klaim Program PEN Periode April 2023 Borderoux Guarante Fee Loss Limit Report and PEN Program Claims for the April 2023 Period
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Bulanan KUR KUR Monthly Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Dana Penjaminan Kredit Kop & UKM Cooperative & SME Credit Guarantee Fund Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Periode III Mei 2021 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN Program Period III May 2021
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Testimoni HUT Ke-53 PT Jamkrindo Request for Testimonials for PT Jamkrindo's 53rd Anniversary
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	2	Undangan ACSIC Conference Ke-35 di Ulaanbaatar, Mongolia Invitation to the 35th ACSIC Conference Ke-35 in Ulaanbaatar, Mongolia
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	2	Permohonan Testimoni HUT PT Jamkrindo Request for Testimonials for PT Jamkrindo's Anniversary
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN GEN 2 Periode II Juni 2022 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN Program GEN 2 Period II June 2022
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Periode III Juni 2023 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN Program Period III June 2023
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Dana Penjaminan Kredit Kop dan UKM Cooperative & SME Credit Guarantee Fund Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Narasumber pada Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penjaminan KUR Triwulan II Invitation of Speaker for Monitoring and Evaluation of KUR Guarantee Performance in Quarter II
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PT Jamkrindo Tahun 2023 Invitation of Speaker at PT Jamkrindo's 2023 National Coordination Meeting (Rakornas).

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	Frekuensi (kali) Frequency (Times)	Perihal Regarding
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Borderoux IJP Loss Limit dan Klaim Program PEN Per Juni 2023 Borderoux Guarante Fee Loss Limit Report and PEN Program Claims for the June 2023 Period
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Periode III Juli 2023 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN Program Period III July 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN GEN 2 Periode II Juli 2022 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN GEN 2 Period II July 2022
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) dan *System Integration Testing* (SIT) *System Webservice* (H2H) Invitation to Implement User Acceptance Test (UAT) and System Integration Testing (SIT) System Webservice (H2H)
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara PT Jamkrindo dengan PT BPR Indra Candra Invitation to Signing of the Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT BPR Indra Candra
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Dana Penjaminan Kredit Kop dan UKM Cooperative & SME Credit Guarantee Fund Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Application for Payment of Guarantee Fees
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Bulanan Penjaminan dan Klaim KUR KUR Guarantee and Claims Monthly Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Periode III Agustus 2023 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN Program Period III August 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Program PEN GEN 2 Periode II Agustus 2022 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN GEN 2 Period II August 2022
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Dana Penjaminan Kredit Kop & UKM Cooperative & SME Credit Guarantee Fund Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Menjadi Narasumber Invitation to become a Speaker
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pemenuhan Dokumen Pendukung atas Temuan Audit Itjen Kemenkeu dalam Rangka Penjaminan PEN Request for Extension of the Deadline for Fulfillment of Supporting Documents for the Audit Findings of the Inspector General of the Ministry of Finance in the Context of PEN Guarantee
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Triwulan III Tahun 2023 Pelaksanaan Penugasan Penjaminan PEN PT Jamkrindo Quarter III Report 2023 Implementation of PT Jamkrindo's PEN Guarantee Assignment
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Bulanan KUR KUR Monthly Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Narasumber Invitation to become a Speaker
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Dana Penjaminan Kredit Kop dan UKM Cooperative & SME Credit Guarantee Fund Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Permohonan Kunjungan PT Jamkrindo Application to a Visit of PT Jamkrindo
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Bulanan Penjaminan dan Klaim Kredit Usaha Rakyat (KUR) Monthly Report on Guarantee and Claims for People's Business Credit (KUR)
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN GEN 2 Periode II Oktober 2022 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN GEN 2 Period II October 2022

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	**Frekuensi (kali)** Frequency (Times)	**Perihal** Regarding
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Dana Penjaminan Kredit Kop dan UKM Cooperative & SME Credit Guarantee Fund Report
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	2	Permohonan Audiensi Penjaminan Suretyship Request for Suretyship Guarantee Hearing
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Periode III November 2021 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN GEN 2 Period II November 2021
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN GEN 2 Periode II November 2022 Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN GEN 2 Period II November 2022
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Penonaktifan Debitur PEN Gen 2 pada Sistem e-JamKU Request for Deactivation of PEN Gen 2 Debtors on the e-JamKU System
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Sinkronisasi Kebijakan KUR Tahun 2024 Invitation to 2024 KUR Policy Synchronization
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Revisi Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Program PEN Periode III November 2021 Revised Application for Payment of Guarantee Fees for the PEN Program Period III November 2021
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Laporan Bulanan KUR KUR Monthly Report
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Direktur Utama serta Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan PT Jaminan Kredit Indonesia Application to Obtain Approval to Become President Director and Director of HR Management, General Affairs, and Compliance at PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Application to Obtain Approval to Become President Commissioner and concurrently Independent Commissioner
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Application to Obtain Approval to Become President Commissioner and concurrently Independent Commissioner
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Direktur Utama serta Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan PT Jaminan Kredit Indonesia Application to Obtain Approval to Become President Director and Director of HRM, General Affairs, and Compliance PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Tindak Lanjut OJK OJK Follow Up
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Audiensi Request for Hearing
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Jaminan Kredit Indonesia Application to Obtain Approval to Become President Commissioner and concurrently Independent Commissioner of PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Tindak Lanjut OJK OJK Follow Up
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada Tahun Buku 2022 Report on the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the Context of an Audit of Annual Historical Financial Information in Fiscal Year 2022
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Tindak Lanjut OJK OJK Follow Up
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Penyampaian PKS KAP PwC PKS KAP PwC Submission Report

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	Frekuensi (kali) Frequency (Times)	Perihal Regarding
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Data Terkait Kerja sama Perusahaan Penjaminan dengan Perusahaan Reas Submission of Data Related to Collaboration between Guarantee Companies and Reinsurance Companies
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Tindak Lanjut OJK OJK Follow Up
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri PT Jaminan Kredit Indonesia Report on the Implementation of PT Jaminan Kredit Indonesia's Official Trip Abroad
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Laporan GCG GCG Report Submission
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian *Audited* PT Jamkrindo Tahun Buku 2022 Submission of Publication of PT Jamkrindo Audited Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2022
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian TL Follow up Submission
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Evaluasi Komite Audit Audit Committee Evaluation
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Tindak Lanjut OJK OJK Follow Up
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan ACSIC *Conference* Ke-35 di Ulaanbaatar, Mongolia Invitation to the 35th ACSIC Conference Ke-35 in Ulaanbaatar, Mongolia
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Tanggapan Surat OJK OJK Response Letter
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Tindak Lanjut Validasi Penilaian Sendiri Delivery of Self-Assessment Validation Follow-up
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Tindak Lanjut OJK OJK Follow Up
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Buku AR 2022 AR 2022 Book Submission
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada Tahun Buku 2023 Report on the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the Context of an Audit of Annual Historical Financial Information in Fiscal Year 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Direktur Keuangan dan Investasi PT Jaminan Kredit Indonesia Application to Obtain Approval to Become Director of Finance and Investment of PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia Application to Obtain Approval to Become President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Waktu Pemenuhan Dokumen Atas Tindaklanjut Validasi Otoritas Jasa Keuangan pada Tanggal 10 November 2023 Request for Document Fulfillment Time for Financial Services Authority Validation Follow-up on November 10, 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Direktur Keuangan dan Investasi PT Jaminan Kredit Indonesia Application to Obtain Approval to Become Director of Finance and Investment of PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Rencana Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024 Submission of Financial Literacy and Inclusion Activity Plan for 2024

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	**Frekuensi (kali)** Frequency (Times)	**Perihal** Regarding
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Laporan Monitoring Pemenuhan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2022 Monitoring Report on the Fulfillment of Follow-up Recommendations for Auditing PT Jaminan Kredit Indonesia in 2022
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Audiensi Lanjutan terkait Rencana Modifikasi Perhitungan Gearing Ratio PT Jamkrindo Request for Further Hearing regarding PT Jamkrindo's Gearing Ratio Calculation Modification Plan
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	118	Transfer Dana Fund Transfer
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	6	Penempatan Deposito Berjangka Time Deposit Placement
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	29	Penempatan DOC DOC Placement
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Perpanjangan Perjanjian Kerja sama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT BPD Bali Submission of PT BPD Bali People's Business Credit Guarantee (KUR) Cooperation Agreement Extension
Surat Penyampaian Submission Letter	2	Pengembalian IJP/Premi Penjaminan FLPP BTN Refund of BTN Guarantee Fee/FLPP Guarantee Premium
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	11	Penempatan Deposito Deposit Placement
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja sama antara PT Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Application for Extension of the Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT South Kalimantan Regional Development Bank
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	8	Permohonan Pembayaran Kekurangan Bunga Deposito Periode November-Desember 2022 Request for Payment of Deposit Interest Shortfall for the November-December 2022 Period
Surat Penyampaian Submission Letter	11	Surat Konfirmasi Bank dan Deposito Bank and Deposit Confirmation Letter
Surat Penyampaian Submission Letter	7	Lelang Surat Utang Negara Auction of Government Debt Securities
Surat Penyampaian Submission Letter	8	Pencairan Deposito Disbursement of deposit
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Pembuatan Rekening Escrow Dana PEN PT Jamkrindo Creation of a PT Jamkrindo PEN Fund Escrow Account
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Pembelian dan Penerimaan SUN PBS036 Purchase and Receipt of SUN PBS036
Surat Penyampaian Submission Letter	3	SI Penempatan Deposito Bank Raya Permit of Bank Raya Deposit Placement
Surat Penyampaian Submission Letter	1	SI Transfer Dana Permit of Fund Transfer
Surat Penyampaian Submission Letter	2	SI DOC Permit of DOC
Surat Penyampaian Submission Letter	12	SI Penempatan DOC Permit of DOC Placement
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja sama antara PT Jamkrindo dengan PT Bank Bukopin Tbk Application for Extension of the Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Bank Bukopin Tbk
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Pemberitahuan Nomor Rekening Penampungan Hasil *Corporate Action* Notification of Escrow Account Number for Corporate Action Results
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	3	Surat Konfirmasi Bank Bank Confirmation Letter

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	Frekuensi (kali) Frequency (Times)	Perihal Regarding
Surat Penyampaian Submission Letter	10	*Request For Shareholders Confirmation*
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja sama antara PT Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Request for Extension of the Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Pembelian dan Penerimaan SUN PBS003 Purchase and Receipt of SUN PBS003
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja sama antara PT Jamkrindo dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Request for Extension of the Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Bank Pembangunan Daerah South Kalimantan
Surat Penyampaian Submission Letter	1	*Quota Share Reinsurance Treaty Produk Penjaminan KUR dan Non KUR*
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Pembelian dan Penerimaan SUN FR0095 & FR0096 Purchase and Receipt of SUN FR0095 & FR0096
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Pembayaran dan Penerimaan Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023 Payment and Receipt of Sustainable Bonds VI Sarana Multigriya Finansial Phase IV 2023
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Penyampaian Pemberhentian Perjanjian Kerja Sama antara PT Jaminan Kredit Indonesia dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada PKS yang tidak Memiliki Jatuh Tempo Submission of Termination of the Cooperation Agreement between PT Jaminan Kredit Indonesia with PT Bank Pembangunan Daerah South Sumatra and Bangka Belitung on PKS that does not have a maturity date
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Penyampaian Pemberhentian Perjanjian Kerja Sama antara PT Jaminan Kredit Indonesia dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi pada PKS yang tidak Memiliki Jatuh Tempo Submission of Termination of the Cooperation Agreement between PT Jaminan Kredit Indonesia with PT Bank Pembangunan Daerah Jambi on PKS that does not have a maturity date
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	19	Permohonan Pembayaran Kekurangan Bunga Deposito Periode November - Januari 2023 Request for Payment of Deposit Interest Shortfall for the Period November - January 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Pembelian dan Penerimaan SUN PBSG001 Purchase and Receipt of SUN PBSG001
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	2	*Confirmation Letter*
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Pembelian dan Penerimaan SUN FR0095 dan FR0096 Purchase and Receipt of SUN FR0095 and FR0096
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Tagihan IJP KUR BRI Posisi Per 31 Desember 2022 Submission of Guarantee Fee of KUR BRI Bills Position as of December 31, 2022
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Konfirmasi Atas Perbedaan Saldo Piutang Klaim Reasuransi Periode Per 31 Desember 2022 Confirmation of the Difference in the Balance of Reinsurance Claims Receivables for the Period as of December 31, 2022
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	6	Permohonan Pembayaran Kekurangan Bunga Deposito Periode Februari 2023 Request for Payment of Deposit Interest Shortfall for the Period February 2023
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Permohonan Pembayaran Kekurangan Bunga Deposito Periode Maret 2022 - Februari 2023 Request for Payment of Deposit Interest Shortfall for the Period March 2022 - February 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penagihan Subrogasi atas Hasil Rekonsiliasi Produk KUR, PEN dan Kupedes KUPRA Subrogation Collection for Reconciliation Results of KUR, PEN and Kupedes KUPRA Products

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	**Frekuensi (kali)** Frequency (Times)	**Perihal** Regarding
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Pembelian dan Penerimaan SUN PBSG001 Purchase and Receipt of SUN PBSG001
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Pembelian dan Penerimaan SUN FR00096 Purchase and Receipt of SUN FR00096
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	24	Transfer Dana Fund Transfer
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Permohonan Tindak Lanjut Penyelesaian Klaim Kupedes Rakyat Mekanisme Autodebet posisi Maret 2023 Application for Follow-up on Settlement of People's Kupedes Claims Autodebit Mechanism position March 2023
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	10	Transfer Dana Fund Transfer
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Pembayaran dan Penerimaan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Tahap II Tahun 2023 Payment and Receipt of Sustainable Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Phase II 2023
Surat Penyampaian Submission Letter	9	Permohonan Dukungan Pemenuhan Dokumen Tagihan IJP KUR Gen 1 kepada Pemerintah Request for Support in Fulfillment of Guarante Fee of KUR Gen 1 Billing Documents to the Government
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Pemindahan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Tahap II Tahun 2023 Seri B Kepada BRI Kustodi Transfer of Sustainable Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Phase II 2023 B Series to BRI Custodian
Surat Penyampaian Submission Letter	6	Penempatan DOC DOC Placement
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja sama antara PT Jamkrindo dengan PT BPD Kalimantan Selatan Request for Extension of the Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT BPD South Kalimantan
Surat Penyampaian Submission Letter	3	Penempatan Deposito Deposit Placement
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Pemutakhiran Data PT Jamkrindo pada Data Inventori Perusahaan Penjaminan di *Website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Application for PT Jamkrindo Data Updates on Guarantee Company Inventory Data on Financial Services Authority of the Republic of Indonesia (OJK) Website
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Kredit Usaha Rakyat antara PT Jamkrindo dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Invitation to Signing of the People's Business Credit Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja sama Penjaminan Bank Garansi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Application for Extension of Bank Guarantee Cooperation Agreement with PT Bank Pembangunan Daerah South Kalimantan
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Addendum Perjanjian Kerja sama Penjaminan Bank Garansi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Application for Addendum to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bank Guarantee Cooperation Agreement
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja sama antara PT Jamkrindo dengan PT Bank Pebangunan Daerah Jawa Timur Tentang Kredit Resi Gudang Application for Extension of Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Bank Pembangunan Daerah East Java Regarding Warehouse Receipt Credit
Surat Penyampaian Submission Letter	4	Permohonan Dukungan Pemenuhan Dokumen Tagihan IJP KUR Gen 1 Kepada Pemerintah Request for Support in Fulfillment of Guarantee Fee of KUR Gen 1 Billing Documents to the Government
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara PT Jamkrindo dengan PT Bank DKI Invitation to Signing of the Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Bank DKI

Korespondensi dengan Kementerian BUMN
Company's correspondence with the Ministry of SOEs

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	Frekuensi (kali) Frequency (Times)	Perihal Regarding
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penyampaian Perpanjangan Ke-2 Submission of 2nd Extension
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara PT Jamkrindo dengan PT Bank Sumsel Babel Invitation to Signing of the Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Bank Sumsel Babel
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permintaan Permohonan Perpanjangan Kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Request for Extension of Cooperation with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penggantian Specimen Speciment Replacement
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penegasan Specimen Tanda Tangan Signature Specimen Confirmation
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Undangan Menjadi Pembicara Invitation to Become a Speaker
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Penagihan Subrogasi atas Hasil Rekonsiliasi Produk KUR, PEN dan Kupedes KUPRA Subrogation Collection for Reconciliation Results of KUR, PEN and Kupedes KUPRA Products
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Surat Penawaran Kerja sama Penjaminan Pinjaman dan Pembiayaan Bank Indonesia Letter of Offer for Bank Indonesia Loan Guarantee and Financing Cooperation
Surat Penyampaian Submission Letter	1	Permohonan Perubahan dan Surat Kuasa Spesimen Tanda Tangan Request for Change and Power of Attorney of Signature Speciment
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara PT Jamkrindo dengan PT PT Bank Central Asia Tbk Invitation to Signing of the Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Bank Central Asia Tbk
Surat Pemberitahuan Letter of Notification	1	Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara PT Jamkrindo dengan PT PT Bank Central Asia Tbk Invitation to Signing of the Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Bank Central Asia Tbk

Situs Web

Keberadaan situs web memiliki peran yang signifikan atas tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada publik dan pemangku kepentingan, di mana hal ini akan memungkinkan penyampaian informasi tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah. Perusahaan telah memiliki situs web elektronik resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id. Situs web ini menyediakan konten seputar informasi Perusahaan yang komprehensif dan berguna bagi akses informasi kepada publik dan pemangku kepentingan.

Website

The existence of a website has a significant role in the governance of information disclosure. Disclosure and availability of information on the Company's website will provide benefits to the public and stakeholders, in which this will enable the delivery of unlimited information that can be done quickly, precisely, and inexpensively. The Company has an official electronic website with the address www.jamkrindo.co.id. This website provides comprehensive and useful content regarding Company information for information access to the public and stakeholders.

Hubungan Media

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif, Perusahaan melakukan hubungan media melalui Rilis Media kepada sejumlah media baik nasional maupun lokal. Di bawah ini disajikan Rilis Media yang dilakukan di sepanjang tahun 2023.

Media Relations

To be able to convey information comprehensively, the Company conducts media relations through Media Releases to a number of national and local media. Below are presented Media Releases made throughout 2023.

Rilis Jamkrindo Tahun 2023
Jamkrindo Releases of 2023

No	Foto Peristiwa Photo of the Event	Tanggal Date		Judul Siaran Pers Title
1		11 Februari 2023	February 11, 2023	Prospek Stabil, Jamkrindo Kembali Raih Peringkat idAA+ dari Pefindo Stable Prospect, Jamkrindo Obtains idAA+ Rating from Pefindo
2		25 Februari 2023	February 25, 2023	BUMN Serahkan Bantuan 2,7 M Kepada HKBP SOEs Gives 2.7 Billion Worth of Aid to HKBP
3		11 Maret 2023	March 11, 2023	Jamkrindo Cepat Tanggap Kirim Bantuan ke Plumpang dan Natuna Jamkrindo's Quick Respond to Send Aid to Plumpang and Natuna
4		14 Maret 2023	March 14, 2023	PT Jamkrindo Berkolaborasi Gelar Jalan Sehat HUT BUMN PT Jamkrindo Collaborates to Organize Healthy Walk Event for SOE Anniversary

Rilis Jamkrindo Tahun 2023
Jamkrindo Releases of 2023

No	Foto Peristiwa Photo of the Event	Tanggal Date		Judul Siaran Pers Title
5		15 Maret 2023	March 15, 2023	Peringati Hari Kopi Nasional, Jamkrindo Gelar Pelatihan Jamkrindo Holds Training to Commemorate National Coffee Day
6		06 April 2023	April 6, 2023	Berbagi di Bulan Ramadhan, PT Jamkrindo Gelar Kegiatan Sosial di Sumbawa Besar Sharing in Ramadan, PT Jamkrindo Organizes Social Activities in Sumbawa Besar
7		06 April 2023	April 6, 2023	Safari Ramadhan, Jamkrindo Berikan Santunan di Balikpapan Ramadan Safari, Jamkrindo Gives Charity in Balikpapan
8		06 April 2023	April 6, 2023	PT Jamkrindo Lakukan Safari Ramadhan dan Kegiatan Sosial di Palembang PT Jamkrindo Conducts Ramadan Safari and Social Activities in Palembang

Rilis Jamkrindo Tahun 2023
Jamkrindo Releases of 2023

No	Foto Peristiwa Photo of the Event	Tanggal Date		Judul Siaran Pers Title
9		06 April 2023	April 6, 2023	Jamkrindo Bagikan 7.937 paket sembako dan Santunan di Berbagai Daerah Jamkrindo Distributes 7,937 food packages and Compensation in Various Regions
10		07 April 2023	April 7, 2023	Berbagi di Bulan Ramadan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di PT. Jamkrindo Cabang Batam Sharing in Ramadan, Jamkrindo Conducts Social Activities at PT. Jamkrindo Batam Branch
11		16 April 2023	April 16, 2023	Erick Thohir ajak mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat berkontribusi untuk negara melalui BUMN Erick Thohir invites Lambung Mangkurat University students to contribute to the country through SOEs
12		27 April 2023	April 27, 2023	Jamkrindo Cetak Laba Bersih Rp1,28 Triliun Berkat Inovasi Berkelanjutan Jamkrindo Prints IDR1.28 Trillion Net Profit Through to Continuous Innovation

Rilis Jamkrindo Tahun 2023
Jamkrindo Releases of 2023

No	Foto Peristiwa Photo of the Event	Tanggal Date		Judul Siaran Pers Title
13		16 Mei 2023	May 16, 2023	Jamkrindo Lakukan Edukasi Anti Perundungan dan Kekerasan Seksual Kepada Ribuan Pelajar SD Jamkrindo Conducts Anti-bullying and Sexual Violence Education to Thousands of Elementary Students
14		06 Juni 2023	June 06, 2023	Jamkrindo Ajak Mahasiswa Bangun Ekosistem Digital UMKM Jamkrindo Invites Students to Build Digital Ecosystem for MSMEs
15		15 Juni 2023	June 15, 2023	Jamkrindo Bagi Ratusan Kacamata Gratis Untuk Pelajar di Indonesia Timur Jamkrindo Shares Hundreds of Free Reading Glasses for Students in Eastern Indonesia
16		05 Juli 2023	July 05, 2023	Rayakan HUT ke-53, Jamkrindo Berkomitmen Tingkatkan Kinerja dalam UMKMK Aksesibilitas Finansial UMKM Celebrating its 53rd Anniversary, Jamkrindo Committed to Improve Performance in Bridging Financial Accessibility of MSMEs

Rilis Jamkrindo Tahun 2023
Jamkrindo Releases of 2023

No	Foto Peristiwa Photo of the Event	Tanggal Date		Judul Siaran Pers Title
17		05 Juli 2023	July 05, 2023	Dorong Peningkatan Kompetensi UMKM Tanah Air, Jamkrindo Gelar Kelas Bisnis UMKM 2023 Jamkrindo Holds MSME Business Class 2023 to Encourage Competency Development of MSMEs in the Country
18		30 Agustus 2023	August 30, 2023	Jamkrindo Lanjutkan Pemberdayaan Peternak Jamkrindo Continues to Empower Cattle Breeders
19		12 September 2023	September 12, 2023	Dorong Peningkatan Kompetensi, jamkrindo Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan UMKM Jamkrindo Holds MSME Financial Management Workshop to Encourage Competency Development
20		15 September 2023	September 15, 2023	Jamkrindo Bawa 21 Produk UMKM ke Festival Pasar Senggol di Turki Jamkrindo brings 21 MSME products to Pasar Senggol Festival in Turkey

Rilis Jamkrindo Tahun 2023
Jamkrindo Releases of 2023

No	Foto Peristiwa Photo of the Event	Tanggal Date		Judul Siaran Pers Title
21		27 September 2023	September 27, 2023	Dorong UMKM Naik Kelas, Jamkrindo Kembali Gelar *Workshop* Pengelolaan Keuangan Encouraging MSMEs to Upgrade, Jamkrindo Once Again Holds Financial Management Workshop
22		02 Oktober 2023	October 02, 2023	Gelar *Workshop* di Palu, Jamkrindo Dorong Literasi Keuangan UMKM di Wilayah Indonesia Timur Jamkrindo Organizes Workshop in Palu, Encourages Financial Literacy of MSMEs in Eastern Indonesia Region
23		13 Oktober 2023	October 13, 2023	Gelar *Workshop* Pengelolaan Keuangan, Jamkrindo Dorong Digitalisasi UMKM Indonesia Timur Jamkrindo Holds Financial Management Workshop, Encourages Digitalization of Eastern Indonesian MSMEs

Rilis Jamkrindo Tahun 2023
Jamkrindo Releases of 2023

No	Foto Peristiwa Photo of the Event	Tanggal Date		Judul Siaran Pers Title
24		16 Oktober 2023	October 16, 2023	Jamkrindo Dorong UMKM Maluku Susun Laporan Keuangan Mandiri Jamkrindo Encourages Maluku MSMEs to Prepare Independent Financial Statements
25		27 Oktober 2023	October 27, 2023	Jamkrindo Dukung Digitalisasi dan Transformasi Bisnis UMKM Kota Kediri Jamkrindo Supports Digitalization and Business Transformation of Kediri City MSMEs
26		14 Desember 2023	December 14, 2023	Peduli Pengembangan Karakter Anak di Geopark Ciletuh, Jamkrindo Gelar Pelatihan Guru dan Seminar Parenting Jamkrindo Cares for Children's Character Development in Ciletuh Geopark, Organizes Teacher Training and Parenting Seminar

Aktivitas Hubungan Media Tahun 2023
Media Relations Activities in 2023

No	Tanggal Dates	Bentuk Hubungan Media Types of Media Relations
1	11 Februari 2023 February 11, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Prospek Stabil, Jamkrindo Kembali Raih Peringkat idAA+ dari Pefindo' Distribution of Press Release 'Stable Prospects, Jamkrindo Again Achieves idAA+ Rating from Pefindo'
2	25 Februari 2023 February 25, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'BUMN Serahkan Bantuan 2,7 M Kepada HKBP' Distribution of Press Release 'SOEs Hands Over 2.7 Billion Aid to HKBP'
3	11 Maret 2023 March 11, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Jamkrindo Cepat Tanggap Kirim Bantuan ke Plumpang dan Natuna' Distribution of Press Release 'Jamkrindo Quickly Responds to Send Aid to Plumpang and Natuna'
4	14 Maret 2023 March 14, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'PT Jamkrindo Berkolaborasi Gelar Jalan Sehat HUT BUMN' Distribution of Press Release 'PT Jamkrindo Collaborates to Hold BUMN Anniversary Healthy Walk'
5	15 Maret 2023 March 15, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Penyebaran Siaran Pers 'Peringati Hari Kopi Nasional, Jamkrindo Gelar Pelatihan' Distribution of Press Releases 'Distribution of Press Releases 'Commemorating National Coffee Day, Jamkrindo Holds Training'
6	6 April 2023 April 6, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Berbagi di Bulan Ramadhan, PT Jamkrindo Gelar Kegiatan Sosial di Sumbawa Besar' Distribution of Press Release 'Sharing in the Month of Ramadhan, PT Jamkrindo Holds Social Activities in Sumbawa Besar'
7	6 April 2023 April 6, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Safari Ramadhan, Jamkrindo Berikan Santunan di Balikpapan' Distribution of Press Release 'Ramadhan Safari, Jamkrindo Provides Compensation in Balikpapan'
8	6 April 2023 April 6, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'PT Jamkrindo Lakukan Safari Ramadhan dan Kegiatan Sosial di Palembang' Distribution of Press Release 'PT Jamkrindo Conducts Ramadhan Safari and Social Activities in Palembang'
9	6 April 2023 April 6, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Jamkrindo Bagikan 7.937 paket sembako dan Santunan di Berbagai Daerah' Distribution of Press Release 'Jamkrindo Distributes 7,937 Basic Food Packages and Compensation in Various Regions'
10	6 April 2023 April 6, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Berbagi di Bulan Ramadan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di PT Jamkrindo Cabang Batam' Distribution of Press Release 'Sharing in the Month of Ramadan, Jamkrindo Conducts Social Activities at PT Jamkrindo Batam Branch'
11	16 April 2023 April 16, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Erick Thohir ajak mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat berkontribusi untuk negara melalui BUMN' Distribution of Press Release 'Erick Thohir invites Lambung Mangkurat University students to contribute to the country through BUMN'
12	27 April 2023 April 27, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Jamkrindo Cetak Laba Bersih Rp 1,28 Triliun Berkat Inovasi Berkelanjutan' Distribution of Press Release 'Jamkrindo Records Net Profit of IDR 1.28 Trillion Thanks to Sustainable Innovation'
13	16 Mei 2023 May 16, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Jamkrindo Lakukan Edukasi Anti Perundungan dan Kekerasan Seksual Kepada Ribuan Pelajar SD' Distribution of Press Release 'Jamkrindo Conducts Anti-Bullying and Sexual Violence Education to Thousands of Elementary School Students'
14	06 Juni 2023 June 6, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Jamkrindo Ajak Mahasiswa Bangun Ekosistem Digital UMKM' Distribution of Press Release 'Jamkrindo Invites Students to Build a Digital Ecosystem for MSMEs'
15	15 Juni 2023 June 15, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Jamkrindo Bagi Ratusan Kacamata Gratis Untuk Pelajar di Indonesia Timur' Distribution of Press Release 'Jamkrindo Gives Hundreds of Free Glasses to Students in Eastern Indonesia'
16	05 Juli 2023 July 5, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Rayakan HUT ke-53, Jamkrindo Berkomitmen Tingkatkan Kinerja dalam Menjembatani Aksesibilitas Finansial UMKM' Distribution of Press Release 'Celebrating 53rd Anniversary, Jamkrindo is Committed to Improving Performance in Bridging Financial Accessibility for MSMEs'
17	29 Agustus – 31 Agustus 2023 August 29-31, 2023	Kunjungan ke UMKM (Media Visit) Mitra Binaan Jamkrindo di Temanggung Jawa Tengah dan DI Yogyakarta' Media Visit to MSMEs of Jamkrindo's Fostered Partners in Temanggung, Central Java and DI Yogyakarta'
18	05 Juli 2023 July 5, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Dorong Peningkatan Kompetensi UMKM Tanah Air, Jamkrindo Gelar Kelas Bisnis UMKM 2023' Distribution of Press Release 'Encouraging Increased Competency of Indonesian MSMEs, Jamkrindo Holds 2023 MSME Business Class'

Aktivitas Hubungan Media Tahun 2023
Media Relations Activities in 2023

No	Tanggal Dates	Bentuk Hubungan Media Types of Media Relations
19	30 Agustus 2023 August 30, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Jamkrindo Lanjutkan Pemberdayaan Peternak' Distribution of Press Release 'Jamkrindo Continues Empowering Cattle Farmers'
20	12 September 2023 September 12, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Dorong Peningkatan Kompetensi, jamkrindo Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan UMKM' Distribution of Press Release 'Encouraging Competency Improvement, Jamkrindo Holds MSME Financial Management Workshop'
21	15 September 2023 September 15, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Jamkrindo Bawa 21 Produk UMKM ke Festival Pasar Senggol di Turki' Distribution of Press Release 'Jamkrindo Brings 21 MSME Products to the Festival in Turkey'
22	27 September 2023 September 27, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Dorong UMKM Naik Kelas, Jamkrindo Kembali Gelar Workshop Pengelolaan Keuanga' Distribution of Press Release 'Encouraging MSMEs to Upgrade, Jamkrindo Again Holds Financial Management Workshop'
23	02 Oktober 2023 October 2. 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Gelar Workshop di Palu, Jamkrindo Dorong Literasi Keuangan UMKM di Wilayah Indonesia Timur' Distribution of Press Release 'By Holding Workshop in Palu, Jamkrindo Encourages Financial Literacy of MSMEs in Eastern Indonesia Region'
24	13 Oktober 2023 October 13, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan, Jamkrindo Dorong Digitalisasi UMKM Indonesia Timur' Distribution of Press Release 'By Holding Financial Management Workshop, Jamkrindo Encourages Digitalization of Eastern Indonesian MSMEs'
25	16 Oktober 2023 October 16, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Jamkrindo Dorong UMKM Maluku Susun Laporan Keuangan Mandiri' Distribution of Press Release 'Jamkrindo Encourages Maluku MSMEs to Prepare Independent Financial Statement'
26	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Jamkrindo Dukung Digitalisasi dan Transformasi Bisnis UMKM Kota Kediri' Distribution of Press Release 'Jamkrindo Supports Digitalization and Business Transformation of MSMEs in Kediri City'
27	14 Desember 2023 December 14, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Peduli Pengembangan Karakter Anak di Geopark Ciletuh, Jamkrindo Gelar Pelatihan Guru dan Seminar Parenting' Distribution of Press Release 'Caring about Children's Character Development in Ciletuh Geopark, Jamkrindo Holds Teacher Training and Parenting Seminar'
28	18 Desember 2023 December 18, 2023	Penyebaran Siaran Pers 'Peduli Pengembangan Karakter Anak di Geopark Ciletuh, Jamkrindo Gelar Pelatihan Guru dan Seminar Parenting' Distribution of Press Release 'Caring about Children's Character Development in Ciletuh Geopark, Jamkrindo Holds Teacher Training and Parenting Seminar'

Akses Publik dan Konsumen

Kepada publik dan konsumen, Perusahaan memberikan keterbukaan akses melalui jalur informasi yang telah disediakan seperti yang tertera di bawah ini.

Public and Consumer Access

To the public and consumers, the Company provides open access through the information channels that have been provided as listed below.

Situs Web Website: www.jamkrindo.co.id

Media Sosial Social Media: @pt_jamkrindo, @pt_jamkrindo, jamkrindo, PT Jamkrindo

Ragam Media Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

Various Communication Media to Shareholders and Stakeholders

Below is a table that describes the various communication media used by the Company to convey data and information related to operational activities, business processes and performance achievements that have been achieved by the Company.

Kepada To	Bentuk-bentuk Media Media Forms
Regulator	Surat dan email Letter and email
Pemegang Saham Shareholders	Surat dan email Letter and email
Lembaga Publik Public Institutuions	Surat dan email Letter and email
Konsumen Consumer	Surat dan email Letter and email
Karyawan Employee	Memorandum dan email Memorandum and Email
Perusahaan Sejenis Lainnya Similar Companies	Surat dan email Letter and email
Mitra Kerja dan Rekanan Partners	Surat dan email Letter and email
Organisasi Profesi Professional Organizations	Surat dan email Letter and email
Masyarakat/Umum Public/People	Surat dan email Letter and email

* Situs Web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.
* The Company's website is not included in the variety of media above, because it is open, unlimited and can be accessed by anyone

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Jamkrindo berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta efisiensi dalam kegiatan operasional Perusahaan dengan membangun infrastruktur dan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Perusahaan menyusun tata kelola TI dengan merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Jamkrindo menghadapi berbagai tantangan Teknologi Informasi baik tuntutan operasional maupun kebutuhan strategis perusahaan ke depan, yang mencakup aspek Aplikasi, Data, Keamanan, Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka pada tahun 2023 Jamkrindo terus melakukan Transformasi Teknologi Informasi dengan tema Rencana Strategis TI pada tahun 2023 yaitu "*Strengthening Services for Business Growth & Profitability*". Jamkrindo percaya transformasi digital yang dilakukan membawa manfaat positif terhadap Perusahaan. Jamkrindo juga mendorong pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam setiap aktivitas. Tidak hanya mendukung *cost leadership*, TI berperan penting dalam rangka mempermudah optimalisasi kinerja sekaligus memberikan dampak positif dalam proses bisnis, antara lain untuk memastikan operasional berjalan lebih efisien, akurat, dan berorientasi pada sistematika cepat-tanggap (*Quick Response System*).

Adapun tujuan penerapan tata kelola TI di lingkup Perusahaan, antara lain:

1. Meningkatkan nilai bisnis:
   Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis, mencakup peningkatan efisiensi operasional, pengembangan produk dan layanan baru, peningkatan kepuasan pelanggan, dan inisiatif lainnya.
2. Menjamin kepatuhan dan keamanan Menjaga kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan kebijakan yang relevan, serta melindungi keamanan dan kerahasiaan informasi. Hal ini mencakup perlindungan data, pencegahan akses yang tidak sah, deteksi dan respons terhadap ancaman keamanan, dan manajemen risiko secara keseluruhan.
3. Meningkatkan kualitas layanan TI.
4. Memberikan layanan TI yang berkualitas kepada pengguna dan pelanggan. Hal Ini mencakup dukungan teknis yang baik, pemecahan masalah yang efisien, dan peningkatan pengalaman pengguna secara keseluruhan.
5. Meningkatkan kinerja dan pengukuran.
6. Pengukuran dan pemantauan kinerja TI untuk mengevaluasi keberhasilan inisiatif dan proyek TI. Hal ini juga melibatkan identifikasi area perbaikan, dan pelaporan yang tepat waktu kepada pemangku kepentingan.

Jamkrindo continues to improve service quality and efficiency in the Company's operational activities by building Information and Communication Technology infrastructure and governance to realize the Company's vision and mission. The Company prepares IT governance by referring to the Regulation of the Minister of SOEs Number Per-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Jamkrindo faces various Information Technology challenges, both in terms of operational demands and the Company's future strategic needs, which include aspects of Applications, Data, Security, Human Resources and Governance. To face these challenges, in 2023, Jamkrindo continued to carry out Information Technology Transformation with the theme of the IT Strategic Plan in 2023, namely "Strengthening Services for Business Growth & Profitability". Jamkrindo believes that the digital transformation carried out will bring positive benefits to the Company. Jamkrindo also encourages optimizing the use of Information Technology (IT) in every activity. Not only supporting cost leadership, IT plays an important role in facilitating performance optimization as well as providing a positive impact on business processes, including ensuring that operations run more efficiently, accurately, and are oriented towards a quick-response system.

The objectives of implementing IT governance within the Company include:

1. Increase business value:
   Optimize the use of information technology to achieve business goals, including increasing operational efficiency, developing new products and services, increasing customer satisfaction, and other initiatives.
2. Ensure compliance and security, maintain compliance with relevant regulations, standards and policies, and protect the security and confidentiality of information. This includes data protection, prevention of unauthorized access, detection and response to security threats, and overall risk management.
3. Improve the quality of IT services.
4. Provide quality IT services to users and customers. This includes good technical support, efficient troubleshooting, and improved overall user experience.
5. Improve performance and measurement.
6. IT performance measurement and monitoring to evaluate the success of IT initiatives and projects. It also involves identifying areas of improvement, and timely reporting to stakeholders.

7. Mendorong inovasi dan transformasi.
8. Mendorong inovasi dan transformasi melalui pemanfaatan teknologi. Hal ini termasuk manajemen perubahan yang diperlukan untuk adaptasi perkembangan bisnis dan teknologi.
9. Meningkatkan kepemimpinan dan kemampuan TI .
10. Pengembangan kepemimpinan TI yang efektif, pengembangan keterampilan dan kompetensi TI dalam organisasi, serta peningkatan pemahaman terhadap nilai dan peran strategis TI dalam bisnis.

Visi & Misi serta Tujuan Penerapan Tata Kelola TI

Berdasarkan *Master Plan* TI Jamkrindo berikut Visi dan Misi TI yang akan dijadikan dasar dalam membangun Kapabilitas TI Jamkrindo untuk masa depan, yang berujung pada Implikasi TI.

Visi TI
"Menjadi *Strategic Partner* penyediaan layanan penjaminan digital yang berorientasi pelanggan, berbasis ekosistem dan peningkatan kematangan tata kelola".

Misi TI
1. Menjadi *Strategic Partner* untuk mendukung transformasi bisnis perusahaan.
2. Melakukan penyediaan layanan penjaminan digital yang bermanfaat bagi customer dan Perusahaan
3. Melakukan pengembangan yang terus berorientasi pada pelanggan dan berbasis ekosistem.
4. Terus melakukan peningkatan kematangan dan kapabilitas Tata Kelola TI.

Strategi TI
1. Digitalisasi Layanan Penjaminan.
2. Manajemen Perencanaan Portofolio TI sesuai manfaat.
3. Peningkatan Proses Bisnis berbasis Data.
4. Organisasi TI yang Inovatif dan Cekatan.

IT Disruption
Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan penggunaan yang luas dari perangkat seluler untuk keperluan pribadi maupun profesional telah menjadi kebiasaan saat ini. Perubahan yang pesat ini seringkali menimbulkan gangguan yang signifikan di sektor industri, termasuk dalam industri jasa keuangan, yang juga membutuhkan penyesuaian cepat untuk menjaga daya saing.

Disrupsi digital umumnya terjadi setelah munculnya inovasi-inovasi digital seperti *big data*, *machine learning*, *Internet of Things*, atau tren BYOD (*Bring Your Own Device*). Tidak hanya mengubah teknologi yang digunakan oleh unit bisnis, inovasi – inovasi ini juga memengaruhi interaksi mereka dengan pelanggan dan cara mereka mengelola operasional. Dampak utama dari disrupsi digital meliputi perubahan dalam harapan dan keinginan pelanggan untuk layanan yang cepat dan instan, mendorong perusahaan untuk melakukan transformasi bisnis dan

7. Encourage innovation and transformation.
8. Encouraging innovation and transformation through the use of technology. This includes change management required to adapt to business and technological developments.
9. Improve leadership and IT capabilities.
10. Developing effective IT leadership, developing IT skills and competencies in the organization, as well as increasing understanding of the value and strategic role of IT in business.

VISION AND MISSIONS OF JAMKRINDO INFORMATION TECHNOLOGY

It is based on the Jamkrindo IT Master Plan, along with the IT Vision and Mission which will be used as the basis for building Jamkrindo's IT Capabilities for the future which will lead to IT Implications.

IT Vision
"To become a Strategic Partner in providing customeroriented, ecosystem-based digital guarantee services and increasing governance maturity."

IT Missions
1. To become a Strategic Partner to support the Company's business transformation.
2. Provide digital guarantee services that are beneficial to customers and Company
3. Carry out development that continues to be customeroriented and ecosystem-based.
4. Continue to increase the maturity and capability of IT Governance.

IT Strategy
1. Digitalization of Guarantee Services.
2. IT Portfolio Planning Management according to benefits.
3. Data-based Business Process Improvement.
4. Innovative and Agile IT Organization.

IT Disruption
Rapid developments in information technology and widespread use of mobile devices for personal as well as professional purposes have become the norm today. This rapid change often causes significant disruption in industrial sectors, including the financial services industry, which also requires rapid adjustments to maintain competitiveness.

Digital disruption generally occurs after the emergence of digital innovations such as big data, machine learning, the Internet of Things, or the BYOD (Bring Your Own Device) trend. Not only do they change the technology used by business units, these innovations also impact their interactions with customers and the way they manage operations. The main impacts of digital disruption include changes in customer expectations and desires for fast and instant services, pushing companies to transform business and operational models, increasing service efficiency, stimulating product

model operasional, meningkatkan efisiensi layanan, merangsang inovasi produk dan layanan, serta mengubah budaya kerja dan struktur organisasi perusahaan.

Mitra bisnis Jamkrindo terdiri dari lembaga keuangan Bank dan lembaga Non Bank yang dalam melaksanakan kegiatan operasional bisnisnya selalu berinovasi dan melakukan perubahan strategi bisnis kepada *customer.* Hal ini terus dilaksanakan untuk memenuhi permintaan konsumen dan menjaga daya saing Perusahaan. Sebagai contoh, sistem layanan transaksi keuangan dengan menggunakan metoder BYOD. Setiap orang dapat dapat bertransaksi di manapun, setiap saat dengan menggunakan perangkat mobile tanpa memerlukan layanan tambahan dari pihak Bank. Juga, layanan kredit dari perbankan telah menerapkan *system* BOYD. Calon kreditur dapat mengajukan pembiayaan melalui layanan aplikasi digital di mana proses persetujuan kredit tidak memerlukan pertemuan secara fisik dan penggunaan dokumen secara digital. Evolusi yang terjadi ini dipicu oleh adanya IT *distruption*, jika perbankan tidak dapat beradaptasi secara baik maka akan terjadi degradasi eksisting bank. Untuk itu Perusahaan wajib mengikuti dan beradaptasi dengan tetap berorientasi pada tujuan Utama Perusahaan Menjadi Pilihan Utama Pelaku Usaha dalam Layanan Penjaminan.

IT *Distruption* tidak lagi dipandang sebagai gangguan yang mempengaruhi *sustainable service* area IT di Perusahaan, melainkan sebagai potensial *improvement* yang perlu dipertimbangkan dan dimanfaatkan agar Perusahaan tetap eksis dan menjawab kebutuhan mitra dan *stakeholder*.

Jamkrindo telah terus beradaptasi dengan melakukan transformasi digital di perusahaan sejak tahun 2022. Salah satu langkah yang diambil adalah menetapkan kembali arah strategis TI perusahaan, yang telah selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Sehingga peran IT bukan sebagai *area support* melainkan sebagai bagian dari *core* layanan Penjaminan kepada mitra bisnis. Pada tahun 2023, penyediaan layanan digital kepada UMKMK telah dilakukan melalui aplikasi digital berbasis layanan. Kegiatan pemasaran oleh tim bisnis juga didukung oleh alat pemasaran digital, sementara layanan TI telah menggunakan sistem layanan terpusat. Selain itu, ada juga adaptasi lain dari segi operasional seperti peningkatan keamanan *cyber*, manajemen data, dan kualitas data, serta perlindungan aset yang lebih baik.

Cyber Security

Pasca pandemi virus corona 19 melanda di seluruh dunia, perkembangan teknologi dan informasi semakin melaju dengan cepat. Salah satu hal yang paling mencolok adalah percepatan pertukaran informasi melalui berbagai perangkat dan keseluruhan aktivitas pekerjaan menjadi sangat tergantung pada internet. Tanpa disadari, digitalisasi telah menjadi kebutuhan pokok, menghapuskan batas jarak dan waktu di antara individu, sehingga menciptakan

and service innovation, and changing work culture and company organizational structures.

Jamkrindo's business partners consist of financial institutions, banks and non-bank institutions, which in carrying out their business operations always innovate and make changes to their business strategies for customers. This continues to be implemented to meet consumer demand and maintain the Company's competitiveness. For example, a financial transaction service system using the BYOD method. Everyone can make transactions anywhere, at any time using a mobile device without requiring additional services from the bank. Also, banking credit services have implemented the BOYD system. Prospective creditors can apply for financing through digital application services in which the credit approval process does not require physical meetings and the use of digital documents. This evolution that occurred was triggered by IT disruption. If banks cannot adapt well, there will be degradation of existing banks. For this reason, the Company must follow and adapt while remaining oriented towards the Company's main goal of becoming the Main Choice for Business Actors in Guarantee Services.

IT Disruption is no longer seen as a disturbance that affects the sustainable IT service area in the Company, but rather as a potential improvement that needs to be considered and utilized so that the Company continues to exist and responds to the needs of partners and stakeholders.

Jamkrindo has continued to adapt by carrying out digital transformation in the Company since 2022. One of the steps taken is to re-establish the Company's IT strategic direction, which is in line with the Company's business goals. So, the role of IT is not as a support area but as part of the core guarantee services to business partners. In 2023, the provision of digital services to MSMEs will be carried out through service-based digital applications. Marketing activities by business teams are also supported by digital marketing tools, while IT services use a centralized service system. In addition, there were also other adaptations from an operational perspective such as improving cyber security, data management and data quality, as well as better asset protection.

Cyber Security

After the corona virus 19 pandemic hit the world, the development of technology and information accelerated even more rapidly. One of the most striking things is the acceleration of information exchange through various devices and all work activities become very dependent on the internet. Without realizing, digitalization has become a basic necessity, eliminating the boundaries of distance and time between individuals, thus creating the impression

kesan bahwa semua orang berada dalam satu ruang dan waktu yang sama. Namun, fenomena ini juga menimbulkan kebutuhan akan kemudahan akses dan interaksi, namun tetap memperhatikan keamanan. Hal ini terjadi juga di Jamkrindo di mana penerapan digitalisasi sebagai sarana operasional, pertukaran data dan informasi bisnis dengan mitra dilakukan secara digital sehingga memangkas biaya operasional, efisien waktu, keakuratan data dan proses bisnis lebih cepat.

that everyone is in the same space and time. However, this phenomenon also raises the need for ease of access and interaction, while still paying attention to security. This also happens at Jamkrindo in which digitalization is implemented as an operational tool, exchanging data and business information with partners is carried out digitally, thus reducing operational costs, making time efficient, data accuracy and business processes faster.

Meskipun manfaat positif dari digitalisasi telah diterima dengan baik oleh semua pihak, masih ada banyak entitas yang belum sepenuhnya matang dalam perencanaan tata kelola digitalisasi. Salah satu risiko utama yang terkait dengan penerapannya adalah risiko keamanan, seperti kebocoran data, serangan *cyber*, pencurian data, manipulasi data, data palsu, transaksi fiktif, dan berbagai jenis kejahatan *cyber* lainnya, yang dapat berdampak secara langsung atau tidak langsung pada operasional perusahaan.

Although the positive benefits of digitalization have been well received by all parties, there were still many entities that have not yet fully matured in digitalization governance planning. One of the main risks associated with its implementation is security risks, such as data leaks, cyber attacks, data theft, data manipulation, fake data, fictitious transactions, and various other types of cyber crimes, which can have a direct or indirect impact on Company operations.

Jamkrindo pada tahun 2023 telah mengimplementasikan *policy cyber security* melalui pembaharuan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi yang mengacu pada ketentuan Pemerintah Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, peraturan regulator Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 4 /POJK.05/2021 dan SE Nomor 22 /SEOJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan *Nonbank* dan standar *framework* manajemen keamanan informasi ISO 27001:2022. Pembaharuan kebijakan ini disertai juga dengan penerapan protocol keamanan pada aspek aplikasi, data, jaringan, dan manajamen aset TI secara terpusat. Dampak positif nyata pada perusahaan ialah, pada tahun 2023 perusahaan mampu menangkal berbagai serangan *cyber*. Selain itu Jamkrindo dalam melindungi informasi dari segala bentuk ancaman dan risiko yang mungkin terjadi, telah menerapkan *Information Security Management System* (ISMS) sejak tahun 2019 telah tersertifikasi ISO 27001:2013 dan periode tahun 2023 telah melakukan penyesuaian sertifikasi menjadi ISO 27001:2022.

Jamkrindo in 2023 has implemented a cyber security policy through updating the information security management system policy which refers to Government provisions Number Per-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, regulatory regulations and Circular Letters of the Financial Services Authority (OJK) of the Republic of Indonesia Number 4 /POJK.05/2021 and SE Number 22 /SEOJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Nonbank Financial Services Institutions and the information security management framework standard ISO 27001:2022. This policy update is also accompanied by the implementation of security protocols in aspects of applications, data, networks and centralized IT asset management. The real positive impact on the Company is that in 2023 the Company was able to ward off various cyber attacks. In addition, Jamkrindo, in protecting information from all forms of threats and risks that may occur, has implemented an Information Security Management System (ISMS) since 2019 and has been certified to ISO 27001:2013 and for the 2023 period it has adjusted the certification to ISO 27001:2022.

Jamkrindo menyadari bahwa pengamanan aspek *cyber* tidak bersifat parsial, melainkan satu kesatuan utuh dari aspek manajemen hingga karyawan/karyawati. Dengan demikian metode peningkatan kualitas keamanan juga dilakukan pada aspek wawasan karyawan/ti melalui pelatihan, seminar, dan pelatihan lainnya yang selaras guna mendapatkan pembaruan informasi *cyber update and technology* dan sebagainya.

Jamkrindo realizes that cyber security is not partial, but is a complete unit from management to employee aspects. In this way, the method of improving security quality is also carried out in the insight aspect of employees/IT through training, seminars and other training that is in line with the aim of obtaining updated information on cyber updates and technology and so on.

Jamkrindo juga secara rutin melakukan peninjauan dan evaluasi secara periodik aspek teknis protokol keamanan *cyber*, evaluasi pola *threats* serangan *cyber*, menyusun *leasson learn* untuk digunakan sebagai literasi dan kebutuhan analisis potensi risk serangan *cyber* di kemudian hari.

Jamkrindo also routinely carries out periodic reviews and evaluations of technical aspects of cyber security protocols, evaluates patterns of cyber attack threats, prepares learning lessons to be used as literacy and analysis needs for potential risks of cyber attacks in the future.

Disaster Recovery

Disaster Recovery merupakan suatu strategi pemulihan yang diimplementasikan oleh perusahaan untuk mengembalikan operasional mereka setelah terjadi bencana atau kejadian tertentu yang mengganggu jalannya operasi. Dalam konteks operasional, terdapat beberapa area pemulihan yang harus diprioritaskan saat terjadi bencana, salah satunya adalah layanan teknologi informasi (*IT Services*). Akhir-akhir ini, perusahaan telah mengandalkan layanan penjaminan dengan mengandalkan platform digital, sehingga peran layanan TI menjadi sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional bisnis.Perusahaan secara rutin melakukan uji coba skenario *disaster* diantaranya skenario kebakaran dan gempa bumi. Tujuan uji coba ini adalah.

1. Untuk memastikan seluruh Pegawai telah memahami prosedur penanganan gangguan saat terjadi gangguan TI.
2. Meningkatkan kesadaran *(awareness)* Pegawai terhadap pentingnya koordinasi dan pembagian peran dan tanggung jawab penanganan bencana.
3. Mengukur kesiapan Pegawai dalam penanganan gangguan TI, mengukur waktu respon gangguan serta perpindahan menggunakan *Disaster Recovery Center*.
4. Mengidentifikasi sarana-prasarana pendukung, termasuk dokumen-dokumen penting yang perlu disiapkan dan diselamatkan dalam menjalankan aktivitas yang diprioritaskan sesaat setelah gangguan terjadi.
5. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menghambat penanganan gangguan yang berpotensi terjadi.

Dalam menyusun rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*), Perusahaan mengacu pada arahan pemerintah, regulator, *best practice, serta standar-standar* umum yang sering digunakan oleh unit usaha sejenis di lingkup BUMN. Adapun refrensi yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 – Perlindungan Data Pribadi 2.
2. Perpres No. 82 Tahun 2022 – Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 – Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) No. 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) No. 10 Tahun 2020 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber.
8. POJK No. 04/05/2021 – Penerapam Manajemen Risiko TI oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
9. SEOJK No. 14/07/2014 – Kerahasiaan dan Keamanan Data.

Disaster Recovery

Disaster Recovery is a recovery strategy implemented by companies to restore their operations after a disaster or certain event that disrupts the course of operations. In an operational context, there are several recovery areas that must be prioritized when a disaster occurs, one of which is information technology services (IT Services). Recently, companies have relied on guarantee services by relying on digital platforms, so the role of IT services has become very important in supporting smooth business operations. The Company routinely tests disaster scenarios, including fire and earthquake scenarios. The aim of this trial is.

1. To ensure that all employees understand the procedures for handling disruptions when an IT disruption occurs.
2. Increase employee awareness of the importance of coordination and distribution of roles and responsibilities for disaster management.
3. Measuring employee readiness in handling IT disruptions, measuring disruption response times and transfers to use the Disaster Recovery Center.
4. Identify supporting facilities, including important documents that need to be prepared and saved in carrying out prioritized activities immediately after the disturbance occurs.
5. Identify factors that have the potential to hinder the handling of potential disorders.

In preparing a disaster recovery plan, the Company refers to directions from the government, regulators, best practices, as well as general standards that are often used by similar business units within the SOEs scope. The references used are:

1. Law no. 27 of 2022 – Personal Data Protection 2.
2. Presidential Decree no. 82 of 2022 – Protection of Vital Information Infrastructure.
3. Republic of Indonesia Government Regulation no. 82 of 2012 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions.
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.
5. Minister of Communication and Information Regulation No. 4 of 2016 – Information Security Management System.
6. National Cyber and Crypto Agency (BSSN) Regulation No. 8 of 2020 concerning Security Systems in the Implementation of Electronic Systems.
7. National Cyber and Crypto Agency (BSSN) Regulation No. 10 of 2020 concerning the Cyber Incident Response Team.
8. POJK No. 04/05/2021 – Implementation of IT Risk Management by Non-Bank Financial Services Institutions.
9. SEOJK No. 07/14/2014 – Data Confidentiality and Security.

10. SEOJK No. 22/05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
11. ISO 27001:2022 *Information security, cybersecurity* and *privacy protection — Information security management systems — Requirements.*
12. NIST *Cybersecurity Framework.*
13. ISO 22301:2019 Societal and Resilience-Business Continuity Management Systems – Requirements.
14. ISO 22313:2020 Security and Resilience – Business Continuity Management Systems – Guidance on the use of ISO 22301.
15. Uji coba pemulihan bencana dilakukan secara menyeluruh dari tingkat BOD hingga unit kerja di kantor cabang. Dengan demikian, seluruh pegawai memiliki pemahaman akan peran dan tanggung jawab mereka saat terjadi bencana, serta mampu melaksanakan pemulihan layanan setelah bencana.

Road Map TI

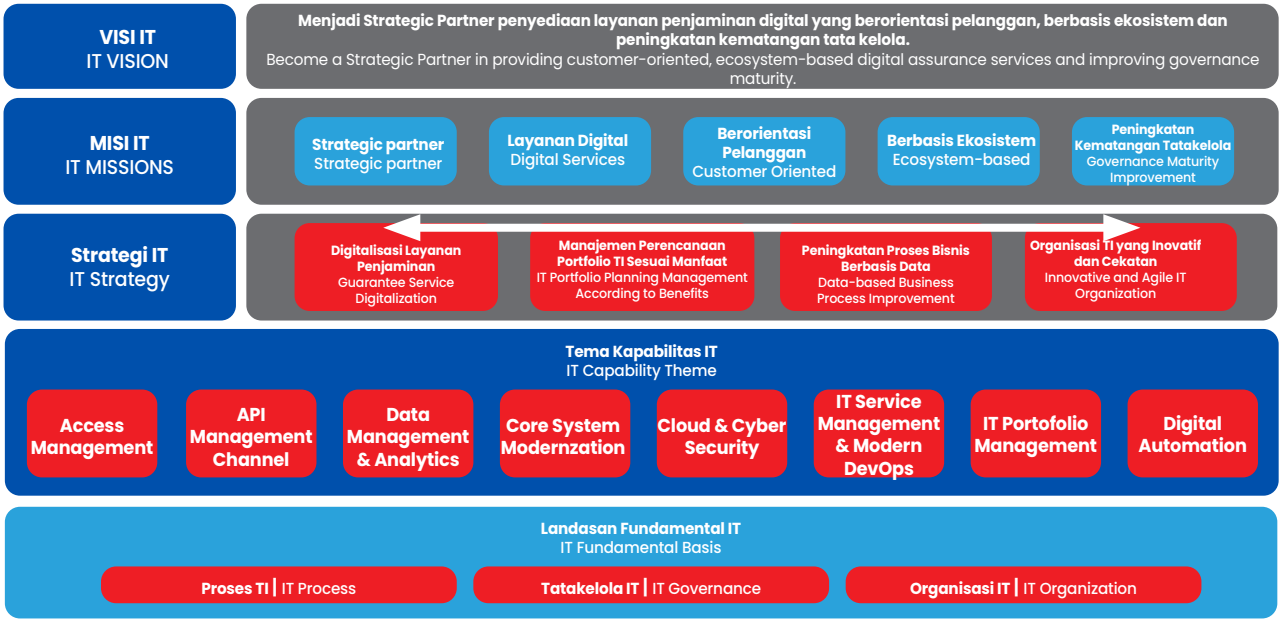
Sesuai dengan aspirasi *stakeholder*, memperhatikan rencana jangan Panjang perusahaan serta *Master Plan* TI dari induk *holding*, berikut merupakan *baseline* rencana pengembangan Teknologi Informasi Jamkrindo ke depan.

Mempertimbangkan trend teknologi, digitalisasi serta kepatuhan dengan *stakeholder*, dengan mendukung integrasi dan kolaborasi berikut rencana startegis Teknologi Informasi ke depan:

10. SEOJK No. 05/22/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions.
11. ISO 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements.
12. NIST Cybersecurity Framework.
13. ISO 22301:2019 Societal and Resilience-Business Continuity Management Systems – Requirements.
14. ISO 22313:2020 Security and Resilience – Business Continuity Management Systems – Guidance on the use of ISO 22301.
15. Disaster recovery trials were carried out comprehensively from the BOD level to work units at branch offices. In this way, all employees have an understanding of their roles and responsibilities when a disaster occurs, and are able to carry out service recovery after a disaster.

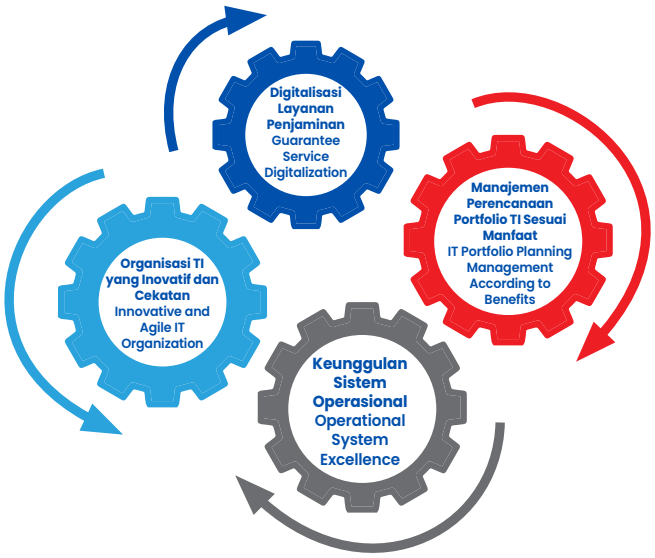
IT Road Map

In accordance with stakeholder aspirations, and paying attention to the Company's long-term plans, and the IT Master Plan of the parent holding company, the following is the baseline for Jamkrindo's future Information Technology development plans.



Taking into account technology trends, digitalization and compliance with stakeholders, by supporting integration and collaboration following future Information Technology strategic plans:

1. Digitalization of Guarantee Services
   a. Support guarantee business in Indonesia and become a "partner" to offer value, achieve problem/solution fit and product/market fit with an open and secure



1. Digitalisasi Layanan Penjaminan
   a. Mendukung bisnis penjaminan di Indonesia dan menjadi "mitra" untuk menawarkan nilai, mencapai kesesuaian masalah / solusi dan kesesuaian produk / pasar dengan arsitektur yang terbuka dan aman.
   b. Meningkatkan digitalisasi dan mengotomatiskan proses bisnis untuk TI internal dan eksternal.
2. Manajemen Perencanaan Portfolio TI sesuai manfaat
   a. Prioritisasi manajemen portofolio yang kuat, dan manajemen permintaan perencanaan TI untuk menjawab kebutuhan bisnis yang tervalidasi.
   b. Manajemen Hubungan Bisnis dengan UMKMK dan Layanan Keuangan Daerah yang efektif dan memahami penawaran secara *end to end*.
   c. Manajemen program dan proyek yang efektif dengan didukung dokumentasi yang lengkap.
   d. Memperkuat keamanan informasi untuk melindungi terhadap risiko keamanan *cyber* sebagai dampak digitalisasi.
3. Keunggulan Sistem Operasional
   a. Peningkatan Tata Kelola TI berbasis data.
   b. Kapasitas infrastruktur TI yang dapat diandalkan dan terstruktur.
   c. Berusaha untuk mengembangkan model operasi berkelanjutan yang dijalankan secara konsisten.
   d. Meningkatkan Standar Arsitektur Perusahaan.
4. Organisasi TI yang Inovatif dan Cekatan
   a. Menerapkan program untuk menanamkan budaya inovasi & *customer centricity* untuk memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal untuk layanan TI secara tepat waktu, efisien dan hemat biaya.
   b. Transformasi pola pikir visioner dalam Strategi TI dengan perencanaan program perekrutan talenta baru dan pelatihan TI secara massif di semua bagian.
   c. Mengadopsi budaya *Agile* dalam mengembangkan sistem baru dan perbaikan sistem secara SDLC.

Untuk mendukung rencana strategis TI dan terus mendukung transformasi Jamkrindo, maka berikut *Roadmap* Program Kerja TI sesuai dengan *Master Plan* TI 2022 – 2024, yang mengusung tema "*Collaboration Enhancement* 2023"

architecture.
   b. Improve digitization and automate business processes for IT internal and external.
2. IT Portfolio Planning Management according to benefits
   a. Strong portfolio management prioritization, and IT planning demand management to address validated business requirements.
   b. Effective Management of Business Relations with MSMEs and Regional Financial Services and understanding end-toend offerings.
   c. Effective program and project management supported by complete documentation.
   d. Strengthen information security to protect against cyber security risks as a result of digitization.

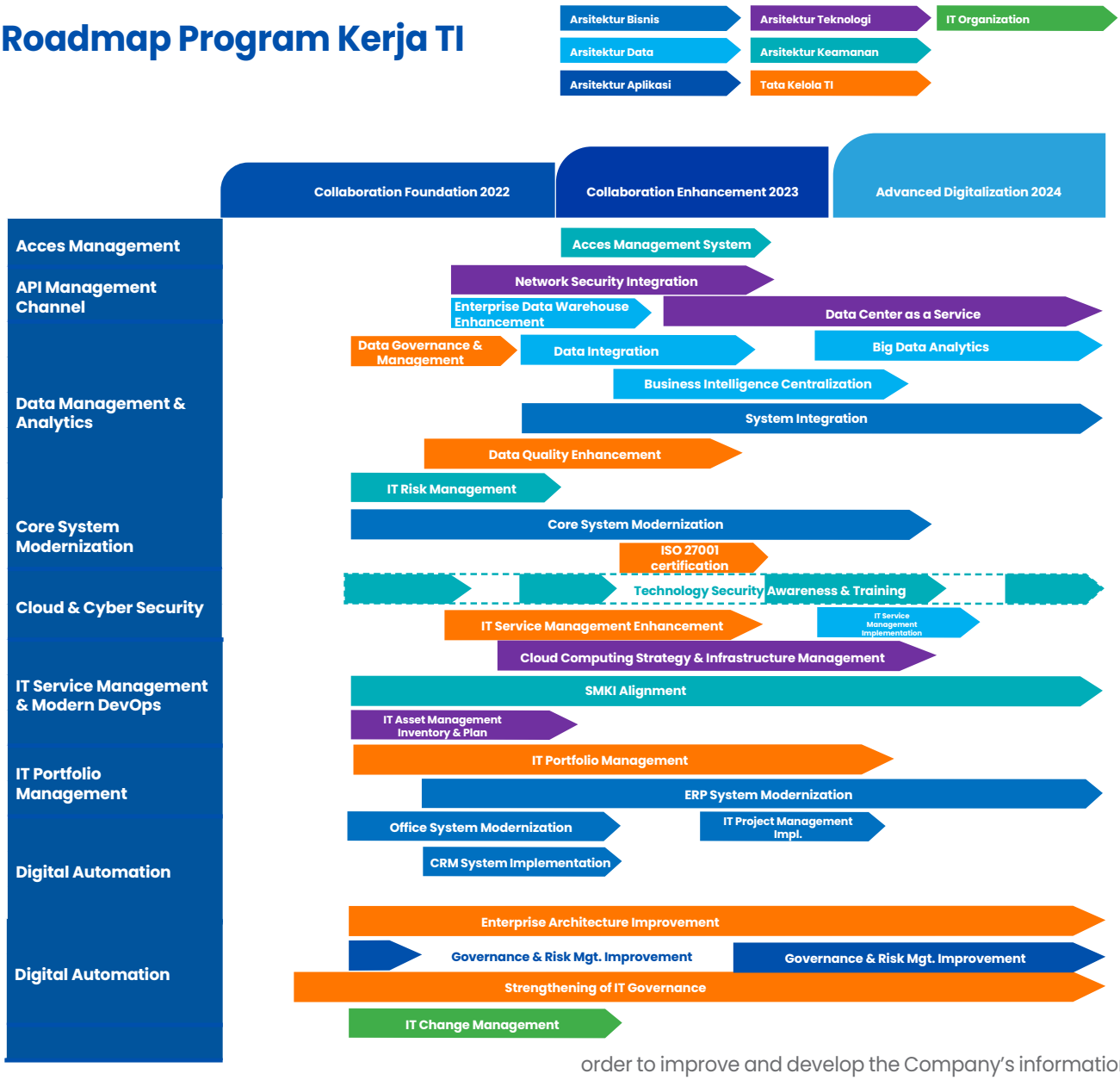
3. Operational System Excellence
   a. Improvement of data-driven IT Governance.
   b. Reliable and structured IT infrastructure capacity.
   c. Strive to develop a sustainable operating model that is executed consistently.
   d. Raising Enterprise Architecture Standards.
4. Innovative and Agile IT Organization
   a. Implement programs to instill a culture of innovation & customer centricity to meet the needs of internal and external users for IT services in a timely, efficient and cost-effective manner.
   b. Transformation of the visionary mindset in IT Strategy by planning a program to recruit new talent and massive IT training in all divisions.
   c. Adopt an Agile culture in developing new systems and SDLC system improvements

To support the IT strategic plan and continue to support Jamkrindo's transformation, the following is the IT Work Program Roadmap in accordance with the IT Master Plan 2022 – 2024, which carries the theme "Collaboration Enhancement 2023"

Information Technology Investment

Every year, Jamkrindo always invests in the IT sector in

Roadmap Program Kerja TI



Investasi Teknologi Informasi

Setiap tahunnya, Jamkrindo senantiasa melakukan investasi di bidang TI dalam rangka peningkatan dan pengembangan sistem teknologi informasi Perusahaan. Jamkrindo menyadari bahwa pengoptimalan penggunaan TI dapat mengakselerasi percepatan dan pertumbuhan kinerja Perusahaan. Maka dari itu, Perusahaan menyediakan anggaran khusus yang diperuntukkan bagi pengelolaan dan pengembangan TI baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Pada tahun 2023, Perusahaan telah merealisasikan dana sebesar Rp64.552.701.059,15 untuk investasi dan biaya di bidang TI.

Rencana Pengembangan TI 2024

Unit Kerja TI terdiri dari dua unit kerja, yaitu Divisi Operasional TI dan Divisi Pengembangan TI yang dikoordinir oleh Senior Excecutive Vice President bidang Teknologi Informasi. Unit kerja TI berpedoman pada *Master Plan* Teknologi

order to improve and develop the Company's information technology system. Jamkrindo realizes that optimizing the use of IT can accelerate the acceleration and growth of the Company's performance. Therefore, the Company provides a special budget intended for IT management and development, both in the form of hardware and software. In 2023, the Company has realized funds amounting to IDR64.552.701.059,15. for investment and costs in the IT sector.

IT Development Plan 2024

The IT Work Unit consists of two work units, namely the IT Operations Division and the IT Development Division which are coordinated by the Senior Executive Vice President for Information Technology. The IT work unit is guided by the Technology Master Plan which is a projection of the Company's RJPP. In line with the increasing role of information technology for Jamkrindo in carrying out its operational activities, this makes Information Technology not only act as a supporting tool but can become the

yang merupakan proyeksi dari RJPP Perusahaan. Sejalan dengan meningkatnya peranan teknologi informasi bagi Jamkrindo dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, hal ini membuat Teknologi Informasi tidak hanya berperan sebagai alat pendukung melainkan dapat menjadi elemen utama atau pendorong bagi Jamkrindo untuk mencapai tujuan bisnis. Untuk itu, Perusahaan telah menyusun rencana pengembangan Teknologi Informasi untuk tahun 2024 yang selaras dengan implementasi atas *Master Plan* TI tahun 2022 – 2024.

Adapun berbagai strategi bersama akan diimplementasikan pada tahun 2024 ini antara lain:

Core System Modernization, ERP *Modernization*, *System Integration, Code Testing and Evaluation, Network Security Integration*, Penyusunan dan *Review Master Plan* TI, *DevSecOps Tools Implementation* dengan tetap terus melakukan perbaikan dan penguatan dari sisi *IT Operating Model* dan *IT Governance*.

Inisiatif-Insiatif Strategis Perusaahaan pada bidang TI di tahun 2024 dalam mewujudkan *roadmap* induk *holding* dan perusahaan dikelompokkan menjadi beberapa program kerja besar yang merujuk pada pengelompokkan program kerja *holding* antara lain:

1. ERP *Modernization*
2. *Core System Modernization*
3. Standardisasi dan Modernisasi Aplikasi IT
4. *Data Management & Analytics*
5. Integrasi Aplikasi IT
6. *IT Operating Model*
7. *IT Service and Computation Enhancement*
8. *IT Cybersecurity Improvement*

Selanjutnya program tersebut diturunkan menjadi inisiatif Strategis TI tahun 2024 yaitu:

1. ERP *Phase* 2 *App Implementation* - Integrasi *Surrounding*
2. *Core System Modernization Phase* 2 - Integrasi *Phase* 2 (*Implementor Developer*) dan *Tools & License*
3. Pengelolaan *Test Suite* untuk *Automation Testing*
4. Implementasi *Tools* untuk proses *DevSecOps* CICD *Pipeline*
5. Implementasi Sentralisasi BI (DWH BI)
6. API *Management Implementation*
7. *Enterprise Architecture Tools Implementation*
8. Penyusunan *Master Plan* TI
9. Penilaian kematangan proses TI
10. IT Portofolio Implementation (Pengawasan & Pendampingan *Project Strategis Core*, ERP, DWH BI)
11. *Enterprise Database Core Modernization*
12. *Server Resource Capacity Enhancement*
13. *Cloud Service Infrastructur Management*
14. *Cloud Computing Strategy*
15. Perangkat *Secure Web Gateway*
16. ISO 27001 *Certification*
17. ISO 20000 *Certification*
18. *Renewal Licenses*

main element or driving force for Jamkrindo to achieve business goals. For this reason, the Company has prepared an Information Technology development plan for 2024 which is in line with the implementation of the IT Master Plan for 2022 – 2024.

Various joint strategies which will be implemented in 2024, including:

Core System Modernization, ERP Modernization, System Integration, Code Testing and Evaluation, Network Security Integration, Preparation and Review of IT Master Plan, DevSecOps Tools Implementation while continuing to make improvements and strengthening in terms of IT Operating Model and IT Governance.

The Company's Strategic Initiatives in the IT sector in 2024 in realizing the holding's master roadmap and the Company are grouped into several large work programs which refer to the grouping of the holding's work programs, including:

1. ERP Modernization
2. Core System Modernization
3. Standardization and Modernization of IT Applications
4. Data Management & Analytics
5. IT Application Integration
6. IT Operating Model
7. IT Service and Computation Enhancement
8. IT Cybersecurity Improvement

Subsequently, the program was reduced to an IT Strategic Initiative for 2024, namely:

1. ERP Phase 2 App Implementation - Surrounding Integration
2. Core System Modernization Phase 2 – Integration of Phase 2 (Implementor Developer) and Tools & License
3. Test Suite Management for Automation Testing
4. Implementation of tools for the DevSecOps CICD Pipeline process
5. Implementation of BI Centralization (DWH BI)
6. API Management Implementation
7. Enterprise Architecture Tools Implementation
8. Preparation of IT Master Plan
9. IT process maturity assessment
10. IT Portfolio Implementation (Supervision & Assistance for Core Strategic Projects, ERP, DWH BI)
11. Enterprise Database Core Modernization
12. Server Resource Capacity Enhancement
13. Cloud Service Infrastructure Management
14. Cloud Computing Strategy
15. Secure Web Gateway Device
16. ISO 27001 Certification
17. ISO 20000 Certification
18. Renewal Licenses

KODE ETIK
CODE OF ETHICS

Kode Etik atau *Code of Conduct* adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari budaya Perusahaan serta Standar Etika Perusahaan yang membentuk dan mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Perusahaan. *Code of Conduct* berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Perusahaan dan entitas anak, serta menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Tujuan penerapan Kode Etik dilakukan untuk:

1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika usaha dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Jamkrindo yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak;
2. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Jamkrindo;
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Jamkrindo;
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Jamkrindo terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

Kode etik yang dimiliki oleh Perusahaan berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan tanpa melihat jenjang jabatan dan parameter lainnya.

Visi dan Misi Perusahaan sebagai Landasan Utama

Penerapan kode etik yang dimiliki Perusahaan merupakan sebuah upaya untuk dapat mensinergikan seluruh organ Perusahaan untuk dapat bersama-sama mengemban visi, misi dan budaya Perusahaan. Sebagai tujuan akan perjalanan Perusahaan di masa yang akan datang, visi berperan penting dalam menempatkan seluruh Insan Jamkrindo untuk dapat mewujudkan visi tersebut melalui misi yang telah ditetapkan, serta internalisasi budaya perusahaan hingga mampu membentuk prilaku setiap Insan Jamkrindo.

The Code of Ethics or Code of Conduct is a set of commitments consisting of the Company's culture and the Company's Ethical Standards that shape and direct behavior so that it is in accordance with the culture and values of the Company. The Code of Conduct applies to all individuals acting on behalf of the Company and its subsidiaries, and serves as a reference for all stakeholders who conduct business transactions with the Company.

The purpose of implementing the Code of Ethics is to:

1. As a guidebook containing guidelines for implementing business ethics standards and code of conduct for all Jamkrindo personnel which must be adhered to in daily interactions with all parties;
2. As an ethical basis for thinking and making decisions related to Jamkrindo;
3. As a means to create and support a work environment that is healthy, positive and displays ethical behaviors from all Jamkrindo personnel;
4. As a means to increase the sensitivity of the Company and Jamkrindo personnel to the values of business ethics by developing discussions or developing discourses regarding ethics.

The Company's code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Employees of the Company regardless of position level and other parameters.

Company Vision and Missions as Main Foundation

The application of the Company's code of conduct is an effort to be able to synergize all the Company's organs to be able to jointly carry out the vision, mission and culture of the Company. As the goal of the Company's future journey, vision plays an important role in positioning all Jamkrindo personnel to be able to realize this vision through a predetermined mission, as well as internalizing the corporate culture so that it is able to shape the behavior of each Jamkrindo employee.

Visi

"Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian nasional"

Misi

Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Vision

"Becoming the Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development"

Missions

Increasing MSME Financial Accessibility Through The Provision of Innovative, Competitive Guarantees with Professional, Effective and Efficient Services In A Sustainable Manner.

Budaya Perusahaan dan Internalisasi Budaya AKHLAK

Corporate Culture and AKHLAK Culture Internalization

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

AKHLAK

Amanah
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

Kompeten
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Harmonis
Saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

Adaptif
Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Kolaboratif
Membangun kerja sama yang sinergis

Trusted
Uphold the given trust

Competent
Continuously learn and develop capabilities

Harmonious
Care to each other and respect differences

Loyal
Prioritize dedication for Nation and Country

Adaptive
Continuously innovate to respond and make change

Collaborative
Build strategic alliance

Sebagai bentuk upaya internalisasi budaya AKHLAK di lingkungan Perusahaan, pada tanggal 10 Agustus 2020 Perusahaan telah membentuk Tim Budaya yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas No. 069/SPT/4/VIII/2020. Tim budaya tersebut terdiri dari Tim Executive, Tim Khusus dan Tim Implementasi. Peran dan tanggung jawab dari tim budaya adalah sebagai berikut:

Peran dan tanggung jawab *Executive*, antara lain:
1. Mendemonstrasikan komitmen dan *leadership* pada implementasi *core values* AKHLAK sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya;

As an effort to internalize AKHLAK's culture within the Company, on August 10, 2020 the Company has formed a Culture Team as outlined in the Assignment Letter No. 069/SPT/4/VIII/2020. The cultural team consists of the Executive Team, Special Team and Implementation Team.
The roles and responsibilities of the culture team are as follows:

The executive's roles and responsibilities, among others:
1. Demonstrate commitment and leadership in the implementation of AKHLAK's core values according to their roles and responsibilities;

2. Menetapkan Kebijakan dan strategi budaya AKHLAK;
3. Memberikan dukungan penuh dalam setiap tahapan dan pelaksanaan kerangka kerja budaya AKHLAK;
4. Memberikan arahan dan pengawasan untuk menjamin implementasi *culture* AKHLAK yang efektif sesuai dengan target yang ditetapkan;
5. Menetapkan Ketua, Wakil Ketua (Ketua Alternatif), Anggota *Executive*, dan Tim yang dibentuk terkait dengan implementasi *core values* AKHLAK;
6. Memastikan bahwa kebijakan dan tujuan *culture* AKHLAK yang tersedia sejalan dengan tujuan strategis Perusahaan dan bisnis Perusahaan;
7. Mengkomunikasikan pentingnya *culture* AKHLAK yang efektif sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
8. Mengarahkan dan mendukung Karyawan untuk berkontribusi pada implementasi Kebijakan *culture* AKHLAK yang efektif.

Peran dan tanggung jawab Team Khusus, antara lain:

1. Merumuskan implementasi *core values* AKHLAK melalui *program Employee Engagement*;
2. Berkoordinasi dengan counterpart expertise budaya dan *Employee Engagement*;
3. Mengkomunikasikan program-program implementasi budaya AKHLAK kepada *executive*;
4. Memastikan pelaksanaan program implementasi berjalan sesuai program kerja;
5. Evaluasi, *mentoring* dan pelaporan program implementasi kepada executive.

Peran dan tanggung jawab Tim Implementasi, antara lain:

1. *Leader*
   a. Memberikan *awareness* bagi tim tentang *core value* AKHLAK;
   b. Memastikan *core values* AKHLAK menjadi perilaku tim;
   c. Memberikan *coaching/mentoring/feedback* terhadap perilaku yang belum sesuai dengan *core values* AKHLAK;
   d. Memastikan tim telah melakukan pengisian *dashboard* perilaku AKHLAK sebagai wujud implementasi *core values* AKHLAK;
   e. Evaluasi dan *monitoring*;
   f. Menjadi *role model core values* AKHLAK.
2. PIC
   a. Memimpin koordinasi antara unit kerjanya dengan tim khusus;
   b. Menjadi motor/penggerak perubahan perilaku yang sesuai dengan *core values* AKHLAK.
3. *Captain*
   a. Memberikan motivasi agar karyawan lain berpartisipasi dan mengimplementasikan perilaku AKHLAK menjadi perilaku baru dan *belief* (*personal value*) yang melekat pada diri masing-masing karyawan;
   b. Memberikan contoh perubahan perilaku AKHLAK kepada seluruh Insan Jamkrindo di Unit Kerja masing-masing;

2. Establish AKHLAK cultural policies and strategies;
3. Provide full support in every stage and implementation of the AKHLAK cultural framework;
4. Provide guidance and supervision to ensure the implementation of an effective AKHLAK culture in accordance with the targets set;
5. Appoint the Chair, Deputy Chair (Alternative Chair), Executive Members, and the Team formed related to the implementation of AKHLAK's core values;
6. Ensure that available AKHLAK culture policies and objectives are in line with the Company's strategic objectives and the Company's business;
7. Communicate the importance of an effective AKHLAK culture according to the needs of the Company;
8. Direct and support employees to contribute to the implementation of an effective AKHLAK culture policy.

The roles and responsibilities of the Special Team, among others:

1. Formulate the implementation of AKHLAK's core values through the Employee Engagement program;
2. Coordinate with cultural counterpart expertise and Employee Engagement;
3. Communicate AKHLAK cultural implementation programs to executives;
4. Ensure the implementation program goes according to the work program;
5. Evaluate, mentor, and report program implementation to the executive.

The roles and responsibilities of the Implementation Team, among others:

1. Leaders
   a. Provide awareness for the team about AKHLAK's core values;
   b. Ensure AKHLAK's core values become team behavior;
   c. Provide coaching/mentoring/feedback on behavior that is not in accordance with AKHLAK's core values;
   d. Ensure that the team has filled out the AKHLAK behavior dashboard as a form of implementing AKHLAK's core values;
   e. Evaluate and monitor;
   f. Become a role model for AKHLAK's core values.
2. PIC
   a. Lead coordination between work units and special teams;
   b. Become a motor/motivator for behavior change in accordance with AKHLAK's core values.
3. Captain
   a. Provide motivation so that other employees participate and implement AKHLAK behavior into new behaviors and beliefs (personal values) that are attached to each employee;
   b. Provide examples of changes in AKHLAK behavior to all Jamkrindo personnel in their respective work units;

c. Berkoordinasi dan memberikan *feedback* kepada tim khusus terkait implementasi *Culture* AKHLAK di unit kerja masing-masing;
d. Memberikan laporan baik lisan maupun tulisan kepada Divisi MSDM terkait implementasi perilaku AKHLAK di masing-masing Unit Kerja dan usulan koreksinya untuk perbaikan baik pada tingkat unit kerja maupun pada tingkat korporasi.

Pedoman Perilaku Jamkrindo

Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan independen, sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Jamkrindo tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) No 02/SKB/1/XII/2020, Kep-09/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Standar perilaku Perusahaan adalah transparansi dan pengungkapan informasi kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran. Penerapan standar etika usaha tersebut merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan komitmen untuk:

Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama;
1. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi);
3. Memperlakukan semua *stakeholder* sebagai mitra;
4. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik.

Isi Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan antara lain adalah:

c. Coordinate and provide feedback to special teams regarding the implementation of AKHLAK in their respective work units;
d. Provide oral and written reports to the HRM Division regarding the implementation of AKHLAK behavior in each Work Unit and suggestions for corrections for improvement both at the work unit level and at the corporate level.

Jamkrindo Code of Conduct

The Company is committed to implementing Good Corporate Governance by adhering to the principles of transparency, fairness, accountability and independence, so that it can support Government policies in the field of developing Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives). This is stated in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Jamkrindo No 02/SKB/1/XII/2020, Kep-09/DK-JAMKRINDO/XII/2020 dated December 30, 2020, concerning the Code of Conduct.

The Company's standards of conduct are transparency and disclosure of information, independence, responsibility and fairness. The application of these business ethics standards is the Company's way of doing business in order to realize the commitment to:

Placing customer satisfaction as a top priority;

1. Implementing Ethical Standards in all business activities based on the principles of Good Corporate Governance;
2. Always proportionately in the context of providing high quality services to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives);
3. Treating all stakeholders as partners;
4. Companies must serve and try to anticipate the needs of stakeholders properly.

The contents of the Company's Code of Conduct include:

- Etika Perusahaan

Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan 1. Perusahaan harus memperlakukan stakeholder secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak *stakeholder*. 2. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi *stakeholder*. 3. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data. 1. 4. Perusahaan harus mematikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada *stakeholder*. 5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan *stakeholder* dengan baik.	Corporate Ethics with Stakeholders 1. Companies must treat stakeholders well and fairly by fulfilling stakeholder rights. 2. Companies are required to improve performance and maintain a positive image in order to increase value for stakeholders. 3. The Company is obliged to maintain the confidentiality of information and data. 4. Companies must stop providing information that is misleading to stakeholders. 5. Companies must serve and try to anticipate the needs of stakeholders properly.
Etika Perusahaan dengan Karyawan 1. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal. 2. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Kayawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. 3. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan. 4. Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan. 5. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif. 6. Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. 7. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Perusahaan mengijinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.	Company Ethics with Employees 1. Company must prioritize health, work safety, quality improvement and employee welfare by fulfilling employee rights proportionally so that employees are expected to show maximum performance. 2. The Company provides equal employment opportunities to all employees regardless of background, ethnicity, religion, gender, age, person's disability, or other special circumstances protected by laws and regulations. 3. The Company provides equal opportunities for employee self-development. 4. The Company provides awards based on employee competence and performance. 5. The Company creates a conducive and productive working environment, communication and working relationship with superiors, subordinates and colleagues. 6. Company must respect human dignity without regard to differences in ethnic background, religion, gender, age, a person's physical disability or other special conditions protected by laws and regulations. 7. Company must uphold the general principles of humanity, rights and obligations, based on applicable laws and regulations. 8. The Company allows employees to carry out multiple activities outside the Company for social activities, professional membership, associations, or similar groups.
Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa 1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa (*supplier*) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis. 3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis. 4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.	Company Ethics with Goods and Service Providers 1. The Company treats goods or service providers (suppliers), including the procurement process according to sound, open, impartial business principles based on applicable regulations. 2. Company must carry out the procurement process in a transparent and accountable manner based on applicable regulations by referring to the principles of effectiveness, efficiency and economy. 3. The Company uses goods and services providers based on written documents. 4. Company must maintain the confidentiality of information and documents for procurement of goods and services in accordance with applicable laws and regulations. 5. The Company does not engage in corruption, collusion and nepotism in the procurement of goods and services.
Etika Perusahaan dengan Pesaing 1. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan. 2. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur. 3. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi. 4. Perusahaan tidak melakukan kerja sama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.	Company Ethics with Competitors 1. Company must carry out fair business competition by prioritizing product excellence and service quality. 2. Company must avoid misleading behavior and or dishonest actions. 3. The Company opposes agreements that are anti-competitive in nature. 4. The Company does not cooperate without acceptable and reasonable reasons.
Etika Perusahaan dengan Pemerintah 1. Perusahaan wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah. 3. Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku.	Company Ethics with the Government 1. The Company must comply with the applicable laws and regulations. 2. Company must maintain good relations and communication with the government. 3. Company must support government programs in accordance with applicable laws and regulations.

Etika Perusahaan dengan Masyarakat 1. Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak asasi manusia. 3. Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. 4. Perusahaan mengoptimalkan penyaluran programprogram tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). 5. Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.	Company Ethics with Society 1. The Company maintains a clean and healthy environment. 2. The Company supports social, cultural, traditional, religious, and human rights activities. 3. The Company participates in empowering the local community's economy. 4. The Company optimizes the distribution of the Company's social responsibility programs to the community (Partnership and Community Development Program). 5. The Company does not take actions that lead to discrimination based on ethnicity, religion, race and between groups
Etika Perusahaan dengan Media Massa 1. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan. 2. Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerja sama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan. 3. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.	Company Ethics with Mass Media 1. The Company must provide relevant information. 2. The Company makes the mass media a partner in creating conducive cooperation based on mutual respect and mutual benefit. 3. The Company accepts and follows up proportionally on constructive criticism submitted through the mass media.

• Standar Perilaku Insan Jamkrindo	• Jamkrindo's Personnel Standard of Behavio
Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi 1. Seluruh Insan Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian. 2. Seluruh Insan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. 3. Seluruh Insan Perusahaan harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 4. Seluruh Insan Perusahaan harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.	Personal and Professional Responsibility 1. All Company personnel must comply with all Company regulations regarding employment. 2. All Company personnel must understand and comply with all provisions issued by the Company and regulators in accordance with their duties and responsibilities. 3. All Company personnel must be dedicated, loyal, active and conscientious in their work and always try to improve their knowledge and skills for the smooth execution of their duties. 4. All Company personnel must apply the interests of the Company above personal or group interests.
Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif 1. Seluruh Insan Perusahaan harus bersikap santun dalam berkomunikasi. 2. Seluruh Insan Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja. 3. Seluruh Insan Perusahaan harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan. 4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status. 5. Seluruh Insan Perusahaan dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor): 6. Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkotika atau obat-obatan terlarang. 7. Mengkonsumsi minuman beralkohol. 8. Melakukan semua bentuk perjudian. 9. Melakukan semua bentuk tindakan kriminal. 10. Seluruh Insan Perusahaan wajib memelihara lingkungan yang sehat. 11. Seluruh Insan Perusahaan agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespon bunyi telepon atau tanda panggilan pada kesempatan pertama.	Creating a Conducive Work Environment 1. All Company personnel must be polite in communicating. 2. All Company personnel must uphold ethical values in working relationships with superiors, subordinates and colleagues. 3. All Company personnel must avoid actions and speech that contain elements of harassment, humiliation, ridicule, slander, and condescension. 4. All Company personnel are prohibited from committing extramarital affairs and acts of sexual harassment verbally, visually or physically including harassment of privacy and status. 5. All Company personnel are prohibited (both in the office and outside the office) to: 6. Using, possessing, distributing or selling narcotics or illegal drugs. 7. Consuming alcoholic beverages. 8. Doing all forms of gambling. 9. Committing all forms of criminal acts. 10. All Company personnel must maintain a healthy environment. 11. All Company personnel strive to use the telephone efficiently and effectively and avoid excessive use of the telephone for personal gain and respond to telephone beeps or call alerts at the first opportunity.

Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak Jujur

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan.
3. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperjanjikan keuntungan pribadi dengan pihak lain.
5. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya.
6. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.
8. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan *mark up* harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak iain.
9. Seluruh Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.

Avoid All Conflicts of Interest and Their Potential to Trigger Unhealthy and Dishonest Behavior

1. All Company personnel use their energy, thoughts and work abilities for the benefit of the Company. Work or activities outside of office hours can be carried out as long as it does not take advantage of the name and interests of the Company.
2. All Company personnel who are no longer active or have resigned are prohibited from using any form of copyright, intellectual property rights, Company data and information and carrying out activities on behalf of the Company.
3. All Company personnel may not invest Company funds on behalf of individuals or groups.
4. All Company personnel may not invest Company funds by promising personal benefits with other parties.
5. All Company personnel may not accept bribes or payments in any form from parties who have a direct or indirect relationship with their position or duties.
6. All Company personnel may not receive and give gifts in any form that can reasonably be suspected of influencing sound business decisions.
7. All Company personnel are prohibited from becoming providers of goods and services that directly or indirectly sell goods, rights or services to the Company.
8. All Company personnel are prohibited from marking up sales or purchase prices for personal or other party interests.
9. All Company personnel are prohibited from taking advantage of their position to give preferential treatment to other parties.

Menjaga Aset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan aset sesuai wewenangnya masing-masing.
3. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga data dan informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan manapun.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Safeguarding Assets, Property and Information for the Interests of the Company

1. All Company personnel use Company assets only for the benefit of the Company and are not permitted for personal or group interests.
2. All Company personnel must be responsible for protecting the Company's assets from theft, embezzlement, and misuse of assets in accordance with their respective authorities.
3. All Company personnel are required to maintain data and information along with their devices in accordance with their authority so that they are not misused, damaged, stolen, or not accessed by other irresponsible parties.
4. All Company personnel are not permitted to use the name, logo, copyright and various accessories belonging to the Company for personal gain.
5. All Company personnel are required to keep the Company's internal information confidential and not use it for personal gain, family, friends, group, or any other group.
6. All Company personnel are required to prepare and provide reports and data correctly and honestly to interested parties in accordance with applicable laws and regulations.

Mematuhi Hukum dan Perundang-Undangan

1. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan *insider trading* guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan atau praktik yang bersifat pencucian uang (*money laundering*).
3. Seluruh Insan Perusahaan dilarang membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat:
4. Tidak mengatasnamakan Perusahaan.
5. Tidak menggunakan aset Perusahaan dalam aktivitas politiknya.
6. Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan.
7. Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.
8. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Compliance with Laws and Regulations

1. All Company personnel are prohibited from engaging in insider trading activities for personal gain and not acting as brokers, prospectors or other intermediaries for personal or group interests in transactions conducted by the Company.
2. All Company personnel are prohibited from engaging or involving themselves in investments and or money laundering practices.
3. All Company personnel are prohibited from making agreements, statements either directly or indirectly indicating that the Company has an affiliation with any political party, however the Company gives freedom to all Company personnel to channel their political aspirations with the following conditions:
4. Not on behalf of the Company.
5. Does not use Company assets in its political activities.
6. Does not make any contribution on behalf of the Company.
7. If you hold a position in a Political Party and become a candidate/member of the legislature, you will be deemed to have resigned from the Company.
8. All Company personnel are prohibited from committing acts of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

Internalisasi dan Penegakan *Code of Conduct*

Internalisasi *Code of Conduct* memiliki tujuan untuk menciptakan kesepahaman dan komitmen bersama dari segenap jajaran di internal Perusahaan untuk dapat menaati dan menjalankan secara baik pedoman prilaku yang tertuang di dalamnya. Internalisasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara menyeluruh dengan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi segenap insan Perusahaan dalam memperoleh informasi tersebut.

Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dilakukan dengan cara seluruh insan perusahaan wajib menandatangani surat Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan seluruh insan Perusahaan wajib mengerti, memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct)*.

1. Saluran pengaduan
   a. Apabila ditemui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk segera melaporkan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor kepada Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM);
   b. Permasalahan perilaku Dewan Komisaris dan Direksi, penanganannya dilakukan oleh Menteri;
   c. Permasalahan perilaku pegawai, penanganannya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku;
   d. Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungannya dengan masyarakat, penanganannya tetap mengacu kepada ketentuan kepegawaian yang berlaku dalam Perusahaan;
   e. Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM) berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional.
2. Mekanisme Penanganan atas Laporan Pelanggaran Pedoman Prilaku
   a. Atasan langsung atau unit kerja yang ditunjuk untuk mengelola penanganan atas laporan pelanggaran berdasarkan laporan yang diterima melakukan identifikasi permasalahan analisis, mengumpulkan informasi tambahan yang relevan serta merahasiakan identitas pelapor;
   b. Hasil analisis tersebut apabila di pandang perlu dapat dilaporkan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Penyebarluasan Etika Perusahaan
   Upaya sosialisasi dan penyebarluasan Etika Perusahaan secara merata kepada seluruh elemen Perusahaan dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:
   a. Pemberian sosialisasi, *training* dan seminar bagi karyawan;
   b. Pemasangan *banner* maupun spanduk;
   c. Rapat evaluasi kinerja;
   d. Sosialisasi saat proses perekrutan.

Internalization and Enforcement of the Code of Conduct

The internalization of the Code of Conduct has the objective of creating a shared understanding and commitment from all levels within the Company to be able to adhere to and properly carry out the code of conduct contained therein. This internalization is carried out through outreach activities which are carried out in its entirety by providing the widest possible access for all Company personnel to obtain this information.

The mechanism for enforcing the Code of Conduct is carried out by means that all Company personnel must sign a Statement of Commitment to Comply with the Code of Conduct, and all Company personnel must know, understand, and implement the Code of Conduct.

1. Complaint channels
   a. If a violation of the Code of Conduct is found within the Company, every Company employee is obliged to immediately report it in writing by stating the identity of the complainant to the Division in charge of Human Resources (HR);
   b. Problems with the behavior of the Board of Commissioners and Board of Directors are handled by the Minister;
   c. Problems with employee behavior, the handling of which is carried out by the direct superior in stages according to the applicable mechanism;
   d. Violations of the Code of Conduct in relation to the community, the handling of which still refers to the employment provisions that apply in the Company;
   e. The division that handles the field of Human Resources (HR) is obliged to respond promptly to every question, notification and report it receives proportionally.
2. Mechanism for Handling Reports of Violation of the Code of Conduct
   a. The direct supervisor or work unit appointed to manage the handling of reports of violations based on the reports received identify analysis problems, collect additional relevant information and keep the identity of the complainant confidential;
   b. If deemed necessary, the results of the analysis can be reported to the Board of Directors for further processing according to the applicable mechanism.
3. Dissemination of Company Ethics Efforts to socialize and spread the Company's Ethics evenly to all elements of the Company are carried out through various strategies, including:
   a. Provision of outreach, training and seminars for employees;
   b. Installation of banners;
   c. Performance evaluation meetings;
   d. Outreach during the recruitment process.



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
UNTUK MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Status Karyawan :

Menyatakan bahwa, saya :

1. Telah menerima Pedoman Perilaku (Code of Conduct);
2. Telah memahami isi dari Pedoman Perilaku (Code of Conduct);
3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan Jamkrindodalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct);
4. Siap menerima konsekuensi dan sanksi dari Perusahaan apabila melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini;
5. Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan kepada Divisi yang membidangi bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pejabat yang telah ditunjuk untuk memonitor penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, apabila menemui permasalahan dan/atau pelanggaran dalam melaksanakan Pedoman Perilaku (Code of Conduct).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Tempat, Tanggal Bulan
Tahun

(Nama / Tanda Tangan)

Sosialisasi *Code of Conduct* dilakukan dengan tujuan agar seluruh Insan Perusahaan memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam lingkungan kerja sehari-hari guna menghindari perilaku menyimpang. Kegiatan sosialisasi Kode Etik dan prinsip GCG di tahun 2023 dilakukan di beberapa kantor cabang, yaitu:

Code of Conduct dissemination is carried out with the aim that all Company personnel understand and can apply GCG principles in their daily work environment to avoid deviant behavior. Dissemination activities for the Code of Ethics and GCG principles in 2023 will be carried out in several branch offices, namely

No.	Kantor Cabang Branch Offices	Tanggal pelaksanaan Implementation Dates
1.	Padang	13 Januari 2023 January 13, 2023
2.	Cirebon	13 Januari 2023 January 13, 2023
3.	Serang	13 Januari 2023 January 13, 2023
4.	Kupang	13 Januari 2023 January 13, 2023
5.	Palu	13 Januari 2023 January 13, 2023
6.	Kudus	13 Januari 2023 January 13, 2023
7.	Jambi	13 Januari 2023 January 13, 2023

No.	Kantor Cabang Branch Offices	Tanggal pelaksanaan Implementation Dates
8.	Samarinda	13 Januari 2023 January 13, 2023
9.	Banyuwangi	13 Januari 2023 January 13, 2023
10.	Ternate	13 Januari 2023 January 13, 2023

4. Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Etika Perusahaan

   Adanya sanksi terhadap pelanggaran etika Perusahaan berfungsi untuk menjamin tegaknya aturan yang dibuat demi terciptanya kedisiplinan dan profesionalisme bagi seluruh Insan Perusahaan. penegakan dan pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali. Adapun sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.
5. Sanksi Administrasi
   Setiap karyawan wajib:
   a. mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi Pegawai BUMN;
   b. mentaati semua peraturan perusahaan, baik berupa perintah maupun larangan secara tertulis atau secara lisan dalam batas pengertian yang layak dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan; dan
   c. menunaikan tugas dan kewaiiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan penugasan oleh Direksi dan atasan masing-masing pegawai dengan mementingkan kepentingan Perusahaan.

Pemberian sanksi administrasi bagi karyawan Jamkrindo mengacu pada Peraturan Direksi No. 19/ Per-Dir/III/2006 tentang Disiplin Pegawai. Sanksi administrasi diberikan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Sebagai realisasi penegakan Pedoman Perilaku, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun terakhir:

4. Enforcement and Sanctions for Violation of Company Ethics
   The existence of sanctions for violations of corporate ethics serves to ensure the enforcement of rules made in order to create discipline and professionalism for all Company personnel. The enforcement and imposition of sanctions for acts of violations apply in its entirety without exception. The sanction given is in the form of a warning letter.
5. Administrative Sanctions
   Every employee must:
   a. comply with all rules and regulations set by the Government for SOE's Employees;
   b. comply with all Company regulations, both in the form of orders and prohibitions in writing or verbally within the limits of proper understanding and not contrary to the norms of decency; And
   c. carry out the duties and responsibilities as well as possible, in accordance with the assignment by the Board of Directors and the superiors of each employee by prioritizing the interests of the Company.

Administrative sanctions for Jamkrindo employees refer to Directors Regulation No. 19/Per-Dir/III/2006 concerning Employee Discipline. Administrative sanctions are given to employees who commit disciplinary violations.

As a realization of the enforcement of the Code of Conduct, the following details the sanctions imposed regarding the enforcement of the Code of Ethics for the last 3 (three) years:

Jenis Sanksi Types of Sanction	2023	2022	2021
Teguran/Reprimand	1	5	2
Peringatan 1/Warning Letter 1	3	3	3
Peringatan 2/Warning Letter 2	1	5	-
Peringatan 3/Warning Letter 3	1	-	1
Pengunduran Diri/Resignation	-	-	-
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/Termination of Employment	-	-	-

KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA
PERFORMANCE-BASED LONG-TERM COMPENSATION

Jamkrindo merupakan anggota dari Indonesia Financial Group (IFG) yaitu *Holding* Asuransi, Penjaminan dan Investasi dan tidak pernah memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait program kepemilikan saham oleh karyawan (ESOP) dan/atau manajemen (MSOP) yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Jamkrindo is a member of the Indonesia Financial Group (IFG), namely the Insurance, Guarantee and Investment Holding, and has never traded its shares on any stock exchange. Therefore, there is no information related to employee (ESOP) and/or management share ownership programs (MSOP) that can be presented in this Annual Report.

KOMITMEN TERHADAP ANTI KORUPSI
COMMITMENT TO ANTI-CORRUPTION

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam meminimalisir benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan, Perusahaan mengupayakan penerapan pengendalian gratifikasi dari pihak lain. Pengelolaan Budaya Kepatuhan Terhadap Gratifikasi telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi 01/Per-Dir/4/I/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Pentingnya pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan Kode Etik seperti yang telah dijelaskan di atas berhubungan dengan pembatasan secara definitif antara gratifikasi atau hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak lain, yang erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan telah mendefinisikan secara jelas tentang pengkategorian gratifikasi yang terkait kedinasan, gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Melalui kebijakan tersebut, Perusahaan tidak hanya mengupayakan penerapan prinsip GCG berbasis pengelolaan korporasi yang sehat, namun kebijakan tersebut juga memberikan landasan bagi setiap insan Jamkrindo untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan menjauhkan perilaku insan Jamkrindo dari kecenderungan praktik korupsi.

Gratification Control Policy

As one of the form of the Company's commitment to minimizing conflicts of interest and abuse of authority and position, the Company seeks to implement gratuity control from other parties. Management of Gratification Compliance Culture has been established through Directors Regulation 01/Per-Dir/4/I/2023 concerning Guidelines for Gratification.

The importance of controlling gratuities in the implementation of the Code of Ethics as explained above relates to the definitive limitation between gratuities or gifts in any form given by other parties, which are closely related to abuse of authority and position. The Company's Gratification Control Policy has clearly defined the categorization of official-related gratuities, gratuities that must be reported, and gratuities that are not required to be reported.

Through this policy, the Company not only seeks to apply GCG principles based on sound corporate management, but the policy also provides a foundation for every Jamkrindo employee not to abuse their authority and position and to distance the behavior of Jamkrindo's employees from tendencies to corrupt practices.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Jamkrindo secara berkelanjutan berkomitmen untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima. Untuk mendukung terciptanya pelayanan yang prima tersebut, Jamkrindo menerapkan pedoman sistem manajemen anti penyuapan dalam penerapan SNI ISO 37001:2016 yang menjadi panduan bagi seluruh karyawan di Jamkrindo. Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau *Anti Bribery Management System* disingkat SMAP adalah Sistem Manajemen Perusahaan dalam rangka pencegahan, pendeteksian dan penanganan penyuapan. Perusahaan telah melakukan manajemen anti penyuapan melalui ditetapkannya Peraturan Direksi No. 22/Per-Dir/4/III/2022 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Tujuan ditetapkannya manajemen anti penyuapan adalah membantu manajemen operasional untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai macam kecurangan (*fraud*), mendorong insan Jamkrindo agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, menciptakan budaya kepatuhan yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi kondisi dan potensi kecurangan secara konsisten dan efisien tanpa mengurangi kinerja Insan Jamkrindo dan menjadi sebuah kebijakan yang berlaku bagi segenap Insan Jamkrindo di mana Perusahaan akan menginformasikan kebijakan anti penyuapan kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) agar memahami dan melaksanakan pedoman SMAP Jamkrindo yang menjadi salah satu standar kerja Perusahaan.

Anti-Bribery Management System (SMAP)

Jamkrindo is continuously committed to innovating in providing services to the community, so that it can provide excellent service. To support the creation of this excellent service, Jamkrindo implements anti-bribery management system guidelines in the application of SNI ISO 37001: 2016 which is a guide for all employees at Jamkrindo. The Anti-Bribery Management System or SMAP, is the Company's Management System for the prevention, detection and handling of bribery. The Company has implemented anti-bribery management through the stipulation of Directors Regulation Number. 22/ Per-Dir/4/III/2022 concerning Guidelines for Implementing the Anti-Bribery Management System.

The purpose of establishing anti-bribery management is to assist operational management to find the best solution in dealing with various types of fraud, encourage Jamkrindo people to make decisions and carry out their actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, create a culture of compliance that can recognize, prevent and deal with conditions and potential for fraud consistently and efficiently without reducing the performance of Jamkrindo personnel and become a policy that applies to all Jamkrindo personnel in which the Company will inform anti-bribery policies to all interested parties (stakeholders) so that they understand and implement Jamkrindo's SMAP guidelines which is one of the Company's work standards.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Agar karyawan senantiasa menjaga dan meningkatkan penerapan kebijakan anti korupsi, Jamkrindo telah melakukan sosialisasi/pelatihan/*awareness* atas hal tersebut, yaitu dengan menggelar program berupa *In-House* maupun pelatihan dan/atau sosialisasi terkait Anti Kecurangan, Penyuapan, dan Korupsi (*Fraud*), dengan detil sebagai berikut:

- Pelatihan terkait Anti Penyuapan (ISO 37001:2016 SMAP)

Anti-Corruption Training/Dissemination for Employees

For employees to always maintain and improve the implementation of anti-corruption policies, Jamkrindo has conducted outreach/training/awareness on this matter, namely by holding programs in the form of In-House as well as training and/or outreach related to Anti-Cheating, Bribery and Corruption (Fraud), with details as follows:

- Training related to Anti-Bribery (ISO 37001:2016 SMAP)

Tanggal Dates	**Materi Kegiatan** Training Materials	**Jumlah Peserta** Number of Participants
23 Maret 2023 March 23, 2023	*Awareness and Requirement Training*	74 Karyawan 74 Employees
9 Mei 2023 May 9, 2023	*Internal Audit Training*	28 Karyawan 28 Employees

KEBIJAKAN TERKAIT INSIDER TRADING
POLICIES RELATED TO INSIDER TRADING

Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait *insider trading* dikarenakan Jamkrindo bukan Perusahaan Terbuka (emiten) yang sahamnya diperjualbelikan ke publik. Kebijakan tersebut merupakan upaya dan/atau aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. Dengan demikian, penjelasan terkait kebijakan *insider trading* tidak dapat disampaikan.

The Company does not have a policy regarding insider trading because Jamkrindo is not a public company (issuer) whose shares are traded to the public. This policy is an effort and/or clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that no one may benefit directly or indirectly from information that is not/ not yet available in the market. Thus, an explanation regarding the insider trading policy cannot be conveyed

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai Tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan niat baik untuk kepentingan perusahaan. Sejak diterbitkannya Peraturan Direksi No. 31/Per-Dir/1/XII/2020 tentang *Whistleblowing System,* SPI melakukan sosialisasi WBS terhadap *auditee* bersamaan dengan pelaksanaan general audit. Adapun tujuan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yaitu:

1. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif;
2. Menciptakan iklim yang kondusif dengan memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan dalam rangka menjaga serta melidungi aset/kepentingan perusahaan;
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif dalam penyelesaian laporan-laporan pelanggaran secara internal maupun eksternal melalui jalur hukum (bila dianggap perlu), melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut;
4. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk perlindungan pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal;

The Whistleblowing System is a system that can be used as a medium for reporting witnesses to convey information regarding acts of violation indicated to have occurred within the Company, based on accountable evidence and good intentions for the benefit of the Company. Since the publication of the Directors Regulation No. 31/Per-Dir/1/XII/2020 concerning Whistleblowing System, SPI conducts WBS dissemination to auditees simultaneously by conducting general audits. The purpose of the Whistleblowing System, namely:

1. Ensuring the implementation of an effective violation complaint resolution mechanism;
2. Creating a conducive climate by strengthening the monitoring environment and encouraging reporting of matters that may cause financial and non-financial losses, including matters that may damage the Company's image in order to safeguard and protect the Company's assets/ interests;
3. Facilitating management to handle quickly and effectively in resolving reports of violations internally and externally through legal channels (if deemed necessary), protect the confidentiality of the reporter's identity and maintain the confidentiality and security of the information;
4. Building a policy and infrastructure to protect reporters from reprisals from internal and external parties;

5. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat satu pelanggaran dan mengurangi potensi kerugian bagi perusahaan;
6. Memberikan masukan untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal serta untuk merancang Tindakan perbaikan yang diperlukan;
7. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
8. Meningkatkan budaya kepatuhan bagi semua insan Jamkrindo;
9. Meningkatkan reputasi Perusahaan;
10. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

Bahwa sesuai Pengelolaan *Whistle Blowing System pada holding* IFG maka telah dilakukan pengkinian kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) Terintegrasi "IFG Integritas" dan telah dilakukan harmonisasi dan diterbitkan ketentuan Direksi PT Jamkrindo Nomor 35/Per-Dir/4/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System)* Terintegrasi yang disosialisasikan pada tahun 2024.

Komitmen Jamkrindo dan Karyawan

Seluruh karyawan Jamkrindo berkomitmen untuk mempraktikkan WBS dalam rangka melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga dituntut untuk berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Jamkrindo juga memiliki komitmen membuat kebijakan untuk melindungi pelapor. Dalam kebijakan WBS menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan. Sistem pelaporan pelanggaran berada di bawah Direksi, khususnya Direktur Utama. Dewan Komisaris ikut melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas atas pelaksanaan sistem tersebut.

Lingkup WBS Jamkrindo

Lingkup Pengaduan Pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS adalah:
1. Tindakan kecurangan (*Fraud*);
2. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang untuk kepentingan pribadi/diluar kepentingan Perusahaan;
3. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
4. Penyelewengan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan;
5. Benturan Kepentingan;
6. Pelanggaran peraturan dan Kode Etik Perusahaan;
7. Perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.

5. Availability of an early warning system for possible problems resulting from a violation and reducing potential losses for the Company;
6. Providing input to observe further at critical areas and work processes that have internal control weaknesses and to design the necessary corrective actions;
7. Availability of ways of conveying important and critical information for the Company to parties who must immediately handle it safely;
8. Improving a culture of compliance for all Jamkrindo personnel;
9. Improving the Company's reputation;
10. As one of the efforts in disclosing various issues that are not in accordance with the ethical standards that apply in the Company.

In accordance with the Management of the Whistle Blowing System at the IFG holding, the Integrated Whistleblowing System (WBS) policy "IFG Integritas" has been updated and has been harmonized and issued the provisions of the Directors of PT Jamkrindo Number 35/Per-Dir/4/XII/2023 dated December 29, 2023 regarding the Integrated Whistle Blowing System Policy which will be disseminated in 2024.

Jamkrindo and Its Employees Commitment

All Jamkrindo employees are committed to practicing WBS in order to implement a violation reporting system. Employees are also required to participate actively in reporting when they find violations. Jamkrindo is also committed to making policies to protect reporters. The WBS policy states clearly that a whistleblower will receive protection from the Company against adverse treatment. The violation reporting system is under the Board of Directors, especially the President Director. The Board of Commissioners participates in supervising the adequacy and effectiveness of the implementation of the system.

Scope of WBS Jamkrindo

The scope of Whistleblowing that will be followed up by the Whistleblowing System/WBS are:
1. Acts of fraud;
2. Abuse of position/authority for personal gain/outside the interests of the Company;
3. Acceptance and/or giving of Gratification;
4. Misappropriation and/or misuse of Company assets;
5. Conflict of Interest;
6. Violation of regulations and the Company's Code of Ethics;
7. Acts that violate the laws and regulations.

Sarana Pelaporan WBS

Perusahaan menyediakan sarana pelaporan untuk menyampaikan pengaduan pelanggaran melalui media di bawah ini:

1. Surat Tertulis : PO BOX 107123 JKP 10610
2. SMS dan Whatsapp : 08111717123
3. Email : wbs@jamkrindo.co.id

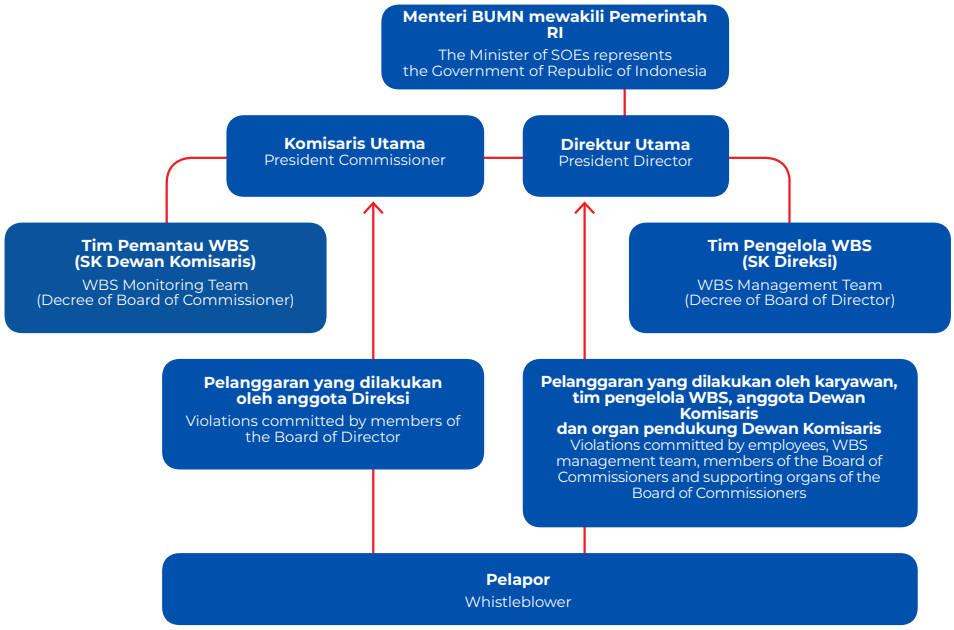
Bagan Mekanisme Pengaduan dan Tindak Lanjut

WBS Reporting Facility

The Company provides reporting facilities to submit complaints of violations through the following media:

1. Written Letter: PO BOX 107123 JKP 10610
2. SMS and Whatsapp: 08111717123
3. Email: wbs@jamkrindo.co.id

Complaint Mechanism and Follow Up Chart



Perlindungan Bagi Pelapor

Perusahaan memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dengan tidak menyampaikan identitas pelapor ke pihak manapun balk internal maupun eksternal. Perusahaan akan merahasiakan informasi yang dilaporkan dan hanya akan menggunakan informasi tersebut sebagai sumber informasi awal dalam proses Investigasi tanpa mengungkapkan identitas pelapor. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk pelapor internal, Perusahaan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pelapor tetapi dapat diperluas hingga ke anggota keluarga dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik.

Protection for Whistleblowers

The Company provides protection of the confidentiality of the whistleblowers's identity by not conveying the identity of the whistleblowers to any party, both internal and external. The Company will keep the reported information confidential and will only use that information as an initial source of information in the Investigation process without disclosing the identity of the complainant. Parties who violate the confidentiality principle will be given sanctions in accordance with applicable regulations.

Especially for internal whistleblowers, the Company does not only provide protection of only the whistleblowers but can be extended to family members. They are protected from pressure, delays in promotions, dismissals, lawsuits, property, and physical actions.

Pelaporan Pelanggaran Tahun 2023 dan Tindak Lanjut

Berikut disampaikan jumlah pelaporan yang masuk dan tindak lanjutnya

.

2023 Whistleblowing Reporting and Follow Up

The following is the number of incoming reports and their followup

Media Penyampaian Communication Media	2023	2022
Surat Letters	-	-
Email Emails	-	-

Media Penyampaian Communication Media	2023	2022
Situs Web Websites	1	-
SMS	-	-
Lain-lain Others	-	-
Jumlah **Total**	**1**	**-**

Status Laporan Report Status	2023	2022
Laporan Dalam Proses Report in Process	-	-
Laporan yang Selesai Ditindaklanjuti Report has been completely Followed Up	-	-
Laporan Tidak Terbukti The report is proven incorrect	-	-
Laporan Selesai dengan Tindak Lanjut The report is resolved and followed up	1	-
Jumlah **Total**	**1**	**-**

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
REPORT OF ASSETS OF STATE ADMINISTRATORS

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Untuk menunjukkan komitmen terhadap penerapan GCG serta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, Jamkrindo telah menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaanya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Basic Principles of State Administrators' Wealth Reports

To demonstrate commitment to the implementation of GCG, as well as one of the State-Owned Companies, Jamkrindo has developed, established and implemented guidelines for compliance with the State Administrator Wealth Report (LHKPN).

LHKPN is a list of all state administrators' assets as outlined in the LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in KPK Decree No. KEP 07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination and Announcement of State Administrator Wealth Reports. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission emphasizes the authority of the KPK to carry out steps or efforts to prevent corruption, including through registration and examination of LHKPN. In addition, Law no. 28 of 1999 concerning State Administrator who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, stipulates that every administrator is required to report and announce his assets before and after taking office and to be willing to have his assets examined before and after taking office. In Law no. 28 of 1999 article 2 (7) and its explanation, it is explained that other officials who have strategic functions in relation to state administrators include the Board of Commissioners, Directors and other structural officials in State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD).

The LHKPN examination submitted to the KPK aims to create state administrators who adhere to the general principles of state administrators who are free from practices of corruption, collusion and nepotism, as well as other disgraceful acts. Every State Administrator is required to report his wealth through the LHKPN form that has been provided by the KPK to be filled in honestly, correctly, and completely, so that the KPK can analyze, assess, and evaluate the total amount, type and value of reported Assets, correctly, quickly, accurately , accurate and responsible.

Legal and Regulatory Basis for Implementing LHKPN in Companies

In implementing LHKPN, the Company considers several legal and regulatory bases as the basis for the perspective of implementing LHKPN within the Company. The legal basis is:

1. Law no. 28 of 1999 concerning State Administrator who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism;

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020;
4. Surat Edaran Nomor SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan BUMN;
5. Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-341/MBU/10/2021 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-01/MBU/2009 tentang Penyelenggara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan BUMN;
6. Peraturan Direksi Nomor : 48/Per-Dir/4/XII/2022 tentang Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Di Lingkungan Perusahaan Dan Anak Perusahaan;
7. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya;
8. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

2. Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
3. Corruption Eradication Commission Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials' Assets as lastly amended through Corruption Eradication Commission Regulation of the Republic of Indonesia Number 02 of 2020;
4. Circular Letter Number SE-12/MBU/10/2021 concerning Obligation to Submit State Administrators Wealth Reports (LHKPN) for Officials within SOEs;
5. Decree of the Minister of SOEs Number SK-341/MBU/10/2021 concerning the Revocation of the Instruction of the State Minister for State-Owned Enterprises Number INS-01/MBU/2009 concerning Organizers Required to Submit Reports on the Wealth of State Administrators (LHKPN) within SOEs;
6. Board of Directors Regulation Number: 48/Per-Dir/4/XII/2022 concerning Provisions for Obligation to Submit State Administrators Wealth Reports (LHKPN) for Officials within the Company and Subsidiaries;
7. Regulation of the State Minister for SOEs No. PER-01/BUMN/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and its amendments;
8. Decree of the Secretary to the Minister of BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good GCG Implementation.

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2023

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan di tahun 2023.

LHKPN Transparency of Company Officials in 2023

Below is presented the transparency of submission of LHKPN by Company officials in 2023.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Jamkrindo Tahun 2023
Disclosure of Submission of 2023 Jamkrindo Officials' LHKPN

Pejabat Officials	**Jumlah Wajib Lapor** Number of Mandatory Reports	**Jumlah yang Telah Melaporkan** Number of Reported	
		Jumlah Total	**%**
Dewan Komisaris Board of Commissioners	5	5	100%
Dewan Direksi Board of Directors	6	6	100%
Organ Pendukung Dewan Komsiaris Board of Commissioners' Supporting Organs	0	0	0 %
Dewan Komisaris Anak Perusahaan Board of Commissioners of Subsidiaries	0	0	0%
Dewan Direksi Anak Perusahaan Board of Directors of Subsidiaries	3	3	100%
Manajer atau Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi Managers or Officers One Level Below the Board of Directors	86	86	100%
Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi Anak Perusahaan Officers One Level Below the Board of Directors of Subsidiaries	5	5	100%
Jumlah Total	**105**	**105**	**100%**

TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

TRANSPARENCY OF BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

Sesuai dengan komitmen Perusahaan untuk menerapkan GCG, berikut adalah pengungkapan tindakan yang berkaitan dengan praktik *Bad Corporate Governance*:

In accordance with the Company's commitment to implementing GCG, the following is a disclosure of actions related to Bad Corporate Governance practices:

Transparansi Praktik Bad Corporate Governance Tahun 2021-2023
Transparency of Bad Corporate Governance Practices Years 2021-2023

No	Praktik Practice	Tahun Year		
		2023	2022	2021
1	Aktivitas perdagangan orang dalam (insider trading) yang melibatkan direksi/ komisaris, manajemen dan karyawan Insider trading activities involving directors/commissioners, management and employees	x	x	x
2	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun Non-compliance in disclosing the fulfillment of tax obligations including guilty verdicts from the highest tax court regarding any tax issues	x	x	x
3	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Discrepancies in the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and SAK	x	x	x
4	Kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material Cases of non-compliance with laws, rules, and regulations relating to significant or material related party transactions	x	x	x
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan There is no disclosure of operating segments in the Financial Statements	x	x	x
6	Pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan Violations of any law relating to labor/employment/consumer/bankruptcy/ commercial/competition, or environmental issues	x	x	x
7	Sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting Sanctions from regulators for not making announcements within the stipulated timeframe for important events	x	x	x
8	Bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan Evidence that the Company has not complied with any listing rules and regulations during the past year apart from disclosure rules	x	x	x

V = ada/Yes
X = tidak ada/No

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG


Jamkrindo
A member of IFG

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG



6

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Corporate Social and Environmental Responsibility

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Governance of Corporate Social Responsibility



Jamkrindo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah, juga diwajibkan menyelenggarakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan program TJSL guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Program TJSL/CSR Jamkrindo merupakan program yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan mendukung bisnis inti Perusahaan. Kegiatan TJSL yang dijalankan oleh Jamkrindo merupakan wujud kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja, serta ikut berperan dalam mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal. Melalui program TJSL, Jamkrindo senantiasa mendukung perkembangan masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan yang menyentuh 3 (tiga) aspek, yaitu ekonomi, sosial, serta lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan.

Sebagai bagian BUMN, Jamkrindo berkomitmen untuk memenuhi peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan penyisihan dan penggunaan laba untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan menciptakan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/3/2023

Jamkrindo as a State-Owned Enterprise (BUMN) in the form of a Limited Liability Company (PT) in carrying out tasks assigned by the Government, is also required to conduct Social and Environmental Responsibility (TJSL) or Corporate Social Responsibility (CSR). For this reason, the Company is committed to implementing the TJSL program to support sustainable development.

The Jamkrindo TJSL/CSR program is a program that supports the Sustainable Development Goals (SDGs) and supports the Company's core business. TJSL activities carried out by Jamkrindo are a manifestation of the Company's concern for the environment, respect for human rights, obligation to provide a comfortable place and good working relationships with employees, priority in maintaining occupational health and safety, and role in developing the local economy and community. Through the TJSL program, Jamkrindo always supports community and sustainable environmentally-friendly development that touches 3 (three) aspects, namely economic, social and environmental in a consistent and sustainable manner.

As part of a SOEs, Jamkrindo is committed to complying with applicable regulations, including Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) which regulates the obligations of companies to set aside and use profits to encourage community economic activities and growth and create equitable development through expanding employment opportunities, business opportunities and community empowerment. For this reason, guided by the Regulation of the Minister of BUMN no. PER-1/MBU/3/2023 concerning Special Assignments

tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Jamkrindo berkomitmen untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam pelaksanaan program TJSL/CSR Jamkrindo memiliki tujuan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif melalui aktivitas usaha Penjaminan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, membangun citra positif Perusahaan di mata masyarakat dan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kerja sama dan saling menghormati dengan masyarakat dan lingkungan sekitar tempat beroperasionalnya jaringan Kantor Perusahaan. Selain itu, pelaksanaan TJSL/CSR juga menjadi salah satu upaya penerapan nilai dan budaya Perusahaan sesuai regulasi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Jamkrindo berkomitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan TJSL/CSR untuk terus menjalankan keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan usaha Perusahaan dan manfaat yang dapat diberikan. Untuk itu, Program Tanggung Jawab Sosial yang dilaksanakan Perusahaan adalah dengan menyasar berbagai pihak/*stakeholders*.

Kombinasi antara implementasi TJSL/CSR yang menyentuh aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, serta komitmen untuk memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat, merupakan bentuk partisiasi aktif Jamkrindo dalam mendukung dan mewujudkan TPB. Perusahaan berharap, program TJSL/CSR yang dilakukan tak sekadar membawa manfaat bagi masyarakat di sekitar operasional Perusahaan dan lingkungan, namun juga berdampak positif bagi keberlanjutan dan keberlangsungan usaha Perusahaan.

Prinsip Korporasi Yang Sehat

Sebagai perusahaan di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi entitas pemilik akhir, Jamkrindo memiliki peran untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial ke dalam seluruh lapisan, khususnya terkait peran BUMN sebagai *Agen of Development* atau Agen Pembangunan. Jamkrindo menyadari pentingnya pengelolaan usaha berbasiskan prinsip korporasi yang sehat menjadi salah satu kewajiban Perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Prinsip korporasi yang sehat tentunya harus dilandasi pada pengelolaan usaha dengan tujuan mencari laba; dan pengelolaan organisasi yang memiliki kaidah-kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang akan berujung pada akuntabilitas Perusahaan.

Hal ini sejalan dengan salah satu *point* dalam kredo Perusahaan yakni, sehat dalam tata kelola perusahaan. Pengelolaan usaha yang sehat juga penerapan tata kelola organisasi yang baik yang didasarkan pada kepatuhan dan akuntabilitas, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan hak-haknya, hingga

and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises, Jamkrindo is committed to fulfilling these obligations.

In implementing the TJSL/CSR program, Jamkrindo aims to support the Government's efforts in driving the national economy which prioritizes harmony between economic, social and environmental aspects, is able to maintain economic stability and is inclusive through Guarantee business activities, improves community welfare and improves the environment, develops positive image of the Company in the eyes of the community and Stakeholders, and increases cooperation and mutual respect with the community and surrounding environment where the Company's Office network operates. Apart from that, implementing TJSL/CSR is also an effort to implement the Company's values and culture in accordance with regulations and Good Corporate Governance.

To achieve better social conditions, economic conditions, and quality of life, Jamkrindo is committed to implementing TJSL/CSR programs and activities to continue to strike a balance between the growth and development of the Company's business and the benefits that can be provided. For this reason, the Corporate Social Responsibility Program implemented by the Company targets various parties/ stakeholders.

The combination of implementing TJSL/CSR which touches economic, environmental and social aspects, as well as a commitment to paying attention to environmental principles, transparency and community participation, is a form of Jamkrindo's active participation in supporting and realizing the SDGs. The Company hopes that the TJSL/ CSR program carried out will not only bring benefits to the communities around the Company's operations and the environment, but will also have a positive impact on the sustainability and continuity of the Company's business.

Principles of a Healthy Corporation

As a company of which the Government of the Republic of Indonesia is the final owner entity, Jamkrindo has a role in realizing Social Responsibility at all levels, especially regarding the role of SOEs as an Agent of Development. Jamkrindo realizes the importance of managing business based on principles of a healthy corporation as one of the Company's obligations to be accountable for its performance. The principles of a healthy corporation must certainly be based on business management with the aim of making a profit; and organizational management that follows principles of Good Corporate Governance, which will lead to Company's accountability.

This is in line with one of the points in the Company's credo, namely, sound corporate governance. Healthy business management as well as the implementation of good organizational governance which is based on compliance and accountability, development of Human Resources (HR) competencies and fulfillment of their rights, and the

pertumbuhan Jamkrindo bersama masyarakat Indonesia, tentu akan memperkuat posisi Jamkrindo untuk dapat menjemput visi yang dicita-citakan.

Dengan memenuhi kewajiban terhadap aspek TJSL/CSR, Jamkrindo berupaya untuk memenuhi hak dan harapan pemegang saham dan para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa kepentingan mereka atas hubungan yang ada dengan Perusahaan dapat terpenuhi sehingga Perusahaan dan pemangku kepentingan dapat tumbuh bersama. Dalam pencapaian tujuan bersama demi menjaga keselarasan antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan, Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan pemangku kepentingan berpartisipasi melalui berbagai inisiasi yang telah dan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk menciptakan keberlanjutan yang dapat saling menopang antara Perusahaan dan pemangku kepentingan.

Prinsip dan Landasan Hukum TJSL di Perusahaan

Prinsip TJSL

Kementerian BUMN mendorong seluruh perusahaan di bawahnya untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui 3 (tiga) bidang prioritas, yaitu pendidikan, lingkungan, serta Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). Program TJSL BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan, dan pengelolaan dampak program TJSL sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian atas tujuan kegiatan dengan berpedoman pada rencana kerja. Program TJSL BUMN memiliki 4 (empat) pilar utama dengan 17 (tujuh belas) poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu:

1. Sosial
   Tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar Sosial meliputi tujuan:
   a. Mengentaskan Kemiskinan (TPB 1)
   b. Mengakhiri Kelaparan (TPB 2)
   c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (TPB 3)
   d. Pendidikan Berkualitas (TPB 4)
   e. Kesetaraan *Gender* (TPB 5)
2. Lingkungan
   Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar Lingkungan meliputi tujuan:
   a. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6)
   b. Pembangunan Kota dan Pemukiman yang Layak (TPB 11)
   c. Proses Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab (TPB 12)
   d. Penanganan Perubahan Iklim (TPB 13)
   e. Menjaga Ekosistem Lautan (TPB 14)
   f. Menjaga Ekosistem Daratan (TPB 15)
3. Ekonomi
   Tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang

growth of Jamkrindo together with the Indonesian people, will certainly strengthen Jamkrindo's position to be able to achieve the desired vision.

By fulfilling obligations on TJSL/CSR aspects, Jamkrindo strives to fulfill the rights and expectations of shareholders and stakeholders, as well as ensuring that their interests in existing relationships with the Company can be fulfilled so that the Company and stakeholders can grow together. In achieving the common goal of maintaining harmony between the Company and its stakeholders, the Company creates conditions that enable stakeholders to participate through various initiatives that have been and will be carried out by the Company to create sustainability that can support each other between the Company and its stakeholders.

Principles and Legal Foundations of TJSL in Company

Principles of TJSL

The Ministry of SOEs encourages all companies under it to make positive contributions to society through 3 (three) priority areas, namely education, environment, and Micro and Small Business Funding (PUMK). The TJSL program is carried out systematically and in an integrated manner to ensure that the implementation, achievement of success and management of the impact of the TJSL program are in accordance with the priorities and/or achievement of objectives guided by the work plan. The TJSL program has 4 (four) main pillars with 17 (seventeen) Sustainable Development Goals (TPB) points, namely:

1. Social
   Achieving the quality fulfillment of basic human rights fairly and equally to improve welfare for the entire community. The Social Pillar includes the following objectives:
   a. Poverty Eradication (SDG 1)
   b. Ending Hunger (SDG 2)
   c. Good Health and Well-being (SDG 3)
   d. Quality Education (SDG 4)
   e. Gender Equality (SDG 5)
2. Environmental
   Sustainable management of natural resources and the environment as a support for all life. The Environmental Pillar includes the following objectives:
   a. Provision of Clean Water and Proper Sanitation (SDG 6)
   b. Development of Proper Cities and Communities (SDG 11)
   c. Responsible Consumption and Production Process(SDG 12)
   d. Handling of Climate Change (SDG 13)
   e. Protection of Ocean Ecosystems (SDG 14)
   f. Protection of Land Ecosystems (SDG 15)
3. Economic
   Achieving the quality economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure,

terjangkau, dan didukung kemitraan. Pilar Ekonomi meliputi tujuan:
   a. Penggunaan Energi Bersih dan Terjangkau (TPB 7)
   b. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (TPB 8)
   c. Industri, Ekonomi dan Infrastruktur (TPB 9)
   d. Mengurangi Kesenjangan (TPB 10)
   e. Melakukan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (TPB 17)
4. Hukum dan Tata Kelola
   Terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar Hukum dan Tata Kelola meliputi tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (TPB 16).

Dasar Hukum

Landasan Hukum dalam menjalankan Program TJSL di Jamkrindo adalah:

1. UU Indonesia. No. 40/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. UU Indonesia. No. 19/2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 51 Tahun 2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik
4. Perpres Indonesia. No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
6. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia. S-721/MBU/11/2022 Tanggal 10 November 2022 Tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja sama Program PUMK").
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/09/2022 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Presiden Indonesia. 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri BUMN RI Indonesia. PER-1/MBU/3/2023 tanggal 3 Indonesia Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial BUMN
10. Kerja sama ISO 26000 dan Metadata Indikator SDGs
11. Risalah Rapat. No. RIS-55/DSI.MBU.B/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Program Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023.
12. Peraturan Direksi. No. 44/Per-Dir/1/XI/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Indonesia PT Jaminan Kredit Indonesia.
13. Ketetapan Direksi. No. 01/KD/5/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Struktur Organisasi Indonesia PT Jaminan Kredit Indonesia.

affordable clean energy, and supported by partnerships. The Economic Pillar includes the following objectives:
   a. Use of clean and affordable energy (SDG 7)
   b. Decent work and economic growth (SDG 8)
   c. Industry, Economy, and Infrastructure (SDG 9)
   d. Reduced Inequalities (SDG 10)
   e. Partnerships for Achieving Goals (SDG 17)
4. Law and Governance
   Realizing the certainty of effective, transparent, accountable, and participatory law and governance to create security stability and achieve a state based on civil society. The Law and Governance pillar includes the goals of Peace, Justice and Strong Institutions (SDG 16)

Legal Basis

The legal basis for implementing the TJSL program at Jamkrindo is:

1. Law No.40/2007 on August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law No. 19/2003 on June 19, 2003 concerning State-Owned Enterprises
3. Regulation of Financial Services Authority (POJK) 51 of 2017 concerning the implementation of sustainable finance for financial service institutions, issuers and public companies
4. Presidential Regulation No.59/2017 concerning Implementation of Achieving Sustainable Development Goals;
5. Regulation of the Minister of National Development Planning no. 7 of 2018 concerning Coordination, Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting on the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs);
6. Letter from the Minister of Indonesian State-Owned Enterprises. S-721/MBU/11/2022 on November 10, 2022 concerning Cooperation in Micro and Small Business Funding Programs ("PUMK Program Cooperation").
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia no. PER-06/MBU/09/2022 concerning Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises;
8. Presidential Regulation. 111 year 2022 concerning Implementation of Achieving Sustainable Development Goals;
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia. PER-1/MBU/3/2023 on March 3, 2023 concerning SOEs Special Assignments and Environmental and Social Responsibility Programs.
10. ISO 26000 Guidance and SDGs Indicator Metadata
11. Minute of Meeting No.RIS-55/DSI.MBU.B/01/2023 on January 19, 2023 concerning 2023 Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Programs.
12. Regulation of the Board of Directors No. 44/Per-Dir/1/XI/2022 on November 30, 2022 concerning Management Guidelines for the Social and Environmental Responsibility Programs of PT Jaminan Kredit Indonesia.
13. Decree of the Board of Directors. No.01/KD/5/VI/2023 on June 5, 2023 concerning the Organizational Structure of PT Jaminan Kredit Indonesia.

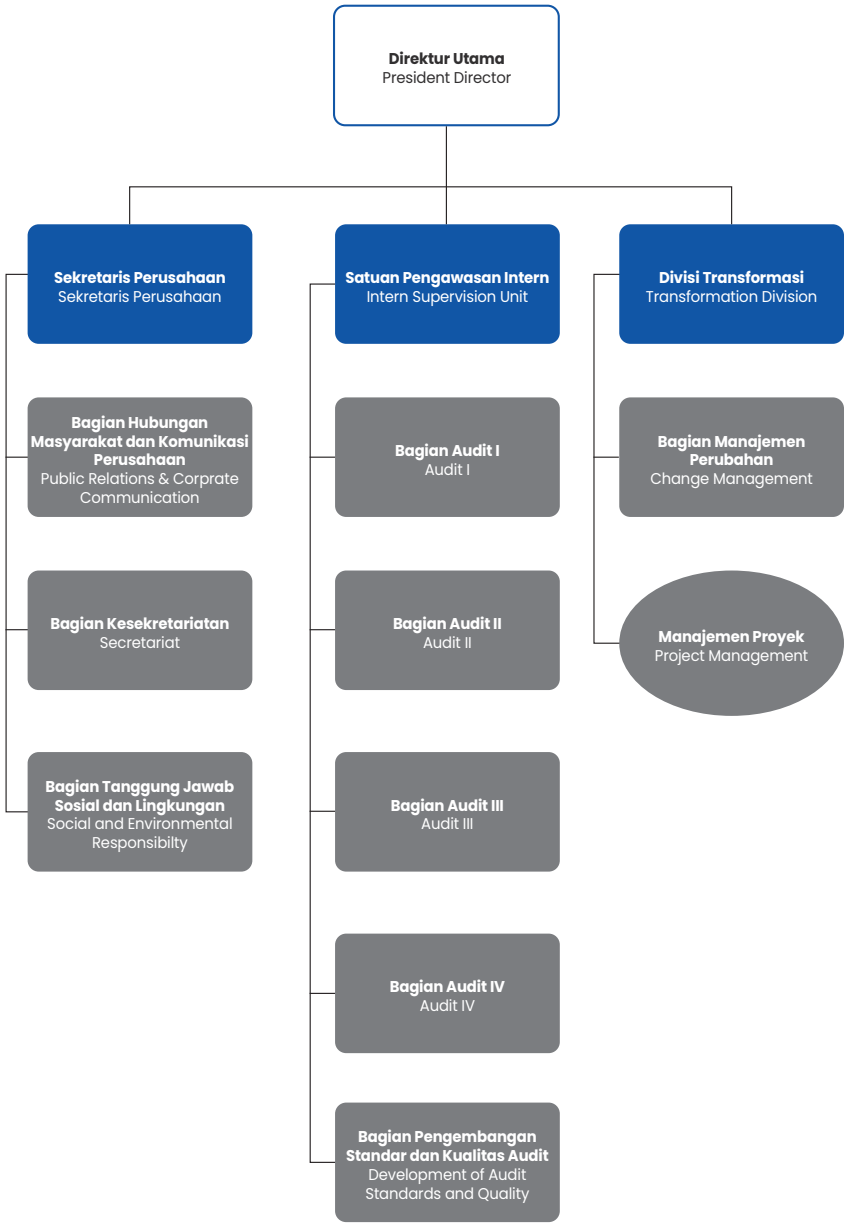
STRUKTUR ORGANISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Organizational Structure of Corporate Social Responsibility

Jamkrindo memberikan tanggung jawab kepada Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan seluruh kegiatan TJSL, meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sekretaris Perusahaan selaku pengelola program TJSL melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Direksi melalui Direktur Utama

Per 31 Desember 2023, struktur organisasi TJSL Jamkrindo berdasarkan Ketetapan Direksi No. 01/KD/1/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Struktur Organisasi PT Jaminan Kredit Indonesia adalah sebagai berikut:

Jamkrindo gives responsibility to the Corporate Secretary in carrying out all TJSL activities, including economic, environmental and social aspects. The Corporate Secretary as the manager of the TJSL program carries out his/her duties and is responsible to the Board of Directors through the President Director.

As of December 31, 2023, the organizational structure of TJSL in Jamkrindo is based on the Decree of Directors no. 01/KD/1/XII/2022 on December 21, 2022 concerning the Organizational Structure of PT Jaminan Kredit Indonesia is as follows:



Tujuan dan Sasaran Program TJSL BUMN

Tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan Program TJSL BUMN adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat di sekitar perusahaan;
4. Mendukung misi strategis inisiatif perusahaan.

Realisasi dana dan Program Kegiatan TJSL 2023

Target dan Rencana Program TJSL

Pelaksanaan program TJSL/CSR Perusahaan dilakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan program harus dibuat sesuai dengan pemetaan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan atas kegiatan operasi dan bisnis yang dilakukan Jamkrindo, yang kemudian dituangkan dalam rencana kebutuhan nyata pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.

Dalam aspek ekonomi, sebagai entitas usaha, Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kinerja ekonomi yang berkelanjutan, bersih dari praktik korupsi serta memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan yang lain. Pada aspek lingkungan, Perusahaan senantiasa melaksanakan kaji risiko lingkungan hidup, untuk menentukan risiko lingkungan dari kegiatan operasional dan langkah pengendaliannya. Sementara pada aspek sosial, perhatian Perusahaan tidak hanya pada pemangku kepentingan internal, melainkan juga eksternal.

Program TJSL/CSR Perusahaan dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan serta pengelolaan dampak program TJSL/CSR sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan program, yang berpedoman pada rencana kerja. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa melakukan identifikasi dan penelaahan terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan atas setiap aktivitas bisnis yang dijalankan. Jamkrindo senantiasa melakukan penelaahan atau *due diligent* atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas Perusahaan, melalui pemonitoran atau rencana program kerja maupun kebijakan yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Goals and Targets of TJSL Program

The goals implementing the TJSL Program are as follows:

1. Providing benefits for economic development, social development, environmental development as well as legal development and governance for companies;
2. Giving contribution to the creation of added values for the company with principles that are integrated, directed, accountable and measurable in terms of impact;
3. Fostering micro and small businesses to be more resilient and independent as well as the communities around the company;
4. Supporting the strategic mission of company initiatives.

Realization of 2023 TSJL Program Funds and Activities

Targets and Plans of TJSL Program

The implementation of the Company's TJSL/CSR program is carried out from planning to evaluation. Program planning must be made in accordance with the mapping of the social, economic and environmental impacts of operational and business activities conducted by Jamkrindo, which are then outlined in a plan for the real needs of stakeholders by taking into account the Company's capabilities.

In the economic aspect, as a business entity, the Company has the responsibility to ensure sustainable economic performance, free from corrupt practices and has benefits for other stakeholders. In the environmental aspect, the Company always carries out environmental risk assessments, to determine environmental risks from operational activities and their control measures. Meanwhile, on the social aspect, the Company's attention is not only on internal stakeholders, but also external stakeholders.

The Company's TJSL/CSR program is carried out systematically and in an integrated manner to ensure the implementation, achievement of success as well as management of the impact of the TJSL/CSR program in accordance with the priorities and/or achievement of program objectives, which are guided by the work plan. Therefore, the Company always identifies and reviews the economic, social and environmental impacts of every business activity which is conducted. Jamkrindo always carries out due diligence reviews of the economic, social and environmental impacts of the Company's activities, through monitoring or planning of work programs and policies that can provide added values for the stakeholders.

Sesuai dengan hasil Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSL Tahun 2023 yang tertuang dalam Risalah Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023 No RIS-55/DSI.MBU.B/01/2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 terkait dengan TJSL adalah sebagai berikut:

In accordance with the results of the discussion of the 2023 TJSL Program Work Plan and Budget as recorded in the Minutes of Meeting of the Meeting for 2023 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget no. RIS-55/DSI.MBU.B/01/2023 concerning the Company's 2023 Work Plan and Budget (RKAP) in regards to TJSL, the decision is as follows:

Tabel RKA Program TJSL Tahun 2023
Table Work Plan and Budget for 2023 TJSL Program

No	Program	RKA 2021 (Rp)
1	Penyaluran Program TJSL Non PUMK (CID) Distribution of the Non-PUMK TJSL Program (CID)	13.435.000.000,-
2	Penyaluran Program TJSL Non PUMK (Non CID) Distribution of the Non-PUMK TJSL Program (NON-CID)	450.000.000,-
3	Penyaluran Pendanaan UMK Mandiri Distribution of Independent MSE Funding	-
4	Penyaluran Pendanaan UMK Kolaborasi "BRI" Distribution of Collaborative MSE Funding "BRI"	4.200.000.000,-
Total		**18.085.000.000,-**

Realisasi Program dan Kegiatan 2023

1. RKA Program Pendanaan UMK
   Jamkrindo akan menyalurkan Program Pendanaan UMK yang masuk kedalam pilar ekonomi sebesar Rp4.200.000.000,- melalui Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK") kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai Surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022. Dalam menyalurkan PUMK sesuai dengan peraturan menteriR No. No. PER-1/MBU/3/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial BUMN

2. RKA Program TJSL/Program Bantuan

   Jamkrindo seperti yang telah ditetapkan dalam 11. Risalah Rapat No. RIS-5531/DSI.MBU.B/0112/2023 tanggal 19 Januari 2023, tentang Rencana Kerja dan Anggaran Program Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023 bahwa RKA Program TJSL/ Program Bantuan (CID) sebesar Rp13.435.000.000,- dan RKA Program TJSL/Program Bantuan (NON-CID) sebesar Rp450.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Realization of 2023 Programs and Activities

1. Work Plan and Budget for MSE Funding Program
   Jamkrindo will distribute the MSE Funding Program which is included in the economic pillar in the amount of IDR4,200,000,000,- through the Cooperation Funding Program for Micro and Small Businesses ("PUMK Cooperation Program") to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in accordance with the Letter from the Minister of State-Owned Enterprises no. S-721/ MBU/11/2022 on November 10, 2022. The distribution is in accordance with the Regulation of the Minister no. PER-1/MBU/3/2023 on March 3, 2023 concerning BUMN Special Assignments and Environmental and Social Responsibility Programs

2. Work Plan and Budget for TJSL Program/Assisstance Program
   Jamkrindo as stipulated in Minute of Meeting no. RIS-5531/DSI.MBU.B/0112/2023 on January 19, 2023 concerning 2023 Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Programs decided that the work plan and budget for TJSL Program/Assistance Program (CID) amounts to IDR13,435,000,000,- and the work plan and budget for TJSL Program/Assistance Program (NON-CID) amounts to IDR450,000,000,- with the following details:

Tabel RKA Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023
Table Work Plan and Budget for 2023 Sustainable Development Goals

No	TPB SDG	RKA Tahun 2023 (Rp) 2023 Work Plan and Budget (IDR)
1	Pilar Pembangunan Sosial Social Development Pillar	4.975.000.000,-
2	Pilar Pembangunan Ekonomi Economic Development Pillar	6.925.000.000,-
3	Pilar Pembangunan Lingkungan Environmental Development Pillar	5.905.000.000,-
4	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Law and Governance Development Pillar	280.000.000,-
TOTAL		**18.085.000.000,-**

a. Realisasi Program TJSL Jamkrindo Tahun 2023
Jamkrindo telah menyalurkan bantuan untuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN CID & NON CID sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp18.007.732.036,- atau 99,57% dari RKA TJSL BUMN Tahun 2023. Penyaluran program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebesar Rp3.450.000.000,- atau 82,14% dari RKA penyaluran PUMK Tahun 2023 yang disalurkan secara kolaborasi dengan Bank BRI. Sedangkan untuk Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) Non PUMK yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat atau *Community Involvement & Development* (CID) yaitu sebesar Rp13.501.444.977,- atau 100,49% dari RKA TJSL Non PUMK CID 2023 dan di luar unit *Community Involvement & Development* (Non-CID) sebesar Rp1.056.287.059,- atau 234,73% dari RKA TJSL Non PUMK (Non-CID). Rincian Penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

a. Realization of 2023 TJSL Program of Jamkrindo
Jamkrindo has distributed assistance for the CID & NON CID SOEs Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program until 2023 amounting to IDR18,007,732,036,- or 99.57% of the 2023 Work Plan and Budget for TJSL Program and Distribution of the Micro and Small Business (PUMK) Funding program of IDR. 3,450,000,000,- or 82.14% of the 2023 Work Plan and Budget for PUMK distribution which was distributed in collaboration with Bank BRI. Meanwhile, the Non-PUMK Social Responsibility Program (TJSL) which is implemented by the Community Involvement & Development (CID) unit amounts to IDR13,501,444,977,- or 100.49% of the 2023 Work Plan and Budget for Non-PUMK (CID). In addition, the Non-PUMK Social Responsibility Program (TJSL) which is implemented by units other than Community Involvement & Development (Non-CID) amounts to IDR1,056,287,059,- or 234.73% of the 2023 Work Plan and Budget for Non-PUMK (Non-CID). Details of the distribution of Social Responsibility Programs (TJSL) based on the Sustainable Development Goals (SDGs) are listed in the following table:

Tabel Realisasi Program TJSL BUMN 2023
Table Realization of 2023 TJSL Program

Program	RKA 2023 2023 Work Plan and Budget	Real TW IV 2023 Real Q4 2023	Capaian Realization
1	2	3	4=3:2
Penyaluran Program TJSL Non PUMK (CID) Distribution of the Non-PUMK TJSL Program (CID)	13.435.000.000	13.501.444.977	100.49%
Penyaluran Program TJSL Non PUMK (Non CID) Distribution of the Non-PUMK TJSL Program (NON-CID)	450.000.000	1.056.287.059	234,73%
Penyaluran Pendanaan UMK Mandiri Distribution of Independent MSE Funding	-	-	0,00%
Penyaluran Pendanaan UMK Kolaborasi Distribution of Collaborative MSE Funding	4.200.000.000	3.450.000.000	82,14%
Realisasi Program TJSL BUMN Realization of 2023 TJSL Program	**18.085.000.000**	**18.007.732.036**	**99,57%**

b. Program *Creating Share Value* (CSV) Jamkrindo
Terdapat 3 (tiga) Program TJSL yang berkomitmen mendukung bisnis inti dan menciptakan *Creating*

b. Creating Share Value (CSV) Program of Jamkrindo
There are 3 (three) TJSL Programs that are committed to supporting core businesses and establishing

Shared Value ("CSV") bagi perusahaan yang tertuang dalam RKA TJSL Tahun 2023. Program CSV sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp870.011.202,- atau 116,00% jika dibandingkan dengan RKA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Creating Shared Value ("CSV") for companies as stated in the 2023 TJSL Work Plan and Budget. The CSV program until December 2023 is IDR870,011,202,- or 116.00% when compared to the 2023 Work Plan and Budget with the following details:

Tabel Realisasi Program CSV 2023
Table Realization of 2023 CSV Program

No.	Program CSV CSV Program	TPB SDG	Uraian Program Program Description	Manfaat Untuk Perusahaan dan Nilai Sosial Benefits for the Company and Social Value	RKA 2023 2023 Work Plan and Budget	Des 2023 Dec 2023	% Pencapaian Achievement Realisasi vs RKA 2023 Realization vs Work Plan and Budget
1	2	3	4	5	6	8	
1	Pendampingan UMKM Garut Garut MSME Assistance	8	Garut telah memiliki modal *social* yang baik yang menggerakkan dinamika perekonomian sehari-hari. Jamkrindo berperan dalam menginspirasi masyarakat untuk memberikan nilai lebih demi pembangunan berkelanjutan. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain : Perluasan wilayah kampanye anti sampah plastik dan pendirian bank sampah, peningkatan usaha *homestay* dengan wisata edukasi budidaya hidroponik, pelatihan keterampilan usaha untuk sektor peternakan, pengolahan makanan, dan pertani. PT Jamkrindo bertujuan mendampingi UMKM tersebut untuk naik kelas dan mendapatkan pembiayaan KUR. Garut already has good social capital which drives daily economic dynamics. Jamkrindo performs a role in inspiring society to provide added value for sustainable development. Potential that can be developed include: Expanding the areas for anti-plastic waste campaign and establishing a waste bank, increasing homestay businesses with educational tourism on hydroponic cultivation, conducting business skills training for the livestock, food processing and agriculture sectors. PT Jamkrindo aims to assist these MSMEs to upgrade and obtain financing for People's Business Credit (KUR).	Dengan adanya program pendampingan UMKM Garut, dapat mendukung pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi Jamkrindo dalam meningkatkan nilai guna bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya program ini juga dapat meningkatkan pembiayaan KUR dari Jamkrindo kepada UMKM With the Garut MSME mentoring program, it can support the development of the community's economic capacity and provide added value for Jamkrindo in increasing base value for the surrounding community. This program can also increase financing for People's Business Credit (KUR) from Jamkrindo to MSMEs	250.000.000	183.432.948	73,37%

Tabel Realisasi Program CSV 2023
Table Realization of 2023 CSV Program

No.	Program CSV CSV Program	TPB SDG	Uraian Program Program Description	Manfaat Untuk Perusahaan dan Nilai Sosial Benefits for the Company and Social Value	RKA 2023 2023 Work Plan and Budget	Des 2023 Dec 2023	% Pencapaian Achievement Realisasi vs RKA 2023 Realization vs Work Plan and Budget
1	2	3	4	5	6	8	
2	Kampanye Anti Sampah Plastik Labuan Bajo Labuan Bajo Anti-Plastic Waste Campaign	13	PT Jamkrindo memahami bahwa menjaga lingkungan akan memberikan dampak positif bagi generasi yang akan datang, oleh karena itu PT Jamkrindo menginisiasi program ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan mengupayakan pengurangan penggunaan dan daur ulang sampah plastik. Meninjau dari sisi ekonomi daur ulang sampah plastik memiliki impact positif terhadap ekonomi masyarakat dengan cara pengolahan sampah plastik menjadi barang bernilai jual yang dapat memberikan penghasilan untuk menunjang ekonomi. PT Jamkrindo understands that protecting the environment will have a positive impact on future generations, therefore PT Jamkrindo initiated this program as a form of concern for the environment by seeking to reduce the use and recycling of plastic waste. Looking at it from an economic perspective, recycling plastic waste has a positive impact on the community's economy by processing plastic waste into goods with selling value that can provide income to support the economy.	Program ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat Labuan Bajo mengenai bahayanya sampah plastik, serta dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Dengan adanya program ini juga dapat membantu meningkatkan nilai tambah bagi Jamkrindo sebagai perusahaan yang mengadakan program tersebut, sehingga menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk dapat mengadakan program berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat This program can increase knowledge among the people of Labuan Bajo about the dangers of plastic waste, and can reduce the use of plastic waste. This program can also help increase added value for Jamkrindo as a company that holds this program, so that it becomes an example for other companies to be able to hold sustainable programs that are beneficial to the community.	250.000.000	458.578.254	183,43%

Tabel Realisasi Program CSV 2023
Table Realization of 2023 CSV Program

No.	Program CSV CSV Program	TPB SDG	Uraian Program Program Description	Manfaat Untuk Perusahaan dan Nilai Sosial Benefits for the Company and Social Value	RKA 2023 2023 Work Plan and Budget	Des 2023 Dec 2023	% Pencapaian Achievement Realisasi vs RKA 2023 Realization vs Work Plan and Budget
1	2	3	4	5	6	8	
3	Kelompok Usaha Bersama Microbusiness Microbusiness Joint Venture Group	8	PT Jamkrindo akan melaksanakan program dalam rangka mendukung penguatan ekonomi bagi UMKM dengan kegiatan pelatihan peningkatan usaha, legalitas usaha, laporan keuangan digital dengan tujuan agar UMKM dapat mengembangan usahanya dengan berbekal pengetahuan kewirausahaan yang kompleks sehingga memiliki daya saing yang kuat dengan harapan pelaku UMKM memiliki peluang untuk mendapatkan akses pembiayaan yang relevan. PT Jamkrindo will implement programs to support economic strengthening for MSMEs with trainings on business improvement, business legality, digital financial reports with the aim that MSMEs can develop their businesses armed with complex entrepreneurial knowledge so that they have strong competitiveness with the hope that MSME players will have the opportunity to gain access to relevant financing.	Dapat mendukung para UMKM dari sisi ekonomi untuk dapat mengembangkan usahanya agar dapat bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Jamkrindo bertujuan mendukung program ini untuk dapat memajukan UMKM serta memberikan pembiayaan KUR kepada UMKM The program can support MSMEs from an economic perspective by developing their businesses so they can compete in line with current developments. Jamkrindo aims to support this program to advance MSMEs and provide financing for People's Business Credit (KUR) to MSMEs	250.000.000	188.000.000	75,20%
Total					**750.000.000**	**830.011.202**	**110,67%**

c. Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial (TJSL)
Pada program prioritas TJSL sampai dengan Desember tahun 2023 Jamkrindo telah melakukan realisasi bantuan guna mendukung Tujuan Pembangun Berkelanjutan (TPB), dengan rincian sebagai berikut :

c. Social Responsibility (CSR) Priority Program
In the TJSL priority program until December 2023, Jamkrindo has realized assistance to support the Sustainable Development Goals (SDGs), with the following details:

Tabel Program Prioritas
Table Priority Program

No	Program Program	Nama Program Unggulan Name of Featured Program	TPB SDG	RKA 2023 2023 Work Plan and Budget	Real TW IV 2023 Real Q4 2023	Capaian Realization
		1	2	3	4	5=4:3
1	Pendidikan Education	Beasiswa Siswa Berprestasi Scholarship for High-Achieving Students	4	670.000.000	236.718.974	35,33%
2		5.300 Pemeriksaan Gigi dan Pembagian Paket Kesehatan Gigi Kepada Siswa/I di Wilayah 3T 5,300 Dental Examinations and Distribution of Dental Health Packages to Students in the 3T Region	4	530.000.000	476.166.501	89,84%
3		530 Kacamata Gratis Bagi Siswa/I di Wilayah 3T 530 Free Glasses for Students in the 3T Area	4	159.000.000	161.035.000	101,28%
4		Edukasi *Anti Bullying & Sex Education* Kepada 5.300 Siswa/i Sekolah Dasar Anti-Bullying Education and Sex Education for 5,300 Students in Elementary Schools	4	250.000.000	332.385.857	132,95%
6		Literasi Bisnis dan Produk Penjaminan Business Literacy and Guarantee Products	4	47.500.000	65.000.000	136,84%
7		Renovasi Fasilitas Pendidikan Wilayah 3T Renovation of 3T Region Education Facilities	4	250.000.000	692.616.628	277,05%
8		Program Kolaborasi Bantuan Pendidikan Education Assistance Collaborative Program	4	1.343.500.000	1.343.500.000	100,00%
Total Program Pendidikan for Educational Programs				**3.250.000.000**	**3.307.422.960**	**101,77%**
1	Lingkungan Environment	Penanaman Pohon Tree planting	15	500.000.000	52.085.000	10,42%
2		Optimalisasi kegiatan Bank Sampah Optimization of Waste Bank activities	12	250.000.000	284.340.000	113,74%
4		Program Renovasi Rumah Ibadah House of Worship Renovation Program	11	2.041.000.000	2.138.995.340	104,80%
6		Pengadaan Air Bersih Provision of Clean Water	6	700.000.000	182.760.000	26,11%
7		Program Rehabiliasi Sarana dan Prasarana di Wilayah 3T Facilities and Infrastructure Rehabilitation Program in the 3T Region	11	371.000.000	1.446.619.165	389,92%
Total Program Lingkungan Total for Environmental Activities				**3.862.000.000**	**4.104.799.505**	**106,29%**
1	Pengembangan UMK MSE Development	Sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan UMK Socialization and training for MSE empowerment	8	450.000.000	284.441.746	63,21%
		Peningkatan Kapasitas Usaha Penyandang Disabilitas Increase of Business Capacity of Persons with Disabilities	8	150.000.000	135.000.000	90,00%
2		Pendampingan UMKM naik kelas Assistance for Upgrading MSMEs	8	400.000.000	321.175.944	80,29%
Total Program PUMK Total for MSE Development				**1.000.000.000**	**817.367.729**	**81,74%**
Grand Total Grand Total				**8.112.000.000**	**8.152.840.155**	**100,50%**

Realisasi Penyaluran dana program prioritas TJSL Jamkrindo tahun 2023 sebesar Rp8.152.840.155,- atau 100,50% dari RKA Program prioritas tahun 2023, dengan detail kegiatan sebagai berikut :

Pilar Pendidikan

1. Pemeriksaan, Edukasi dan Pembagian Paket Kesehatan Gigi Kepada 5.300 Siswa/i Sekolah Dasar di Seluruh Indonesia
   Latar belakang pemilihan program Edukasi, Pemeriksaan Gigi dan Pembagian Paket Kesehatan Gigi Kepada 5.300 Siswa/I Sekolah Dasar di wilayah 3T Indonesia, yaitu :

   a. Hasil Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2018 menyebutkan bahwa 93 persen anak usia dini, yakni dalam rentang usia 5-6 tahun, mengalami gigi berlubang;
   b. Hal ini dapat memengaruhi status gizi anak karena gigi berlubang membuat anak menolak untuk makan;
   c. Sementara untuk perilaku menyikat gigi yang benar, hasil Riskesdas 2018 menyebut bahwa baru 2,8 persen penduduk Indonesia yang menyikat gigi dua kali sehari, yakni pagi dan malam secara benar. Hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi seputar menyikat gigi harus dimulai sejak dini karena akan menjadi kebiasaan hingga dewasa;

   • **Dampak Program :** Jamkrindo berkolaborasi dengan puskesmas dan Universitas program dokter gigi untuk melaksanakan kegiatan ini, Kegiatan ini telah diberikan kepada 5.300 Siswa/I Sekolah Dasar di wilayah 3T di Seluruh Indonesia dengan melibatkan unit kerja Jamkrindo di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan menjaga kebersihan dan kesehatan gigi sejak dini, agar anak-anak indonesia memiliki kesehatan dari berbagai aspek tidak terkecuali kesehatan gigi dan mulut.

2. Sosialisasi dan Edukasi Peduli Kesehatan Mental Cegah Perundungan dan Kekerasan Seksual Kepada 5.300 Siswa/i Sekolah Dasar di DKI Jakarta
   Dalam rangka menyambut HUT Jamkrindo ke-53 kami mengadakan rangkaian kegiatan bantuan TJSL (Non PUMK) pada bidang prioritas pendidikan yaitu salah satunya Edukasi *Anti Bullying & Sex Education* kepada 5.300 Siswa/I Sekolah Dasar bekerja sama dengan Komnas Perlindungan anak dan Paud Institude Indonesia.

   • **Dampak :** Jamkrindo berkolaborasi bersama Komnas Perlindungan anak untuk turut dalam roadshow edukasi *anti bullying dan sex education* di 21 sekolah atau 5.300 siswa/i yang ada di Jakarta dan Bekasi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu siswa/I Sekolah Dasar memahami tentang *anti bullying* serta *sex education*, sehingga dapat mengurangi kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia sehingga tercipta penerus generasi bangsa yang berkualitas.

Realization of distribution of funds for Jamkrindo's TJSL priority program in 2023 amounts to IDR8,152,840,155,- or 100.50% of the 2023 priority program Work Plan and Budget, with detailed activities as follows:

Pillar of Education

1. Examination, education and distribution of dental health packages to 5,300 elementary school students throughout Indonesia
   The background for selecting the education program, dental examination and distribution of dental health packages to 5,300 elementary school students in the 3T region of Indonesia, namely:
   a. The results of the 2018 Basic Health Research or Riskesdas stated that 93 percent of young children, namely in the 5-6 year age range, experienced cavities;
   b. This can affect the child's nutritional status because cavities make the child refuse to eat;
   c. Meanwhile, in terms of proper tooth brushing behavior, the results of 2018 Riskesdas show that only 2.8 percent of the Indonesian population brushes their teeth twice a day, namely morning and night, properly. This shows that education about brushing teeth must start early because it will become a habit into adulthood;

   • **Program Impact:** Jamkrindo collaborates with community health centers and universities with dental programs to carry out this activity. This activity has been provided to 5,300 elementary school students in 3T areas throughout Indonesia by involving Jamkrindo work units throughout Indonesia. It is hoped that this activity can foster the habit of maintaining clean and healthy teeth from an early age, so that Indonesian children have health from various aspects, including oral and dental health.

2. Socialization and Education on Mental Health Care to Prevent Bullying and Sexual Violence to 5,300 Elementary School Students in DKI Jakarta
   In order to welcome Jamkrindo's 53rd anniversary, we are holding a series of TJSL (Non PUMK) assistance activities in the priority areas of education; one of which is Anti-Bullying Education & Sex Education for 5,300 Elementary School Students in collaboration with the National Commission for Child Protection and Indonesian Early Childhood Education Institute.

   • **Impact:** Jamkrindo collaborated with the National Commission on Child Protection to take part in an anti-bullying and sex education educational roadshow in 21 schools or 5,300 students in Jakarta and Bekasi. The aim of this activity is that elementary school students understand anti-bullying and sex education, so that they can reduce cases of violence that occur in Indonesia so as to create a quality future generation for the nation.

Pemberian Bantuan 530 Kacamata Bagi Siswa/i Sekolah Dasar di Wilayah Indonesia Timur

Latar belakang pemilihan program Pemberian 530 Kacamata Gratis Bagi Siswa/I di wilayah 3T Indonesia, yaitu :

1. Wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau yang sering dikenal dengan sebutan Wilayah 3T adalah daerah yang letaknya paling terluar pada wilayah Indonesia. Wilayah 3T memiliki karakteristik yang pada dasarnya tidak akan terlepas dari ketertinggalan;
2. Wilayah 3T yang secara geografis memiliki kesulitan untuk dijangkau mengakibatkan ketidaksetaraan penerima layanan pendidikan pada usia sekolah nasional;
3. Bagi pelajar yang memiliki kekurangan pada kesehatan mata sangat sulit mengakses kaca mata selain harganya yang relatif mahal selain itu lokasi nya sulit dijangkau, sehingga permasalahan ini sering diabaikan. Sedangkan kesehatan mata sangat berpengaruh pada prestasi pada anak;

- **Dampak :** Kegiatan ini diberikan kepada 530 Siswa/I Sekolah Dasar di wilayah 3T di Seluruh Indonesia dengan melibatkan unit kerja wilayah Makassar dan sekitarnya. Program ini bertujuan untuk membantu siswa/I agar dapat meningkatkan kualitas belajar karena banyak kasus penurunan hasil belajar siswa karna salah satu faktornya karna gangguan penglihatan.

Renovasi Fasilitas Pendidikan Wilayah 3T

1. Bantuan Atap Halaman Latihan Pencak Silat
   PT Jaminan Kredit Indonesia berupaya dalam mendukung program prioritas TJSL BUMN tahun 2023 yang salah satunya fokus dalam bidang pendidikan. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan program tersebut salah satunya yaitu memberikan bantuan atap halaman latihan pencak silat di Kp. Haruman 1 RT 005/001 Desa Harumansari, Kadungora, Garut. Tujuan diberikannya bantuan tersebut yaitu untuk peningkatan fasilitas latihan pencak silat guna melestarikan seni budaya tradisional Pencak Silat.

2. Tanalino II
   Dalam program ini berkolaborasi dengan 23 perusahaan BUMN termasuk PT Jamkrindo di antaranya PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Perum LPPNPI, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Brantas Abipraya (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Perum Bulog, PT Danareksa (Perseroan), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Nindya Karya, PT Pelabuhan Indonesia, PT Pegadaian, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Taspen (Persero).

Provision of 530 glasses for elementary school students in Eastern Indonesia

The background to the selection of the program to provide 530 free glasses for students in the 3T region of Indonesia, namely:

1. Frontier, outermost and underdeveloped regions or what are often known as 3T Regions are the areas that are located in the outermost regions of Indonesia. The 3T regions are characterized with underdevelopment;
2. The 3T regions, which are is geographically difficult to reach, results in inequality in terms of receiving educational services at national school age;

3. For students who have eye problems, it is very difficult to access glasses. Apart from the relatively expensive price and difficult location, this problem is often ignored. Meanwhile, eye health greatly influences children's achievement;

- **Impact:** This activity was provided to 530 elementary school students in the 3T regions throughout Indonesia by involving work units in Makassar and surrounding areas. This program aims to help students improve the quality of learning because there are many cases of decreasing outcome in the student learning due to visual impairment.

Renovation of Education Facilities in 3T Regions

1. Assisstance for the Roofing of the Pencak Silat Training Yard
   PT Jaminan Kredit Indonesia strives to support TJSL priority programs in 2023; one of which focuses on education. One of the activities carried out to distribute this program is providing assistance with the roof of the Pencak Silat training yard in Kp. Haruman 1 RT 005/001 Harumansari Village, Kadungora, Garut. The aim of providing this assistance is to improve Pencak Silat training facilities in order to preserve the traditional art and culture of Pencak Silat.

2. Tanalino II
   This program collaborates with 23 state-owned companies including PT Jamkrindo, namely PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Perum LPPNPI, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Brantas Abipraya (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Perum Bulog, PT Danareksa (Perseroan), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Nindya Karya, PT Pelabuhan Indonesia, PT Pegadaian, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Taspen (Persero).

Pada program Tana Lino Lestari II, akan memberikan bantuan di wilayah Pulau Komodo, Labuan Bajo, NTT berupa :

a. Revitalisasi Sarana Pendidikan SDN Pulau Komodo;
b. Revitalisasi Jaringan Internet SDN Pulau Komodo;
c. Bantuan Alat Laboratorium SMPN Pulau Komodo;
d. Taman Tematik SDN Pulau Komodo;
e. Pembangunan Ruang Guru SDN Pulau Komodo;
f. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.

Pilar Lingkungan

1. Optimalisasi Kegiatan Bank Sampah
   a. Motor Sampah Roda 3 Lubuklinggau
      Berkaitan dengan telah dilakukan perjanjian kerja sama antara Jamkrindo dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam Jaminan Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Jasa *Surety Bond*) maka dalam menunjang kegiatan bisnis tersebut akan dilaksanakan pemberian bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Bantuan TJSL yang akan diberikan berupa penyediaan 2 unit motor sampah yang diberikan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Lingkungan Hidup. Bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah.

2. Konservasi Terumbu Karang
   a. Budidaya Tambak Garam Sumber Laut
      Kelompok Usaha Garam Rakyat "Sumber Laut" yang beralamat di Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki usaha garam yang masih minim fasilitas peralatan produksi garam, sehingga masih terdapat berbagai permasalahan dalam produksi.

      - **Dampak :** Program ini membantu masyarakat untuk dapat mendayagunakan potensi yang ada pada masyarakat sehingga dapat menghasilkan garam untuk kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengadaan Air Bersih

1. Talud Dukuh Gumukrejo
   Sebagai bentuk dukungan program prioritas pada pilar Lingkungan, PT Jaminan Kredit Indonesia ikut mendukung program pembangunan Talud Dukuh Gumukrejo yang berlokasi di Dukuh Gumukrejo RT 04/VI – RT05/VI Desa Giriroto, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali. Pembangunan talud ini untuk mendukung perekonomian di lingkungan Dukuh. Pembangunan talud di Dukuh Gumukrejo bertujuan untuk mencegah terjadinya erosi akibat kecepatan arus air yang deras sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Talud yang dibangun dengan ukuran L= 50 cm x 70 cm x PJ 90 m.

The Tana Lino Lestari II program will provide assistance in the Komodo Island, Labuan Bajo, East Nusa Tenggara in the form of:

a. Revitalization of Komodo Island Elementary School Educational Facilities;
b. Revitalization of the Internet Network for the Komodo Island Elementary School;
c. Assistance for the Komodo Island Middle School Laboratory Equipment;
d. Thematic Plant for the Komodo Island Elementary School;
e. Construction of Teacher's Room at the Komodo Island Elementary School;
f. Empowerment of Fishermen's Communities.

Pillar of Environment

1. Optimization of Waste Bank Activities
   a. Lubuklinggau three-wheeled trash motorbike
      In connection with the cooperation agreement between Jamkrindo and the Lubuk Linggau City Government in Guarantees for Surety Bond Services, to support these business activities, TJSL assistance will be provided. The TJSL assistance that will be provided is in the form of providing 2 units of waste motorbikes which will be given to the Lubuk Linggau City government through the Environmental Service. This assistance is provided with the aim of helping the community in handling and managing waste.

2. Coral Reef Conservation
   a. Cultivation of Salt Ponds "Sumber Laut"
      People's Salt Business Group "Sumber Laut" whose address is in Padelegan Village, Pademawu District, Pamekasan Regency is a community group that has salt businesses with minimum salt production equipment and facilities, so there are still various problems in production.

      - **Impact:** This program helps the community to utilize the potential that exists in the community so that it can produce salt for community needs and improve the community's economy.

Provision of Clean Water

1. Dukuh Gumukrejo Riprap
   As a form of support for priority programs in the pillar of Environment, PT Jaminan Kredit Indonesia supports the development program of Dukuh Gumukrejo Riprap located in Dukuh Gumukrejo RT 04/VI – RT05/VI Giriroto Village, Ngemplak District, Boyolali Regency. The construction of this riprap is to support the economy in the Dukuh area. The construction of the riprap in Dukuh Gumukrejo aims to prevent erosion due to the fast water currents so that it does not endanger the surrounding environment. The riprap was built with the width of 50 cm, height of 70 cm, and length of 90 cm.

2. Bantuan Sumur Bor "Sedekah Air Bersih"
Jamkrindo telah menyalurkan bantuan untuk pembangunan Sumur Bor untuk kampung nelayan di Tanjung Leidong, Labuhanratu Utara karena sarana air bersih tidak memadai. Dari bantuan tersebut harapannya dapat membantu Masyarakat dalam mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari serta menghindari Masyarakat dari berbagai penyakit yang bersumber dari air yang tidak bersih.

Pilar Ekonomi (Pengembangan UMK)

1. Pendampingan UMKM Naik Kelas
   a. Pameran Mitra Binaan Perayaan Natal Bersama KBUMN
   Dalam Rangka Perayaan Hari Natal bersama KBUMN, berkolaborasi dengan IFG dan Anak Perusahaan untuk menghadirkan mitra binaan pada rangkaian acara tersebut.

   Dalam kegiatan tersebut PT Jaminan Kredit Indonesia menghadirkan produk dari 2 UMKM mitra binaan. Keikutsertaan Mitra Binaan PT Jaminan Kredit Indonesia pada kegiatan pameran Hari Natal bersama KBUMN merupakan salah satu kegiatan Pembinaan UMK yang dilaksanakan oleh PT Jaminan Kredit Indonesia sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

   b. Pameran Mitra Binaan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum At-Taufiq
   Untuk mendukung Inklusi Keuangan Syariah, Jamkrindo turut berpartisipasi dalam Inklusi Keuangan Syariah di Ponpes Miftahul Ulum At-Taufiq.

   Dalam kegiatan tersebut PT Jaminan Kredit Indonesia menghadirkan produk dari 1 UMKM mitra binaan. Keikutsertaan Mitra Binaan PT Jaminan Kredit Indonesia pada kegiatan pameran UMKM di Ponpes Miftahul Ulum At-Taufiq merupakan salah satu kegiatan Pembinaan UMK yang dilaksanakan oleh PT Jaminan Kredit Indonesia sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

   c. Peningkatan Kapasitas Usaha Penyandang Disabilitas
   Jamkrindo yang telah bersinergi dengan Yayasan Visi Maha Karya sejak tahun 2021 dalam dukungan program Kaki Palsu kepada tuna daksa pada HUT Jamkrindo ke-51 dan ke-52 dan HUT Jamkrindo ke-53 akan kembali berkolaborasi untuk Program Bantuan Motor Roda 3 yang ditujukan untuk disabilitas. Harapannya bantuan tersebut dapat meningkatkan kemandirian dan perekonomian bagi penerima bantuan.

2. Well Drilling Assistance "Clean Water Assistance"
Jamkrindo has distributed aid for the construction of a drilling well for a fisherman village in Tanjung Leidong, Labuhanratu Utara because clean water facilities are inadequate. It is hoped that this assistance can help people access clean water for their daily needs and prevent people from various diseases that originate from unclean water.

Pillar of Economy (MSE Development)

3. Assistance for Upgrading MSMEs
   a. Partner Exhibition for Christmas Celebration with KBUMN
   In the spirit of Christmas Celebration with KBUMN and in collaboration with with IFG and Subsidiaries to present partners in this series of events.

   In this activity, PT Jaminan Kredit Indonesia presented products from 2 MSME partners. The participation of PT Jaminan Kredit Indonesia's Partners in the Christmas Day exhibition with KBUMN is one of the MSE Development activities carried out by PT Jaminan Kredit Indonesia in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister no. Per-05/MBU/04/2021 concerning SOEs Social and Environmental Responsibility Programs.

   b. Partner Exhibition at Miftahul Ulum At-Taufiq Islamic Boarding School
   To support Sharia Financial Inclusion, Jamkrindo participates in Sharia Financial Inclusion at the Miftahul Ulum At-Taufiq Islamic Boarding School.

   In this activity, PT Jaminan Kredit Indonesia presented products from 1 MSME partner. The participation of PT Jaminan Kredit Indonesia's Partner in the MSME exhibition activities at the Miftahul Ulum At-Taufiq Islamic Boarding School is one of the MSE Development activities carried out by PT Jaminan Kredit Indonesia in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister no. Per-05/MBU/04/2021 concerning SOEs Social and Environmental Responsibility Programs.

   c. Increase of Business Capacity of Persons with Disabilities
   Jamkrindo has been synergizing with Visi Maha Karya Foundation since 2021 in supporting the Prosthetic Leg program for the disabled at the 51st and 52nd Jamkrindo Anniversaries. In the 53rd Jamkrindo Anniversary, Jamkrindo will collaborate again with Visi Maha Karya Foundation for the Three-Wheeled Motorbike Assistance Program aimed at the disabled. It is hoped that this assistance can increase independence and the economy for the aid recipients

Pendanaan Usaha Mikro & Usaha Kecil (PUMK)

1. Penyaluran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK)
   Dana yang telah disalurkan Jamkrindo untuk Program PUMK di tahun 2023 sebesar Rp3.450.000.000,- atau 82,14% dari RKA penyaluran Pendanaan UMK Kolaborasi dengan BRI tahun 2023. Sesuai dengan arahan Kementerian BUMN yang tertuang pada pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. RIS-55/DSI.MBU.B/01/2023 tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023, pada tahun 2023 PT Jaminan Kredit Indonesia memiliki rencana penyaluran Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil sebesar 100% melalui kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI"). Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkan surat arahan dari Menteri BUMN Nomor S-721/MBU/11/2022 Tanggal 10 November 2022 ("S-721") Perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana disebutkan bahwa Menteri BUMN merekomendasikan BRI kepada BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas sebagai pengelola kerjasama Program PUMK.

Berikut Realisasi sampai dengan Desember 2023 Penyaluran Program PUMK PT Jaminan Kredit Indonesia :

Micro and Small Enterprise Funding (PUMK)

1. Distribution of Funds for the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK)
   The funds that Jamkrindo has distributed for the PUMK Program in 2023 amount to Rp3,450,000,000,- or 82.14% of the Work Plan and Budget for the distribution of Collaborative MSE Funding with BRI in 2023. In accordance with the direction of the Ministry of SOEs as stated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) no. RIS-55/DSI.MBU.B/01/2023 concerning Discussion of the 2023 Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Program, in 2023 PT Jaminan Kredit Indonesia has a plan to completely distribute Micro and Small Enterprise Funding through collaboration with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI"). This was reinforced by the issuance of a letter of direction from the Minister of BUMN no. S-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022 ("S-721") regarding Cooperation in Micro and Small Enterprise Funding Program which stated that the Minister of BUMN recommended BRI to BUMN and Companies with Minority State Ownership as managers of the PUMK Program collaboration.

The following is the realization up to December 2023 of the Distribution of the PUMK program by PT Jaminan Kredit Indonesia :

Program	RKA 2023 2023 Work Plan and Budget	Real TW IV 2023 Real Q4 2023	Capaian Realization
1	2	3	4=3:2
Penyaluran PUMK Mandiri Distribution of Independent PUMK	-	-	0,00%
Penyaluran PUMK Kolaborasi Distribution of Collaborative PUMK	4.200.000.000	3.450.000.000	82,14%
Total	**4.200.000.000**	**3.450.000.000**	**82,14%**

2. Kualitas Piutang

2. Quality of Receivables

Rincian Kualitas Piutang
Details of Quality of Receivables

NO	KATEGORI KOLEKTABILITAS COLLECTIBILITY CATEGORIES	JUMLAH AMOUNT
1	LANCAR CURRENT	2.614.390.117
2	KURANG LANCAR SUBSTANDARD	1.601.941.564
3	DIRAGUKAN DOUBTFUL	411.337.034
4	MACET BAD	7.854.349.716
5	BERMASALAH PROBLEMATIC	
JUMLAH TOTAL		**12.482.018.431**

Pada Tahun 2023, terdapat piutang macet sebesar Rp7.854.349.716. Sebagian besar piutang macet disebabkan karena sebagian besar Mitra Binaan masih dalam proses pemulihan usaha pasca pandemi COVID-19.

Terdapat piutang bermasalah sebesar Rp1.617.485.210,- Piutang bermasalah yang ada merupakan total piutang yang telah diupayakan penagihannya melalui *rescheduling* dan *reconditiong* namun belum dapat dipulihkan dari tahun 1998 hingga 2005. Piutang bermasalah didominasi oleh Mitra Binaan perorangan dengan jumlah 102 Mitra Binaan.

Pengawasan dan Publikasi Program TJSL

Sepanjang tahun 2023, Jamkrindo telah melaksanakan pengawasan dan publikasi atas program TJSL yang diselenggarakan sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/2022 Pasal 22 tentang Pengawasan dan Pelaporan, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/2021 Pasal 27 tentang Publikasi atas Pelaksanaan Program TJSL BUMN.

Penghargaan terkait TJSL

Di sepanjang tahun 2023, komitmen Perusahaan dalam melakukan kegiatan TJSL telah mendapat pengakuan dari pihak lain. Hal tersebut diwujudkan dalam berbagai penghargaan yang diterima Jamkrindo terkait program dan kegiatan TJSL Perusahaan, sebagai berikut:

In 2023, the amount of bad receivables was IDR7,854,349,716. Most of the bad receivables were caused by the fact that most of the Partners were still in the process of business recovery after the COVID-19 pandemic.

Meanhile, the amount of problematic receivables is IDR1,617,485,210.- The problematic receivables represent the total receivables for which efforts have been made to collect through rescheduling and reconditioning but have not been able to be recovered from 1998 to 2005. Problematic receivables are dominated by 102 individual Partners.

Supervision and Publication of the TJSL Program

Throughout 2023, Jamkrindo has carried out supervision and publication of the TJSL program in line with the Regulation of the Minister of BUMN no. PER-6/2022 Article 22 concerning Supervision and Reporting, as well as the Regulation of the Minister of BUMN no. PER-05/2021 Article 27 concerning Publication of TJSL Program Implementation.

TJSL-related Awards

Throughout 2023, the Company's commitment to carrying out TJSL activities has received recognition from other parties. This is manifested in various awards received by Jamkrindo in relation to the Company's TJSL programs and activities, as follows:

Nama Penghargaan Name od Awards	**Tanggal Penerimaan Penghargaan** Received Date	**Pihak yang Memberikan Penghargaan** Awarding Entity
Bintang CSR Indonesia Besar Bintang CSR at the Indonesia Best Social Responsibility Awards (BESAR)	25 Oktober 2023 October 25, 2023	La Tofi School of Social Responsibility


Jamkrindo
Jamkrindo

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG



7

Laporan Keuangan
Financial Report

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER/*DECEMBER* 2023

Kementerian BUMN

Jamkrindo
A member of IFG

PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA DAN ENTITAS ANAK

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Akhmad Purwakajaya
   Jabatan : Direktur Utama
   Alamat Kantor : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, 10610

2. Nama : Alia Nur Fitri
   Jabatan : Direktur Keuangan dan Investasi
   Alamat Kantor : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, 10610

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PT. JAMINAN KREDIT INDONESIA AND SUBSIDIARY

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022

We, the undersigned:

1. *Name* : Akhmad Purwakajaya
   Title : *President Director*
   Office Address : *Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, 10610*

2. *Name* : Alia Nur Fitri
   Title : *Finance, and Investment Director*
   Office Address : *Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, 10610*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary;*
2. *The consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or facts;*
4. *We are responsible for PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary internal control system.*

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 28 Maret/*March* 2024
Atas nama dan mewakili Direksi/*For and behalf of the Directors:*



Akhmad Purwakajaya
Direktur Utama /
President Director

Alia Nur Fitri
Direktur Keuangan dan Investasi /
Finance, and Investment, Director

Kementerian BUMN

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kepentingan Publik

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

Kementerian BUMN

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
28 Maret/*March* 2024

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0222

Jaminan Kredit Indonesia
00502/2.1025/AU.1/05/0222-4/1/III/2024

Kemenkeuan

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ASET				***ASSETS***
Kas dan kas di bank - bersih	4	185,130	236,997	*Cash and cash in banks - net*
Deposito wajib dan berjangka - bersih	5	7,233,120	5,451,788	*Statutory and time deposits - net*
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu - bersih	6	1,552,271	1,689,817	*Time deposits for certain purposes - net*
Efek-efek - bersih	7	14,745,121	11,981,785	*Marketable securities - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	8	2,737,976	3,474,500	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	9	582,178	242,025	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	10	224,895	166,807	*Investment income receivables - net*
Biaya dibayar dimuka		115,800	49,217	*Prepaid expenses*
Aset tetap - bersih	11	626,808	513,359	*Fixed assets - net*
Aset takberwujud - bersih		68,202	34,452	*Intangible assets - net*
Penjaminan ulang dibayar dimuka	12	936,226	663,699	*Prepaid re-guarantee*
Aset pengembalian	13	791,644	1,023,425	*Reimbursement assets*
Biaya akuisisi tangguhan	14	147,381	182,502	*Deferred acquisition cost*
Aset penjaminan ulang	15	354,324	428,727	*Re-guarantee assets*
Aset pajak tangguhan - bersih	20c	1,925,862	1,831,441	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain - bersih	16	4,282	39,026	*Other assets - net*
JUMLAH ASET		32,231,220	28,009,567	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Utang klaim	17	81,372	58,074	*Claim payables*
Utang penjaminan ulang	18	633,300	221,100	*Re-guarantee payables*
Akrual dan utang lain-lain	19	1,535,414	969,758	*Accruals and other payables*
Utang pajak	20a	129,408	441,221	*Taxes payables*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	21	15,211,466	12,204,280	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Pendapatan komisi ditangguhkan	22	159,158	122,636	*Deferred commission income*
Estimasi liabilitas klaim	23	358,504	366,887	*Estimated claim liabilities*
Imbal jasa *kafalah* ditangguhkan	24	686,139	715,196	*Unearned kafalah fees*
Liabilitas imbalan kerja	25	82,437	90,882	*Employee benefits liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		18,877,198	15,190,034	***TOTAL LIABILITIES***

Kementerian BUMN

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to equity holders of the parent entity***
Modal saham:				*Share capital:*
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp 1.365.160 (nilai penuh) per lembar saham				*Class A Dwiwarna - nominal amount Rp 1,365,160 (full amount) at par per share*
- Seri B - nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham				*Class B - nominal amount Rp 1,000,000 (full amount) at par per share*
Modal dasar:				*Authorised capital:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham				*Class A Dwiwarna - 1 share*
- Seri B - 30.000.000 saham				*Class B - 30,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				*Issued and fully paid:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham				*Class A Dwiwarna - 1 share*
- Seri B - 10.638.732 saham	26	10,638,733	10,638,733	*Class B - 10,638,732 shares*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja		(19,859)	(19,324)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		(265,002)	(323,044)	*Unrealised losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax*
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya		1,562,455	1,242,333	*Appropriated retained earnings*
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya		1,436,849	1,279,835	*Unappropriated retained earnings*
		13,353,176	12,818,533	
Kepentingan non-pengendali	27	846	1,000	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		13,354,022	12,819,533	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		32,231,220	28,009,567	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Kementerian BUMN

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
PENDAPATAN PENJAMINAN				***GUARANTEE INCOME***
Imbal jasa penjaminan bruto	28	6,738,700	5,641,788	*Gross guarantee fee income*
Imbal jasa *kafalah* bruto	29	408,035	503,297	*Gross kafalah fees*
(Penurunan)/kenaikan imbal jasa *kafalah* yang belum merupakan pendapatan	31	(24,212)	128,623	*(Decrease)/increase in unearned kafalah fees*
Premi penjaminan ulang	30	(767,795)	(997,898)	*Re-guarantee premiums*
Jumlah pendapatan penjaminan - bersih		6,354,728	5,275,810	***Total guarantee income - net***
BEBAN PENJAMINAN				***GUARANTEE EXPENSES***
Beban klaim bruto	32	5,957,023	3,237,332	*Gross claim expenses*
Klaim penjaminan ulang	34	(788,483)	(539,414)	*Re-guarantee claims*
Beban *ujrah*		15,386	39,045	*Ujrah expenses*
Biaya *kafalah* lainnya		762	1,068	*Other kafalah expenses*
(Penurunan)/kenaikan cadangan klaim	33	(529,220)	1,440,312	*(Decrease)/increase in claim reserves*
Pendapatan subrogasi - bersih	37	(1,059,417)	(835,372)	*Subrogation income - net*
Pendapatan *ujrah* penjaminan ulang		(18,719)	(33,738)	*Re-guarantee ujrah income*
Jumlah beban penjaminan - bersih		3,577,332	3,309,233	***Total guarantee expenses - net***
Pendapatan penjaminan bersih		2,777,396	1,966,577	***Net guarantee income***
Pendapatan komisi	35	92,651	98,984	*Commission income*
Beban komisi	36	(31,338)	(89,705)	*Commission expenses*
Pendapatan investasi - bersih	38	1,193,515	844,995	*Investment income - net*
Beban usaha	39	(2,255,338)	(1,206,253)	*Operating expenses*
Pendapatan lain-lain - bersih	40	15,099	61,671	*Other income - net*
Beban pajak final		(153,023)	(95,652)	*Final tax expenses*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1,638,962	1,580,617	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	20b	(202,113)	(300,460)	*Income tax expenses*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		1,436,849	1,280,157	***NET PROFIT FOR THE YEAR***

Kementerian BUMN

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in milions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	25	(670)	(1,030)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Efek pajak terkait	20c	135	227	*Related tax effect*
		(535)	(803)	
(Kerugian)/pendapatan yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(9,473)	5,640	*Unrealised (losses)/gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Pendapatan/(kerugian) yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		67,368	(166,643)	*Unrealised gain/(losses) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Efek pajak terkait	20c	157	9,131	*Related tax effect*
		67,525	(157,512)	
Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		57,517	(152,675)	*Other comprehensive income/ (loss) for the year, net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,494,366	1,127,482	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		1,437,013	1,279,835	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		(164)	322	*Non-controlling interest*
		1,436,849	1,280,157	
LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		1,494,520	1,127,174	*Owner of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali		(154)	308	*Non-controlling interest*
		1,494,366	1,127,482	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

Kementerian BUMN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak/ *Remeasurement of employee benefit liabilities, net of tax*	(Kerugian)/ keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ *Unrealised (losses)/gain on marketable securities on fair value through other comprehensive income, net of tax*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
					Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*				
Saldo 1 Januari 2022		10,638,733	(18,521)	(170,155)	861,844	1,521,955	12,833,856	692	12,834,548	***Balance as at 1 January 2022***
Cadangan umum		-	-	-	1,521,955	(1,521,955)	-	-	-	*General reserves*
Dividen	26	-	-	-	(1,141,466)	-	(1,141,466)	-	(1,141,466)	*Dividend*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	1,279,835	1,279,835	322	1,280,157	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:										*Other comprehensive income:*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-	-	(151,858)	-	-	(151,858)	(14)	(151,872)	*Fair value through other comprehensive income*
Penjualan atas surat berharga		-	-	(1,031)	-	-	(1,031)	-	(1,031)	*Sale on marketable securities*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja		-	(803)	-	-	-	(803)	-	(803)	*Remeasurement of post - employment benefits*
Saldo 31 Desember 2022		10,638,733	(19,324)	(323,044)	1,242,333	1,279,835	12,818,533	1,000	12,819,533	***Balance as at 31 December 2022***
Cadangan umum		-	-	-	1,279,835	(1,279,835)	-	-	-	*General reserves*
Dividen	26	-	-	-	(959,877)	-	(959,877)	-	(959,877)	*Dividend*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	1,437,013	1,437,013	(164)	1,436,849	*Net profit for the year*
Perubahan ekuitas Entitas Anak		-	-	-	164	(164)	-	-	-	*Adjustment to Subsidiary's equity*
Penghasilan komprehensif lain:										*Other comprehensive income:*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-	-	58,042	-	-	58,042	10	58,052	*Fair value through other comprehensive income*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja		-	(535)	-	-	-	(535)	-	(535)	*Remeasurement of post - employment benefits*
Saldo 31 Desember 2023		10,638,733	(19,859)	(265,002)	1,562,455	1,436,849	13,353,176	846	13,354,022	***Balance as at 31 December 2023***

Kementerian BUMN

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022*)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan imbal jasa penjaminan	11,111,588	6,661,110	*Receipt from guarantee fees*
Penerimaan dari mitra penjaminan ulang	515,596	474,047	*Receipt from re-guarantee partners*
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya	1,109,244	924,165	*Receipt from other operating activities*
Pembayaran premi penjaminan ulang	(628,122)	(938,258)	*Payment of re-guarantee premiums*
Pembayaran klaim	(5,933,725)	(2,992,011)	*Payment of claims*
Pembayaran beban usaha	(684,996)	(609,940)	*Payment of operating expenses*
Pembayaran kepada karyawan	(585,647)	(669,036)	*Payment to employee*
Pembayaran pajak penghasilan	(666,381)	(664,591)	*Payment of income tax*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	4,237,557	2,185,486	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan hasil investasi	1,135,360	621,152	*Receipt from investment income*
Penempatan investasi	(5,667,989)	(3,611,396)	*Purchase of investments*
Penjualan investasi	1,007,694	1,003,627	*Sale of investments*
Pembelian aset tetap dan aset takberwujud	(100,100)	(237,394)	*Acquisition of fixed assets and intangible assets*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(3,625,035)	(2,224,011)	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran sewa	(45,693)	-	*Lease payments*
Dividen	(959,877)	(1,141,466)	*Dividend*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1,005,570)	(1,141,466)	***Net cash flows used in financing activities***
Penurunan pada kas dan setara kas	(393,048)	(1,179,991)	*Decrease in cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	6,445,968	7,625,959	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	6,052,920	6,445,968	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			*Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:*
Kas dan kas di bank	185,130	236,997	*Cash and cash in banks*
Deposito wajib dan berjangka (dibawah tiga bulan)	5,071,657	5,451,788	*Statutory and time deposits (below 3 months)*
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	796,133	757,183	*Time deposits for certain purposes*
	6,052,920	6,445,968	

*) Disajikan Kembali, lihat Catatan 46

*) *Restated, refer to Note 46*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

Kementerian BUMN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

PT Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1981 dengan nama Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, yang sebelumnya merupakan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi ("LJKK") yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1981, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1985 selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018, Perum Sarana Pengembangan Usaha diubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, bentuk badan hukum Perum Jaminan Kredit Indonesia diubah perseroan terbatas bernama PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau PT Jamkrindo (Persero) berdasarkan Akta Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., No. 25 tanggal 24 Februari 2020. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 9 April 2020 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU.0028854.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 9 April 2020, Saham Seri B dari Pemerintah Republik Indonesia dialihkan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), sehingga bentuk badan hukum PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menjadi PT Jaminan Kredit Indonesia.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada 7 Oktober 2022, terdapat perubahan terakhir Anggaran Dasar perseroan terbatas dengan Akta Notaris Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.KN., No. 7 mengenai Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2022 melalui surat keputusan No. AHU-0075624.AH.01.02 tahun 2022.

Kantor pusat Grup terletak di Jalan Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, DKI Jakarta dan mempunyai 9 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 53 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan ("KUP") yang tersebar di seluruh Indonesia (tidak diaudit).

1. GENERAL INFORMATION

PT Jaminan Kredit Indonesia (the "Company") was established based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 51 Year 1981 under the name Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, previously named Lembaga Jaminan Kredit Koperasi ("LJKK") which is formed by 1970. Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 51 Year 1981, which is renewed by the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 27 Year 1985, here in after by the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 95 Year 2000 dated 7 November 2000, Perum Pengembangan Keuangan Koperasi was changed to Perum Sarana Pengembangan Usaha. Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 41 Year 2008, which was updated with Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 35 Year 2018, Perum Sarana Pengembangan Usaha was changed to Perum Jaminan Kredit Indonesia. Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 11 Year 2020, legal form of Perum Jaminan Kredit Indonesia change to limited liability company namely PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) or PT Jamkrindo (Persero) by Notarial Deed No. 25 by Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., dated 24 February 2020. Based on the Deed of Resolution of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia regarding change of Articles of Association No. 2 dated 9 April 2020 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU.0028854.AH.01.02. Year 2020 dated 9 April 2020, Series B Shares from the Government of Republic of Indonesia is transferred to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), which resulting in form of a legal entity of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) becoming PT Jaminan Kredit Indonesia.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest being on 7 October 2022, where there was an amendment to the Company's Articles of Association, notarised by Notarial Deed No. 7 by Bernadette Wirastuti Puntaraksma, M.KN., regarding The Circular Decision Statement of The Shareholders. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-0075624.AH.01.02 Year 2022 dated 19 October 2022.

The Group's head office located at Jalan Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, DKI Jakarta and have 9 Regional Offices, 1 Special Branch Office, 53 Branch Offices, and 16 Unit Service Offices ("KUP") which is spread over in all Indonesia (unaudited).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 07 tanggal 7 Oktober 2022, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah melakukan penjaminan kredit baik bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi ("UMKM"), Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. *GENERAL* *(continued)*

In accordance with the Deed of Decision Statement of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 07 dated 7 October 2022, the Company's main business activities are providing credit guarantees for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives ("UMKM"), Guarantees for State-Owned Enterprises, Guarantee for Warehouse Receipt Systems, and other guarantees as well as optimizing the utilization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance.

As at 31 December 2023 and 2022, the composition of the Board of Commissioners, Directors, and Audit Committee is as follows:

	2023	2022	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama / Komisaris Independen	Krisna Wijaya	Krisna Wijaya	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Hernita Alius	Hernita Alius	*Independent Commissioner*
Komisaris	Desty Arlaini	Desty Arlaini	*Commissioner*
Komisaris Independen	Ari Wahyuni	Ari Wahyuni	*Independent Commissioner*
Komisaris	Muhammad Muchlas Rowi	Muhammad Muchlas Rowi	*Commissioner*
Komisaris	Angger P Yuwono [1]	-	*Commissioner*
Direksi			***Directors***
Direktur Utama	Akhmad Purwakajaya [1]	Hendro Padmono [3]	*President Director*
Direktur Bisnis Penjaminan	Henry Panjaitan	Henry Panjaitan	*Business Guarantee Director*
Direktur Operasional dan Jaringan	Suwarsito [1]	Kadar Wisnuwarman [3]	*Operational and Network Director*
Direktur Kelembagaan dan Layanan	Abdul Bari	Abdul Bari	*Director of Institutional and Service*
Direktur Manajemen SDM, Umum dan Manajemen Risiko	Achmad Ivan Sutrisna Soeparno	Achmad Ivan Sutrisna Soeparno	*Director of SDM Management, General Affair and Risk Management*
Direktur Keuangan dan Investasi	Alia Nur Fitri [1]	Suwarsito	*Director of Finance and Investation*

	2023	2022	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Hernita Alius	Hernita Alius	*Chairman*
Anggota	Desty Arlaini	Desty Arlaini	*Member*
Anggota	Angger P Yuwono [2]	-	*Member*
Anggota	Sukamdani Eko Basuki	Sukamdani Eko Basuki	*Member*
Anggota	Safari Mirza	Safari Mirza	*Member*

[1] diangkat tanggal 31 Juli 2023
[2] diangkat tanggal 1 Agustus 2023
[3] diberhentikan dengan hormat tanggal 31 Juli 2023

[1] appointed on 31 July 2023
[2] appointed on 1 August 2023
[3] dismissed with honor on 31 July 2023

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah karyawan Grup dan Entitas Anak masing-masing adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

As at 31 December 2023 and 2022, the number of employees of the Group and Subsidiary are as follows (unaudited):

	2023	2022	
Grup	1,075	1,025	*The Group*
Entitas Anak	315	281	*Subsidiary*
	1,390	1,306	

Kementerian BUMN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Entitas Anak yang dikonsolidasikan

Berikut ini adalah Entitas Anak yang dikonsolidasi oleh Grup karena mempunyai kepemilikan mayoritas atau hak untuk mengendalikan operasi:

***1. GENERAL** (continued)*

Consolidated Subsidiary

The following is the list of the Group's consolidated Subsidiary in which it has majority ownership or the right to control the operation:

Entitas Anak/ *Name of Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Type of business*	Dimulainya kegiatan komersial/ *Commencement of commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage* 31 Desember/ *December* 2023	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage* 31 Desember/ *December* 2022	Jumlah aset (Sebelum eliminasi)/ *Total assets (Before eliminations)* 31 Desember/ *December* 2023	Jumlah aset (Sebelum eliminasi)/ *Total assets (Before eliminations)* 31 Desember/ *December* 2022
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jakarta	Penjaminan syariah/ *Sharia guarantee*	24 September 2014	99.929%	99.929%	2,452,095	2,449,452

Entitas induk langsung dan entitas induk utama Grup adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

The Group's immediate and ultimate parent is PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), incorporated and domiciled in Indonesia.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak (bersama-sama disebut "Grup") disusun dan diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 28 Maret 2024.

Kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan harga perolehan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dimana diukur pada nilai wajar. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan kas di bank mencakup kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements of the Company and Subsidiary (together called "Group") were prepared and authorised by the Directors to be issued on 28 March 2024.

The material accounting policies adopted in the preparation of these consolidated financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("IAI") and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI.

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention except for financial assets measured at fair value through other comprehensive income and at fair value through profit or loss which have been measured at fair value. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flow on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of statement of cash flow, cash and cash in banks, time deposits with original maturities of three months or less, which are not restricted and not pledged as collaterals for borrowings.

Kementerian BUMN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Grup beroperasi (mata uang fungsional). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Direksi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula (lihat Catatan 3).

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Berikut ini adalah amendemen standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya; dan
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.

Implementasi dari amendemen standar-standar tersebut di atas tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements *(continued)*

Figures in the consolidated financial statements are expressed in million Rupiah, unless otherwise stated.

Items included in the consolidated financial statements of the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the Group operates (the functional currency). The functional currency of the Group is Rupiah.

The preparation of the consolidated financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based on the Director's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates (refer to Note 3).

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretation of financial accounting standards

The followings are amendments of financial accounting standards become effective starting 1 January 2023:

- *Amendment of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";*
- *Amendment of SFAS 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and its explanations; and*
- *Amendment of SFAS 46,"Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS No.12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and*
- *Amendment of SFAS 16, "Fixed Assets" regarding proceeds before the intended use.*

The implementation of the above amendment of standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for the current year or prior financial years.

Kementerian Keuangan

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak dimana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan suatu entitas ketika Perusahaan terekspos terhadap, atau memiliki hak atas, pengembalian variabel dari keterlibatannya terhadap entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas Anak dikonsolidasikan sejak tanggal pengendalian beralih secara efektif kepada Perusahaan dan tidak lagi dikonsolidasi sejak Perusahaan tidak lagi memiliki kontrol.

Kepentingan non-pengendali adalah ekuitas Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk.

Kepentingan non-pengendali atas laba bersih Entitas Anak disajikan sebagai pengurang dari laba bersih konsolidasian untuk menyajikan jumlah laba yang menjadi hak Perusahaan. Kepentingan non-pengendali atas aset bersih disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Transaksi, saldo, dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi Entitas Anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Perusahaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Entitas Anak, kecuali bila dinyatakan lain.

Perusahaan memiliki pengendalian dan kekuasaan terhadap *investees* yang mengelola investasi pada Kontrak Pengelolaan Dana ("KPD") sehingga investasi dan transaksi atas imbal hasil *investee* serta biaya yang ditimbul diakui oleh Perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan instrumen keuangan, pendapatan dan beban terkait pengelolaan dana tersebut.

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

i. Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"), aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

c. Principle of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its Subsidiary where the Company has control. The Company controls an entity when the Company is exposed to, or has right to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

The Subsidiary is consolidated from the date on which effective control is transferred to the Company and no longer consolidated from the date when the Company is no longer able to control.

Non-controlling interest represents the equity in a Subsidiary not attributable directly or indirectly to the parent.

Non-controlling interest in the net income of subsidiaries is presented as a deduction of consolidated net income in order to present the Company's income. Non-controlling interest in net assets is presented as part of equity. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Intercompany transactions, balances, and unrealised gains on transactions between the Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. Accounting policies of Subsidiary have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Subsidiary, unless otherwise stated.

The Company has control and power over investees who manage investments in Fund Management Contracts ("KPD") so that investments and transactions regarding investee returns and costs incurred are recognised by the Company as a whole in accordance with the financial instruments, income and expenses related to the management of these funds.

d. Financial assets and financial liabilities

i. Financial assets

The Group classifies its financial assets in categories financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL"), financial assets measured at amortized cost, and financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Kementerian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Grup berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut, serta berdasarkan dengan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

d. Financial assets and financial liabilities *(continued)*

The following table presents the classification of the Group's financial instruments based on the characteristics of these financial instruments, as well as in accordance with SFAS 71 "Financial Instruments".

Kategori yang diidentifikasikan pada PSAK 71/ *Category as defined by SFAS 71*		**Golongan (ditentukan oleh Grup)/ *Classes (as determined by the Group)***	**Sub-golongan/ *Sub-classes***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")*	Efek-efek/*Marketable securities*	Obligasi/*Bonds*
			Rekasadana/*Mutual funds*
			Efek beragun aset/*Asset-backed securities*
	Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	Kas dan kas di bank/*Cash and cash in banks*	
		Efek-efek/*Marketable securities*	Obligasi/*Bonds*
			Deposito wajib dan berjangka/*Statutory and time deposits*
			Deposito berjangka untuk tujuan tertentu/ *Time deposits for certain purposes*
		Piutang imbal jasa penjaminan/*Guarantee fee receivables*	
		Piutang penjaminan ulang/*Re-guarantee receivables*	
		Piutang hasil investasi/*Investment income receivables*	
		Aset lain-lain/*Other assets*	Uang jaminan/*Security deposits*
			Lain-lain - bersih/*Others - net*
	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI")*	Efek-efek/*Marketable securities*	Obligasi/*Bonds*
			Saham/*Shares*

i. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

(a) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan tersebut masuk ke dalam klasifikasian yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

i. Financial assets

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how Groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

(a) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets are measured at fair value through profit or loss except business model test and contractual cash flow test show that financial assets are included in the classification that are measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

Kopi Tercap an BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

(a) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba/rugi konsolidasian dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain" dan "Pendapatan investasi - bersih". Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam Grup diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebagai "Pendapatan bunga".

(b) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

(c) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

d. Financial assets and financial liabilities *(continued)*

i. Financial assets *(continued)*

(a) Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Financial instruments classified into this category are recognised at fair value at initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the consolidated statement of profit or loss.

Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial instruments are recognised in the consolidated statement of profit or loss and are recorded as "Unrealised gain/(losses) on financial assets at fair value through other comprehensive income" and "Investment income - net". Interest income from financial instruments in the Group measured at fair value through profit or loss is recorded as "Interest income".

(b) Financial assets are measured at amortized cost

Financial assets are measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

a. the financial assets is held within a business model whose objective is to hold the financial asset to collect contractual cash flows; and

b. its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

(c) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

Financial instruments measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

a. financial assets are managed in a business model whose objectives will be met by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and

Kementerian BUMN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

(c) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (lanjutan)

b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold-to-collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

Saat pengakuan awal, entitas dapat membuat pilihan yang tak terbatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan selanjutnya pada nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup. Pernyataan ini dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan maupun imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

d. Financial assets and financial liabilities *(continued)*

i. Financial assets *(continued)*

(c) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (continued)

Financial instruments measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met: (continued)

b. contractual requirements of financial assets meet the SPPI criteria.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Assets may be sold out of hold-to-collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Unrealised gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces accounting mismatch.

At initial recognition, an entity may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value of an investment in an equity instrument within the scope. This statement and is neither held for trading nor contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination.

Kepentingan BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Grup mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Grup atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Grup. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Grup menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat *desk* yang lebih *granular* (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Financial assets and financial liabilities *(continued)*

i. Financial assets *(continued)*

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial assets on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Group considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Group considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Early redemption and extension terms;*
- *Terms that limit the Group's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Group. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where Groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Group assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates/objectives within a business line, at a product business line or more granular desk level (i.e. subportfolios or sub-business lines).

Kemenkeuan RI

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Grup dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Grup untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

d. Financial assets and financial liabilities *(continued)*

i. Financial assets *(continued)*

Business model assessment *(continued)*

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to management;*
- *the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Group reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Group did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

The Group can reclassified all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

ii. Financial liabilities

The Group classified its financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortized cost.

Rekonfirmasi

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi, diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iii. **Pengukuran awal**

Pengakuan Grup menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian transaksi untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

iv. Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Grup melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

v. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hak yang berkekuatan hukum harus tidak bersifat kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

d. Financial assets and financial liabilities *(continued)*

Business model assessment *(continued)*

ii. Financial liabilities *(continued)*

Financial liabilities measured at amortized costs

Financial liabilities measured at amortized cost are initially recognised at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Group measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

iii. Initial recognition

The Group uses trade date accounting for regular contracts when recording financial assets transactions.

iv. Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Group evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

v. Off-setting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis or realise the assets and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable rights must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

Kepentingan BPIN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

vi. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri, badan pengawas, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar yang aktif ditentukan berdasarkan kuotasi pasar aktif dari sumber yang dapat dipercaya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kuotasi pasar aktif ini termasuk yang berasal dari *Interdealer Market Association* ("IDMA"), Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), atau harga kuotasi broker untuk obligasi, harga saham dari indeks harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk saham, dan nilai aset bersih untuk reksadana dan *exchange traded funds*.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar, estimasi yang wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar terkini instrumen keuangan lain yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama atau dihitung berdasarkan estimasi arus kas terhadap aset bersih dari instrumen keuangan tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Financial assets and financial liabilities *(continued)*

Business model assessment *(continued)*

vi. Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at the date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry Group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid offer spread and there are few recent transactions.

Fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the consolidated statement of financial position date from credible sources. This includes IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices, IBPA's (Indonesia Bond Pricing Agency) quoted price or broker's quoted price for bonds, shares price from shares prices indexes at Indonesia Stock Exchange for shares and net assets value for mutual funds and exchange traded funds.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments.

Komisaris Utama

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

vi. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bukti terbaik dari nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksinya (nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima), kecuali nilai wajar dari instrumen tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan transaksi untuk instrumen yang sama di pasar terkini yang dapat diobservasi (yaitu yang tanpa modifikasi atau *repackaging*) atau berdasarkan teknik penilaian dimana variabelnya hanya data dari pasar yang dapat diobservasi.

vii. Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") dengan menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis perkiraan masa depan.

Perusahaan menilai dengan basis perkiraan masa depan kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur aset keuangan dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi dan dapat didukung, yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Financial assets and financial liabilities** (continued)*

***Business model assessment** (continued)*

***vi. Determination of fair value** (continued)*

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair value are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using available inputs at the dates of the consolidated statement of financial position.

The best evidence of fair value at initial recognition is the transaction price (the fair value of the consideration given or received), unless the fair value of that instrument is proved by comparison with other observable current market transactions for the same instrument (that is, without modification or repackaging) or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets.

vii. Impairment of financial assets

The Company applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss ("ECL") using a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis.

The Company assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition. At each reporting date, the Company assesses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial assets based on reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future macroeconomic factors, and that is indicative of credit risk having significantly increased since initial recognition.

Lihat Terjemahan Bisa

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Kas dan kas di bank

Kas dan bank mencakup kas dan kas di bank, yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

f. Deposito wajib dan berjangka

Deposito wajib dan berjangka mencakup penempatan dana Grup ke suatu lembaga keuangan. Deposito wajib dan deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal.

g. Investasi

Efek-efek

Efek-efek terdiri dari saham, obligasi, reksadana dan efek beragun aset. Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi klasifikasi aset keuangan.

Investasi pada sukuk

Investasi sukuk diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Grup berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan diamortisasi disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

e. Cash and cash in banks

Cash and banks include cash and cash in banks, which are not restricted and pledged as collateral for any borrowing.

f. Statutory and time deposits

Statutory and time deposits include the placement of Group funds in a financial institution. Statutory deposits and time deposits are stated at nominal value.

g. Investments

Marketable securities

Marketable securities consist of shares, bonds, mutual funds and asset-backed securities. They are classified as financial assets at fair value through profit or loss, financial assets are measured at amortized cost, fair value through profit and loss and fair value through other comprehensive income. Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets classification.

Investment in sukuk

Investment in sukuk are classified based on business model defined by the Group in accordance with SFAS 110 on "Accounting for Sukuk" as follows:

1. *At amortised cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*
2. *At fair value through profit or loss securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year consolidated profit or loss.*
3. *At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in current year consolidated other comprehensive income.*

Kemenkeuan RI

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Kontrak jaminan keuangan

Grup menerapkan kontrak jaminan keuangan. Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

Imbal jasa penjaminan dan pendapatan ditangguhkan

Imbal jasa penjaminan diakui ketika terbitnya Sertifikat Penjaminan ("SP") dan ulang tahun akad/ realisasi kredit/ pembiayaan dengan mempertimbangkan mekanisme pembayaran imbal jasa penjaminan oleh penerima jaminan.

Imbal jasa penjaminan diakui sebesar pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan ("SP").

Pendapatan ditangguhkan merupakan bagian dari imbal jasa penjaminan yang berkaitan dengan persyaratan belum berakhirnya cakupan penjaminan. Pendapatan ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan ("SP").

Pendapatan ditangguhkan merupakan imbal penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari terjamin kepada Grup yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Piutang imbal jasa penjaminan disajikan secara neto setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Pendapatan imbal jasa penjaminan ditangguhkan disajikan sebesar sisa imbal jasa penjaminan pada tanggal laporan yang belum diamortisasi sebagai pendapatan sampai dengan masa penjaminan.

Premi penjaminan ulang dan penjaminan ulang dibayar di muka

Premi penjaminan ulang merupakan beban atas premi yang dibayarkan kepada mitra penjaminan ulang guna mengalihkan risiko klaim. Besaran premi penjaminan ulang yang menjadi hak mitra penjaminan ulang ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

h. Financial guarantee contract

The Group implement financial guarantee contract. Financial guarantee contract is contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.

Guarantee fee income and deferred income

Guarantee fee income is recognised when the Guarantee Certificate ("SP") is issued and the anniversary of the contract/ realisation of credit/ financing by considering the payment mechanism for guarantee services by the recipient of the guarantee.

Guarantee fee income is recognised amounted deferred revenue and amortized over the period upon inception of Guarantee Certificate ("SP").

Deferred income represents portion of the guarantee fee income relating to the unexpired terms of coverage guarantee. Deferred income will be recognised as income during the remaining period of guarantee and allocated based on the issuance month of Guarantee Certificate ("SP").

Deferred guarantee is a guarantee fee income for current year and previous years from the guaranteed to the Group which will become income in the coming years.

Receivables from guarantee services are presented on a net basis after deducting the allowance for impairment losses. Income from deferred guarantee services is presented at the remaining guarantee fees at the reporting date which has not been amortized as income up to the guarantee period.

Re-guarantee premiums and prepaid re-guarantee

Re-guarantee premiums are premium expenses paid to re-guarantee company to transfer the claim risk. Amount of re-guarantee premium is defined based on type of product guarantee.

Kementerian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Kontrak jaminan keuangan (lanjutan)

Beban klaim

Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi konsolidasian menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim penjaminan ulang, dan kenaikan/penurunan cadangan klaim.

Liabilitas kontrak jaminan keuangan

Kontrak jaminan keuangan mensyaratkan Grup untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti penerima jaminan atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

Cadangan klaim atas kontrak penjaminan keuangan merupakan estimasi klaim atas kontrak penjaminan keuangan yang akan menjadi tanggungan Grup, yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal laporan. Kontrak jaminan keuangan selanjutnya diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

i. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan; dan
ii. jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui.

Grup disyaratkan untuk melakukan pembayaran hanya pada peristiwa gagal bayar dengan debitur/terjamin sesuai dengan persyaratan instrumen yang dijamin.

Kerugian ekspektasian atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai aset pengembalian dan diukur secara sistematik sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara jumlah saldo kerugian ekspektasian - bruto dan jumlah saldo kerugian ekspektasian - bersih.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

h. Financial guarantee contract *(continued)*

Claim expenses

Claims are recognised as expenses when incurred. Re-guarantee claims received from re-guarantee companies are recognised as deduction from claim expenses in the same period as the recognition of claim expenses. Subrogation rights are recognised as deduction from claim expenses upon realisation.

Claim expenses in the consolidated statement of profit or loss represent gross claims, re-guarantee claims and increase/decrease in claim reserves.

Liabilities for financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts require the Group to make certain payments to reimburse the recipient for losses incurred because certain debtors fail to make payments when due in accordance with the original terms or the modified terms of a debt instrument.

Claims reserve on financial guarantee contracts are estimated claims on financial guarantee contracts that will be borne by the Group, the amount of which is recognised and recorded at the report date. Financial guarantees are subsequently measured at the higher of:

i. the amount of the loss allowance determined; and
ii. the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised.

The Group is required to make payments only in the event of default with the debtor/guaranteed in accordance with the terms of the guaranteed instrument.

Expected loss for risks that have been transferred to reguarantor are recognised as reimbursement assets and are measured systematically according to the pattern of claim reserve measurement based on the variance between the total expected loss - gross and the total expected loss - net.

Kementerian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Kontrak jaminan keuangan (lanjutan)

Liabilitas kontrak jaminan keuangan (lanjutan)

Jangka waktu periode estimasi cadangan klaim atas kontrak penjaminan adalah periode kontraktual maksimum dimana Grup memiliki kewajiban kontraktual kini untuk melakukan penjaminan.

Grup telah membentuk cadangan klaim sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak penjaminan. Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71, yang mensyaratkan kerugian ekspektasian sepanjang umur periode kontrak penjaminan diakui sejak pengakuan awal.

Grup telah mengimplementasikan metode perhitungan statistik dengan menggunakan persamaan regresi untuk melihat ketertarikan variabel makroekonomi dengan tingkat pertumbuhan klaim yang terjadi pada Grup selama masa periode observasi. Grup menambahkan elemen *Forward Looking* yang merupakan hasil regresi dan model peramalan, dari variabel dependen (PC) dan independen (variabel makroekonomi).

i. Piutang penjaminan ulang

Piutang penjaminan ulang merupakan piutang atas pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra penjaminan ulang.

j. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset tetap

Berdasarkan PSAK 16, Grup memilih menggunakan metode biaya.

Aset tetap diukur menggunakan model harga perolehan. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya akuisisi meliputi semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset tersebut.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

h. Financial guarantee contract *(continued)*

Liabilities for financial guarantee contracts (continued)

The estimated period of the reserve for claims under the guarantee contract is the maximum contractual period during which the Group has a current contractual obligation to provide guarantees.

The Group has established a claim reserve in accordance with SFAS 71 related to guarantee contracts. From 1 January 2020, the Group applies the simplified approach permitted by SFAS 71, which requires expected lifetime losses of guarantee contract period to be recognised from initial recognition.

The Group has implemented a statistical calculation method using a regression equation to see the interest of macroeconomic variables with the growth rate of claims that occurred in the Group during the observation period. The Group adds Forward Looking element that is the result of regression and forecasting models, from the dependent (PC) and independent variables (macroeconomic variable).

i. Re-guarantee receivables

Re-guarantee receivables represent receivables for the claim payment to the recipient of the guarantee which is the responsibility of the re-guarantee partners.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods of benefit using straight line method.

k. Fixed assets

Under SFAS 16, the Group has chosen the cost model.

Fixed asset measured using cost model. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Acquisition cost covers expenditures that is directly attributable to the acquisitions of the assets.

Kementerian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Aset tetap didepresiasi menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap tersebut sebagai berikut:

Jenis aset	Masa manfaat (tahun)/ *Useful life (year)*	Penyusutan per tahun (%)/ *Depreciation per year (%)*	*Asset type*
Bangunan gedung	30	3.33	*Buildings*
Kendaraan bermotor	5	20	*Motor Vehicle*
Inventaris	2-10	50-10	*Equipment*

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian ditahun yang sama pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan.

Apabila aset tetap dihentikan penggunaannya atau dijual, harga perolehan dan akumulasi depresiasi yang terkait dengan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai.

Aset dalam penyelesaian ("ADP") merupakan akumulasi biaya konstruksi bangunan, biaya material, dan biaya lainnya dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Beban renovasi gedung sewa, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

k. Fixed assets *(continued)*

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced part is derecognised. Repairs and maintenance costs are charged to the consolidated profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Fixed assets are depreciated using the straight line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Repair and maintenance expenses are charged to the consolidated profit or loss in the year which they are incurred. Expenditure which extends the useful lives of the assets or provides further economic benefits are capitalised and depreciated.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and any resulting gains or losses are recognised in the consolidated profit or loss.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined based on the higher of net selling price or value in use.

Assets in progress ("ADP") is an accumulated costs of the construction of buildings, material costs and other costs are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Renovation expense of rental building, amortized as per useful life.

Kemenkeuan RUM

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari aset tak berwujud yang berasal dari piranti lunak yang dimiliki Grup. Aset takberwujud diakui jika Grup kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dari aset tak berwujud tersebut dan biaya aset takberwujud tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus dengan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 (empat) tahun.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

m. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunkan aset.

Aset hak-guna kemudian didepresiasikan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

I. Intangible assets

Intangible assets consist of intangible asset from the Group's software. Intangible assets are recognised if the Group have high possibility to get economical benefits in the future from those intangible assets and the cost could be measured reliably.

Intangible assets are recorded based on acquisition cost deducted by accumulated amortization and impairment if there's any impairment. Intangible assets are amortized based on the estimated useful life. Group estimated the value that can be recovered from intangible assets. If value of intangible assets exceed the recovered estimated value, then the amount that recorded in the asset should be lowered at the recoverable estimated value.

Intangible assets are amortized using straight line method with an estimated economic useful life for 4 (four) years.

Costs associated with maintenance of computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets.

Intangible assets are derecognised when the assets are released or have no future economic benefit. The difference between carrying amount of the asset and net value of its disposal is recognised in the consolidated profit or loss.

m. Leases

The determination of whether an agreement constitutes, or contains, a lease is made based on the substance of the agreement itself and an assessment of whether fulfillment of the agreement depends on the use of a particular asset or assets, and whether the agreement provides the right to use the asset.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using straight line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Kementerian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian;
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, dan;
  1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
  2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Leases *(continued)*

The Group as a lessee

At the inception date of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for short-term lease.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use;*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined, and;*
  1. *The Group has the right to operate the asset; and*
  2. *The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

At the lease commencement date, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liabilities. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liabilities adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Lease liabilities are initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate.

Dokumen ini merupakan milik Bursa Efek Indonesia

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "aset tetap - bersih" dan liabilitas sewa sebagian dari "akrual dan utang lain-lain" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

Lease payments included in the measurement of the lease liabilities comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to the profit or loss over the lease period in order to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "fixed assets - net" and lease liabilities as part of "accruals and other payables" in the consolidated statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Short-term leases

The Group has not recognised right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the leases payments associated with these leases as an expense on a straight line basis over the lease term.

Kementerian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga efektif Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan kemungkinan penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai tersebut. Nilai aset yang dapat diperoleh kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau harga jual neto, mana yang lebih tinggi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

Lease modification

The Group account for a lease modification as a separate lease if:

- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *remeasure and allocate the consideration in the modified contract;*
- *determine the lease term of the modified lease;*
- *remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's effective interest rate at the effective date of the modification;*
- *decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

n. Impairment of non-financial assets

The Group examines whether there is any indication of impairment of the non-financial assets on the consolidated statement of financial position date and the possible adjustments to the recoverable value if there are circumstances that indicate such impairment. The value of assets that can be recovered is calculated based on the value in use or net selling price, whichever is higher.

Kemenkeuan RUN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Di lain pihak, pembalikan penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan/(pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban/(pendapatan) pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

o. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Akumulasi pajak yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan waktu yang masih dapat dimanfaatkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Impairment of non-financial assets *(continued)*

Impairment loss is recognised if the carrying amount of the asset exceeds its recoverable value. On the other hand, a reversal of impairment is recognised when there is an indication that the impairment is no longer the case. Impairment/(recovery) on the value of the asset is recognised as an expense/(income) in the current year consolidated profit or loss.

o. Taxation

Tax expenses comprise of current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates the implementation of prevailing tax regulations especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Where appropriate management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

The accumulated tax that can be compensated is recognised as a deferred tax assets to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which the tax losses can still be utilised.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the timing differences can be utilised.

Komersial dan UMK

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Direksi juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

p. Utang klaim

Utang klaim merupakan kewajiban Grup kepada pemberi pinjaman yang pinjamannya dijamin oleh Grup. Utang klaim yang tercatat merupakan pengajuan klaim yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar oleh Grup. Utang klaim dinyatakan sebesar baki debet saat timbulnya hak klaim dikalikan dengan persentase penjaminan.

Beban klaim dicatat pada saat klaim telah disetujui oleh Komite Klaim. Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

q. Akad penjaminan syariah

Akad yang digunakan dalam penjaminan syariah adalah akad *kafalah*.

Imbal jasa *kafalah* (IJK)

Imbal jasa *kafalah* dari terjamin dicatat sebesar nilai bersih, setelah diskonto, sesuai dengan ketentuan pada kontrak.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

o. Taxation *(continued)*

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities related to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Correction to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined. The Directors provide provision for future tax liability at the amount that will be payable to the tax office on probable tax exposure, based on assessment as at the date of statement of financial position. Assumption and estimation used in the provisioning calculation may involve element of uncertainty.

p. Claim payables

Claim payables represents liability of the Group to the lender which loan are guaranteed by the Group. Claim payables are claims that have been processed and approved but not yet paid by the Group. Claim payables is stated at the outstanding balance when the right to claim arises multiplied by the guarantee percentage.

Claim expenses is recorded when the claim has been approved by the Claim Committee. Changes in the amount of claim payables, as a result of further review and the difference between the amount of the claim debt and the claim paid, are recognised in the statement of profit or loss in the year of the change.

q. Sharia guarantee contract

The contract used for sharia guarantee contract is kafalah contract.

Kafalah fees

Kafalah fees from guarantee are accounted for, net of any discounts, in accordance with the terms of contracts.

Kementerian Keuangan

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

Imbal jasa *kafalah* (IJK) (lanjutan)

IJK ditangguhkan merupakan bagian dari IJK yang berkaitan dengan persyaratan belum berakhirnya cakupan penjaminan.

Pembentukan imbal jasa *kafalah* ditangguhkan dihitung berdasarkan IJK neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan sertifikat *kafalah* berakhir (proporsional harian).

Kenaikan/(penurunan) atas imbal jasa *kafalah* yang belum merupakan pendapatan adalah selisih antara IJK belum menjadi hak periode berjalan dan periode lalu.

Penyajian imbal jasa *kafalah* dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah imbal jasa bruto.

Pendapatan *ujrah* penjaminan ulang

Pendapatan *ujrah* penjaminan ulang merupakan *ujrah* yang diterima dari mitra penjaminan ulang dengan persentase tertentu dari jumlah premi yang dibayar ke mitra penjaminan ulang.

Ujrah penjaminan ulang dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu penjaminan.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atau terjadi klaim atas pembiayaan yang dijaminkan, jumlah pendapatan imbalan jasa *kafalah* dan pendapatan *ujrah* penjaminan ulang yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan jasa administrasi *kafalah*

Pendapatan jasa administrasi *kafalah* diakui seluruhnya saat sertifikat *kafalah* ("SK") diterbitkan.

Beban *ujrah*

Ujrah diberikan kepada agen dan penerima jaminan sehubungan dengan penutupan pertanggungan. Beban *ujrah* besarnya dinyatakan sebagai persentase tertentu dari IJK. Beban *ujrah* dicatat sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

q. Sharia guarantee contract *(continued)*

Kafalah fees (continued)

Unearned kafalah fees represent portion of the kafalah fees written relating to the unexpired terms of coverage guarantee.

Unearned kafalah fees are determined and calculated based on net kafalah fees in proportion to the number of days until the kafalah certificate expires (daily proportional).

Increase/(decrease) in unearned kafalah fees represent the difference between the balance of unearned kafalah fees for current and prior period.

Presentation of kafalah fees in the profit or loss statement represents gross fees.

Re-guarantee ujrah income

Re-guarantee ujrah income is ujrah receipt from re-guarantee partner with certain percentage of premium paid to re-guarantee partner.

Re-guarantee ujrah is recorded as unearned revenue and amortized over the period of the guarantee.

If there is an accelerated repayment or there is a claim of the guarantee fee receivables, the amount of kafalah fees and deferred re-guarantee ujrah income are entirely recognised to profit or loss for the current year.

Kafalah administrative service income

Kafalah administrative service income is fully recognised when kafalah certificates ("SK") were issued.

Ujrah expenses

Ujrah given to agents and recipient of the guarantee related to insurance coverage. Ujrah expenses are expressed as a certain percentage of the IJK. Ujrah expenses are recorded as prepaid expenses and amortized over the guarantee period.

Kontetorian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

Premi penjaminan ulang

Premi penjaminan ulang merupakan beban atas premi yang dibayarkan kepada mitra penjaminan ulang guna mengalihkan risiko klaim. Besaran premi penjaminan ulang yang menjadi hak mitra penjaminan ulang ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Premi penjaminan ulang dicatat sebagai aset penjaminan ulang dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan ulang.

Klaim

Estimasi klaim adalah jumlah yang menjadi tanggungan Entitas Anak sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan penelaahan secara teknis asuransi.

Klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian, termasuk estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR"), dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim penjaminan ulang, dan kenaikan/penurunan estimasi klaim. Klaim penjaminan ulang disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

Cadangan atas estimasi klaim bruto dibuat berdasarkan taksiran beban klaim yang akan dibayar sesuai dengan klaim yang diterima Entitas Anak sampai dengan tanggal laporan. Pemulihan klaim dari reasuradur untuk cadangan atas estimasi klaim bruto dicatat sebagai estimasi klaim penjaminan ulang pada aset penjaminan ulang.

Entitas Anak menetapkan cadangan berdasarkan lini usaha ("LoB"). Terdapat dua kategori cadangan: cadangan untuk klaim yang sudah dilaporkan dan cadangan untuk klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan ("IBNR").

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

q. Sharia guarantee contract *(continued)*

Re-guarantee premiums

Re-guarantee premiums are premium expenses paid to re-guarantee company to transfer the claim risk. Amount of re-guarantee premium is defined based on type of product guarantee.

Re-guarantee premiums are recorded as re-guarantee assets and amortized over the period of re-guarantee.

Claims

Estimated claims represent outstanding claims and the Subsidiary's estimate of claims already incurred but not yet reported. This account is stated in the statement of financial position based on the insurance technical review.

Claims consist of settled claims, outstanding claims, including claims incurred but not yet reported ("IBNR"), and claim settlement expenses. Claims are recognised as expenses when incurred. Re-guarantee claims received from re-guarantee companies are recognised as deduction from claim expenses in the same period as the recognition of claim expenses. Subrogated rights are recognised as deduction from claim expenses upon realisation.

Claim expenses in the statement of profit or loss represent gross claims, re-guarantee claims and increase/decrease in estimated claims. Re-guarantee claims are presented as deduction from gross claims.

Provision for estimated gross claims is made for the full estimated costs of claims to be paid in respect of claims notified to the Subsidiary until the date of the reporting period. Re-guarantee recoveries of the provision for estimated gross claims is recorded as estimated re-guarantee claims in re-guarantee assets.

The Subsidiary establishes its reserves by line of business ("LoB"). There are two categories of reserve: reserves for reported losses and reserves for incurred but not yet reported ("IBNR") losses.

Kementerian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

Klaim (lanjutan)

Cadangan Entitas Anak untuk klaim yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan klaim yang sudah dilaporkan. Entitas Anak membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan.

Entitas Anak membentuk cadangan IBNR dengan menggunakan metode triangulasi dan metode gabungan (seperti *Bornhuetter-Ferguson*), termasuk asumsi tingkat diskonto, rasio klaim, dan rasio biaya.

Perubahan jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

r. Imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pascakerja, seperti pensiun, uang pisah, uang penghargaan, dan imbalan lainnya dihitung berdasarkan peraturan Grup dan Undang-Undang No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 ("UUCK").

Grup telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu program asuransi kesejahteraan karyawan dan program kesejahteraan karyawan melalui dana pensiun lembaga keuangan ("DPLK") dan pendanaan hari tua ("PHT"). Selain program pensiun, Grup juga membukukan imbalan pascakerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan UUCK, sedangkan Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.

Selain program pensiun imbalan pasti, Grup juga memiliki program iuran pasti dimana Grup membayar iuran yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

Liabilitas imbalan pascakerja merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***q. Sharia guarantee contract** (continued)*

Claims (continued)

The Subsidiary's reserves for reported losses are based on estimates of future payments to settle reported claims. The Subsidiary bases such estimates on the facts available at the time the reserves are established.

The Subsidiary establishes IBNR reserves using triangulation method and hybrid methods (such as, Bornhuetter-Ferguson), include discount rate assumptions, claim ratio, and expense ratio.

Changes in the amount of estimated total claim liabilities as a result of further review and differences between estimated claims and claims paid are recognised in the profit or loss statement in the period when the changes occur.

r. Employee benefits

Long-term and post-employment benefits liabilities, such as pension, severance payments, service payments, and other benefits are calculated in accordance with the Group's Regulation and Indonesian Law No. 11/2020 and Government Regulation No. 35/2021 ("UUCK").

The Group has registered their employees into pension plan, that is program asuransi kesejahteraan karyawan and program kesejahteraan karyawan through financial institution pension fund ("DPLK") and provident fund ("PHT"). Besides pension plan, the Group also recognised defined benefit post-employment benefit according to the UUCK, whilst the Subsidiary conduct defined benefits pension plans.

In addition to the defined benefit pension plan, the Group also has defined contribution plans in which the Group pays fees calculated based on a certain percentage of the employee's basic salary to the pension insurance program held by the pension funds of financial institutions. Contributions are charged to the income statement when due.

The post-employment benefit liabilities represent the present value of the defined benefit liabilities at the end of the reporting period less the fair value of the plan assets and adjustments to past services costs not yet recognised. The defined benefit liabilities are calculated annually by the independent actuary using the projected unit credit method.

Kementerian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSIMATERIAL (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pascakerja yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu seluruhnya diakui secara langsung dalam laba rugi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mensyaratkan karyawan untuk bekerja selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, biaya jasa lalu akan diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode tersebut.

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dan diakui di dalam pendapatan komprehensive lainnya.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah/gaji, upah lembur, iuran jaminan sosial dan hari tua, iuran asuransi jiwa dan penggantian biaya perawatan dan pengobatan, cuti jangka pendek, tunjangan hari raya dan bonus diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Liabilitas imbalan pascakerja

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti melalui Grup asuransi yang pesertanya adalah karyawan tetap Grup. Iuran pasti dan manfaat pasti kepada Grup asuransi adalah sebesar persentase tertentu dari gaji karyawan yang menjadi peserta program iuran pasti dan manfaat pasti Grup.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan penghargaan tanda jasa dan cuti besar kepada karyawan yang memiliki masa kerja tertentu sesuai ketentuan Grup. Perkiraan biaya imbalan ini dicadangkan sepanjang masa kerja karyawan. Liabilitas ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Employee benefits *(continued)*

The present value of the defined benefit liabilities are determined by discounting the estimated future cash flows using the interest rate on long-term government bonds at the end of the reporting period, expressed in Rupiah, in accordance with the currency in which the benefits will be paid and the short-term ones corresponding to the post-employment benefits liabilities in question.

All past service costs are recognised directly in the profit or loss, except for changes towards pension programs that impose conditions on the employees to work during a specified period of time. In this case, past service costs will be amortized using the straight line method over that period.

Actuarial gains and losses may arise from adjustments made based on experience and changes in actuarial assumptions and recognised in other comprehensive income.

Short-term employee benefits liabilities

Short-term work benefits such as wages/salaries, overtime pay, social security contributions and old age, life insurance contributions and reimbursement for treatment and medical expenses, short-term leave, holiday allowances and bonuses are recognised over the period of service provided. Short-term benefits are calculated at the undiscounted amount.

Post-employment benefits liabilities

The Group provides defined contribution pension plans and defined benefit pension plans through insurance companies whose participants are permanent employees of the Group. The defined contribution and defined benefit contributions to insurance companies are a certain percentage of the salaries of employees who are participants in the Group's defined contribution and defined benefit plans.

Other long-term employee benefits

The Group provides awards for service and long leave to employees who have a certain period of service in accordance with the Group regulations. The estimated cost of these benefits is reserved over the employee's tenure. This liability is assessed annually by an independent actuary.

Kementerian Perin

2. KEBIJAKAN AKUNTANSIMATERIAL (lanjutan)

s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup yang memenuhi persyaratan berikut:

a). Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Grup jika:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
   iii. personel manajemen kunci Grup atau induk Grup.

b). Suatu entitas berelasi dengan Grup jika:
   i. entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
   ii. entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain;
   iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja;
   vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
   vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 41.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

s Transactions with related parties

The Group entered into transactions with related parties as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures". This transaction is based on the terms agreed by both parties, where these requirements may not be the same as other transactions conducted with unrelated parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

A related party is an individual or entity related with the Group that meets the following requirements:

a). Person or immediate family member has a relationship with the Group if:
   i. has control or joint control over the Group;
   ii. has significant influence over the Group; or
   iii. is a key management personnel of the Group or its parent.

b). An entity is related with the Group if:
   i. the entity and the Group are members of the same business Group;
   ii. the entity is an associate or joint venture of another entity;
   iii. both entities are joint ventures of the same third party;
   iv. the entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate entity of the third entity;
   v. the entity is a post-employment benefit plan;
   vi. the entity is controlled or jointly controlled by person identified in point (a); or
   vii. the person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 41.

Kementerian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSIMATERIAL (lanjutan)

t. Dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen telah disetujui oleh para pemegang saham.

u. Kepentingan non-pengendali

Kepentingan non-pengendali adalah ekuitas Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

v. Piutang hasil investasi

Piutang hasil investasi merupakan piutang atas bunga dari penempatan investasi oleh Grup yang diakui secara akrual basis.

w. Aset pengembalian

Aset pengembalian adalah aset perusahaan penjaminan yang dapat dipulihkan dari perusahaan penjaminan ulang untuk porsi estimasi klaim.

Aset pengembalian terbentuk atas perhitungan cadangan klaim. Aset pengembalian merupakan kerugian ekspektasian atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang dan diukur secara sistematik sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara jumlah saldo kerugian ekspektasian bruto dan jumlah saldo kerugian ekspektasian bersih.

x. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari klaim dalam proses, piutang investasi yang telah jatuh tempo, pinjaman, piutang kepada karyawan, piutang lainnya, uang jaminan, sediaan cetakan, dan giro Kospin Jasa.

Klaim dalam proses merupakan klaim yang telah diajukan oleh penerima jaminan kepada perusahaan namun masih dalam proses verifikasi data. Klaim dalam proses dicatat sebesar jumlah pembayaran klaim yang didebet pada rekening Grup setelah dikurangi dengan jumlah klaim yang telah disetujui.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

t. Dividend

Dividend distribution to the Group's shareholder is recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which dividend are approved by the shareholders.

u. Non-controlling interests

Non-controlling interest is the equity of the Subsidiary not attributable directly and indirectly in Subsidiary.

Non-controlling interests are presented in equity in the consolidated financial statements, separately from the equity owners of the parent.

v. Investment income receivables

Investment income receivable represents interest receivable from investment placement by the Group which are recognised on an accrual basis.

w. Reimbursement assets

Recoverable assets are assets of the insurance company that can be recovered from the reguarantee company for the portion of the estimated claim.

Reimbursement assets are based on the calculation of claims reserves. Reimbursement assets represent expected losses on risks that have been transferred to re-guarantee and are measured systematically in accordance with the claims reserve measurement pattern based on the difference between the gross expected loss balance and the net expected loss balance.

x. Other assets

Other assets include claims in process, matured investment receivables, loans, receivables to employees, other receivables, security deposits, inventories, and current accounts of Kospin Jasa.

Claims in process are claims that have been submitted by the guarantee recipient to the Group but are still in the process of data verification. Claims in process are recorded at the amount of claim payments debited to the Group account after deducting the amount of claims that have been approved.

Kementerian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSIMATERIAL (lanjutan)

x. Aset lain-lain (lanjutan)

Piutang investasi yang telah jatuh tempo merupakan piutang atas penempatan investasi Grup yang telah jatuh tempo namun atas penempatan tersebut Grup belum menerima dana atas penempatan investasi.

y. Penjaminan ulang dibayar dimuka

Penjaminan ulang dibayar dimuka terdiri dari beban imbal jasa *co-guarantee* dibayar dimuka, beban premi *co-insurance* dibayar dimuka, beban premi reasuransi dibayar dimuka, dan beban imbal jasa penjaminan *loss limit* dibayar dimuka.

Atas akun diatas diakui sebagai penjaminan ulang dibayar dimuka dan diamortisasi bulanan secara proporsional sesuai dengan periode penjaminan ulang atau mengikuti pola pengakuan pendapatan imbal jasa penjaminan sesuai dengan periode berlakukanya Sertifikat Penjaminan ("SP"), kecuali produk penjaminan tertentu memperhatikan mekanisme pembayaran imbal jasa penjaminan secara tahunan.

z. Biaya akuisisi tangguhan

Biaya akuisisi tangguhan terdiri dari *fee* agen dibayar dimuka, beban fee broker dibayar dimuka, dan beban fee based dibayar dimuka.

Atas akun diatas diakui sebagai biaya akuisisi dimuka dan diamortisasi bulanan secara proporsional sesuai dengan periode penjaminan ulang atau mengikuti pola pengakuan pendapatan imbal jasa penjaminan sesuai dengan periode berlakukanya Sertifikat Penjaminan ("SP"), kecuali produk penjaminan tertentu memperhatikan mekanisme pembayaran imbal jasa penjaminan secara tahunan.

Biaya akuisisi tangguhan diakui ketika terbit Sertifikat Penjaminan ("SP") dan diterimanya tagihan dari mitra penerima jaminan/mitra agen penjaminan/mitra broker.

Biaya akuisisi tangguhan disajikan sebesar nilai nominal yang sesuai dengan presentase tertentu dari imbal jasa penjaminan yang disepakati sebagaimana diatur dalam perjanjian penjaminan kredit/perjanjian dengan mitra agen penjaminan/mitra broker.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

x. Other assets *(continued)*

Matured investment receivables represent receivables for the Group investment placements that have matured but for which the Group has not yet received funds for the investment placement.

y. Prepaid re-guarantee

Prepaid re-guarantee consists of prepaid co-guarantee fees, prepaid co-insurance premium, prepaid re-insurance premium, and prepaid loss limit guarantee fee.

The above accounts are recognised as prepaid re-guarantee and amortized monthly in proportion to the re-guarantee period or following the pattern of recognition of guarantee fee income in accordance with the validity period of the Guarantee Certificate ("SP"), unless certain guarantee products pay attention to the mechanism of paying guarantee fees on an annual basis.

z. Deferred acquisition cost

Deferred acquisition costs consist of prepaid agent fees, prepaid broker fees, and prepaid fee-based expenses.

The above accounts are recognised as deferred acquisition costs and amortized monthly in proportion to the re-guarantee period or following the pattern of recognition of guarantee fee income in accordance with the validity period of the Guarantee Certificate ("SP"), except for certain guarantee products that pay guarantee fees on an annual basis.

Deferred acquisition costs are recognised when a Guarantee Certificate ("SP") is issued and an invoice is received from the guarantee recipient partner/guarantee agent partner/broker partner.

Deferred acquisition costs are presented at a nominal value that corresponds to a certain percentage of the agreed guarantee fee as regulated in the credit guarantee agreement/agreement with the guarantee agent/broker partner.

Konfidensial BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Utang penjaminan ulang

Utang penjaminan ulang merupakan kewajiban yang harus dibayar Grup kepada mitra penjaminan ulang untuk mengalihkan risiko klaim. Utang penjaminan ulang diakui ketika terbit Sertifikat Penjaminan.

ab. Pendapatan komisi ditangguhkan

Pendapatan komisi ditangguhkan terdiri dari pendapatan komisi *co-guarantee* ditangguhkan, pendapatan komisi *co-insurance* ditangguhkan, pendapatan komisi reasuransi ditangguhkan, pendapatan *fee based co-insurance* ditangguhkan.

Pendapatan komisi ditangguhkan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan sesuai dengan periode berlakukanya Sertifikat Penjaminan ("SP").

ac. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

Grup mengklasifikasikan instrumen modal sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi ketentuan kontrak dari instrumen. Saham Grup diklasifikasikan sebagai ekuitas ketika tidak ada liabilitas kontrak untuk mentransfer kas atau aset keuangan lainnya.

ad. Komisi (pendapatan)/beban

Pendapatan komisi merupakan pendapatan komisi yang diberikan oleh mitra penjaminan ulang atas transaksi penjaminan ulang. Beban komisi merupakan beban komisi penjaminan yang diberikan kepada penerima jaminan dan agen penjaminan sehubungan dengan kegiatan usaha penjaminan.

Pendapatan komisi diakui sebagai pendapatan terkait penjaminan kredit diterima dimuka dan diamortisasi selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan ("SP"). Beban komisi diakui sebesar imbal jasa yang diberikan kepada penerima jaminan dan agen penjaminan.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

aa. Re-guarantee payables

Re-guarantee payables represent obligations that the Group must pay to the re-guarantor to transfer the risk of claims. Re-guarantee payables is recognised when the Guarantee Certificate is issued.

ab. Deferred commission income

Deferred commission income consists of deferred co-guarantee commission income, deferred co-insurance commission income, deferred re-guarantee commission income, and deferred co-insurance fee based income.

Deferred commission income is recognised as deferred income and amortized over the remaining guarantee period and allocated in accordance with the validity period of the Guarantee Certificate ("SP").

ac. Share capital

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

The Group classifies capital instruments as financial liabilities or equity instruments in accordance with the substance of the contractual terms of the instruments. The Group's shares are classified as equity when there is no contractual obligation to transfer cash or other financial assets.

ad. Commission (income)/expenses

Commission income is commission income provided by re-guarantee partners for re-guarantee transactions. Commission expenses represent guarantee commission expenses given to guarantee recipients and guarantee agents in connection with guarantee business activities.

Commission income is recognised as income related to unearned credit guarantees and is amortized over the remaining guarantee period and allocated based on the month the Guarantee Certificate ("SP") is issued. Commission expenses are recognised in the amount of fees for services provided to guarantee recipients and guarantee agents.

Kementerian BUMN

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ae. Beban usaha

Beban operasional diakui pada saat terjadinya dan berdasarkan basis akrual.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh standar adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Liabilitas kontrak jaminan keuangan

Liabilitas kontrak jaminan keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan terjamin dan nilai realisasi bersih dari setiap subrogasi.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, asumsi dibuat untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

Keakuratan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan terjamin tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

ae. Operating expenses

Operating expenses is recognised as incurred and on an accrual basis.

3. *CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS*

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with standard are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from initial estimates.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Liabilities for financial guarantee contracts

Liabilities for financial guarantee contracts are evaluated individually and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the guaranteed's financial situation and the net realisable value of any underlying subrogation.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

The accuracy of the allowances depends on how well the estimation of future cash flows for specific guaranteed allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

Kementerian BUMN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

b. Estimasi klaim

Estimasi klaim Entitas Anak dihitung berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial. Entitas Anak menggunakan teknik permodelan dan asumsi berdasarkan risiko pemburukan dari *experienced studies* secara historis yang dianggap mempengaruhi perhitungan cadangan klaim. Realisasi estimasi dicatat pada perubahan estimasi cadangan klaim. Termasuk dalam cadangan teknis Entitas Anak adalah estimasi liabilitas klaim dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan (lihat Catatan 2g).

c. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaris. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan *forward-looking* untuk piutang usaha dihitung menggunakan metode *discounted cash flow* dengan *scenario* optimis dan pesimis. Sedangkan, secara kolektif untuk investasi mengunakan eksternal rating terhadap *invesment grade* dengan menggunakan 3 (tiga) skenario yaitu normal, optimis dan pesimis.

Secara khusus, pertimbangan oleh manajemen diperlukan dalam mengestimasi jumlah dan waktu arus kas dimasa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin akan berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai di masa mendatang.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, asumsi dibuat untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(continued)*

Key sources of estimation uncertainty: *(continued)*

b. Estimated claims

Estimated claims in Subsidiary are calculated based on actuarial calculations using actuarial assumptions. Subsidiary is using technical modeling and assumptions based on the risk of deterioration from historically experienced studies which are considered to affect the calculation of claims reserves. Estimated realisation is recorded in the change in the estimated reserves for claims. Subsidiary's technical reserves are included in the estimated claims liabilities and reserves for premiums that have not yet been earned (see Note 2g).

c. Employee benefits liabilities

Employee benefits liabilities are determined based on actuarial valuation. The actuary valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate, and others. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

d. Allowance for impairment losses

The Group applies a simplified approach to measuring the allowance for impairment losses on a forward-looking basis for trade receivables calculated using the discounted cash flow method with optimistic and pessimistic scenarios. However, collectively for investment using an external rating of investment grade using 3 (three) scenarios, namely normal, optimistic and pessimistic.

In particular, judgement by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may be different, resulting in future changes to the allowance.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

Kemenkeu

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

e. Nilai wajar dari instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk menggunakan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Dalam mengestimasi arus kas, Grup melakukan penilaian tentang kondisi keuangan terjamin dan nilai realisasi bersih dari agunan.

f. Aset pengembalian

Aset yang timbul dari kontrak penjaminan ulang sebagai pemulihan cadangan klaim dihitung dengan menggunakan pendekatan *gross* dan *netting-off* pemulihan klaim ekspektasian setelah dikurangi ekspektasi pemulihan aset. Pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor seperti *counterparty* dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui di mana terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak dapat menerima jumlah yang terutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal.

g. Estimasi pengakuan imbal jasa penjaminan dan imbal jasa *kafalah*

Grup memperkirakan pengakuan imbal jasa penjaminan dan imbal jasa *kafalah* dengan mempertimbangkan kontrak-kontrak penjaminan yang belum dicatat pada akhir tahun. Perkiraan ini didasarkan pada pengalaman tahun sebelumnya, volume usaha tahun ini serta perkiraan usaha masa datang. Grup mencatat perkiraan imbal jasa penjaminan ini sebagai imbal jasa penjaminan dan imbal jasa kafalah yang diperkirakan, dan juga mengevaluasi cadangan premi yang belum diterima terkait dengan imbal jasa tersebut.

h. Provisi pengembalian

Grup membuat estimasi atas pencadangan *refund* atas sertifikat penjaminan yang sudah dilakukan restrukturisasi. Grup membukukan provisi *refund* dengan melakukan diskonto atas porsi yang seharusnya dikembalikan kepada mitra terjamin.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(continued)*

Key sources of estimation uncertainty: *(continued)*

d. Allowance for impairment losses *(continued)*

The accuracy of the allowance depends on how well the estimation of future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

e. Fair value of financial instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the financial position statements cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgement is required to establish fair values. In estimating these cash flows, the Group makes judgement about the borrower's financial condition and the net realisable value of collateral.

f. Reimbursement assets

Assets arising from re-guarantee contracts as recovery of reserves for claims are calculated using the gross and netting-off approaches of the expected recovery of claims after deducting expected recovery of assets. The recoverability of these assets is assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflecting the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Group may not received amounts due to it and these amounts can be reliably measured.

g. Estimated guarantee fees and kafalah fees recognition

The Group estimates the recognition of guarantee fees and kafalah fees by considering the guarantee contracts that have not been recorded at the end of the year. This estimation is based on the previous year's experience, the current year's business volume, and future business projections. The Group records these estimated service fees as estimated guarantee fees and kafalah fees and also evaluates the provision for unearned premiums associated with these fees.

h. Provision for refund

The Group makes an estimate for refunds for certificates that have issued restructurisation. The Group booked refund provision by discounting the portion that should have been returned to the guaranteed parties.

Kemenkeuangan RI

4. KAS DAN KAS DI BANK - BERSIH / *4. CASH AND CASH IN BANKS - NET*

	2023	2022	
Kas	1,228	1,342	***Cash on hand***
Kas di bank			***Cash in banks***
Pihak berelasi:			*Related parties:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	83,625	60,125	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23,170	71,337	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18,617	17,213	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9,769	4,703	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,813	6,992	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	1,053	328	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	717	134	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit*
PT Bank Mandiri Taspen	2	3	*PT Bank Mandiri Taspen*
	139,766	160,835	
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Berbagai Bank Pembangunan Daerah	37,154	37,424	*Various Regional Development Banks*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	1,769	178	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
PT Bank KB Bukopin Tbk	1,493	939	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
PT Bank Ina Perdana	1,215	325	*PT Bank Ina Perdana*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	609	100	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Sinarmas Tbk - Unit Syariah	365	117	*PT Bank Sinarmas Tbk - Sharia Unit*
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	352	2,834	*PT Bank Artha Graha Internasional Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	249	233	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	227	273	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Sinarmas Tbk	210	31,791	*PT Bank Sinarmas Tbk*
PT Bank KB Bukopin Syariah	202	154	*PT Bank KB Bukopin Syariah*
Lainnya	295	465	*Others*
	44,140	74,833	
	185,134	237,010	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4)	(13)	*Allowance for impairment losses*
	185,130	236,997	

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah: / *Movement for impairment losses are as follows:*

	2023	2022	
Saldo awal	13	4	*Beginning balance*
(Pembalikan)/penambahan provisi	(9)	9	*(Reversal)/additional provision*
Saldo akhir	4	13	*Ending balance*

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai kas dan kas di bank.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of cash and cash in banks.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

Kementerian BUMN

5. DEPOSITO WAJIB DAN BERJANGKA - BERSIH / 5. *STATUTORY AND TIME DEPOSITS - NET*

	2023	2022	
Pihak berelasi:			*Related parties:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,362,662	1,401,344	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,318,230	1,938,850	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	1,145,695	1,004,958	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	414,000	34,375	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	197,000	234,250	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	46,139	109,926	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15,500	98,650	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	6,499,226	4,822,353	
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Berbagai Bank Pembangunan Daerah	674,182	232,092	*Various Regional Development Banks*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	53,300	36,750	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank KB Bukopin Syariah	3,476	5,957	*PT Bank KB Bukopin Syariah*
PT Bank Nano Syariah	2,113	-	*PT Bank Nano Syariah*
PT Bank Maybank Indonesia - Unit Syariah	1,000	1,000	*PT Bank Maybank Indonesia - Sharia Unit*
PT Bank KB Bukopin Tbk	-	306,294	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	-	26,608	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
PT Bank Mega Syariah	-	18,211	*PT Bank Mega Syariah*
Berbagai Bank Perkreditan Rakyat	-	2,550	*Various Rural Banks*
	734,071	629,462	
	7,233,297	5,451,815	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(177)	(27)	*Allowance for impairment losses*
	7,233,120	5,451,788	

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah: / *Movement for impairment losses are as follows:*

	2023	2022	
Saldo awal	27	29	*Beginning balance*
Penambahan/(pembalikan) provisi	150	(2)	*Additional/(reversal) provision*
Saldo akhir	177	27	*Ending balance*

Deposito berjangka memperoleh suku bunga tahunan berkisar 2,00% - 7,00% untuk tahun 2023 (2022: 1,80% - 7,00%).

Time deposit earned annual interest at ranging of 2.00% - 7.00% in 2023 (2022: 1.80% - 7.00%).

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai deposito wajib dan berjangka.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of statutory and time deposits.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

Kementerian BUMN

6. DEPOSITO BERJANGKA UNTUK TUJUAN TERTENTU - BERSIH / *6. TIME DEPOSITS FOR CERTAIN PURPOSES - NET*

	2023	2022	
Dibatasi penggunaannya	756,140	932,640	*Restricted*
Tidak dibatasi penggunaannya	796,133	757,183	*Unrestricted*
	1,552,273	1,689,823	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	(6)	*Allowance for impairment losses*
	1,552,271	1,689,817	

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, deposito berjangka untuk tujuan tertentu Grup ditempatkan pada Bank Mitra sebagai berikut:

As at 31 December 2023 and 2022, the Group's time deposits for certain purposes placed in the Bank's Partner is as follows:

	2023	2022	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	755,139	709,689	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	421,000	269,000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200,000	500,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	125,140	125,140	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	3,094	3,094	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit*
Berbagai Bank Pembangunan Daerah	47,900	82,900	*Various Regional Development Banks*
	1,552,273	1,689,823	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	(6)	*Allowance for impairment losses*
	1,552,271	1,689,817	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Changes in allowance for impairment are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	6	7	*Opening balance*
Pembalikan provisi	(4)	(1)	*Reversal provision*
Saldo akhir	2	6	*Ending balance*

Sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati dengan mitra, Grup wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk deposito berjangka yang akan dipergunakan sebagai pelengkap persyaratan dalam perjajian kerjasama tersebut. Grup dapat menentukan jangka waktu penempatan deposito.

In accordance with the cooperation agreement with partners, the Group are required to allocate certain amount of fund in the form of time deposits which will be utilised as the fullfillment of requirement on the related cooperation agreement. The Group could determine the period of time deposits placement.

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai deposito di bank yang dibatasi penggunaannya.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of Time deposits for certain purposes.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

Kementerian BUMN

7. EFEK-EFEK - BERSIH / 7. *MARKETABLE SECURITIES - NET*

	2023	2022	
Nilai wajar melalui laba rugi:			*Fair value through profit or loss:*
- Reksadana	1,459,975	975,630	*Mutual funds -*
- Obligasi	599,641	191,474	*Bonds -*
- Sukuk	10,094	40,193	*Sukuk -*
- Efek beragun aset	3,063	6,122	*Asset-backed securities -*
	2,072,773	1,213,419	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:			*Fair value through other comprehensive income:*
- Obligasi	4,769,589	3,245,852	*Bonds -*
- Sukuk	2,508,432	1,638,765	*Sukuk -*
- Saham	184,154	193,308	*Shares -*
	7,462,175	5,077,925	
Biaya perolehan diamortisasi:			*Measured at amortized cost:*
- Obligasi	3,067,887	2,960,192	*Bonds -*
- Sukuk	2,143,677	2,731,160	*Sukuk -*
	5,211,564	5,691,352	
Jumlah efek-efek	14,746,512	11,982,696	*Total marketable securities*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,391)	(911)	*Allowance for impairment losses*
	14,745,121	11,981,785	

Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari:

Marketable securities at fair value through profit or loss consist of the followings:

	2023	2022	
Reksadana			***Mutual funds***
Penyertaan terbatas	333,467	344,554	*Limited participation*
Ekuitas	108,516	109,844	*Equity*
Terproteksi	123,785	137,575	*Protected*
Pendapatan tetap	235,250	222,989	*Fixed income*
Pasar Uang	527,290	29,836	*Money Market*
Campuran	131,667	130,832	*Discretionary*
	1,459,975	975,630	
Obligasi			***Bonds***
Obligasi pemerintah	261,048	152,825	*Government bonds*
Obligasi perusahaan milik negara dan anak perusahaannya	310,076	38,649	*State-owned enterprises and its subsidiaries bonds*
Obligasi perusahaan milik swasta	28,517	-	*Private owned enterprises bonds*
	599,641	191,474	
Sukuk			***Sukuk***
Sukuk pemerintah	-	30,118	*Government sukuk*
Sukuk perusahaan milik swasta	10,094	10,075	*Private owned enterprises sukuk*
	10,094	40,193	
Efek beragun aset			***Asset-backed securities***
Perusahaan milik negara dan anak perusahaannya	3,063	6,122	*State-owned enterprises and its subsidiaries*
	2,072,773	1,213,419	

Kementerian BUMN

7. EFEK-EFEK - BERSIH (lanjutan) / ***7. MARKETABLE SECURITIES - NET*** *(continued)*

Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: / *Marketable securities at fair value through other comprehensive income:*

	2023	2022	
Obligasi			***Bonds***
Obligasi pemerintah	4,125,103	3,016,029	*Government bonds*
Obligasi perusahaan milik negara dan anak perusahaannya	443,355	229,823	*State-owned enterprises and its subsidiaries bonds*
Obligasi perusahaan milik swasta	201,131	-	*Private owned enterprises bonds*
	4,769,589	3,245,852	
Sukuk			***Sukuk***
Sukuk pemerintah	2,282,895	1,560,851	*Government sukuk*
Sukuk perusahaan milik negara dan anak perusahaannya	212,661	65,041	*State-owned enterprises and its subsidiaries sukuk*
Sukuk perusahaan milik swasta	12,876	12,873	*Private owned enterprises sukuk*
	2,508,432	1,638,765	
Saham			***Shares***
Perusahaan milik negara dan anak perusahaannya	134,061	134,999	*State-owned enterprises and its subsidiaries*
Perusahaan milik swasta	50,093	58,309	*Private owned companies*
	184,154	193,308	
	7,462,175	5,077,925	

Efek-efek yang diukur pada biaya amortisasi: / *Marketable securities measured at amortized cost:*

	2023	2022	
Obligasi			***Bonds***
Obligasi pemerintah	2,188,887	1,666,192	*Government bonds*
Obligasi perusahaan milik negara dan anak perusahaannya	830,000	1,294,000	*State-owned enterprises and its subsidiaries bonds*
Obligasi perusahaan milik swasta	49,000	-	*Privately owned enterprises bonds*
	3,067,887	2,960,192	
Sukuk			***Sukuk***
Sukuk pemerintah	2,129,677	2,731,160	*Government sukuk*
Sukuk perusahaan milik negara dan anak perusahaannya	14,000	-	*State-owned enterprises and its subsidiaries sukuk*
	2,143,677	2,731,160	
	5,211,564	5,691,352	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,391)	(911)	*Allowance for impairment losses*
	5,210,173	5,690,441	

Kementerian BUMN

7. EFEK-EFEK - BERSIH (lanjutan) / 7. *MARKETABLE SECURITIES - NET (continued)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah: / *Movement for impairment losses are as follows:*

	2023	2022	
Saldo awal	911	932	*Beginning balance*
Penambahan/(pembalikan) provisi	480	(21)	*Additional/(reversal) provision*
Saldo akhir	1,391	911	*Ending balance*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat efek-efek yang dijadikan dana jaminan. / *As at 31 December 2023 and 2022, there were no marketable securities pledged as statutory funds.*

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai efek-efek. / *The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of marketable securities.*

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi. / *Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.*

8. PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN - BERSIH / 8. *GUARANTEE FEE RECEIVABLES - NET*

	2023	2022	
Pemerintah Republik Indonesia	1,663,631	1,775,450	*The Government of The Republic of Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,382,499	1,475,793	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	751,421	868,969	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	553,208	364,392	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15,634	3,260	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Berbagai Bank Pembangunan Daerah	234,956	170,778	*Various Regional Development Banks*
Berbagai Bank Swasta	31,587	14,604	*Various Private Banks*
Lainnya	131,765	5,769	*Others*
	4,764,701	4,679,015	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,026,725)	(1,204,515)	*Allowance for impairment losses*
	2,737,976	3,474,500	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai: / *Changes in allowance for impairment are as follows:*

	2023	2022	
Saldo awal	1,204,515	1,107,172	*Opening balance*
Penambahan provisi	822,210	97,343	*Additional provision*
Saldo akhir	2,026,725	1,204,515	*Ending balance*

Kementerian BUMN

8. PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN - BERSIH (lanjutan) / *GUARANTEE FEE RECEIVABLES - NET (continued)*

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang imbal jasa penjaminan.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible guarantee fee receivables.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

9. PIUTANG PENJAMINAN ULANG - BERSIH / *RE-GUARANTEE RECEIVABLES - NET*

	2023	2022	
PT Reasuransi Nasional Indonesia	453,973	60,689	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	209,319	205,223	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Reasuransi Syariah Indonesia	88,063	61,135	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
PT Asuransi Syariah Mubarakah	72,705	72,705	*PT Asuransi Syariah Mubarakah*
PT Heksa Solution Insurance	16,456	20,067	*PT Heksa Solution Insurance*
PT BRI Asuransi Indonesia	6,355	6,295	*PT BRI Insurance Indonesia*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	4,914	4,525	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
PT Tugu Reasuransi Indonesia	-	367	*PT Tugu Reasuransi Indonesia*
	851,785	431,006	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(269,607)	(188,981)	*Allowance for impairment losses*
	582,178	242,025	

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Changes in allowance for impairment are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	188,981	248,559	*Opening balance*
Penambahan/(pembalikan) provisi	80,626	(59,578)	*Additional/(reversal) provision*
Saldo akhir	269,607	188,981	*Ending balance*

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang penjaminan ulang.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible re-guarantee receivables.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

10. PIUTANG HASIL INVESTASI - BERSIH / *INVESTMENT INCOME RECEIVABLES - NET*

	2023	2022	
Obligasi	202,851	92,424	*Bonds*
Sukuk	12,298	68,316	*Sukuk*
Deposito berjangka	9,805	6,039	*Time deposits*
Efek beragun aset	22	42	*Asset-backed security*
	224,976	166,821	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(81)	(14)	*Allowance for impairment losses*
	224,895	166,807	

Kementerian BUMN

10. PIUTANG HASIL INVESTASI - BERSIH (lanjutan) / *10. INVESTMENT INCOME RECEIVABLES - NET (continued)*

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai: / *Changes in allowance for impairment are as follows:*

	2023	2022	
Saldo awal	14	79	*Opening balance*
Penambahan/(pembalikan) provisi	67	(65)	*Additional/(reversal) provision*
Saldo akhir	81	14	*Ending balance*

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang hasil investasi.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible investment income receivables.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

11. ASET TETAP - BERSIH / *11. FIXED ASSETS - NET*

	2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Transfer/ *Transferred*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan:						***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Tanah	217,273	35,072	-	4,413	256,758	*Land*
Bangunan kantor	226,877	18,677	-	8,825	254,379	*Office buildings*
Perumahan dinas	8,648	744	-	636	10,028	*Houses*
Inventaris kantor	176,556	32,339	(142)	345	209,098	*Office equipment*
Inventaris rumah dinas	5,199	845	-	8	6,052	*Houses equipment*
Kendaraan bermotor	36,383	121	(29)	-	36,475	*Motor vehicles*
Aset dalam penyelesaian	-	33,394	-	(14,227)	19,167	*Assets in progress*
	670,936	121,192	(171)	-	791,957	
Aset hak-guna						*Right-of-use assets*
Bangunan kantor	61,152	16,984	(16,391)	-	61,745	*Office buildings*
Kendaraan bermotor	57,304	44,545	(29,184)	-	72,665	*Motor vehicles*
Inventaris kantor	159	-	-	-	159	*Office equipment*
	118,615	61,529	(45,575)	-	134,569	
	789,551	182,721	(45,746)	-	926,526	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan kantor	(43,851)	(6,641)	-	-	(50,492)	*Office buildings*
Perumahan dinas	(3,263)	(394)	-	-	(3,657)	*Houses*
Inventaris kantor	(116,710)	(22,343)	142	-	(138,911)	*Office equipment*
Inventaris rumah dinas	(3,854)	(656)	-	-	(4,510)	*Houses equipment*
Kendaraan bermotor	(36,205)	(96)	29	-	(36,272)	*Motor vehicles*
	(203,883)	(30,130)	171	-	(233,842)	
Aset hak-guna						*Right-of-use assets*
Bangunan kantor	(36,540)	(17,295)	16,391	-	(37,444)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor	(35,681)	(21,818)	29,184	-	(28,315)	*Motor vehicles*
Inventaris kantor	(88)	(29)	-	-	(117)	*Office equipment*
	(72,309)	(39,142)	45,575	-	(65,876)	
	(276,192)	(69,272)	45,746	-	(299,718)	
Nilai buku bersih	513,359				626,808	***Net book value***

Kementerian BUMN

11. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan) / *11. FIXED ASSETS - NET (continued)*

	2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Transfer/ *Transferred*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan:						***Acquisition cost:***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Tanah	88,706	128,567	-	-	217,273	*Land*
Bangunan kantor	151,291	46,869	-	28,717	226,877	*Office buildings*
Perumahan dinas	8,648	-	-	-	8,648	*Houses*
Inventaris kantor	163,843	25,141	(12,428)	-	176,556	*Office equipment*
Inventaris rumah dinas	4,679	614	(94)	-	5,199	*Houses equipment*
Kendaraan bermotor	43,891	41	(7,549)	-	36,383	*Motor vehicles*
Aset dalam penyelesaian	29,435	-	(718)	(28,717)	-	*Assets in progress*
	490,493	201,232	(20,789)	-	670,936	
Aset hak-guna						*Right-of-use assets*
Bangunan kantor	58,428	6,767	(4,043)	-	61,152	*Office buildings*
Kendaraan bermotor	48,132	15,080	(5,908)	-	57,304	*Motor vehicles*
Inventaris kantor	159	-	-	-	159	*Office equipment*
	106,719	21,847	(9,951)	-	118,615	
	597,212	223,079	(30,740)	-	789,551	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan kantor	(38,794)	(5,057)	-	-	(43,851)	*Office buildings*
Perumahan dinas	(2,877)	(386)	-	-	(3,263)	*Houses*
Inventaris kantor	(108,800)	(20,325)	12,415	-	(116,710)	*Office equipment*
Inventaris rumah dinas	(3,349)	(599)	94	-	(3,854)	*Houses equipment*
Kendaraan bermotor	(42,440)	(1,304)	7,539	-	(36,205)	*Motor vehicles*
	(196,260)	(27,671)	20,048	-	(203,883)	
Aset hak-guna						*Right-of-use assets*
Bangunan kantor	(26,788)	(13,794)	4,042	-	(36,540)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor	(23,869)	(17,720)	5,908	-	(35,681)	*Motor vehicles*
Inventaris kantor	(59)	(29)	-	-	(88)	*Office equipment*
	(50,716)	(31,543)	9,950	-	(72,309)	
	(246,976)	(59,214)	29,998	-	(276,192)	
Nilai buku bersih	350,236				513,359	***Net book value***

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya. Direksi berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As at 31 December 2023, fixed assets are covered by insurance against losses of fire and other risks. The Directors believe that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Berdasarkan evaluasi Direksi, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023.

Based on the Directors' assessment, there had been no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of fixed assets as at 31 December 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan.

As at 31 December 2023 there were no fixed assets pledged as collateral.

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The profit or loss shows the following amounts related to leases:

	2023	2022	
Beban umum dan administrasi			*General and administrative expenses*
Depresiasi aset hak-guna	39,142	31,543	*Depreciation of right-of-use assets*
Beban bunga	4,056	3,825	*Interest expense*

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp45.692 dan Rp35.409.

The total cash outflow for leases for the year ended 31 December 2023 and 2022 is amounting to Rp45,692 and Rp35,409, respectively.

Kementerian BUMN

12. PENJAMINAN ULANG DIBAYAR DIMUKA / *12. PREPAID RE-GUARANTEE*

	2023	2022	
Kredit Usaha Rakyat	258,785	249,606	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	357,271	11,210	*Productive*
PEN	20,569	50,353	*PEN*
Konsumtif	286,869	351,401	*Consumptive*
Suretyship	12,732	1,129	*Suretyship*
	936,226	663,699	

13. ASET PENGEMBALIAN / *13. REIMBURSEMENT ASSETS*

	2023	2022	
Kredit Usaha Rakyat	627,458	603,111	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	63,675	110,699	*Productive*
PEN	-	(189)	*PEN*
Konsumtif	111,719	303,572	*Consumptive*
Suretyship	(11,208)	6,232	*Suretyship*
	791,644	1,023,425	

14. BIAYA AKUISISI TANGGUHAN / *14. DEFERRED ACQUISITION COST*

	2023	2022	
Produktif	9,725	7,529	*Productive*
Konsumtif	135,661	168,364	*Consumptive*
Suretyship	1,995	6,609	*Suretyship*
	147,381	182,502	

15. ASET PENJAMINAN ULANG / *15. RE-GUARANTEE ASSETS*

	2023	2022	
Entitas Anak			***Subsidiary***
Imbal jasa *kafalah* ditangguhkan	193,192	246,462	*Unearned kafalah fees*
Klaim dalam proses penyelesaian	42,649	139,122	*Outstanding claims*
Incurred but not reported ("IBNR")	118,483	43,143	*Incurred but not reported ("IBNR")*
	354,324	428,727	

16. ASET LAIN-LAIN - BERSIH / *16. OTHER ASSETS - NET*

	2023	2022	
Klaim dalam proses	56,442	81,476	*Claims in process*
Pinjaman	17,110	17,110	*Loans*
Piutang investasi jatuh tempo	9,428	22,178	*Receivables from matured investment*
Lainnya	7,319	9,156	*Others*
	90,299	129,920	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(86,017)	(90,894)	*Allowance for impairment losses*
	4,282	39,026	

Kementerian BUMN

16. ASET LAIN-LAIN - BERSIH (lanjutan) / *OTHER ASSETS - NET (continued)*

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Changes in allowance for impairment are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	90,894	76,730	*Opening balance*
(Pembalikan)/penambahan provisi	(4,877)	14,164	*(Reversal)/additional provision*
Saldo akhir	86,017	90,894	*Ending balance*

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai aset lain-lain.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of other assets.

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

17. UTANG KLAIM / *CLAIM PAYABLES*

	2023	2022	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	67,013	45,456	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,112	391	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya Tbk	4,963	-	*PT Adhi Karya Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,855	3,092	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Berbagai Bank Pembangunan Daerah	1,115	2,280	*Various Regional Development Banks*
Lainnya	314	6,855	*Others*
	81,372	58,074	

18. UTANG PENJAMINAN ULANG / *RE-GUARANTEE PAYABLES*

	2023	2022	
PT Reasuransi Nasional Indonesia	625,497	163,366	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
PT Reasuransi Syariah Indonesia	6,102	29,117	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
Pemerintah Republik Indonesia	1,701	26,921	*Government of The Republic of Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama	-	1,696	*PT Reasuransi Indonesia Utama*
	633,300	221,100	

19. AKRUAL DAN UTANG LAIN-LAIN / *ACCRUALS AND OTHER PAYABLES*

	2023	2022	
IJP belum teridentifikasi dan dikembalikan	936,002	511,109	*Unidentified and refundable guarantee fees*
Beban pegawai yang masih harus dibayar	306,409	240,761	*Accrued employee expenses*
Beban administrasi dan umum yang masih harus dibayar	83,035	60,489	*Accrued administrative and general expenses*
Beban sistem dan teknologi yang masih harus dibayar	67,226	28,312	*Accrued system and technology expenses*
Liabilitas sewa	48,713	29,129	*Lease liabilities*
Fee bank	13,477	12,864	*Bank fees*
Beban operasi yang masih harus dibayar	11,406	25,797	*Accrued operational expenses*
Subrogasi belum teridentifikasi		3,160	*Unidentified subrogation income*
Lainnya	69,146	58,137	*Others*
	1,535,414	969,758	

Kementerian BUMN

20. PERPAJAKAN / *20. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Taxes payables*

	2023	2022	
Pajak penghasilan badan:			***Corporate income tax:***
Perusahaan			***The Company***
PPh Pasal 29	94,078	419,115	*Article 29*
Entitas Anak			***Subsidiary***
PPh Pasal 29	-	311	*Article 29*
	94,078	419,426	
Pajak lain-lain:			***Other taxes:***
Perusahaan			***The Company***
PPh Pasal 25	16,808	13,661	*Article 25*
PPh Pasal 21	10,946	3,838	*Article 21*
Pajak Pertambahan Nilai	1,838	2,245	*Value Added Tax*
PPh Pasal 23	1,053	473	*Article 23*
PPh Pasal 4 (2)	132	179	*Article 4 (2)*
PPh Pasal 22	46	39	*Article 22*
	30,823	20,435	
Entitas Anak			***Subsidiary***
PPh Pasal 25	3,787	-	*Article 25*
PPh Pasal 21	543	1,060	*Article 21*
PPh Pasal 23	61	37	*Article 23*
PPh Pasal 4 (2)	116	263	*Article 4 (2)*
	4,507	1,360	
	35,330	21,795	
	129,408	441,221	

b. Beban pajak penghasilan / *b. Income tax expenses*

	2023	2022	
Perusahaan			***The Company***
Kini	296,283	580,135	*Current*
Tangguhan	(87,595)	(324,084)	*Deferred*
	208,688	256,051	
Entitas Anak			***Subsidiary***
Kini	-	45,441	*Current*
Tangguhan	(6,575)	(1,032)	*Deferred*
	(6,575)	44,409	
Konsolidasian			***Consolidated***
Kini	296,283	625,576	*Current*
Tangguhan	(94,170)	(325,116)	*Deferred*
	202,113	300,460	

Kementerian BUMN

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

***20. TAXATION** (continued)*

***b. Income tax expenses** (continued)*

A reconciliation between income tax expense and the theoretical amount of income tax expense is calculated based on profit before income tax at the tax rates that apply is as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	1,638,962	1,580,617	*Consolidated profit before income tax*
Laba sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak	(27,314)	(234,038)	*Profit before income tax - Subsidiary*
Laba sebelum pajak penghasilan	1,611,648	1,346,579	*Profit before income tax*
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku 22%	354,563	296,247	*Taxes calculated at the applicable tax rate of 22%*
Dampak pajak atas koreksi beda tetap	(145,875)	(40,196)	*Tax impact on the correction of permanent differences*
Beban pajak penghasilan Perusahaan	208,688	256,051	*The Company's income tax expense*

Pajak penghasilan badan dihitung untuk masing-masing entitas sebagai bagian yang terpisah secara hukum.

The corporate income tax is calculated for each entity as a separate legal entity.

Taksiran laba kena pajak Grup, dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The Group's estimated taxable income, and income taxes for the year ended 31 December 2023 are as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	1,638,962	1,580,617	*Consolidated profit before income tax*
Laba sebelum pajak penghasilan - Entitas Anak	(27,314)	(234,038)	*Profit before income tax - Subsidiary*
Laba sebelum pajak penghasilan	1,611,648	1,346,579	*Profit before income tax*
Perbedaan waktu:			***Temporary differences:***
(Penurunan)/kenaikan cadangan klaim	(541,971)	1,439,352	*(Decrease)/increase in reserve claim*
Akrual	54,304	24,644	*Accruals*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	883,046	31,823	*Allowance for impairment losses*
Imbalan kerja jangka panjang	(10,167)	2,997	*Long-term employee benefits*
Liabilitas sewa	46,097	-	*Lease liabilities*
Penyusutan	(33,149)	(25,707)	*Depreciation*
	398,160	1,473,109	
Perbedaan tetap:			***Permanent differences:***
Pendapatan yang dikenakan pajak final dan pendapatan yang tidak dikenakan pajak	(1,135,473)	(818,875)	*Income subject to final tax and non-taxable income*
Beban terkait pendapatan yang dikenakan pajak final - *joint cost*	20,553	16,565	*Expenses subject to final tax - joint cost*
Beban terkait pendapatan yang dikenakan pajak final	27,780	31,491	*Expenses subject to final tax*
Penghapusan piutang	79,632	295,981	*Receivables write-off*
Beban pajak final	139,635	95,651	*Final tax expenses*
Beban yang tidak diperkenankan	204,803	196,477	*Non-deductible expenses*
	(663,070)	(182,710)	
Laba kena pajak	1,346,738	2,636,978	*Taxable income*

Kementerian BUMN

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Taksiran laba kena pajak Grup, dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

20. TAXATION *(continued)*

b. Income tax expenses *(continued)*

The Group's estimated taxable income, and income taxes for the year ended 31 December 2023 are as follows: (continued)

	2023	2022	
Perusahaan:			***The Company:***
Beban pajak penghasilan - kini	296,283	580,135	*Income tax expenses - current*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:			*Less prepaid income taxes:*
Pasal 23	(12,469)	(22,072)	*Article 23*
Pasal 25	(189,736)	(138,948)	*Article 25*
Utang pajak penghasilan	94,078	419,115	*Corporate income tax payable*
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
Beban pajak penghasilan - kini	-	45,441	*Income tax expenses - current*

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Grup menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajaknya.

The corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2023 is an estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Group lodges its Annual Corporate Tax Return ("SPT").

c. Aset pajak tangguhan - bersih

c. Deferred tax assets - net

	2023				
	1 Januari/ *January* 2023	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/*Credited/ (charged) to the profit or loss*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/(charged) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2023	
Perusahaan					***The Company***
Cadangan kerugian penurunan nilai	326,532	194,270	-	520,802	*Allowances for impairment losses*
Kenaikan cadangan klaim	1,359,837	(119,234)	-	1,240,603	*Increase in claim reserves*
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(4,034)	-	4,034	-	*Unrealised gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Liabilitas imbalan kerja	18,621	(2,237)	402	16,786	*Employee benefit liabilities*
Depresiasi aset tetap dan aset hak-guna	(5,645)	(7,293)	-	(12,938)	*Fixed asset and right-of-use assets depreciation*
Liabilitas sewa	-	10,142	-	10,142	*Lease liabilities*
Akrual	86,983	11,947	-	98,930	*Accruals*
	1,782,294	87,595	4,436	1,874,325	
Entitas Anak					***Subsidiary***
Depresiasi aset tetap dan aset hak-guna	143	(804)	-	(661)	*Fixed asset and right-of-use assets depreciation*
Liabilitas sewa	-	575	-	575	*Lease liabilities*
Estimasi klaim	40,616	2,805	-	43,421	*Estimated claims*
Liabilitas imbalan kerja	1,373	231	(254)	1,350	*Employee benefit liabilities*
Nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual	3,931	-	(3,931)	-	*Fair value on financial asset available for sale*
Cadangan bonus	3,084	91	-	3,175	*Provision for bonus*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjaminan ulang dan piutang imbal jasa *kafalah*	-	3,677	-	3,677	*Allowance for impairment losses for re-guarantee receivables and kafalah receivables*
	49,147	6,575	(4,185)	51,537	
	1,831,441	94,170	251	1,925,862	

Kementerian BUMN

20. PERPAJAKAN (lanjutan) / *TAXATION (continued)*

c. Aset pajak tangguhan - bersih (lanjutan) / *Deferred tax assets - net (continued)*

	2022				
	1 Januari/ *January* 2022	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/*Credited/ (charged) to the profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited/(charged) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2022	
Perusahaan					***The Company***
Cadangan kerugian penurunan nilai	319,531	7,001	-	326,532	*Allowances for impairment losses*
Kenaikan cadangan klaim	1,043,178	316,659	-	1,359,837	*Increase in claim reserves*
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(7,526)	-	3,492	(4,034)	*Unrealised gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Liabilitas imbalan kerja	17,978	659	(16)	18,621	*Employee benefit liabilities*
Aset tetap	11	(5,656)	-	(5,645)	*Fixed assets*
Akrual	81,562	5,421	-	86,983	*Accruals*
	1,454,734	324,084	3,476	1,782,294	
Entitas Anak					***Subsidiary***
Depresiasi aset tetap	58	85	-	143	*Fixed assets depreciation*
Estimasi klaim	40,405	211	-	40,616	*Estimated claims*
Liabilitas imbalan kerja	879	251	243	1,373	*Employee benefit liabilities*
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1,708)	-	5,639	3,931	*Unrealised gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Cadangan bonus	2,599	485	-	3,084	*Provision for bonus*
	42,233	1,032	5,882	49,147	
	1,496,967	325,116	9,358	1,831,441	

Direksi berkeyakinan bahwa saldo aset pajak tangguhan di atas dapat digunakan di masa yang akan datang.

Director believes that the deferred tax assets balance above can be recovered.

d. Administrasi / *Administration*

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Grup menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Group submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Tax ("DJP") may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

21. LIABILITAS KONTRAK JAMINAN KEUANGAN / *LIABILITIES FOR FINANCIAL GUARANTEE CONTRACTS*

	2023	2022	
Kredit Usaha Rakyat	8,944,482	8,701,144	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	4,527,198	1,195,751	*Productive*
PEN	482,352	201,916	*PEN*
Konsumtif	1,236,876	1,995,071	*Consumptive*
Suretyship	20,558	110,398	*Suretyship*
	15,211,466	12,204,280	

Kementerian BUMN

22. PENDAPATAN KOMISI DITANGGUHKAN / *22. DEFERRED COMMISSION INCOME*

	2023	2022	
Kredit Usaha Rakyat	45,395	44,157	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	54,663	3,694	*Productive*
PEN	162	2,649	*PEN*
Konsumtif	55,131	65,367	*Consumptive*
Suretyship	3,807	6,769	*Suretyship*
	159,158	122,636	

23. ESTIMASI LIABILITAS KLAIM / *23. ESTIMATED CLAIM LIABILITIES*

	2023	2022	
Entitas Anak			***Subsidiary***
Kredit Usaha Rakyat	56,019	29,244	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	52,673	90,562	*Productive*
PEN	16,336	50,723	*PEN*
Konsumtif	44,153	118,805	*Consumptive*
Suretyship	189,323	77,553	*Suretyship*
	358,504	366,887	

Estimasi liabilitas klaim pada Entitas Anak merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

The estimated claim liabilities of the Subsidiary is the reserve of claims that might occur in the coming years onto the guarantee that has not matured yet.

Estimasi liabilitas klaim dicatat di laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan asumsi aktuarial. Termasuk dalam estimasi liabilitas klaim adalah klaim dalam proses dan IBNR *(Incurred But Not Reported)*.

Estimated claim liabilities are recorded in the statement of financial position based on actuarial calculations using actuarial assumptions. Included in the estimated claim liabilities are claims in process and IBNR (Incurred But Not Reported).

Pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk dalam estimasi klaim adalah estimasi liabilitas klaim yang terjadi namun belum dilaporkan - bersih sebesar Rp 112.808 (2022: Rp 108.687).

As at 31 December 2023, included in estimated claims is estimated claim liabilities incurred but not yet reported - net amounting to Rp 112,808 (2022: Rp 108,687).

24. IMBAL JASA *KAFALAH* DITANGGUHKAN / *24. UNEARNED KAFALAH FEES*

	2023	2022	
Entitas Anak			***Subsidiary***
Kredit Usaha Rakyat	265,561	141,879	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	22,754	27,220	*Productive*
PEN	4,022	62,706	*PEN*
Konsumtif	351,582	402,702	*Consumptive*
Suretyship	42,220	80,689	*Suretyship*
	686,139	715,196	

Kementerian BUMN

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2023	2022	
Imbalan pascakerja	51,775	63,484	*Post-employment benefit*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	30,662	27,398	*Other long-term employee benefits*
	82,437	90,882	

Imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk program penghargaan pengabdian gaji dan cuti besar.

Other long-term employee benefits in the form of dedication rewards program and annual leave.

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh aktuaris independen, KKA Riana & Rekan (dahulu PT Padma Radya Aktuaria) dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*", sedangkan untuk Entitas Anak, liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh aktuaris independen KKA Nandi dan Sutama, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

The liability for employee benefits as at 31 December 2023 and 2022 are calculated by an independent actuary, KKA Riana & Rekan (formerly PT Padma Radya Aktuaria) using the "Projected Unit Credit" method, whilst for Subsidiary, the liability for employee benefits as at 31 December 2023 and 2022 are calculated by an independent actuary, KKA Nandi dan Sutama, using the "Projected Unit Credit" method.

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2023	2022	
Asumsi finansial:			***Financial assumptions:***
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	*Normal retirement age*
Tingkat diskonto per tahun			*Annual discount rate*
Program Imbalan Pascakerja	6.75%	7.25%	*Post-employment Benefit*
Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	6.75%	7.25%	*Other Long-Term Employee Benefit*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6.00%	6.00%	*Salary incremental rates*
Tingkat pengembalian Investasi			*Return on Investment of*
DPLK	5.50%	6.00%	*DPLK*
PHT	2.50%	2.50%	*PHT*
Tingkat mortalitas	100% TMI IV 2019	100% TMI IV 2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat	*5% TMI IV 2019*	*5% TMI IV 2019*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	3.00% per tahun sampai dengan usia 35 tahun kemudian menurun linier hingga 0.00% pada usia 55 tahun/ *3.00% per annum up to age 35 then decrease linearly to 0.00% at age 55*	3.00% per tahun sampai dengan usia 35 tahun kemudian menurun linier hingga 0.00% pada usia 55 tahun/ *3.00% per annum up to age 35 then decrease linearly to 0.00% at age 55*	*Turnover rate*
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	*Normal retirement age*
Metode penilaian aktuaria	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Actuarial valuation method*

Kementerian BUMN

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

Imbalan pascakerja / ***Post-employment benefits***

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of post-employment benefits liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	63,484	61,893	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	5,485	7,590	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(20,188)	(8,145)	*Past service cost*
Beban bunga	3,050	3,864	*Interest expense*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	670	137	*Experience adjustment - on obligation*
Imbalan yang dibayar	(726)	(2,885)	*Benefit paid*
	51,775	62,454	
Penyesuaian aktuarial	-	1,030	*Actuarial adjustment*
	51,775	63,484	

Imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The post-employment benefits recognised in the consolidated statement of profit or loss are as follows:

	2023	2022	
Biaya jasa kini	5,485	7,590	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	(20,188)	(8,145)	*Past service cost*
Selisih imbalan kerja yang dicatat pada beban	-	137	*Excess benefits payment*
Program penyelesaian	-	-	*Settlement program*
Biaya bunga	3,049	3,864	*Interest expense*
	(11,654)	3,446	

Jumlah yang diakui pada laba rugi komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in other comprehensive income are as follows:

	2023	2022	
Perubahan asumsi keuangan	1,852	-	*Change in financial assumption*
Penyesuaian pengalaman kewajiban	(1,182)	(76)	*Experience adjustment on obligation*
Kerugian aktuarial	-	1,106	*Actuarial Loss*
	670	1,030	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 13,22 (2022: 13,70).

The weighted average duration of the defined post-employment benefit liabilities at 31 December 2023 are 13.22 (2022: 13.70).

kementerian BUMN

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

Imbalan pascakerja (lanjutan) / ***Post-employment benefits*** *(continued)*

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits is as follows:

	2023	2022	
Dalam 1 tahun	1,157	1,189	*Within 1 year*
Antara 2 sampai 5 tahun	29,622	30,513	*Between 2 and 5 years*
Antara 6 sampai 10 tahun	34,371	50,481	*Between 6 and 10 years*
Lebih dari 10 tahun	266,316	322,901	*More than 10 years*

Sensitivitas liabilitas imbalan pascakerja untuk perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The sensitivity of the post-employment benefit liabilities to changes in the significant actuarial assumptions are as follows (unaudited):

	31 Desember/*December* 2023 — Dampak atas liabilitas imbalan pascakerja/ *Impact on post-employment benefit liabilities*			
	Perubahan asumsi/ *Changes in assumptions*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumptions*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumptions*	
Tingkat diskonto	1%	(3,807)	4,314	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	4,660	(4,176)	*Future salary increment rate*

	31 Desember/*December* 2022 — Dampak atas liabilitas imbalan pascakerja/ *Impact on post-employment benefit liabilities*			
	Perubahan asumsi/ *Changes in assumptions*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumptions*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumptions*	
Tingkat diskonto	1%	(5,171)	5,895	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	6,145	(5,481)	*Future salary increment rate*

Imbalan kerja jangka panjang lainnya / ***Other long-term employee benefit***

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of other long-term employee benefit liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	27,398	23,824	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	4,141	3,702	*Current service cost*
Beban bunga	1,789	1,688	*Interest expense*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Perubahan asumsi keuangan	848	(383)	*Change in financial assumption -*
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(290)	359	*Experience adjustment - on obligation*
Imbalan yang dibayar	(3,224)	(1,792)	*Benefits paid*
	30,662	27,398	

Kementerian BUMN

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian terdiri dari:

25. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES* *(continued)*

Other long-term employee benefit *(continued)*

Other long-term employee benefit liabilities recognised in the consolidated statement of profit or loss comprised of:

	2023	2022	
Biaya jasa kini	4,141	3,702	*Current services cost*
Biaya bunga	1,789	1,688	*Interest expense*
Pengakuan kembali yang diakui selama tahun berjalan	558	(24)	*Remeasurements recognised during the year*
	6,488	5,366	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 10,43 (2022: 10,46)

The weighted average duration of the other long-term employee benefit liabilities at 31 December 2023 are 10.43 (2022:10.46)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan kerja jangka panjang lainnya yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long-term employee benefit is as follows:

	2023	2022	
Dalam 1 tahun	8,155	3,101	*Within 1 year*
Antara 2 sampai 5 tahun	11,722	15,224	*Between 2 and 5 years*
Antara 6 sampai 10 tahun	30,814	25,613	*Between 6 and 10 years*
Lebih dari 10 tahun	101,780	88,293	*More than 10 years*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The sensitivity of the other long-term employee benefit liabilities to changes in the weighted principal assumption is as follows (unaudited):

	31 Desember/*December* 2023			
	Dampak atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on other long-term employee benefit liabilities*			
	Perubahan asumsi/ *Changes in assumptions*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumptions*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumptions*	
Tingkat diskonto	1%	(2,366)	2,715	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	2,862	(2,548)	*Future salary increment rate*

	31 Desember/*December* 2022			
	Perubahan asumsi/ *Changes in assumptions*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumptions*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumptions*	
Tingkat diskonto	1%	(1,425)	1,603	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	1,789	(1,618)	*Future salary increment rate*

Kementerian BUMN

26. EKUITAS / *26. EQUITY*

Berikut ini rincian modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Below are the details of issued and fully paid capital as at 31 December 2023 and 2022:

	Jenis saham/ *Type of shares*	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*	
Pemerintah Republik Indonesia	Seri A Dwiwarna/ *Series A Dwiwarna*	1	0.000009%	1	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Seri B/*Series B*	10,638,732	99.999991%	10,638,732	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
		10,638,733	100%	10,638,733	

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero) Nomor 25 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjarwo, S.H., M.H., tanggal 24 Februari 2020, badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo berubah menjadi Perseroan Terbatas dan telah mendapatkan pengesahan pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0011484.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Perubahan ini mengakibatkan susunan saham dari yang sebelumnya tidak terbagi atas saham menjadi sebagai berikut:

1. Sebanyak 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna bernominal Rp 1.365.160 (jumlah penuh) (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu 56erratus enam puluh Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
2. Sebanyak 7.638.732 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar Saham Seri B dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp 7.638.732.000.000 (tujuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Based on the Deed of Establishment of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero) No. 25 made before Notary Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjarwo, S.H., M.H., dated 24 February 2020, the legal public entity Jaminan Kredit Indonesia or Jamkrindo was changed to a Limited Company and has been agreed by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0011484.AH.01.01 Year 2020 dated 24 February 2020 regarding Ratification of the Establishment of a Limited Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). This change resulted in the composition of the shares from previously not divided into shares to become as follows:

1. *Amounted to 1 (one) Series A Dwiwarna share with a nominal value of Rp 1,365,160 (full amount) (one million three hundred sixty five thousand one hundred and sixty Rupiah) is owned by the Republic of Indonesia;*
2. *Amounted to 7,638,732 (seven million six hundred thirty eight thousand seven hundred and thirty two) Series B Shares with each share having a nominal value of Rp 1,000,000 (one million Rupiah), therefore the total is Rp 7,638,732,000,000 (seven trillion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty two million Rupiah) owned by the Republic of Indonesia.*

Kementerian BUMN

26. EKUITAS (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 9 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjarwo, S.H., M.H., terjadi pengalihan saham Seri B dari yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia menjadi dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sehingga terjadi perubahan badan hukum dari Persero menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028854.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0181758 tanggal 9 April 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0181759 tanggal 9 April 2020. Perubahan ini mengakibatkan susunan saham menjadi sebagai berikut:

1. Sebanyak 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna bernominal Rp 1.365.160 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
2. Sebanyak 7.638.732 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar Saham Seri B dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp 7.638.732.000.000 (tujuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Setoran modal

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham No. S-101/MBU/02/2021 dan No. 002//BPUI/01/2021 yang dinotarisasi dengan Akta Notaris Hadijah, S.H., M.P.A., Nomor 10 tanggal 08 Maret 2021, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan Perusahaan sebesar 3.000.000 lembar saham dengan jumlah nominal Rp 3.000.000. Saham baru sebanyak 3.000.000 lembar saham ini telah diterbitkan dan dibayar penuh oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-051492 tertanggal 09 Maret 2021. Perubahan ini mengakibatkan susunan saham menjadi sebagai berikut:

1. Sebanyak 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna bernominal Rp 1.365.160 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;

26. *EQUITY* *(continued)*

Based on the Deed of Resolution of the Shareholders of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia regarding the Amendment to the Articles of Association No. 2 dated 9 April 2020 which was made before Notary Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjarwo, S.H., M.H., there was a transfer of Series B shares from those previously owned by the Republic of Indonesia to be owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) resulting in a change of legal entity from (Persero) to Limited Company. This amendment has been agreed for amendments to the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights through the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-0028854.AH.01.02. Year 2020 dated 9 April 2020 regarding Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Company and Letter of Acceptance of Notification of Amendments to Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0181758 dated 9 April 2020 and Letter of Acceptance of Notification of Changes in Company Data Number AHU-AH.01.03-0181759 dated 9 April 2020. This change resulted in the composition of the shares to become as follows:

1. *Amounted to 1 (one) Series A Dwiwarna Share with a nominal value of Rp 1,365,160 (one million three hundred sixty five thousand one hundred and sixty Rupiah) is owned by the Republic of Indonesia;*
2. *Amounted to 7,638,732 (seven million six hundred thirty eight thousand seven hundred and thirty two) Series B Shares with each share having a nominal value of Rp 1,000,000 (one million Rupiah), therefore the total is Rp 7,638,732,000,000 (seven trillion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty two million Rupiah) is owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).*

Paid-in capital

Based on Resolution of Shareholders No. S-101/MBU/02/2021 and No. 002//BPUI/01/2021 which notarised by Notarial Deed of Hadijah, S.H., M.P.A., No. 10 dated 08 March 2021, the shareholders approved the increase of the Company's share capital of 3,000,000 shares with the nominal value of Rp3,000,000. The issuance of 3,000,000 new shares has been issued and fully paid by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-AH.01.03-051492 dated 09 March 2021. This change resulted in the composition of the shares to be as follows:

1. *Amounted to 1 (one) Series A Dwiwarna Share with a nominal value of Rp 1,365,160 (one million three hundred sixty five thousand one hundred and sixty Rupiah) is owned by the Republic of Indonesia;*

26. EKUITAS (lanjutan)

Setoran modal (lanjutan)

2. Sebanyak 10.638.732 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar Saham Seri B dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp 10.638.732.000.000 (sepuluh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Pembagian dividen

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 18 Mei dan 11 April 2022 nomor S-MBU/05/2022 dan 3/BPUI/04/2022 serta tanggal 2 November dan 22 Desember 2022 nomor SK-293/MBU/12/2022 dan 31/BPUI/11/2022 tentang "Persetujuan Laporan Tahun dan Pengesahaan Laporan Keuangan PT Jamkrindo Tahun Buku 2020 dan 2021", pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp 342.099.669.901 (nilai penuh) dan Rp 799.366.450.530 (nilai penuh) yang berasal dari hasil operasi tahun 2020 dan 2021. Dividen tersebut telah dibayar pada tanggal 23 Juni 2022 dan 29 Desember 2022.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2023 nomor B.1368/EKT/DIRUT/RUPS/VI/2023 tentang "Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022", pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp 959.876.206.648 (nilai penuh) yang berasal dari hasil operasi tahun 2022. Dividen tersebut telah dibayar pada tanggal 14 Agustus 2023.

***26. EQUITY** (continued)*

***Paid-in capital** (continued)*

2. Amounted to 10,638,732 (ten million six hundred thirty eight thousand seven hundred and thirty two) Series B Shares with each share having a nominal value of Rp 1,000,000 (one million Rupiah), therefore the total is Rp 10,638,732,000,000 (ten trillion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty two million Rupiah) is owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Dividend distribution

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder on 18 May and 11 April 2022 S-MBU/05/2022 and 3/BPUI/04/2022 and 2 November and 22 December 2022 No. SK-293/MBU/12/2022 and 31/BPUI/11/2022 regarding "Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statement PT Jamkrindo Year 2020 and 2021", the shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp 342,099,669,901 (full amount) and Rp 799,366,450,530 (full amount) from 2020 and 2021 operating result. The dividend was paid on 23 June 2022 and 29 December 2022.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder on 27 June 2023 No. B.1368/EKT/DIRUT/RUPS/VI/2023 regarding "Approval of Annual Report and Ratification of Consolidated Financial Statements PT Jamkrindo Year 2022", the shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp 959,876,206,648 (full amount) from 2022 operating result. The dividend was paid on 14 August 2023.

27. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Perubahan kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Saldo awal	1,000	692	*Beginning balance*
Bagian kepentingan non-pengendali atas laba komprehensif Entitas Anak	(154)	308	*Comprehensive income of Subsidiary to non-controlling interests*
Saldo akhir	846	1,000	*Ending balance*

27. NON-CONTROLLING INTEREST

Movements in the non-controlling interests' share in the net assets of the Subsidiary are as follows:

28. IMBAL JASA PENJAMINAN BRUTO

	2023	2022	
Kredit Usaha Rakyat	4,214,420	3,875,941	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	1,407,622	247,647	*Productive*
PEN	798,201	907,415	*PEN*
Konsumtif	209,409	521,217	*Consumptive*
Suretyship	109,048	89,568	*Suretyship*
	6,738,700	5,641,788	

28. GROSS GUARANTEE FEE INCOME

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

Kementerian BUMN

29. IMBAL JASA *KAFALAH* BRUTO / *29. GROSS KAFALAH FEES*

	2023	2022	
Entitas Anak			***Subsidiary***
Kredit Usaha Rakyat	226,590	79,513	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	19,433	5,228	*Productive*
PEN	17,909	171,452	*PEN*
Konsumtif	22,755	19,918	*Consumptive*
Suretyship	121,348	227,186	*Suretyship*
	408,035	503,297	

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

30. PREMI PENJAMINAN ULANG / *30. RE-GUARANTEE PREMIUMS*

	2023	2022	
Kredit Usaha Rakyat	483,551	443,307	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	94,207	35,080	*Productive*
PEN	80,694	141,437	*PEN*
Konsumtif	73,604	290,785	*Consumptive*
Suretyship	35,739	87,289	*Suretyship*
	767,795	997,898	

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

31. (PENURUNAN)/KENAIKAN IMBAL JASA *KAFALAH* YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN / *31. (DECREASE)/INCREASE IN UNEARNED KAFALAH FEES*

	2023	2022	
Entitas Anak			***Subsidiary***
Kredit Usaha Rakyat	(110,494)	(12,032)	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	(30)	17,969	*Productive*
PEN	44,561	84,524	*PEN*
Konsumtif	26,356	41,180	*Consumptive*
Suretyship	15,395	(3,018)	*Suretyship*
	(24,212)	128,623	

32. BEBAN KLAIM BRUTO / *32. GROSS CLAIM EXPENSES*

	2023	2022	
Kredit Usaha Rakyat	4,731,429	2,148,763	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	336,954	181,154	*Productive*
PEN	304,915	294,155	*PEN*
Konsumtif	245,505	389,523	*Consumptive*
Suretyship	338,220	223,737	*Suretyship*
	5,957,023	3,237,332	

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

Kementerian BUMN

33. (PENURUNAN)/KENAIKAN CADANGAN KLAIM / *33. (DECREASE)/INCREASE IN CLAIM RESERVES*

	2023	2022	
Kredit Usaha Rakyat	166,276	941,030	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	(675,596)	(1,799)	*Productive*
PEN	511,467	(62,041)	*PEN*
Konsumtif	(496,477)	498,699	*Consumptive*
Suretyship	(34,890)	64,423	*Suretyship*
	(529,220)	1,440,312	

34. KLAIM PENJAMINAN ULANG / *34. RE-GUARANTEE CLAIMS*

	2023	2022	
Kredit Usaha Rakyat	(476,250)	(201,078)	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	(64,542)	(60,036)	*Productive*
PEN	(3,690)	(3,216)	*PEN*
Konsumtif	(117,829)	(176,529)	*Consumptive*
Suretyship	(126,172)	(98,555)	*Suretyship*
	(788,483)	(539,414)	

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

35. PENDAPATAN KOMISI / *35. COMMISSION INCOME*

	2023	2022	
Kredit Usaha Rakyat	68,679	63,652	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	13,741	4,013	*Productive*
Konsumtif	7,099	29,534	*Consumptive*
Suretyship	3,132	1,785	*Suretyship*
	92,651	98,984	

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

36. BEBAN KOMISI / *36. COMMISSION EXPENSES*

	2023	2022	
Produktif	8,781	10,494	*Productive*
Konsumtif	22,071	77,541	*Consumptive*
Suretyship	486	1,670	*Suretyship*
	31,338	89,705	

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

Kementerian BUMN

37. PENDAPATAN SUBROGASI - BERSIH / *37. SUBROGATION INCOME - NET*

	2023	2022	
Kredit Usaha Rakyat	879,695	600,053	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	99,880	106,142	*Productive*
PEN	29,778	12,649	*PEN*
Konsumtif	17,466	77,130	*Consumptive*
Suretyship	32,598	39,398	*Suretyship*
	1,059,417	835,372	

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

38. PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH / *38. INVESTMENT INCOME - NET*

	2023	2022	
Bunga obligasi	710,447	551,470	*Bonds interest*
Bunga deposito	373,267	228,502	*Time deposits interest*
Pendapatan reksadana	51,515	18,616	*Mutual fund income*
Pendapatan sukuk	49,355	33,084	*Sukuk income*
Dividen	16,839	8,293	*Dividend*
Pendapatan *capital gain*	6,544	37,522	*Income on capital gain*
Efek beragun aset	298	1,051	*Asset-backed securities*
	1,208,265	878,538	
Beban amortisasi	(4,087)	(13,541)	*Amortization expenses*
Beban investasi	(10,663)	(20,002)	*Investment expenses*
	1,193,515	844,995	

Lihat Catatan 41 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 41 for details of related parties balances and transactions.

39. BEBAN USAHA / *39. OPERATING EXPENSES*

	2023	2022	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	898,640	51,849	*Provision for impairment losses*
Beban pegawai	647,384	527,711	*Employee expenses*
Umum dan administrasi	262,881	224,666	*General and administrative*
Pemasaran	131,470	124,907	*Marketing*
Outsourcing	84,018	75,512	*Outsourcing*
Depresiasi	69,272	59,214	*Depreciation*
Teknologi, sistem dan pengembangan usaha	64,553	50,313	*Technology, system and development*
Perjalanan dinas	39,703	33,927	*Business travel*
Kendaraan	21,654	19,194	*Transportation*
Sewa	18,830	15,257	*Rent*
Sosialisasi dan rekonsiliasi	14,792	21,963	*Socialization and reconciliation*
Lainnya	2,141	1,740	*Others*
	2,255,338	1,206,253	

Kementerian BUMN

40. PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH / *OTHER INCOME - NET*

	2023	2022	
Pendapatan jasa administrasi penjaminan	7,153	4,438	*Administration guarantee income*
Pendapatan jasa giro	6,838	7,087	*Interest income*
Pendapatan non-operasional	1,108	50,146	*Non-operating income*
	15,099	61,671	

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2023 were as follows:

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) adalah pemegang saham Grup. PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah entitas yang dimiliki dan dikendalikan secara tidak langsung oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Grup memiliki transaksi penjaminan ulang dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia.

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) is the shareholder of the Group. PT Reasuransi Nasional Indonesia is an entity which indirectly owned and controlled by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). The Group has re-guarantee transaction with PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

State-Owned Enterprises

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama Grup dan Badan Usaha Milik Negara dan Anak perusahaan. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Syariah, PT Pegadaian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Reasuransi Syariah Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT BRI Asuransi Indonesia, Perum Perumahan Nasional (Persero), PT Bank Raya Indonesia Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pegadaian - Unit Syariah, PT perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Bukit Asam Tbk,

Government of Republic of Indonesia is the ultimate shareholder of the Group and State-Owned Enterprises and Subsidiaries. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Syariah, PT Pegadaian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Reasuransi Syariah Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, PT BRI Insurance Indonesia, Perum Perumahan Nasional (Persero), PT Bank Raya Indonesia Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pegadaian – Sharia Unit, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Bukit Asam Tbk,

Kementerian BUMN

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (lanjutan)

PT perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT PP (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Mandiri Tunas Finance, PT BNI Multifinance, PT AXA Mandiri Financial Service, Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera, PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Istaka Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bahana TCW Investment Management, PT Danareksa (Persero), PT PNM Investment Management, PT Danareksa Investment Management, PT PP Presisi Tbk, PT BNI Asset Management, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Perkebunan Nusantara, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Propernas Griya Utama, Koperasi Warga Semen Gresik, PT Propernas Griya Utama dan PT Barata Indonesia (Persero) adalah entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Grup memiliki rekening giro, deposito wajib dan berjangka, surat berharga, deposito berjangka untuk tujuan tertentu, piutang penjaminan, piutang penjaminan ulang, piutang hasil investasi, utang reasuransi, utang klaim, imbal jasa *kafalah* bruto, premi penjaminan ulang bruto, beban klaim, klaim penjaminan ulang, beban komisi, pendapatan komisi, pendapatan *ujrah* penjaminan ulang, beban *ujrah*, pendapatan subrogasi, pendapatan investasi dan beban investasi di entitas-entitas tersebut. Grup memiliki obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Grup juga memiliki transaksi investasi pada efek-efek, piutang penjaminan, piutang hasil investasi, utang reasuransi, imbal jasa *kafalah* bruto, premi penjaminan ulang bruto dan pendapatan investasi dengan Badan Usaha Milik Negara dan Anak perusahaan.

Manajemen kunci

Manajemen kunci termasuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 61.983 (31 Desember 2022: Rp 55.616).

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2023 were as follows: (continued)

State-Owned Enterprises *(continued)*

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT PP (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Mandiri Tunas Finance, PT BNI Multifinance, PT AXA Mandiri Financial Service, Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera, PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Istaka Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bahana TCW Investment Management, PT Danareksa (Persero), PT PNM Investment Management, PT Danareksa Investment Management, PT PP Presisi Tbk, PT BNI Asset Management, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Perkebunan Nusantara, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Propernas Griya Utama, Koperasi Warga Semen Gresik, PT Propernas Griya Utama and PT Barata Indonesia (Persero) are entities which is owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia. The Group has bank accounts, statutory and time deposits, marketable securities, time deposits for certain purposes, guarantee fee receivables, re-guarantee receivables, investment income receivables, claim payables, gross kafalah fees, gross re-guarantee premiums, gross claims, re-guarantee claims, commission expense, commission income, re-guarantee commission income, ujrah expense, subrogation income, investment income, and investment expense in those entities. The Group also hold bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia. The Group also has transactions in marketable securities, guarantee fee receivables, investment receivables, re-guarantee payables, gross kafalah fees, re-guarantee expenses, gross re-guarantee premiums, investment income with the State-Owned Enterprises and Subsidiaries.

Key management

Key management includes Board of Commissioners and Board of Directors. Total compensation to the Group's Board of Commissioners and Board of Directors for the year ended 31 December 2023 amounted to Rp 61,983 (31 December 2022: Rp 55,616).

Lampiran Laporan Audit

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2023 were as follows: (continued)

	2023	2022	
Aset:			***Assets:***
Kas di bank			***Cash in banks***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	83,625	60,125	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23,170	71,337	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18,617	17,213	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9,769	4,703	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,813	6,992	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	1,053	328	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	717	134	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit*
PT Bank Mandiri Taspen	2	3	*PT Bank Mandiri Taspen*
	139,766	160,835	
Deposito wajib dan berjangka			***Statutory and time deposits***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,362,662	1,401,344	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,318,230	1,938,850	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	1,145,695	1,004,958	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	414,000	34,375	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	197,000	234,250	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	46,139	109,926	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15,500	98,650	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
	6,499,226	4,822,353	
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu			***Time deposits for certain purposes***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	755,139	709,689	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	421,000	269,000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200,000	500,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	125,140	125,140	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	3,094	3,094	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit*
	1,504,373	1,606,923	
Efek-efek			***Marketable securities***
Obligasi			***Bonds***
Pemerintah Republik Indonesia	6,575,038	4,835,046	*Government of the Republic of Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	300,000	300,000	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	275,971	130,079	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	268,277	115,000	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	200,000	200,000	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	119,094	55,000	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	90,000	100,050	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Angkasa Pura I (Persero)	59,913	60,337	*PT Angkasa Pura I (Persero)*
PT Pegadaian	52,000	102,000	*PT Pegadaian*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	43,000	43,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Permodalan Nasional Madani	25,000	37,127	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	25,000	45,000	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*

Kementerian BUMN

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (contined)*

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2023 were as follows: (continued)

	2023	2022	
Aset: (lanjutan)			***Assets:** (continued)*
Efek-efek (lanjutan)			***Marketable securities** (continued)*
Obligasi (lanjutan)			***Bonds** (continued)*
Perum Perumahan Nasional	25,000	25,000	*Perum Perumahan Nasional*
PT Mandiri Tunas Finance	25,000	25,000	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Pengelolaan Aset (Persero)	25,000	25,000	*PT Pengelolaan Aset (Persero)*
PT Bank Mandiri Taspen	20,000	20,000	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	10,113	10,294	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	10,063	10,363	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	10,000	10,000	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Waskita Beton Precast Tbk	-	1,717	*PT Waskita Beton Precast Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	10,602	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	20,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
	8,158,469	6,180,615	
Sukuk			***Sukuk***
Pemerintah Republik Indonesia	4,412,572	4,308,103	*Government of Republic of Indonesia*
PT Angkasa Pura I (Persero)	147,814	12,873	*PT Angkasa Pura I (Persero)*
PT Waskita Karya (Persero)	44,559	44,901	*PT Waskita Karya (Persero)*
PT Permodalan Nasional Madani	20,288	20,140	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Pegadaian (Persero)	14,000	14,000	*PT Pegadaian (Persero)*
	4,639,233	561,010	
Reksadana			***Mutual funds***
PT Bahana TCW Investment Management	609,567	100,750	*PT Bahana TCW Investment Management*
PT PNM Investment Management	253,506	262,955	*PT PNM Investment Management*
PT BRI Manajemen Investasi	95,494	-	*PT BRI Manajemen Investasi*
PT BNI Asset Management	77,163	84,928	*PT BNI Asset Management*
PT Mandiri Manajemen Investasi	5,493	5,808	*PT Mandiri Manajemen Investasi*
PT Danareksa Investment Management	-	106,569	*PT Danareksa Investment Management*
	1,041,223	561,01	
Saham			***Shares***
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	19,750	18,750	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16,268	13,399	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14,980	12,915	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	14,640	16,192	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	10,544	8,570	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	9,740	5,960	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	8,675	6,425	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8,554	7,398	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	7,586	7,824	*PT Semen Gresik (Persero) Tbk*
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	5,967	6,948	*PT Aneka Tambang (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5,229	5,670	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	3,382	4,832	*PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2,813	4,388	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
PT PP Presisi Tbk	1,864	2,903	*PT PP Presisi Tbk*
PT PP (Persero) Tbk	1,498	2,503	*PT PP (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya Gedung Tbk	1,185	2,235	*PT Wijaya Karya Gedung Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	930	1,452	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	456	1,511	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	-	3,468	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Waskita Beton Precast Tbk	-	1,659	*PT Waskita Beton Precast Tbk*
	134,061	135,002	

Kementerian BUMN

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(contined)*

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2023 were as follows: (continued)

	2023	2022	
Aset: (lanjutan)			***Assets:*** *(continued)*
Efek beragun aset			***Asset-backed securities***
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	3,063	6,122	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
	3,063	6,122	
Piutang imbal jasa penjaminan			***Guarantee fee receivables***
Pemerintah Republik Indonesia	1,663,631	1,775,450	*Government of Republic of Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,382,499	1,475,793	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	751,421	868,969	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	553,208	364,392	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15,634	3,260	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
	4,366,393	4,487,864	
Piutang penjaminan ulang			***Re-guarantee receivables***
PT Reasuransi Nasional Indonesia	453,973	60,689	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama	209,319	205,223	*PT Reasuransi Indoneisa Utama*
PT Reasuransi Syariah Indonesia	88,063	61,135	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
PT BRI Asuransi Indonesia	6,355	6,295	*PT BRI Asuransi Indonesia*
PT Asuransi Jiwasraya	4,914	4,525	*PT Asuransi Jiwasraya*
PT Tugu Reasuransi Indonesia	-	367	*PT Tugu Reasuransi Indonesia*
	762,624	338,234	
Piutang hasil investasi			***Investment income receivables***
Pemerintah Republik Indonesia	191,341	143,646	*Government of Republic of Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6,796	2,741	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	4,725	4,830	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3,029	2,263	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	2,655	2,700	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Permodalan Nasional Madani	2,288	393	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2,259	373	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2,059	958	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	1,422	1,434	*PT Bank Tabungan Negara Syariah*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1,167	503	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	606	510	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Pegadaian	524	596	*PT Pegadaian*
PT Angkasa Pura I (Persero)	420	420	*PT Angkasa Pura I (Persero)*
PT Pengelolaan Aset (Persero)	405	400	*PT Pengelolaan Aset (Persero)*
PT Mandiri Tunas Finance	392	-	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	261	392	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	225	232	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	187	208	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	185	285	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	154	151	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
Perum Pembangunan Rumah Nasional	134	128	*Perum Pembangunan Rumah Nasional*
Lainnya	243	1,560	*Others*
	221,477	164,723	
Jumlah aset dengan pihak berelasi	27,469,909	22,863,692	*Total assets with related parties*
Persentase terhadap jumlah aset	85.23%	81.63%	*Percentage of total assets*

Dokumen Kepemilikan BUMN

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2023 were as follows: (continued)

	2023	2022	
Liabilitas:			***Liabilities:***
Utang penjaminan ulang			***Re-guarantee payables***
PT Reasuransi Nasional Indonesia	625,497	163,366	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
PT Reasuransi Syariah Indonesia	6,102	29,117	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
Pemerintah Republik Indonesia	1,701	26,921	*Government of Republic of Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	-	1,696	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
	633,300	221,100	
Utang klaim			***Claim payables***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	67,013	45,456	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,112	391	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya Tbk	4,963	-	*PT Adhi Karya Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,855	3,092	*PT Bank Mandiri (Persero)Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	740	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	624	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Lainnya	32	4,187	*Others*
	79,975	54,490	
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi	713,275	275,590	*Total liabilities with related parties*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	3.78%	1.81%	*Percentage of total liabilities*
Pendapatan *kafalah*:			***Kafalah income:***
Imbal jasa *kafalah* bruto			***Gross kafalah fees***
Pemerintah Republik Indonesia	17,909	171,452	*Government of the Republic of Indonesia*
Persentase terhadap jumlah imbal jasa *kafalah* bruto	4.40%	34.07%	*Percentage of total gross kafalah fees*
Premi penjaminan ulang			***Re-guarantee premiums***
PT Reasuransi Nasional Indonesia	642,887	631,010	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
Pemerintah Republik Indonesia	76,693	114,613	*Government of Republic of Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	11,611	29,645	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Reasuransi Syariah Indonesia	4,376	96,147	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
PT Asuransi Binagriya Upakara	2,945	39,470	*PT Asuransi Binagriya Upakara*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	1,427	3,879	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
PT BRI Asuransi Indonesia	227	168	*PT BRI Asuransi Indonesia*
	740,166	914,932	
Persentase terhadap jumlah premi penjaminan ulang	96.40%	91.69%	*Percentage of total re-guarantee premiums*

Kementerian BUMN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2023 were as follows: (continued)

	2023	2022	
Beban klaim bruto			***Gross claim expenses***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,130,804	2,077,145	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia			*PT Bank Negara Indonesia*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	468,572	177,822	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
(Persero) Tbk	458,759	177,891	*(Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	96,987	122,476	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Permodalan Nasional Madani	84,787	37,976	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Mandiri Tunas Finance	43,620	-	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	36,404	82,824	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Pegadaian - Unit Syariah	14,393	28,982	*PT Pegadaian - Sharia Unit*
PT Pegadaian	13,944	56,217	*PT Pegadaian*
Bank Indonesia	7,470	5,600	*Bank Indonesia*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	7,461	6,576	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	7,156	1,349	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit*
Koperasi Pegawai	329	824	*Koperasi Pegawai*
Koperasi Warga Semen Gresik	272	452	*Koperasi Warga Semen Gresik*
Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera	-	21	*Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera*
	5,370,958	2,776,155	
Persentase terhadap jumlah beban klaim	90.16%	85.75%	*Percentage of total claim expenses*
Klaim penjaminan ulang			***Re-guarantee claims***
PT Reasuransi Nasional Indonesia	697,497	388,363	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
PT Reasuransi Syariah Indonesia	61,930	107,140	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	27,964	37,745	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	388	502	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
PT BRI *Insurance* Indonesia	60	-	*PT BRI Insurance Indonesia*
PT Asuransi Binagriya Upakara	-	157	*PT Asuransi Binagriya Upakara*
	787,839	533,907	
Persentase terhadap jumlah klaim penjaminan ulang	99.92%	98.98%	*Percentage of total re-guarantee claim expense*
Beban komisi			***Commission expenses***
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,444	32,074	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	244	498	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	204	423	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1	1	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	2,893	32,996	
Persentase terhadap jumlah beban komisi	9.23%	25.63%	*Percentage of total commission expenses*

Kementerian BUMN

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / ***41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*** *(continued)*

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2023 were as follows: (continued)

	2023	2022	
Pendapatan komisi			***Commission income***
PT Reasuransi Nasional Indonesia	(89,692)	(87,020)	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	(1,898)	(4,949)	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Binagriya Upakara	(440)	(5,908)	*PT Binagriya Upakara*
	(92,030)	(97,877)	
Persentase terhadap jumlah pendapatan komisi	99.33%	99.96%	*Percentage of total commission income*
Pendapatan subrogasi - bersih			**Subrogation income - net**
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	748,581	489,499	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	85,589	60,412	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	62,841	58,388	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Permodalan Nasional Madani	42,657	8,534	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Pegadaian	23,383	54,718	*PT Pegadaian*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	9,906	9,027	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Mandiri Tunas Finance	2,976	-	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Pegadaian - Unit Syariah	1,921	5,003	*PT Pegadaian - Sharia Unit*
PT Bank Syariah Indonesia	1,753	5,559	*PT Bank Syariah Indonesia*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	323	289	*PT Bank Tabungan Negara Syariah*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	301	55	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
Lainnya	111	166	*Others*
PT Reasuransi Nasional Indonesia	(13,075)	-	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
	967,267	691,650	
Persentase terhadap jumlah pendapatan subrogasi - bersih	91.30%	82.80%	*Percentage of total subrogation income - net*
Pendapatan investasi			***Investment income***
Pemerintah Republik Indonesia	647,670	462,215	*Government of Republic of Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	119,553	63,076	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	113,585	70,438	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	55,444	25,093	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	34,869	5,830	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT PNM Investment Management	26,681	23,903	*PT PNM Investment Management*
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	22,713	22,551	*PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21,113	14,006	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	18,000	3,205	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	14,510	2,362	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
PT Bahana TCW Investment Management	16,230	(13,503)	*PT Bahana TCW Investment Management*
PT Permodalan Nasional Madani	9,210	3,506	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	9,101	2,466	*Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Angkasa Pura I (Persero)	7,345	6,299	*PT Angkasa Pura I (Persero)*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6,564	3,029	*PT Bukit Asam (Persero) Tbk*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	6,445	4,438	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Pegadaian	6,050	5,263	*PT Pegadaian*
PT BNI Asset Management	4,670	(18,623)	*PT BNI Asset Management*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4,211	6,035	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3,720	3,965	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Perum Perumahan Nasional (Persero)	2,848	2,798	*Perum Perumahan Nasional (Persero)*
PT Mandiri Tunas Finance	2,375	2,368	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1,950	932	*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
PT Waskita Karya (Persero)	1,514	4,760	*PT Waskita Karya (Persero)*
PT Bank Mandiri Taspen	1,450	1,546	*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Semen Indonesia	1,012	106	*PT Semen Indonesia*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	890	892	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	838	1,461	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	825	1,864	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*

Dokumen Kementerian BUMN

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *41. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2023 were as follows: (continued)

	2023	2022	
Pendapatan investasi (lanjutan)			***Investment income** (continued)*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	671	370	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	353	311	*PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk*
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	278	136	*PT Aneka Tambang (Persero) Tbk*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	151	128	*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	1,095	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Danareksa (Persero)	-	1,948	*PT Danareksa (Persero)*
Lainnya	36	85	*Others*
PT Waskita Beton Precast Tbk	(10,732)	1,505	*PT Waskita Beton Precast Tbk*
PT Danareksa Investment Management	(7,819)	6,972	*PT Danareksa Investment Management*
PT Mandiri Manajemen Investasi	(315)	(191)	*PT Mandiri Manajemen Investasi*
	1,144,009	724,640	
Persentase terhadap jumlah pendapatan investasi	93.67%	82.48%	*Percentage of total investment income*

	2023	2022	
Beban investasi			***Investment expenses***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	(6,744)	(6,308)	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bahana TCW Investment Management	(2,259)	(2,469)	*PT Bahana TCW Investment Management*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	(1,361)	(608)	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
	(10,364)	(9,385)	
Persentase terhadap jumlah beban investasi	37.31%	46.92%	*Percentage of total investment expenses*

42. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN / *42. FINANCIAL GUARANTEE RISK*

Risiko utama yang dihadapi Grup dengan kontrak penjaminan adalah kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default risk* dan tingkat *non-performing financing* ("NPF") kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi. Selain itu, terdapat risiko atas perbedaan antara klaim aktual, pembayaran manfaat, dan tanggal klaim dari yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, besarnya nilai klaim, nilai klaim yang dibayarkan, dan perkembangan klaim jangka panjang selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan Grup adalah untuk memastikan bahwa cadangan cukup dibuat untuk menutupi kewajiban tersebut.

The principal risk the Group faces under guarantee contracts is the guarantee's failure to fulfill its obligations. This risk can be seen in the amount of default risk and the level of guarantee's non-performing financing ("NPF"), as well as the rate of return on subrogation receivables. In addition, there is a risk from the difference between actual claims, benefit payments, and claim dates from the one predicted previously. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid, and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Group is to ensure that sufficient reserves are made to cover those liabilities.

Eksposur risiko yang berkaitan dengan kontrak penjaminan diminimalisir dengan diversifikasi portofolio penjaminan kontrak dan wilayah geografis. Variabilitas risiko juga ditingkatkan dengan risiko seleksi yang bijak dan implementasi pedoman strategi *underwriting*, serta pengaturan program penjaminan ulang.

The risk exposure related to guarantee contracts is mitigated by diversification of guarantee contracts portfolio and geographical areas. The variability of risks is also improved by prudent risks selection and implementation of underwriting strategy guidelines, as well as re-guarantee program arrangements.

Operasional Grup didiversifikasi berdasarkan lini bisnis dan penyebaran geografis risiko. Pendekatan global untuk manajemen risiko memungkinkan Grup melakukan proses identifikasi dan seleksi risiko dalam menjamin kredit dengan eksposur risiko yg besar.

The Group's operations are diversified by line of business and the geographic spread of risk. A global approach to risk management allows the Group to underwrite and accept large guarantee accounts.

Kerahasiaan BUMN

42. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect, Productivity, Payment,* dan *Personality* dan 5C *(Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral)* yang harus diperhatikan. *Item* yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait. Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P dan 5C. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing terjamin atau sekelompok terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi. Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Proses bisnis penjaminan ulang yang dilakukan terkoordinasi oleh Kantor Pusat dilakukan sebagai bentuk *transfer risk*. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan beban penjaminan ulang. Penjaminan ulang yang digunakan oleh Grup harus memenuhi persyaratan pengalaman di bidang keuangan tertentu dan yang dimasukkan melalui proses reviu keuangan yang ketat agar mendapat persetujuan dari senior manajemen. Akibatnya penjaminan ulang hanya ditempatkan pada kelompok terpilih hanya dari Grup yang secara finansial paling aman dan berpengalaman dalam industri penjaminan ulang. Pembayaran klaim yang konsisten dan sesuai juga harus dipastikan. Selain kontrol internal, unit operasional Grup dan bidang fungsional akan ditinjau oleh tim audit Grup yang secara teratur melakukan audit operasional.

Eksposur Grup terhadap risiko konsentrasi penjaminan ini diatasi dengan beragam portofolio bisnis di berbagai lokasi dan industri.

42. *FINANCIAL GUARANTEE RISK* *(continued)*

To minimise the risk of the guarantee, in the credit guarantee process, risk identification is carried out using the 4P, which are Prospect, Productivity, Payment, and Personality and 5C (Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral). The items that must be considered for each of these aspects are adjusted to the characteristics of the credit to be guaranteed, and are described in the related guarantee system and procedures. The results of the risk identification process are then followed up with the determination of the guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In its implementation, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for each aspect of the 4P and 5C. Quantitative prediction is done with a scoring system. Based on the score determined the risk prediction of each guaranteed or a Group of guaranteed, or a new product.

Furthermore, to make a decision on whether a guarantee application can be approved or not, a committee meeting will be carried out. In accordance with the principle of prudence, the committee members consist of officials directly related to the guarantee activity (risk taker unit) and officials directly related to the cost consequences of potential risks (risk financing unit). With a decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected that decisions will be more objective and potential risk because decision-making errors can be minimised. Apart from being used to assist the guarantee decision-making process, the results of the risk analysis that have been carried out are also used as a basis for consideration in monitoring ongoing credit. For high-risk credit, credit monitoring is conducted more intensively.

Centrally-coordinated re-guarantee management facilitates appropriate risk transfer and efficient and cost-effective use of external re-guarantee markets. Reinsurers utilised by the Group must fulfill certain financial experience requirements and are put through a stringent financial review process in order to be approved by senior management personnel. As a result of these controls, re-guarantee is placed with a select Group of only the most financially secure and experienced companies in the re-guarantee industry. A consistent approach to reserving practices and the settlement of claims are also ensured. In addition to these internal controls, the Group's operating units and functional areas are subject to review by the corporate audit team that regularly carries out operational audits.

The Group's exposure to a concentration of guarantee risk is mitigated by a diverse portfolio of business written across a broad range of locations and industries.

42. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)

ANALISA EKSPOSUR

Pada tahun 2023 dan 2022, risiko penjaminan yang dihadapi oleh Grup diklasifikasikan berdasarkan *line of business* sebagai berikut:

42. *FINANCIAL GUARANTEE RISK (continued)*

EXPOSURE ANALYSIS

In 2023 and 2022, the Group's guarantee risks classified based on the class of businesses are as follows:

	2023				
	Beban klaim bruto/ *Gross claims*	Klaim penjaminan ulang/ *Re-guarantee claims*	Kenaikan/ (penurunan) cadangan klaim/ *Increase/ (decrease) in claim reserves*	Beban klaim - bersih/*Claim expenses - net*	
Kredit Usaha Rakyat	4,731,429	(476,250)	166,276	4,421,455	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	336,954	(64,542)	(675,596)	(403,184)	*Productive*
PEN	304,915	(3,690)	511,467	812,692	*PEN*
Konsumtif	245,505	(117,829)	(496,477)	(368,801)	*Consumptive*
Suretyship	338,220	(126,172)	(34,890)	177,158	*Suretyship*
	5,957,023	(788,483)	(529,220)	4,639,320	

	2022				
	Beban klaim bruto/ *Gross claims*	Klaim penjaminan ulang/ *Re-guarantee claims*	Kenaikan/ (penurunan) cadangan klaim/ *Increase/ (decrease) in claim reserves*	Beban klaim - bersih/*Claim expenses - net*	
Kredit Usaha Rakyat	2,148,763	(201,078)	941,030	2,888,715	*Kredit Usaha Rakyat*
Produktif	181,154	(60,036)	(1,799)	119,319	*Productive*
PEN	294,155	(3,216)	(62,041)	228,898	*PEN*
Konsumtif	389,523	(176,529)	498,699	711,693	*Consumptive*
Suretyship	223,737	(98,555)	64,423	189,605	*Suretyship*
	3,237,332	(539,414)	1,440,312	4,138,230	

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko manajemen modal

Tujuan Grup dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholders* lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional.

Grup memonitor *gearing ratio* yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.2/POJK.05/2017 tertanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. *Gearing ratio* adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.

43. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT*

Capital management risk

The Group's objective in managing its capital is to safeguard the Group's going concern ability in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

The Group monitors the gearing ratio which is calculated in accordance with Financial Services of Authority of the Republic of Indonesia Decree No. 2/POJK.05/2017 dated 11 January 2017 regarding The Business Operation of Guarantor Institution. Gearing ratio is the ratio between the total outstanding value of the Guarantee that is borne by itself with the net capital of the Guarantor at a certain time.

Kementerian BUMN

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko manajemen modal (lanjutan)

Gearing ratio penjaminan untuk usaha produktif ditetapkan paling tinggi 20 (dua puluh) kali dari ekuitas Grup dan *gearing ratio* total ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali dari ekuitas Grup.

Grup telah memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut (tidak diaudit).

Manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan antara lain risiko kredit dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko tersebut, mengelola posisi risiko, dan menentukan alokasi modal. Grup secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan dipasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Tujuan Grup adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Grup. Grup mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Manajemen risiko dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Direksi memberikan kebijakan tertulis atas manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk kebijakan tertulis yang mencakup area khusus, seperti risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, dan pemanfaatan instrumen keuangan. Risiko yang berasal dari instrumen keuangan yang dihadapi oleh Grup mengandung risiko keuangan, termasuk juga risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas.

(i) Risiko pasar

Grup menghadapi eksposur risiko pasar, yaitu risiko akibat dari menurunnya nilai suatu investasi karena kondisi pasar misalnya suku bunga. Risiko pasar berasal dari posisi terbuka yang terkait dengan produk suku bunga dan ekuitas, yang seluruhnya dipengaruhi oleh pergerakan pasar baik secara spesifik maupun umum, dan perubahan volatilitas tingkat suku bunga pasar atau harga seperti suku bunga, dan produk ekuitas.

43. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT* *(continued)*

Capital management risk *(continued)*

The gearing ratio for guarantees for productive businesses is set at a maximum of 20 (twenty) times the equity of the Group and the total gearing ratio is set at no higher than 40 (forty) times the equity of the Group.

The Group has fulfilled the requirements outlined in the regulation (unaudited).

Financial risk management

The Group's activities expose it to a variety of financial risks: credit risk and liquidity risk. The core functions of The Group's risk management are to identify all key risks for The Group, measure these risks, manage the risk positions, and determine capital allocations. The Group regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in the market, products, and best market practice.

The Group's aim is to achieve an appropriate balance between risk and return and minimise potential adverse effects on The Group's financial performance. The Group defines risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal and external factors.

Risk management is carried out under policies approved by Directors. The Directors provides written principles for overall risk management, as well as written policies covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, and use of the financial instruments. The risk arising from financial instruments to which the Group is exposed are financial risks, which include market risk, credit risk, and liquidity risk.

(i) Market risk

The Group takes on exposure to market risks exposure, which is the risk resulting from a decrease in the value of an investment due to market conditions, such as interest rates. Market risk arise from open positions in interest rate, and equity products, all of which are exposed to the general and specific market movements and changes in the level of volatility or market rates or prices such as interest rates, and equity products.

Kementerian BUMN

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(ii) Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar.

Grup tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Grup dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak terhadap laba rugi setelah pajak Grup untuk tahun berjalan.

(iii) Risiko tingkat bunga

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai suku bunga wajar adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Grup menghadapi dampak dari fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas. Marjin suku bunga bisa meningkat sebagai hasil dari perubahan tersebut namun juga dapat mengurangi kerugian ketika terdapat pergerakan yang tidak diharapkan. Direksi menetapkan batas atas tingkat ketidaksesuaian dari suku bunga *repricing* dan *value at risk* yang bisa dilakukan, yang dimonitor secara harian oleh divisi yang membidangi investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup tidak memiliki risiko tingkat suku bunga yang signifikan. Sebagian besar aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup tidak dikenakan bunga atau berbunga tetap, sehingga tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas.

(iv) Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian finansial akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Grup. Grup juga menghadapi risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada efek utang dan reksadana.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

(ii) Foreign exchange risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

The Group has no significant foreign exchange risks since the Group's transactions are performed using the Group's functional currency. As at 31 December 2023 and 2022, the Group has no financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Group's functional currency will not impact to the Group's current year profit or loss after tax.

(iii) Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Fair value interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group takes on exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on both its fair value and cash flow risks. Interest margins may increase as a result of such changes but may reduce losses in the event that unexpected movements arise. The Directors set limits on the level of mismatch of interest rate repricing and value at risk that may be undertaken, which is monitored daily by the investment division.

As at 31 December 2023 and 2022, the Group has no significant interest rate risk. Most of the Group's financial assets and financial liabilities are non-interest bearing or fixed interest rate, thus no significant exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on both fair value and cash flow risks.

(iv) Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Group's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Group. The Group is also exposed to other credit risks arising from investments in debt securities and mutual funds.

Lembar Pertama Audit

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(iv) Risiko kredit (lanjutan)

Risiko kredit merupakan salah satu risiko terbesar bagi Grup sehingga manajemen melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati. Manajemen dan pengendalian atas risiko kredit dipusatkan pada tim manajemen risiko kredit yang bertanggung jawab kepada Direksi. Penilaian risiko kredit atas suatu portofolio aset memerlukan estimasi-estimasi seperti kemungkinan terjadinya wanprestasi, rasio kerugian, dan korelasi wanprestasi antara lawan transaksi.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan (jika ada) hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).

Konsentrasi risiko instrumen keuangan dengan eksposur risiko kredit

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk aset keuangan:

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(iv) Credit risk (continued)

Credit risk is the one of the largest risk for the Group's business, therefore management carefully manages its exposure to credit risk. The credit risk management and control are centralised in a credit risk management team which reports to the Directors. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails estimations as to the likelihood of defaults occurring of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties.

Impairment allowances (if any) are recognised for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statement of financial position (based on objective evidence of impairment).

Concentration of risks of financial instruments with credit risk exposure

The following table presents the Group's maximum exposure to credit risk of financial assets:

	2023	2022	
Kas di bank - bersih	183,902	235,655	*Cash in banks - net*
Deposito wajib dan berjangka - bersih	7,233,120	5,451,788	*Statutory and time deposits - net*
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu - bersih	1,552,271	1,689,817	*Time deposits for certain purposes - net*
Efek-efek - bersih	14,560,967	11,788,477	*Marketable securities - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	2,737,976	3,474,500	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	582,178	242,025	*Re-guarantee payables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	224,895	166,807	*Investment income receivables - net*
Aset lain-lain - bersih	4,282	39,026	*Other assets - net*
	27,079,591	23,088,095	

a) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit maksimum Grup pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

a) Industry sectors

The following table breaks down the Group's maximum credit exposure at carrying amounts, as categorised by the industry sectors.

	31 Desember/*December* 2023				
	Pemerintah/ *Government*	Lembaga keuangan/ *Financial institution*	Lain-lain/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Kas di bank	-	183,906	-	183,906	*Cash in banks*
Deposito wajib dan berjangka	-	7,233,297	-	7,233,297	*Statutory and time deposits*
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	-	1,552,273	-	1,552,273	*Time deposits for certain purposes*
Efek-efek	10,987,610	3,129,033	445,715	14,562,358	*Marketable securities*
Piutang imbal jasa penjaminan	1,663,631	3,101,070	-	4,764,701	*Guarantee fee receivables*
Piutang penjaminan ulang	-	851,785	-	851,785	*Re-guarantee receivables*
Piutang hasil investasi	191,422	30,161	3,393	224,976	*Investment income receivables*
Aset lain-lain	-	56,442	33,857	90,299	*Other assets*
	12,842,663	16,137,967	482,965	29,463,595	
Cadangan kerugian penurunan nilai				(2,384,004)	*Allowance for impairment losses*
				27,079,591	

Kementerian

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(iv) Risiko kredit (lanjutan)

a) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit maksimum Grup pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan sektor industri. (lanjutan)

***43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***(iv) Credit risk** (continued)*

***a) Industry sectors** (continued)*

The following table breaks down the Group's maximum credit exposure at carrying amounts, as categorised by the industry sectors. (continued)

	31 Desember/*December* 2022				
	Pemerintah/ *Government*	Lembaga keuangan/ *Financial institution*	Lain-lain/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Kas di bank	-	235,668	-	235,668	*Cash in banks*
Deposito wajib dan berjangka	-	5,451,815	-	5,451,815	*Statutory and time deposits*
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	-	1,689,823	-	1,689,823	*Time deposits for certain purposes*
Efek-efek	9,157,175	2,347,372	284,841	11,789,388	*Marketable securities*
Piutang imbal jasa penjaminan	703,655	3,975,360	-	4,679,015	*Guarantee fee receivables*
Piutang penjaminan ulang	-	431,006	-	431,006	*Re-guarantee receivables*
Piutang hasil investasi	143,660	17,353	5,808	166,821	*Investment income receivables*
Aset lain-lain	-	81,476	48,444	129,920	*Other assets*
	10,004,490	14,229,873	339,093	24,573,456	
Cadangan kerugian penurunan nilai				(1,485,361)	*Allowance for impairment losses*
				23,088,095	

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Direksi yakin akan kemampuan untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum.

The table above represents the maximum exposure of credit risk to the Group as at 31 December 2023 and 2022. The Directors are confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk.

b) Kualitas kredit dari aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

b) Credit quality of financial assets

As at 31 December 2023 and 2022, credit risk exposure relating to financial assets are divided as follows:

	31 Desember/*December* 2023				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Kas di bank	183,906	-	-	183,906	*Cash in banks*
Deposito wajib dan berjangka	7,233,297	-	-	7,233,297	*Statutory and time deposits*
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	1,552,273	-	-	1,552,273	*Time deposits for certain purposes*
Efek-efek	14,294,754	-	267,604	14,562,358	*Marketable securities*
Piutang imbal jasa penjaminan	22,615	3,900,095	841,991	4,764,701	*Guarantee fee receivables*
Piutang penjaminan ulang	-	-	851,785	851,785	*Re-guarantee receivables*
Piutang hasil investasi	224,976	-	-	224,976	*Investment income receivables*
Aset lain-lain	-	4,282	86,017	90,299	*Other assets*
	23,511,821	3,904,377	2,047,397	29,463,595	
Cadangan kerugian penurunan nilai				(2,384,004)	*Allowance for impairment losses*
				27,079,591	

Kementerian BUMN

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(iv) Risiko kredit (lanjutan)

b) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas: (lanjutan)

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

(iv) Credit risk *(continued)*

b) Credit quality of financial assets *(continued)*

As at 31 December 2023 and 2022, credit risk exposure relating to financial assets are divided as follows: (continued)

	31 Desember/*December* 2022				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Kas di bank	235,668	-	-	235,668	*Cash in banks*
Deposito wajib dan berjangka	5,451,815	-	-	5,451,815	*Statutory and time deposits*
Deposito di bank yang dibatasi penggunaannya	1,689,823	-	-	1,689,823	*Time deposits for certain purposes*
Efek-efek	11,725,986	-	63,401	11,789,387	*Marketable securities*
Piutang imbal jasa penjaminan	74,965	3,847,528	756,522	4,679,015	*Guarantee fee receivables*
Piutang penjaminan ulang	431,006	-	-	431,006	*Re-guarantee receivables*
Piutang hasil investasi	166,821	-	-	166,821	*Investment income receivables*
Aset lain-lain	-	39,026	90,895	129,921	*Other assets*
	19,776,084	3,886,554	910,818	24,573,456	
Cadangan kerugian penurunan nilai				(1,485,361)	*Allowance for impairment losses*
				23,088,095	

(v) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat dari ketidakmampuan Grup memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Ketidakmampuan Grup memenuhi kewajibannya diakibatkan karena pembayaran manfaat/klaim pemegang sertifikat penjaminan, kebutuhan kas dari komitmen kontraktual atau arus keluar kas lainnya, seperti utang yang telah jatuh tempo. Arus kas keluar ini akan menghabiskan sumber daya kas yang tersedia untuk aktivitas operasional, perdagangan dan investasi. Dalam suatu keadaan yang ekstrim, kekurangan likuiditas dapat mengarah pada penurunan posisi keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian dan penjualan aset atau ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen kepada pemegang sertifikat penjaminan.

Risiko ini melekat pada semua operasi penjaminan dan bisa dipengaruhi oleh kejadian spesifik secara institusional dan pasar secara luas termasuk, namun tidak terbatas pada, transaksi kredit, aktivitas merger dan akuisisi, goncangan sistemik dan bencana alam. Grup melakukan evaluasi dan menelaah struktur laporan posisi keuangan dan melakukan analisis serta pengukuran risiko likuiditas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko.

(v) Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet its obligations when due as a result of policyholder benefit/claim payment, cash requirements from contractual commitments or other cash outflows, such as debt maturities. Such outflows would deplete available cash resources for operational, trading and investment activities. In extreme circumstances, lack of liquidity could result in reductions in the consolidated financial statement of financial position and sales of assets or inability to fulfill policyholder commitment.

The risk is inherent in all insurance operations and can be affected by a range of institution-specific and market-wide events including, but not limited to, credit events, merger and acquisition activity, systemic shocks and natural disasters. The Group evaluates and reviews its statements of financial position structure, by analysing and measuring liquidity risk based on its Risk Management Guideline Standard..

Kementerian BUMN

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(v) Risiko likuiditas (lanjutan)

Profil jatuh tempo ini didasarkan pada jangka waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Selain itu, jika terdapat kebutuhan akan likuiditas, efek-efek dan aset lancar dapat dijual. Kebijakan Grup sehubungan dengan *maturity gap* antara aset dan liabilitas moneter adalah menetapkan *gap limit* yang disesuaikan dengan kemampuan Grup untuk memperoleh likuiditas.

Tabel di bawah ini menunjukan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pada *undiscounted cash flows*.

***43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***(v) Liquidity risk** (continued)*

This maturity profile is based on the remaining period to the contractual maturity date. In addition, if the Group encounters liquidity needs, marketable securities and current assets could be liquidated. The Group's policy with regards to the maturity gap between the monetary assets and liabilities is to determine a gap limit which is adjusted to the Group ability to obtain immediate liquidity.

The tables below show the remaining contractual maturities of the Group's financial liabilities based on undiscounted cash flows.

	31 Desember/*December* 2023				
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	**Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year***	**Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
Utang klaim	81,372	-	-	81,372	*Claim payables*
Utang penjaminan ulang	633,300	-	-	633,300	*Re-guarantee payables*
Liabilitas kontrak jaminan Keuangan	2,792,093	-	12,419,373	15,211,466	*Liabilities for financial guarantee contract*
Akrual dan utang lain-lain	1,486,701	48,713	-	1,535,414	*Accruals and other payables*
	4,993,466	48,713	12,419,373	17,461,552	

	31 Desember/*December* 2022				
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	**Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year***	**Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	
Utang klaim	58,074	-	-	58,074	*Claim payables*
Utang penjaminan ulang	221,100	-	-	221,100	*Re-guarantee payables*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	2,008,482	-	10,195,798	12,204,280	*Liabilities for financial guarantee contract*
Akrual dan utang lain-lain	959,027	10,731	-	969,758	*Accruals and other payables*
	3,246,683	10,731	10,195,798	13,453,212	

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, semua liabilitas Grup tidak mengandung tingkat suku bunga sehingga tidak ada perhitungan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

As at 31 December 2023 and 2022, all the Group's liabilities did not consist of interest rate therefore no disclosure on contractual undiscounted cash flows.

(vi) Manajemen risiko permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholder* lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional.

(vi) Capital risk management

The Group's objectives when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

Kementerian BUMN

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(vi) Manajemen risiko permodalan (lanjutan)

Grup telah memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut.

(vii) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Semua aset keuangan yang diklasifikasikan dalam pinjaman yang diberikan, piutang, atau liabilitas keuangan, diukur dengan amortisasi. Aset tersebut mempunyai jatuh tempo jangka pendek, sehingga nilai tercatatnya dapat menjadi perkiraan yang layak atas nilai wajarnya. Oleh karena itu, nilai wajar untuk aset dan liabilitas yang diukur melalui laporan laba rugi adalah sama dengan nilai tercatatnya.

Grup menyajikan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

a. Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas;

b. Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

c. Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*unobservable inputs*).

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar

Tabel berikut menyajikan aset keuangan Grup yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

***43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***(vi) Capital risk management** (continued)*

The Group has fulfilled the requirements outline in the regulation.

(vii) Fair value of financial assets and liabilities

All financial assets classified as loans, receivables or financial liabilities are measured by amortization. These assets have short term maturities, so their carrying amount is a reasonable approcimation of their fair value. Therefore, the fair value of the assets and liabilities measured through profit and loss is the same as their carrying amount.

The Group presents the fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:

a. Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for associated assets or liabilities;

b. Level 2
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and

c. Level 3
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Financial instruments measured at fair value

The following tables show the Group's financial assets that are measured at fair value as at 31 December 2023 and 2022:

	31 Desember/*December* 2023					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset						***Assets***
Efek-efek	8,898,584	180,772	8,783,190	570,986	9,534,948	*Marketable securities*

	31 Desember/*December* 2022					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset						***Assets***
Efek-efek	7,082,681	186,817	5,615,274	489,253	6,291,344	*Marketable securities*

Kementerian BUMN

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(vii) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Tabel berikut menyajikan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar yang dimiliki oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

(vii) Fair value of financial assets and liabilities *(continued)*

Financial instruments not measured at fair value

The table below summarises the Group's financial assets and liabilities that are not measured at fair value as at 31 December 2023 and 2022.

	31 Desember/*December* 2023		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan			***Financial assets***
Kas di bank - bersih	183,902	183,902	*Cash in banks - net*
Deposito wajib dan berjangka - bersih	7,233,120	7,233,120	*Statutory and time deposits - net*
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu - bersih	1,552,271	1,552,271	*Time deposits for certain purposes - net*
Efek-efek - bersih	5,210,173	5,210,173	*Marketable securities - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	2,737,976	2,737,976	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	582,178	582,178	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	224,895	224,895	*Investment income receivables - net*
Aset lain-lain - bersih	4,282	4,282	*Other assets - net*
	17,728,797	17,728,797	
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Utang klaim	81,372	81,372	*Claim payables*
Utang penjaminan ulang	633,300	633,300	*Re-guarantee payables*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	15,211,466	15,211,466	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Akrual dan utang lain-lain	1,535,414	1,535,414	*Accruals and other payables*
	17,461,552	17,461,552	

	31 Desember/*December* 2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan			***Financial assets***
Kas di bank - bersih	235,655	235,655	*Cash in banks - net*
Deposito wajib dan deposito berjangka - bersih	5,451,788	5,451,788	*Statutory deposits and time deposits - net*
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu - bersih	1,689,817	1,689,817	*Time deposits for certain purposes - net*
Efek-efek - bersih	5,690,442	5,690,442	*Marketable securities - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	3,474,500	3,474,500	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	242,025	242,025	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	166,807	166,807	*Investment income receivables – net*
Aset lain-lain – bersih	39,026	39,026	*Other assets - net*
	16,990,060	16,990,060	
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Utang klaim	58,074	58,074	*Claim payables*
Utang penjaminan ulang	221,100	221,100	*Re-guarantee payables*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	12,204,280	12,204,280	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Akrual dan utang lain-lain	969,758	969,758	*Accruals and other payables*
	13,453,212	13,453,212	

Salinan Peraturan BUMN

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Semua aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan pinjaman yang diberikan dan piutang serta liabilitas keuangan yang diukur melalui biaya yang diamortisasi mempunyai jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset yang bukan merupakan aset keuangan mempunyai jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan yang bervariasi sesuai dengan jatuh tempo aset tersebut.

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

All financial assets classified as financial assets at fair value through profit or loss, financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and loans and receivables and financial liabilities at amortized cost have maturities of less than or equals 12 months. Financial assets classified into held-to-maturity financial assets and assets which are not financial assets have maturities of more than 12 months which vary according to the maturity of the asset.

44. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Transaksi non-kas terkait aktivitas investasi:

44. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Non-cash transactions arising from investing activities:

	2023	2022	
Pembelian aset tetap melalui utang usaha	23,565	-	*Acquisition of fixed assets through trade payables*
Pembelian aset takberwujud melalui utang usaha	47,457	13,584	*Acquisition of intangible assets through trade payables*
Penambahan aset hakguna aset melalui liabilitas sewa	65,277	30,729	*Acquisition of right-of-use assets through lease liabilities*
	686,139	715,196	

45. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan interpretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperbolehkan.

45. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants ("DSAK-IAI") issued several new standards, amendments and interpretations but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2023 are as follows:

- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" insurance contract regarding long-term liabilities with the covenant;*
- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current; and*
- *Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.*

The above standards will be effective on 1 January 2024 and early adoption is permitted.

- *SFAS 74: "Insurance Contract"; and*
- *Amendment of SFAS 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.*

The above standards will be effective on 1 January 2025 and early adoption is permitted.

Kementerian BUMN

45. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh DSAK-IAI.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan kosolidasian.

45. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

Beginning on 1 January 2024, references to the individual SFAS and ISAKs will be changed as published by DSAK-IAI.

As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the consolidated financial statements.

46. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Dalam proses penyusunan laporan keuangan pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Manajemen melakukan penyajian kembali pada laporan arus kas terdahulu yang terkait dengan:

1. Klasifikasi deposito *on call* dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari tiga bulan atau kurang yang tidak dimasukkan sebagai komponen setara kas dalam laporan arus kas konsolidasi dan laporan arus kas entitas induk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Perubahan klasifikasi ini ini menyebabkan saldo kas dan setara kas awal tahun (1 Januari 2022) dan saldo kas akhir tahun (31 Desember 2022) pada laporan arus kas konsolidasi dan entitas induk kurang catat masing-masing sebesar Rp6.093.948 dan Rp3.305.558.

2. Presentasi penerimaan kas dari penjualan instrumen investasi dan pembayaran kas atas pembelian instrumen investasi pada arus kas dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi pada laporan arus kas konsolidasi dan laporan arus kas entitas induk. Perubahan klasifikasi ini menyebabkan saldo arus pembayaran klaim, arus kas penerimaan investasi dan arus kas penjualan/pelepasan investasi pada laporan arus kas konsolidasi dan entitas induk kurang catat masing-masing sebesar Rp147.051, Rp2.392.248 dan Rp1.003.627.

Manajemen telah mengoreksi presentasi tersebut dan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah disajikan kembali.

46. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

In the process of preparing the financial statements as of 31 December 2023, Management restates the financial statement in the prior year related with presentation on cash flow from investment and cash equivalent balances.

1. *Classification of on-call deposits and time deposits with original maturities of three months or less which were not included as cash equivalent components in the consolidated cash flow statement and cash flow statement of the parent entity for the year ended 31 December 2022. This change in classification resulted in cash and cash equivalent balance at the beginning of the year (1 January 2022) and the cash balance at the end of the year (31 December 2022) in the consolidated and parent entity cash flow statements were understated by Rp6,093,948 and Rp3,305,558, respectively.*

2. *Presentation of cash receipts from the sale of investment instruments and cash payments for the purchase of investment instruments in cash flows from operating and investing activities in the consolidated cash flow statement and cash flow statement of the parent entity. This change in classification resulted in the balance of cash flow used for payment of claim, cash flow from investment receipts and cash flow from sale/disposal of investment in the consolidated and parent entity cash flows statements were understated by Rp147,051, Rp2,392,248, and Rp1,003,627, respectively.*

Management has corrected the presentation and in the context of preparing and presenting the consolidated cash flow statement for the year ending 31 December 2023, the cash flow report for the year ending 31 December 2022 has been restated.

Komersial Lap BUMN

46. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

46. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS *(continued)*

Dampak dari penyajian kembali laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The effect of these restatements on the consolidated statement of cash flows for the year ended 31 December 2022 is as follows:

	2022			
	Sebelum penyajian kembali/ *Before restatement*	Penyajian kembali/ *Restatement*	Setelah penyajian kembali/ *After restatement*	
LAPORAN ARUS KAS KOLIDASIAN				***CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pembayaran klaim	(3,139,062)	147,051	(2,992,011)	*Payment of claims*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penempatan investasi	(1,219,148)	(2,392,248)	(3,611,396)	*Purchase of investments*
Penjualan investasi	-	1,003,627	1,003,627	*Sale of investments*
Kenaikan/(penurunan) pada kas dan setara kas	61,579	(1,241,570)	(1,179,991)	*Increase/(decrease) in cash and cash equivalent*
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	175,418	7,450,541	7,625,959	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	236,997	6,208,971	6,445,968	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:*
Kas dan kas di bank	236,997	-	236,997	*Cash and cash in banks*
Deposito wajib dan berjangka	-	5,451,788	5,451,788	*Statutory and time deposits*
Deposito di bank yang dibatasi penggunaannya	-	757,183	757,183	*Time deposits for certain purposes*
	236,997	6,208,971	6,445,968	

	2022			
	Sebelum penyajian kembali/ *Before restatement*	Penyajian kembali/ *Restatement*	Setelah penyajian kembali/ *After restatement*	
LAPORAN ARUS KAS				***STATEMENT OF CASH FLOWS***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penempatan investasi	(1,337,925)	(2,044,785)	(3,382,710)	*Purchase of investments*
Penjualan investasi	-	972,368	972,368	*Sale of investments*
(Penurunan)/kenaikan pada kas dan setara kas	78,688	(1,072,417)	(993,729)	*(Decrease)/increase in cash and cash equivalent*
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	136,528	6,093,948	6,230,476	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	215,216	3,305,558	3,520,774	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:*
Kas dan kas di bank	215,216	-	215,216	*Cash and cash in banks*
Deposito wajib dan berjangka	-	5,021,531	5,021,531	*Statutory and time deposits*
	215,216	5,021,531	5,236,747	

Kementerian BUMN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi berikut pada halaman 6/1 sampai dengan 6/6 adalah informasi keuangan tambahan PT Jaminan Kredit Indonesia, entitas induk saja, yang menyajikan penyertaan Perusahaan pada Anak Perusahaan berdasarkan metode biaya.

47. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The following supplementary financial information of PT Jaminan Kredit Indonesia, the parent company only, on page 6/1 to page 6/6 which presents the Company's investment in Subsidiary under the cost method.

Kementerian BUMN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK/ PARENT ENTITY

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
ASET			***ASSETS***
Kas dan kas di bank - bersih	159,253	215,216	*Cash and cash in banks - net*
Deposito wajib dan berjangka - bersih	7,009,990	5,021,531	*Statutory and time deposits - net*
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu - bersih	756,138	932,634	*Time deposits for certain purposes - net*
Efek-efek - bersih	14,143,269	11,522,088	*Marketable securities - net*
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	2,728,574	3,473,922	*Guarantee fee receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	395,794	149,649	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang hasil investasi - bersih	214,853	158,639	*Investment income receivables - net*
Biaya dibayar dimuka	61,831	45,992	*Prepaid expenses*
Investasi pada entitas asosiasi	705,121	705,121	*Investment in associates*
Aset tetap - bersih	543,312	439,079	*Fixed assets - net*
Aset takberwujud - bersih	67,862	33,969	*Intangible assets - net*
Penjaminan ulang dibayar dimuka	936,226	663,699	*Prepaid re-guarantee*
Aset pengembalian	791,644	1,023,425	*Reimbursement assets*
Biaya akuisisi tangguhan	91,850	111,613	*Deferred acquisition cost*
Aset pajak tangguhan - bersih	1,874,325	1,782,294	*Deferred tax assets - net*
Aset lain-lain - bersih	4,202	38,858	*Other assets - net*
JUMLAH ASET	30,484,244	26,317,729	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Utang klaim	76,262	52,618	*Claim payables*
Utang penjaminan ulang	579,443	172,784	*Re-guarantee payables*
Akrual dan utang lain-lain	1,422,264	905,252	*Accruals and other payables*
Utang pajak	124,902	439,550	*Taxes payable*
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	15,211,466	12,204,280	*Liabilities for financial guarantee contracts*
Pendapatan komisi ditangguhkan	128,585	79,773	*Deferred commission income*
Liabilitas imbalan kerja	76,299	84,640	*Employee benefits liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	17,619,221	13,938,897	***TOTAL LIABILITIES***

Kementerian BUMN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
EKUITAS			***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			***Equity attributable to equity holders of the parent entity***
Modal saham:			*Share capital:*
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp 1.365.160 per saham (dalam Rupiah penuh)			*Class A Dwiwarna - nominal amount Rp 1,365,160 par value per share (in full Rupiah amount)* -
- Seri B - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham (dalam Rupiah penuh)			*Class B - nominal amount Rp 1,000,000 par value per share (in full Rupiah amount)* -
Modal dasar:			*Authorised capital:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			*Class A Dwiwarna - 1 share* -
- Seri B - 30.000.000 saham			*Class B - 30,000,000 shares* -
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			*Issued and fully paid:*
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			*Class A Dwiwarna - 1 share* -
- Seri B - 10.638.732 saham	10,638,733	10,638,733	*Class B - 10,638,732 shares* -
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	(20,310)	(18,886)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(264,533)	(309,066)	*Unrealised losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax*
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	1,108,173	977,523	*Appropriated retained earnings*
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	1,402,960	1,090,528	*Unappropriated retained earnings*
JUMLAH EKUITAS	12,865,023	12,378,832	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	30,484,244	26,317,729	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Kementerian BUMN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
PENDAPATAN PENJAMINAN			***GUARANTEE INCOME***
Imbal jasa penjaminan bruto	6,738,700	5,641,788	*Gross guarantee fee income*
Premi penjaminan ulang	(717,410)	(828,970)	*Re-guarantee premium*
Jumlah pendapatan penjaminan - bersih	6,021,290	4,812,818	***Total guarantee income - net***
BEBAN PENJAMINAN			***GUARANTEE EXPENSES***
Beban klaim bruto	5,476,738	2,840,164	*Gross claim expenses*
Klaim penjaminan ulang	(594,121)	(356,787)	*Re-guarantee claims*
(Penurunan)/kenaikan cadangan klaim	(541,970)	1,439,352	*(Decrease)/increase in claim reserves*
Pendapatan subrogasi - bersih	(1,016,532)	(783,531)	*Subrogation income - net*
Jumlah beban penjaminan - bersih	3,324,115	3,139,198	***Total guarantee expenses - net***
Pendapatan penjaminan bersih	2,697,175	1,673,620	***Net guarantee income***
Pendapatan komisi	92,651	97,916	*Commission income*
Beban komisi	(31,338)	(89,705)	*Commission expenses*
Pendapatan investasi - bersih	1,107,693	787,384	*Investment income - net*
Beban usaha	(2,127,080)	(1,094,761)	*Operating expenses*
Pendapatan lain-lain - bersih	12,182	67,776	*Other income - net*
Beban pajak final	(139,635)	(95,651)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,611,648	1,346,579	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	(208,688)	(256,051)	*Income tax expenses*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1,402,960	1,090,528	***NET PROFIT FOR THE YEAR***

Kementerian BUMN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja	(1,828)	76	*Remeasurement of post-employment benefits*
Efek pajak terkait	402	(16)	*Related tax effect*
	(1,426)	60	
(Beban)/pendapatan yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(9,473)	5,640	*Unrealised (losses)/gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan/(kerugian) yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	49,974	(141,015)	*Unrealised gains/(losses) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Efek pajak terkait	4,033	3,492	*Related tax effect*
	54,007	(137,523)	
Pendapatan/(beban) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	43,108	(131,823)	*Other comprehensive income/(losses) for the year, net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,446,069	958,705	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR***

Kementerian BUMN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak/ *Remeasurement of employee benefit liabilities, net of tax*	Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak/ *Unrealised losses on marketable securities on fair value through other comprehensive income, net of tax*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah/ *Total*	
				Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*		
Saldo 1 Januari 2022	10,638,733	(18,945)	(176,153)	810,139	1,308,850	12,562,624	***Balance as at 1 January 2022***
Cadangan umum	-	-	-	1,308,850	(1,308,850)	-	*General reserves*
Dividen	-	-	-	(1,141,466)	-	(1,141,466)	*Dividend*
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	1,090,528	1,090,528	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:							*Other comprehensive income:*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	(131,883)	-	-	(131,883)	*Fair value through other comprehensive income*
Penjualan atas surat berharga	-	-	(1,031)	-	-	(1,031)	*Sale of marketable securities*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	-	60	-	-	-	60	*Remeasurement of post-employment benefits*
Saldo 31 Desember 2022	10,638,733	(18,885)	(309,067)	977,523	1,090,528	12,378,832	***Balance as at 31 December 2022***
Cadangan umum	-	-	-	1,090,528	(1,090,528)	-	*General reserves*
Dividen	-	-	-	(959,877)	-	(959,877)	*Dividend*
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	1,402,960	1,402,960	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:							*Other comprehensive income:*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	44,534	-	-	44,534	*Fair value through other comprehensive income*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	-	(1,426)	-	-	-	(1,426)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Saldo 31 Desember 2023	10,638,733	(20,311)	(264,533)	1,108,174	1,402,960	12,865,023	***Balance as at 31 December 2023***

Kementerian BUMN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan imbal jasa penjaminan	10,721,455	6,114,451	*Receipt from guarantee fees*
Pembayaran dari mitra penjaminan ulang	424,619	338,886	*Payment from re-guarantee partners*
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya	1,057,873	773,045	*Receipt from other operating activities*
Pembayaran kepada mitra penjaminan ulang	(583,278)	(605,665)	*Payment to re-guarantee partners*
Pembayaran klaim	(5,453,094)	(2,886,511)	*Payment of claims*
Pembayaran biaya	(531,564)	(403,892)	*Payment of expenses*
Pembayaran kepada karyawan	(525,201)	(475,870)	*Payment to employee*
Pembayaran pajak penghasilan	(750,567)	(679,462)	*Payment of income tax*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	4,360,243	2,174,982	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan hasil investasi	1,051,412	591,622	*Receipt from investment income*
Penempatan investasi	(5,551,356)	(3,382,710)	*Placement of investment*
Penjualan investasi	997,429	972,368	*Sale of investments*
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(86,616)	(208,525)	*Acquisition of fixed assets and intangibles assets*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(3,589,131)	(2,027,245)	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran sewa	(40,202)	-	*Lease payments*
Dividen	(959,877)	(1,141,466)	*Dividend*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(1,000,079)	(1,141,466)	***Net cash flows used in financing activities***
Penurunan kas dan setara kas	(228,967)	(993,729)	*Decrease in cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	5,236,747	6,230,476	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	5,007,780	5,236,747	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

	2023	2022	
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			*Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:*
Kas dan kas di bank	159,253	215,216	*Cash and cash in banks*
Deposito wajib dan berjangka (dibawah tiga bulan)	4,848,527	5,021,531	*Statutory and time deposits (below 3 months)*
	5,007,780	5,236,747	

Kementerian BUMN

Jamkrindo

Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG

2023
Laporan Tahunan
Annual Report

Menavigasi Transformasi untuk Tumbuh Berkelanjutan

Navigating Transformation for Sustainable Growth

Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG

PT Jaminan Kredit Indonesia

Gedung Jamkrindo. Jl. Angkasa B-9 Kavling 6 Kota Baru Bandar - Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610
Telp : (021) 6540335
Email : contact@jamkrindo.co.id